





PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

TAHUN 2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 5
RINGKASAN EKSEKUTIF 6
BAB 1 PENDAHULUAN 10
1.1. Latar Belakang 10
Pandemi Covid-19 10
Refocusing Anggaran 11
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 11
1.2.1. Kedudukan 12
1.2.2. Tugas 12
1.2.3. Fungsi 12
1.3. Struktur Organisasi 12
1.4. Isu Strategis 14
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 17
2.1. Uraian Singkat Renstra 17
2.1.1. Tujuan 17
2.1.2. Sasaran Strategis 17
2.1.3. Arah Kebijakan 18
2.1.4. Strategi 19
2.1.5. Program Teknis 20
2.2. Target 2020 - 2024 Berdasarkan Rencana Strategis 21
2.3. Perjanjian Kinerja 30
2.4. Metode Pengukuran 33
2.5. Target 2021 Disandingkan dengan *Baseline* 38
2.6. Pohon Kinerja 38
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI 41
3.1. Sumber daya Manusia 41
3.2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM 45
3.3. Sarana dan prasarana 45
3.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 46
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA 59
4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 59
4.1.1. Perbandingan kinerja Organisasi 96
4.2. Realisasi Anggaran 100
4.3. Outcome / Kebermanfaatan 109
4.4. EValuasi Kinerja 109
4.5. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 110
4.6. Kendala dan Strategi 110
4.7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun 2020 112
4.8. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Tahun 2020 113
4.9. Penghargaan yang Diterima 117
BAB 5 PENUTUP 120
5.1. Kesimpulan 120
5.2. Rekomendasi 122
LAMPIRAN 123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Target Program, Kegiatan, dan Pendanaan pada Renstra Tahun 2020 - 2024 21
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Bulan Januari 2021 30
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Revisi Bulan Februari 2021 31
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Revisi Bulan Agustus 2021 31
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Revisi Bulan November 2021 32
Tabel 6. Perbandingan Perubahan Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun Anggaran 2021 33
Tabel 7. Metode Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2020 - 2024 34
Tabel 8. Target Capaian Kinerja 2022 disandingkan dengan *baseline* / capaian Tahun Anggaran 2021 38
Tabel 9. Daftar Sarana dan Prasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan T.A. 2021 45
Tabel 10. Hubungan Indikator Kinerja dalam Renstra dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA 48
Tabel 11. *Cascading* Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 60
Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 70
Tabel 13. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 72
Tabel 14. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 84
Tabel 15. Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan 85
Tabel 16. Kinerja Anggaran per Bulan T.A. 2021 100
Tabel 17. Tabel Kinerja Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Preumahan Tahun Anggaran 2021 102
Tabel 18. Kendala dalam Mencapai Target Kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan 110
Tabel 19. Penyebab Kendala dan Strategi / Upaya yang Dilakukan pada Proyek KPBU 111
Tabel 20. Penyebab Kendala dan Strategi / Upaya yang Dilakukan pada Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 112
Tabel 21. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun 2020 113
Tabel 22. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Tahun 2020 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 14
Gambar 2. Pohon Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 38
Gambar 3. *Pipeline* KPBU Bidang Perumahan 75
Gambar 4. Penyaluran BP2BT Tahun Anggaran 2021 89
Gambar 5. Capaian Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 90
Gambar 6. Grafik Kinerja Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan T.A. 2021 (sumber data: e-Monitoring Kementerian PUPR) 100
Gambar 7. Grafik Perbandingan Kinerja Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan T.A. 2021 (sumber data: e-Monitoring Kementerian PUPR) 101
Gambar 8. Sertifikat Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Terbaik 118

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Atas izin-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIN merupakan amanah Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan LAKIN selain merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja, tetapi juga sebagai laporan pertanggungjawaban Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2021, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa input, output, dan outcome yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan direalisasikan.

LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 disusun berdasarkan masukan dari seluruh sub bidang kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Tahun 2021. Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2022
Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan



R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 197008201997031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan disusun bertujuan untuk menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2021.

Pandemi COVID-19

Tahun 2020 *Coronovirus Disease - 2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus korona yang menyerang pernapasan dan disebarkan melalui *droplet*. Covid-19 menyerang seluruh negara termasuk Indonesia menjadi pandemi global. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020 dan menyebabkan banyak perubahan termasuk cara bekerja dan berinteraksi sosial. Perubahan cara bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai kehadiran pegawai, penyelenggaraan aktivitas perkantoran, perjalanan dinas, penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, dan rapat, dan pengaturan penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Refocusing Anggaran

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami 5 (kali) *refocusing* anggaran dan penambahan pagu PHLN sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki pagu awal tahun 2021 sebesar Rp41.000.000.000,00 menjadi pagu akhir sebanyak Rp501.469.015.000,00

Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

1. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.
2. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

Program Teknis

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjalankan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dan

Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Perumahan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan lainnya pada sasaran program tersebut yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja, yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Kualitass Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman adalah Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali. Perjanjian Kinerja Awal pada Bulan Januari 2021, Revisi Pertama pada Bulan Februari 2021, Revisi Kedua pada Bulan Agustus 2021, dan Revisi Ketiga pada Bulan November 2021.

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan yaitu 24,25% dari target sebesar 25%. Capaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dn Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Kualitas dan Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 2% dari target 2%. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 48,83% dari target sebesar 50%.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Pelaksanaa Penyaluran BP2BT yang memiliki target penyaluran kepada 11.865 Rumah Tangga menggunakan Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri *National Affordable Housing Program*. Program BP2BT berhasil disalurkan kepada 11.999 Rumah Tangga sehingga capaian kinerja penyaluran mencapai 101,13% atau sebanyak Rp474.056.000.000,00.

Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

Pada Tahun Anggaran 2021, Subsidi Selisih Bunga tidak melayani penyaluran kepada calon debitur baru namun hanya untuk pembayaran ulang tahun / menggulung atau penerbitan KPR dari tahun sebelumnya. Pagu penyaluran Program SSB adalah sebanyak Rp5.881.806.849.000,00 dan yang berhasil tersalurkan adalah sebanyak Rp2.330.372.675.343,00. Target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 adalah sebanyak 157.500 rumah tangga, karena Program SBUM dan Program Fasilitas LIkuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saling berkaitan, pada pelaksanaannya target penyaluran untuk program SBUM pada Tahun 2021 menjadi 175.000 Rumah Tangga atau sebanyak Rp715.000.000.000 karena adanya penurunan bunga kredit dari perbankan sehingga target penyaluran bertambah. Pada Tahun 2021, Program SBUM berhasil menyalurkan kepada 176.705 Rumah Tangga sejumlah Rp714.902.000.000,00 atau sebesar 101,63% dari target penyaluran.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 berdasarkan *e-monitoring* PUPR adalah sebesar Rp499.120.086.000,00 atau sekitar 99,53% dari pagu akhir yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp501.469.015.000,00.

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan masing - masing program yang dilaksanakan adalah 99,53% capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman atau yang terkait dengan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan; 99,07% capaian Program Dukungan Operasionalisasi Kantor Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan 99,41% capaian Program Dukungan Manajemen: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kendala, Permasalahan, Rekomendasi / TIndak Lanjut

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam mencapai target kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Kendala pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan yaitu Belum adanya KPBU Perumahan yang siap ditransaksikan sehingga jenis indikator “Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan” tidak dapat terpenuhi.
2. Kendapa pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasililtasi Pembiayaan Perumahan yaitu Kinerja penyaluran SSB Pembayaran KPR Tahun Sebelumnya dan penyaluran yang dilakukan oleh Tapera yang tidak maksimal.

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dan isu strategis yang dihadapi.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada unit kerja yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung untuk mencapai *outcome* yang tertera pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) 2020 – 2024 dan Rencana Strategis DIrektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 diukur pelaksanaannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtasaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban dan sebagai upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dilaporkan menggunakan Laporan Kinerja oleh masing – masing kementerian atau lembaga (K/L) yang telah diatur diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara rinci diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2021.

Program dan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 dibiayai melalui APBN rupiah murni dan pinjaman luar negeri PHLN NAHP (BA 033). Pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja Tahun Anggaran 2021 dengan dilakukannya *refocusing* atau pengaturan kembali anggaran dan beberapa kali perubahan DIPA. *Refocusing* anggaran dilakukan terhadap dana rupiah murni, tidak dilakukan kepada dana pinjaman luar negeri PHLN NAHP. Terhadap dana luar negeri PHLN NAHP disediakan bertahap sesuai dengan rencana penyerapan. Selain itu juga Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Pelaksanaan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Perumahan (BA.999.087) dari Kementerian Keuangan.

PANDEMI COVID-19

Tahun 2020 *Coronovirus Disease – 2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus korona yang menyerang pernapasan dan disebarkan melalui *droplet*. Covid-19 menyerang seluruh negara termasuk Indonesia menjadi pandemi global. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada

bulan Maret 2020 dan menyebabkan banyak perubahan termasuk cara bekerja dan berinteraksi sosial. Perubahan cara bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai kehadiran pegawai, penyelenggaraan aktivitas perkantoran, perjalanan dinas, penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, dan rapat, dan pengaturan penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

REFOCUSING ANGGARAN

Dalam rangka mendukung penanggulangan pandemik Covid-19 Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalami beberapa kali *refocusing* anggaran pada tahun 2021. *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian / Lembaga TA 2021 tahap 1 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebagai langkah strategis untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Refocusing tahap 2 dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 hal Penghematan Belanja Kementerian / Lembaga TA 2021 tanggal 18 Mei 2021.Penghematan dilakukan dalam kaitan dengan COVID-19 juga dalam rangka menjaga defisit APBN TA 2021 agar tercipta APBN yang *prudent* dan *sustainable.*

Refocusing 3 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 dalam rangka mempertimbangkan perkembangan terkini kasus Covid-19, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta penanganan bencana.

Refocusing tahap 4 dilakukan berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.02.01-Mn/1342 tanggal 2 Agustus 2021 hal *Refocusing* Belanja K/L Kementerian PUPR TA 2021 Tahap IV.

1.2. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai kedudukan dan menjalankan tugas serta fungsi, sebagai berikut:

1.2.1. KEDUDUKAN

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berada di bawah Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

1.2.2. TUGAS

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

1.2.3. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 570, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan;
f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

1. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

   Tugas Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi yaitu melaksanakan:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan;

b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi;
c. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaaan;
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
f. serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

2. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

   Tugas Subdirektorat Kerja Sama Investasi yaitu melaksanakan:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksansanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha;
   b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemerbian bimbingan teknis dan supervisi; serta
   c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.

3. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

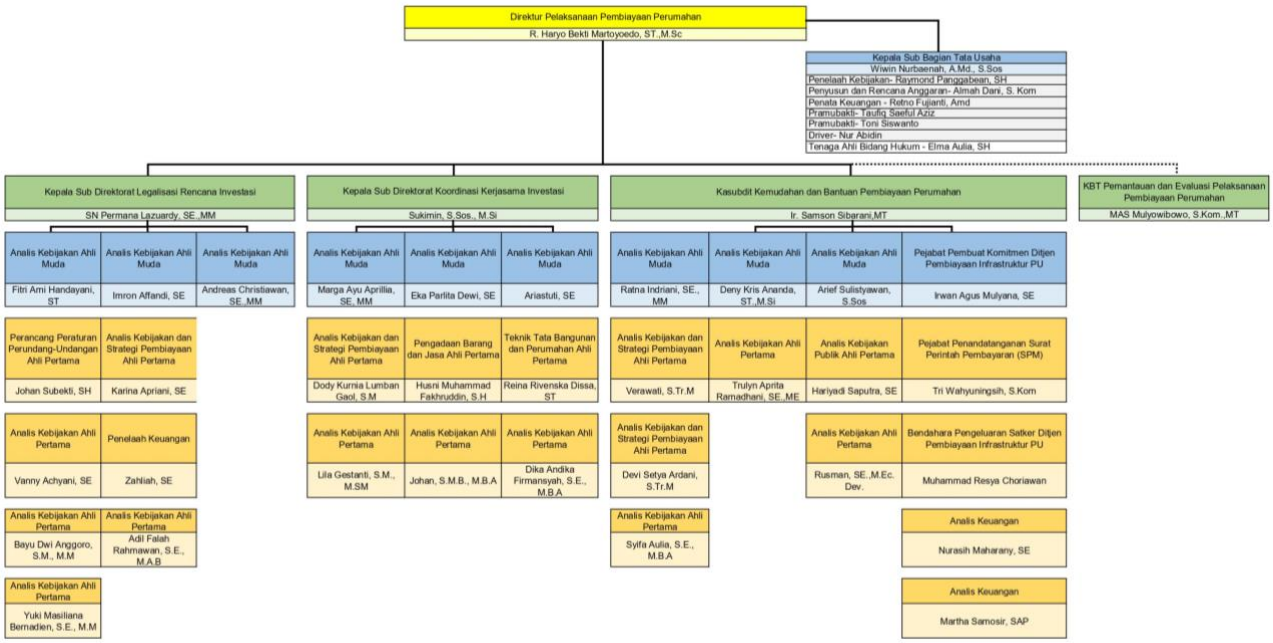
   Tugas Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yaitu melaksanakan:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan;
   b. pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi;
   c. penyiapan

4. Subbagian Tata Usaha

   Tugas Subbagian Tata Usaha adalah melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi adalah 81 pegawai yang terdiri dari 39 PNS dan 42 Non PNS. Bagan struktur organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isu strategis pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:

a. Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
b. Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
c. Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
d. Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;
e. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
f. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
g. Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
h. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
i. Ketersediaan lahan yang *clear and clean* untuk proyek KPBU.

Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:

a. Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;
b. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
c. Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR;
d. Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
e. Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka Panjang;
g. *Supply stock* rumah bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan MBR;
h. Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini merupakan penjelasan mengenai Pagu, Rencana Anggaran, serta Capaian Realisasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

2.1.1. TUJUAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2020 – 2024 yang terdiri dari:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industry dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko / kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan sistem logistic nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.

Tujuan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Percepatan Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif;
2. Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

Adapun tujuan bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan Tahun 2020 – 2024 adalah untuk meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga-lembaga pembiayaan perumahan yang didukung sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.

2.1.2. SASARAN STRATEGIS

5 (lima) Sasaran Strategi Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional.
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak.

4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Professional.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

a. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.
b. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatknya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

2.1.3. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat – pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visum PUPR 2020 – 2024;
5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
8. Membentuk unit pelaksana teknis / memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai *paying agent* serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel;
10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*);

13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

2.1.4. STRATEGI

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan RPJMN 2020 – 2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dana man yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*). Strateginya adalah sebagai berikut:

1. Sisi Permintaan (*Demand Side*)
    a. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJ Ketenagakerjaan;
    b. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
    c. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
    d. Pengembangan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas aksses pembiayaan perumahan.
2. Sisi Pasokan (*Supply Side*);
    a. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dengan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
    b. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
    c. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
    d. Pemanfaatan tanah milik negara / BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
    e. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
3. *Enabling Environment*;
    a. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
    b. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;

c. Peningkatan kolaborasi antara pemeritah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
d. Pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
e. Pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan Nasional dan daerah.

Arah kebijakan dan strategi dalam rabgka pemenuhan perumahan dan pernukima layak, aman, dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

2.1.5. PROGRAM TEKNIS

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjalankan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu **Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya** dan **Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman**.

Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Perumahan adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan.** Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan lainnya pada sasaran program tersebut yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja, yaitu **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Kualitass Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.**

Sedangkan, sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman adalah **Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan.**

2.2. TARGET 2020 – 2024 BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 - 2024 berdasarkan Matriks Program, kegiatan, dan Pendanaan yang terdapat Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks Target Program, Kegiatan, dan Pendanaan pada Renstra Tahun 2020 - 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	2,001,581	383,920	382,472	394,183	4,706,394
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN									208,666	333,429	314,797	326,456	335,434	1,518,782
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)								118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44							
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)								118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12							
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	%	2	2	2	2	2	2						
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1	**Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**	%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yag efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	50,244	170,000	172,870	180,158	183,372	756,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	25	25	25	25	25	25	9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan									9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	600	500	750	1,000	1,000	3,850
	1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	300	500	750	1,000	1,000	3,550
	2 Jumlah Penyusunan identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	300

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
3	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	1,750	5,750	30,000	35,000	36,500	109,000
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	1	1	1	7	875	5,750	15,000	17,500	18,250	57,375
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	1	4	875	0	15,000	17,500	18,250	51,625
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
5	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	4,000	4,096	21,000	25,000	26,307	80,403
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	3	2	2	2	2	11	3,500	2,096	17,000	20,000	20,307	62,903

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	500	2,000	4,000	5,000	6,000	17,500
6		NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
	1	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
8		Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	150	300	300	300	168	1,218
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	150	300	300	300	168	1,218
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau										**1,335,572**	**1,668,152**	**69,123**	**56,015**	**58,750**	**3,187,612**
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:															
1		**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni**	**%**	**56,86**	**57,46**	**58,02**	**58,71**	**59,48**	**59,48**	**1,335,572**	**1,668,152**	**69,123**	**56,015**	**58,750**	**3,187,612**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		%	100	100	100	100	100	100						
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :														
1	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612
KEGIATAN 4: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	50	50	50	50	50	50	1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	50	50	50	50	50	50	27,840	27,840	28,675	29,535	30,422	144,312
KOORDINATOR : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	5	5	5	23	3,250	3,250	7,100	7,760	8,486	29,846

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	2,500	1,500	4,400	4,840	5,324	18,564
	2	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	2	8	750	1,000	2,200	2,420	2,662	9,032
	3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	0	750	500	500	500	2,250
2		NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782
3		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	2	2	12	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	2	2	12	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
4		Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	0	0	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	-	-	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343
5		Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000
		SSB (BA.999.07)	Rumah Tangga	175,000	100,000	0	0	0	275,000	4,657,982	5,969,486	4,930,376	4,865,899	4,804,866	25,228,609
		SBUM (BA.999.07)	Rumah Tangga	263,000	157,500	200,000	220,000	220,000	1,060,500	1,064,000	945,000	1,200,000	1,320,000	1,320,000	5,849,000
6		Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	0	0	3	4,500	5,000	5,000	0	0	14,500
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	0	0	3	4,500	5,000	5,000			14,500
7		Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		SMF (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	8,460	10,000	10,000	10,000	11,540	50,000						
		Tapera (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	500,000						

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali.

Perjanjian Kinerja pertama dilakukan pada bulan Januari 2021 dengan target kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Bulan Januari 2021

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2020	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	*98,93%*	*100%*
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	*55,50%*	*63,35 %*
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	100%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%
Kegiatan:		
1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan 2. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp41.000.000.000,00 Rp6.596.806.849.000,00	

Pada Perjanjian Kinerja pertama, pagu anggaran bagi Kegiatan Penyelenggaraan dan pembianaan Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak Rp41.000.000.000,00 dan Kegiatan Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07) Rp6.596.806.849.000,00.

Revisi pertama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 dilakukan pada Bulan Februari 2021 setelah terjadinya perubahan DIPA pada Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembianaan Pembiayaan

Perumahan menjadi Rp36.000.000.000,00 karena *refocusing* anggaran. Sehingga Perjanjian Kinerja revisi pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Revisi Bulan Februari 2021

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2020	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	*98,93%*	*100%*
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	*55,50%*	*63,35 %*
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	100%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%
Kegiatan:		
1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan 2. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp36.000.360.000,00 Rp6.596.806.849.000,00	

Revisi kedua Perjanjian Kinerja dilakukan pada bulan Agustus 2021 sebagai bentuk perbaikan terhadap kegiatan yang tercantum di Perjanjian Kinerja. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan diperbaiki menjadi Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan dan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan. Sehingga Perjanjian Kinerja tersebut menjadi:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Revisi Bulan Agustus 2021

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2020	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	*98,93%*	*100%*
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2020	Target
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%
Kegiatan:		
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan 2. Penyelenggaran Pembiayaan Infrastruktur Perumahan 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp58.371.627.000,00 Rp7.775.628.000,00 Rp6.596.806.849.000,00	

Revisi ketiga Perjanjian Kinerja dilakukan pada Bulan November 2021 karena adanya penambahan pagu PHLN untuk Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), sehingga perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Pelaksananaan Pembiayaan Perumahan menjadi:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Revisi Bulan November 2021

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2020	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	*98,93%*	*100%*
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%
Kegiatan:		
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan 2. Penyelenggaran Pembiayaan Infrastruktur Perumahan 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp492.971.627.000,00 Rp7.611.308.000,00 Rp659.806.849.000,00	

Perbandingan perubahan Revisi Perjanjian Kinerja DIrektorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Perubahan Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun Anggaran 2021

	PK Awal	PK Revisi 1	PK Revisi 2	PK Revisi 3
Target	3 (tiga) target Sasaran Kegiatan: 1. SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 2. SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 3. SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	*Tetap*	Target Sasaran Kegiatan berubah menjadi 2 (dua) berdasarkan Nota Dinas Kepala Sub DIrektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Nomor 50/ND/Pk.2/2021 hal Penyampaian Perjanjian Kinerja TA 2021 dengan Sasaran Kegiatan menjadi sebagai berikut: 1. SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 2. SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	*Tetap sejak PK Revisi 2*
Kegiatan	1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan: Ro41.000.000.000 2. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07): Rp6.596.806.849.000	1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan: Rp36.000.630.000 2. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07): Rp6.596.806.849.000	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan: Rp58.371.627.000 2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan: Rp7.775.628.000 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07): Rp6.596.806.849.000	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan: Rp492.971.627.000 2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan: Rp7.611.308.000 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07): Rp6.596.806.849.000

2.4. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 - 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 7. Metode Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Komposit Indikator Kinerja	Metode Perhitungan	Bobot
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
SK 01	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantorat Direktorat	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantorat Direktorat	100%
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	50,00%
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50,00%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman						
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target	30,00%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Komposit Indikator Kinerja	Metode Perhitungan	Bobot
				Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target	50,00%
				Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	20,00%

Bobot perhitungan Indikator Rincian Output berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Komposit Indikator Kinerja	Indikator Rincian Output	Bobot
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investassi Pembiayaan Perumahan	15,00%
					Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	20,00%
					Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	30,00%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Komposit Indikator Kinerja	Indikator Rincian Output	Bobot
					Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	20,00%
					Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	15,00%
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	35,00%
					Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	
					Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	35,00%
					Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	30,00%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman						
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)	100%
					Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (Tapera)	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Komposit Indikator Kinerja	Indikator Rincian Output	Bobot
				Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perymahan Berbasis Tabungan	40,00%
					Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SSB/SBK)	60,00%
					Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	
				Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	50,00%
					Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatangan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	
					Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	
					Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	20,00%
					Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	15,00%

2.5. TARGET 2021 DISANDINGKAN DENGAN *BASELINE*

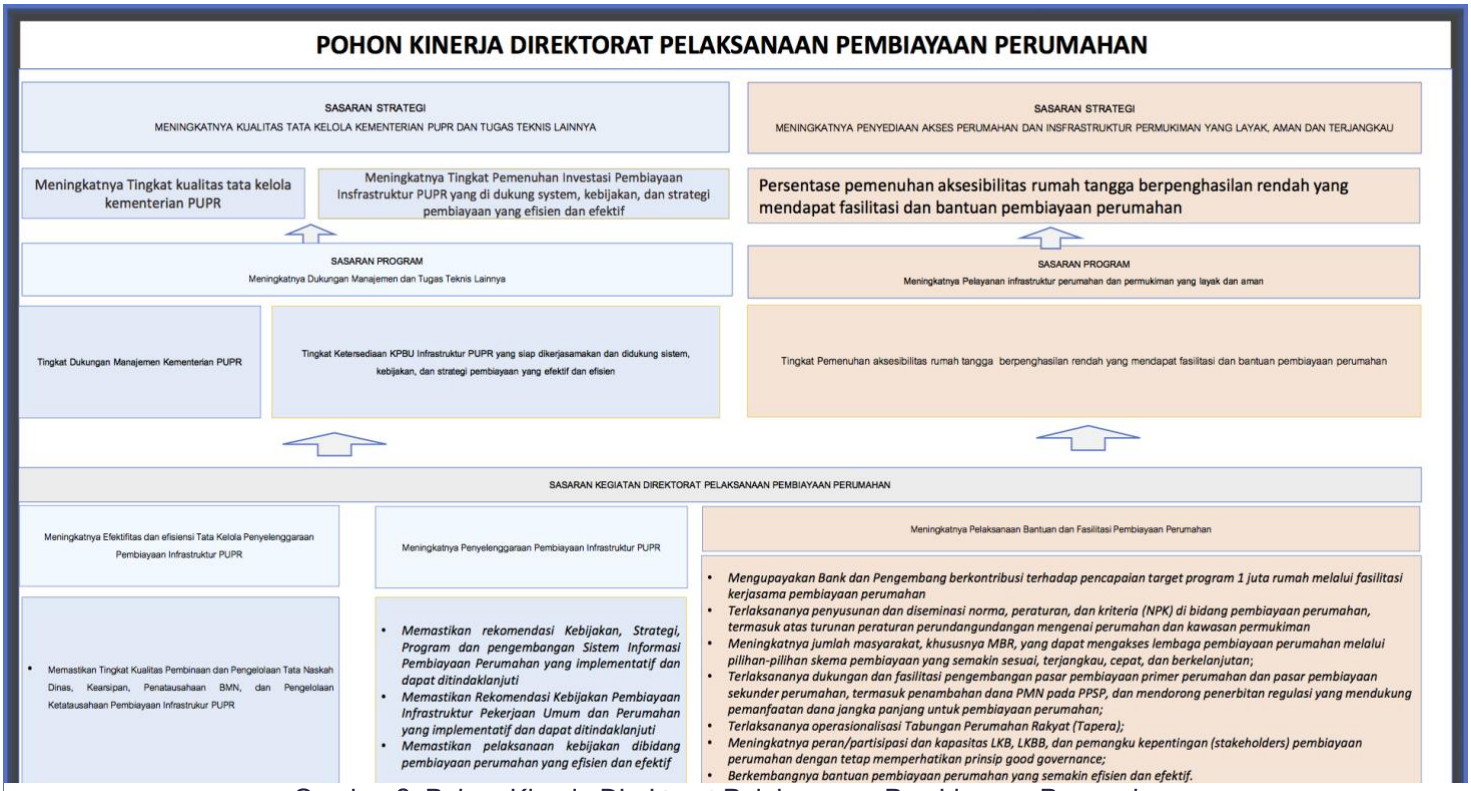
Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan *baseline* atau dengan dasar capaian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Target Capaian Kinerja 2021 disandingkan dengan *baseline* / capaian Tahun Anggaran 2021

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Baseline 2020	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	*98,93%*	*100%*
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%

2.6. POHON KINERJA

Hubungan antaran Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Sasaran Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Sasaran Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Strategi untuk memastikan bahwa Sasaran Kinerja tercapai adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Pohon Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Pohon Kinerja di atas, Strategi untuk dapat mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PUP adalah dengan Memastikan Tingak Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsiapn, Penatausahaan BMN, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur PUPR.

Strategi untuk dapat mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

1. Memastikan rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program, dan pengembangan Sistem Informal Pembiayaan Perumahan yang implementatif dan dapat ditindaklanjuti;
2. Memastikan Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Implementatif dan dapat ditindaklanjuti;
3. Memastikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan yang efisien dan efektif.

Strategi untuk dapat mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan bank dan pengembang berkontribusi terhadap pencapaian target program 1 juta rumah melalui fasilitasi kerja sama pembiayaan perumahan;
2. Terlaksananya penyusunan dan diseminasi norma, peraturan, dan kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
3. Meningkatnya jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses Lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan – pilihan skema pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat, dan berkelanjutan;
4. Terlaksananya dukungan dan fasilitasi pengembangan pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PPSP, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan;
5. Terlaksananya operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
6. Meningkatnya peran / partisipasi dan kapasitas LKB, LKBB, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembiayaan perumahan dengan tetap memperhatikan prinsip good governance;
7. Berkembangnya bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif.

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

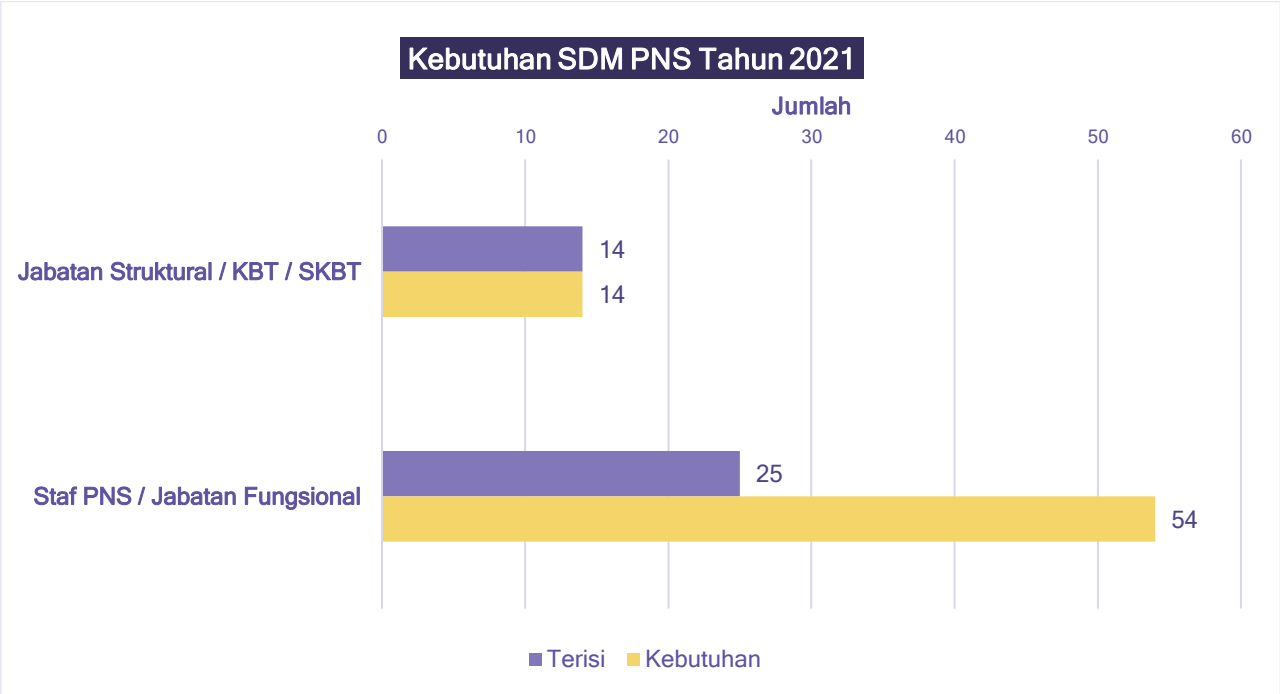
Bab ini menguraikan pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bab ini juga menjelaskan potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

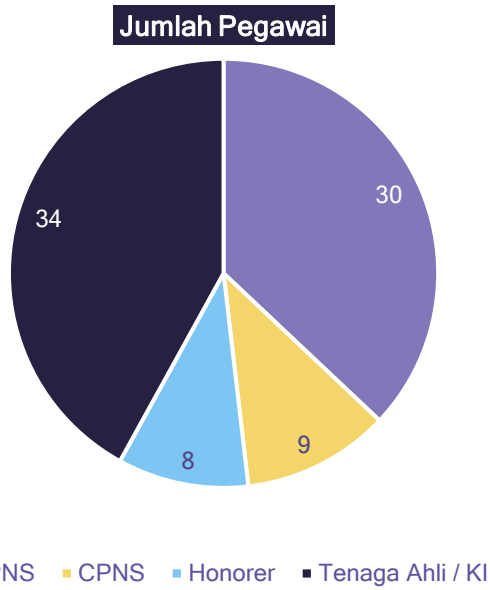
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

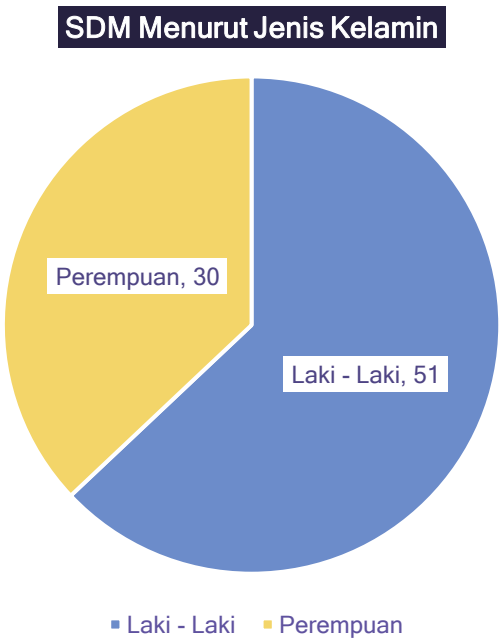
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jumlah SDM turut mempengaruhi tercapainya kinerja yang telah direncanakan. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 81 orang dengan komposisi 30 orang PNS, 9 orang CPNS, 8 orang Honorer, 34 orang Tenaga Ahli / Konsultan Individual.

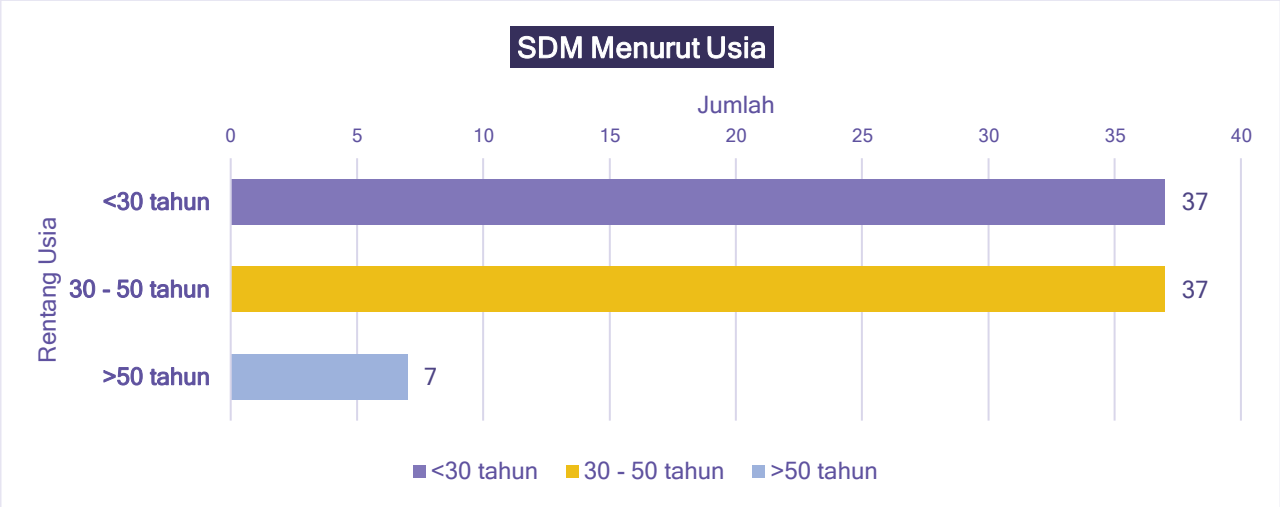
Berdasarkan Nota Dinas No.25/ND/Pp/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal penyampaian hasil pembahasan pemetaan pegawai di lingkungan DJPI, kebutuhan staf PNS di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebanyak 68 orang PNS. Jumlah PNS dan CPNS saat ini adalah sebanyak 39 orang sehingga masih membutuhkan 29 PNS di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; jumlah tersebut saat ini dibantu oleh Non-PNS Substansi dan Pendukung.

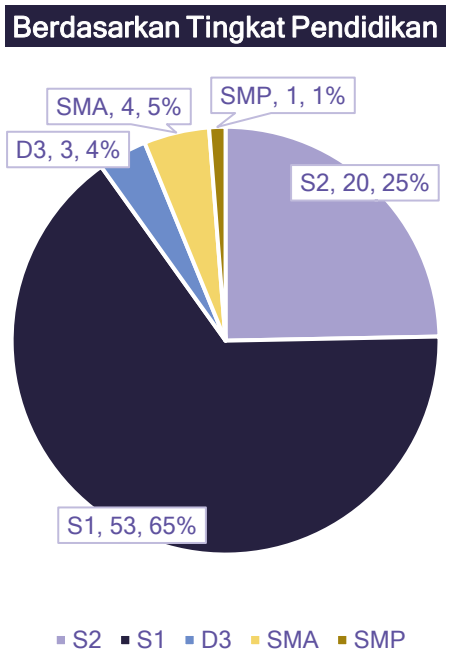




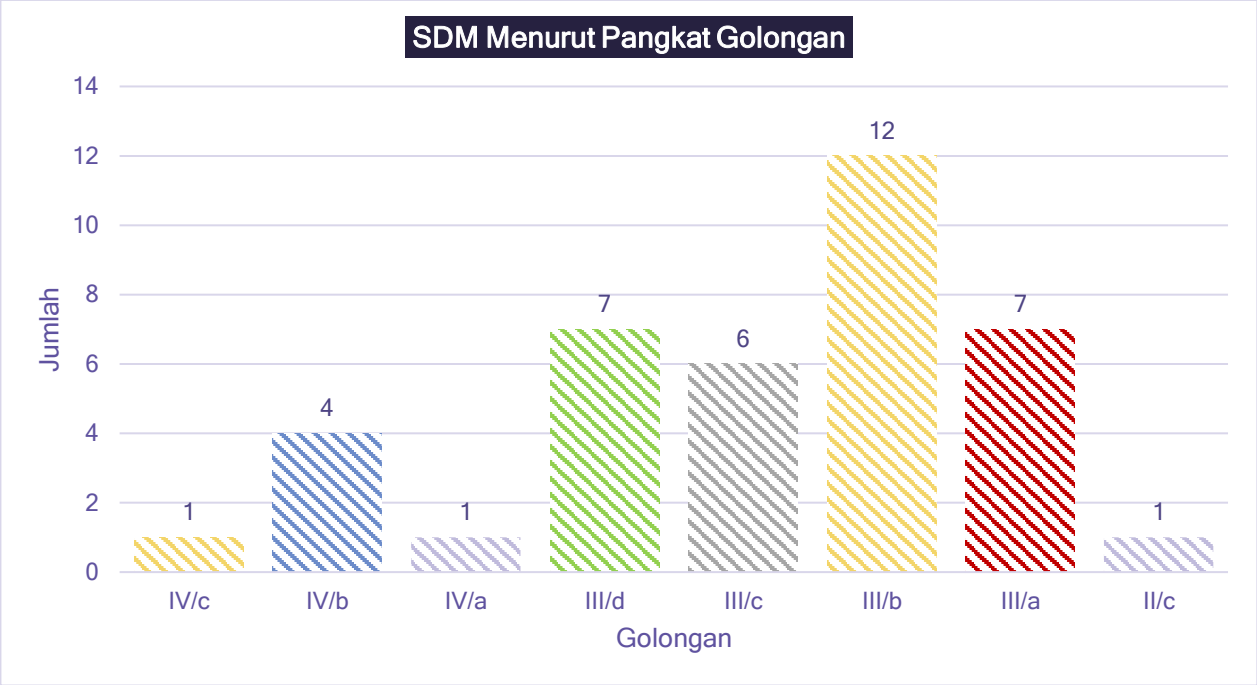
Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas 30 orang perempuan dan 51 orang laki-laki dengan rentang usia <30 tahun sebanyak 37 orang, 30 – 50 tahun sebanyak 37 orang, dan >50 tahun sebanyak 7 orang.



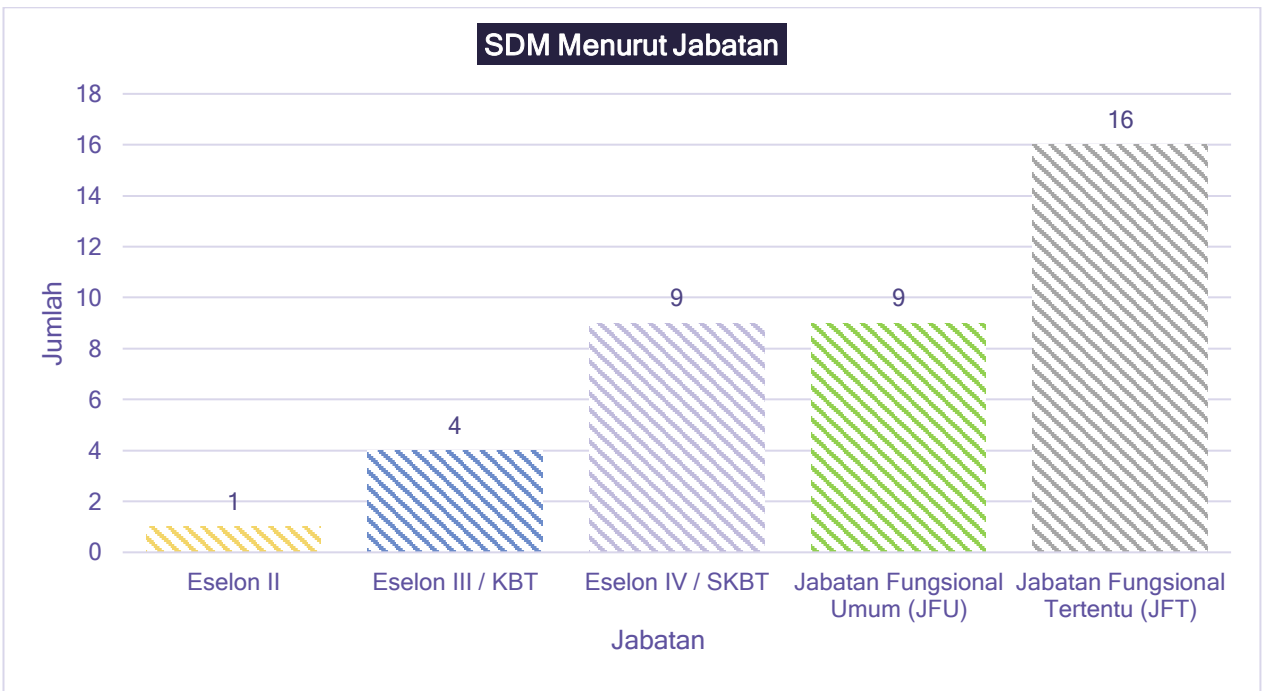




Tingkat pendidikan pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari lulusan S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 53 orang, D3 sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 4 orang dan SMP sebanyak 1 orang, mendukung tingkat profesionalisme dalam melakukan penelaahan kasus, pengelolaan data dan informasi yang menjadi kekuatan dalam perencanaan program dan kegiatan.



Komposisi golongan ASN di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak 1 orang memiliki golongan IV/c, 4 orang memiliki golongan IV/b, 1 orang dengan golongan IV/a, 7 orang dengan golongan III/d, 6 orang dengan golongan III/c, 12 orang dengan golongan III/b, 7 orang memiliki golongan III/a dan 1 orang dengan golongan II/c menggambarkan kecukupan pengalaman dalam merencanakan, menyusun dan menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dan program.



Komposisi SDM Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menurut jabatan adalah terdiri dari 1 orang Eselon II, 3 orang Eselon III, 1 orang Eselon IV, 13 orang memiliki Jabatan Fungsional Umum, dan 9 orang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu. Jenis Jabatan Fungsional pegawai di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
2. Arsiparis;

3. Perencana;
4. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Analis Kebijakan.

3.2. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SDM

Pada tahun 2021, sebanyak 20 ASN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi *Certified Public Private Partnership Professional* (CP3P) *Foundation*;
2. Sertifikasi *Certified Public Private Partnership Profession* (CP3P) *Preparation*;
3. Sertifikasi *Certified Public Private Partnership Profession* (CP3P) *Execution*;
4. FAST *Financial Model Training*;
5. Pelatihan Manajemen Risiko;
6. Bimbingan teknis Tim Penilai Instansi (TPI) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (*Distance Learning*);
7. Pelatihan *Public Private Partnership*.

3.3. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Apabila sarana dan prasarana tidak tersedia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan. Data berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Direktorat Pembiayaan Perumahan selama tahun 2021.

Tabel 9. Daftar Sarana dan Prasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan T.A. 2021

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	
	Jumlah	Satuan
Printer	19	unit
Scanner	1	unit
Komputer PC	28	unit
Meja dan Kursi Kerja	43	pasang
Webcamera	2	buah
Penghancur Kertas	6	unit
Filing Cabinet	16	buah
Filing Cabinet Kaca	15	buah
Laptop	3	unit
Meja Rapat	1	buah
Kursi Rapat	10	buah
Proyektor	1	unit

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	
	Jumlah	Satuan
Layar Proyektor	1	unit
Lemari Buku di Ruang Rapat	2	buah
Meja Tamu Besar di Ruang Kerja Direktur	1	buah
Kursi Tamu di Ruang Kerja Direktur	4	buah
Meja Tamu Kecil di Ruang Kerja Direktur dan Kasubdit	4	buah
Sofa di Ruang Kerja Direktur dan Kasubdit	8	buah
Lemari Buku di Ruang kerja Direktur	1	buah

3.4. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan dan BA.999.07 untuk Pengelolaan Subsidi Perumahan. DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 Penerbitan DIPA pertama pada tanggal 23 November 2020 sebanyak Rp41.000.000.000,00 dan sebanyak Rp10.000.000.000,00 merupakan dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diperuntukan untuk Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Pagu anggaran Dit. PPP mengalami perubahan pagu sebanyak 5 (lima) kali:

1) Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: KU.0212-Ps/92 tanggal 22 Februari 2021 hal Permintaan Data Rencana Pelaksanaan Anggaran, sehingga pagu Dit. PPP berkurang sebanyak Rp 4.999.370.000,00 menjadi **Rp36.000.630.000,00, yang terdiri dari rupiah murni Rp26.000.630.000,00 dan PHLN Rp.10.000.000.000,00**
2) Tanggal 15 April 2021, pada Revisi-02 DIPA BA.033, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami penambahan anggaran yang berasal dari dana PHLN, sehingga pagu yang dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp71.122.257.000,00 yang terdiri dari rupiah murni Rp26.000.630.000,00 dan** PHLN menjadi sebanyak Rp45.121.627.000,00.
3) Terjadi refocusing anggaran berikutnya pada DIPA Revisi-04 tanggal 28 Juli 2021 dikarenakan *Refocusing* dan Realokasi Belanja Tahap III Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: KU.0201-Ps/429 yang merupakan arahan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021, sehingga Dit. PPP melakukan pemotongan sebesar 19,17% dilakukan pada sisa pagu perjalanan dinas dan sisa pagu lelang setiap unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebesar Rp1.136.673.000,00, sehingga pagu anggaran Direktorat

Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjadi **Rp69.985.584.000,00** yaitu rupiah murni Rp24.863.957,00 dan PHLN Rp45.121.627.000,00.

4) Menindaklanjuti Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.02.01-Mn/1342 tanggal 2 Agustus 2021 hal *Refocusing* Belanja K/L Kementerian PUPR Tahap IV, maka Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan *refocusing* anggaran sebesar 6% atau sebanyak Rp2.952.249.000,00 dalam rangka mendukung Program PEN Bidang Kesehatan. Sehingga berdsasarkan DIPA Revisi-05 tanggal 20 Agustus 2021, pagu Dit. PPP menjadi **Rp67.033.335.000,00 yaitu** yaitu rupiah murni Rp21.911.708,00 dan PHLN Rp45.121.627.000,00.
5) Berdasarkan DIPA Revisi-08 tanggal 2 November 2021 terjadi penambahan PHLN yang semua sebesar Rp45.121.627.000,00 dengan target volume 1.000 Rumah Tangga berubah menjadi Rp479.721.627.000,00 dengan target volume 11.865 Rumah Tangga, sehingga pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar **Rp501.469.015.000,00**.

Perbedaan besaran anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Perjanjian Kinerja dengan DIPA dikarenakan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja, tetapi secara anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dikelola oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

BA.999.07 merupakan DIPA Pengelolaan Subsidi Perumahan untuk Program Subsidi Bunga Kredit dan Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar dengan total pagu sebesar **Rp6.596.806.849.000,00**. Target penyaluran SBUM pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 175.000 Rumah Tangga, sedangkan penyaluran Subsidi Bunga Kredit pada Tahun Anggaran 2021 hanya merupakan SBK Menggulung atau pembyaran dari tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berbeda dengan Indikator Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang tertera di dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR. Indikator Kinerja yang tertera di dalam Rencana Strategis berorientasi *outcome* sedangkan pada DIPA berorientasi *Output Kegiatan*. Sehingga hubungan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hubungan Indikator Kinerja dalam Renstra dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
Dukungan Manajemen	(SS2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Kebijakan Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan
							Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan
							Pra-Studi Kelayakan	Penyusunan Kajian Awal Pra

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
							Investasi Pembiayaan Perumahan	Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan
							Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
						Kemitraan	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan
								Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan
						Layanan Monitorinjg	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
						dan Evaluasi Internal	Investasi Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan
							Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
	(SS1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik	Layanan Perkantoran	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantorat Direktorat PPP

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
					Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Koordinasi	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
			Pembiayaan Perumahan					Perumahan (Tapera)
						Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
							Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SSB)

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)
						Kebijakan Saranan dan Prasarana	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiyaan Perumahan
								Jumlah Penyusunan dan Penyiapan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
								Penandatanagan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
								Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
								Pembiayaan Perumahan
						Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistm Pembiayaan Perumahan
						Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantluan Uang Muka	
							Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Sasaran Program / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output [DIPA]	Rincian Ouput [DIPA]	Indikator Rincian Output
							Berbasis Tabungan	
						Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2021.

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan kegiatan yang akuntabel memanfaatkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah. Akuntabilitas diharapkan dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dilakukan berdasarkan Metode Perhitungan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Rencana Strategis dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Pada Perjanjian Kinerja, target kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan merupakan Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 2021 sebesar 25%;
2. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan target capaian pada Tahun 2021 sebesar 50%.

Cascading atau turunan antara Program, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output, Indikator Rincian Output, dan Komponen, Paket Kegiatan, dan Target dalam Renstra dan dalam DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 11. *Cascading* Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
Dukungan Manajemen	(SS2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Kebijakan Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	Rekom. Kebijakan
							Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1	1	Rekom. Kebijakan
							Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	2	1	Rekom. Kebijakan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan		1	Rekom. Kebijakan
							Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan	1	1	Rekom. Kebijakan
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	1	1	NSPK

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
						Kemitraan	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	2	2	Dokumen
									Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan			
								Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	2	1	Kesepakatan
						Layanan Monitorinjg dan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan	1	1	Laporan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
						Evaluasi Internal	Pembiayaan Perumahan	Investasi Pembiayaan Perumahan	KPBU Bidang Perumahan			
							Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	Laporan
	(SS1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan	Layanan Perkantoran	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantorat Direktorat PPP	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1	1	Layanan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
					Umum dan Perumahan							
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Koordinasi	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF)	1	10,000	Rumah Tangga
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (Tapera)	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)		75,000	Rumah Tangga

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
						Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	39,684	11,865	Rumah Tangga
							Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SSB)	SSB (BA.999.07)	100,000	859,582	Rumah Tangga
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	SBUM (BA.999.07)	157,500	175,000	Rumah Tangga
						Kebijakan Saranan dan Prasarana	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan	2	1	Rekom. Kebijakan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
								Sistem Pembiyaan Perumahan	Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR			
									Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan		1	Rekom. Kebijakan
									Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		1	Layanan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
								Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanagan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyiapan Kesepakatan Bersama dan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	Rekom. Kebijakan
								Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	1	1	Rekom. Kebijakan
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	1	1	NSPK

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
						Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistm Pembiayaan Perumahan	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	2	2	Laporan
									Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
						Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantluan Uang Muka		Dana Operasional Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Danan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		1	Layanan
							Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		1	Layanan
						Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT		1	Pendam-pingan

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan yaitu 24,25% dari target sebesar 25%. Capaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dn Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Kualitas dan Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 2% dari target 2%. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 48,83% dari target sebesar 50%.

Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian
Program Dukungan Manajamen						
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	**23,25%**
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	**100%**
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan	50%	**48,38%**

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian
dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	dan Permukiman yang Layak dan Aman	Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pembiayaan Perumahan	Bantuan Pembiayaan Perumahan		

Berikut adalah uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 pada Program Dukungan Manajemen beserta indikator yang tertera di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja:

1) **Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

   Sasaran kegiatan ini memiiki Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 25%. Berdasarkan Rencana Strategis, terdapat 2 (dua) jenis indikator yaitu:

   ①. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 50% dan memiliki Rincian Output sebagai berikut:
      i. Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 15%;
      ii. Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 20%;
      iii. Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 30%;
      iv. Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 20%;
      v. NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 15%.

   ②. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot perhitungan 50% dan memiliki output kegiatan kegiatan sebagai berikut:
      i. Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan dengan bobot perhitungan 35%;
      ii. Pemantauan dan Eveluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dengan bobot perhitungan 35%;
      iii. Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dengan bobot perhitungan 30%.

Capaian masing – masing output kegiatan dan paket kegiatan dari masing – masing output adalah sebegai berikut:

Tabel 13. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Program Dukungan Manajemen							
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraaan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan							
Target			Capaian				
25,00%			23,25%				
No	Jenis Indikator Komposit IKK / KRO / RO / Indikator Rincian Output / Paket Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan		**%**	**100%**	**108%**	**100%**	**50%**	**50%**
Kebijakan Sarana dan Prasarana							
A	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	15%	15%
	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
B	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	20%	20%
	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
C	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	2	100%	30%	30%
	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
2	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
D	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	20%	20%
	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria							
E	NSPK Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	15%	15%

	Jumlah Perumusah NSPK Pembiayaan Perumahan						
1	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	NSPK	1	1	100%	100%	100%
Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan		**%**	**100%**	**86%**	**86%**	**50%**	**43%**
Kemitraan							
F	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepa-katan	1	0	60%	35%	21%
	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan						
1	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	Dokumen	1	1	100%	30%	30%
2	Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	Dokumen	1	1	100%	30%	30%
	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan						
3	Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	Kesepa-katan	1	0	0%	40%	0%
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							
G	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	35%	35%
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan						
1	Pemantuan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	Laporan	1	1	100%	100%	100%
H	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	30%	30%
	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan						
1	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	100%	100%

A. Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan satu Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output yaitu Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berhasil menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yaitu berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL), Rencana Kerja, dan rencana lainnya yang terkait dengan penyusunan Program dan Anggaran di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Sehingga capaian Rincian Ouput tersebut adalah 100% atau sebesar 15% konversi bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output, serta tidak terdapat deviasi antara target dan realisasi.

Output kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan merupakan kegiatan untuk menjabarkan program, kegiatan dan kinerja anggaran DIT. PPP pada Tahun 2021 sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tertuang di dalam

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan di dalam Renja TA. 2021 (T-1).

Terdapat berbagai isu yang menjadi tantangan penyelesaian di Tahun 2022 dan berupaya diselesaikan dengan kebijakan dan strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang tertuang di dalam struktur Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2022.

Selain penyusunan program dan anggaran tahunan, salah satu strategi yang menjadi *concern* dalam pemecahan isu dan upaya pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang perumahan baik melalui KPBU maupun kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan,akan dikembangkan *housing ecosystem* yang dilengkapi dengan rencana kerja masing- masing subsistem di dalam *housing ecosystem* tersebut. Diharapkan dengan adanya sinergi dari *Key Stakeholders* ini dapat mewujudkan suatu ekosistem perumahan yang efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan di dalam RPJMN (5 tahunan) dan Renja K/L (tahunan).

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan pada kegiatan ini:

1. Penyusunan program dan anggaran Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan khususnya di bidang KPBU Perumahan perlu memperhatikan kesesuaian dengan pipeline KPBU Perumahan, agar target penyiapan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Pada tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga perlu menggunakan kesempatan ini untuk mendorong percepatan pencapaian target penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan sesuai dengan renstra DJPI.
3. Melakukan *midterm review* Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 – 2024.

Kegiatan Penyusunan program dan anggaran merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga pada kedua Program di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, perlu memperhatikan prognosis yang telah disampaikan pada awal tahun, sehingga realisasi kegiatan berjalan sesuai rencana dan minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan beserta penyerapan anggaran.

Perencanaan pelaksanaan Proyek KPBU di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2021 tertuang ke dalam *pipeline* yang memuat rencana tahapan Proyek KPBU Bidang Perumahan dari mulai Tahap Perencanaan, Tahap Penyiapan, Tahap Transaksi, hingga Konstruksi, yaitu sebagai berikut:

No	Proyek	Estimasi Biaya Investasi (Rp. Milyar)	Rencana Jumlah Unit	Tahun																	
				2019	2020	2021				2022				2023				2024			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Rusun Sewa Cisaranten Bina Harapan	1.074	2.738	SP	OBC		PENYIAPAN PDF			FBC (PDF)				LELANG (PDF)			PKS	FINANCIAL CLOSE		KONSTRUKSI	
2	Rusun Sewa Terintegrasi KEK Sei Mankei	1.134	672	SP	DPP		PENYIAPAN PDF			FBC				LELANG			PKS	FINANCIAL CLOSE		KONSTRUKSI	
3	Rusun Karawang Spuur	403	1.175		SP	CPS		PENYIAPAN PDF			FBC (PDF)				LELANG (PDF)			PKS	FINANCIAL CLOSE	KONSTRUKSI	
4	Rusun TOD Jabodetabek (Rusun Pasar Jumat)	1.000	2.000					SP			FBC				LELANG		PKS	FINANCIAL CLOSE		KONSTRUKSI	
5	Rusun IKN Tahap 1	18.721	11.268						SP	PENGAJUAN PDF		FBC			LELANG		PKS	FINANCIAL CLOSE		KONSTRUKSI	
6	Rusun Mamminasata	1.000	2.000								SP		FBC			LELANG		PKS	FINANCIAL CLOSE	KONS -TRUKSI	
7	Rusun IKN Tahap 2	11.944	7.189									SP		FBC			LELANG		PKS	FINANCIAL CLOSE	
8	Rusun Desa Besar Medan	1.655	2.880		SP	OBC				FBC				LELANG		PKS	FINANCIAL CLOSE		KONSTRUKSI		

Gambar 3. *Pipeline* KPBU Bidang Perumahan

B. Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan satu Indikator Rincian Output Jumlah Penyusunan Studik Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan. Paket Kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output tersebut yaitu Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan yang dapat menghasilkan Rekomendasi Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan (Proyek KPBU Hunian ASN / TNI / POLRI di KIPP IKN) dan Proyek KPBU Rusun Transit Oriented Development (TOD). Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot peniaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 20%.

Kegiatan Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan dimaksud untuk menyiapkan dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan dalam rangka Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan. Adapun kegiatan ini bertujuan menyusun kompilasi data dan informasi terkait dengan Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan, serta menganalisis data dan informasi tersebut dan menyusun Studi Pendahuluan KPBU Bidang Perumahan.

Kegiatan ini menghasilkan dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP – IKN untuk hunian ASN. Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP - IKN terdiri atas kajian terkait Analisis Kebutuhan, Kriteria Kepatuhan, Kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*) partisipasi badan usaha, Analisis Potensi Pendapatan dan Skema Pembiayaan Proyek serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas 2/2020.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah menyelesaikan dokumen Studi Pendahuluan, berdasarkan hasil reviu oleh Kementerian PPN/Bappenas, dokumen SP tersebut telah memenuhi ketentuan Permen PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 per tanggal 17

November 2021 sesuai Surat Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, proyek KPBU Perumahan di KIPP – IKN dapat dilanjutkan ke tahapan penyiapan.

Saat ini masih terdapat beberapa *outstanding issues* dalam pelaksanaan KPBU Perumahan di KIPP –IKN seperti kepastian status dan kebutuhan pengadaan lahan, batasan ruang lingkup serta jumlah kebutuhan hunian yang masih sangat dinamis karena dalam perencanaan dari satgas IKN masih seringterjadi perubahan, sehingga rincian biaya investasi juga masih mungkin untuk mengalami perubahan,lalu kemampuan pengguna (ASN) untuk membayar tidak akan sanggup untuk skema kepemilikan sehingga hanya dimungkinkan skema sewa, serta masih diperlukannya peraturan pendukung yang menjadi landasan hukum yang memperkuat pemindahan Ibu Kota Negara sebagai landasan kebutuhanpenyediaan infrastruktur hunian bagi ASN dalam bentuk KPBU Perumahan KIPP-IKN.

Adapun rekomendasi dalam rangka finalisasi pengajuan PDF karena telah tersusunnya Studi Pendahuluan KPBU Perumahan di KIPP-IKN, selain menyiapkan Studi Pendahuluan, maka Kementerian PUPR perlu memastikan kelengkapan penyiapan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan pengajuan PDF sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor: 180 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang meliputi:

1. Studi Pendahuluan;
2. Laporan hasil Konsultasi Publik;
3. Kajian yang memuat referensi internasional atas proyek KPBU sejenis;
4. Khusus proyek yang dimohonkan menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan melampirkan: rencana penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan, permohonan konfirmasi pendahuluan, dan informasi terkait kapasitas fiskal;
5. Dokumen rencana pengadaan lahan;
6. Dokumen penetapan Tim KPBU;
7. Surat pernyataan PJPK.

C. Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Pra Studi Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki target sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan dengan satu Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Investasi Pembiayaan Perumahan.Rincian Output tersebut terdiri atas 2 (dua) Paket Kegiatan yaity Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan dan Penyiapan Dukungan Penyusunan Prasudi Kelayakan KPBU Perumahan yang masing-masing menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan khususnya Proyek KPBU Rusun TOD dan Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Dukungan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan untuk Protek KPBU Rusunawa Karawang Spuur dan Proyek KPBU Rusun Daan Mogot. Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang

kemudian dikonversikan berdasar bobot peniaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 30%.

1.1. Penyiapan Dukungan Prastudi Kelayakan KPBU perumahan

Kegiatan penyiapan dukungan prastudi kelayakaan KPBU Perumahan berkaitan dengan Kegiatan Dukungan Prastudi Kelayakan KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur dan KPDBU Rumah Susun Daan Mogot, yaitu keluaran (*output*) berupa pendampingan dukungan awal KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur yaitu *Indonesia's Infrastructure Finance Development* (IIFD) dari Kementerian Keuangan untuk penyusunan *Complementary Preliminary Study* (CPS) yang selanjutnya dilaporkan untuk mengajukan *Project Development Facility* (PDF). Lalu melakukan pendampingan pelaksanaan *National Affordable Housing Program-Public Private Partnership* (NAHP-PPP) dalam penyusunan dokumen prastudi kelayakan KPDBU Rusun Daan Mogot untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Penangung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Hasil pelaksanaan kegiatan Penyiapan Dukungan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan untuk Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Karawang Spuur pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri PUPR No. 419/KPTS/M/2021 tentang Mandat sebagian kewenangan Menteri PUPR selaku PJPK untuk Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang Spuur tanggal 12 April 2021
2. Keputusan Dirjen PI No. 27/KPTS/DP/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja KPBU Karawang Spuur tanggal 30 April 2021
3. Kick-Off Meeting Tim KPBU Karawang Spuur tanggal 25 Mei 2021
4. Pengajuan Konfirmasi Awal AP tanggal 8 Juli 2021
5. Pengajuan Usulan PDF tanggal 23 Juli 2021
6. Pembahasan Fiskal untuk Proyek KPBU-AP tanggal 8 September 2021
7. Penyampaian Komitmen PJPK dalam PDF tanggal 16 September 2021

Pada KPBU Rumah Susun Daan Mogot adalah Proyek yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Berupa sebidang tanah kosong datar seluas 4,7 Ha, terletak di zona perumahan dan terletak di Jalan Daan Mogot, KM 18, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Pemprov DKI berencana penggunaan lahan ini untuk pengembangan perumahan mixed-use bagi rumah tangga berpenghasilan menengah hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui pengaturan SPV di bawah skema KPBU.

Real Demand Survey (RDS) yang telah dilaksanakan menjelaskan bahwa proyek dengan estimasi biaya investasi sebesar 717 M dan 22 tahun masa konsesi (2 tahun konstruksi) telah memenuhi persyaratan ketinggian bangunan, KLB dan KDB yang dapat dibangun, serta direncanakan untuk total 1.584 unit rumah (Rusunawa, affordable housing, dan apartemen sewa) pada di 8 Towers dengan 12 lantai termasuk basement dan podium, dan total luas bangunan 32.779 m2.

Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan:

Pada proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur :

- Penyiapan Berita Acara Kesepatan antara Tim KPBU dan PT SMI atas Workplan dan Ruang Lingkup PDF beserta Hasil Keluaran;
- Penyiapan konsep/rancangan Perjanjian Fasilitas antara PJPK dan PT SMI;
- Akan dibuat berita acara persetujuan KAK untuk penasihat pelaksanaan transaksi PDF Proyek KPBU Karawang Spuur;
- Penyiapan Berita Acara Kesepatan antara Tim KPBU dan PT SMI atas Workplan dan Ruang Lingkup PDF beserta Hasil Keluaran;
- Penyiapan konsep/rancangan Perjanjian Fasilitas antara PJPK dan PT SMI;
- Akan dibuat berita acara persetujuan KAK untuk penasihat pelaksanaan transaksi PDF Proyek KPBU Karawang Spuur.

Pada proyek KPBU Rumah Susun Daan Mogot :

- Optimalisasi lahan karena termasuk KKOP Cengkareng;
- Optimalisasi aset untuk funasi non hunian (mix-function) Pemprov DKI berharap fungsi non hunian bisa mensuppor penerimaan sehingga tidak memerlukan AP;
- Akses dan kesediaan air bersih;
- Penyempurnaan OBC.

1.2. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan (Proyek KPBU Rusun TOD)

Kegiatan Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan (Proyek KPBU Rusun TOD) merupakan kegiatan dalam menyusun draf *Outline Business Case* (OBC) Proyek KPBU Rusun yang terintegrasi dengan kawasan transit atau lebih dikenal dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD) dalam rangka Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan.

Hasil Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Rusun TOD ini sebagai berikut:

- Laporan Identifikasi Awal Potensi Rusun KPBU TOD pada perpanjangan MRT Lebak Bulus – Rawa Buntu dan Depok – Parung.
- Dua jenis keluaran dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rusun TOD, yaitu untuk Rusun di kawasan TOD Lebak Bulus dan kawasan TOD Pondok Cabe.
- Draf Outline Business Case (OBC) untuk Rusun Pasar Jumat di kawasan TOD Lebak Bulus

Adapun rekomendasi dan tindaklanjut yang akan dilakukan untuk Proyek KPBU Rusun TOD adalah:

a. Melanjutkan penyiapan proyek dengan melakukan perampungan dan finalisasi dokumen Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) untuk mendapatkan kajian yang lebih komprehensif, termasuk melaksanakan konsultasi publik/market sounding.
b. Untuk Proyek Rusun di Kawasan TOD Lebak Bulus, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pengelola Kawasan Pasar Jumat dalam memastikan perolehan pemanfaatan lahan

BMN untuk pembangunan rusun TOD, serta melakukan identifikasi dan koordinasi dengan pemilik lahan sisa Terminal Lebak Bulus yang berada di samping Kawasan Pasar Jumat, untuk potensi rencana pemanfaatan lahan. Selain itu, perlu adanya keputusan penetapan mekanisme pembiayaan proyek melalui 2 (dua) opsi yaitu antara:

- Skema KPBU oleh PJPK sesuai ketentuan dalam Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah melalui Permen PPN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; atau
- Penugasan khusus kepada Perum Perumnas sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang tentang Perusahaan Umum Perum Pembangunan Perumahan Nasional.

Untuk Proyek Rusun di Kawasan TOD Pondok Cabe, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pengelola Terminal Pondok Cabe untuk memastikan perolehan pemanfaatan lahan BMN untuk pembangunan rusun TOD, serta memastikan bangunan Rusun tidak terkendala ketentuan KKOP.

D. Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyiapan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan. Rincian Output terdiri atas 1 (satu) paket kegiatan yaitu Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan yang memiliki keluaran yaitu Rekomendai Kebijakan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerinatah dalam Pembiayaan Perumahan untuk proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan, Rusun PALDAM, dan Rusun Sei Mangkei. Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot peniaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 20%.

Kegiatan Penyusunan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan ini mendorong fasilitasi KPBU bidang perumahan berupa dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah baik untuk proyek dengan PJPK Pusat maupun PJPK Daerah dengan tujuan untuk mendorong potensi fasilitasi dalam KPBU berupa Penyiapan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Untuk PJPK Pusat danPendampingan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah bagi PJPK Daerah

Adapun hasil dari Penyusunan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan:

- Melakukan pengusahaan Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) untuk Proyek KPBU PJPK PUPR yaitu Rusun Desa Besar Medan

- Melakukan pendampingan pengusahaan Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) untuk Proyek KPBU PJPK Pemerintah Daerah yaitu Proyek KPBU Rusun Desa Besar Paldam Siliwangi dan Rusun Terintegrasi Sei Mangkei.

Berikut merupakan rekomendasi dari kegiatan Penyusunan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan:

Proyek KPBU Desa Besar Medan

- SK Tim KPBU dan Kepmen Mandat Pendelegasian
- Tindak Lanjut fasilitasi penyiapan PDF dan Proses Penyiapan PDF
- Penyiapan konsep/rancangan Perjanjian Fasilitas antara PJPK dan Badan Usaha

Proyek KPBU Sei Mangkei

- Penyiapan konsep/rancangan Perjanjian Fasilitas antara PJPK dan PT PII
- Pelaksanaan PDF oleh PT PII

Proyek KPBU Paldam Siliwangi Bandung

- Penyempurnaan OBC
- Tindak Lanjut fasilitasi penyiapan PDF dan Proses Penyiapan PDF.

E. NSPK Pembiayaan Perumahan

Rincian Output NSPK Pembiayaan Perumahan memiliki target sebanyak 1 (satu) NSPK dengan Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Inevstasi Pembiayaan Perumahan/ Rincian output terdiri atas 1 (satu) paket kegiatan yaitu Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan yang menghasilkan Draf SOP Perencanaan dan Penyiapan KPBU Perumahan Subdit Legalisasi Rencana Investasi dan Draf Pedoman Pelaksanaan *Real Demand Survey* (RDS). Kedua keluaran tersebut merupakan kesatuan di dalam Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan, sehingga berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1(satu) NSPK atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 15%.

Kegiatan Standar Penyiapan KPBU Perumahan adalah penyusunan standar penyiapan KPBU Perumahan yang mencakup koordinasi, rapat dan diskusi/*Focus Group Discussion* (FGD), survei serta penyusunan pedoman standar penyiapan KPBU Perumahan.

Adapun hasil dari Standar Penyiapan KPBU Perumahan:

1) Buku elektronik berjudul Pedoman Real Demand Survey (RDS) untuk Penilaian Perumahan. Adapun ruang lingkup pedoman RDS terbagi menjadi tiga bagian tersendiri yaitu ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup waktu
2) Penyiapan penyusunan SOP di bidang pelaksanaan KPBU perumahan:
   <u>Subdit Legalisasi Rencana Investasi</u>
   - SOP Penyusunan Studi Pendahuluan
   - SOP Penyelenggaraan Konsultasi Publik KPBU Sektor Perumahan

- SOP Penyusunan Bahan Rekomendasi Penetapan Pemrakarsa KPBU Bidang Perumahan (Unsolicited)
- SOP Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan
- SOP Penyelenggaraaan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) KPBU Sektor Perumahan
- SOP Penyelenggaraan Konsultasi Pasar KPBU Sektor Perumahan
- SOP Penyiapan Dokumen Pengusahaan Penjaminan Pemerintah bagi Proyek KPBU Perumahan
- SOP Pembentukan Tim KPBU Bidang Perumahan.

Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi

- SOP Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah bagi Proyek KPBU Perumahan
- SOP Penyiapan dan Pendampingan Pengadaan Badan Usaha KPBU Sektor Perumahan
- SOP Penyusunan Usulan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang Perumahan
- SOP Penyiapan dan Pendampingan Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) untuk KPBU Sektor Perumahan
- SOP Dokumen Pengadaan Badan Usaha KPBU Sektor Perumahan
- SOP Dokumen Pengadaan Badan Usaha KPBU Sektor Perumahan

Berikut rekomendasi dari Standar Penyiapan KPBU Perumahan:

- KPBU Perumahan merupakan kerjasama pemerintah dan badan usaha yang berbeda dan paling baru jika dibandingkan dengan kerjasama infrastruktur lainnya di Kementerian PUPR dengan demikian diperlukan adanya koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya penyempurnaan pedoman, standar maupun prosedur dalam menyusun kajian kelayakan KPBU Perumahan;
- Penyusunan SOP Pemantauan KPBU Sektor Perumahan yang telah disusun merupakan SOP yang dibutuhkan saat ini oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Sehingga, jika pada pelaksanaan pemantauan dan supervise dibutuhkan SOP yang lain, maka Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dapat menyusun SOP baru sesuai kebutuhan atau mengembangkan SOP yang ada.

F. Proyek KPBU perumahan yang Siap Dikerjasamakan

Rincian Output Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan memiliki target sebanyak 1 (satu) kesepakatan yang terdiri dari Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan yang terdiri dari 2 (dua) dokumen dengan bobot 60% dan Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan yang terdiri dari 1 (satu) kesepakatan 40%. Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan terdiri atas 2 (dua)

Output Kegiatan yaitu Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan dengan hasil keluaran 1 (satu) dokumen Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan dan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan dengan hasil keluaran 1 (satu) dokumen Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Bidang Perumahan. Sedangkan Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan terdiri dari kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan yang merupakan bagian dari Tahapan Transaksi Proyek KPBU memiliki target 1 (satu) kesepakatan.

1.1. Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan

Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan merupakan bentuk persiapan dalam rangka pelaksanaan transaksi KPBU Bidang Perumahan. Kegiatan ini menghasilkan tiga jenis keluaran yaitu:

- Permohonan Fasilitas PDF Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung
- Kesepakatan Induk antara kementerian Keuangan dan kementerian PUPR tentang Penyediaan Fasilitas dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung
- Dokumen Perjanjian antara Kementerian PUPR dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tentang Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Adapun rekomendasi dan tindaklanjut yang akan dilakukan untuk Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung adalah:

- Mempersiapkan penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (inception report) Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dengan output sekurang-kurangnya memuat Laporan Gap Analysis terhadap dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan/Outline Business Case (OBC), termasuk identifikasi isu-isu utama Proyek (aspek hukum, teknis & finansial, ekonomi, lingkungan, dsb), Rencana Kerja termasuk RDS, ATP/WTP dan jadwal indikatif pekerjaan.
- Penyelesaian FBC harus sesuai dengan persyaratan Pemen PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020.

1.2. Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Bidang perumahan

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Bidang Perumahan merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Badan Usaha untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha bidang Perumahan. Adapun tujuannya menyelenggarakan Pengadaan

Badan Usaha untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha bidang Perumahan dengan Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif, dan Akuntabel. Pada tahun ini target di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yaitu Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten sudah melaksanakan lelang akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dikarenakan belum adanya keputusan terkait pengadaan lahan untuk proyek tersebut sehingga pada tahun ini belum dapat dilaksanakan pendampingan pengadaan badan usaha pelaksana. Saat ini proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung sedang berproses untuk persiapan pelaksanaan fasilitas PDF dari Kementerian Keuangan. Proyek ini sudah disetujui untuk mendapatkan fasilitas PDF sehingga nantinya akan mendapat pendampingan pelaksanaan transaksi. Namun saat ini telah disiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Adapun hasil kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Bidang Perumahan sebagai berikut:

- Draft SK Panitia Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan
- Draft Dokumen Permintaan Proposal KPBU Perumahan
- Draft Dokumen Prakualifikasi KPBU Perumahan

1.3. Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ditargetkan untuk dapat melakukan transaksi Proyek KPBU Sektor Perumahan sebanyak 1 (satu) proyek, yaitu Proyek KPBU Rusun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung yang merupakan proyek *pilot* bagi KPBU *Solicited Project* Sektor Perumahan. Dalam pelaksanaannya, Proyek KPBU tersebut menemui beberapa isu krusial setelah *Outline Business Case* selesai disusun yang harus dipecahkan atau diputuskan sebelum penyusunan *Final Business Case*. Isu yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan tidak dapat memenuhi target capaian adalah sebagai berikut:

1. Terdapat lahan yang digunakan oleh masyarakat seluas 4.360 m^2 yang harus dibebaskan. Strategi pembebasan / pengadaan lahan tersebut saat ini sedang dalam proses meminta Direktorat Jenderal Perumahan untuk dapat melakukan pengadaan tanah menggunakan APBN dengan *benchmarking* proses dan mekanisme pengadaan lahan pada proyek IPA Karian Serpong seluas 4,89 Ha.
2. Tidak adanya *supply* air minum dikarenakan PDAM belum melayani area proyek KPBU Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung berada, sehingga belum mendapat kepastian pemenuhan air oleh PDAM. Selain itu, proyek KPBU tidak dapat menggunakan air tanah sebagai sumber air utama karena berada di dalam area yang sangat dibatasi untuk menggunakan air tanah.

2) **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Sasaran kegiatan ini memiiki Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indikator Kinerja Kegiatan adalah Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target 50%. Capaian masing – masing output kegiatan dan paket kegiatan dari masing – masing output adalah sebegai berikut:

Tabel 14. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Program Dukungan Manajemen							
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
Target			Capaian				
2,00%			2,00%				
No	Jenis Indikator Komposit IKK / KRO / RO / Indikator Rincian Output / Paket Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahang		%	100%	100%	100%	2%	2%
Layanan Perkantoran							
A	Operasionalisasi Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%	2%	2%
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP						
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	Layanan	1	1	100%	100%	100%

Pelaksanaan Operasional Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki kinerja 100% dan dapat memenuhi target, sehingga capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 2,00%.

Berikut adalah uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2020 pada Program Perumahan dan Permukiman beserta indikator yang tertera di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja:

1) **Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**

Sasaran kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Jenis Indikator Komposit IKK sebagai berikut:

① Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dengan output kegiatan yaitu Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan bobot 30%

② Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan bobot 50%, terdiri atas Rincian Output:
   i. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dengan bobot 40%;
   ii. Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka dengan bobot 60%.

③ Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang memiliki bobot 20% terdiri atas Rincian Output:
   i. Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan bobot 50%;
   ii. NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan dengan bobot 20%;
   iii. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan bobot 15%;
   iv. Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dengan bobot 15%.

Capaian masing – masing output kegiatan dan paket kegiatan dari masing – masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Sasaran kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan							
Target			Capaian				
50,00%			48,38%				
No	Jenis Indikator Komposit IKK / KRO / RO / Indikator Rincian Output / Paket Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera		**%**	**100%**	**93,46%**	**93,46%**	**30%**	**28,038%**
Koordinasi							
A	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	93,46%	100%	93,46%
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)						
1	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat	Rumah Tangga	10.000	13.329	133,29%	70%	93,30%
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (Tapera)						
1	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder	Rumah Tangga	75.000	389	0,52%	30%	0,16%

	Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat						
Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan		**%**	**100%**	**101,13%**	**101,13%**	**50%**	**48,714%**
Subsidi kepada Keluarga							
B	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	11.865	11.999	101,13%	40%	40,45%
	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan						
1	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	Rumah Tangga	11.865	11.999	101,13%	40%	40,45%
C	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Rumah Tangga	-	-	94,97%	60%	56,98%
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka						
1	Subsidi Selisih Bunga (BA.999.07)*	Rumah Tangga	859.582	767.605	83,30%	50%	44,65%
2	Subsidi Bantuan Uang Muka (BA.999.07)	Rumah Tangga	175.000	176.105	100,63%	50%	50,32%
Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**20%**	**20%**
Kebijakan Sarana dan Prasarana							
D	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100%	50%	50%
	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan						
1	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah bagi MBR	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	50%	50%
	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan						
1	Penyiapan Kesepakatan Bersama dan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	30%	30%
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan						
1	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	20%	20%
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria							
E	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	100%	20%	20%
	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan						
1	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan bagi MBR	NSPK	1	1	100%	100%	100%
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							
F	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	2	2	100%	15%	15%
	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan						

1	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi MBR	Laporan	1	1	100%	50%	50%
2	Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	50%	50%
Pelayanan Publik Lainnya							
G	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	100%	33%	33%
1	Dana Operasional Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	100%	100%	100%
H	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	100%	34%	34%
1	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	100%	100%	100%
Subsidi Kepada Keluarga							
I	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pendam pingan	1	1	100%	33%	33%
1	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	Pendam pingan	1	1	100%	100%	100%

**Subsidi Selisih Bunga di Tahun Anggaran 2021 hanya penyaluran Ulang Tahun, tidak ada penyaluran baru*

A. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Fasilitasi Pembiayaan Perumahan terdiri atas Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat. Capaian Kinerja Rincian Output tersbut merupakan hasil perhitungan akumulasi penyaluran yang dilakukan oleh PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Tabungan perumahan Rakyat (Tapera), sehingga capaian kinerja Rincian Output tersebut adalah sebesar 87,52%. Rincian Output Fasilitasi Pembiayaan Perumahan tidak dapat mencapai 100% dikarenakan penyaluran yang dilakukan oleh Tapera hanya sebesar 389 dari besar target berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 sebesar 75.000 Rumah Tangga walaupun pembiayaan di luar KPR FLPP yang dilakukan oleh PT. SMF berdasarkan Surat Direktur Utama PT. SMF Nomor S-0193/DIR/SMF/XI/2020 pada tanggal 21 Januari 2022 Perihal Penyertaan Data Capaian Kinerja PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah kepada 13.329 debitur yang dengan nominal Rp1.148.237.006.494,00 atau sebesar 133,29% dari target berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024.

Ketidaktercapaian target penyaluran oleh Tapera dikarenakan Tapera belum beroperasi penuh pada tahun 2021 karena masih dalam proses pemindahan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang semula dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

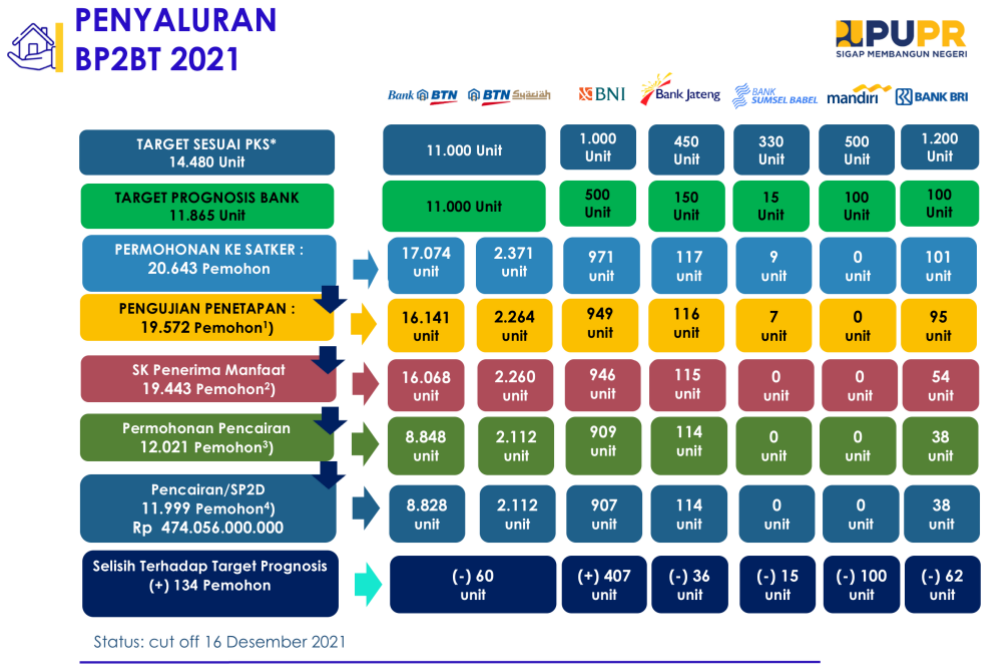
B. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Rincian Output Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan merupakan Rincian Output yang teridiri atas Pelaksanaa Penyaluran BP2BT yang memiliki target penyaluran kepada 11.865 Rumah Tangga menggunakan Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri *National Affordable Housing Program*/ Program BP2BT berhasil disalurkan kepada 11.999 Rumah Tangga sehingga capaian kinerja penyaluran mencapai 101,13% atau sebanyak Rp474.056.000.000,00 yang terdiri atas 11.984 rumah tangga untuk bantuan bagi perumahan atau sebanyak Rp473.458.000.000,00 yang disediakan pengembang dan 15 rumah tangga untuk bantuan bagi perumahan swadaya atau sebanyak Rp598.000.000,00. Namun, pada pelaksanaanya hingga kuartal ketiga tahun 2021 terdapat deviasi sebesar 27,97% dari target penyaluran yang disebabkan oleh kendala sebagai berikut:

1. Preferensi bank pelaksana dan calon pemohon terhadap program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan lain selain BP2BT;
2. Kurangnya sosialisasi terkait Program BP2BT kepada pengembang dan masyarakat; dan
3. Kelengkapan persyaratan berkas BP2BT.

Rekomendasi untuk dapat memitigasi kendala yang akan terulang kembali pada pelaksanaan Program BP2BT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan penyaluran pada Semester 1 Tahun Anggaran 2022 saat Program FLPP yang saat ini dikelola oleh Tapera belum beroperasi penuh;
2. Melakukan sosialisasi Program BP2BT secara lebih luas;
3. Melakukan evaluasi penyaluran kuota di Semester 1 untuk mendapatkan komitment penyaluran dari bank pelaksana;
4. Pelibatan Lembaga *linkage* dalam Rancanagan Peraturan Menteri PUPR sehingga dapat segera diterapkan dan mendorong percepatan penyaluran;
5. Menyiapkan target realisasi per triwulan dan melakukan evaluasi oleh Penguji dari Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.



Gambar 4. Penyaluran BP2BT Tahun Anggaran 2021

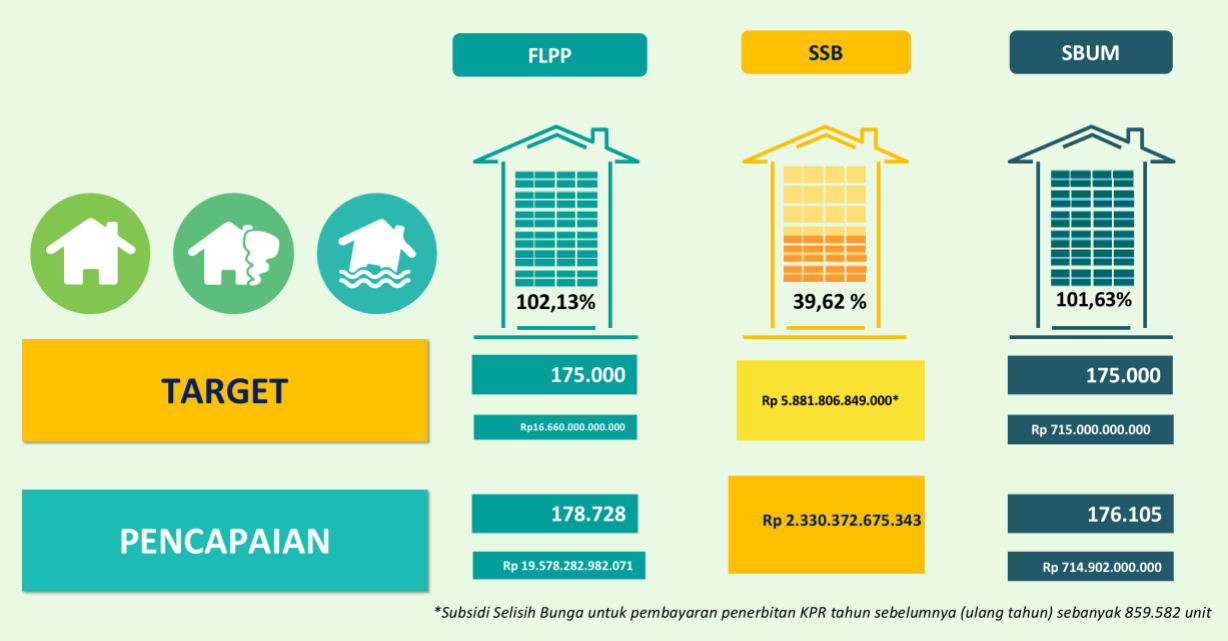
C. Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

Rincian Output Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka merupakan Rincian Output yang terdiri atas Pelaksanaan Program Subsidi Selisih Bunga (BA.999.07) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (BA.999.07). Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 target penyaluran Subsidi Selisih Bunga atau Selisih Bunga Kredit (SSB / SBK) adalah sebanyak 859.582 Rumah Tangga. Pada Tahun Anggaran 2021, anggaran Subsidi Selisih Bunga untuk penerbitan baru tidak dialokasikan, yang dialokasikan adalah pembayaran tahun ke-2 dan seterusnya. Realisasi penyaluran program SSB sebanyak Rp2.330.372.675.343,00 atau kepada 767.605 Rumah Tangga untuk akad KPR tahun 2015-2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian alokasi anggaran SBK/SSB yang belum maksimal terutama di tahun 2020-2021 diakibatkan karena rendahnya tingkat suku bunga KPR eksisting berkisar antara 8,3%-8,7%, sedangkan asumsi tingkat suku bunga perencanaan sebesar 12,25%; dan
2. Adanya pelunasan dipercepat oleh debitur/nasabah menyebabkan jumlah unit SSB berkurang dari target awal.

Target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 adalah sebanyak 157.500 rumah tangga, karena Program SBUM dan Program Fasilitas LIkuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saling berkaitan, pada pelaksanaannya target penyaluran untuk program SBUM pada tahun 2021 menjadi 175.000 Rumah Tangga atau sebanyak Rp715.000.000.000 karena adanya penurunan bunga kredit dari perbankan sehingga target penyaluran bertambah. Pada Tahun 2021, Program

SBUM berhasil menyalurkan kepada 176.705 Rumah Tangga sejumlah Rp714.902.000.000,00 atau sebesar 101,63% dari target penyaluran.



Gambar 5. Capaian Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Pada pelaksanaan Program SSB Penyaluran Ulang Tahun menemui beberapa kendala sebagai berikut:

1. Terjadi keterlambatan pengajuan penagihan pembayaran SSB/SSM/SBK dari Bank Pelaksana kepada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan terdapat beberapa debitur yang dihentikan subsidinya;
3. Terdapat sisa dana penyaluran;
4. Bank pelaksana belum seluruhnya menagihkan pembayaran SBK Perumahan kepada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
5. Perbedaan dalam perhitungan nilai subsidi Program SBK Perumahan antara bank pelaksana dengan Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
6. Bank pelaksana terlambat dalam menyampaikan Pelaporan Lunas Dipercepat;
7. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Bank Pelaksana.

Sedangkan kendala yang ditemui saat pelaksanaan Program SBUM adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan penyerahan dokumen administrasi oleh bank pelaksana pasca pencairan sehingga tagihan selanjutnya ditahan pencairannya sampai bank melengkapi dokumen-dokumennya;
2. Bank pelaksana tidak segera melakukan pengajuan pembayaran SBUM meskipun sudah realisasi Program FLPP;
3. Bank pelaksana masih ada yang belum mengajukan penambahan kuota penyaluran Program SBUM dan FLPP yang sesuai dengan pencairan Program FLPP sehingga proses pencairan SBUM terkendala dengan Batasan kuota;

4. Bukti pemindahbukuan dana SBUM Perumahan untuk KPR Sejahtera (FLPP) belum seluruhnya diterima oleh Satker DJPI;
5. Bank pelaksana belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban atas Penyaluran SBUM Perumahan;
6. Penagihan pembayaran SBUM Perumahan dilakukan jauh dari tanggal pencairan Dana FLPP;
7. Realisasi pada pencairan dana FLPP melebihan rencana DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 untuk dapat memitigasi kendala serupa pada Program SSB dan SBUM Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dalam rangka mendorong penyaluran bantuan yang tepat waktu;
2. Sehubungan dengan pengalihan pengelolaan dana FLPP dari PPDPP ke Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), perlu mendorong perbankan melakukan perjanjian kerja sama penyaluran FLPP dengan BP Tapera sebagaiman yang disyaratkan dalam Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

D. Kebijakan Bantuan Pembiayan Perumahan

Rincian Output Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan terdiri atas 3 (tiga) Indikator Rincian Output, yaitu Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan, Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan, dan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Masing-masing Indikator Rincian Output berhasil mencapai target kinerja yang direncanakan sehingga Capaian Kinerja Rincian Ouput Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 100% dengan bobot 50% berdasarkan Jenis Indikator Komposit IKK sehingga Capaian Kinerja adalah 50%.

Indikator Rincian Output Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan terdiri atas 2 (dua) Output Kegiatan yaitu Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah bagi MBR yang menghasilkan dan Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan.

Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolahan Rumah Bagi MBR

Ouput kegiatan ini pada Tahun 2021 menghasilkan:

1. Keputusan Menteri PUPR Nomor 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batsasn Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.
2. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan output kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan batas waktu pemberhentian pemberlakuan Kepmen PUPR Nomor 242/KPTS/M/2019;
2. Penyempurnaan substansi KPR Siap Bangun memerlukan waktu yang relative lama karena diperlukan pendetailan mengenai skema penyaluran dan sebagainya yang terkait;
3. Batas waktu penyaluran FLPP Tahun 2021 adalah sampai dengan dengan 31 Oktober 2021, sehingga batas penyaluran KPR Siap Bangun yang difasilitasi oleh dana FLPP yang disalurkan oleh PPDPP sangat singkat.

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya perbaikan adalah diperlukannya penyesuaian harga jual rumah yang difasilitasi KPR Bersubsidi yang termuat dalam Kepmen PUPR Nomor 995/KPTS/M/2021 seiring dengan perubahan harga satuan bahan dan tukang serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan

Ouput kegiatan ini pada Tahun 2021 menghasilkan:

1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
2. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemduahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kendala yang ditemu saat pelaksanaan output kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Batsan penghasilan MBR untuk mendapatkan fasilitas kemudahan dan bantuan dari pemerintah dan Batasan penghasilan MBR bagi peserta Tapera;
2. Diperlukan kesepakatan mengenai Batasan pengaturan pada Rapermen PUPR tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan peraturan BP Tapera.

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan permohonan persetujuan presiden kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setelah proses harmonisasi Rapermen PUPR selesai dan menyampaikan Rapermen tersebut kepada Menteri PUPR untuk penandatanganan dan pengundangan peraturan;
2. Sosialisasi dan pelaksanaan Peraturan Menteri PUPR.

Indikator Rincian Output Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan terdiri atas Ouput Kegiatan Penyiapan Kesepakatan Bersama dan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menghasilkan Kepakatan Bersama dan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan antara bank pelaksana dengan Kementerian PUPR.

Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan memiliki Ouput Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang menghasilkan Laporan koordinasi dengan pemangku kepentingan dilakukan dalam rangka terlaksananya program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan koordinasi yang dilakukan berupa sosialisasi program, audiensi dan fasilitasi penyelesaian masalah terkait pembiayaan perumahan bagi MBR.

E. NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan

Rincian Output NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan terdiri atas Indikator Rincian Output Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) NSPK. Capaian kinerja Rincian Output adalah sebanyak 1 (satu) NSPK atau sebesar 100% dari target yang direncanakan atau capaian kinerja berdasarkan bobot Jenis Indikator Komposit IKK adalah sebesar 20%. Rincian Output memiliki Ouput Kegiatan Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan bagi MBR yang menghasilkan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Kendala yang dihadapi saat melaksanakan ouput kegiatan tersebut adalah diperlukan pembahsan yang intens terkait dengan sekma penyaluran BP2BT melalui BPR/BPRS dan perusahaan pembiayaan, pembulatan konsepsi mengenai perluasan skema perbaikan rumah swadaya, dan batas waktu pelaksanaan Program BP2BT yang akan berakhir pada bulan Februari 2023. Berdaarkan progres pelaksanaan ouput kegiatan, rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Pengundangan Rapermen menjadi Peraturan Menteri PUPR, sosialiasi Peraturan Menteri PUPR, dan optimalisasi pelaksanaan Program BP2BT.

F. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan terdiri atas Indikator Rincian Output Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 (dua)

laporan. Capaian kinerja rincian ouput adalah sebesar 100% atau berdasarkan bobot Jenis Indikator Komposit IKK sebesar 15%. Rincian Output terdiri atas 2 (dua) Output Kegiatan yaitu Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi MBR dan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi MBR

Output kegiatan ini menghasilkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Nomor 05/SE/Dp/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Kendala yang dihadapi adalah. Adanya perubahan / revisi terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan petunjuk teknis berdasarkan Peraturan Menteri PUPR terkait yang baru;
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dan BP2BT.

Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Output kegiatan ini menghasilkan rangkaian laporan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengendalian Tahap Persiapan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 melalui Program FLPP, SSB dan SBUM, dan BP2BT;
2. Laporan Kunjungan Lapangan terkait Hasil Tinjauan Fisik/Konstruksi Rumah dan PSU Program KPR Bersubsidi dan BP2BT;
3. Laporan Kinerja Penyaluran KPR Bersubsidi dan BP2BT Tahun Anggaran 2021;
4. Laporan Hasil Kemajuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2021 terkait Pemanfaatan Keterhunian Rumah Program KPR Bersubsidi dan BP2BT.

Kendala yang dihadapi saat melaksanakan ouput kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian spesifikasi bantuan serta teknik pemasangan / cara pengerjaan yang salah;
2. Capaian target realisasi penyaluran BP2BT hingga kuartal ketiga tahun 2021 rendah;
3. *Database* Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan tidak cocok dengan yang dimiliki saat ini oleh debitur sehingga tidak mendapatkan akses untuk masuk ke dalam sistem e-monev.

Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

1. Bank Pelaksana agar mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi atas hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah yang dikerjakan oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi
2. Pengembang agar menyediakan Pengkaji Teknis/Manajemen konstruksi untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala
3. Bank Pelaksana melakukan percepatan proses permohonan pencairan kepada Satker
4. Satker melakukan percepatan proses penerbitan SK Penerima Manfaat dan pencairan Dana BP2BT
5. Bank Pelaksana wajib untuk menginfokan kepada Debitur yang belum mengisi kuesioner e-monev untuk mengisi kuesioner e-monevnya
6. Koordinasi pelibatan monitoring dan evaluasi dengan Bank Cabang sebagai upaya percepatan keterisian kuesioner e-monev

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kemampuan teknis kepada Manajemen Konstruksi / Pengkaji Teknis;
2. Pelibatan pihak ketiga pengendali mutu independent;
3. Adanya komitmen bank pelaksana dalam hal pengawasan kualitas konstruksi;
4. Target Program BP2BT lebih realistis dan dilengkapi dengan strategi – strategi pencapaian target;
5. Perlu adanya komitmen bank pelaksana untuk pemenuhan target;
6. Pemutakhiran / pengembangan web okupansi;
7. Pemutakhiran data NIK dan kontak debitur.

4.1.1. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2021 terdapat perubahan dalam *cascading* pada Program hingga Output Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi dan unit kerja, sehingga perbandingan kinerja terhadap 2020 dianggap sebagai *baseline* pada target Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis Indikator	*Baseline* 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	**24,25%**	25,00%	**23,25%**

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis Indikator	*Baseline* 2020	Target 2021	Realisasi 2021
						Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	**2,00%**	2,00%	**2.00%**
Perumahan dan	Meningkatnya Penyediaan	Meningkatnya Pelayanan	Tingkat Pemenuhan	Meningkatnya Pelaksanaan	Tingkat Pencapaian	Prosentase Rumah Tangga	**42,06%**	50.00%	**48,38 %**

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis Indikator	*Baseline* 2020	Target 2021	Realisasi 2021
Kawasan Permukiman	Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)			
						Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)			
						Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)			

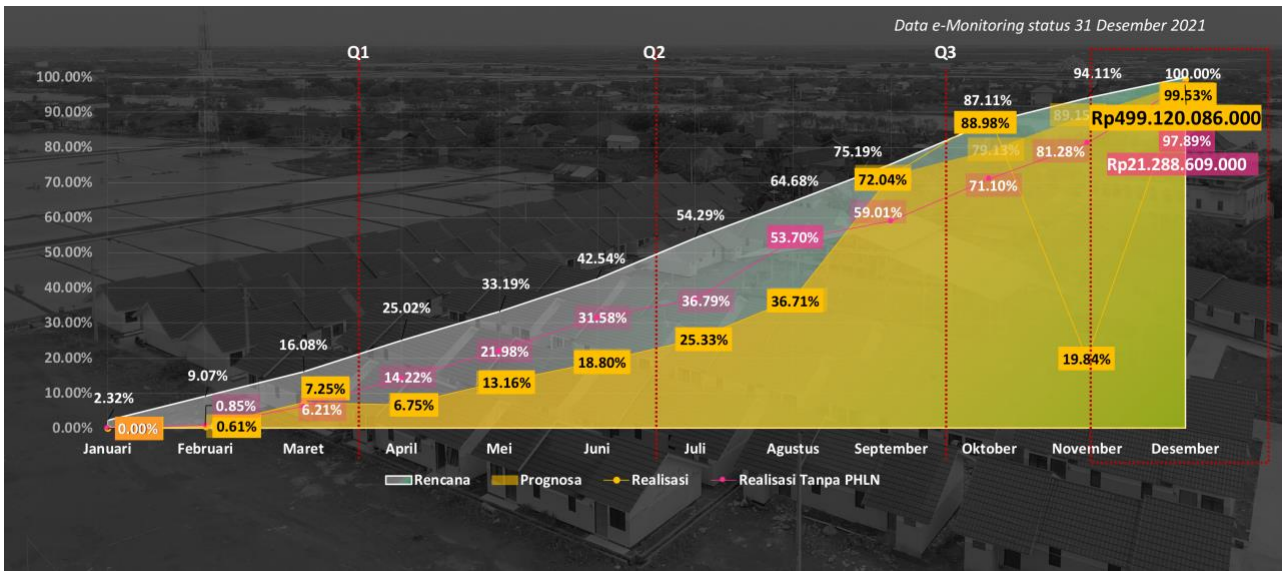
Baseline 2020 Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 24,25% merupakan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020. Penurunan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 1% dari *baseline* 2020 diakibatkan karena tidak adanya proyek KPBU yang telah ditransaksikan pada tahun 2021 sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penyebab dan kendala ketidaktercapaian target Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan telah dibahas pada sub-bab sebelumnya.

Baseline 2020 Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 2%. Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2021 dapat memenuhi 100% atau besaran Capaian Kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terkait Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebesar 2%.

Baseline 2020 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan ddengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 42,06%. Terjadi peningkatan Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja tersebut di Tahun Anggaran 2021 atau Capaian Kinerja pada Tahun 2021 menjadi sebesar 48,38%. Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun Sasaran Kegiatan tersebut belum mencapai 100% dikarenakan Capaian Kinerja Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Tapera tidak mencapai target atau hanya dapat menyalurkan kepada 389 Rumah Tangga atau sebesar 0,52% target penyaluran. Penyebab dan Kendala dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut telah dibahas pada sub-bab sebelumnya.

4.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 berdasarkan *e-monitoring* PUPR adalah sebesar Rp499.120.086.000,00 atau sekitar 99,53% dari pagu akhir yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp501.469.015.000,00.



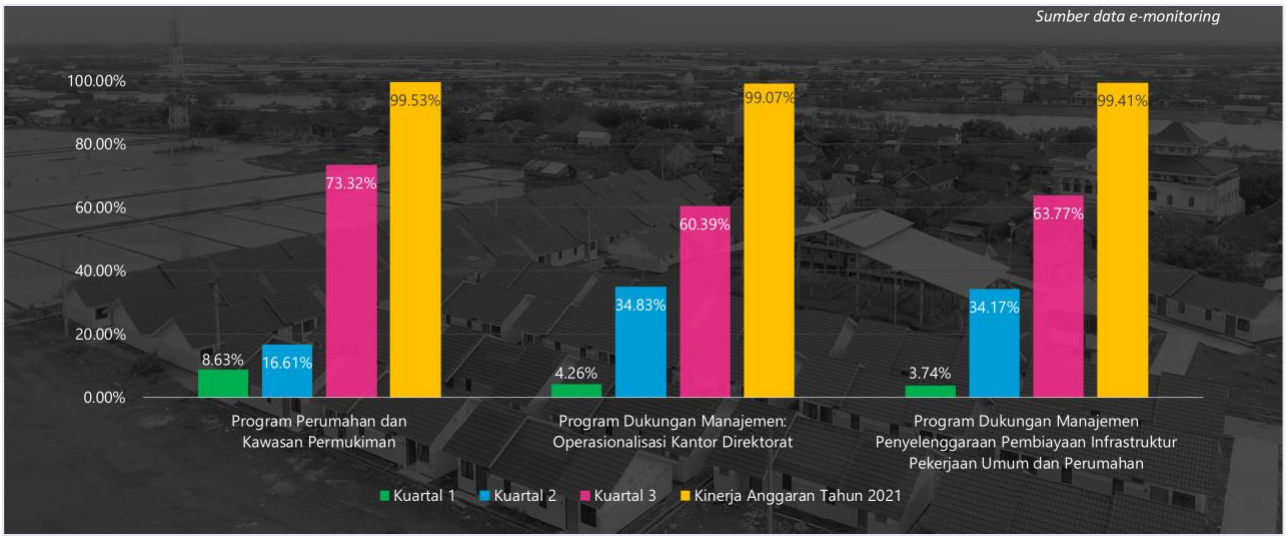
Gambar 6. Grafik Kinerja Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan T.A. 2021 (sumber data: e-Monitoring Kementerian PUPR)

Tabel 16. Kinerja Anggaran per Bulan T.A. 2021

Realisasi	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Presentase Keuangan	0,00%	0,61%	7,25%	6,75%	13,16%	18,80%	25,33%	36,71%	72,04%	88,98%	19,84%	99,53%
Penyerapan Keuangan (xRp1.000,00)	0	220.363	2.615.796	4.799.271	9.361.877	13.370.636	18.012.371	24.607.448	48.289.082	59.649.466	99.478.171	499.120.086

Kinerja Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sangat dipengaruhi oleh Pagu Anggaran yang bersumber dari dana PHLN yang mencakup 95,68% pagu anggaran yang dikelola. Dana PHLN tersebut merupakan alokasi dana untuk penyaluran Program BP2BT yang mengalami kendala penyaluran hingga kuartal ketiga tahun 2021, sehingga berdasarkan grafik kinerja anggaran di atas, hingga Bulan Agustus 2021 kinerja mengalami deviasi lebih dari 20%. Pada Bulan November 2021, grafik kinerja anggaran menurun tajam hingga 19,84% karena terdapat

penambahan pagu anggaran untuk penyaluran Program BP2BT sebanyak Rp434.000.000.000,00 sehingga pagu dana PHLN menjadi sebesar Rp479.721.627.000,00.



Gambar 7. Grafik Perbandingan Kinerja Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan T.A. 2021 (sumber data: e-Monitoring Kementerian PUPR)

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan masing – masing program yang dilaksanakan adalah 99,53% capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman atau yang terkait dengan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan; 99,07% capaian Program Dukungan Operasionalisasi Kantor Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan 99,41% capaian Program Dukungan Manajemen: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 berdasarkan pagu dan realisasi anggaran masing - masing Paket Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Tabel Kinerja Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Preumahan Tahun Anggaran 2021

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Capaian			
					Keuangan (%)		Fisik (%)	
					RN	RL	RN	Fisik
Unor	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		501,469,015,000	499,120,086,000	98.01%	99.53%	99.00%	99.73%
Program	033.16.IA	Perumahan dan Kawasan Permukiman	492,971,627,000	490,676,012,000	98.00%	99.53%	99.00%	99.73%
Kegiatan	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	492,971,627,000	490,676,012,000	98.00%	99.53%	99.00%	99.73%
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,813,401,000	4,531,494,000	98.00%	94.14%	99.00%	94.65%
RO	4976.ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,813,401,000	4,531,494,000	98.00%	94.14%	99.00%	94.65%
Komponen	051	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	3,868,637,000	3,602,755,000	98.00%	93.13%	99.00%	93.59%
Subkomponen	051.A	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	596,290,000	564,187,000	98.00%	94.62%	99.00%	95.00%
Subkomponen	051.B	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	622,347,000	615,288,000	98.00%	98.87%	99.00%	99.00%
Subkomponen	051.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,650,000,000	2,423,280,000	98.00%	91.44%	99.00%	92.00%
Komponen	052	Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayan Perumahan	354,126,000	349,676,000	98.00%	98.74%	99.00%	99.00%

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Capaian			
					Keuangan (%)		Fisik (%)	
					RN	RL	RN	Fisik
Subkomponen	052.A	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	354,126,000	349,676,000	98.00%	98.74%	99.00%	99.00%
Komponen	**053**	**Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**590,638,000**	**579,063,000**	**98.00%**	**98.04%**	**99.00%**	**99.00%**
Subkomponen	053.A	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	590,638,000	579,063,000	98.00%	98.04%	99.00%	99.00%
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**602,384,000**	**588,437,000**	**98.00%**	**97.68%**	**99.00%**	**98.00%**
RO	**4976.AFA.001**	**NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**602,384,000**	**588,437,000**	**98.00%**	**97.68%**	**99.00%**	**98.00%**
Komponen	**051**	**Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**602,384,000**	**588,437,000**	**98.00%**	**97.68%**	**99.00%**	**98.00%**
Subkomponen	051.A	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	602,384,000	588,437,000	98.00%	97.68%	99.00%	98.00%
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**1,157,375,000**	**1,107,102,000**	**98.00%**	**95.66%**	**99.00%**	**98.31%**
RO	**4976.EAL.001**	**Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1,157,375,000**	**1,107,102,000**	**98.00%**	**95.66%**	**99.00%**	**98.31%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1,157,375,000**	**1,107,102,000**	**98.00%**	**95.66%**	**99.00%**	**98.31%**
Subkomponen	051.A	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	363,791,000	333,456,000	98.00%	91.66%	99.00%	92.00%
Subkomponen	051.B	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	793,584,000	773,646,000	98.00%	97.49%	99.00%	98.00%
KRO	**PEA**	**Koordinasi**	**729,558,000**	**727,170,000**	**98.00%**	**99.67%**	**99.00%**	**100.00%**
RO	**4976.PEA.001**	**Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**729,558,000**	**727,170,000**	**98.00%**	**99.67%**	**99.00%**	**100.00%**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Capaian			
					Keuangan (%)		Fisik (%)	
					RN	RL	RN	Fisik
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**729,558,000**	**727,170,000**	**98.00%**	**99.67%**	**99.00%**	**100.00%**
Subkomponen	051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	729,558,000	727,170,000	98.00%	99.67%	99.00%	100.00%
KRO	**QAH**	**Pelayanan Publik Lainnya**	**5,947,282,000**	**5,890,332,000**	**98.00%**	**99.04%**	**99.00%**	**99.50%**
RO	**4976.QAH.001**	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**2,974,484,000**	**2,926,448,000**	**98.00%**	**98.39%**	**99.00%**	**99.00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**2,974,484,000**	**2,926,448,000**	**98.00%**	**98.39%**	**99.00%**	**99.00%**
Subkomponen	051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	2,974,484,000	2,926,448,000	98.00%	98.39%	99.00%	99.00%
RO	**4976.QAH.002**	**Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**2,972,798,000**	**2,963,884,000**	**98.00%**	**99.70%**	**99.00%**	**100.00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**2,972,798,000**	**2,963,884,000**	**98.00%**	**99.70%**	**99.00%**	**100.00%**
Subkomponen	051.A	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	2,972,798,000	2,963,884,000	98.00%	99.70%	99.00%	100.00%
KRO	**QFC**	**Subsidi kepada Keluarga**	**479,721,627,000**	**477,831,477,000**	**98.00%**	**99.61%**	**99.00%**	**99.79%**
RO	**4976.QFC.001**	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**479,721,627,000**	**477,831,477,000**	**98.00%**	**99.61%**	**99.00%**	**99.79%**
Komponen	**051**	**Penyaluran Bantua Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**479,721,627,000**	**477,831,477,000**	**98.00%**	**99.61%**	**99.00%**	**99.79%**
Subkomponen	051.A	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	474,600,000,000	473,742,000,000	98.00%	99.82%	99.00%	100.00%
Subkomponen	051.B	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5,121,627,000	4,089,477,000	98.00%	79.85%	99.00%	80.00%

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Capaian			
					Keuangan (%)		Fisik (%)	
					RN	RL	RN	Fisik
Program	033.WA	Program Dukungan Manajamen	8,497,388,000	8,444,074,000	98.00%	99.37%	99.00%	99.87%
Kegiatan	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	886,080,000	877,841,000	98.00%	99.07%	99.00%	100.00%
KRO	EAA	Layanan Perkantoran	886,080,000	877,841,000	98.00%	99.07%	99.00%	100.00%
RO	4194.EAA.006	Operasionalisasi Kantor Direktorat	886,080,000	877,841,000	98.00%	99.07%	99.00%	100.00%
Komponen	002	Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP	886,080,000	877,841,000	98.00%	99.07%	99.00%	100.00%
Subkomponen	002.E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	886,080,000	877,841,000	98.00%	99.07%	99.00%	100.00%
Kegiatan	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	7,611,308,000	7,566,233,000	98.00%	99.41%	99.00%	99.86%
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4,352,289,000	4,327,545,000	98.00%	99.43%	99.00%	99.94%
RO	4197.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	282,030,000	277,764,000	98.00%	98.49%	99.00%	99.00%
Komponen	051	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	282,030,000	277,764,000	98.00%	98.49%	99.00%	99.00%
Subkomponen	051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	282,030,000	277,764,000	98.00%	98.49%	99.00%	99.00%
RO	4197.ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	922,008,000	917,257,000	98.00%	99.48%	99.00%	100.00%
Komponen	051	Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	922,008,000	917,257,000	98.00%	99.48%	99.00%	100.00%
Subkomponen	051.A	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	922,008,000	917,257,000	98.00%	99.48%	99.00%	100.00%

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Capaian			
					Keuangan (%)		Fisik (%)	
					RN	RL	RN	Fisik
RO	**4197.ABF.015**	**Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumaan**	**2,501,770,000**	**2,491,559,000**	**98.00%**	**99.59%**	**99.00%**	**100.00%**
Komponen	**051**	**Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**2,501,770,000**	**2,491,559,000**	**98.00%**	**99.59%**	**99.00%**	**100.00%**
Subkomponen	051.A	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1,654,149,000	1,651,348,000	98.00%	99.83%	99.00%	100.00%
Subkomponen	051.B	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	847,621,000	840,211,000	98.00%	99.13%	99.00%	100.00%
RO	**4197.ABF.016**	**Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**646,481,000**	**640,965,000**	**98.00%**	**99.15%**	**99.00%**	**100.00%**
Komponen	**051**	**Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**646,481,000**	**640,965,000**	**98.00%**	**99.15%**	**99.00%**	**100.00%**
Subkomponen	051.A	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	646,481,000	640,965,000	98.00%	99.15%	99.00%	100.00%
KRO	**AEE**	**Kemitraan**	**2,050,417,000**	**2,044,545,000**	**98.00%**	**99.71%**	**99.00%**	**100.00%**
RO	**4197.AEE.004**	**Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan**	**2,050,417,000**	**2,044,545,000**	**98.00%**	**99.71%**	**99.00%**	**100.00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1,279,384,000**	**1,274,824,000**	**98.00%**	**99.64%**	**99.00%**	**100.00%**
Subkomponen	051.A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1,279,384,000	1,274,824,000	98.00%	99.64%	99.00%	100.00%
Komponen	**052**	**Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**771,033,000**	**769,721,000**	**98.00%**	**99.83%**	**99.00%**	**100.00%**
Subkomponen	052.A	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	771,033,000	769,721,000	98.00%	99.83%	99.00%	100.00%
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**366,067,000**	**360,277,000**	**98.00%**	**98.42%**	**99.00%**	**99.00%**
RO	**4197.AFA.004**	**NSPK Pembiayaan Perumahan**	**366,067,000**	**360,277,000**	**98.00%**	**98.42%**	**99.00%**	**99.00%**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Capaian			
					Keuangan (%)		Fisik (%)	
					RN	RL	RN	Fisik
Komponen	**051**	**Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan**	**366,067,000**	**360,277,000**	**98.00%**	**98.42%**	**99.00%**	**99.00%**
Subkomponen	051.A	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	366,067,000	360,277,000	98.00%	98.42%	99.00%	99.00%
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**842,535,000**	**833,866,000**	**98.00%**	**98.97%**	**99.00%**	**99.51%**
RO	**4197.EAL.007**	**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**634,946,000**	**630,465,000**	**98.00%**	**99.29%**	**99.00%**	**100.00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**634,946,000**	**630,465,000**	**98.00%**	**99.29%**	**99.00%**	**100.00%**
Subkomponen	051.A	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	634,946,000	630,465,000	98.00%	99.29%	99.00%	100.00%
RO	**4197.EAL.008**	**Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**207,589,000**	**203,401,000**	**98.00%**	**97.98%**	**99.00%**	**98.00%**
Komponen	**051**	**Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**207,589,000**	**203,401,000**	**98.00%**	**97.98%**	**99.00%**	**98.00%**
Subkomponen	051.A	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	207,589,000	203,401,000	98.00%	97.98%	99.00%	98.00%

Target Capaian Fisik Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran adalah sebesar 99.00% dan berhasil mencapai kinerja fisik hingga 99,73%. Berdasarkan tabel di atas, hanya 3 (tiga) Output Kegiatan / Subkomponen yang tidak mencapai target kinerja keuangan yaitu:

1. Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bungka Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,66% atau terdapat deviasi sebesar 6,34% dari target. Dalam pelaksanaan Penyaluran Dana SBUM mampu melebihi dari target penyaluran yang direncanakan yaitu sebesar 101,63%. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong bank pelaksana untuk dapat segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan evaluasi triwulan secara daring, sehingga penggunaan anggaran dapat ditekan.

2. Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT dengan capaian kinerja keuangan sebesar 79,85% sehingga terjadi deviasi sebesar 18,15%. Dalam pelaksanaannya Program BP2BT berhasil menyalurkan kepada 11.999 Rumah Tangga atau sebesar 101,13% dari target yang direncanakan. Terdapat perbedaan capaian kinerja anggaran dan ketercapaian target penyaluran karena pelaksanaan kegiatan penyaluran dilakukan secara daring dan tidak menggunakan Tenaga Pendukung Penyaluran (TPP) sehingga penggunaan anggaran dapat ditekan.
3. Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,98% atau terdapat deviasi sebesar 0,02% dari target yang direncanakan.

4.3. OUTCOME / KEBERMANFAATAN

Pada tahun 2021, Program BP2BT dapat menyalurkan dana bantuan kepada 11.999 rumah tangga atau sebanyak Rp474.056.000.000,00 dari target penyaluran sebanyak 11.865 rumah tangga. Menggunakan asumsi dalam 1 (satu) rumah tangga terdapat 4 (empat) orang anggota keluarga, maka program BP2BT dapat mencapai kepada 47.996 orang. Selain itu, Program BP2BT juga dapat mendorong pembangunan rumah secara swadaya dengan adanya 15 debitur yang mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan sehingga dapat membangun rumah yang layak dan sesuai dengan Standar Rumah Sederhana Sehat yang ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Permukiman, Sarana, dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Nomor 403/KPTS/M/2002.

Program SBUM dapat menyalurkan dana bantuan uang muka kepada 176.105 rumah tangga atau sebanyak Rp714.902.000.000,00. Menggunakan asumsi 1 (satu) rumah tangga terdapat 4 (empat) anggota keluarga, maka program SBUM dapat mencapai kepada 704.420 orang.

Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat dapat menyalurkan kepada 13.329 rumah tangga melalui pendanaan PT.SMF dan 389 rumah tangga melalui pendanaan Tapera sehingga penyaluran dapat mencapai sebanyak 13.718 rumah tangga. Menggunakan asumsi 1 (satu) rumah tangga terdapat 4 (empat) anggota keluarga, maka program penyaluran melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat dapat mencapai 54.872 orang.

Pada program KPBU, berdasarkan *Pipeline* KPBU Bidang Perumahan, indikasi nilai investasi yang bisa didapatkan adalah sebanyak Rp36.931.000.000.000,00 atau dapat diperkirakan membangun perumahan susun sebanyak 29,892 unit hunian.

4.4. EVALUASI KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan. Selain itu, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melaksanakan pembahasan bersama dengan pemangku kepentingan terhadap capaian kinerja yang dilakukan secara triwulanan. Pembahasan bersama tersebut antara lain:

1. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Kuartal 1 (Q1) TA 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021;
2. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Kuartal 2 (Q2) TA 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021;
3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Kuartal 3 (Q3) TA 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021;
4. Rapat Kerja Pembiayaan Perumaha yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 November 2021 yang membahas Reviu Capaian RPJMN 2020 – 2024 Bidang perumahan dan pengembangan *housing ecosystem* dalam rangka mendukung RPJMN 2020 – 2024;

5. Pembahasan Draf Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 merupakan pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 yang disandingkan berdasarkan target pada Renstra dan DIPA.

Selain pembahasan evaluasi kinerja secara berkala, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan juga melakukan pembahasan atas rekomendasi yangd iberikan oleh Evaluator SAKIP Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dengan melaksanakan Pembahasan Hasil Evaluasi SAKIP 2020 pada tanggal 4 Agustus 2021.

4.5. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami 3 (tiga) kali pengurangan pagu pada T.A. 2021 di luar pagu dana PHLN akibat *refocusing* anggaran yaitu pada revisi tanggal 22 Februari 2021 terjadi pengurangan sebanyak Rp4.999.370.000,00, DIPA BA.033 Revisi-04 tanggal 28 Juli 2021 mengalami pengurangan pagu sebanyak Rp1.136.673.000,00, dan Revisi-05 DIPA BA.033 tanggal 20 Agustus 2021 mengalami pengurangan pagu sebanyak Rp2.952.249.000,00. Kronologis perubahan pagu dapat dilihat pada Bab 3 Kapasitas Organisasi Sub-bab 3.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi sebagai bentuk penyesuaian terhadap *refocusing* anggaran yang dialami dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 yaitu dengan melaksanakan pertemuan secara daring dengan pemangku kepentingan. Selain itu upaya yang dilakukan khususnya pada pelaksanaan Program BP2BT, Pengujian Manual Penetapan Penerima Manfaat dilakukan secara daring berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 03/SE/Dp/2020 tentang Pelaksanaan Pengujian Manual Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada Masa Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19).

4.6. KENDALA DAN STRATEGI

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam mencapai target kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Kendala dalam Mencapai Target Kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan (SK.)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kendala dalam Mencapai Target Kinerja
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Belum adanya KPBU Perumahan yang siap ditransaksikan sehingga jenis indikator “Tingkat

No.	Sasaran Kegiatan (SK.)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kendala dalam Mencapai Target Kinerja
			Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan" tidak dapat terpenuhi
3	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Kinerja penyaluran SSB Pembayaran KPR Tahun Sebelumnya dan penyaluran yang dilakukan oleh Tapera yang tidak maksimal.

Penyebab Kendala dan strategi yang telah diupayakan untuk mencapai target kinerja pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infarstruktur PU dan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Penyebab Kendala dan Strategi / Upaya yang Dilakukan pada Proyek KPBU

Penyebab Kendala	Strategi / Upaya yang Dilakukan
Pada Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung terdapat lahan yang digunakan oleh masyarakat seluas 4.360m^2 yang harus dibebaskan	Diperlukan pengadaan lahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan sesuai amanat Keputusan Menteri PUPR Nomor 419/KPTS/M/2021 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang Spuur.
Pada Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung tidak terdapat *supply* air minum dikarenakan PDAM belum melayani area, sehingga belum ada kepastian pemenuhan air oleh PDAM. Selain itu, proyek KPBU tidak dapat menggunakan air tanah sebagai sumber air utama karena berada di dalam area yang sangat dibatasi untuk menggunakan air tanah.	Saat ini proses penyusunan kajian Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung bersamaan dengan pelaksanaan proyek IPA Cipamokolan, sehingga Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung terkait dengan kemungkinan IPA Cipamokolan dapat men-*supply* air minum ke area proyek nantinya.

Penyebab Kendala dan stretegi yang telah diupayakan untuk mencapai target kinerja pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Penyebab Kendala dan Strategi / Upaya yang Dilakukan pada Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Penyebab Kendala	Strategi / Upaya yang Dilakukan
Terjadi keterlambatan pengajuan penagihan pembayaran SSB/SSM/SBK dari Bank Pelaksana kepada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Mendorong bank pelaksana melakukan percepatan penagihan pembayaran SSB/SSM kepada Satuan Kerja (Satker)
Berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terdapat beberapa debitur yang dihentikan subsidinya	Rekonsiliasi data antara Satker dengan bank pelaksana
Terdapat sisa dana penyaluran Program SSB	Pergeseran anggaran SSB/SSM untuk pemenuhan SBUM sebesar Rp85.000.000.000,00
Bank pelaksana belum seluruhnya menagihkan pembayaran SBK Perumahan kepada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Satker telah mengingatkan kepada bank pelaksana untuk segera mengirimkan tagihan SBK Perumahan
Perbedaan dalam perhitungan nilai subsidi Program SBK Perumahan antara bank pelaksana dengan Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Telah dilakukan rekonsiliasi perhitungan SBK Perumahan antara PIC Satker dan PIC bank pelaksana
Bank pelaksana terlambat dalam menyampaikan Pelaporan Lunas Dipercepat pada Program SSB/SSM/SBK	Satker telah memberikan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi kepada bank pelaksana untuk ditindaklanjuti.
Tapera belum beroperasi penuh pada Tahun 2021 karena masih dalam proses pemindahan Program FLPP yang semula dikelola oleh PPDPP/	Melakukan percepatan operasionalisasi setelah sistem Program FLPP telah secara penuh dikelola oleh BP Tapera

4.7. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Terdapat rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020, yaitu:

Tabel 21. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun 2020

Rekomendasi Strategi yang Dapat Dilaksanakan	Tindak Lanjut
Identifikasi Proyek KPBU	Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan Identifikasi Proyek yaitu pada lokasi sekitar area TOD Jadebotabek dan Kawasan Intin Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibukota Negara (IKN) yang baru.
Alternatif Sumber Penganggaran untuk Penyiapan Proyek KPBU	Pada Tahun 2021, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan pengajuan fasilitasi (PDF) kepada Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan penyusunan *Final Business Case* Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan saat ini sedang dalam proses pengajuan PDF untuk Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur.
Koordinasi dan Fasilitasi Bank Pelaksana, Pembiayaan Sekunder, dan Tapera	Koordinasi dan Fasilitasi dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan PT. SMF dan BP Tapera dalam perluasan mandat PT. SMF, penyaluran KPR, dan fasilitasi pemindahan Program FLPP dari PPDPP ke BP Tapera.
Koordinasi Pendataan Pembiayaan Perumahan	Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pembiayaan Perumahan dilakukan dengan bekerja sama dengan PPDPP untuk dilakukan secara bersamaan.

4.8. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melalui Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor PA.01.01-Ps/441/1 dengan Hal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelasakaan Pembiayaan Perumahan TA. 2020 tanggal 26 Juli 2021, rekomendasi yang diberikan oleh Evaluator terkait dengan Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja	Hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya sebaiknya menjadi salah satu masukan/pertimbangan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan di tahun selanjutnya (Rencana Strategis, Rencana Aksi).	Hasil evaluasi pada tahun sebelumnya telah dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021.
	Perlu dilakukan review terhadap Dokumen Perencanaan (Renstra) tingkat Eselon 2 secara berkala, agar terdapat keselerasan antara dokumen perencanaan dengan kondisi yang ingin dicapai.	Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 telah dilakukan/ Rencana reviu Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 – 2024 akan dilakukan pada tahun 2022 sebagai *midterm review* terhadap Rencana Strategis.
	Perlu adanya SOP tentang mekanisme atau cara penyusunan dan review Renstra pada Dit. PPP.	Menunggu mekanisme reviu Renstra atau SOP yang diatur oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR.
Pengukuran Kinerja	Laporan / monev bulanan sebaiknya mencantumkan target kinerja sesuai dengan IK.	Laporan Monev Bulanan sudah secara implisit mencakup IK khusunya IKK terkait dengan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan khusunya program terkait dengan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.
	Perlu adanya *cascading* di dalam organisasi untuk penyusunan SKP hingga tingkat individu.	Matriks Peran-Hasil Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Indikator Kinerja sebaiknya menjadi bahan dalam review kinerja berkala (Laporan Bulanan).	Laporan Monev Bulanan sudah secara implisit mencakup IK khusunya IKK terkait dengan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan khusunya program terkait dengan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.
	Perlunya penerapan *reward and punishment* berupa kenaikan atau penurunan peringkat maupun pemberian insentif/penghargaan dalam mencapai target kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran di luar dari pemberian *reward and punishment* secara sistem melalui Tunjangan Kinerja (sistem ini dari Kementerian PUPR).	Penerapan sistem *reward and punishment* perlu dibahas pada tingkat kementerian oleh Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR.
	Melakukan Review dan Evaluasi berkala terhadap implementasi SOP Pengukuran Kinerja.	Telah disusun draf SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
Pelaporan Kinerja	Perlu adanya pemetaan jumlah pegawai dengan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pancapaian sasaran.	Telah dilakukan pemetaan jumlah pegawai berdasarkan kebutuhan subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 25/ND/Pp/2022 Hal Penyampaian Hasil Pembahasan Pemetaan Pegawai di Lingkungan Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Diharapkan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan program serta implementasi kegiatan di unit organisasi di tahun berikutnya.	Informasi yang terdapat di dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan dan perencanaan di Tahun 2021.
	Diharapkan Laporan Kinerja harus menggambarkan hubungan kausalitas atau alur antara Output – Proses – Input.	Hubungan kausalitas digambarkan dengan Pohon Kinerja pada Bab 2 Perencanaan Kinerja Sub-bab 2.6. Pohon Kinerja dan tabel *Cascading* Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 pada Bab 4 Akuntabilitas Kinerja Sub-bab 4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
Evaluasi Internal	Perlu lampiran/berkas pelaksanaan Evaluasi yang telah dilakukan oleh DIT.PPP yang dilakukan secara berkala.	Laporan dan Nota Dinas pelaksanaan evaluasi berkala pada bagian lampiran.
Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	Memberlakuikan sistem *reward and punishment* terhadap kedisiplinan, kinerja, dan loyalitas pegawai sebagai motivasi kepada pegawai agar terpacu dalam mencapai sasaran kinera organisasi.	Penerapan sistem *reward and punishment* perlu dibahas pada tingkat kementerian oleh Badan Pengeloa Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR.
	Melakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak terkait, baik dari sisi internal (antar unit kerja di lingkungan direktorat jenderal) maupun dari pihak eksternal (perbankan dan K/L lain) untuk mencapai sasaran kinerja.	Setiap pelaksanaan rapat, pembahasan, maupun FGD di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sudah mengundang dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, PT. SMF, BP Tapera, PT. PII, PT. SMI, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, bank pelaksana, pengembang perumahan, direktorat jenderal

Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		teknis di lingkungan Kementerian PUPR, dll.
	Melakukan evaluasi secara berkala dalam pencapaian output dan outcome.	Sudah dilakukan evaluasi berkala yang dijelaskan pada Bab 4 Akuntabilitas Kinerja Sub-bab 4.4 Evaluasi Kinerja.
	Melakukan reviu dokumen perencanaan secara berkala terhadap pencapaian output/outcome.	1. Telah dilaksanakan Pembahasan terkait Reviu Capaian RPJMN 2020 – 2024 Bidang Perumahan saat Rapat Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 2. Review Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 – 2024 akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai jadwal *midterm review* yang telah direncanakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

4.9. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pada Tahun 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendapatkan penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemberian *reward* tersebut sebagai apresiasi atas implementasi penerapan Manajemen Risiko yang dinilai dengan membobotkan nilai pada 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pegawai dan pimpinan di unit kerja dalam rangka menciptakan budaya risiko;
2. Kesesuaian dan kelengkapan Profil Risiko sesuai dengan aturan berlaku;
3. Keikutsertaan dalam kegiatan yang diadakan dalam rangka Manajemen Risiko;
4. Efektivitas pengendalian Risiko.

Masing-masing aspek tersebut diberikan bobot sebesar 25% (maksimal) sehingga total bobot untuk aspek tersebut sebesar 100%.



Gambar 8. Sertifikat Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko Terbaik

BAB 5

PENUTUP

Bab ini menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2019 dan rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2021.

Tahun 2020 *Coronovirus Disease – 2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus korona yang menyerang pernapasan dan disebarkan melalui *droplet*. Covid-19 menyerang seluruh negara termasuk Indonesia menjadi pandemi global. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020 dan menyebabkan banyak perubahan termasuk cara bekerja dan berinteraksi sosial. Perubahan cara bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai kehadiran pegawai, penyelenggaraan aktivitas perkantoran, perjalanan dinas, penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, dan rapat, dan pengaturan penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Program dan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 dibiayai melalui APBN rupiah murni dan pinjaman luar negeri PHLN NAHP (BA 033). Pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja tahun anggaran 2021 dengan dilakukannya *refocusing* atau pengaturan kembali anggaran dan beberapa kali perubahan DIPA. *Refocusing* anggaran dilakukan terhadap dana rupiah murni, tidak dilakukan kepada dana pinjaman luar negeri PHLN NAHP. Terhadap dana luar negeri PHLN NAHP disediakan bertahap sesuai dengan rencana penyerapan. Selain itu juga Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Pelaksanaan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Perumahan (BA.999.087) dari Kementerian Keuangan.

Arah kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat – pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visum PUPR 2020 – 2024;

5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
8. Membentuk unit pelaksana teknis / memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai *paying agent* serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel;
10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali.

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan yaitu 24,25% dari target sebesar 25%. Capaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Kualitas dan Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 2% dari target 2%. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 48,83% dari target sebesar 50%.

Realisasi anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 berdasarkan e-monitoring PUPR adalah sebesar Rp499.120.086.000,00 atau sekitar 99,53% dari pagu akhir yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp501.469.015.000,00.

5.2. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga perlu menggunakan kesempatan ini untuk mendorong percepatan pencapaian target penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan sesuai dengan renstra DJPI.
2. Melakukan *midterm review* Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 – 2024.
3. Rekomendasi pelaksanaan proyek-proyek KPBU Sektor Perumahan adalah sebagai berikut:
    a. finalisasi pengajuan PDF KPBU Perumahan di KIPP-IKN dan Desa besar
    b. Penyiapan Berita Acara Kesepatan dan Penyiapan konsep/rancangan Perjanjian Fasilitas KBPU Karawang Spuur
    c. Penyempurnaan OBC Daan Mogot, Rusun TOD, dan Paldam
    d. Pelaksanaan PDF oleh PT PII KPBUSei Mangkei
    e. Penyelesaian FBC Cisaranten
    f. Penyusunan SOP Pemantauan KPBU Sektor Perumahan
4. Rekomendasi pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:
    a. Percepatan penyaluran BP2BT pada Semester 1 Tahun Anggaran 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program BP2BT
    b. Evaluasi berkala terhadap program SSB SBUM dalam rangka mendorong penyaluran bantuan yang tepat waktu
    c. Percepatan Pengundangan Rapermen PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Rapermen PUPR tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
    d. Penyempurnaan konsep/metode Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan;
    e. Sosialiasi dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Permen PUPR tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta sosialisasi Program BP2BT secara lebih luas.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penyaluran BP2BT Rumah Swadaya












8 JAWA TENGAH JATENG POS

Babinsa Karangtengah Bantu Jamban Warga

Melayani Sepenuh Hati dan Berkualitas

HUT KE-70 SMC RS Telogorejo

KILAS

Waspada La Nina BPBD Ingatkan Mitigasi

Ditpolairud Polda Gelar Tabur Bunga

SDN Gendongan 01 Ucapkan HGN & HUT PGRI

Peringati Hari Guru

Empat Guru Terima Subsidi Rumah Swadaya

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
EKO D. HERIPOERWANTO	**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	100%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%

KEGIATAN	**ANGGARAN**
1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp41.000.000.000,00
2. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp6.596.806.849.000,00

JAKARTA, JANUARI 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
EKO D. HERIPOERWANTO	**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	100%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp36.000.630.000,00
2. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp6.596.806.849.000,00

JAKARTA, FEBRUARI 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp58.371.627.000,00
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp7.775.628.000,00
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp6.596.806.849.000,00

JAKARTA, AGUSTUS 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN



HARYO BEKTI MARTOYOEDO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HERRY TRISAPUTRA ZUNA	**HARYO BEKTI MARTOYOEDO**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%

KEGIATAN	ANGGARAN	
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp	492.971.627.000,00
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp	7.611.308.000,00
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp	6.596.806.849.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

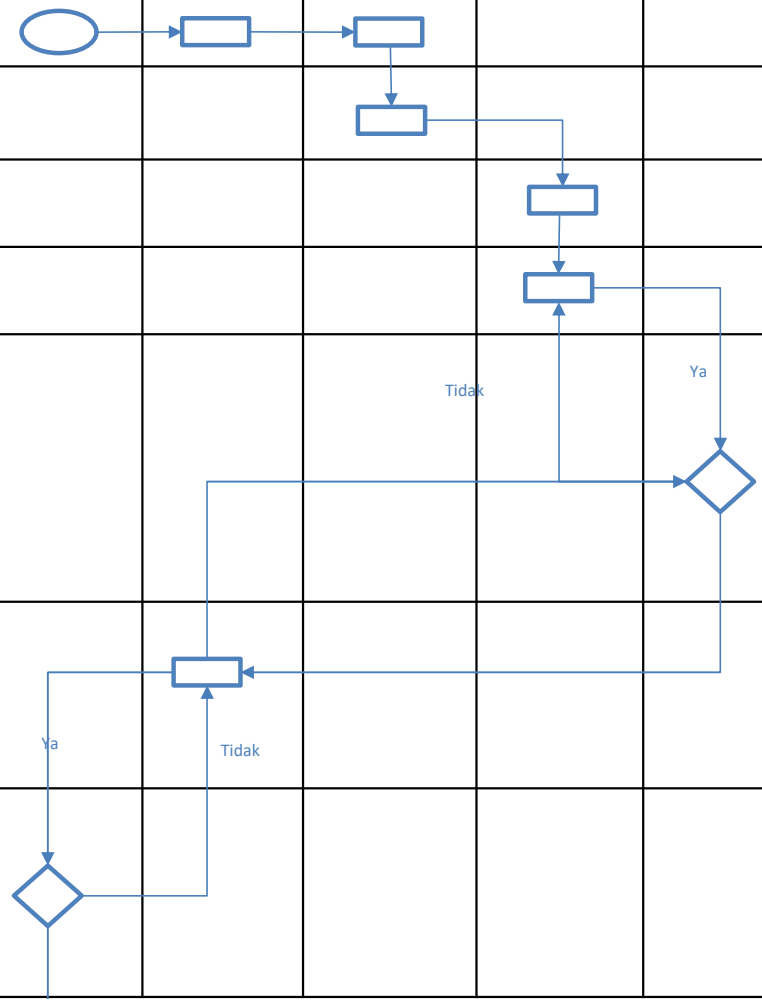
LAMPIRAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT **DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN** **DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**	**NOMOR SOP**	:
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan** **R. Haryo Bekti Martoyoedo, S.T.,**
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Mingguan

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perumahan 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun laporan mingguan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui pedoman dalam penyusunan laporan 4. Meningkatkan kualitas administrasi menjadi lebih tepat mutu, tepat waktu, dan biaya
KETERKAITAN:	**PERALATAN PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Kerja Sama Investasi Perumahan; 2. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Legalisasi Rencana Investasi Perumahan	1. Buku Catatan 2. Nota Dinas 3. Komputer, kalkulator, ATK
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila Pelaksanaan Penyusunan laporan mingguan ini tidak dilakukan maka kegiatan perkembangan kemajuan program tidak dapat terinformasi dan mempersulit perolehan masukan dan pengambilan keputusan.	Aktivitas Pelaksanaan Penyusunan laporan mingguan dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan untuk memantau perkembangan kemajuan program kegiatan dan menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung, sehingga dapat memberikan gambaran dasar dalam pengambilan keputusan terkait tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dicapai dan tindakan yang diperlukan.

SOP : PENYUSUNAN LAPORAN MINGGUAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Pelaksana Tugas Pemantauan Investasi/Evaluasi	Kasubdit (di lingkungan Dit. PPP)	Staf PIC Subdit (di lingkungan Dit. PPP)	SKBT Pelaksana Tugas Pemantauan Evaluasi Investasi dan Pelaporan Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan tugas pelaksanaan laporan mingguan						Arahan	10 menit	Arahan	
2	Menentukan tim penyiapan laporan mingguan						Staf Pic Subdit	10 menit	Staf Pic Subdit	Disiapkan staf setiap subdit
3	Menyiapkan laporan kegiatan/nota dinas untuk setiap pelaksanaan kegiatan						Laporan kegiatan/ Nota Dinas	15 menit	Nota Dinas	Nota Dinas setiap kegiatan
4	Penyusunan laporan mingguan						Draft Laporan Mingguan	300 menit	Draft Laporan Mingguan	Nota Dinas selama seminggu
5	Pemeriksaan laporan mingguan (konfirmasi apabila ada kendala, tantangan, dan hambatan dengan SKBT pelaksana) jika setuju melaporkan ke Koordinator Pelaksana, jika tidak dikembalikan lagi untuk diperbaiki ke Staf			Tidak		Ya	Draft Laporan Mingguan	30 menit	Draft Laporan Mingguan dengan paraf Kasi Pelaksana	
6	Pemeriksaan laporan mingguan (jika setuju melaporkan ke Direktur, jika tidak dikembalikan lagi untuk diperbaiki)		Tidak				Laporan Mingguan	30 menit	Draft Laporan Mingguan dengan ttd Koordinator Pelaksana	
7	Pemeriksaan laporan mingguan (jika setuju menerima, jika tidak dikembalikan ke Koordinator Pelaksana)	Ya					Laporan Mingguan ttd Koordinator Pelaksana	30 menit	Laporan mingguan dengan ttd Direktur & Tanda terima serta arahan tindak lanjut	



8	Tindak lanjut evaluasi hasil laporan mingguan						Arahan dan tindak lanjut dari Direktur	15 menit	Arahan pengendalian	
9	Pelaksanaa Pengendalian						Arahan tindak pengendalian	300 menit		
10	Mendokumentasikan & mengarsip laporan mingguan						Arsip Laporan Mingguan	10 menit	Dokumentasi Laporan Mingguan	Dokumentasi Arsip di Subdit & Sekretaris Direktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT **DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN** **DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**	**NOMOR SOP**	:
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan** **R. Haryo Bekti Martoyoedo, S.T.,** **NIP 19700820 199703 1 002**
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-undangn Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Permen Bappenas Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOmor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai Sipil.	1. Memahami indikator kinerja unit organisasi eselon II Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 2. Memahami perjanjian kinerja (PK) yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan; 3. Memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP); 4. Memahami SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) 5. Memiliki kewenangan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 6. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
KETERKAITAN:	**PERALATAN PERLENGKAPAN:**

1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan 2. SOP Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor Perumahan 3. SOP Penyusunan Bahan Rekomendasi Penetapan Pemrakarsa KPBU Sektor Perumahan (Unsolicited) 4. SOP Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan 5. SOP Penyiapan Dokumen Pengusahaan Penjaminan Pemerintah bagi Pembiayaan Infrastruktur Perumahan 6. SOP Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Perumahan 7. SOP Penyelenggaraan Konsultasi Pasar KPBU Sektor Perumahan 8. SOP Penyiapan dan Pendampingan Pengadaan Badan Usaha KPBU Sektor Perumahan 9. SOP Penyusunan Usulan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Sektor Perumahan 10. SOP Penyiapan dan Pendampingan Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) untuk KPBU Sektor Perumahan 11. SOP Penyusunan Konsep NSPK Pembiayaan Infrastruktur Perumahan 12. SOP Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Supervisi KPBU Sektor Perumahan 13. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan 14. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Legalisasi Rencana Investasi Perumahan 15. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Kerja Sama Investasi Perumahan	1. Renstra Dit.PP Perumahan; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 3. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Dit. PP Perumahan; 4. Laporan Rencana Aksi (T0) Unit Kerja Eselon II Dit.PP Perumahan; 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Unit Kerja Eselon II; 6. Data Realisasi Kinerja Anggaran dan Fisik ; 7. Data SDM Dit.PP Perumahan; 8. Data BMN Dit.PP Perumahan; 9. Petunjuk Teknis dan Buku Pedoman; Komputer; 10. Printer dan Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan waktu penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dit.PP Perumahan; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan penurunan kinerja unit kerja.	1. Copy berkas-berkas terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Dit.PP Perumahan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Dit.PP Perumahan; 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Dit.PP Perumahan dijadikan dasar pelaksanaan tugas.

(SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubbag TU	Kelompok Jabatan Fungsional	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi	Kasubdit Kerja Sama Investasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan						Surat dari sekjen c.q biro PA-KLN	10 Menit	Surat dari sekjen c.q biro PA-KLN , disposisi kepada Kasubbag TU	
2	Menugaskan untuk mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan						Surat dari sekjen c.q biro PA-KLN , disposisi kepada Kasubbag TU	10 Menit	Surat dari sekjen c.q biro PA-KLN , disposisi Fungsional/Pelaksana	
3	Menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan						Surat dari sekjen c.q biro PA-KLN , disposisi kepada Fungsional/Pelaksana	10.080 Menit	konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP)	
4	Memeriksa konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Jika Setuju menyerahkan kepada Kasubdit untuk dikoreksi Jika tidak setuju menyerahkan kepada Fungsional/Pelaksana untuk diperbaiki		TIDAK YA				konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP)	300 Menit	konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa oleh Kasuubag TU	
5	Memeriksa konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Jika Setuju menyerahkan kepada Kasubbag TU untuk diserahkan kepada Direktur , Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag TU untuk diperbaiki				TIDAK YA	YA TIDAK	konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa oleh Kasuubag TU	300 Menit	konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa oleh Kasubdit	
6	Menyerahkan konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang sudah disetujui oleh Kasubdit kepada Direktur untuk ditandatangani						konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa oleh Kasubdit	10 menit	konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa oleh Kasubdit	
7	Memeriksa Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Jika Setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubbag TU, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag TU untuk diperbaiki		TIDAK				konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa oleh Kasubdit	180 Menit	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Direktur	
8	Menugaskan Fungsional/Pelaksana untuk mengunggah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ke e-SAKIP dan menyampaikan kepada Dit.PSSPP						Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Direktur	15 menit	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) , Disposisi	
9	Mengunggah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ke e-SAKIP, dan disampaikan ke Dit.PSSPP						Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP), Disposisi	15 menit	Dokumentasi dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP)	

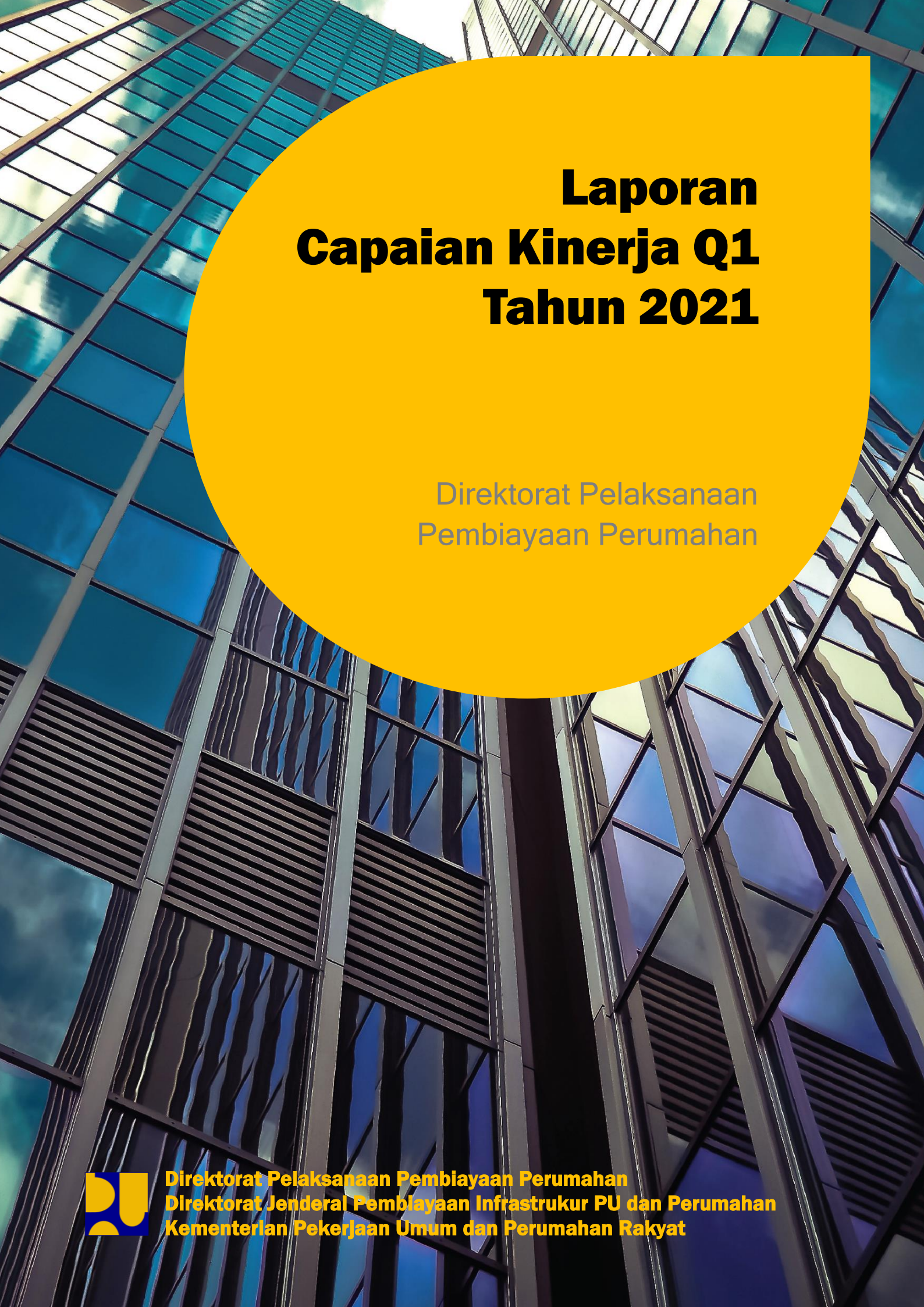
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT **DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN** **DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**	**NOMOR SOP**	:
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan** **R. Haryo Bekti Martoyoedo, S.T.,**
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Kerja Sama Investasi Perumahan

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 3.Permen Menpan 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP, 4. Permen Bappenas Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Memahami proses pemantauan 2. Memahami tugas dan fungsi Direktorat PP Perumahan 3. Memahami Proses tahapan KPBU
KETERKAITAN:	**PERALATAN PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penyelenggaraan Konsultasi Pasar KPBU Sektor Perumahan 2. SOP Penyiapan dan Pendampingan Pengadaan Badan Usaha KPBU Sektor Perumahan 3. SOP Penyusunan Usulan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Sektor Perumahan 4. SOP Penyiapan dan Pendampingan Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) untuk KPBU Sektor Perumahan 5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 6. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Legalisasi Rencana Investasi Perumahan	1. Timeline Kegiatan Proyek Infrastruktur KPBU Sumber Daya Air 2. *Term of Refference* 3. Komputer/*Printer* /*Scanner* 4. Jaringan Internet 5. Alat tulis
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP Penyusunan Pelaporan Pemantauan tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	1. Digunakan sebagai masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan. 2. Digunakan sebagai database.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Kerja Sama Investasi Perumahan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi	Kelompok Jabatan Fungsional	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Fungsional/Pelaksana Untuk Menyiapkan Konsep laporan pemantauan dan evaluasi koordinasi kerja sama investasi Perumahan				Agenda Kegiatan/Timeline	15 Menit	Disposisi	
2	Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi koordinasi kerja sama investasi Perumahan				Disposisi	180 Menit	Konsep Laporan	
3	Memeriksa Konsep laporan pemantauan dan evaluasi koordinasi kerja sama investasi Perumahan. Jika setuju menyampaikan kepada Direktur, jika tidak setuju diserahkan ke fungsional/pelaksana untuk diperbaiki	TIDAK YA			Konsep Laporan	60 Menit	Konsep Laporan yang sudah direview oleh Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi	
4	Memeriksa Konsep laporan pemantauan dan evaluasi koordinasi kerja sama investasi Perumahan. Jika Setuju menandatangi dan menyerahkan kepada Kasubdit, Jika tidak setuju menyerahkan kepada Fungsional/Pelaksana untuk diperbaiki		TIDAK	YA	Konsep Laporan yang sudah direview oleh Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi	30 Menit	Laporan yang sudah ditandatangani Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi, Disposisi	
5	Menyerahkan laporan pemantauan dan evaluasi koordinasi kerja sama investasi Perumahan kepada Sub Koordinator untuk didokumentasikan				Laporan yang sudah ditandatangani Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi, Disposisi	15 Menit	Laporan yang sudah ditandatangani Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi, Disposisi	
6	Mendokumentasikan & mengarsip laporan pemantauan dan evaluasi koordinasi kerja sama investasi Perumahan				Laporan, Disposisi	15 Menit	Dokumentasi Laporan	

LAMPIRAN



Laporan Capaian Kinerja Q1 Tahun 2021

Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrukur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan izin-Nya Laporan Quartal 1 (Q1) Tahun Anggaran 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Q1 merupakan amanah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan laporan ini merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dan laporan pertanggungjawaban kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Q1 ini disajikan dengan mengukur sasaran, program, kegiatan dan pencapaian kinerja yang dilakukan pada periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa input, output, dan outcome yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang direalisasikan.

Penyusunan Laporan Q1 berdasarkan masukan dari seluruh Subdirektorat dan Mitra Kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Diharapkan dengan adanya Laporan Q1, dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada periode tersebut. Serta upaya untuk meningkatkan kinerja di periode berikutnya sehingga memperoleh ketercapaian mutu dalam mencapai tujuan.

Demikian Laporan Q1 disampaikan, mohon maaf jika dalam penyusunan masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk menyempurnakan laporan pada periode berikutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Mei 2021
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 197008201997031002

Ringkasan Eksekutif

Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor SP DIPA- 0.33.16.1.631003/2021 sebesar Rp 36.000.630.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) progam Kegiatan yaitu Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Progam Dukungan Manajemen. Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terkait Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target capaian pada Tahun Anggaran 2021, sedangkan Sasaran Kegiatan terkait dengan Program Dukungan Manajemen yaitu (1) Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Hingga akhir Kuartal I Tahun Anggaran 2021 (Bulan Maret 2021), Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada bulan Februari 2021 dilihat dari e-monitoring online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status tanggal 1 April 2021 memiliki kinerja realisasi anggaran sebesar Rp 2.615.796.000,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 36.000.630.000,00 atau sebesar 7,53%.

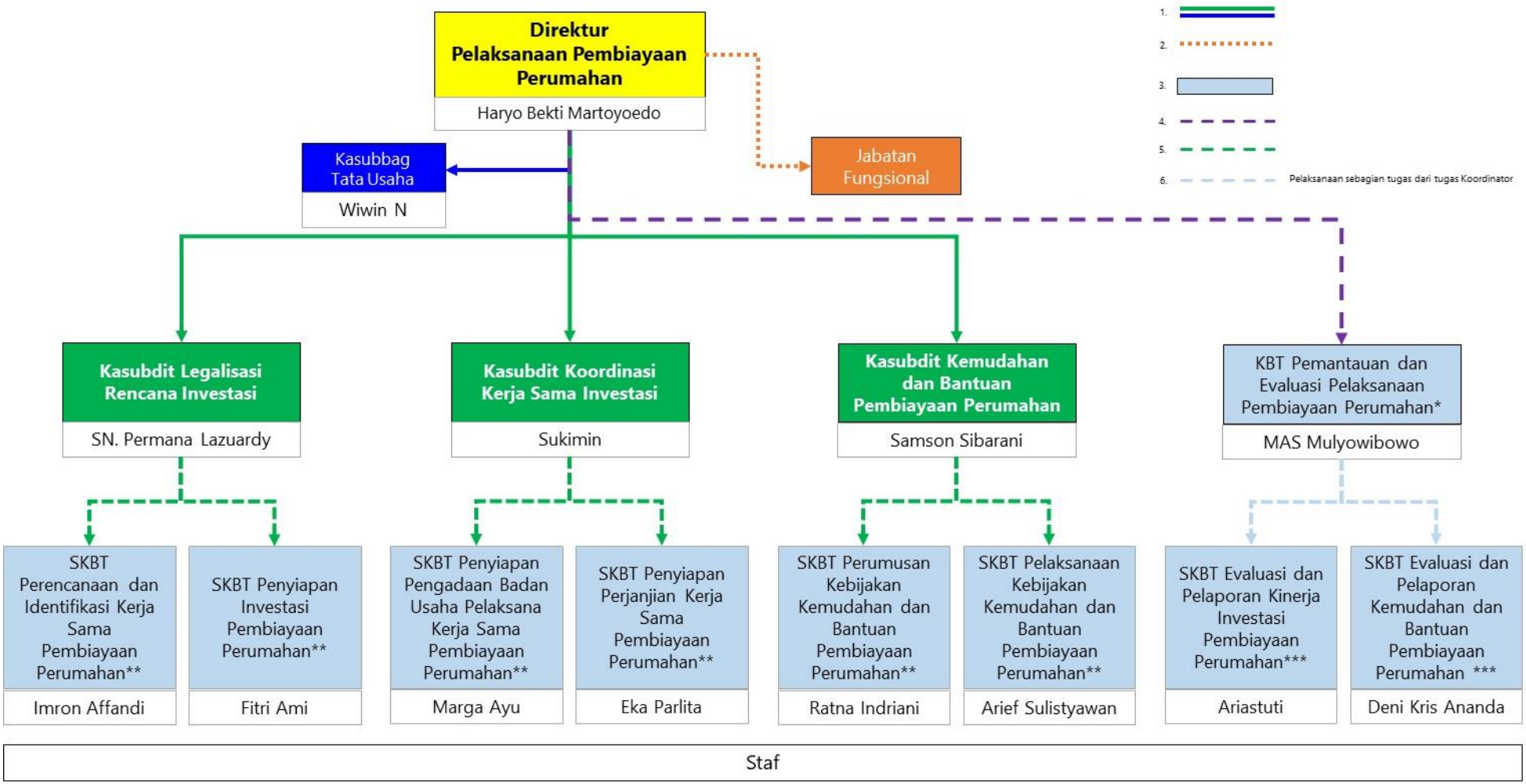
Proyek KPBU Bidang Perumahan

Kemudahan dan Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat memiliki rumah antara lain Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pada tahun Q1 2021, FLPP memiliki target penyaluran sebanyak 157.500 unit, target SBUM pada 2021 sebanyak 157.500 unit, dan untuk BP2BT memiliki target sebanyak 18.950 unit. Sedangkan untuk SSB pada tahun 2021 ini merupakan pembayaran untuk tahun sebelumnya (menggulung) dengan besar target penyaluran sebesar Rp 5.960.000.000.000,00. Pencapaian hingga 31 Maret 2021 untuk program FLPP adalah sebanyak 21.037 unit atau sebesar Rp 2.290.895.504.448,00, capaian SBUM sebanyak 1.736 unit atau sebesar Rp 7.748.000.000,00, dan BP2BT belum tersalurkan. Penyaluran SSB ulang tahun hingga 31 Maret 2021 adalah sebanyak 93.400 unit atau sebesar Rp 28.698.882.366,00.

Tujuan dari Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kementerian PUPR turut hadir dalam memberikan dukungan agar proses kebutuhan dasar manusia yaitu rumah dapat terpenuhi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema oembiayaan perumahan dapat tercapai.

Struktur Organisasi



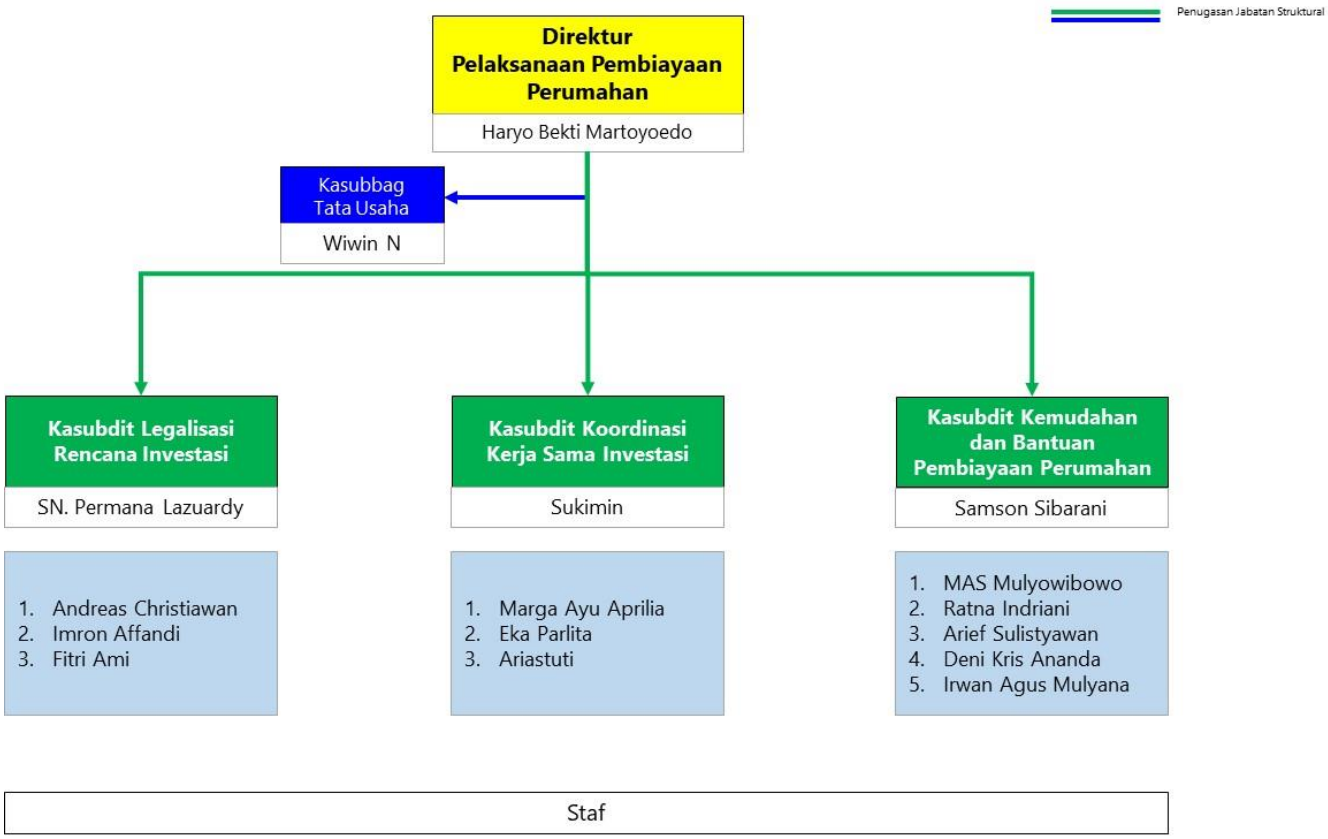
* *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.1a*

** *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.2a*

*** *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.2c*

Struktur Administrasi Organisasi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Perencanaan Kegiatan Keuangan

Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor SP DIPA- 0.33.16.1.631003/2021 sebesar Rp 36.000.630.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) progam Kegiatan yaitu Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Progam Dukungan Manajemen. Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terkait Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai yaitu:

1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target capaian pada Tahun Anggaran 2021

Sasaran Kegiatan terkait dengan Program Dukungan Manajemen yaitu:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumhan
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Target Capaian Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	100%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	70,88%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	50%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Rp36.000.630.000,00
2. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp6.596.806.849.000,00

JAKARTA, FEBRUARI 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

Hubungan antara Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dapat dilihat pada table Cascading Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berikut:

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00 %	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yag disusun dibandingkan dengan target	50,00%	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	15,00 %	54,00 %	24,25 %
												Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan			
										Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	40,0%		
										Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	30%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi	18,00 %		
												Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan			

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
										Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	20,00 %		
										NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	15,00 %		
							Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50,00%	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan	35%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	21,00 %	43,00 %	
												Jumah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan			
										Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	35,00 %		

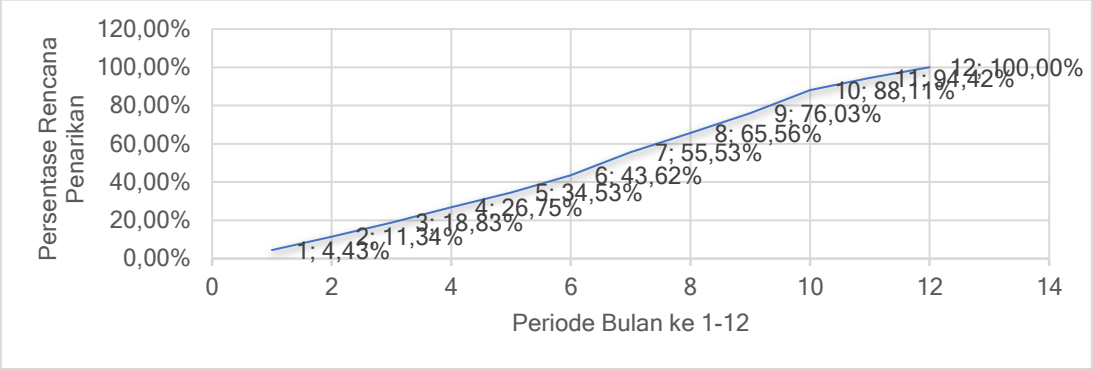
Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
										Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	30,00 %		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00 %	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)		100,00%	Layanan Perkantoran	100 %	Jumlah Layanan Pelaksanaan Oprasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	100,00 %	100,00 %	2,00%
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastrukt	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaa	50,00 %	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Fasilitasi Pembiayaa	30,00%	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: SMF (Dana Masyarakat)	100,00 %	30,00 %	42,06 %

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
	ur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Permukiman yang Layak dan Aman	yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		n Perumahan		Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)	n Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target				Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: Tapera (Dana Masyarakat)			
							Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target	50,00%	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	40%	Jumlah Penyaluran Bantyuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	25,25 %	27,79 %	
										Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	60%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SSB (BA.999.07)	30,34 %		
												Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SBUM (BA.999.07)			

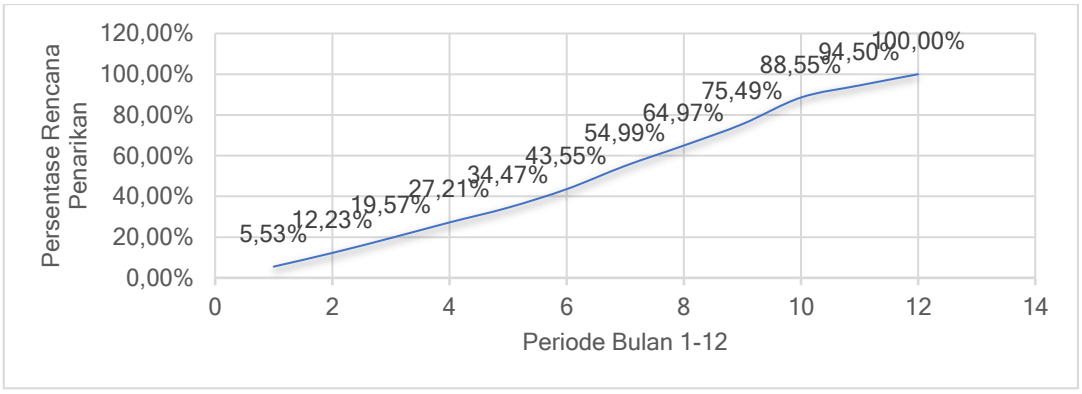
Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
							Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	20,00%	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Jumah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayan Perumahan	81,67 %	26,33 %	
												Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
												Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan			
										NSPK Pengembangan Skema	20%	Jumlah Perumusan NSPK Pengembang	20,0%		

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
										Pembiayaan Perumahan		an Skema Pembiayaan Perumahan			
										Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	15,00 %		
										Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	15%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	15,00 %		

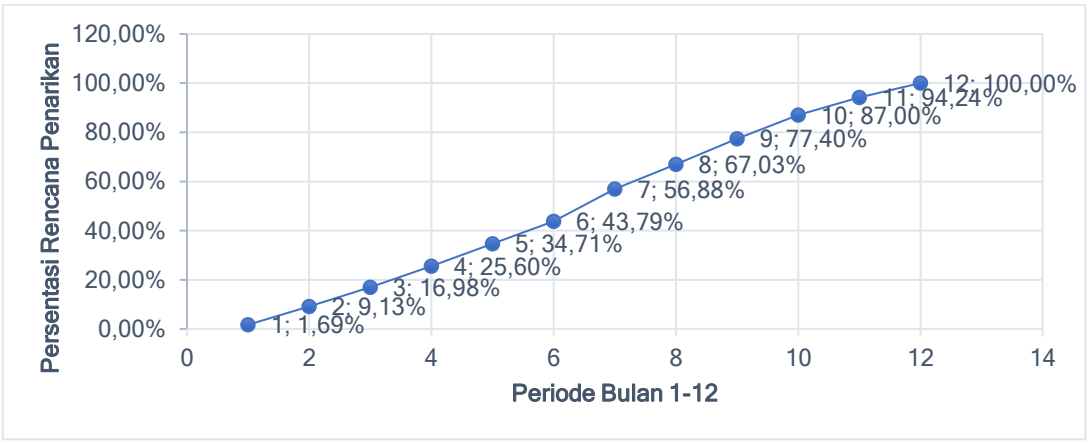
Selama tatanan kenormalan baru, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengoptimalkan pemanfaatan ruang kerja sesuai aturan dan tetap memaksimalkan kegiatan melalui teknologi. Berikut merupakan prognosis kinerja keuangan DIrektorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2020



Gambar 1 Rencana Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2021



Gambar 2 Rencana Pelaksanaan Anggaran Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021



Gambar 3 Rencana Pelaksanan Anggaran Progam Dukungan Manajemen 2021

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki rencana target penyerapan akhir tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian prognosis anggaran per kegiatan sebagaimana table berikut:

Cascading	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Unor	**Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**													
Program	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**25.750.000.000**	**5,53%**	**12,23%**	**19,57%**	**27,21%**	**34,47%**	**43,55%**	**54,99%**	**64,97%**	**75,49%**	**88,55%**	**94,50%**	**100,00%**
Kegiatan	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**25.750.000.000**	**5,53%**	**12,23%**	**19,57%**	**27,21%**	**34,47%**	**43,55%**	**54,99%**	**64,97%**	**75,49%**	**88,55%**	**94,50%**	**100,00%**
KRO	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**5.500.000.000**	**1,71%**	**8,13%**	**15,87%**	**25,61%**	**33,65%**	**44,21%**	**55,04%**	**65,73%**	**74,92%**	**84,76%**	**92,86%**	**100,00%**
RO	**Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**5.500.000.000**	**1,71%**	**8,13%**	**15,87%**	**25,61%**	**33,65%**	**44,21%**	**55,04%**	**65,73%**	**74,92%**	**84,76%**	**92,86%**	**100,00%**
Paket	**Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1.500.000.000**	**4,00%**	**11,00%**	**18,00%**	**25,00%**	**33,00%**	**43,00%**	**53,00%**	**66,50%**	**76,50%**	**86,50%**	**95,50%**	**100,00%**
	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	750.000.000	5,00%	12,00%	18,00%	22,00%	28,00%	38,00%	48,00%	68,00%	78,00%	88,00%	96,00%	100,00%
	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	750.000.000	3,00%	10,00%	18,00%	28,00%	38,00%	48,00%	58,00%	65,00%	75,00%	85,00%	95,00%	100,00%
	Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayan Perumahan	**600.000.000**	**0,00%**	**1,00%**	**6,00%**	**18,00%**	**27,00%**	**39,00%**	**61,00%**	**73,00%**	**80,00%**	**88,00%**	**95,00%**	**100,00%**
	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	600.000.000	0,00%	1,00%	6,00%	18,00%	27,00%	39,00%	61,00%	73,00%	80,00%	88,00%	95,00%	100,00%

Cascading	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	**750.000.000**	**1,00%**	**5,00%**	**12,00%**	**28,00%**	**32,00%**	**48,00%**	**58,00%**	**68,00%**	**78,00%**	**92,00%**	**96,00%**	**100,00%**
	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	750.000.000	1,00%	5,00%	12,00%	28,00%	32,00%	48,00%	58,00%	68,00%	78,00%	92,00%	96,00%	100,00%
	Belanja Penanganan Covid-19	**2.650.000.000**	**1,00%**	**9,00%**	**18,00%**	**27,00%**	**36,00%**	**45,00%**	**54,00%**	**63,00%**	**72,00%**	**81,00%**	**90,00%**	**100,00%**
KRO	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**750.000.000**	**2,00%**	**8,00%**	**15,00%**	**20,00%**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**	**68,00%**	**86,00%**	**90,00%**	**92,00%**	**100,00%**
RO	**NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	**2,00%**	**8,00%**	**15,00%**	**20,00%**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**	**68,00%**	**86,00%**	**90,00%**	**92,00%**	**100,00%**
Komponen	**Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	**2,00%**	**8,00%**	**15,00%**	**20,00%**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**	**68,00%**	**86,00%**	**90,00%**	**92,00%**	**100,00%**
Paket	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	750.000.000	2,00%	8,00%	15,00%	20,00%	38,00%	43,00%	56,00%	68,00%	86,00%	90,00%	92,00%	100,00%
KRO	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**1.500.000.000**	**5,00%**	**12,00%**	**22,00%**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**	**68,00%**	**76,00%**	**86,00%**	**90,00%**	**98,00%**	**100,00%**
RO	**Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1.500.000.000**	**5,00%**	**12,00%**	**22,00%**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**	**68,00%**	**76,00%**	**86,00%**	**90,00%**	**98,00%**	**100,00%**
Komponen	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1.500.000.000**	**5,00%**	**12,00%**	**22,00%**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**	**68,00%**	**76,00%**	**86,00%**	**90,00%**	**98,00%**	**100,00%**

Cascading	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Paket	Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Konstruksi Rumah untuk MBR yang Mengikui Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	500.000.000	5,00%	12,00%	22,00%	38,00%	43,00%	56,00%	68,00%	76,00%	86,00%	90,00%	98,00%	100,00%
	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	5,00%	12,00%	22,00%	38,00%	43,00%	56,00%	68,00%	76,00%	86,00%	90,00%	98,00%	100,00%
KRO	**Koordinasi**	**500.000.000**	**1,00%**	**3,00%**	**8,00%**	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**	**84,00%**	**91,00%**	**100,00%**
RO	**Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**1,00%**	**3,00%**	**8,00%**	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**	**84,00%**	**91,00%**	**100,00%**
Komponen	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**1,00%**	**3,00%**	**8,00%**	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**	**84,00%**	**91,00%**	**100,00%**
Paket	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	500.000.000	**1,00%**	**3,00%**	**8,00%**	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**	**84,00%**	**91,00%**	**100,00%**
KRO	**Pelayanan Publik Lainnya**	**7.500.000.000**	**2,00%**	**10,00%**	**17,00%**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**	**90,00%**	**94,00%**	**100,00%**
RO	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**3.500.000.000**	**2,00%**	**10,00%**	**17,00%**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**	**90,00%**	**94,00%**	**100,00%**
Komponen	**Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**3.500.000.000**	2,00%	10,00%	17,00%	23,00%	30,00%	39,00%	53,00%	62,00%	74,00%	90,00%	94,00%	100,00%
Paket	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	3.500.000.000	2,00%	10,00%	17,00%	23,00%	30,00%	39,00%	53,00%	62,00%	74,00%	90,00%	94,00%	100,00%
RO	**Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**4.000.000.000**	**2,00%**	**10,00%**	**17,00%**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**	**90,00%**	**94,00%**	**100,00%**

Cascading	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Komponen	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**4.000.000.000**	2,00%	10,00%	17,00%	23,00%	30,00%	39,00%	53,00%	62,00%	74,00%	90,00%	94,00%	100,00%
Paket	Dana Operaional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN	4.000.000.000	2,00%	10,00%	17,00%	23,00%	30,00%	39,00%	53,00%	62,00%	74,00%	90,00%	94,00%	100,00%
KRO	**Subsidi kepada Keluarga**	**10.000.000.000**	**10,84%**	**16,96%**	**24,08%**	**30,48%**	**36,64%**	**44,56%**	**54,24%**	**64,80%**	**74,48%**	**89,44%**	**95,60%**	**100,00%**
RO	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**10.000.000.000**	**10,84%**	**16,96%**	**24,08%**	**30,48%**	**36,64%**	**44,56%**	**54,24%**	**64,80%**	**74,48%**	**89,44%**	**95,60%**	**100,00%**
Komponen	**Penyaluran Bantua Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**10.000.000.000**	10,84%	16,96%	24,08%	30,48%	36,64%	44,56%	54,24%	64,80%	74,48%	89,44%	95,60%	100,00%
Paket	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	8.800.000.000	1,00%	7,00%	14,00%	21,00%	28,00%	37,00%	48,00%	60,00%	71,00%	88,00%	95,00%	100,00%
	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	1.200.000.000	83,00%	90,00%	98,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
Program	**Program Dukungan Manajamen**	**10.250.630.000**	**1,69%**	**9,13%**	**16,98%**	**25,60%**	**34,71%**	**43,79%**	**56,88%**	**67,03%**	**77,40%**	**87,00%**	**94,24%**	**100,00%**
Kegiatan	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**1.000.000.000**	**5,00%**	**10,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**	**90,00%**	**98,00%**	**100,00%**
KRO	**Layanan Perkantoran**	**1.000.000.000**	**5,00%**	**10,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**	**90,00%**	**98,00%**	**100,00%**
RO	**Operasionalisasi Kantor Direktorat**	**1.000.000.000**	**5,00%**	**10,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**	**90,00%**	**98,00%**	**100,00%**
Komponen	**Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP**	**1.000.000.000**	**5,00%**	**10,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**	**90,00%**	**98,00%**	**100,00%**
Paket	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000.000	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	65,00%	75,00%	85,00%	90,00%	98,00%	100,00%

Cascading	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Kegiatan	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**9.250.630.000**	**1,33%**	**9,04%**	**16,66%**	**25,13%**	**34,13%**	**43,11%**	**56,01%**	**66,17%**	**76,58%**	**86,67%**	**93,84%**	**100,00%**
KRO	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**5.096.630.000**	**0,06%**	**8,24%**	**15,28%**	**24,92%**	**35,36%**	**45,51%**	**57,77%**	**67,04%**	**76,99%**	**85,94%**	**93,64%**	**100,00%**
RO	**Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**664.320.000**	**0,49%**	**8,99%**	**19,74%**	**28,24%**	**35,98%**	**45,23%**	**56,73%**	**64,47%**	**72,97%**	**85,98%**	**93,99%**	**100,00%**
Komponen	**Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**664.320.000**	**0,49%**	**8,99%**	**19,74%**	**28,24%**	**35,98%**	**45,23%**	**56,73%**	**64,47%**	**72,97%**	**85,98%**	**93,99%**	**100,00%**
Paket	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500.000.000	0,00%	8,00%	19,00%	27,00%	34,00%	43,00%	55,00%	62,00%	70,00%	84,00%	93,00%	100,00%
	Belanja Penanganan Covid-19	164.320.000	**2,00%**	**12,00%**	**22,00%**	**32,00%**	**42,00%**	**52,00%**	**62,00%**	**72,00%**	**82,00%**	**92,00%**	**97,00%**	**100,00%**
RO	**Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1.000.000.000**	0,00%	4,00%	11,00%	23,00%	31,00%	45,00%	52,00%	63,00%	75,00%	84,00%	92,00%	100,00%
Komponen	**Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1.000.000.000**	**0,00%**	**4,00%**	**11,00%**	**23,00%**	**31,00%**	**45,00%**	**52,00%**	**63,00%**	**75,00%**	**84,00%**	**92,00%**	**100,00%**
Paket	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1.000.000.000	0,00%	4,00%	11,00%	23,00%	31,00%	45,00%	52,00%	63,00%	75,00%	84,00%	92,00%	100,00%
RO	**Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumaan**	**2.682.310.000**	0,00%	11,09%	16,96%	24,79%	36,66%	46,74%	60,40%	69,48%	79,57%	86,91%	94,35%	100,00%
Komponen	**Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**2.682.310.000**	0,00%	11%	16,96%	24,79%	36,66%	46,74%	60,40%	69,48%	79,57%	86,91%	94,35%	100,00%

Cascading	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Paket	Penyusunan OBC Proyek KPBU Perumahan	1.750.000.000	0,00%	17,00%	26,00%	38,00%	45,00%	53,00%	67,00%	74,00%	82,00%	89,00%	94,00%	100,00%
	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	932.310.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,00%	35,00%	48,00%	61,00%	75,00%	83,00%	95,00%	100,00%
RO	**Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	0,00%	3,00%	11,00%	25,00%	36,00%	42,00%	57,00%	66,00%	74,00%	85,00%	93,00%	100,00%
Komponen	**Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	**0,00%**	**3,00%**	**11,00%**	**25,00%**	**36,00%**	**42,00%**	**57,00%**	**66,00%**	**74,00%**	**85,00%**	**93,00%**	**100,00%**
Paket	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan	750.000.000	0,00%	3,00%	11,00%	25,00%	36,00%	42,00%	57,00%	66,00%	74,00%	85,00%	93,00%	100,00%
KRO	**Kemitraan**	**2.500.000.000**	**3,80%**	**11,40%**	**19,80%**	**26,40%**	**33,80%**	**40,60%**	**54,40%**	**66,40%**	**77,60%**	**87,60%**	**94,60%**	**100,00%**
RO	**Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan**	**2.500.000.000**	3,80%	11,40%	19,80%	26,40%	33,80%	40,60%	54,40%	66,40%	77,60%	87,60%	94,60%	100,00%
Komponen	**Pelaksanaaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1.500.000.000**	**3,00%**	**11,00%**	**19,00%**	**26,00%**	**33,00%**	**41,00%**	**54,00%**	**66,00%**	**78,00%**	**88,00%**	**95,00%**	**100,00%**
Paket	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1.500.000.000	3,00%	11,00%	19,00%	26,00%	33,00%	41,00%	54,00%	66,00%	78,00%	88,00%	95,00%	100,00%
Komponen	**Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1.000.000.000**	**5,00%**	**12,00%**	**21,00%**	**27,00%**	**35,00%**	**40,00%**	**55,00%**	**67,00%**	**77,00%**	**87,00%**	**94,00%**	**100,00%**
Paket	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	1.000.000.000	5,00%	12,00%	21,00%	27,00%	35,00%	40,00%	55,00%	67,00%	77,00%	87,00%	94,00%	100,00%
KRO	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**500.000.000**	**1,00%**	**5,00%**	**16,00%**	**27,00%**	**34,00%**	**42,00%**	**56,00%**	**67,00%**	**75,00%**	**83,00%**	**91,00%**	**100,00%**
RO	**NSPK Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**1,00%**	**5,00%**	**16,00%**	**27,00%**	**34,00%**	**42,00%**	**56,00%**	**67,00%**	**75,00%**	**83,00%**	**91,00%**	**100,00%**

Cascading	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Komponen	**Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**1,00%**	**5,00%**	**16,00%**	**27,00%**	**34,00%**	**42,00%**	**56,00%**	**67,00%**	**75,00%**	**83,00%**	**91,00%**	**100,00%**
Paket	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	500.000.000	1,00%	5,00%	16,00%	27,00%	34,00%	42,00%	56,00%	67,00%	75,00%	83,00%	91,00%	100,00%
KRO	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**1.154.000.000**	**1,74%**	**9,22%**	**16,22%**	**22,48%**	**29,48%**	**38,48%**	**51,70%**	**61,48%**	**73,22%**	**89,48%**	**94,26%**	**100,00%**
RO	**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**854.000.000**	**2,00%**	**10,00%**	**17,00%**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**	**90,00%**	**94,00%**	**100,00%**
Komponen	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**854.000.000**	**2,00%**	**10,00%**	**17,00%**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**	**90,00%**	**94,00%**	**100,00%**
Paket	Pemantauan dan Evaluasi KPBU Bidang Perumahan	854.000.000	2,00%	10,00%	17,00%	23,00%	30,00%	39,00%	53,00%	62,00%	74,00%	90,00%	94,00%	100,00%
RO	**Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**300.000.000**	**1,00%**	**7,00%**	**14,00%**	**21,00%**	**28,00%**	**37,00%**	**48,00%**	**60,00%**	**71,00%**	**88,00%**	**95,00%**	**100,00%**
Komponen	**Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**300.000.000**	**1,00%**	**7,00%**	**14,00%**	**21,00%**	**28,00%**	**37,00%**	**48,00%**	**60,00%**	**71,00%**	**88,00%**	**95,00%**	**100,00%**
Paket	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	300.000.000	1,00%	7,00%	14,00%	21,00%	28,00%	37,00%	48,00%	60,00%	71,00%	88,00%	95,00%	100,00%
		36.000.630.000	4,43%	11,34%	18,83%	26,75%	34,53%	43,62%	55,53%	65,56%	76,03%	88,11%	94,42%	100,00%

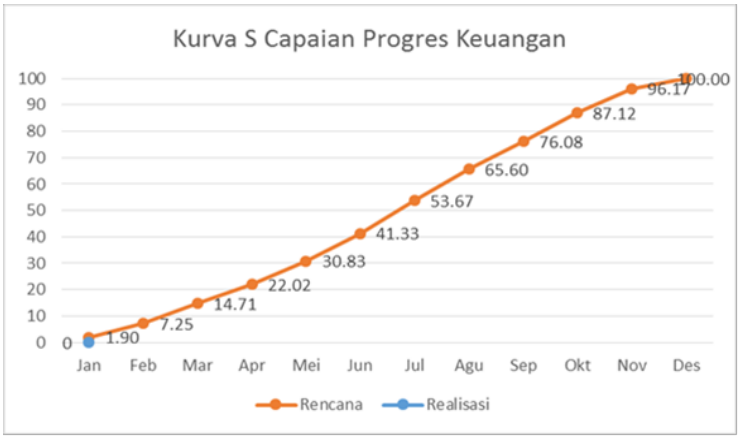
Capaian
Kinerja Keuangan

JANUARI 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 dilihat dari *e-monitoring* online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 29 Januari 2021 sebagai berikut:

• Kinerja realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari total pagu anggaran Rp.41.000.000.000 yang mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran menjadi Rp.33.186.310.000 (berdasarkan surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: Pr.02.01-Ps/30, tanggal 19 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021).

• Capaian progres keuangan masih 0 % serta progres fisik juga masih 0%. Apabila dilihat dalam grafik kurva S tampak pada Gambar disamping:



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan

Untuk rincian realisasi anggaran pada Bulan Januari dapat dilihat pada Table berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pada Februari TA. 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Target	PAGU Rp.	Ralisasi Rp.	PIC					KET
					KEUANGAN		FISIK			
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	KINERJA	
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		***5 Rekomendasi Kebijakan, 2 Kesepakatan, 1 NSPK, 3 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, 1 Layanan Perkantoran,312 Subsidi Kepada Keluarga, 2 Layanan Publik, 1 Kegiatan Koordinasi***	***33,186,310,000***	-						
1	**Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi**	**5 Rekomendasi Kebijakan, 1 NSPK, 1 Kegiatan Koordinasi**	**6,532,310,000**	-		-		-		
	Penyusunan Progam dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		500,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Penyusunan Identifikasi Potensi dan SP Proyek KBPU Bidang Perumahan		1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan		1,750,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan		932,310,000	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan		750,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Penyusunan standar penyiapan KPBU Perumahan		500,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		600,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tabungan Perumahan Rakyat		500,000,000	0	0	0	0	0	0	

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pada Februari TA. 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Target	PAGU Rp.	Ralisasi Rp.	PIC					KET
					KEUANGAN		FISIK			
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	KINERJA	
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		***5 Rekomendasi Kebijakan, 2 Kesepakatan, 1 NSPK, 3 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, 1 Layanan Perkantoran,312 Subsidi Kepada Keluarga, 2 Layanan Publik, 1 Kegiatan Koordinasi***	***33,186,310,000***	***-***						
1	**Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi**	**5 Rekomendasi Kebijakan, 1 NSPK, 1 Kegiatan Koordinasi**	**6,532,310,000**	**-**		**-**		**-**		
	Penyusunan Progam dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		500,000,000	0	0	0	0	0	0	
2	**Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi**	**2 Kesepakatan, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal,**	**3,654,000,000**	**-**						
	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan		1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan		1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Pemantauan dan Evaluasi KPBU Bidang Perumahan		854,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		300,000,000	0	0	0	0	0	0	
3	**Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**1 NSPK, 2 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal,**	**4,500,000,000**							
	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR		750,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan		750,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan		750,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR		750,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Konstruksi Rumah untuk MBR yang Mengikuti Program Kemudahan dan		500,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan		1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	
4	**Jumlah Layanan Perkantoran**	**1 Layanan Perkantoran,**	**1,000,000,000**							
	Operasionalisasi dan pemeliharaan kantor Direktorat PPP		1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	
5	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**312 Subsidi Kepada Keluarga, 2 Layanan Publik,**	**14,000,000,000**							
	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT		8,800,000,000	0	0	0	0	0	0	
	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT		1,200,000,000		0	0	0	0	0	
	Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan PHLN		4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	
6	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**1 Layanan**	**3,500,000,000**							
	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		3,500,000,000	0	0	0	0	0	0	

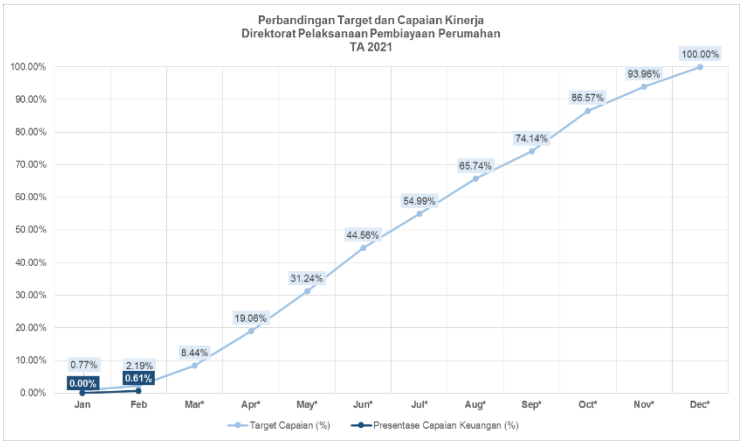
FEBRUARI 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada bulan Februari 2021 dilihat dari e-monitoring online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status tanggal 1 Maret 2021, sebagai berikut:

- Kinerja realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebesar Rp. 201.863.000,00 dari total pagu anggaran Rp. 36.000.630.000,00

1.

- Capaian progres keuangan masih 0,61% serta progres fisik juga masih 0,70%.Apabila dilihat dalam grafik kurva S tampak pada Gambar kurva disamping berikut:



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan

Rincian realisasi anggaran pada Bulan Februari 2021 dapat dilihat pada Tabel 1. Detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pada Februari TA. 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Target	PAGU Rp.	Ralisasi Rp.	PIC					KET
					KEUANGAN		FISIK			
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	KINERJA	
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		***5 Rekomendasi Kebijakan, 2 Kesepakatan, 1 NSPK, 3 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, 1 Layanan Perkantoran,312 Subsidi Kepada Keluarga, 2 Layanan Publik, 1 Kegiatan***	***36,000,630,000***	***201,863,000***	***11.83***	***0.61***	***12.29***	***0.70***		
1	**Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi**	**5 Rekomendasi Kebijakan, 1 NSPK, 1 Kegiatan Koordinasi**	**6,532,310,000**	**-**	**5.13**	**-**	**5.59**	**-**		
	Penyusunan Progam dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		500,000,000	-	8.00	0.00	8.50	0.00		
	Penyusunan Identifikasi Potensi dan SP Proyek KBPU Bidang Perumahan		1,000,000,000	-	4.00	0.00	4.75	0.00		
	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan		1,750,000,000	-	17.00	0.00	17.50	0.00		
	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan		932,310,000	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan		750,000,000	-	3.00	0.00	3.50	0.00		
	Penyusunan standar penyiapan KPBU Perumahan		500,000,000	-	5.00	0.00	5.50	0.00		
	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		600,000,000	-	1.00	0.00	1.50	0.00		
	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tabungan Perumahan Rakyat		500,000,000	-	3.00	0.00	3.50	0.00		

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Target	PAGU Rp.	Ralisasi Rp.	PIC					KET
					KEUANGAN		FISIK			
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	KINERJA	
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		***5 Rekomendasi Kebijakan, 2 Kesepakatan, 1 NSPK, 3 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, 1 Layanan Perkantoran,312 Subsidi Kepada Keluarga, 2 Layanan Publik, 1 Kegiatan***	***36,000,630,000***	***201,863,000***	***11.83***	***0.61***	***12.29***	***0.70***		
2	**Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi**	**2 Kesepakatan, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal,**	**3,654,000,000**	**-**	**10.00**	**0.00**	**10.50**	**0.00**		
	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan		1,500,000,000	-	11.00	0.00	11.50	0.00		
	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan		1,000,000,000	-	12.00	0.00	12.50	0.00		
	Pemantauan dan Evaluasi KPBU Bidang Perumahan		854,000,000	-	10.00	0.00	10.50	0.00		
	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		300,000,000	-	7.00	0.00	7.50	0.00		
3	**Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**1 NSPK, 2 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal,**	**4,500,000,000**		**9.83**	**0.00**	**10.33**	**0.00**		
	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR		750,000,000	-	12.00	0.00	12.50	0.00		
	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan		750,000,000	-	10.00	0.00	10.50	0.00		
	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan		750,000,000	-	5.00	0.00	5.50	0.00		
	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR		750,000,000	-	8.00	0.00	8.50	0.00		
	Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Konstruksi Rumah untuk MBR yang Mengikuti Program Kemudahan dan		500,000,000	-	12.00	0.00	12.50	0.00		
	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan		1,000,000,000	-	12.00	0.00	12.50	0.00		
4	**Jumlah Layanan Perkantoran**	**1 Layanan Perkantoran, 2 Layanan**	**3,814,320,000**	**-**	**10.00**	**-**	**10.50**	**-**		
	Operasionalisasi dan pemeliharaan kantor Direktorat PPP		1,000,000,000	-	10.00	0.00	10.50	0.00		
	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		164,320,000							
	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		2,650,000,000							
5	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**312 Subsidi Kepada Keluarga, 2 Layanan Publik,**	**14,000,000,000**	**123,614,000**	**35.67**	**1.03**	**35.84**	**1.33**		
	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT		8,800,000,000	-	7.00	0.00	7.02	0.00		
	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT		1,200,000,000		90.00	0.00	90.00	0.00		
	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN		4,000,000,000	123,614,000	10.00	3.09	10.50	4.00		
6	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**1 Layanan**	**3,500,000,000**	**78,249,000**	**15.08**	**2.24**	**16**	**3**		
	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		3,500,000,000	78,249,000	15.08	2.24	16	3.00		

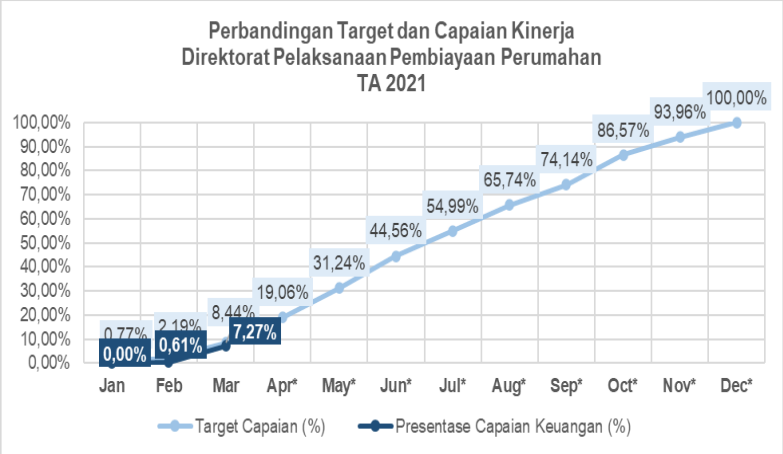
MARET 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada bulan Februari 2021 dilihat dari e-monitoring online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status tanggal 1 April 2021, sebagai berikut:

- Kinerja realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 2.615.796.000,00 dari total pagu anggaran Rp 36.000.630.000,00

2.

- Capaian progres keuangan masih 7,27% serta progres fisik juga masih 7,53%.Apabila dilihat dalam grafik kurva S tampak pada



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan

Rincian realisasi anggaran pada Bulan Maret 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pada Februari TA. 2021

Subdit / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target	Real.	Target	Real.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	**36.000.630.000**	**2.615.796.000**	**19,48%**	**7,27%**	**19,34%**	**7,53%**
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	**6.532.310.000**	**253.245.000**	**13,75%**	**3,88%**	**14,05%**	**4,21%**
Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500.000.000	19.916.000	19,00%	3,98%	19,50%	4,00%
Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1.000.000.000	91.154.000	11,00%	9,12%	11,50%	10,00%
Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1.750.000.000	49.033.000	26,00%	2,80%	26,50%	3,00%
Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	932.310.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	750.000.000	19.374.000	11,00%	2,58%	11,00%	3,00%
Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	500.000.000	6.600.000	16,00%	1,32%	16,00%	2,00%
Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	600.000.000	0	6,00%	0,00%	6,50%	0,00%

Subdit / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target	Real.	Target	Real.
Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat	500.000.000	67.168.000	8,00%	13,43%	8,00%	14,00%
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	**3.654.000.000**	**163.904.000**	**18,67%**	**4,49%**	**18,87%**	**4,65%**
Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1.500.000.000	148.080.000	19,00%	9,87%	19,50%	10,00%
Pendampingan Pelaksaaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	1.000.000.000	15.824.000	21,00%	1,58%	21,00%	2,00%
Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	854.000.000	0	17,00%	0,00%	17,00%	0,00%
Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	300.000.000	0	14,00%	0,00%	14,00%	0,00%
Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	**4.500.000.000**	**127.681.000**	**17,83%**	**2,84%**	**18,33%**	**3,33%**
Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	750.000.000	19.244.000	18,00%	2,57%	18,50%	3,00%
Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	750.000.000	18.620.000	18,00%	2,48%	18,50%	3,00%
Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	750.000.000	17.212.000	12,00%	2,29%	12,50%	3,00%
Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	750.000.000	31.026.000	15,00%	4,14%	15,50%	5,00%
Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	500.000.000	1.980.000	22,00%	0,40%	22,50%	1,00%
Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	39.599.000	22,00%	3,96%	22,50%	4,00%
Layanan Perkantoran	**3.814.320.000**	**332.047.000**	**18,70%**	**8,71%**	**13,80%**	**8,95%**
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000.000	42.609.000	20,00%	4,26%	0,00%	5,00%

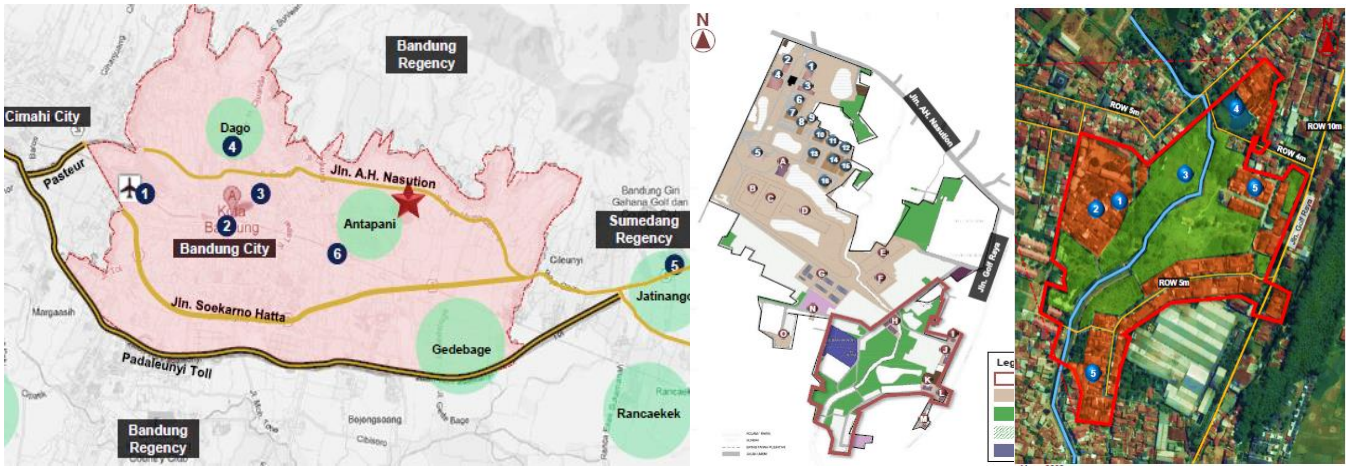
Subdit / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target	Real.	Target	Real.
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164.320.000	0	22,00%	0,00%	22,00%	0,00%
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.650.000.000	289.438.000	18,00%	10,92%	18,50%	11,00%
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	**14.000.000.000**	**1.220.536.000**	**22,06%**	**8,72%**	**22,60%**	**8,91%**
Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	8.800.000.000	0	14,00%	0,00%	14,50%	0,00%
Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	1.200.000.000	1.000.000.000	98,00%	83,33%	99,00%	84,00%
Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	4.000.000.000	220.536.000	17,00%	5,51%	17,50%	6,00%
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	**3.500.000.000**	**518.383.000**	**23,69%**	**14,81%**	**24,00%**	**15,00%**
Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	3.500.000.000	518.383.000	23,69%	14,81%	24,00%	15,00%

01 Proyek KPBU Perumahan

Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Pembangunan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung merupakan salah satu upaya pemenuhan backlog perumahan nasional yang masuk ke dalam program penyediaan infrastruktur sektor perumahan dan permukiman, dimana saat ini terdapat permintaan cukup tinggi untuk perumahan dengan harga yang terjangkau. Terdapat sekitar 64,1 juta unit rumah di Indonesia, sekitar 20% di antaranya berada dalam kondisi buruk dan diperkirakan 820.000 hingga 1 juta unit rumah baru dibutuhkan setiap tahun untuk menanggapi permintaan perumahan tahunan dari pertumbuhan populasi, pembentukan rumah tangga baru, dan migrasi ke daerah perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah mengidentifikasi satu bidang tanah yaitu, Komplek Pusjatan. Jl. AH. Nasution Kota Bandung, untuk pengembangan unit perumahan yang terjangkau dengan target pasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini disusun menggunakan skema KPBU dan akan memanfaatkan area komersial, sehingga dapat melakukan subsidi silang bagi harga sewa rendah dan mengurangi beban pada anggaran PJPK.



Gambar Lokasi KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

PROJECT PROFILE

PJPK	:	Kementerian PUPR
Lingkup Proyek	:	Design – Build – Finance – Maintain – Transfer (DBFMT)
Lokasi	:	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung
Bentuk Kerja Sama	:	KPBU *Solicited*
Bentuk Pengembalian Investasi	:	*Availibility Payment* (AP)
Jumlah Tower	:	11 Tower Rusunawa (Rusunawa – 4, Rusunawa Jangka Panjang – 3, Rusunawa Komersial – 4)
Jumlah Unit	:	2.378 Unit

Proyek KPBU Karawang Spuur

Indonesia sedang mengalami urbanisasi yang pesat. Sesuai dengan "Dokumen Penilaian Proyek dari Program Nasional Perumahan Terjangkau IBRD", kota-kota di negara tersebut tumbuh dengan laju 4,1% per tahun antara tahun 2000 hingga tahun 2010, lebih cepat daripada negara-negara Asia lainnya (dibandingkan dengan 3,8 persen di Cina, 3,1 persen di India dan 2,8 persen di Thailand). Pada tahun 2012, penduduk perkotaan mencapai 52% dari total penduduk dan pada tahun 2025, hampir 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. 18 juta dari 21 juta pekerjaan yang diciptakan diantara tahun 2001 dan tahun 2011 berada di daerah perkotaan, menandai pergeseran besar pekerjaan ke kota.

Menurut RPJMN 2020-2024, arah kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a) kawasan industri/KEK; (b) Kawasan pariwisata; (c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; (d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi; (e) keterkaitan desa dan kota; (f) kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga dan 187 lokasi prioritas, termasuk di dalamnya 92 pulau terluar; (g) daerah tertinggal; dan (h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. Program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional. Untuk itu, pemerintah terus berusaha dalam mewujudkan hunian layak bagi MBR yang sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan yaitu pada Kawasan/wilayah prioritas pembangunan nasional, salah satunya di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang didominasi oleh aktivitas sektor industri yang menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktivitas lain sebagai multiplier effect salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dengan dibangunnya Rumah Susun bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dengan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Karawang Regency



Project Site



Proyek KPBU Perumahan Karawang Spuur adalah proyek perumahan rakyat di atas lahan milik Kementerian PUPR seluas 1,9 ha. Lokasi proyek KPBU berada di Jalan Karawang Spuur, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Proyek KPBU Perumahan Karawang Spuur berlokasi di kawasan pengembangan Karawang Transit Oriented Development (TOD). Lahannya terletak di kawasan perkotaan Karawang, beberapa menit dari sekolah, universitas, dan kawasan industri. Selain itu lokasi proyek memiliki aksesibilitas yang tinggi, hanya beberapa menit dari pintu tol Karawang Barat 1, dan halte bus Karaba Indah. Pada proyek ini, direncanakan akan dibangun 2 tower,

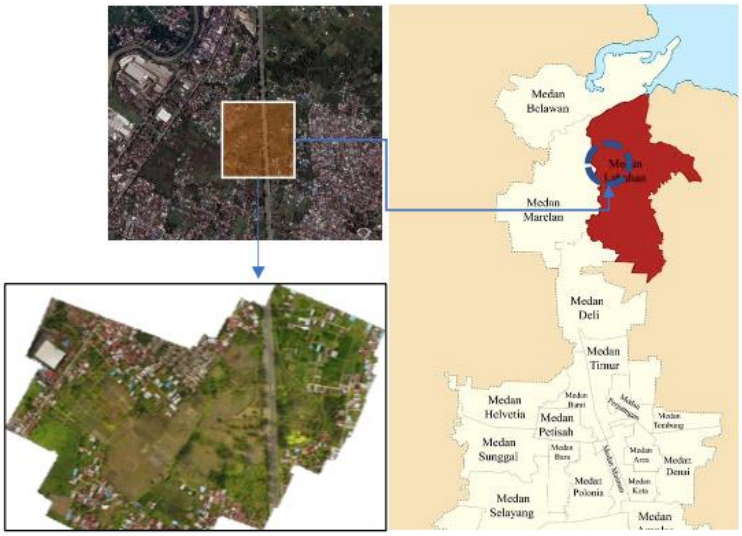
25 lantai, dengan total 1.175 unit hunian dan beberapa keperluan umum, seperti co-working space, green area, komersial, dan fasilitas sosial lainnya.

Ruang lingkup proyek KPBU Karawang Spuur adalah mennggunakan DBFOMT (Desain - Konstruksi - Pembiayaan – Operasi - Pemeliharaan dan Transfer).

Status: OBC

Proyek KPBU Desa Besar Medan

Dalam memenuhi kewajiban pemerintah dalam bidang pembiayaan perumahan, selain melalui bantuan atau kemudahan pembiayaan perumahan untuk MBR yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2017 bahwa proyek bidang perumahan dapat dilakukan dengan menggunakan Skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk di dalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional. Untuk itu, pemerintah terus berusaha dalam mewujudkan hunian layak bagi MBR yang sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan yaitu pada Kawasan/wilayah prioritas pembangunan nasional.



Gambar Lokasi Proyek KPBU Desa Besar Medan

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang didominasi oleh aktifitas sektor industri/jasa. Pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktifitas lain sebagai multiplier effect salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Tentu saja hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dibangunnya Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Proyek KPBU dalam Pendampingan Penyiapan

Selain mengembangkan proyek KPBU diatas lahan BMN PUPR, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga melakukan fasilitasi pendampingan proyek KPBU diantara yaitu Proyek KPBU Daan Mogot, Proyek KPBU Sei Mangkei, dan Proyek KPBU Paldam Siliwangi

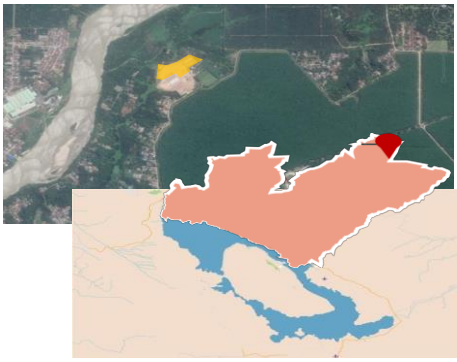
Proyek KPBU Daan Mogot

DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi di Indonesia yang didominasi oleh aktifitas sektor industri/jasa. Pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktifitas lain sebagai *multiplier effect* salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Tentu saja hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dengan dibangunnya Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Proyek KPBU Daan Mogot merupakan proyek yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 47.599 m2 (sesuai peta bidang)

Proyek KPBU Sei Mangkei

Proyek ini dibangun oleh PJPK untuk memenuhi kebutuhan pemukiman bagi pekerja di kawasan Industri KEK Seimangkei



Gambar Lokasi Proyek KPBU Sei Mangkei

Proyek KPBU Paldam Siliwangi

Proyek KPBU Paldam Siliwangi merupakan proyek yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang memiliki luas sebesar 1.1 ha



Gambar Lokasi Proyek KPBU Paldam Siliwangi

Pelaksanaan Kegiatan KPBU Perumahan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
1	Rapat Pembahasan Strategi Penyelenggaraan Paket Kegiatan NAHP-PPP	Rabu, 6 Januari 2021 di Ruang Rapat Dit. PPP, Lantai 3 Wing 2 DJPI dan *video conference* melalui aplikasi *Zoom*.	1. Penambahan waktu pelaksanaan NAHP – PPP karena terdapat beberapa isu seperto mismatch waktu, perubahan TOR, kondisi pandemi sehingga penyusunan RDS tertentu. 2. Final Report untuk FBC di Desember 2020 3. Draft FRQ, RFP. PPP agreements dan Second Technical Workshop akan diselesaikan di Januari 2020	1. Penambahan waktu sampai dengan 15 Februari 2021 sampai dengan Final Report
2	Pembahasan Hasil Kunjungan Lapangan dan Rencana Tindak Lanjut Penyusunan OBC Proyek *Public Housing* Karawang (acara difasilitasi oleh Kementerian Keuangan)	14 Januari 2021	1. Berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang, pada tahun 20014 sempat terjadi banjir pada area lahan 2. Ketinggian menara SUTT yang melintasi lahan adalah setinggi 27 meter 3. Tim RDS akan menyebarkan survey mengenai peminatan, kemampuan membayar, dll terkait dengan kebutuhan analisis pasar. 4. Tim Penyusun OBC menargetkan pada tanggal 3 Februari 2021 melaksanakan Konsultasi Publik untuk dapat mengumpulkan masukan dari *stakeholders*.	1. Tim RDS perlu mempertajam pertanyaan untuk survey dan menyasar lebih detil mengenai kuesioner yang akan disebarkan agar hasil analisis dapat lebih spesifik. 2. Pada Konsultasi Publik perlu menyusun target dan strategii terlebih dahulu mengenai informasi yang ingin didapatkan dari para pemangku kepentingan.
3	Rapat Persiapan RDS KPBU Desa Besar Medan	15 Januari 2021	1. Progres yang dilaksanakan tim Jones Lang LaSalle yang merupakan Tim RDS KPBU Desa Besar Medan saat ini telah sebanyak 20% pelaksanaan pada perkerjaan *Market Survey*, 10% pelaksanaan *Primary Survey*, dan 10% pelaksanaan *Market Finding Report*	1. JLL akan berkoordinasi dengan PT. Amythas selaku Tim Penyusun OBC Proyek KPBU Desa Besar Medan 2. JLL dan Kementerian PUPR akan melakukan pembahasan mengenai perhitungan desil sebelum mengundang BPS dan Kementerian Sosial mengenai konfirmasi cara penghitungan desil.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
				3. JLL melanjutkan perkerjaan berdaarkan *action plan* yang telah disusun
4	Rapat Pembahasan Progress NAHP-PPP	Jumat,22 Januari 2021	1) Tim Konsultan menyampaikan Progress KPBU Daan Mogot dan Kelurahan Medan Besar. Adapun progress dari kedua KPBU ini adalah sebagai berikut: a. Pada tahap perencanaan, kedua proyek KPBU sudah melaksanakan Studi Pendahuluan*, Project Screening Tools*, dan *public consultation* untuk Kelurahan Medan Besar sedangkan KPBU Daan Mogot belum melaksanakan (terlambat). KPBU Daan Mogot masih menunggu koordinasi antar SKPD dan masih menunggu pergantian pejabat definitif SEKDA b. Pada tahap penyiapan, progress sudah sampai pada tahap penyusunan RDS dan *Draft* OBC. Keduanya masih dalam tahap diskusi dan koordinasi. 2) Beberapa kendala atau tantangan dalam kedua proyek KPBU ini adalah: a. Administratif: Keterbatasan SDM karena terdapat beberapa TA yang telah selesai masa kontrak selama 6 bulan, sehingga untuk penyusunan OBC memanfaatkan SDM TA yang ada. Kedua, keterbatasan aktivitas dan gerak dalam melaksanakan kegiatan pada saat pemberlakuan PSBB dan PPKM sebagai akibat pandemic COVID-19. 1) Teknis: Pada proyek KPBU Kelurahan Medan Besar, masih terjadi okupasi lahan proyek oleh warga. Namun hal ini seharusnya dapat diselesaikan secara cepat.	1. Tim Konsultan perlu melaporkan persenan realisasi kedua Proyek KPBU selambat-lambatnya tanggal 26 Januari 2021 kepada Satker.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
5	Diskusi *Real Demand Survey* Rusunawa Kota Medan dalam Rangka Penyusunan OBC Proyek KPBU Desa Besar-Medan	29 Januari 2021, Ruang Rapat Lt. 3, Wing 2, Dit. PPP dan Video *Conference via Zoom Meeting*	3. Diskusi *Real Demand Survey* Rusunawa Kota Medan dalam Rangka Penyusunan OBC Proyek KPBU Desa Besar – Medan yaitu sebagai berikut: 1. Kota Medan memiliki 2 (dua) Rusun yang dimana Pembangunannya dilaksanakan oleh kementerian PUPR yaitu: • Rumah Susun Sederhana Sewa Seruai, Beralamat di Jl. Seruai, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kota Medan dengan alas hak: Hak Pengelolaan No.5, Kel. Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan (luas tanah: 89.000 m²). Rusunawa seruai memiliki 4 blok yaitu blok A, blok B, blok C, dan blok D • Rumah Susun Sederhana Sewa Kayu Putih, Berlokasi di Kecamatan Medan Deli, Jalan Kayu Putih. Rusunawa Kayu Putih memiliki 4 blok yaitu blok A, blok B, blok C, dan blok D 2. Rumah Susun Sederhana Sewa Seruai dan Rumah Susun Sederhana Sewa Kayu Putih dapat menjadi gambaran dan pembelanjaran dalam pengembangan Proyek KPBU Rusunawa Desa Besar- Medan 3. Hal-hal yang menjadi pembelajaran untuk pembangunan rusunawa kedepan adalah: • Memperhatikan perhitungan perkiraan biaya tarif listrik • Dalam penyusunan kajian diharapkan memperhatikan segmentasi MBR dengan target market yang jelas • Pendekatan Housing Career 2) Memperhatikan kemampuan Anggaran Daerah dalam mengelola Rusun	2. Jika diperluakan Tim Konsultan RDS akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi Rusunawa Rumah Susun Sederhana Sewa Seruai dan Rumah Susun Sederhana Sewa Kayu Putih.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
6	Rapat Progress NAHP PPP	Jumat, 5 Februari 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Rapat bertujuan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan *critical issue*s dalam rangka NAHP-PPP yang dilaksanakan oleh konsultan. 2. Terkait dengan perpanjangan waktu, proses addendum perpanjangan waktu telah disampaikan kepada WB melalui PIU NAHP. Telah disepakati pula bahwa perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 tanpa adanya penambahan biaya. 3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dikarenakn adanya proses/tahapan yang belum terlaksana, yaitu *Real Demand Survey* (RDS). 4. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, maka konsultan berkewajiban menyelesaikan semua pekerjaan yang telah diuraikan di dalam KAK pada kontrak awal dan kontrak yang telah disesuaikan. Dalam rangka penyelesaian pekerjaan dalam waktu kurang lebih 4 bulan, maka disarankan agar konsultan dapat menyusun rencana aksi pelaksanaan. Selain bermanfaat untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana aksi ini bermanfaat agar konsultan dapat melihat kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia dan sekiranya dapat dimanfaatkan dalam upaya pencapaian output. 5. Terkait dengan kategorisasi proyek KPBU, perlu menscreening ulang data dan informasi yang akan diserahkan kepada WB. *Screening* ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara internal DJPI. Hal ini mengingat kategorisasi merupakan hal yang krusial bagi WB. 6. Untuk sementara, maka kita dapat memberikan data dan informasi yang mengarah pada kategori B. Artinya, jika	1. Pada tanggal 8 Februari, PT. Amythas agar dapat bertemu dan tandatangan addendum kontrak sesuai perpanjangan kontrak terbaru. 2. Penyusunan rencana aksi oleh konsultan dalam rangka penyelesaian pekerjaan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			terdapat hal-hal yang masih perlu untuk didiskusikan/diidentifikasikan, maka pada *form* dapat ditulis N/A, *to be discussed*, dan lainnya. Hal ini sebagai upaya pemberian lebih dari 1 opsi kepada WB yang dapat menggiring kepada interpretasi data yang salah.	
7	Penyiapan dokumen-dokumen pengajuan PPP Book Proyek Karawang Spuur	Kamis dan Jumat, 18-19 Februari 2021, WFH/WFO	1. Pengumpulan dan penyiapan dokumen-dokumen dalam rangka pengajuan PPP Book Proyek KPBU Karawang Spuur	2. Kelengkapan dokumen
8	Rapat Persiapan Pengusulan Project KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur	Selasa, 2 Maret 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Status Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur saat ini yaitu dalam proses complimentary preliminary study, dan proses penyiapan pengusulan PDF kepada Kementerian Keuangan. Kick off meeting penyusunan OBC telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 2. Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur belum lolos evaluasi tim Bappenas untuk dimasukan dalam PPP book 2020, dikarenakan menunggu konfirmasi AP dari Kemenkeu. Namun Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur telah diusulkan kembali untuk dimasukan ke dalam PPP book 2021 3. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal permohonan PDF oleh PJPK kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di antaranya: a. Deskripsi proyek secara singkat (executive summary) yang meliputi nilai, cakupan, lokasi, dan manfaat; b. Pernyataan bahwa proyek akan diselenggarakan dengan skema KPBU; c. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kriteria dan persyaratan yang diwajibkan bagi proyek tersebut telah terpenuhi;	1. Menyampaikan progres Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur kepada Bapak Menteri 2. Menyusun action plan dengan melibatkan Ditjen Perumahan 3. Melakukan rapat pembahasan yang melibatkan Ditjen Perumahan sebelum menyusun SK Tim KPBU 4. Pengajuan Permohonan PDF kepada Kementerian Keuangan untuk penyusunan Dokumen FBC dan pendampingan Tahap Transaksi 5. Perlu dilakukan pemetaan urgensi pelibatan pihak luar dalam SK Tim KPBU

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			d. Komitmen untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan yang diperlukan untuk pemberian dukungan; e. Kesediaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari segala dokumen, informasi baik berupa data atau angka dan / atau segala pernyataan mengenai Proyek KPBU yang disediakan, dibuat dan disampaikannya untuk pengajuan Permohonan Fasilitas; dan f. Lampiran surat permohoman PDF sebagai dokumen pendukung. 4. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam penyediaan Infrastruktur, bahwa dalam pembagian kewenangan proyek KPBU, DJPI memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan kegiatan tahap penyiapan dan transaksi KPBU. Dimana dalam tahap tersebut DJP akan memberikan bantuan yaitu berupa pelaksanaan pengadaan tanah dan penyiapan rencana anggaran pembayaran ketersediaan layanan (AP). (pembagian wewenang dalam pelaksanaan KPBU sektor perumahan terlampir). 5. Pada tahap penyiapan transaksi DJPI membentuk tim KPBU dan panitia pengadaan, sedangkan dalam tahap pelaksanaan perjanjian, DJP akan membentuk tim pengendali. 6. Tim KPBU Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur terdiri dari pengarah, pelaksana, dan sekretariat. 7. Dalam SK Tim KPBU Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur perlu melibatkan Pemerintah Daerah.	
9	Rapat Pembahasan *Complementary Preliminary Study* (CPS) Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur	Senin, 8 Maret 2021, Ruang Rapat Lt. 3 Dit. PPP DJPI dan	Masukan untuk Studi Pendahulan Proyek KPBU Karawang Spuur sebagai berikut: 1. Secara umum kajian pada kriteria kepatuhan sudah mencangkup kajian yang dibutuhkan pada SP, namun perlu dilengkapi dengan pembagian tugas antara DJP dengan DJPI	1. Merevisi SP sesuai masukan rapat 2. Akan dilakukan pembahasan mengenai *updated workplan* antara Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Konsultan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
		Video Conference via Zoom Meeting	2. Dari sisi teknis perlu dilakukan kajian lebih detail terkait dengan kondisi *eksisting site* 3. Perlu adanya *overview* kebijakan 4. Dari sisi finansial diperlukan kajian VfM secara kuantitatif	
10	Rapat Pembahasan Kemajuan Penyiapan KPBU Karawang Spuur	Selasa, 16 Maret 2021 Hotel 101 Darmawangsa, Jakarta dan melalui *Video Conference* via Zoom Meeting	1. Pihak BMN PUPR menjelaskan bahwa lahan tidak ada masalah, statusnya *clean and clear*. Status sertifikatnya sedang dalam proses dan akan selesai dalam waktu dekat. 2. Proyek KPBU Karawang Spuur direncanakan akan diselenggarakan dengan menggunakan skema AP dan akan menjadi Rumah Susun Sewa, diharapkan harus ada pengelola yang mengelola dana yang di *collect* dari sewa tersebut. 3. Tidak akan ada pemindahan kepemilikan dari negara ke kepemilikan masyarakat. Tetap akan menggunakan *Long Term Lease*. Sedangkan penyiapan SKBG oleh pemda, sebagai jaminan untuk kredit *Long Term Lease*, Mirip dengan SHM (Sertifikat Hak Milik).	1. Akan diselenggarakan kunjungan lapangan bersama dengan PLN khusus meninjau kabel SUTT yang berada di dalam lokasi proyek 2. Jasa pengguna barang dan penyiapan KSPI akan dikonsepkan dari Ditjen Perumahan. 3. Simpul KPBU sedang disiapkan oleh Direktorat PSSPP DJPI.
11	Rapat Pembahasan Persiapan Pengusulan PDF Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur	Senin, 22 Maret 2021 *Video Conferences* via Zoom Meeting	1. Terkait rencana kegiatan hari Jumat (26 Maret 2021) yaitu penyiapan KSPI untuk tiga proyek; Cisaranten, Karawang Spuur dan Medan. Beberapa hal yang harus ditinjau ulang diantaranya: - Prosedur KSPI di tingkat internal - Rencana kerja untuk masing-masing proyek - Status lahan di masing-masing proyek 2. Terkait pengajuan PDF itu ada dua dokumen yang dibutuhkan, yaitu: - Status lahan - Surat pernyataan PJPK	1. Mempersiapkan SK Tim KPBU 2. Mengirimkan bahan paparan terutama KPBU Medan ke tim konsultan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
12	Kunjungan Lapangan dan Pembahasan Opsi Teknis Pembangunan Rusun Sewa Karawang Spuur	Selasa, 23 Maret 2021 Hotel Novotel Karawang	1. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan kesiapan tapak (terkait aspek legal dan aspek teknis), serta pembahasan terkait opsi teknis yang diusulkan dalam proyek KPBU Karawang Spuur. 2. Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur direncanakan di atas lahan BMN Kementerian PUPR yang berlokasi di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dengan luas 1,9 Ha. Aset BMN tersebut saat ini dikelola oleh Biro BMN, Kementerian PUPR. 3. Lokasi lahan BMN sebagian besar dalam keadaan kosong, tidak ada bangunan permanen. Di atas lahan tersebut terdapat BMD Kab Karawang berupa Jalan Kampung Budaya, yang nantinya akan digunakan sebagai akses menuju lokasi Rusun, baik pada saat konstruksi maupun penghunian. Lahan tersebut berbatasan dengan objek pariwisata Kampung Budaya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemkab Karawang dan Sungai Cikalapa. 4. Lahan dilalui oleh jalur SUTT 70kv-Kosambi-Jatirangon T35-T36 (AFTAK 24-90 Wilayah ULTG CKRG) yang rencananya akan ditingkatkan menjadi 150 kv. 5. Konsep Rusun Sewa Karawang Spuur: a. Penyediaan Rusun Sewa yang ditujukan bagi MBR dengan fungsi campuran yang mengadopsi prinsip *Smart Living, Green Building,* dan *Universal Design* yang memperhatikan kesetaraan gender. b. Diusulkan sebanyak 2 tower terdiri atas 27 lantai yang meliputi 1.450 unit sarusun. c. Estimasi biaya CAPEX sebesar Rp458M dan OPEX sebesar Rp.298M.	1. Pembentukan Tim KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur 2. Penyelesaian Kajian Awal Prastudi Kelayakan 3. Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (diusulkan melalui *Project Development Facility*/PDF) 4. Penyiapan Usulan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) atas pemanfaatan lahan BMN yang akan digunakan dalam KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur.
13	Rapat Pembahasan Kemajuan RDS dan Penyiapan OBC KPBU Rusun Desa Besar Medan	Rabu, 24 Maret 2021	1. Penyusunan rencana pengembangan Kawasan yang terdiri dari 3 skenario: a) Full-site development: Mengoptimalkan seluruh lahan BMN di sisi KM 8 Tol Belmera (east-west) b) West-side development: Hanya menggunakan sisi barat yang diakses dari Jl. Yos Sudarso.	1. Penyampaian update progress RDS di minggu ke-2 April oleh Konsultan. 2. Rencana Penyelesaian OBC dan Market Sounding di minggu ke-4 April oleh Konsultan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
		Video Conferences	c) Full-site development dengan pembebasan/ konsolidasi lahan di sekitarnya.	
14	Rapat Pembahasan Kemajuan RDS dan Penyiapan OBC KPDBU Rusun Daan Mogot	Kamis/25 Maret 2021 *Video Conferences via Zoom Meeting*	1. Terkait RDS, Pemda dan tim Konsultan telah menyusun dan menyebarkan kuesioner *online* dan *offline* dari bulan Januari-Maret dan nanti di bulan April ditargetkan untuk memaparkan mengenai progress report keseluruhan. 2. Temuan sementara menunjukkan bahwa antusiasme warga terhadap rusun ini sangat tinggi karena lokasinya yang strategis namun kekurangan dari lokasi ini adalah kebutuhan air bersih belum dapat terpenuhi, drainase cukup dangkal dan kotor dan dekat dengan perumahan illegal. 3. Pembangunan Rusun Daan Mogot memiliki masa konsesi sebanyak 22 tahun dengan kapasitas hunian sebanyak 1600 unit dan memiliki estimasi biaya (RAB) sebesar Rp1,6 Milyar dan estimasi biaya CAPEX sebesar Rp2,1 Milyar.	1. Penyampaian update progress RDS di bulan April. 2. Mengkaji ulang mengenai mall dan ruang pemakaman. 3. Mengkaji ulang responden kuesioner agar sesuai dan tepat sasaran.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
15	Pembahasan Revisi *Inception Report* Konsultan Penyusunan	Senin, 18 Januari 2021 Melalui *Video Conference*	1. perlu mengambil pengalaman dalam penyusunan OBC dan pelaksanaan kajian pada Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan, Bandung. 2. Perlu menyertakan Project Screening Tool, Initial Value for Money Tools	1. pelaksanaan konsultasi publik yang direncanakan akan diadakan pada awal Februari 2021 2. pelaksanaan FGD terkait data yang dibutuhkan dalam analisis.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
	OBC Perumahan Karawang		3. Perlu mengevaluasi berbagai macam PPP options dan mengerucutkan menjadi beberapa recommended models to be applied. 4. Model survey RDS perlu lebih tajam dan lebih spesifik untuk mendapatkan data yang lebih berkualitas dan tajam untuk dapat menentukan target market dengan tipe hunian yang harus dilakukan 5. Dalam analisis tapak, perlu mengcover anaisis mengenai perkembangan kota di masa mendatang dalam radius 10 - 20km	
16	Pembahasan Persiapan Pelaksanaan *Real Demand Survey Public Housing* Karawang	Kamis, 21 Januari 2021 Melalui *Video Conference*	1. Metode pengumpulan data oleh konsultan dalam RDS yaitu dengan data primer dengan depth interview oleh surveyor. Kelomok Responden: responden pengguna (rumah tangga dan Perusahaan) dan responden penyedia (perusahaan/institusi properti) 2. Daftar pertanyaan untuk Rumah tangga terkait dengan sosial econ responden, kondisi sarpras responden, willingness to move ke hunian vertikal, willingness to pay harga sewa dan iuran lingkungan / service charge, target pricing. Untuk perusahaan: informasi umum, kemauan memberikan pelayanan perumahan kpd karyawan, willingness to pay, dan tipe/luasan yang diinginkan/dibutuhkan. Untuk responden penyedia: informasi umum, jenis/banyak proyek yang dijalani, tingkat hunian dan tingkat penjualan yang dilakukan, kendala dan hambatan selama menjalankan usaha. 3. Jumlah responden 200 disebar 5 kecamatan. Metode analisis: Analisis lokal, analisis fisik bangunan, analisis pesaing properti, market analysis yang mencakup analisis makro ekonomi, analisis pasar mikro.	• Pelaksanaan RDS oleh konsultan sesuai dengan rencana yang disusun

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
17	Rapat Koordinasi Pentahapan dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur IKN	Senin, 1 Februari 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	• Urban desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) dan Rencana Pentahapan Pembangunan Infrastruktur IKN oleh Tim Kolaborasi Rancang Kota adalah sebagai berikut: a. Rencana Pentahapan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 1 pada sisi utara karena lahan sudah clear, pada tahap dua pada bagian selatan karena masih perlu pembebasan lahan; b. Prioritas zona untuk *ground breaking* adalah kawasan istana dan sumbu kebangsaan; c. Strategi pentapahan adalah sebagai berikut: • Survey data primer • Penyusunan modeling • Pradesain tahap I • Penyusunan program bangunan • Pada pertengahan 2021 dilakukan *basic design*. d. Masukan yang diberikan oleh perwakilan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut: • Pembangunan diawali dengan kota yang sudah berkembang, missal Kota Balikpapan dengan akses ke pusat kota di IKN untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan keluarga ASN; • Menggunakan pemanfaatan *Land Value Capture* dan LCSI	• Tim Satgas PPI IKN akan mengatur dan mengagendakan pertemuan untuk integrase perencanaan berbagai sektor di Kementerian PUPR

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			• Penggabungan infrastruktur non-generating revenues dengan generating revenue. e. Masukan pada diskusi yang dilakukan adalah sebagai berikut: • Perlu identifikasi lebih lanjut subkawasan yang dapay dilakukan melalui sistem KPBU; • Perlu pertemuan mendetail dan teknis terkait sinkronisasi jadwal dan teknis pelaksanaan; • Sektor perlu memberikan gambaran *Waste to Energy* dan komitmen dalam pelaksanaannya	
18	Rapat Lanjutan KPBU	Rabu, 3 Februari 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Percepatan proyek KPBU Cisaranten 2. Koordinasi Proyek KPDBU Sei Mangke dan PALDAM 3. Fasilitasi Proyek KPDBU Daan Mogot 4. Percepatan Proyek KPBU Desa Besar Medan • Pecepatan Proyek KPBU Karawang Spuur	Dipantau progress masing-masing lokasi proyek KPBU
19	Rapat Konsolidasi Pembahasan KPBU Bidang Perumahan	Rabu, 3 Februari 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	• Pemilihan lokasi di atas tanah BMN berdasarkan balasan/disposisi Menteri berdasarkan Nota Dinas Dirjen PI	• Pelaksanaan rapat oleh DJP membahas proyek-proyek KPBU perumahan yang sedang berjalan
20	*Discussion of OBC Karawang Spuur Compliment Prelimenari Studies*	Rabu,17 Februari 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Rapat bertujuan membahas *Progress Draft* Laporan *Complement of Preliminary Study* untuk penyusunan *Outline Business Case* (OBC) Proyek KPBU Rusunawa Karawang Spuur. 2. Beberapa masukan yang disampaikan di dalam rapat adalah sebagai berikut:	1. Merevisi dokumen CPS sesuai masukan dari Kementerian dan *World Bank*. 2. Restrukturisasi dokumen sesuai dengan Studi Pendahuluan yang sudah dibuat sebelumnya oleh PUPR.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			a. Perlu ditambahkan opsi-opsi yang berkaitan dengan kajian teknis, hal ini diperlukan untuk pengambilan keputusan kebijakan yang sebelumnya terlebih dahulu melihat berbagai opsi yang ada. b. Perlu melihat kembali terkait dengan *maintanance*, jika dimungkinkan tidak hanya dilakukan daily/yearly, namun lebih kepada jangka panjang. Hal ini memerlukan sruvey pasar. c. Diharapkan struktur dokumen OBC menyesuaikan format SP yang sudah dibuat oleh PUPR dan menyesuaikan dengan Permen Bappenas. d. Pada analisis legal belum tergambar hubungannya dengan rencana pelaksanaan proyek apakah dapat memenuhi kebutuhan di Karawang. e. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep "Kampung Budaya", hal ini dikarenakan kampung budaya merupakan kawasan pariwisata, bukan kawasan permukiman. f. Meskipun sudah terlihat ada hitungan CAPEX dan OPEX, namu perlu dibuatkan estimasi awal AP dan identifikasi kemampuan PUPR menggunakan skema dan range skema AP. g. Terkait analisis UUCK, pada bagian Aspek terdapat hal yang belum dibahas, yaitu pengelolaan. Perumnas tertarik untuk bergabung pengelolaan, aspek pengelolaan ini juga penting dibahas daripada konstruksi, meskipun dengan AP tapi tetap ada *stream revenue* dari *user*. h. Pelaku pengelolaan *revenue* belum terlihat (BLU/UPT).	3. Untuk selanjutnya agenda pembahasan bisa dipecah agar tidak terlalu panjang.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			i. Informasi sudah banyak disebutkan konsultan, namun belum ada potret kalau proyek dilakukan, dampak sosialnya seperti apa, dan juga *baseline* kondisi lapangan. j. Mohon memeprhatikan TOR *social and environmental* untuk Draft OBC	
21	OBC Karawang Spuur Legal & Technical Assesment Discussion	Selasa, 23 Februari 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Pembahasan dibagi menjadi 2 sub-pembahasan besar, yaitu Legal Assesment dan Tecnical Assesment. 2. Pokok pembahasan pada sub pembahasan *Legal Assesment* adalah sebagai berikut: a. Kementerian Keuangan telah menambahkan masukan pada Draft OBC Karawang Spuur. b. Perlu melihat pro dan cons KPBU gabungan. c. Perlu mulai merincikan ketentuan dalam pendirian badan usaha yang harus sesuai dengan proyeknya. d. Melihat progress penyusunan OBC saat ini, maka sudah dapat dibentuk Tim KPBU dan dijabarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan tahapan-tahapan di dalam KPBNU/ e. Perlu perlahan-lahan menyiapkan FBC. Sebagai tahap awal dapat mengidentifikasi peraturan-peraturan terkait dan mulai *sounding*. f. Belum terlihat sinergisitas antara peraturan perundangan-undnagan dengan RPJMD (pusat-daerah). Dengan demikian, perlu ditambahkan hamonisasinya akan seperti apa. g. Perlu membuat *section outstanding issues*, sehingga hal ini dapat *difollow-up* pada saat FBC.	1. Merevisi outline sesuai masukan dari Tim Teknis dan *World Bank*. 2. Tim Teknis juga memberikan masukan tertulis kepada konsultan selain dari yang diberikan dalam rapat.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			h. Perlu merincikan risiko dan mitigasi per tahapan kegiatan pelaksanaan KPBU (perencanaan-penyiapan-transaksi-pelaksanaan). i. Perlu menjabarkan terkait perizinan dan persetujuan baik yang diperlukan oleh BUP maupun PJPK. 3. Pokok Pembahasan *Technical Assesment* adalah sebagai berikut: a. Target pembangunan tidak sebatas hanya terbangun dan tersedia, namun ada target lain yaitu rusunawa yang terbangun harus berfungsi, sehingga life cycle penghuni dapat terlayani. Terkait dengan fungsional, perlu memperhatikan hal apa saja yang menjadi standarnya. b. Terkait dengan rancang bangun awal, saat CPS disepakati maka akan ada pilihan/alternatif. Pada rancang bangun awal perlu memperhatikan hal-hal yang telah disampaikan pada CPS yaitu responsive gender, smart city, green living. Intinya, selain memenuhi regulasi konstruksi, standar dan kualitas. Konsep-konsep terbaru yang ada di dalam DPJM perlu diakomodasi. c. Sebelum sampai pada technical assesment, seharusnya ada needs assesment. Hal ini dikarenakan saat ini RDS masih dalam proses penyusunan oleh Konsultan.	
22	Pembahasan Jadwal Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek	Kamis, 25 Februari 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Yang menjadi prioritas dalam pembangunan IKN Bidang Perumahan adalah Rumah Negara untuk Pejabat dan rumah susun ASN. 1. DJPI diminta untuk membangun melalui skema KPBU untuk lingkup kawasan tertentu yang perlu	1. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rangka menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan melalui skema KPBU.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
	KPBU bidang Perumahan di IKN		dibicarakan juga dengan DJCK sebagai *leading sector*. 2. DJPI diminta untuk jg menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan melalui skema KPBU.	
23	Rapat Pembahasan RDS Medan	Senin, 1 Maret 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	1. *Interview* yg dilakukan Tim RDS pada perwakilan PT Musim Mas Medan. Kementerian PUPR mengikuti *interview* tersebut sebagai pemantau/pengobservasi. 2. *Interview* yg dilakukan oleh Nielsen berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh JLL. 3. Untuk menanyakan kebutuhan hunian untuk staf, harga sewa hunian bagi staf, dan lokasi serta ketertarikan perusahaan terhadap proyek KPBU	• Data *interview* akan digunakan sebagai salah satu input data untuk *market research*
24	*IIFD Mid-Term Review Mission* - Diskusi Dukungan IIFD terhadap Pengembangan OBC untuk Proyek Perumahan Karawang	Senin, 8 Maret 2021, *Video Conference* via Zoom Meeting	1. Rapat membahas sejauh mana dana-dana *Indonesia Infrastructure Finance Development* IIFD mendatangkan manfaat untuk proyek-proyek KPBU Kementerian PUPR. 2. Berdasarkan hasil riviu yang dilakukan oleh Tim dari Dit. PPP DJPI, TOR yang telah disusun oleh Konsultan sudah cukup baik. Namun, kedepannya terkait hal penyusunan OBC-FBC perlu menyesuaikan kepada regulasi Bappenas yang terbaru. 3. Dari sisi kinerja konsultan, terdapat missed coordination antar anggota tim yang telihat jelas pada proses penggabungan laporan, selain itu terdapat banyak salah penulisan. • Pada Permen PUPR Nomo2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, telah dijabarkan secara detail tugas dan	• Perlu menyampaikan kepada DJP tentang kebutuhkan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah pada lokasi proyek KPBU Cisaranten sebesar 48M. Dengan demikian, hal ini perlu di *highlight* sampai mendapatkan konfirmasi dari DJP.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			fungsi DJPI dengan Unor Teknis bidang Perumahan, yaitu DJP. Artinya, DJPI bertugas dalam perencanaan-transaksi KPBU, dan akan dilanjutkan oleh DJPI pada masa konstruksi proyek KPBU. • Sementara waktu, proyek IKN tidak dilampirkan di dalam lampiran E - PUPR-DJPI.	
25	Pembahasan rincian proyek KPBU IKN	Senin, 8 Maret 2021 *Video Conference* via Zoom Meeting	• Usulan lokasi rencana penyusunan rumah susun pada TA 2021 dilakukan secara bertahap • Untuk tahun 2021 akan dibangun rusun negara tipe 36 dengan biaya estimasi per m² = Rp19.377.287 dengan total kebutuhan biaya Rp 1.926.722.400.984 T • Tantangan pembangunan kawasan perumahan di IKN yaitu sebagai berikut: 1. Topografi dan pematangan lahan 2. Implikasi waktu dan biaya 3. Metoda KOntruksi Dan Manajemen Pelaksanaan Status lahan	• Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut
26	Pembahasan *Draft* Laporan Analisis Market dan *Real Demand Survey* (RDS) - OBC Rusun Karawang	Selasa, 9 Maret 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	• Beberapa masukan untuk Tim RDS Proyek KPBU Karawang diantara lain: 1. RDS ini penting sekali dan harus mendapatkan benefit dari hasil. Ini adalah validasi dan urgensi dari proyek ini, harus meyakinkan kemenkeu dan bappenas, ini adalah proyek yang betul-betul dibutuhkan. Dan meyakinkan investor bahwa ini ada target market. Harus di-address dalam kajian ini 2. Bab 8 kesimpulan harusnya bisa menjawab.kondisi pasar, survei primer dan analisis konsultan, tapi tidak ada penjalasan kenapa konsultan menyarankan itu.	1. Merevisi dokumen RDS sesuai masukan dari Kementerian 2. Pending FGD dan Konsultasi Publik dari *workplan* 3. Membuat *updated workplan* sesuai perkembangan terkini.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			• Konsultan perlu membuat *updated workplan* sesuai perkembangan terkini.	
27	Pembahasan Revisi *Complement of Preliminary Study OBC PPP Housing Karawang*	Rabu, 10 Maret 2021 *Video Conference* via Zoom Meeting	1. Rapat membahas secara detail terkait Laporan Pelengkap Studi Pendahuluan OBC KPBU Karawang Spuur. 2. Secara garis besar, beberapa poin yang menjadi masukan untuk konsultan adalah sebagai berikut: a. Diperlukan menyusun summary yang berbeda berdasarkan masing-masing alternatif dan konsekuensi atas alternatif-alternatif tersebut b. Perlu menambahan dan memahami beberapa peraturan/regulasi terkait kriteria MBR, KPBU, Lingkungan dan lainnya c. Terkait dengan aspek kepatuhan, perlu menetapkan keputusan untuk menggunakan BP3 atau BLU pada saat OBC d. VfM sudah ada, asumsi yang dijelaskan harus dominan kepada MBR, agar Apnya semakin besar • Hasil pelaksanaan konsultasi publik bersama Pamerintah Daerah diharapkan dapat dijadikan indikasi bagi konsultan, sehingga dapat menjadi baseline penentuan langkah ke depan.	• Masukan-masukan yang disampaikan di dalam rapat ditindaklanjuti oleh konsultan.
28	Pembahasan *Legal Assessment* OBC PPP Housing Karawang	Rabu, 17 Maret 2021 *Video Conference* via Zoom Meeting	*Legal Assessment* ini merupakan bagian dari OBC. Beberapa masukan untuk konsultan di antaranya sebagai berikut: 1. Di dalam Dokumen CPS seharusnya sudah dibuatkan kesimpulan/hasil analisis mengenai: a. PJPK b. Kejelasan apakah proyek KPBU ini akan menjadi Proyek KPBU gabungan atau tidak	• Setiap konsultan menindaklanjuti sesuai masukan-masukan dalam *desk*

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			2. BP3 perlu dilihat dan telaah kembali, apakah badan ini bisa menjadi PJPK. Karena KPBU PJPK biasanya oleh Kementerian, Pemerintah Daerah 3. Pada bagian Kajian KSPI perlu lebih distrukturkan dalam menguraikan penulisan analisis	
29	Evaluasi dan Rencana Pelaksanaan *National Affordable Housing Program* (NAHP)	Jumat, 19 Maret 2021 Hotel Mercure Alam Sutera	1. Hal – hal yang perlu diperhatikan oleh masing – masing konsultan Paket Pekerjaan PHLN TA. 2021 adalah: a. Perlu disusun Rencana Penyerapan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (*Master Schedule*) yang telah ditetapkan dalam Kontrak. b. Perlu disiapkan kelengkapan dokumen/data pendukung untuk mengajukan Pencairan Termin. c. Terhadap *output* pekerjaan dalam bentuk Laporan, harus mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis sebelum disampaikan kepada Satker dan/atau PIU. d. Konsultan harus menyiapkan dokumen Addendum Kontrak dengan cermat dan cepat agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan karena proses persetujuannya membutuhkan waktu yang tidak singkat. e. Untuk mengantisipasi pemeriksaan oleh BPK, untuk Konsultan yang melakukan beberapa kali Addendum Kontrak, harus menyusun *resume* masing-masing Addendum Kontrak. 2. Tahun 2021 terdapat 9 (sembilan) kegiatan, 6 (enam) dibiayai oleh *World Bank* dan 3 (tiga) kegiatan dibiayai oleh ADB 3. Realisasi sampai dengan status 15 Maret adalah 4.035.793.499 4. Paket NAHP SMF tinggal satu kali pencairan masuk ke 62% 5. Paket NAHP PPP dilihat dari kontrak ada perpanjangan waktu 2 (dua) bulan, pagu saat ini masih progres 57,49%	• Setiap konsultan menindaklanjuti sesuai masukan dalam rapat

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			• Paket NAHP NCS status 30,59% berakhir kontrak 16 April 2021	
30	Rapat Koordinasi Rencana Penyediaan Hunian bagi ASN di IKN	Kamis, 25 Maret 2021 *Video Conferences via Zoom Meeting*	1. Tujuan rapat adalah mengkoordinasi rencana penyediaan hunian bagi ASN di IKN baru terkait kepastian jumlah ASN dan pejabat negara yang akan menjalankan tugas di IKN, terutama di kawasan inti pemerintahan 2. Dalam rencana penyediaan hunian bagi ASN di IKN, maka hal yang paling penting yang harus disiapkan adalah data jumlah ASN yang akan pindah ke IKN 3. Data jumlah ASN yang akan pindah menentukan penyediaan huniannya berdasarkan tipologi huniannya, dan tipologi ini mempengaruhi biaya/anggaran yang harus dikeluarkan. 4. Hasil perhitungan Satgas IKN, terdapat 199.486 yang terdiri atas ASN/TNI/POLRI. Angka ini tidak jauh berbeda dengan angka yang dikeluarkan oleh Tim POKJA Bappenas. Dan targetnya bahwa pada Tahun 2024, Pejabat Negara 100% pindah ke IKN kemudian diikuti oleh ASN/TNI/POLRI. 5. Bappenas menyampaikan 3 opsi rencana penyediaan hunian bagi ASN/TNI/POLRI yang harus dibahas oleh Tim Satgas Kementerian PUPR.	• Perlu mereviu kembali kebutuhan menganggarkan APBN pada Tahun 2022 bagi Unor terkait untuk persiapan kegiatan penyediaan hunian bagi ASN/TNI/POLRI. • Perlu segera menyusun Basic Design dan rencana aksi agar dapat dilakukan eksekusi jika dibutuhkan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Penyampaian Progres Proyek KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei	Kamis, 14 Januari 2021 via *video conference* melalui aplikasi *Zoom*.	a. Proyek KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei sudah masuk kedalam PPP Book TA 2020 pada tanggal 17 Desember 2020. b. Pembangunan KPBU Rusunawa KEK Sei Mangkei akan menjadi tempat relokasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan kilang minyak di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara. Pemprov Sumut juga sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar c. Pada tanggal 7 Januari 2020 Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara sudah menandatangani surat Screening Form yang anntinya akan diserahkan ke PT. PII sebagai penjamin Proyek. Untuk kegiatan KPBU ditingkat Provinsi diperlukan kerjasama antar lembaga eksekutif dan legislatif, karena dalam regulasi nantinya akan diperlukan juga persetujuan oleh DPRD.	Program relokasi masyarakat dimasukan dalam Renstra Dinas Permukiman yang nantinya masuk kedalam RPJMD Prov Sumut. Dalam sisi legal hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Gubernur Sumatera Utara sebagai PJPK agar sejalan dengan Sektor Prioritas Dukungan Pemerintah di Kementerian Keuangan, salah satunya sektor perumahan.
2	Rapat Koordinasi Persiapan Permohonan Fasilitas PDF Proyek KPBU rusun Cisaranten kepada Kementerian Keuangan	Selasa, 19 Januari 2021 Melalui *Video Conference*	a. Ada beberapa action plan yang perlu ditindaklanjuti oleh PJPK seperti perlunya BLU, nantinya Bappenas akan menuliskan secara detil dalam hasil review OBC tersebut. b. Surat permohonan konfirmasi pendahuluan perlu diproses terlebih dahulu, karena apabila nanti difinalisasi pada saat FBC memakai AP, maka tidak perlu membuat surat permohonan konfirmasi pendahuluan. c. Pada proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten ada sebagian kecil lahan yang dimiliki warga untuk kandang sapi, diharapkan dari PUPR bisa membebaskan lahannya sehingga perlu adanya dokumen rencana pengadaan lahan dalam lampiran permohonan PDF.	a. Tanggal 20 januari 2021 merupakan batas akhir final OBC. b. Bappenas akan mereview hasil final OBC dan memberikan hasil review kepada Kementerian PUPR. Perlu dikaji kembali terkait skema penggunaan APBN dalam proyek KPBU Perumahan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			d. Tim pelaksana ini tidak sesuai dengan tupoksi dari Sekretariat Ditjen Bina Marga, hanya keterkaitan lahan saja sehingga lebih baik apabila hanya Biro BMN Sekretariat Jenderal saja yang menjadi Tim Pelaksana sebab semuanya terpusat. e. Proyek KPBU Rusun Cisaranten ini merupakan bundling satu paket antara rusun MBR dengan komersil karena kalau hanya rusunawa saja akan sangat berat bagi PUPR untuk membayar APnya saja sehingga dibundling dengan komersial. Untuk tanahnya sama namun yang berbeda adalah towernya dan fasilitasnya yang dibedakan	
3	Rapat Koordinasi Percepatan Persiapan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Bandung	Jumat, 29 Januari 2021 Melalui *Video Conference*	a. Perkembangan penyiapan Proyek KPBU Rusun Cisaranten saat ini dalam tahap finalisasi dokumen Outline Business Case (OBC) oleh Bappenas dan proses pengajuan PDF. b. Sesuai kajian OBC Proyek KPBU Rusun Cisaranten dihasilkan tiga skema diantaranya terdapat dua skema yang terkait dengan alokasi APBN yaitu skema Availability Payment (AP) dan Hybrid Annuity Model (HAM). Penentuan alokasi AP akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. c. Pelaksanaan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Bandung perlu ada penentuan dan kesepakatan terhadap pembagian tugas dalam pendelegasian kewenangan PJPK yang akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. d. Berdasarkan Permen PUPR No. 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Tim	Direktorat Jenderal Perumahan yang diwakili oleh Direktur Rumah Susun dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum serta Direktorat Jenderal Cipta karya yang diwakili oleh Kepala Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan, Direktorat Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota dalam Tim KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Bandung sesuai dengan pendelegasian kewenangan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			KPBU dibentuk oleh PJPK untuk membantu Pelaksanaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU. Pada saat ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mengirimkan Surat Permohonan nama-nama yang akan berpartisipasi dalam Tim KPBU kepada Direktur Jenderal Perumahan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Selain itu akan segera mengirimkan juga Surat Permohonan yang sama kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya.	
1	Rapat Pembahasan Draft Keputusan Menteri Pelimpahan Wewenang Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bandung	Jumat, 5 Februari 2021 Via *Teleconference*	a. Sesuai amanat dari Permen PUPR No. 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, Pasal 7 bahwa Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya sebagai PJPK kepada Pimpinan Unit Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu mengacu juga kepada Permen PPN/ Bappenas No 4 tahun 2015 pasal 5 bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat melimpahkan kewenangannya sebagai PJPK kepada pihak yang dapat mewakili kementerian / Lembaga / pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pembagian Kewenangan Proyek KPBU Bidang Perumahan ini akan di generalisasikan dengan catatan karakteristik proyek KPBU Bidang Perumahan yang sama. c. Untuk pembagian anggaran, Unor DJPI akan memfasilitasi pada tahapan penyiapan dan transaksi, dan Unor DJP akan memfasilitasi pada tahapan pelaksanaan perjanjian. d. Secara global, hal-hal teknis nantinya akan berada pada kewenangan Ditjen Ciptakarya.	Adapun masukan-masukan untuk draft Kepmen ini diantaranya adalah: a. Judul sebaiknya digeneralisasikan, tidak khusus untuk Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten. Namun dengan catatan Proyek yang akan di KPBU kan memiliki karakteristik yang sama b. Pada bagian mengingat, belum ada Permen PUPR nomor 1 tahun 2018 dan Permen PUPR nomor 19 tahun 2019, sehingga perlu dicek kembali sebagai acuan penyusunan Kepmen ini. c. Pada Diktum ke 2, kata “Apabila” sebaiknya diganti menjadi “Dalam Hal”. d. Pada Diktum ke 2 No 12, kata “kegiatan” sebaiknya diperjelas dengan “Proses finalisasi Perjanjian KPBU” agar tidak multitafsir.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			e. Pada Timeline Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bandung ini seharusnya lelang dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2021, namun karena OBC masih belum diserahkan, sehingga kemungkinan lelang akan dilaksanakan pada awal tahun 2022. e. Untuk Proses lelang akan dilaksanakan oleh Unor DJPI. Dirjen akan membentuk Tim Lelang untuk Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bandung.	Pada Diktum ke 3, mekanisme DJP dalam penilaian dan persetujuan teknis sebaiknya dijelaskan lebih detail.
2	Rapat Internal Pembahasan Dokumen Pengadaan Lahan Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bandung	Selasa, 10 Februari 2021 Ruang Rapat Dit. PPP	a. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan Proyek KPBU Cisaranten Bina Harapan Bandung. b. Lokasi tanah yang akan dibebaskan terletak di Desa Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah yang diusulkan untuk pengadaan lahan yaitu seluas 4.360 m^2. c. Status tanah adalah Hak Milik Adat (Pribadi) yang sebagian digunakan sebagai kandang hewan ternak/kandang sapi, dengan sertipikat tanah dalam bentuk hibah (hibah), terakhir atas nama Doyot Hidayat. d. Pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Akan segera dibuat timeline proses pengadaan lahan sesuai Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
3	*Kick Off Meeting* Tim KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	Kamis, 25 Februari 2021 Ruang Rapat Dirjen	a. Dokumen Outline Business Case (OBC) sudah diberikan oleh World Bank kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 22 Februari 2021 dan saat ini proses pengajuan PDF. b. Sesuai kajian OBC Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dihasilkan tiga skema diantaranya terdapat dua skema yang terkait dengan alokasi APBN yaitu skema Availability Payment (AP) dan Hybrid Annuity Model (HAM). Penentuan alokasi AP akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. c. Dalam pelaksanaan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung sudah ada penentuan dan kesepakatan terhadap pembagian tugas dalam pendelegasian kewenangan PJPK yang akan dituangkan dalam draft Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung. d. SK Tim KPBU Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung sudah diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 10/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam	1. Tim KPBU akan dikirimkan Dokumen OBC untuk dapat dipelajari; dan Perlu diadakan diskusi yang lebih detail melalui rapat lanjutan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung. e. Dalam hal pemanfaatan aset BMN untuk Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung perlu dilakukan: a) pengajuan skema KSPI ke Direktorat BMN, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. b) pemindahbukuan dan pencatatan aset BMN dari Ditjen Bina Marga ke Ditjen Perumahan. f. Direktorat Jenderal Perumahan yang diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Perumahan, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktur Rumah Susun, Direktur Rumah Umum dan Komersial, dan Direktur Kepatuhan Intern telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan pengadaan tanah dan menganggarkan pembayaran ketersediaan layanan.	
1	Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi KPBU Bidang Perumahan	Senin, 15 Maret 2021 Di Aviary Hotel Bintaro dan melalui *Teleconference*	1. Draf SOP Pemantauan dan Supervisi KPBU Bidang Perumahan disusun pada tahun 2020 bertujuan menjadi pedoman Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan setiap tahapan proyek KPBU untuk meminimalisasi kesalahan saat pelaksanaan tugas; memperjelas peran, tanggung jawab, dan fungsi tiap – tiap unit Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam organisasi proyek KPBU; menjadi pegangan secara hukum untuk melindungi organisasi Proyek KPBU dan pegawai dari kesalahan administrasi.	a. Menentukan prioritas pelaksanaan, mana yang akan dilakukan dan dirilis terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan. b. Revisi atau penyesuaian draf SOP berdasarkan masukan yang diterima.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			2. Penyusunan Pedoman dan draf Standar Operasi dan Prosedur (SOP) KPBU Bidang Perumahan ditargetkan untuk dapat disahkan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun saat pengajuan awal, disarankan untuk Penyusunan Pedoman dan SOP KPBU seluruh sektor. Draf SOP yang telah disusun sejumlah 12 SOP yang terkait Tahap Perencanaan, Penyiapan, Transaksi, Pemantauan dan Evaluasi pada KPBU Bidang Perumahan secara solicited dan unsolicited. 3. Tim KPBU di dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi menggunakan instrumen yang disusun untuk memeriksa kesesuaian substansi dalam penyusunan dokumen – misalkan pengeceken Value for Money, namun pemeriksaan kesesuaian tersebut membutuhkan kapabilatass Sumber Daya Manusia yang mampu untuk dapat mereviu studi / dokumen yang disusun.	
2	Kunjungan Lokasi Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	Kamis, 18 Maret 2021 Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung	1. Kunjungan Lokasi ke lahan proyek yang berlokasi di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik bersama PT. PII dan PT. SMF 2. Lokasi Proyek Berada satu hamparan dengan Kantor Pusjatan (12.5 ha) di Jalan AH Nasution, dengan Luas lahan seluas 5 Ha dan tidak diokupansi 3. Proyek Cisaranten merupakan Pilot Project Bidang Perumahan sehingga harus dibuat menarik untuk pihak investor 4. Proyek ini menggunakan lahan BMN sehingga nantinya aka nada proses KSPI	

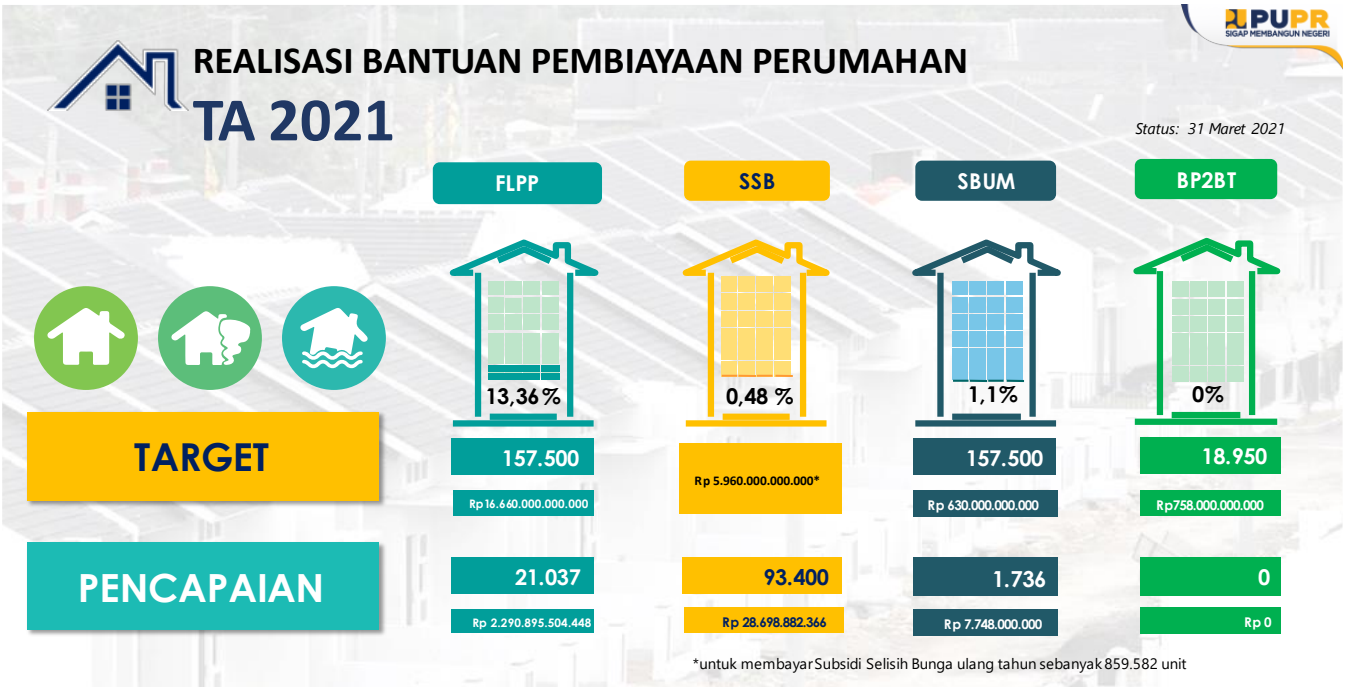
NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
3	Rapat Pembahasan Persiapan Pengadaan Proses Transaksi Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	Rabu, 17 Maret 2021 Hotel Dharmein, Jakarta Selatan dan melalui *Teleconference* via Zoom Meeting	1. Persiapan Pengadaan Proses Transaksi Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*) agar para peserta terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam prosedur pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada tahapan transaksi untuk bidang perumahan. 2. Prinsip Pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Akuntabel, Bersaing dan Adil/Tidak Diskriminatif. 3. *Checklist* dokumen kesiapan proyek yang harus disiapkan pada proses Penyiapan Transaksi terdiri dari: a. Surat Pernyataan PJPK bahwa proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi, dan finansial b. Pra-Studi Kelayakan (Pre-FS) c. Dukungan Pemerintah (VGF) dan/atau Jaminan Pemerintah d. Penetapan pengembalian investasi BUP e. Penetapan Lokasi KPBU: • Dokumen terkait penetepan Lokasi KPBU atau • Dokumen terkait pemanfaatan aset BMN/BMD f. Dokumen Konsultasi Publik Proyek Konsultasi Publik harus berisi: • Respon dan penerimaan/masukan dari pemangku kepentingan • Evaluasi hasil yang diperoleh dari konsultasi publik dan implementasinya di KPBU ditandatangani oleh PJPK g. Hasil Penjajakan Minat Pasar (Dokumentasi pertemuan langsung dan promosi KPBU dengan investor KPBU, institusi nasional dan internasional yang tertarik proyek KPBU) h. Dokumentasi Lingkungan • Penentuan Dokumen Lingkungan yang Berlaku	

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			• Kebutuhan Dokumen Lingkungan yang dibutuhkan seperti AMDAL atau UKL/UPL i. Dokumen tambahan yang diperlukan untuk sektor spesifik j. DED tidak diperlukan pada saat lelang, namun *basic design* harus tetap ada. Karena DED terlalu detail. 4. Didalam lelang dua tahap terdapat inovasi. Inovasi tersebut memungkitkan Badan Usaha dapat memberikan solusi yang sebelumnya tidak pernah ada. Ada persyaratan tambahan yang tidak dikunci sehingga Badan Usaha dapat memberikan Inovasi terbiasa sesuai dengan yang diharapkan PJPK 5. Panitia pengadaan dalam menyusun persyaratan harus mempertimbangkan kemampuan Badan Usaha yang akan mengikuti lelang. 6. Jadwal Pengadaan harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk menerapkan semua tahapan dan aktivitas utama dalam Pengadaan Badan Usaha Pelaksana. 7. Pada saat proses PQ jika sudah ada yang men-*submit* dokumen PQ, maka panitia dapat secara langsung mengevaluasi dokumen tersebut untuk mempercepat waktu 8. Jika dalam batas waktu lelang tidak ada penawaran maka secara otomatis akan ada perpanjangan waktu lelang. Namun hal tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada PJPK. 9. Untuk penyimpanan di Data *Room* bisa menggunakan *drive* digital seperti *Google Drive* atau *Dropbox*. 10. PJPK menetapkan layanan dan standar kinerja yang dipersyaratkan dan menyerahkan kepada Peserta untuk memutuskan desain pekerjaan dan solusi yang diperlukan dalam memberikan layanan tersebut. Spesifikasi keluaran ini berbentuk *Service Level Agreement* (SLA).	

02 Kemudahan dan Bantuan

Kemudahan dan Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat memiliki rumah antara lain Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Progres Capaian Produk Kemudahan dan Bantuan



Gambar Progres Capaian Produk Kemudahan dan Bantuan

Pada tahun Q1 2021, FLPP memiliki target penyaluran sebanyak 157.500 unit, target SBUM pada 2021 sebanyak 157.500 unit, dan untuk BP2BT memiliki target sebanyak 18.950 unit. Sedangkan untuk SSB pada tahun 2021 ini merupakan pembayaran untuk tahun sebelumnya (menggulung) dengan besar target penyaluran sebesar Rp 5.960.000.000.000,00.

Pencapaian hingga 31 Maret 2021 untuk program FLPP adalah sebanyak 21.037 unit atau sebesar Rp 2.290.895.504.448,00, capaian SBUM sebanyak 1.736 unit atau sebesar Rp 7.748.000.000,00, dan BP2BT belum tersalurkan. Penyaluran SSB ulang tahun hingga 31 Maret 2021 adalah sebanyak 93.400 unit atau sebesar Rp 28.698.882.366,00

Perkembangan Regulasi

Perkembangan regulasi terkait Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan:

NO	URAIAN	STATUS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	**Kriteria MBR** KepmenPUPR tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya	Telah terbit Keputusan Menteri PUPR No. 411/ KPTS/M/2021 Tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya, tanggal 7 April 2021		
2.	**BP2BT /HMF** Rapermen PUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	• Izin prakarsa Bapak Menteri PUPR melalui surat No HK.01.01-Mn/410 tanggal 15 Maret 2021	Belum disepakati apakah status Rapermen akan menjadi perubahan atau penggantian	Melakukan percepatan penyelesaian pembahasan RapermenPUPR
		• Telah terbit SK Dirjen PI No 12/KPTS/Dp/2021 terkait Pembentukan Tim Penyusun Rancangan PermenPUPR		
		• Telah dibahas tanggal 15 Maret 2021 melibatkan Bank Pelaksana		
		• Telah dilakukan 2 kali pembahasan draft RapermenPUPR dengan tim penyusun		
3.	**KPR Siap Bangun**	• Telah dilakukan 3 kali pembahasan melibatkan Perum Perumnas dan Bank BTN	Masih diperlukan kejelasan terkait konsep pembiayaan KPR Siap Bangun	PPDPP akan membuat kajian terkait konsep KPR Siap Bangun
		• Konsep SK Tim Penyusun RapermenPUPR tentang KPR Siap Bangun telah disiapkan		
4.	**Kepesertaan FLPP di BP Tapera**	• Telah dilakukan 2 kali pembahasan melibatkan Kemenkeu,		Akan dibahas lebih lanjut

		BP Tapera, dan PPDPP	Masih memerlukan pembahasan RapermenPUPR	dengan Tim Penyusun RapermenPUPR
		• Pokok pengaturan Rapermen telah disepakati		
		• Konsep SK Tim Penyusun RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima Manfaat FLPP pada BP Tapera		

Kegiatan Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan

Kegiatan pelaksanaan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang dilakukan selama Bulan Januari 2021 – Maret 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
1	*Kick-Off* Sinergi Proses Bisnis KPR Bersubsidi dengan BP2BT	Selasa, 5 Januari 2021 Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP	1. Perbedaan proses bisnis BPBT dengan FLPP dan SSB/SSM terletak pada tahap pengujian, dimana pada BP2BT terdapat pengujian manual dan uji petik (10%) terhadap dokumen permohonan KPR yang lolos pengujian otomatis; 2. Kasubdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mengusulkan agar dilakukan perubahan PermenPUPR No 20/PRT/M/20219 terutama format H, untuk mengakomodir perubahan kebijakan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan mengusulkan agar pencairan dana BP2BT dilakukan bertahap untuk meminimalisir risiko; 3. Direktur Utama PPDPP mengusulkan agar semua program pembiayaan perumahan memanfaatkan aplikasi (siKasep, siKumbang, dan siPetruk), dimana pemantauan kualitas rumah dapat menggunakan aplikasi siPetruk; dan 4. Kepala Bagian Hukum dan Kompu mengusulkan agar hanya ada satu	• Laporan akan diserahkan kepada Dirjen untuk dikaji kembali mengenai keputusan Sinergi Proses Bisnis KPR Bersubsidi dengan BP2BT. •

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			program bantuan pembiayaan perumahan yang dikelola DJPI.	
2	Rapat Persiapan Pelaksanaan BP2BT TA 2021	Kamis, 7 Januari 2021 Ruang rapat Dit PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Kepala *Project Implementation Unit* (PIU) NAHP, *Task Team Leader* NAHP	1. Restrukturisasi NAHP pertama pada bulan Juli 2020 menyetujui bahwasannya proyek akan diperpanjang sampai dengan Februari 2022. Dengan merealokasi target BP2BT sebesar 72.000 unit atau USD 205 Juta. Sampai dengan akhir 2020, masih terdapat dana sebesar USD 219 Juta yang belum digunakan; 2. Realisasi BP2BT hanya mencapai 6.578 unit atau 9,1% dan sebesar USD 18,5 Juta atau 9% dari total target realokasi; 3. Terkait perpanjangan kontrak sampai dengan Feb 2023, WB menilai hal tersebut memiliki risiko tinggi dan beberapa isu seperti perpanjangan kontrak tidak menjamin penyaluran yang lebih banyak, BP2BT diangap 2 (dua) kali gagal dalam mencapai target penyaluran; 4. Wb fokus terhadap kualitas rumah, karena berdasarkan *rapid assessment* hanya 16% yang memenuhi kualifikasi aman; 5. WB merekomendasikan menggunakan desain produk yang	1. Menyiapkan tim khusus untuk mengawal program HMF; 2. Menyiapkan dokumen desain, juknis, serta regulasi untuk program HMF.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			simpel, dilengkapi dengan peraturan (permen/Juknis/SK), pemantauan kualitas bangunan oleh MK, dan sesuai timeline secepatnya mempersiapkan DIPA, MoU Bank Pelaksana dan PKS, serta berkoordinasi dengan Bank Pelaksana (BTPN Syariah).	
3	Rapat Tindak Lanjut Audiensi Perum Perumnas dengan Bapak Menteri PUPR	Senin, 11 Januari 2021 Ruang rapat Dit PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Perum Perumnas	1. Saat ini Perumnas memiliki persediaan dalam proyek perumahan bagi MBR (subsidi) sebanyak Rp 4,36 Triliun, dan mengusulkan agar Kementerian PUPR menyediakan pembiayaan dengan agunan persediaan tersebut untuk membiayai kebutuhan biaya proyek rencana penugasan pembangunan sebesar Rp 3,42 Triliun; 2. Pembiayaan sebagaimana angka 1 akan dibayar kembali ke Kementerian PUPR dari hasil penjualan rumah dalam proyek rencana tersebut; 3. Perumnas meminta agar diarahkan ke Ditjen terkait di Kementerian PUPR yang menangani hal tersebut; 4. Perumnas mengusulkan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada Kementerian	• Kebutuhan Perumnas harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan apakah dimungkinkan dilakukan mekanisme pembiayaan ke Perumnas dengan jaminan barang persediaan yang dimiliki.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			PUPR untuk sebanyak 95.822 unit atau sebesar Rp 95 Miliar.	
4	Rapat Pengalihan Dana FLPP Pada PPDPP Kepada BP Tapera	Jumat, 15 Januari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP, BP Tapera	1. Disepakati reviu BPKP akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada kuartal 1 dan kuartal 4 tahun 2021; 2. PPDPP dan BP Tapera menyetujui metode pengalihan Aset Transfer dimana pengalihan tidak hanya pada Dana FLPP tetapi juga SDM dan IT. Pengalihan SDM PPDPP akan dilakukan dengan cara assessment atau penyaringan; 3. Dibutuhkan pembentukan direktorat baru pada BP Tapera yang berfungsi untuk mengelola Dana FLPP; 4. BP Tapera mengharapkan adanya PMK yang mengatur: • Izin BP Tapera menggunakan sebagian PNBP dengan cara NET yang dapat digunakan membiayai operasional direktorat baru yang berfungsi menangani pengelolaan Dana FLPP; • Pemisahan manfaat antara penerima FLPP dan anggota penabung di BP Tapera. 5. Usulan proses bisnis PPDPP pasca ngelihan Dana FLPP yaitu:	1. DJPI akan menyiapkan surat Bapak Direktur Jenderal perihal Permohonan reviu BPKP terhadap Dana FLPP; 2. Akan dilakukan perbaikan pada draft SK Tim Satgas Pengalihan Dana FLPP pada PPDPP kepada BP Tapera; 3. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada minggu ke-3 bulan Januari terkait pemindahan aset, SDM dan IT PPDPP kepada BP Tapera dan pembahasan proses bisnis PPDPP pasca pengalihan Dana FLPP dengan mengundang para Narasumber; 4. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait pembahasan: a. izin pembentukan direktorat baru pada BP Tapera b. Pencabutan tugas BLU PPDPP c. Pembentukan PMK untuk mengakomodir proses pengalihan Dana FLPP 5. Akan dibentuk Tim Kecil yang bertugas mengawal proses pengalihan Dana FLPP pada PPDPP kepada BP Tapera dan berkewajiban memberikan laporan setiap minggunya.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			• Memberikan fasilitas bagi kelompok sasaran dengan penghasilan dibawah UMP (tidak terlayani oleh BP Tapera); • Menjadi BLU di Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan (BP3).	
5	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Senin, 18 Januari 2021 Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1. Segmentasi penerima manfaat skema *housing microfinance* adalah MBR sektor informal; 2. Diusulkan pelaksanaan skema *housing microfinance* dalam bentuk *pilot project*; 3. Skema ini sudah diusulkan kepada Bapak Menteri dan mendapatkan persetujuan dengan catatan tidak menjadi kompetitor dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); 4. Diusulkan penyaluran bantuan menggunakan 2 pendekatan yaitu melalui perbankan dan lembaga keuangan non bank, kaitannya dengan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada MBR; 5. Apabila pelaksanaan skema *housing microfinance* dengan melakukan perubahan peraturan menteri, maka perlu dipersiapkan kelengkapannya seperti izin prakarsa dan lain-lain.	1. Penyiapan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; 2. Menentukan alternatif sumber pendanaan proyek dengan menggunakan dana NAHP atau APBN; 3. Perlu konfirmasi kembali dengan Ditjen Perumahan kaitannya dengan perbedaan segmentasi program BSPS dengan skema HMF.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
6	Rapat Pembahasan Suku Bunga KPR BP2BT TA 2021	Selasa, 19 Januari 2021 Ruang rapat Dit PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Perbankan (BTN, BNI, BRI, BPD Jateng)	1. Suku Bunga yang diberlakukan pada SBKP dan BP2BT sama-sama menggunakan suku bunga komersial namun pada pelaksanaannya suku bunga BP2BT lebih tinggi dibandingkan SBKP; 2. Perlu dilakukan pengkajian ulang terkait suku bunga acuan yang digunakan karena suku bunga BP2BT saat ini menggunakan SUN 10 tahun ditambah marjin yang dirasa terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat sehingga masyarakat tidak tertarik untuk mengajukan BP2BT; 3. Diharapkan agar kenaikan suku bunga dilakukan berjenjang agar tidak mengganggu *cash flow* masyarakat.	• Diskusi lebih lanjut terkait dukungan SMF agar dapat mengurangi suku bunga yang berlaku.
7	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Senin, 25 Januari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Terdapat perubahan pada poin terminologi perbaikan rumah, persyaratan Bank Pelaksana dan persyaratan perbaikan rumah; 2. Batas luasan lantai rumah paling besar adalah 36m^2; 3. Perbaikan rumah swadaya mencakup penambahan luas lantai rumah (menambah struktur) sehingga tetap diperlukan IMB; 4. Disampaikan usulan Bank BTPN terkait persyaratan Bank Pelaksana	1. Melakukan pembahasan dengan melibatkan Direktorat Rumah Swadaya, Dirktorat Jenderal Perumahan terkait dengan kriteria, format lampiran dan rencana anggaran biaya BSPS; 2. Melakukan pembahasan dengan melibatkan Bank BTPN Syariah terkait dengan persyaratan Bank Pelaksana; 3. Melakukan pembahasan dengan melibatkan Bank Pelaksana BP2BT.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			yaitu memiliki pengalaman dalam penerbitan KPR atau pembiayaan mikro untuk tujuan perbaikan rumah paling singkat 2 (dua) tahun.	
8	Rapat Pembahasan Status Aset PPDPP Paska Pengalihan Dana FLPP ke BP TAPERA	Selasa, 26 Januari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP, BP Tapera	1. Disepakati bahwa seluruh aset baik aset berwujud maupun tidak berwujud pada PPDPP senilai Rp 9,7 M per 31 Desember 2020 akan dilikuidasi seluruhnya ke BP Tapera; 2. Untuk dapat menentukan prosedur pemindahan atau likuidasi aset PPDPP ke BP Tapera, perlu kejelasan terkait; a. Keberlangsungan PPDPP; b. Posisi KPA Investasi Pemerintah berada pada Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan atau BP Tapera. 3. Pemindahan aset PPDPP kepada BP Tapera dapat dilakukan karena memenuhi beberapa kriteria yaitu: a. PPDPP tidak lagi beroperasi sebagai entitas akutansi atau pelaporan; b. Perubahan identitas atau status; c. Tidak mendapat alokasi anggaran di tahun selanjutnya. 4. Melihat ketentuan yang ada, proses yang perlu dilakukan adalah dengan proses alih status BMN dan ijin	1. Tim akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Ortala (BKO) untuk menyiapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal perihal pembentukan Tim Likuidasi dan Tim Transisi; 2. Tim akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro Pengelolaan BMN terkait persiapan pemindahan aset; 3. Tim akan menyiapkan skema proses bisnis PPDPP paska pengalihan Dana FLPP.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			prinsip kepada Bapak Menteri PUPR.	
9	Rapat PKS SBUM	Selasa, 26 Januari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Terdapat 2 (dua) alternatif rencana penyaluran SBUM: a. Rencana penyaluran SBUM oleh PIHAK KEDUA untuk rumah umum tapak ditetapkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk pembayaran SBUM yang telah dilakukan akad KPR Sejahtera Tapak sejak 1 Januari 2021; atau b. Rencana penyaluran SBUM oleh PIHAK KEDUA untuk rumah umum tapak ditetapkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk pembayaran SBUM yang telah dilakukan akad KPR Sejahtera Tapak sejak 21 Januari 2021. 2. Perbankan, menyepakati: a. Menyetujui klausul-klausul perubahan draft PKS yang telah dijelaskan Satker; b. Penagihan pembayaran SBUM kepada Satker bisa dilakukan setelah penandatanganan PKS untuk akad KPR Sejahtera yang	• Penandatanganan PKS SBUM antara Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri dengan Satker akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			telah dilakukan sejak 4 Januari 2021.	
10	Koordinasi Pengalihan Dana FLPP pada PPDPP kepada BP TAPERA	Jumat, 29 Januari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Kementerian Keuangan	1. Dana FLPP yang dialihkan sebesar kurang lebih sebesar Rp 44 T (tahun 2010-2020) dan sebesar Rp 16,6 T (tahun 2021). Perlu diperhatikan mekanisme pengalihan Dana FLPP tersebut, dilakukan secara bertahap atau sekaligus; 2. Reviu BPKP dilakukan setelah PMK terkait disahkan dan pengaturannya sudah masuk dalam Rancangan PMK tersebut dimana permohonan reviu dilakukan oleh BLU PPDPP; 3. Aset PPDPP dapat dilikuidasi menjadi aset negara, sehingga peralihan aset tersebut ke unit lain akan mengikuti ketentuan dalam pengelolaan BMN dan melalui tahapan pengalihan aset BMN ke badan lain; 4. Dalam skema Investasi Pemerintah (IP) terdapat *fee* bagi BP Tapera atas pengelolaan Dana FLPP, *fee* tersebut dapat digunakan sebagai dana operasional pengelolaan Dana FLPP.	• Akan disiapkan skema proses bisnis PPDPP paska pengalihan Dana FLPP.
11	Rapat Pembahasan KPR Fidusia	Jumat, 29 Januari 2021	1. Pemerintah Daerah belum ada yg menerbitkan SKBG sehingga belum ada ketentuan internal dari bank untuk mengakomodir SKBG;	• Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut minggu depan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
		Ruang rapat Dit PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	2. Prespektif Bank BTN terhadap KPR Fidusia ini adalah perlu dapat *marketable* (memiliki permintaan) dan *executable* (dapat direalisasikan). Kemudian *cover ratio* dihitung berdasarkan bangunan gedung bukan hak atas tanah. Kemudian juga diperlukan perjanjian atas pembeli tanah dan pembeli bangunan untuk menjalankan Jaminan Fidusia; 3. Skema KPR Fidusia: Jangka waktu KPR tergantung pada perjanjian pembeli tanah dan pembeli bangunan yaitu maksimal 1 tahun sebelum berakhirnya hak atas tanah. Dalam menilai dilakukan dengan pendekatan harga produksi namun tetap tergantung ketentuan pemerintah. Untuk bunga tetap kembali pada kebijakan pemerintah; 4. Fidusia dikenal umum sebagai jaminan terhadap barang tidak bergerak dan bisa dilakukan terhadap sarusunami jika SKBG sarusun telah ada. RPP Rumah Susun sudah disepakati oleh beberapa kementrian namun karena UU Cipta Kerja dibutuhkan penyesuaian lagi pada RPP Rumah Susun.	

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
12	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Rabu, 3 Februari 2021 Ruang rapat Dit PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Bank BTPN Syariah	1. BTPN SYARIAH memberikan masukan: Agar ditambahkan definisi perbaikan struktural dan non struktural; Terkait persyaratan perbaikan rumah cukup dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan mengingat kelompok sasaran merupakan masyarakat ultra mikro yang memiliki keterbatasan; Sebagian masyarakat berpenghasilan rendah tidak familiar dengan NPWP dan SPT PPh 21 selain itu ada pula yang belum memenuhi PTKP yang dipersyaratkan dalam NPWP dan PPh 21, mengusulkan dua hal tersebut menjadi opsional. 2. Disepakati bahwa persyaratan memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan, pembangunan, dan/atau perbaikan rumah paling singkat 2 (dua) tahun harus dibuka untuk umum, apabila perbankan belum memenuhi persyaratan maka dapat diberikan kesempatan untuk menambah pengalamannya atau memberikan kesempatan kepada perbankan yang sudah siap;	• Melakukan pembahasan melibatkan internal Kementerian PUPR terkait masukan yang diberikan oleh perbankan dan Direktorat Rumah Swadaya.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			3. Syaifudin Ishar, Housing and Settlement Specialist, Advisory Consultant: a. Memberikan masukan terkait perbaikan struktural dapat dikategorikan menjadi perbaikan struktural ringan, sedang, dan berat sehingga perbaikan rumah swadaya dapat difokuskan/dibatasi kepada perbaikan struktural yang sifatnya ringan maupun non struktural; b. Terkait penambahan luas lantai rumah, mengusulkan ada batasan mengenai luasan minimum dan maksimun yang dapat diakomodir oleh HMF.	
2	Rapat Pembahasan *Green Building* Rumah Bagi MBR	Kamis, 4 Februari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Tim GBCI	1. Penerapan Konsep *green building* pada sektor Infrastruktur perlu segera dilakukan karena: a. Saat ini bahan material yang memiliki stardardisasi *green building* memiliki perbedaan harga yang tidak signifikan dengan bahan material tanpa standar *green building*; b. Berdasarkan praktek yang dilakukan di lapangan, penerapan konsep *green building* hanya membutuhkan	• GBCI siap bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk *pilot project green building* di proyek perumahan bagi MBR dan siap berpartisipasi sejak awal proyek.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			incremental cost sebesar 5,08% dengan *Payback Period* selama 3,1 tahun, namun dapat menghemat *utility cost* sebesar 56%, setara Rp 4,1 M per tahun atau setara dengan 726 energi Rumah Sederhana Sehat; c. Bangunan yang menerapkan *green building* memiliki *value* lebih karena biaya operasional yang lebih murah sehingga kesehatan keuangan juga menjadi lebih baik. 2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep *green building* pada rumah bersubsidi di antaranya: a. Penilaian *Greenship Rating System* pada satu hamparan tidak hanya dilihat dari satuan unit rumah tapak tetapi juga Prasarana Sarana dan Utilitas Umum; b. Adanya *Green Mortgage* yang diberikan setelah rumah dinyatakan memenuhi ketentuan standard *Green Building.*	

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
3	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Jumat, 5 Februari 2021 Ruang rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	Disepakati beberapa substansi Perubahan Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 di antaranya: a. Penambahan peruntukkan Dana BP2BT untuk Perbaikan Rumah Swadaya; b. Penambahan nomenklatur Perbaikan Rumah Swadaya; c. Perubahan besaran Dana Swadaya menjadi 1% (satu persen); d. Penambahan ketentuan pencairan dana BP2BT untuk Perbaikan Rumah Swadaya dicairkan setelah pencairan kredit dari Bank Pelaksana; e. Ketentuan Kelompok Sasaran sesuai dengan Permen PUPR no 1 tahun 2021; f. Penambahan komponen biaya Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya di dalamnya termaksud Sertifikat Hak Milik (SHM); g. Penambahan ketentuan Perbaikan Rumah Swadaya termaksud di dalamnya	1. Dalam hal pengajuan perubahan Permen, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan perlu menyiapakan beberapa dokumen di antaranya: a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Pembasahan Rapermen PUPR; b. Izin Prakarsa Perubahan Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 kepada Bapak Menteri PUPR; c. Surat Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan perihal permohonan pengajuan nama anggota Tim Pembahasan Rapermen PUPR kepada Unit Kerja lain di luar Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. 2. Perlu dilakukan *Kick Off Meeting* pembahasan perubahan Permen PUPR dengan melibatkan Biro Hukum untuk menginformasikan terkait substansi perubahan Permen PUPR dan berkoordinasi terkait Izin Prakarsa; 3. Perlu ditinjau kembali Rapermen PUPR tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait, sehingga tidak

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); h. Penambahan pengecualian pengembalian Dana BP2BT; i. Perubahan ketentuan Bank Pelaksana yaitu Bank Umum dan BUS dan memiliki pengalaman kredit atau pembiayaan untuk pemilikan, pembangunan dan/atau perbaikan rumah; j. Penambahan ketentuan pengendalian dan pengawasan penyaluran Dana BP2BT oleh Satuan Kerja dan Bank Pelaksana.	perlu dilakukan perubahan pada PMK tersebut.
4	Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Pada Tahap Persiapan	Senin, 8 Februari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan pada tahap persiapan. Adapun lingkup pemantauan tahap persiapan di antaranya: a. Melakukan analisa terhadap alokasi penyaluran Dana FLPP, SSB/SSM, SBUM, dan BP2BT sesuai dengan DIPA; b. Melakukan analisa terhadap rencana kegiatan tahunan BLU PPDPP, Satker DJPP, dan Satker PIPUP dalam melakukan	• Akan disiapkan laporan kepada Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terkait persiapan penyaluran bantuan kemudahan KPR bersubsidi dan BP2BT pada pertengahan Februari.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			penyaluran Dana FLPP, SSB/SSM, SBUM, dan BP2BT sehingga target kinerja dan penyaluran anggaran dapat tercapai; c. Melakukan analisa kesesuaian ketersediaan alokasi penyaluran Dana FLPP, SSB/SSM, SBUM, dan BP2BT dengan target unit penyaluran pada dokumen Perjanjian Kerjasama di masing-masing Bank Pelaksana. 2. Untuk persiapan, ada beberapa lembar kerja yg harus dipenuhi. Diharapkan BLU PPDPP, Satker DJPP, dan Satker PIPUP dapat mengumpulkan lembar kerja paling lambat pertengahan Februari agar dapat disiapkan laporan kepada Pak Dirjen terkait persiapan penyaluran bantuan kemudahan KPR bersubsidi dan BP2BT.	
5	Laporan Rapat Koordinasi Pembiayaan Perumahan	Rabu, 10 Februari 2021 Ruang Rapat DJPI dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Perumahan Perumnas yang tidak teserap sudah ditindaklanjuti, telah dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi perumahan Perumnas yang potensial dan dibentuk tim untuk memfasilitasi Perumnas;	1. Beberapa isu terkait perumahan yang disampaikan pada Rapat Intern Sekretariat Wakil Presiden RI pada Kamis, 17 September 2020 telah ditindaklanjuti; 2. Mengharapkan koordinasi lebih lanjut secara regular dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
		Peserta: Sekretariat Wakil Presiden RI, BP Tapera	2. Upaya pengalihan anggaran yang tidak terserap di tahun 2020 telah dilakukan, namun dari sisi administrasi perubahan anggaran tidak dimungkinkan dilakukan di akhir tahun anggaran; 3. Perlu menindaklanjuti usulan dari Kementerian Keuangan agar anggaran SSB dan SBUM yang belum terserap sepenuhnya di tahun 2020 dapat dialihkan dalam skema subsidi BPHTB; 4. Mengingat harga jual rumah bersubsidi tidak mengalami kenaikan di tahun 2021, PPDPP akan melakukan *value engineering* terhadap rumah berubsidi sehingga Dana FLPP yang tersedia dapat membiayai sampai dengan 170.000 unit; 5. Proses pengalihan dana PNS Bapertarum ke BP Tapera telah selesai adapun pengalihan dilakukan atas 4,2 juta data PNS dan dana sebesar Rp 11,8T; 6. Target fasilitasi pembiayaan perumahan oleh Tapera di tahun 2021 sebesar 25.380 unit rumah, sedangkan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 500.000 ASN akan difasilitasi melalui Tapera.	

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
6	Rapat Pembahasan Kepesertaan Penerima FLPP di BP Tapera	Kamis, 11 Februari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: BP Tapera	1. Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Tapera dan bagi ASN yang sudah mendapatkan FLPP sudah dipotong pendapatannya untuk iuran Tapera; 2. Terkait dengan masa transisi dapat diartikan batas waktunya sampai dengan BP Tapera beroperasi penuh atau sampai tahun 2027, dimana PPDPP dapat tetap melayani untuk segmen yang tidak dapat dilayani oleh BP Tapera. Dengan demikian meskipun Dana FLPP berada di BP Tapera namun target RPJMN melalui FLPP tetap tercapai; 3. Di tahun 2021 peserta Tapera selain dari ASN dapat diikuti oleh peserta dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan pekerja mandiri atau informal. Sedangkan untuk peserta dari TNI/POLRI akan ikut di tahun 2022; 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tabungan Perumahan Rakyat pada Pasal 65 ayat (1), disebutkan bahwa masyarakat yang telah menerima manfaat FLPP dapat ditetapkan	1. Akan dilakukan inventarisasi terkait dengan fitur FLPP dan Tapera *exercise* terkait dengan penyatuan produk FLPP dan Tapera; 2. FLPP tetap disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan target pada RPJMN tahun 2020-2024; 3. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengalihan Dana FLPP ke BP Tapera dan kepesertaan Tapera termasuk besaran iuran yang diwajibkan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			atau dicatat. Dimana perlakuannya nanti bagi penerima manfaat Tapera yang belum menabung akan dicatat sebagai peserta yang belum diwajibkan menabung dan bukan ditetapkan yang akan diberikan nomor unit kepesertaan.	
7	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Kamis, 11 Februari 2021 (Pukul 09.00-selesai) Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan telah bersurat kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR perihal permohonan Izin Prakarsa pada tanggal 9 Februari 2021; 2. Telah disepakati sebelumnya bahwa program Perbaikan Rumah Swadaya BP2BT dan BSPS berbeda dan tidak tumpang tindih dalam pengaturan. Perbedaan Perbaikan Rumah Swadaya dalam Program BSPS dan BP2BT di antaranya: a. Terdapat komponen kredit dalam BP2BT sehingga perbaikan Rumah Swadaya sampai dengan 70% dari total RAB pembangunan Rumah Swadaya, lebih besar dari BSPS; b. Segmentasi Kelompok Sasaran BP2BT adalah	1. Perlu dilakukan pembahasan lanjutan untuk meninjau setiap pasal dalam Rapermen PUPR sehingga dapat ditentukan apakah perlu dilakukan pencabutan terhadap Rapermen PUPR terdahulu; 2. BHKP akan melakukan telaah terhadap Draft Rapermen PUPR. Jika diperlukan, Tim Penyusun Rapermen PUPR dapat ditambahkan unsur Kementerian/ Lembaga lain.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			sampai dengan penghasilan Rp 6jt, sedangkan BSPS penghasilan sampai dengan UMP; c. Bantuan BP2BT berupa dana sedangkan BSPS berupa bahan bangunan.	
8	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Kamis, 11 Februari 2021 (Pukul 13.30-selesai) Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Bank Pelaksana, *Task Team Leader* NAHP	KPR mikro dan suku bunga yang berlaku pada perbankan: Bank BRI • Memilki KPR Mikro yang ditujukan untuk hunian produktif (rumah sebagai tempat usaha) dan tidak untuk hunian yang bersifat konsumtif; • Penetapan *pricing* menggunakan mekanisme yang sama dengan KPR. Bank BNI • Memiliki program KPR Renovasi untuk perbaikan dan perluasan rumah; • Rate suku bunga fix 1 tahun (9,2%) atau Rate suku bunga fix 2 tahun (7,75%). Bank BTN • Memiliki Produk KPR BTN Mikro difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan tidak tetap namun masuk ke dalam suatu	1. Perluasan skema Perbaikan Rumah Swadaya melalui BP2BT akan dikaji berdasarkan masukan dari pihak bank; 2. BTPN Syariah akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait laporan layanan pembiayaan perbaikan rumah yang dilakukan oleh BTPN Syariah serta potensi pasar untuk tahun 2021 dan 2022.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			komunitas, fasilitas yang diberikan adalah pembangunan dan perbaikan rumah. Untuk perbaikan rumah plafon yang diberikan paling besar Rp 75jt. BTN Syariah • Memiliki produk pembangunan dan renovasi rumah dengan margin 11,5-13,75% dan pencairan dibagi menjadi 4 tahap. BTPN Syariah • Memiliki fasilitas pembiayaan untuk perbaikan rumah swadaya dengan range plafon Rp 5-56 juta dengan angsuran yang dibayarkan debitur setiap 2 minggu dan tenor selama 5-10 tahun tanpa jaminan/agunan; • Memiliki *pricing* yang lebih mahal dari bank lain sekitar 25%, hal ini dikarenakan tingkat resiko yang lebih tinggi.	
9	Laporan Rapat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rabu, 17 Februari 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Perpanjangan waktu *loan agreement* untuk BP2BT sepertinya tidak dimungkinkan dilakukan selama 22 bulan, akan dilakukan pembahasan internal dalam waktu dekat dengan Dirjen PI; 2. World Bank mengharapkan penetapan target yang jelas secara	1. Membuat *exercise* capaian target triwulanan; 2. Melakukan pembahasan dengan melibatkan Bank Pelaksana penyalur BP2BT terkait rencana penyerapan Bank Pelaksana.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
		Peserta: *Task Team Leader* NAHP	triwulanan dan strategi apabila tidak mencapai target setiap triwulan; 3. Terkait QA/QC berdasarkan realisasi tahun 2020 terhadap 1.357 unit secara umum hasilnya sudah baik (di atas 50%); 4. Rencana Penyaluran BP2BT dan HMF TA 2021 – 2023 yaitu sebesar USD 96,5 Juta atau Rp 1.351,6 Miliar (33.791 unit).	
10	Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan TA 2021	Rabu, 17 Februari 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Pelaksanaan pemantauan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2021diperuntukkan untuk KPR yang diterbitkan pada 2016-2020; 2. Sudah diperoleh beberapa data dari kertas kerja yang dimintakan kepada Satker pada rapat sebelumnya, di antaranya: a. Realisasi kinerja dan target kinerja penyaluran Dana TA 2021; b. Status penyusunan dan masa berlaku dokumen MoU SSB dan FLPP;	1. Akan dikonsepkan surat permintaan data prognosis penyaluran KPR Bersubsidi dan BP2BT TA 2021 ke Bank Pelaksana; 2. Akan dikonsepkan SK Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Pasca Penyaluran; 3. Akan disiapkan KAK uji kualitas konstruksi (arahan untuk FLPP); 4. Akan dilakukan pembahasan terkait prognosis bersama Bank Pelaksana.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			c. Status penyusunan dan masa berlaku dokumen BP2BT; d. Status penyusunan dan penandatangann dokumen PKS SBUM.	
11	Diskusi Harga Rumah dengan BP Tapera	Jumat, 19 Februari 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: BP Tapera	1. Rancangan Peraturan BP Tapera hasil harmonisasi di antaranya: a. Fitur skema pembiayaan Tapera menambahkan kelompok penghasilan, limit kredit/pembiayaan, dan uang muka; b. Kelompok penghasilan dibagi menjadi 3 kategori yang nantinya digunakan untuk menentukan limit kredit/pembiayaan, suku bunga/margin/ujrah dan standar teknis yang berbeda; c. Peserta dapat memilih prinsip pengelolaan konvensional dan syariah; d. Kelompok peserta dibagi menjadi 5 (lima): ASN, TNI/POLRI, BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri; 2. Pembiayaan Tapera tidak bisa digunakan untuk rumah inden;	1. BP Tapera akan memastikan kembali terminologi yang sesuai untuk standar teknis; 2. Melakukan pembahasan lanjutan melibatkan BP Tapera.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			3. Diharapkan agar limit kredit sama dengan harga jual KPR sehingga MBR tidak perlu menambah uang muka, sedangkan ketentuan mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai ditentukan berdasarkan zonasi sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan.	
1	Rapat Pembahasan Catatan Atas Pengajuan Izin Prakarsa	Senin, 1 Maret 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Catatan Bapak Menteri PUPR terkait permohonan izin prakarsa perubahan atas PermenPUPR No. 13/PRT/M/2019 apakah perlu dilakukan perubahan dan bagaimana kaitannya dengan PermenPUPR No 1 Tahun 2021; 2. Penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah dibedakan berdasarkan kemampuan membayar dimana MBR yang tidak kawin dihitung 1/3 (satu per tiga) dari total penghasilan sedangkan MBR yang kawin adalah 25% (dua puluh lima persen) dari total penghasilan; 3. Besaran penghasilan bagi MBR yang berada di Papua dan Papua Barat, mempertimbangkan dari sisi harga jual rumah yang berbeda antar wilayah; 4. Perubahan pengaturan penghasilan orang perseorangan yang tidak	• Akan disusun konsep surat tanggapan terhadap catatan atas pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk kemudian diteruskan kepada Biro Hukum Kementerian PUPR.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			kawin dan penghasilan orang perseorangan yang kawin bertujuan untuk mengakomodasi BP Tapera yang menggunakan pendekatan kepesertaan dimana setiap peserta berhak untuk mendapat manfaat; 5. Pertimbangan perubahan PermenPUPR No 13/PRT/M/2019 bukan didasarkan pada PermenPUPR No 1 Tahun 2021, namun karena adanya usulan Bapak Sekretaris Jenderal kepada World Bank terkait perluasan skema perbaikan rumah swadaya BP2BT.	
2	Rapat Pembahasan Implementasi Konversi Qanun Aceh Kredit Konvensional (KC Banda Aceh)	Senin, 1 Maret 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: BTN, BTN Syariah	1. Dalam proses konversi kredit konsumer BTN Konvesinal kepada UUS disepakati bahwa: a. Tidak diperlukan perubahan akad debitur; b. Tidak perlu dilakukan PKS ulang; c. Tahap dalam proses konversi atau peralihan kredit konsumer dari BTN Konvensional kepada UUS yaitu: • Rekonsiliasi antara BTN, PPDPP dan Satuan Kerja Direktorat Jenderel Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;	• Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infarstrutkur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PPDPP akan berkoordinasi dengan Bank BTN dan BTN Syariah terkait pelaksanaan rekonsiliasi.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			• Selanjutnya akan dilakukan *exercise* atau perhitungan untuk mengetahui selisih nilai Dana FLPP yang harus dikembalikan oleh Bank BTN dan selisih nilai angsuran SSB yang menjadi tanggungan pemerintah; • Dilakukan peralihan dana kredit konsumer dari BTN Konvensional kepada BTN Syariah.	
3	Rapat Penyetaraan Mekanisme Pengujian dan Pelibatan Balai Perumahan untuk KPR Bersubsidi dan BP2BT	Selasa, 2 Maret 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Latar belakang usulan Penyetaraan Mekanisme Pengujian FLPP dan BP2BT sebagai berikut: Pada tahap pengujian penetapan dana dan pencairan dana BP2BT dilakukan pengujian manual (uji petik/sampling) sedangkan untuk FLPP dilakukan pengujian secara otomatis; a. Dalam pelaksanaan pengujian penetapan dana dan pencairan dana BP2BT secara otomatis dilakukan menggunakan excel, sedangkan untuk FLPP dilakukan menggunakan Sistem Informasi *host to host* dengan Bank Pelaksana; b. Pada saat permintaan pencairan Dana FLPP, Bank	1. Tindak lanjut pelaksanaan penyetaraan mekanisme pengujian FLPP dan BP2BT adalah melakukan koordinasi dengan PPDPP dan Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait usulan penyetaraan mekanisme pengujian FLPP dan BP2BT; 2. Tindak lanjut pelibatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan adalah melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Perumahan terutama terkait tugas-tugas Balai Pelaksana/SNVT secara terperinci terkait pelibatan Balai Perumahan untuk dikoordinasikan dengan Bapak Direktur Jenderal Perumahan;

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			Pelaksana/PPDPP hanya memeriksa dokumen Formulir pemeriksaan kualitas struktur/konstruksi rumah yang ditandatangani oleh MK dan diketahui oleh Pengembang (Simak), sedangkan BP2PT ditambahkan dokumen formulir pemeriksaan kualitas struktur /konstruksi rumah BP2BT. 2. Terdapat 2 (dua) pilihan usulan Pelibatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dalam pelaksanaan penyaluran dana kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi MBR dan BP2BT, yaitu: a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melakukan koordinasi pelaksanaan tinjauan fisik rumah MBR dengan SNVT antara lain dengan mengumpulkan laporan pengawasan konstruksi rumah MBR oleh MK, melaksanakan analisa laporan pengawasan konstruksi rumah MBR, mengumpulkan foto-foto hasil tinjauan fisik rumah MBR; atau b. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melakukan pendampingan terhadap	3. Akan disiapkan laporan kepada Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan terkait tambahan data penyetaraan mekanisme pengujian FLPP & BP2BT dan menyiapkan proposal yang berisi konsep tugas-tugas secara terperinci pelibatan Balai Perumahan dalam perbantuan penyediaan perumahan untuk nantinya akan dikoordinasikan dengan Bapak Direktur Jenderal Perumahan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			pelaksanaan pengendalian kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan BP2BT.	
4	Rapat Pembahasan KPR Siap Bangun oleh Perumnas	Selasa, 2 Maret 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Perum Perumnas, PPDPP	1. Dalam skema KPR Siap Bangun dilakukan dua pengujian, yaitu: pengujian pertama untuk izin lokasi, sertifikat dan PSU, sedangkan pengujian kedua adalah pengujian terhadap fisik bangunan; 2. Diperlukan kontrakual yang jelas mengatur hak dan kewajiban PPDPP dengan Perum Perumnas; 3. KPR Siap Bangun tidak bisa dirumuskan ke dalam Keputusan Menteri karena proses bisnisnya berbeda dengan FLPP, dengan demikian dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri atau membuat Peraturan Menteri baru; 4. Apabila skema KPR Siap Bangun akan diproses ke dalam Peraturan Menteri maka diperlukan permohonan izin prakarsa, pembentukan tim penyusun dan kemudian dilakukan pembahasan.	1. Pelaksanaan usulan Bapak Menteri PUPR perihal dukungan kepada Perum Perumnas menunggu persetujuan dari Ibu Menteri Keuangan; 2. Menyiapkan konsepsi pengaturan proses bisnis KPR Siap Bangun oleh Perum Perumnas.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
5	Rapat Pemanfaatan Kebijakan Insentif Perpajakan Terhadap Rumah yang Dibeli Menggunakan KPR Bersubsidi	Rabu, 3 Maret 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP, Bank Pelaksana	• Poin pengaturan PMK No. 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditangung Pemerintah Tahun Anggaran 2021: a. Objek: rumah tapak dan unit hunian rumah susun; b. Atas penyerahan yang terjadi saat ditandatangani akta jual beli atau diterbitkan surat keterangan lunas dari penjual; c. Diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif (Maret 2021 s.d Agustus 2021); d. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni; e. Diberikan maksimal 1 unit rumah tapak/unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun; f. Besaran PPN DTP adalah 100% untuk harga jual rumah paling tinggi Rp 2 M dan 50% untuk harga jual rumah lebih dari Rp 2 M s.d Rp 5 M; g. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP;	• Sebagai informasi untuk Bank Pelaksana agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			h. Dalam hal rumah tapak dan unit hunian rumah susun telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan, tetap dapat diberikan fasilitas PPN DTP dengan ketentuan: a. Dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali paling lama 1 Januari 2021; b. Penyerahan dilakukan pada periode insentif; c. PPN yang ditanggung pemerintah diberikan hanya atas pembayaran sisa cicilan dan peluanasan pada periode insentif.	
6	Rapat Penyiapan Peralihan Dana FLPP	Rabu, 10 Maret 2021 Ruang Rapat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP	1. Diperlukan penyesuaian terhadap Tim Satgas Pengalihan Dana FLPP karena adanya penugasan langsung dari Kementerian Keuangan terhadap PPDPP untuk meminta reviu kepada BPKP dan Direktur Keuangan PPDPP menindaklanjuti secara eksplisit dan bertanggungjawab mengenai hal ini; 2. Dana FLPP akan direviu oleh BPKP melalui 2 (dua) tahap yaitu reviu atas dana bergulir FLPP tahun 2010 – 2020 dan sisanya reviu atas dana bergulir FLPP tahun 2021;	1. Tim akan berkoordinasi dengan Biro BMN Kementerian PUPR untuk membentuk tim likuidasi aset PPDPP ke BP Tapera; 2. Tim akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penugasan pegawai Kementerian Keuangan dalam Tim Satgas Penyiapan Pengalihan Dana FLPP; 3. Tim akan melakukan penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Tapera dan skema pemanfaatan Dana FLPP.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			3. Terkait kepesertaan penerima FLPP dibagi menjadi dua, yaitu: dicatat sebagai peserta untuk pemanfaat FLPP yang pada saat dialihkan belum berkewajiban menabung atau ditetapkan sebagai peserta untuk pemanfaat FLPP yang pada saat dialihkan sudah berkewajiban membayar simpanan (ASN) dan diberikan nomor anggota Tapera; 4. Berdasarkan pembahasan dengan Kementerian Keuangan bahwa PMK terkait akan menyebutkan nilai Dana FLPP yang akan dialihkan ke BP Tapera, sehingga PMK tersebut akan diundangkan setelah reviu oleh BPKP telah selesai dilakukan.	
7	Rapat Penyiapan Peralihan Dana FLPP	Jumat, 12 Maret 2021 Ruang Rapat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP	1. Disepakati bahwa reviu akan dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (kali), reviu tahap pertama dilakukan pada awal tahun 2021 untuk Dana FLPP tahun anggaran 2010 – 2020 dan reviu tahap kedua dilakukan pada bulan Oktober 2021 untuk Dana FLPP tahun 2021; 2. Pengembalian dana pokok dari bank ke PPDPP akan dibekukan dan tidak digulirkan pada saat pelaksanaan reviu tahap pertama guna mendapatkan nila Dana FLPP yang tidak bergerak. Namun ini dapat	1. PPDPP agar segera berkomunikasi dengan BPKP terkait dengan review termasuk memastikan poin-poin reviu dan membuat TOR reviu; 2. Tim satgas akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dalam merumuskan Rancangan Peraturan Menteri PUPR terkait kepesertaan penerima manfaat FLPP di BP Tapera dan pengelolaan Dana FLPP di BP Tapera.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			mengakibatkan target realisasi FLPP tahun 2021 tidak tercapai; 3. Perlu dipastikan apakah benar BPKP hanya melakukan reviu terhadap 6 poin, hal ini untuk menghindari berhentinya layanan kepada MBR terlalu lama jika dalam pelaksanaannya reviu membutuhkan waktu yang panjang; 4. Reviu dilakukan dari dana awal 2010 dengan penanggung jawab oleh Direktur Keuangan BLU PPDPP dan menggunakan anggaran BLU PPDP.	
8	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Senin, 15 Maret 2021 Qubika Boutique Hotel, Tangerang dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: *Project Implementation Unit* (PIU) NAHP, Kepala BP2BT *Facilitation Management Services*, Bank Pelaksana	1. NPWP tetap diperlukan dalam persyaratan kelompok sasaran; 2. Apabila Bank Pelaksana melakukan *merger* dan masih menjalankan proses bisnis yang sama maka jejak pengalaman dalam hal ini penyaluran kredit kepemilikan dan/atau perbaikan rumah masih tetap ada; 3. Tata cara pengujian diatur dalam Juknis; 4. Apabila besaran uang muka ditetapkan dalam Keputusan Menteri maka pengaturan lain yang berkenaan dengan angka juga diatur dalam Keputusan Menteri agar lebih konsisten;	1. Melakukan pembahasan melibatkan ATR/BPN untuk menjaring masukan terkait pengertian alas hak yang sah; 2. Bank BTPN Syariah akan mengirimkan data terkait mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh vendor pada Senin, 22 Maret 2021; 3. Draft RapermenPUPR disesuaikan dengan masukan hasil pembahasan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			5. Kepala BHKP Sekretaritat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjelaskan bahwa terkait pengawasan progres perbaikan rumah swadaya merupakan tugas TPP.	
9	Rapat Pembahasan KPR Siap Bangun	Rabu, 17 Maret 2021 Qubika Boutique Hotel, Tangerang dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP, Bank BTN, Perum Perumnas	1. KPR Siap Bangun diperuntukkan untuk pemilik rumah tapak bagi MBR; 2. Pembayaran KPR akan dilakukan dalam dua tahap: a. 50% pada saat kaveling siap bangun/rumah belum jadi, terdiri dari 25% dana KPR dari Bank Pelaksana (100% porsi dana Bank) dan sisanya dari Dana FLPP; b. 50% pada saat rumah siap huni dan telah serah terima. 3. Maksimal serah terima rumah dari pengembang ke MBR adalah 4 bulan sejak akad KPR; 4. Pembayaran angsuran: a. Akan dilakukan *grace period* pembayaran angsuran dari debitur ke bank serta pengembalian dana + tarif Dana FLPP dari bank ke PPDPP (Debitur disyaratkan menabung sebesar angsuran	• SBUM akan dibahas lebih lanjut dengan DJA dan *grace period* Dana FLPP akan dibahas lebih lanjut dengan DJKN.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			per bulan selama masa *grace period*, selanjutnya dana akan dibayarkan ke bank setelah serah terima); b. Tanpa *grace period*, besarnya angsuran didasarkan dari 50% nilai KPR; atau c. Akan dilakukan *grace period* pembayaran angsuran dari debitur ke bank, dan akan diperhitungkan dalam baki debet pokok KPR setelah dilakukan serah terima rumah dari pengembang ke debitur. 5. KPR siap bangun akan dilengkapi dengan *buyback guarantee* masa konstruksi jika pengembang tidak dapat melakukan serah terima rumah ke debitur dalam jangka waktu maksimal 4 bulan; 6. Bank memastikan *grace period* sesuai pelaksanaan perbankan dan PPDPP memastikan bahwa pelaksanaan KPR siap bangun sesuai dengan PMK.	
10	Rapat Pembahasan Kepesertaan Penerima	Jumat, 19 Maret 2021	1. Tata kelola program pembiayaan perumahan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian PUPR, sedangkan tata	1. Lama masa transisi FLPP di BP Tapera perlu didiskusikan lebih lanjut (melihat hasil simulasi);

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
	Manfaat FLPP di BP Tapera	Mercure Tangerang BSD dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: Kementerian Keuangan, PPDPP, BP Tapera	kelola pengelolaan Dana FLPP di BP Tapera sebagai OIP perlu dipersiapkan dengan rambu-rambu dari Kementerian Keuangan; 2. Penerima manfaat FLPP tahun 2022, pekerja swasta dan pekerja mandiri tidak perlu menunggu 12 bulan untuk memanfaatkan pembiayaan, ditetapkan sebagai peserta Tapera dan mempunyai kewajiban menabung setelah menjadi penerima manfaat FLPP; 3. *Initial project* sebanyak 11.000 unit pemanfaatan Tapera di semester 1 tahun 2021, Tapera akan disalurkan bekerjasama dengan Perumnas dan Bank BTN; 4. Pengaturan di PMK akan ada serah terima Dana FLPP (999.03) dari KPA PPDPP ke KPA IP, terkait pengalihan SDM dan aset menggunakan *plug and play*; 5. Rekening program Dana FLPP akan tetap seperti saat di PPDPP hanya berubah nama rekening; 6. Pengalihan piutang perlu amandemen PKS dengan Bank Pelaksana setelah dilakukan pengalihan Dana FLPP.	2. Pengaturan dasar perkalian besaran simpanan peserta mandiri akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi yang terkait; 3. Disepakati pertemuan rutin pengalihan Dana FLPP setiap 2 minggu sekali (selanjutnya berkisar 5-9 April 2021).
11	Rapat Pembahasan SK Tim Pemantauan dan	Selasa, 23 Maret 2021	1. Terkait rencana Pemantauan dan Evaluasi, pada tahun 2021 PPDPP	1. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan mengevaluasi terkait

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
	Evaluasi Pembiayaan Perumahan Tahap Pasca Penyaluran	The Grantage Hotel, Tangerang dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	akan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dengan metode *offline*; 2. Rencana sampel yang dilakukan pada tahun 2021 sebesar 62.000 di seluruh Indonesia yang melibatkan petugas lapangan yang disebar dilapangan sebanyak 25 petugas dimana petugas lapangan tersebut masih dalam tahap *profiling* dan akan segera rampung; 3. Rencana kegiatan Pemantauan dan Evaluasi akan dilaksanakan mulai Bulan April-Oktober 2021 yang dibagi menjadi 4 wilayah; 4. Pada tahun 2021 PPDPP akan berkoneksi dengan PLN, sebagai basis data atau alat pemantauan dan evaluasi keterhunian melalui penggunaan listrik; 5. Kepala BHKP menjelaskan bahwa pengaturan PKS menjadi salah satu penekanan terhadap Bank agar Bank lebih peduli terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, surat laporan hasil monev dapat ditembuskan ke Direktur Jenderal sekaligus melaporkan bahwa Bank Pelaksana kurang *responsive* terkait kebutuhan data pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.	dengan kegiatan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2020 yang dilakukan secara *online*; 2. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan mempertimbangkan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilakukan secara *offline* (Rekrutmen pihak ke tiga/lembaga surveyor); 3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan melakukan rapat-rapat secara teknis dan berkoordinasi dengan PPDPP, Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk mendiskusikan atau memformulasikan kegiatan yang akan dilakukan secara *offline*.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
12	Persiapan Pelaksanaan Tinjauan Fisik/Konstruksi Rumah untuk KPR Bersubsidi dan BP2BT	Selasa, 23 Maret 2021 The Grantage Hotel, Tangerang dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Pelaksanaan tinjauan fisik/konstruksi rumah dan PSU akan dilakukan sebanyak 3-4 kali di TA 2021; 2. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 24-26 Maret 2021 untuk penyaluran FLPP bulan Januari-Maret 2021 di Provinsi Jawa Barat dan Banten, oleh 14 orang yang terbagi ke dalam 7 tim; 3. Penentuan sampel Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang memiliki penyaluran lebih dari 200 unit, yaitu: Kabupaten Bekasi (835 unit), Kabupaten Tangerang (242 unit), Kabupaten Bogor (353 unit) dan Kabupaten Karawang (398 unit); 4. Pemilihan lokasi perumahan di 4 Kab/Kota terpilih yang memiliki penyaluran lebih dari 10 unit; 5. Pemeriksaan tinjauan fisik/konstruksi meliputi komponen struktur bangunan rumah dan komponen PSU.	1. Pelaksanaan tinjauan fisik/konstruksi rumah dan PSU pada tanggal 24-26 Maret 2021 di Provinsi Jawa Barat dan Banten; 2. Penyusunan laporan pelaksanaan tinjauan fisik/konstruksi dan PSU di Provinsi Jawa barat dan Banten.
13	Rapat Pembahasan Potensi Lemabaga Pembiayaan dalam Penyaluran Kemudahan	Rabu, 24 Maret 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara	1. Kasubdit Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan mengusulkan perluasan penyaluran BP2BT melalui Lembaga Keuangan Non Bank dan integrasi program dengan PT SMF;	1. Akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2. PT SMF akan mengundang Kementerian PUPR dan lembaga pembiayaan untuk

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
	dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	*teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PT SMF	2. Usulan kriteria perusahaan pembiayaan untuk program pemerintah: a. Perusahaan pembiayaan mengajukan ijin khusus untuk produk program pemerintah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK); b. Dilakukan *assessment* awal dan penetapan kriteria perusahaan pembiayaan yang dapat menyalurkan program pemerintah, salah satunya adalah persyaratan kesehatan keuangan minimum; c. Pembiayaan perumahan dilengkapi dengan asuransi kredit. 3. PT SMF mengusulkan fitur pembiayaan untuk perbaikan rumah swadaya (renovasi) dapat dilakukan dengan syarat bentuk pembiayaan mikro, yaitu plafon tidak terlalu besar (maksimal Rp 40-50 juta) dan tenor yang tidak terlalu panjang (maksimal 18 bulan); 4. BP2BT adalah berbasis tabungan, sedangkan perusahaan pembiayaan tidak diizinkan memilik produk simpanan, sehingga perlu perubahan mekanisme penyaluran, misalnya dengan bekerjasama	diskusi terbatas pelaksanaan pembiayaan perumahan melalui lembaga pembiayaan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			dengan Bank Induk dari perusahaan pembiayaan.	
14	Rapat Pembahasan BP2BT Pembangunan Rumah Swadaya dengan BTN Syariah	Rabu, 24 Maret 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: BTN, BTN Syariah	1. Kepala Divisi Syariah Bank BTN menginformasikan bahwa saat ini SOP pelaksanaan BP2BT Bank BTN Syariah untuk pembangunan rumah swadaya masih proses penyusunan; 2. Diperlukan kejelasan terkait persyaratan alas hak yang sah, apakah dimaknai harus sertifikat atas nama penerima manfaat atau dapat berbentuk AJB atau girik; 3. RAB pembangunan rumah swadaya di Provinsi Jateng Rp 2 juta/m^2 untuk spesifikasi rumah tersebut dianggap terlalu mahal, sedangkan biaya perolehan tanah menggunakan program pinjaman lain; 4. Pembangunan perumahan swadaya berbasis komunitas terdapat konsolidasi tanah sehingga diperlukan pengecekan ulang dari sisi legalitas;	1. BTN Syariah akan menyelesaikan SOP pelaksanaan BP2BT pembangunan rumah swadaya; 2. Akan dilakukan koordinasi antara Satker BP2BT dengan BTN dan BTN Syariah.
15	Rapat Pembahasan Pengalihan Dana FLPP	Rabu, 24 Maret 2021	1. *Core system* FLPP yang saat ini di PPDPP akan diadopsi oleh BP Tapera dalam rangka menjaga *service level* yang telah dicapai;	1. Persiapan direktorat khusus pengelola Dana FLPP di BP Tapera akan dilaksanakan minggu depan, dengan penyaji BP Tapera;

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
	pada PPDPP kepada BP Tapera	Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom Peserta: PPDPP, BP Tapera	2. Persiapan direktorat baru di BP Tapera sudah masuk dalam agenda pembahasan, masing-masing fungsi akan dimasukan ke dalam organisasi BP Tapera (misal: Hukum, IT, dll); 3. Struktur Organisasi *Project Charter* terdiri atas tim Legal yang dipimpin oleh Kementerian PUPR, tim Pengelolaan Dana yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan, tim *Business Process* dan Operasional yang dipimpin oleh PPDPP, dan team IT yang dipimpin oleh BP Tapera; 4. Diharapkan adanya manajemen *Application Programming Interface* (API) dari masing-masing pemilik data yang terhubung ke Pusdatin, sehingga lebih mudah menampilkan data dengan hasil kesepakatan bersama.	2. PPDPP dan BP Tapera akan koordinasi untuk *mirroring data critical point* (*Business Process* dan Operasional, Pengelolaan Dana, Integrasi Sistem Teknologi Informasi, memadupadankan data Sikasep, Sikumbang, Sipetruk); 3. DJPI akan menyiapkan surat usulan anggota tim Satgas yang melibatkan Kementerian Keuangan.
16	Rapat Pembahasan Potensi Lembaga Pembiayaan Dalam Penyaluran Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Senin, 29 Maret 2021 Secara *teleconference* melalui aplikasi Zoom	1. Berdasarkan POJK No 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa perusahaan pembiayaan sangat dimungkinkan untuk menyalurkan pembiayaan sektor perumahan; 2. Secara regulasi OJK penyaluran KPR melalui perusahaan pembiayaan dapat dilakukan, hanya perlu memperhatikan kebijakan dari	1. OJK, SMF, dan APPI akan merumuskan kriteria perusahaan pembiayaan yang dapat menyalurkan kredit pembiayaan perumahan; 2. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melibatkan OJK, SMF, dan APPI terkait dengan rumusan kriteria perusahaan pembiayaan pada minggu pertama bulan April 2021.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			Kementerian PUPR dan dukungan pendanaan dari PT SMF, karena perusahaan pembiayaan tidak akan dapat bersaing dengan perbankan apabila tidak ada dukungan dari sisi suku bunga ataupun pendanaannya; 3. Diusulkan dalam hal pembiayaan perumahan melalui lembaga keuangan non bank maksimal tenor tidak lebih dari 5 tahun karena sumber dana perusahaan pembiayaan mayoritas adalah dana jangka pendek sehingga sulit mendapatkan sumber pendanaan 5–10 tahun; 4. Sebagai altenatif mitigasi risiko, diusulkan pada desain produk dan rekening *escrow* SMF dan PP dapat dicover risiko asuransinya; 5. Diharapkan suku bunga untuk MBR dapat lebih ditekan agar lebih terjangkau.	

Status MoU dan PKS

1. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana FLPP & SBUM TA 2021

No	Nama Bank	Kuota SBUM FLPP	Status		
			Kesepakatan Bersama (KSB)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) FLPP dengan PPDPP	Perjanjian Kerja Sama (PKS) SBUM dengan Satker
1	Bank Artha Graha	1.600	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
2	BRI	6.000	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
3	Bank Papua	400	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
4	Bank Nagari	900	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
5	Bank Nagari Syariah	200	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
6	Bank Jambi	1.450	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
7	Bank Jambi Syariah	300	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
8	Bank DIY	125	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
9	Bank SULSELBAR	1.350	MoU sudah ditandatangani tgl 30-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
10	Bank SULSELBAR Syariah	900	MoU sudah ditandatangani tgl 30-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
11	Bank Aceh Syariah	800	MoU sudah ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
12	Bank NTB Syariah	1.800	MoU sudah ditandatangani tgl 18-03-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
13	BNI Syariah	600	MoU sudah ditandatangani tgl 23-04-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
14	Bank BJB	5.700	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
15	BTN	72.000	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
16	BTN Syariah	9.000	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021

17	Bank KALBAR	1.600	MoU sudah ditandatangani tgl 07-04-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
18	Bank KALBAR Syariah	200	MoU sudah ditandatangani tgl 07-04-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
19	Bank KALSEL	600	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
20	Bank KALSEL Syariah	700	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
21	Bank SUMUT	500	MoU sudah ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
22	Bank SUMUT Syarah	1.000	MoU sudah ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
23	Bank MANDIRI	3.000	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
24	Bank JATENG	200	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
25	Bank JATENG Syariah	200	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
26	BNI	17.500	MoU sudah ditandatangani tgl 30-08-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
27	Bank JATIM	300	MoU sudah ditandatangani tgl 13-10-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
28	Bank JATIM Syariah	1.550	MoU sudah ditandatangani tgl 13-10-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
29	Bank SUMSELBABEL	1.700	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
30	Bank SUMSELBABEL Syariah	500	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
31	Bank KALTENG	300	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
32	BRI Syariah	13.500	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
33	Bank KALTIMTARA	300	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
34	BRI AGRO	550	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
35	Bank NTT	450	MoU sudah ditandatangani tgl 03-08-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
36	Bank SULTENG	325	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 02-02-2021

37	Bank RIAU KEPRI	300	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
38	Bank RIAU KEPRI Syariah	225	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
39	Bank DKI	25	MoU sudah ditandatangani tgl 20-05-2020	PKS ditandatangani tgl 15-02-2021	Sudah TTD KPA tgl 15-03-2021
40	Bank BJB Syariah	700	MoU sudah ditandatangani tgl 22-02-2021	PKS ditandatangani tgl 01-03-2021	Sudah TTD KPA tgl 31-03-2021
Total Sbum Flpp		149.350			

2. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana SSB Menggulung TA 2021

No	Nama Bank	Kuota	Status	
			Kesepakatan Bersama (KSB)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
1	BTN	87.151	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 04-02-2021
2	BNI	5.542	MoU sudah ditandatangani tgl 30-08-2016	Sudah TTD KPA tgl 15-02-2021
3	BRI	707	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 15-03-2021
Total		93.400		

3. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana BP2BT TA 2021

Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT (TA 2021)						Status	
No	Nama Bank	Jenis Perolehan Rumah (Unit)				*Memorandum of Understanding* (MoU)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
		Rumah Tapak	Satuan Rusun	Rumah Swadaya	Total Penyaluran		
1	BTN	11.000	-	-	11.000	MoU sudah ditandatangani tanggal 27-01-2021	Sudah PKS Tanggal 28-01-2021
2	BNI	1.000	-	-	1.000	Masih menggunakan MoU sebelumnya yang berlaku sampai tahun 2024	Sudah PKS Tanggal 28-01-2021
3	Bank JATENG	205	-	245	450	MoU sudah ditandatangani tanggal 28-01-2021	Sudah PKS Tanggal 22-03-2021
4	Bank SUMSEL BABEL	300	-	-	300	MoU sudah ditandatangani	Proses tanda tangan Direksi Bank Sumsel Babel

5	BRI	1.000	-	200	1.200	Sedang proses Drafting MoU	Draft PKS sudah dikirim
6	Bank MANDIRI	5.000	-	-	5.000	Sedang proses Drafting MoU	Draft PKS sudah dikirim
Total		18.505	-	445	18.950		

03 Pembiayaan Sekunder Perumahan (SMF)

Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan (SMF)

No	Hari/ Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Agenda/Kegiatan
1	Selasa, 12 Januari 2021	Video Conference/RR Dit PPP	Rapat Pemahasan Strategi Penyelesaian Paket Kegiatan NAHP-SMF
2	Rabu, 13 Januari 2021	Video Conference/RR Dit PPP	Rapat Pembahasan Draft Laporan Akhir Pekerjaan NAHP-SMF
3	Rabu, 20 Januari 2021	RR Dit PPP/Video Conference	Rapat Pembahasan Penyiapan Rencana Bisnis SMF untuk Mendukung KPBU dan Kredit Konstruksi
4	Kamis, 21 Januari 2021	RR Dit PPP/Video Conference	Rapat Pembahasan Penyiapan Rencana Bisnis SMF untuk Mendukung Housing Micro Finance
5	Jumat, 22 Januari 2021	RR Dit PPP/Video Conference	Rapat Pembahasan Penyiapan Rencana Bisnis SMF untuk Mendukung Skema Rental to Own
6	Rabu, 27 Januari 2021	Ruang Rapat Dit PPP	Rapat Pembahasan Laporan Akhir NAHP-SMF
7	Senin, 5 April 2021	Video Conference	Rapat Pembahsan Hasil Kegiatan NAHP- SMF

04 Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Tujuan dari Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kementerian PUPR turut hadir dalam memberikan dukungan agar proses kebutuhan dasar manusia yaitu rumah dapat terpenuhi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema oembiayaan perumahan dapat tercapai. Berikut merupakan sebagain dari banyak dukungan yang telah dilakukan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Peruamahan pada Quartal 1:

1. **Revisi Keputusan Presiden Tentang Pengangkatan Komite Tapera**

   Telah mengirimkan surat kepada Mensesneg tentang permohonan penetapan Keputusan Presiden RI tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 67/m Tahun 2016 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

   Tindak lanjut: Kemensetneg meminta penjelasan terkait usulan revisi dimaksud.

2. **Raperpres tentang Honorarium, Insentif dan Manfaat Tambahan Lainnya untuk Komite Tapera**
   - Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021
   - RPerpres telah disiapkan, hasil rapat dengan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan).
   - Telah dilaksanakan *Kick Off Meeting* Rperpres pada Tanggal 27 Januari 2021

   Tindak lanjut: Surat Permohonan Usulan Nama PAK akan dikirimkan ke K/L melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.

3. **Pembentukan Sekretariat Komite Tapera**

   Bapak Menteri PUPR telah menyetujui konsep Sekretariat Komite Tapera yang diusulkan oleh DJPI (hal ini telah dibahas bersama dengan Bapak Sonny Loho dan BP Tapera).

   Tindak lanjut: Menunggu arahan Bapak Menteri terhadap kandidat Sekretariat Komite Tapera.

4. **Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Mekanisme Kepesertaan Masyarakat yang telah Menerima Manfaat Dana FLPP**

   Kementerian Keuangan sedang menyiapkan RPMK tentang Mekanisme Pengalihan Dana FLPP ke Dana Tapera.

   Tindak lanjut: Perlu pembahasan lebih lanjut terkait entitas BLU pengelola Dana FLPP.

5. **Pembahasan Permohonan Penggunaan Sebagian Modal Awal BP Tapera untuk Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor BP Tapera**

   Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 2 disebutkan bahwa nilai Modal Awal BP Tapera adalah Rp2.500.000.000.000,00. BP Tapera berencana akan menggunakan sebagian dana modal awal sebesar Rp500.000.000.000,00 untuk pengadaan tanah dan gedung kantor BP Tapera setelah mendapat persetujuan dari KPA Modal Awal BP Tapera.

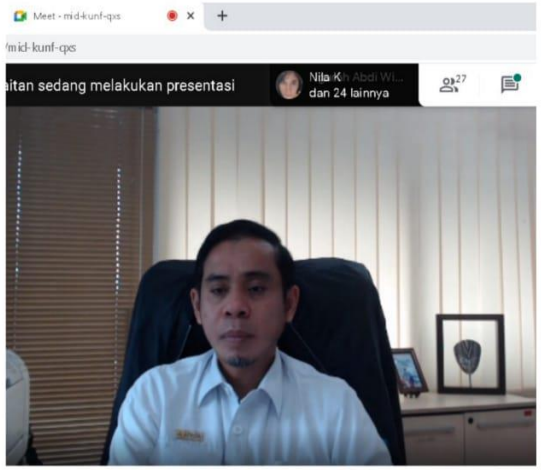
   Tindak lanjut: Meminta BP Tapera untuk menyampaikan permohonan rencana penggunaan anggaran tersebut kepada Komite Tapera dengan disertai kajian penggunaan sebagian Modal Awal BP Tapera untuk pengadaan tanah dan gedung Kantor BP Tapera secara komprehensif.

Pelaksanaan Kegiatan Tapera

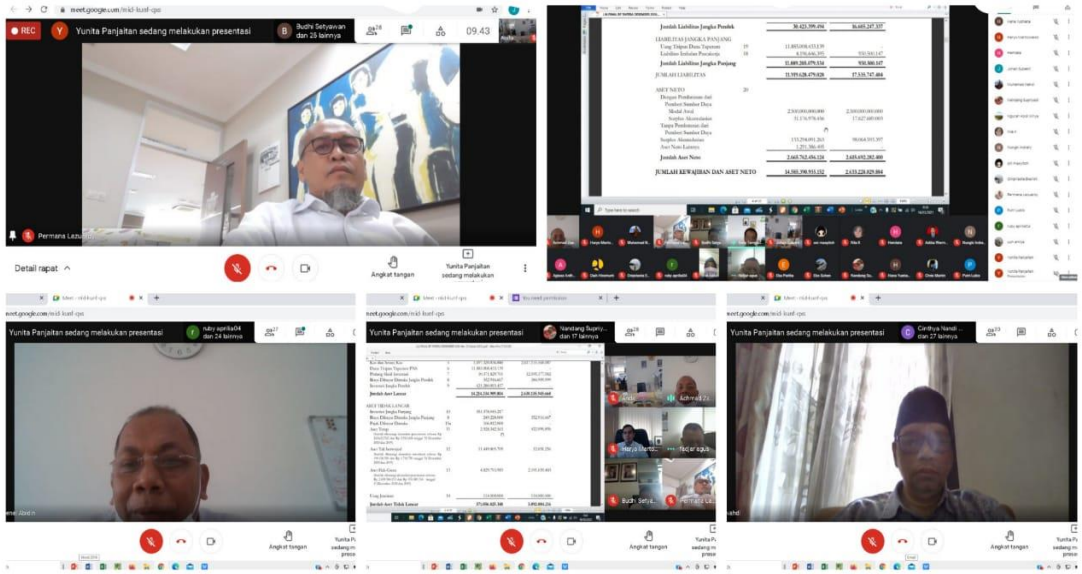
No	Hari/ Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Agenda/Kegiatan
1	Rabu, 13 Januari 2021	Ruang Rapat 1 Lt. 2 Wing 3	Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) TA 2021
2	Jumat, 15 Januari 2021	Video Conference	Rapat Pengalihan Dana FLPP pada PPDPP Kepada BP Tapera
3	Senin, 25 Januari 2021	Video Conference	Undangan Pembahasan Harmonisasi Rancangan Rancangan Peraturan BP Tapera Tentang Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat
4	Rabu, 27 Januari 2021	Ruang Rapat Dirjen Lt. 2 Wing 2	Kick Off Meeting Pembahasan Rpepres Honorarium, Insentf dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tapera
5	Senin, 15 Februari 2021	Ruang Rapat 1 Lt. 2 Wing 3/Vidcon	Rapat Pembahasan RKAT BP Tapera Tahun 2021
6	Rabu, 24 Februari 2021	Video Conference	Rapat Evaluasi Modal Awal BP Tapera
7	Jumat, 5 Maret 2021	Hotel Aviary Bintaro/Video Conference	Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Modal Awal BP Tapera tentang Standar Operasinela Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera
8	Rabu, 31 Maret 2021	Video Conference	Undangan Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Penggunaan Sebagai Model Awal BP Tapera

Dokumentasi Kegiatan Tapera









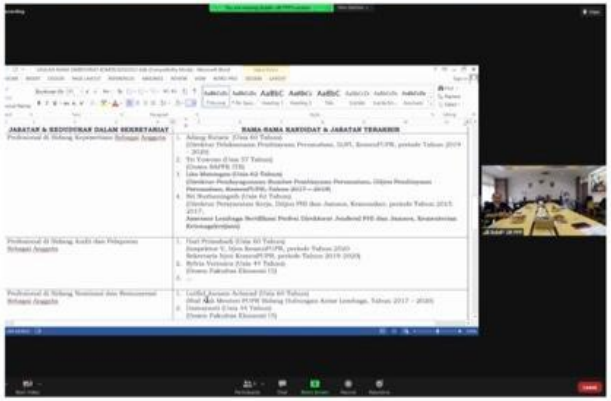
Dokumentasi Kegiatan Tapera



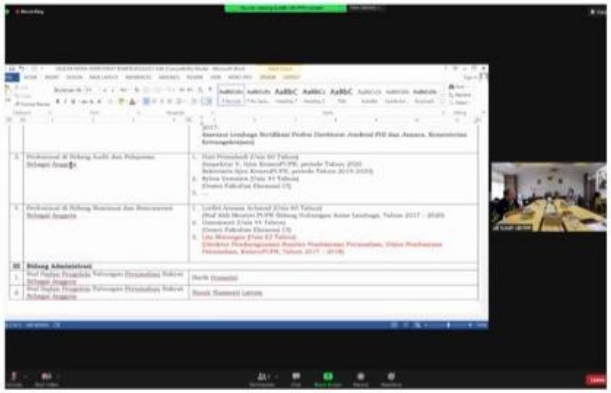


Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Sekretariat Komite Tapera

5 Februari 2021







Dokumentasi Kegiatan Tapera





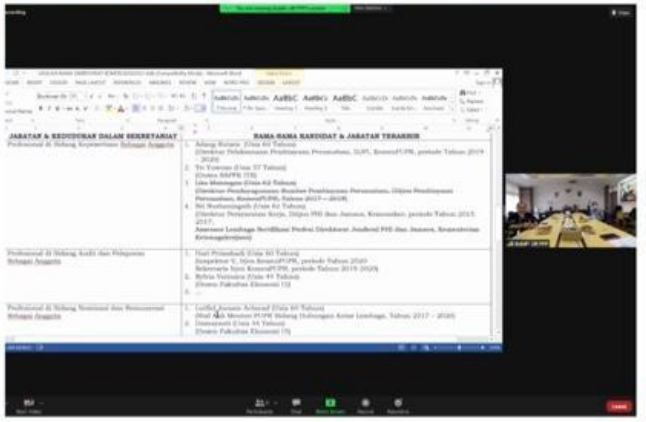


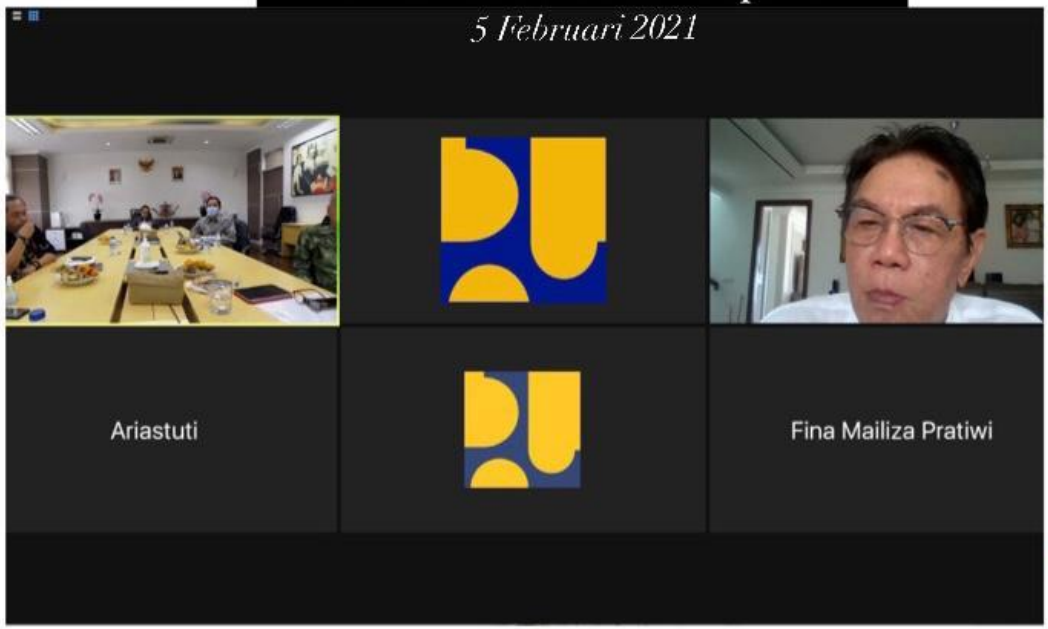


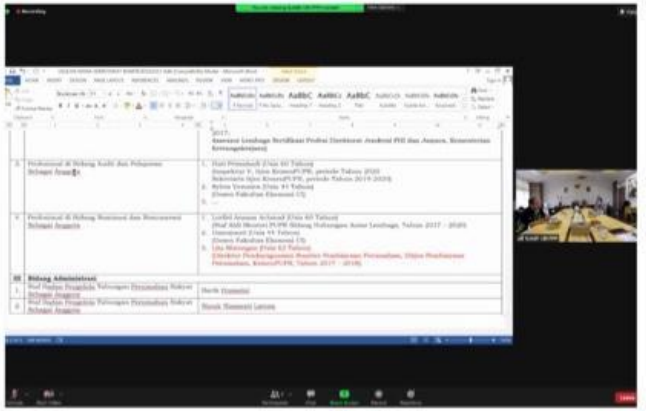
Dokumentasi Kegiatan Tapera











Permasalahan dan Tindak Lanjut Kegiatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Dalam penyiapan proyek KPBU Bidang Perumahan, pemberian dukungan kepada BP Tapera, dan pelaksanaan tugas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bentuk permasalahannya yang dijumpai berbeda-beda dari yang memiliki kompleksitas ringan sampai yang berat.

Berkoordinasi dengan berbagai Kementrian/Lembaga, berdiskusi dengan para stakeholder, dan berkonsultasi kepada para pakar konsultan kerap kali dilakukan untuk tercapainya penyelesaian permasalahan yang ada. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama Q1 2021, maka tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Proyek KPBU

Proyek	Isu Permasalahan	Tindak Lanjut
KPBU Cisaranten Kota Bandung	• Penetuan pengembalian skema investasi • Pemenuhan kebutuhan air bersih • Penyiapan lahan BMN • Penentuan BLU • AMDAL dan Perizinan • SPM dan SLA	• Penyiapan KSPI • Pembahasan isu OBC untuk di *delivered* dan tindaklanjut di FBC • Persiapan pengadaan BUP • Pembahasan terkait dengan penentuan skema, pembebasan lahan, dan kendala teknis • Mengajukan PSN untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan lahan
KPBU Desa Besar Medan	• Sertifikat lahan masih menjadi satu dengan sertifikat Tol Belmera • Lahan BMN PUPR tercatat masih dalam pengelolaan PT Jasa Marga • Permasalahan banjir • Potensi relokasi warga	• Akan dilakukan split sertifikat • Akan dilakukan pengembalian pengelolaan ke PUPR • Pembentukan SK Tim KPBU • Pengajuan PPP Book • Pengajuan KSPI • FBC dan Dokumen Transaksi ditargetkan Bulan Juni 2021
KPBU Karawang Spuur	• Lokasi proyek daerah macet • Status jalan kampung budaya adalah BMD • Luapan aliran Sungai Cikalapa • Area lahan dilintasi SUTT aliran listrik • Sertifikasi tanah dari Sekjen ke DJP	• Koordinasi pengelolaan jalan dengan instansi terkait • Pembangunan turap • Pembentukan SK Tim KPBU • Pengajuan PDF ke Kementerian Keuangan

KPBU Sei Mangkei	• Kewenangan PJPK Pemprov dalam penyediaan perumahan bagi MBR tidak sesuai dengan UU 23/2014 • Pembahasan usulan teknis terkait fungsi campuran (apartemen dan hotel)	• Pembentukan SK Tim KPBU • Pendelegasian kewenangan PJPK dari Gubernur ke Dinas PKP • Konfirmasi bahwa pembangunan perumahan ini untuk fasilitasi dan penyediaan perumahan bagi pekerja industri di KEK Sei Mangkei dan masyarakat yang terkena relokasi dampak pembangunan kilang minyak di Kuala Tanjung
KPBU Rusun Paldam Siliwangi	• Kewenangan PJPK Pemprov dalam penyediaan perumahan bagi MBR tidak sesuai dengan UU 23/2014 • Relokasi warga yang sekarang menempati rumah dinas TNI-AD di atas lahan Paldam • Penggantian aset BMN TNI AD yang berada di atas lahan PALDAM	• Koordinasi dengan TNI-AD terkait relokasi warga dan penggantian aset • Penyusunan kajian hukum dan kelembagaan terkait kewenangan PJPK dalam pembangunan rusun yang ditujukan untuk masyarakat terdampak program Kota Bandung
KPBU Daan Mogot Jakarta	• Optimalisasi lahan, karena termasuk KKOP Cengkareng • Opimalisasi aset, dengan support dari non hunian • Ketersedian air bersih	• Pembentukan SK Tim KPBU • Penentuan Skema Pengembalian Investasi (Non-AP) • Pengajuan KSPI • Konsultasi Publik • Koordinasi dengan SPAM Karian
KPBU Karawang Spuur	• Lokasi proyek daerah macet • Status jalan kampung budaya adalah BMD • Luapan aliran Sungai Cikalapa • Area lahan dilintasi SUTT aliran listrik • Sertifikasi tanah dari Sekjen ke DJP	• Koordinasi pengelolaan jalan dengan instansi terkait • Pembangunan turap • Pembentukan SK Tim KPBU • Pengajuan PDF ke Kementerian Keuangan

Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Isu Permasalahan:

1. Suku Bunga yang diberlakukan pada SBKP dan BP2BT sama-sama menggunakan suku bunga komersial namun pada pelaksanaannya suku bunga BP2BT lebih tinggi dibandingkan SBKP
2. Alternatif rencana penyaluran SBUM: Rencana penyaluran SBUM oleh PIHAK KEDUA untuk rumah umum tapak ditetapkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk pembayaran SBUM yang telah dilakukan akad KPR Sejahtera Tapak sejak 1 Januari 2021; atau Rencana penyaluran SBUM oleh PIHAK KEDUA untuk rumah umum tapak ditetapkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk pembayaran SBUM yang telah dilakukan akad KPR Sejahtera Tapak sejak 21 Januari 2021
3. Penerapan konsep green building pada rumah bersubsidi
4. Rencana Penyaluran BP2BT dan HMF TA 2021 – 2023 yaitu sebesar USD 96,5 Juta atau Rp 1.351,6 Miliar (33.791 unit).
5. Implementasi Konversi Qanun Aceh Kredit Konvensional (KC Banda Aceh)
6. Penyesuaian terhadap Tim Satgas Pengalihan Dana FLPP karena adanya penugasan langsung dari Kementerian Keuangan terhadap PPDPP untuk meminta reviu kepada BPKP dan Direktur Keuangan PPDPP menindaklanjuti secara eksplisit dan bertanggungjawab mengenai hal ini.
7. Fisik/Konstruksi Rumah untuk KPR Bersubsidi dan BP2BT
8. Potensi Lembaga Pembiayaan Dalam Penyaluran Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Tindak Lanjut:

1. Diskusi lebih lanjut terkait dukungan SMF agar dapat mengurangi suku bunga yang berlaku.
2. Penandatanganan PKS SBUM antara Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri dengan Satker akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021.
3. GBCI siap bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk pilot project green building di proyek perumahan bagi MBR dan siap berpartisipasi sejak awal proyek.
4. Membuat exercise capaian target triwulanan dan Melakukan pembahasan dengan melibatkan Bank Pelaksana penyalur BP2BT terkait rencana penyerapan Bank Pelaksana
5. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infarstrutkur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PPDPP akan berkoordinasi dengan Bank BTN dan BTN Syariah terkait pelaksanaan rekonsiliasi.
6. Berkoordinasi dengan Biro BMN Kementerian PUPR untuk membentuk tim likuidasi aset PPDPP ke BP Tapera, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penugasan pegawai Kementerian Keuangan dalam Tim Satgas Penyiapan Pengalihan Dana FLPP, dan melakukan penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Tapera dan skema pemanfaatan Dana FLPP.
7. Pelaksanaan tinjauan fisik/konstruksi rumah dan PSU pada tanggal 24-26 Maret 2021 di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
8. OJK, SMF, dan APPI akan merumuskan kriteria perusahaan pembiayaan yang dapat menyalurkan kredit pembiayaan perumahan

Pelaksanaan Dukungan Tapera

Isu Permasalahan

1. Berita Acara Tim Likudasi Bapertarum PNS
2. Pengalihan Dana FLPP Pada PPDPP Kepada BP Tapera
3. Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sekretariat Komite Tapera
4. Penggunaan Sebagian Modal Awal BP Tapera untuk Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor BP Tapera
5. Revisi Keputusan Presiden Tentang Pengangkatan Komite Tapera
6. Raperpres tentang Honorarium, Insentif dan Manfaat Tambahan Lainnya untuk Komite Tapera

Tindak Lanjut

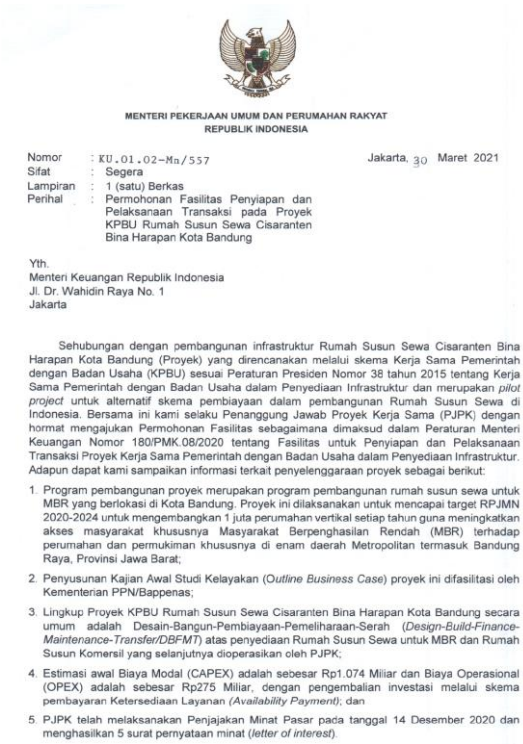
1. Seluruh aset eks - BAPERTARUM-PNS selanjutnya dikelola oleh BP Tapera
2. PPDPP dan BP Tapera menyetujui metode pengalihan Aset Transfer dimana pengalihan tidak hanya pada Dana FLPP tetapi juga SDM dan IT pada PPDPP. Pengalihan SDM PPDPP akan dilakukan dengan cara assessment atau penyaringan. Serta dibentuk Tim Kecil yang bertugas mengawal proses pengalihan dana FLPP pada PPDPP kepada BP Tapera dan berkewajiban memberikan laporan setiap minggunya.
3. Melengkapi kandidat pada bidang audit dan pelaporan di Sekretariat Komite Tapera
4. Meminta BP Tapera untuk menyampaikan permohonan rencana penggunaan anggaran tersebut kepada Komite Tapera dengan disertai kajian penggunaan sebagian Modal Awal BP Tapera untuk pengadaan tanah dan gedung Kantor BP Tapera secara komprehensif.
5. Mengirimkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara tentang permohonan penetapan Keputusan Presiden RI tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 67/m Tahun 2016 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan RakyatRevisi Kepres tentang Komite Tapera
6. Surat Permohonan Usulan Nama PAK akan dikirimkan ke K/L melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR dan Penyusunan Raperpres tentang Honorarium, Insentif dan Manfaat Tambahan Lainnya untuk Komite Tapera

LAMPIRAN

Dokumen Penting

01 KPBU

Dokumen KPBU Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

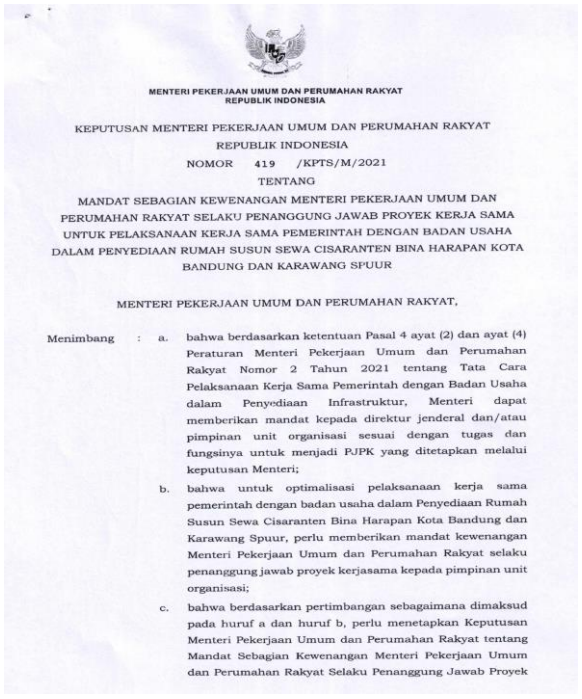
Nomor : KU.01.02-Mn/557
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Jakarta, 30 Maret 2021

Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung (Proyek) yang direncanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan merupakan *pilot project* untuk alternatif skema pembiayaan dalam pembangunan Rumah Susun Sewa di Indonesia. Bersama ini kami selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan hormat mengajukan Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun dapat kami sampaikan informasi terkait penyelenggaraan proyek sebagai berikut:

1. Program pembangunan proyek merupakan program pembangunan rumah susun sewa untuk MBR yang berlokasi di Kota Bandung. Proyek ini dilaksanakan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk mengembangkan 1 juta perumahan vertikal setiap tahun guna meningkatkan akses masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan dan permukiman khususnya di enam daerah Metropolitan termasuk Bandung Raya, Provinsi Jawa Barat;
2. Penyusunan Kajian Awal Studi Kelayakan (*Outline Business Case*) proyek ini difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas;
3. Lingkup Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung secara umum adalah Desain-Bangun-Pembiayaan-Pemeliharaan-Serah (*Design-Build-Finance-Maintenance-Transfer/DBFMT*) atas penyediaan Rumah Susun Sewa untuk MBR dan Rumah Susun Komersil yang selanjutnya dioperasikan oleh PJPK;
4. Estimasi awal Biaya Modal (CAPEX) adalah sebesar Rp1.074 Miliar dan Biaya Operasional (OPEX) adalah sebesar Rp275 Miliar, dengan pengembalian investasi melalui skema pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan
5. PJPK telah melaksanakan Penjajakan Minat Pasar pada tanggal 14 Desember 2020 dan menghasilkan 5 surat pernyataan minat (*letter of interest*).



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

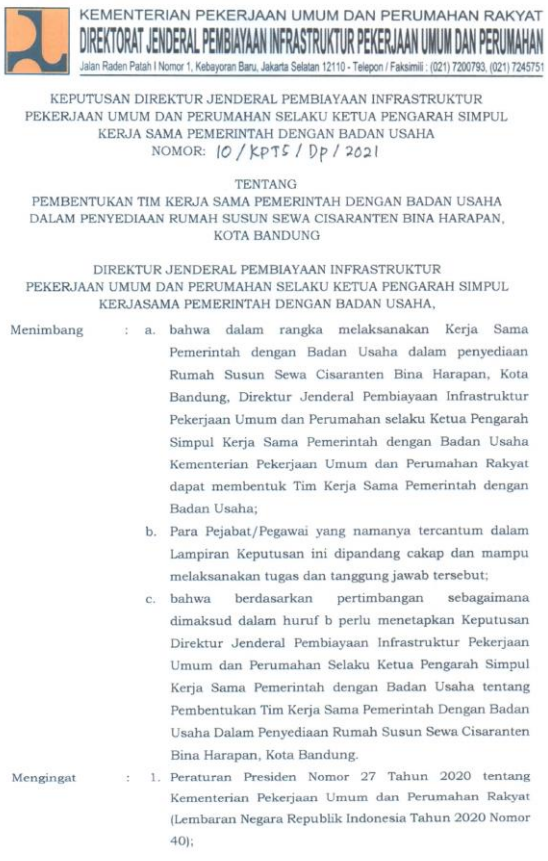
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 419 /KPTS/M/2021
TENTANG
MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEWA CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA BANDUNG DAN KARAWANG SPUUR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri dapat memberikan mandat kepada direktur jenderal dan/atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjadi PJPK yang ditetapkan melalui keputusan Menteri;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang Spuur, perlu memberikan mandat kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab proyek kerjasama kepada pimpinan unit organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN SELAKU KETUA PENGARAH SIMPUL
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
NOMOR: 10 / KPTS / Dp / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEWA CISARANTEN BINA HARAPAN,
KOTA BANDUNG

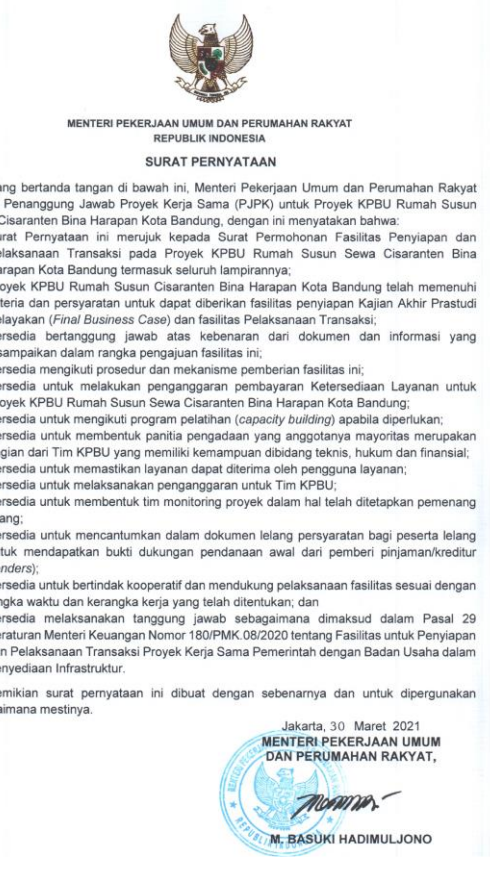
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN SELAKU KETUA PENGARAH SIMPUL
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selaku Ketua Pengarah Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat membentuk Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;

b. Para Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Selaku Ketua Pengarah Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Surat Pernyataan ini merujuk kepada Surat Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung termasuk seluruh lampirannya;
2. Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dapat diberikan fasilitas penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case*) dan fasilitas Pelaksanaan Transaksi;
3. Bersedia bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka pengajuan fasilitas ini;
4. Bersedia mengikuti prosedur dan mekanisme pemberian fasilitas ini;
5. Bersedia untuk melakukan penganggaran pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung;
6. Bersedia untuk mengikuti program pelatihan (*capacity building*) apabila diperlukan;
7. Bersedia untuk membentuk panitia pengadaan yang anggotanya mayoritas merupakan bagian dari Tim KPBU yang memiliki kemampuan dibidang teknis, hukum dan finansial;
8. Bersedia untuk memastikan layanan dapat diterima oleh pengguna layanan;
9. Bersedia untuk melaksanakan penganggaran untuk Tim KPBU;
10. Bersedia untuk membentuk tim monitoring proyek dalam hal telah ditetapkan pemenang lelang;
11. Bersedia untuk mencantumkan dalam dokumen lelang persyaratan bagi peserta lelang untuk mendapatkan bukti dukungan pendanaan awal dari pemberi pinjaman/kreditur (*lenders*);
12. Bersedia untuk bertindak kooperatif dan mendukung pelaksanaan fasilitas sesuai dengan jangka waktu dan kerangka kerja yang telah ditentukan; dan
13. Bersedia melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Maret 2021
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Dokumen KPBU Karawang Spuur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR: 27 / KPTS / DP / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEWA KARAWANG SPUUR,
KABUPATEN KARAWANG

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Rumah Susun Sewa Kawarang Spuur, Kabupaten Karawang, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan membentuk Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
b. bahwa para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Karawang Spuur, Kabupaten Karawang.

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Dokumen KPBU KEK Sei Mangkei

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-226/MK.08/2021 — 23 Maret 2021
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Persetujuan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Fasilitas) Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei ("Proyek")

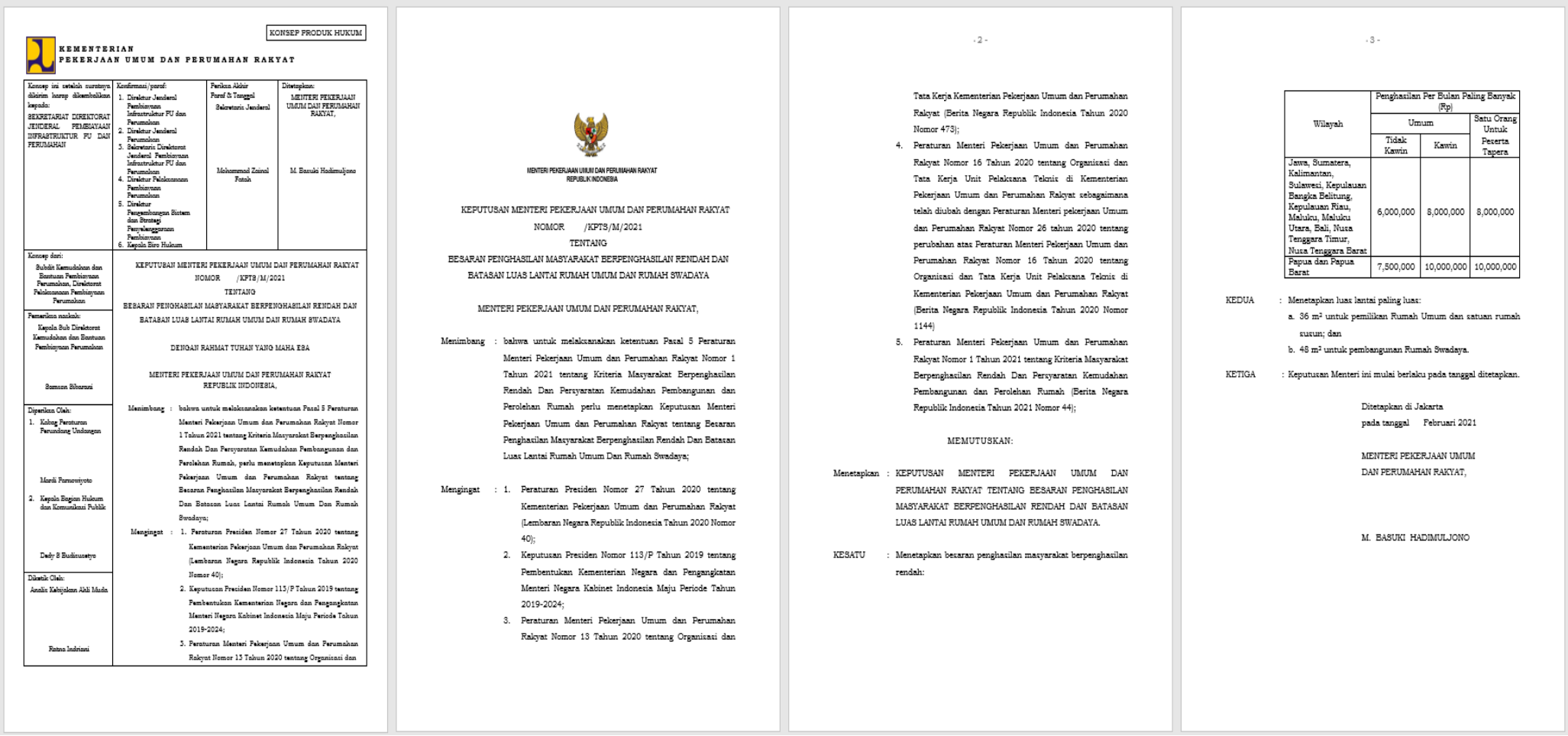
Yth. Gubernur Sumatera Utara
Di Jalan Diponegoro Nomor 30, Kota Medan
Sumatera Utara

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor Nomor 600/4869/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei Sumut, dan korespondensi lanjutan yang telah Saudara lakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami memandang inisiatif Saudara untuk mewujudkan Proyek merupakan langkah baik dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa dasar penelahaan Surat Permohonan Fasilitas adalah PMK 73/PMK.08/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
3. Memperhatikan hasil penelaahan atas permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Fasilitas ("Fasilitas") yang Saudara sampaikan dan pembahasan bersama dengan Tim KPBU yang Saudara tunjuk, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Fasilitas yang Saudara ajukan. Kiranya dalam pelaksanaan Fasilitas, Saudara selaku PJPK dapat:
   a. Melaksanakan tanggung jawab Saudara selaku PJPK sebagaimana pasal 29 PMK 180/2020 dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Proyek;
   b. Melaksanakan komitmen Saudara untuk memberikan dukungan baik yang bersifat kebijakan maupun finansial yang dibutuhkan Proyek;
   c. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dan efektif dengan pemangku kepentingan guna menjaga kesuksesaan pelaksanaan Proyek, utamanya dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan/atau Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya dalam hal program relokasi warga terkena dampak pembangungan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
   d. Menjaga dan menjamin tidak terjadi korupsi dan konflik kepentingan dalam proses penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek;
   e. Bersama dengan Pelaksana Fasilitas melakukan penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan yang mengutamakan pembangunan perumahan yang mengikuti prinsip-prinsip infrastruktur berkualitas termasuk mengusung konsep *green project* (ramah

02. Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Lampiran Dokumen)

KepmenPUPR tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya



KONSEP PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep ini setelah suratnya diberikan harap dikembalikan kepada: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN	Konfirmasi/paraf: 1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 2. Direktur Jenderal Perumahan 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 4. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 5. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 6. Kepala Biro Hukum	Periksa Akhir Paraf & Tanggal Sekretaris Jenderal Muhammad Zainul Fatoh	Ditetapkan: MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, M. Basuki Hadimuljono

Konsep dari:
Subdit Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Samson Sihaloni

Diperiksa oleh:
1. Kabag Peraturan Perundang Undangan

Mardi Purnawiyoto

2. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Dedy S Budiwanatya

Dikenik Oleh:
Analis Kebijakan Ahli Muda

Ratna Indriani

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /KPTS/M/2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN BATASAN LUAS LANTAI RUMAH UMUM DAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum Dan Rumah Swadaya;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /KPTS/M/2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN BATASAN LUAS LANTAI RUMAH UMUM DAN RUMAH SWADAYA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum Dan Rumah Swadaya;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BESARAN PENGHASILAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN BATASAN LUAS LANTAI RUMAH UMUM DAN RUMAH SWADAYA.

KESATU : Menetapkan besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah:

Wilayah	Penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp)		
	Umum		Satu Orang Untuk Peserta Tapera
	Tidak Kawin	Kawin	
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat	6,000,000	8,000,000	8,000,000
Papua dan Papua Barat	7,500,000	10,000,000	10,000,000

KEDUA : Menetapkan luas lantai paling luas:
a. 36 m² untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan rumah susun; dan
b. 48 m² untuk pembangunan Rumah Swadaya.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

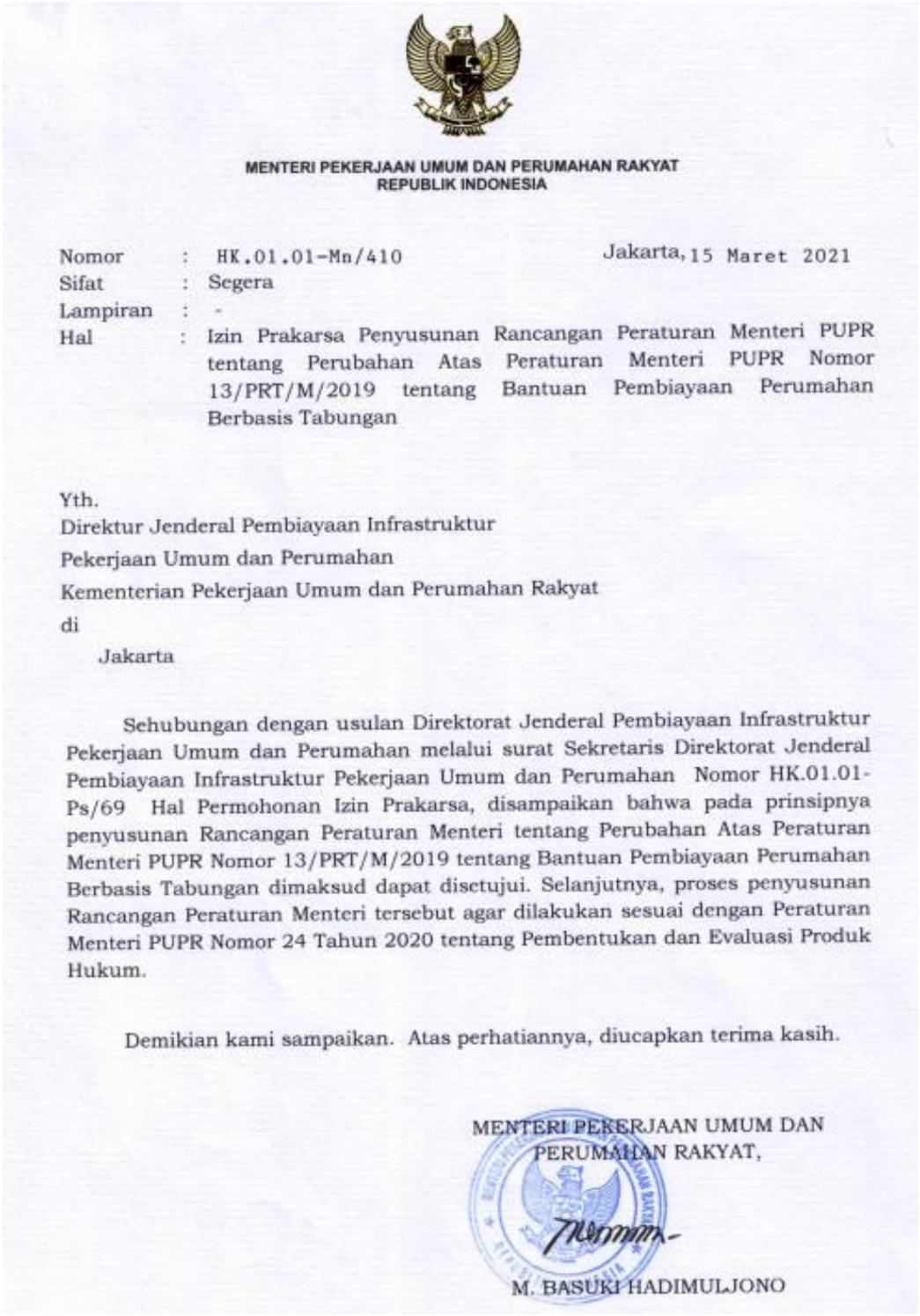
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Rapermen PUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

a. Izin prakarsa Bapak Menteri PUPR melalui surat No HK.01.01-Mn/410 tanggal 15 Maret 2021



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.01.01-Mn/410
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Jakarta, 15 Maret 2021

Yth.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di
Jakarta

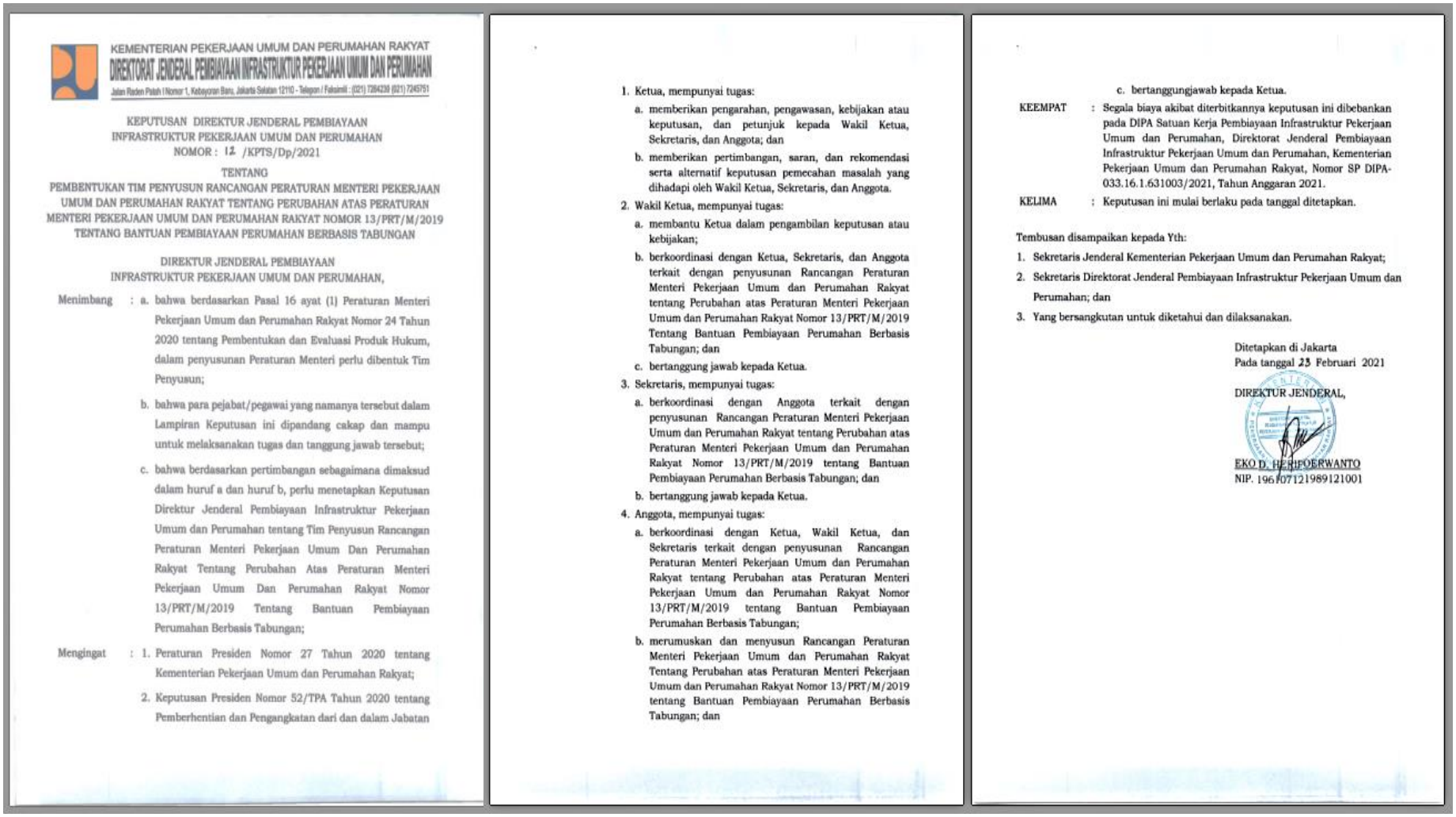
Sehubungan dengan usulan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor HK.01.01-Ps/69 Hal Permohonan Izin Prakarsa, disampaikan bahwa pada prinsipnya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dimaksud dapat disetujui. Selanjutnya, proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tersebut agar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

b. SK Dirjen PI No 12/KPTS/Dp/2021 terkait Pembentukan Tim Penyusun Rancangan PermenPUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264238 (021) 7245751

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : 12 /KPTS/Dp/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13/PRT/M/2019 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, dalam penyusunan Peraturan Menteri perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan

1. Ketua, mempunyai tugas:
   a. memberikan pengarahan, pengawasan, kebijakan atau keputusan, dan petunjuk kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota; dan
   b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi serta alternatif keputusan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
   a. membantu Ketua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
   b. berkoordinasi dengan Ketua, Sekretaris, dan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan
   c. bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Sekretaris, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan
   b. bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Anggota, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
   b. merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan
   c. bertanggungjawab kepada Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021, Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

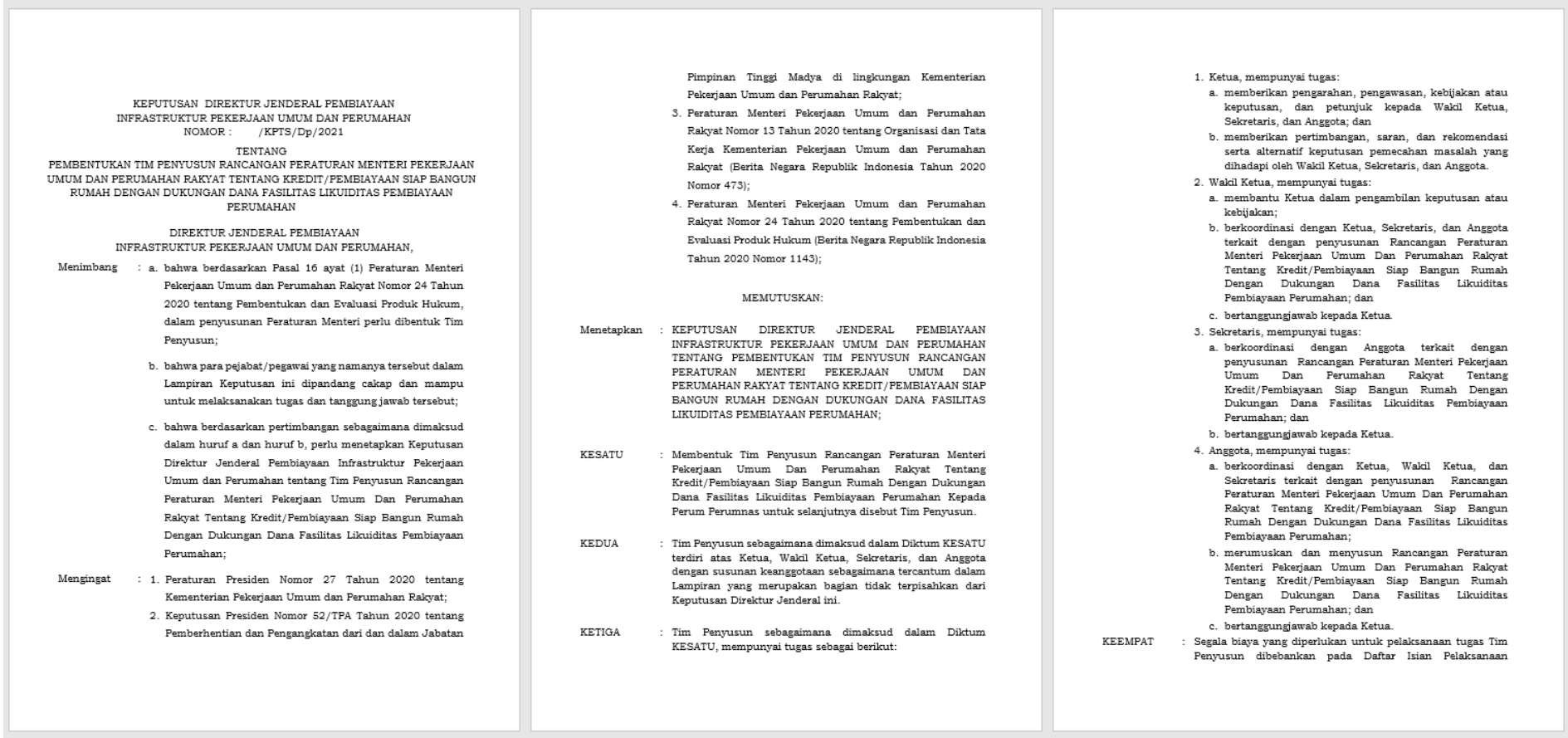
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL,

EKO D. HERIPOERWANTO
NIP. 196107121989121001

KPR Siap Bangun

Konsep SK Tim Penyusun RapermenPUPR tentang Kredit/Pembiayaan Siap Bangun Rumah dengan Dukungan Dana FLPP



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : /KPTS/Dp/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KREDIT/PEMBIAYAAN SIAP BANGUN RUMAH DENGAN DUKUNGAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, dalam penyusunan Peraturan Menteri perlu dibentuk Tim Penyusun;
b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kredit/Pembiayaan Siap Bangun Rumah Dengan Dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KREDIT/PEMBIAYAAN SIAP BANGUN RUMAH DENGAN DUKUNGAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kredit/Pembiayaan Siap Bangun Rumah Dengan Dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Kepada Perum Perumnas untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun.

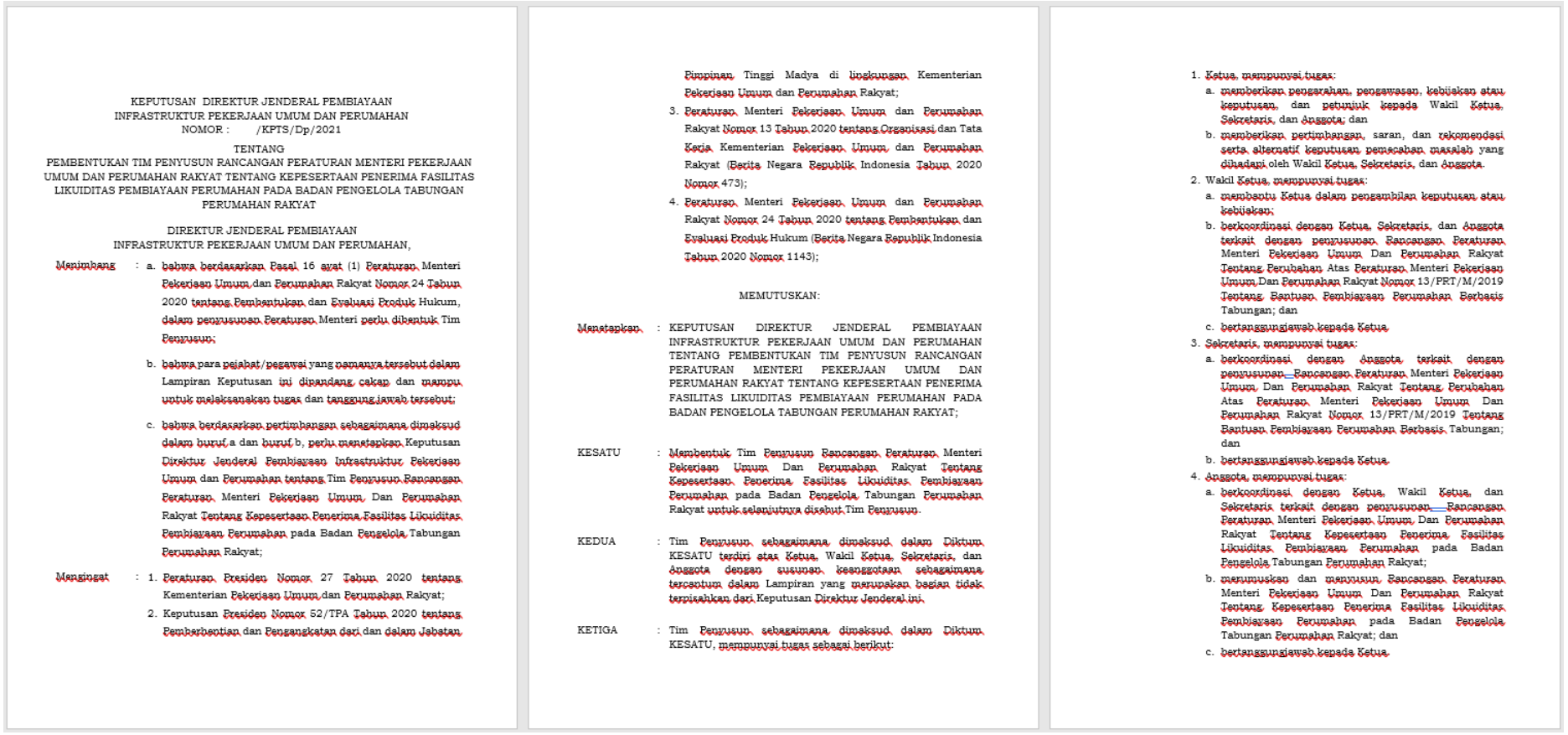
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua, mempunyai tugas:
   a. memberikan pengarahan, pengawasan, kebijakan atau keputusan, dan petunjuk kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota; dan
   b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi serta alternatif keputusan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
   a. membantu Ketua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
   b. berkoordinasi dengan Ketua, Sekretaris, dan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kredit/Pembiayaan Siap Bangun Rumah Dengan Dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; dan
   c. bertanggungjawab kepada Ketua.
3. Sekretaris, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kredit/Pembiayaan Siap Bangun Rumah Dengan Dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; dan
   b. bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Anggota, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kredit/Pembiayaan Siap Bangun Rumah Dengan Dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;
   b. merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kredit/Pembiayaan Siap Bangun Rumah Dengan Dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; dan
   c. bertanggungjawab kepada Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Kepesertaan FLPP di BP Tapera

Konsep SK Tim Penyusun RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima Manfaat FLPP pada BP Tapera



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : /KPTS/Dp/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KEPESERTAAN PENERIMA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, dalam penyusunan Peraturan Menteri perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KEPESERTAAN PENERIMA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun.

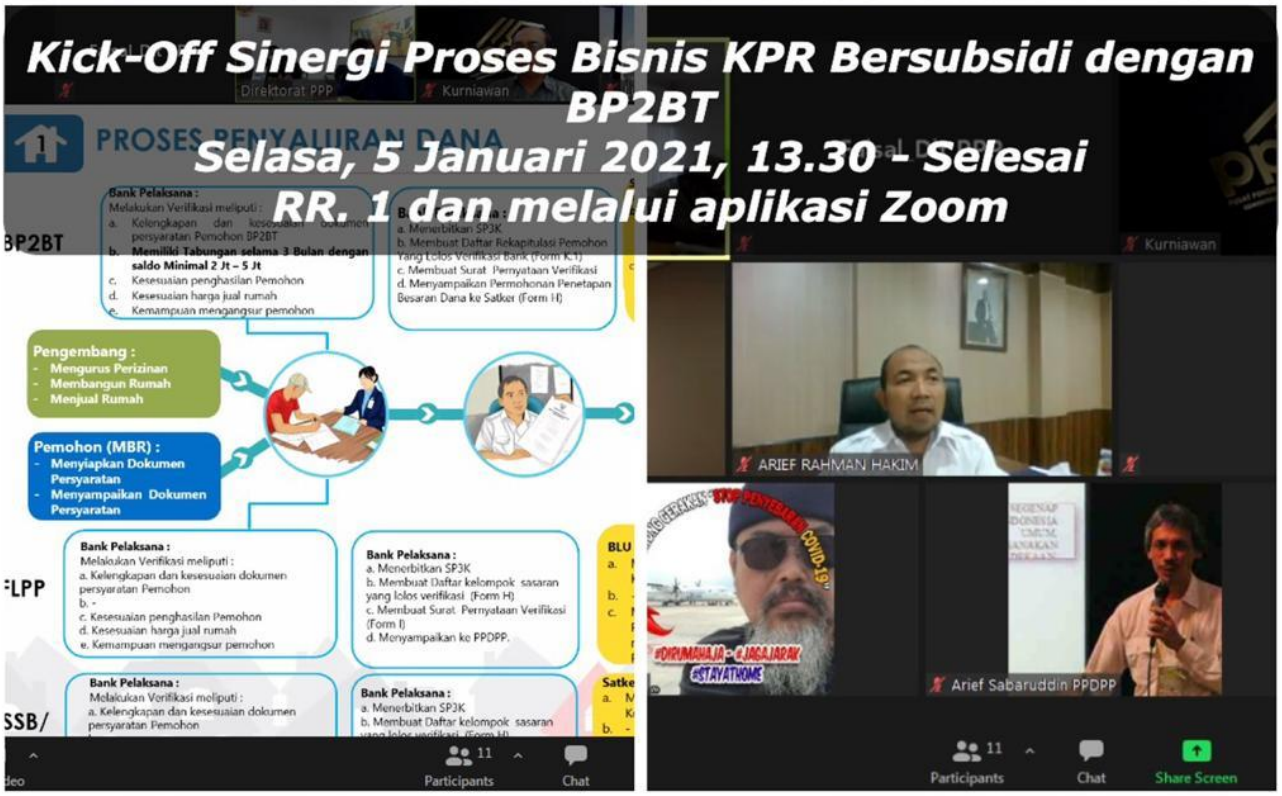
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas:
   a. memberikan pengarahan, pengawasan, kebijakan atau keputusan, dan petunjuk kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota; dan
   b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi serta alternatif keputusan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
   a. membantu Ketua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
   b. berkoordinasi dengan Ketua, Sekretaris, dan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan
   c. bertanggungjawab kepada Ketua.
3. Sekretaris, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan; dan
   b. bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Anggota, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
   b. merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; dan
   c. bertanggungjawab kepada Ketua.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

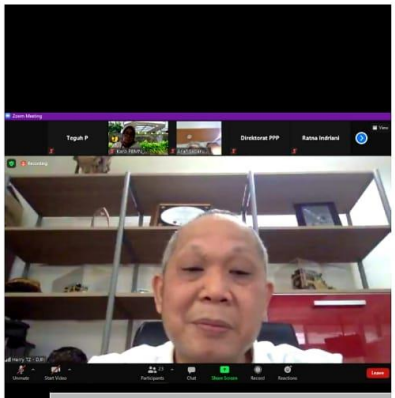










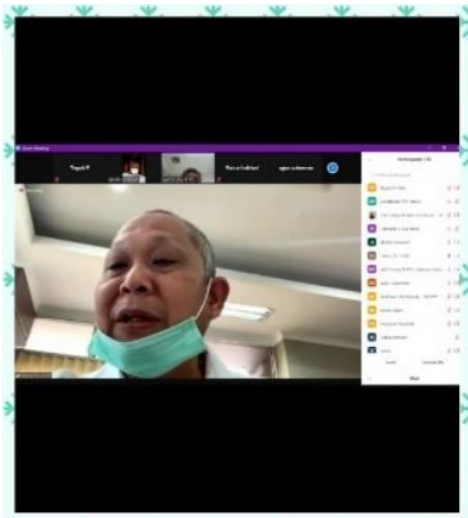


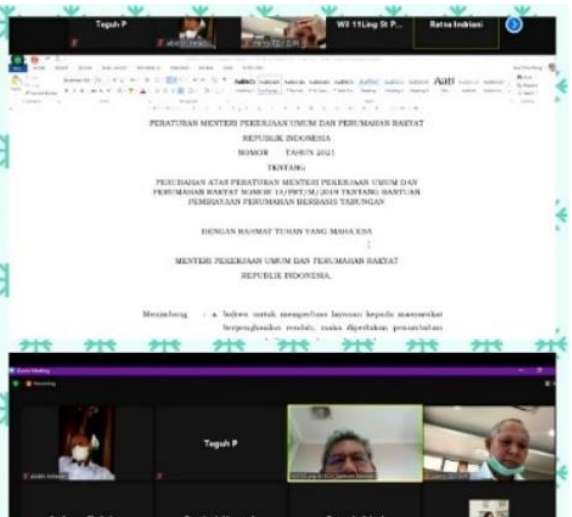


Rapat Pembahasan Status Aset PPDPP Paska Pengalihan Dana FLPP ke BP TAPERA
Selasa, 26 Januari 2021
Pukul 09.00 WIB - Selesai
Teleconference Melalui Aplikasi Zoom







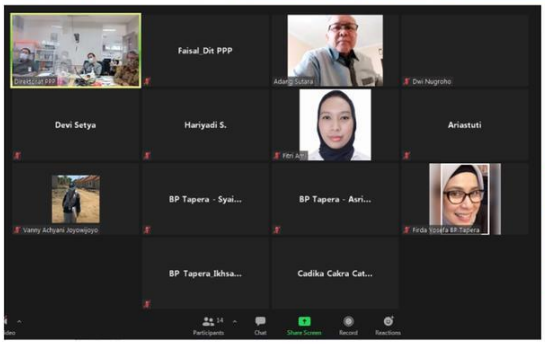




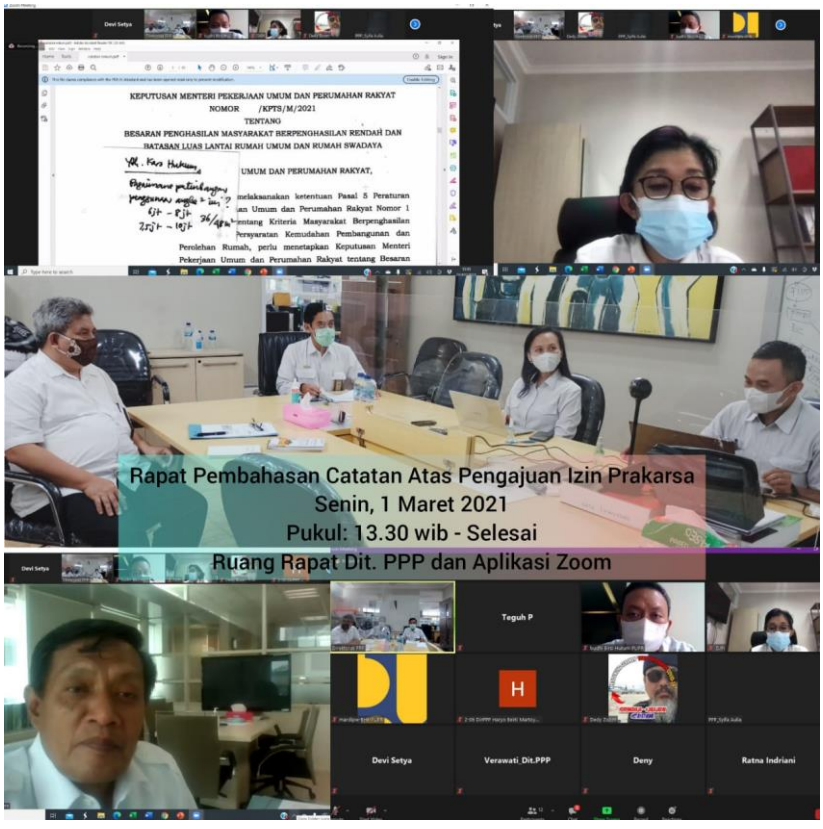


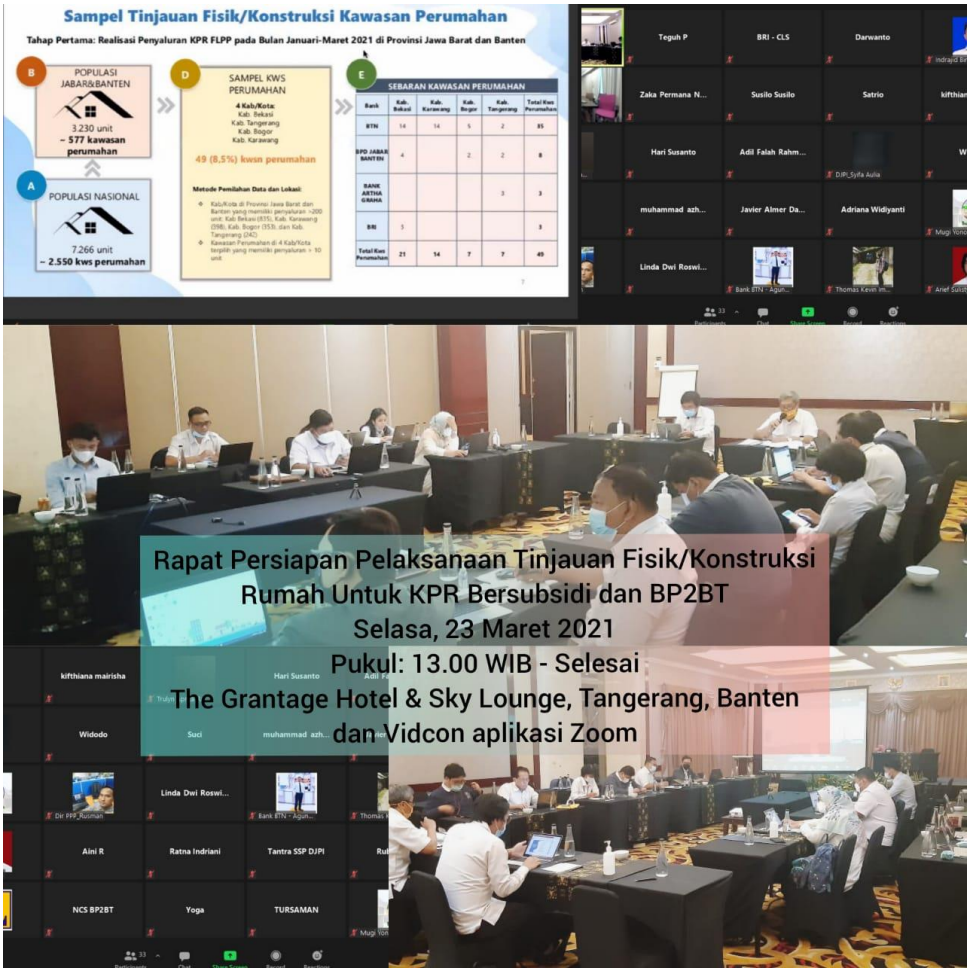
Rapat Pembahasan Skema Housing Microfinance (HMF)
Senin, 25 Januari 2021
Pukul 09.00 WIB-Selesai
Melalui Aplikasi ZOOM


Faisal_Dit PPP
Devi Setya
RPBP
Pembiayaan Perumahan bagi
Peserta Tapera
BP TAPERA
"Diskusi Harga Rumah dengan BP Tapera"
Jumat, 19 Februari 2021 Pukul 09.00 WIB - Selesai
Bertempat di Ruang Rapat Dit. PPP
dan secara Teleconference melalui aplikasi Zoom


Faisal_Dit PPP
Devi Setya
Hariyadi S.
Ariastuti
BP Tapera - Syai...
BP Tapera - Asri...
BP Tapera_Ikhsa...
Cadika Cakra Cat...




KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /KPTS/M/2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN
BATASAN LUAS LANTAI RUMAH UMUM DAN RUMAH SWADAYA
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
Rapat Pembahasan Catatan Atas Pengajuan Izin Prakarsa
Senin, 1 Maret 2021
Pukul: 13.30 wib - Selesai
Ruang Rapat Dit. PPP dan Aplikasi Zoom
Teguh P
Devi Setya
Verawati_Dit.PPP
Deny
Ratna Indriani


Sampel Tinjauan Fisik/Konstruksi Kawasan Perumahan
Tahap Pertama: Realisasi Penyaluran KPR FLPP pada Bulan Januari-Maret 2021 di Provinsi Jawa Barat dan Banten
POPULASI JABAR&BANTEN
3.230 unit
– 577 kawasan perumahan
POPULASI NASIONAL
7.266 unit
– 2.550 kws perumahan
SAMPEL KWS PERUMAHAN
4 Kab/Kota:
Kab. Bekasi
Kab. Tangerang
Kab. Bogor
Kab. Karawang
49 (8,5%) kwsn perumahan
SEBARAN KAWASAN PERUMAHAN
Rapat Persiapan Pelaksanaan Tinjauan Fisik/Konstruksi
Rumah Untuk KPR Bersubsidi dan BP2BT
Selasa, 23 Maret 2021
Pukul: 13.00 WIB - Selesai
The Grantage Hotel & Sky Lounge, Tangerang, Banten
dan Vidcon aplikasi Zoom


Bahan Rapat
Perluasan Skema Pembiayaan
Perumahan BP2BT




Rapat Pembahasan Skema Housing Microfinance
(HMF)
Senin, 18 Januari 2021
13.30 WIB -Selesai
Ruang Rapat 1, Lt 2 Wing 3 dan menggunakan aplikasi Zoom


Faisal_Dit PPP
Hariyadi S.
Teguh P
Halberto Sidiq P...
Ratna Indriani
Zulkifli Kahar
Satker PI - BP2BT
Dian setiyaningr...
W Hadi Sulistija

















Kunjungan Lokasi Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Kamis, 18 Maret 2021
Pukul 11.00 - selesai
di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung



Rapat Pembahasan Persiapan Pengadaan untuk Proses Transaksi Proyek
KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung
Rabu, 17 Maret 2021
Pukul 09.00 s/d selesai
Hotel Dharmein Jakarta dan Zoom Meeting



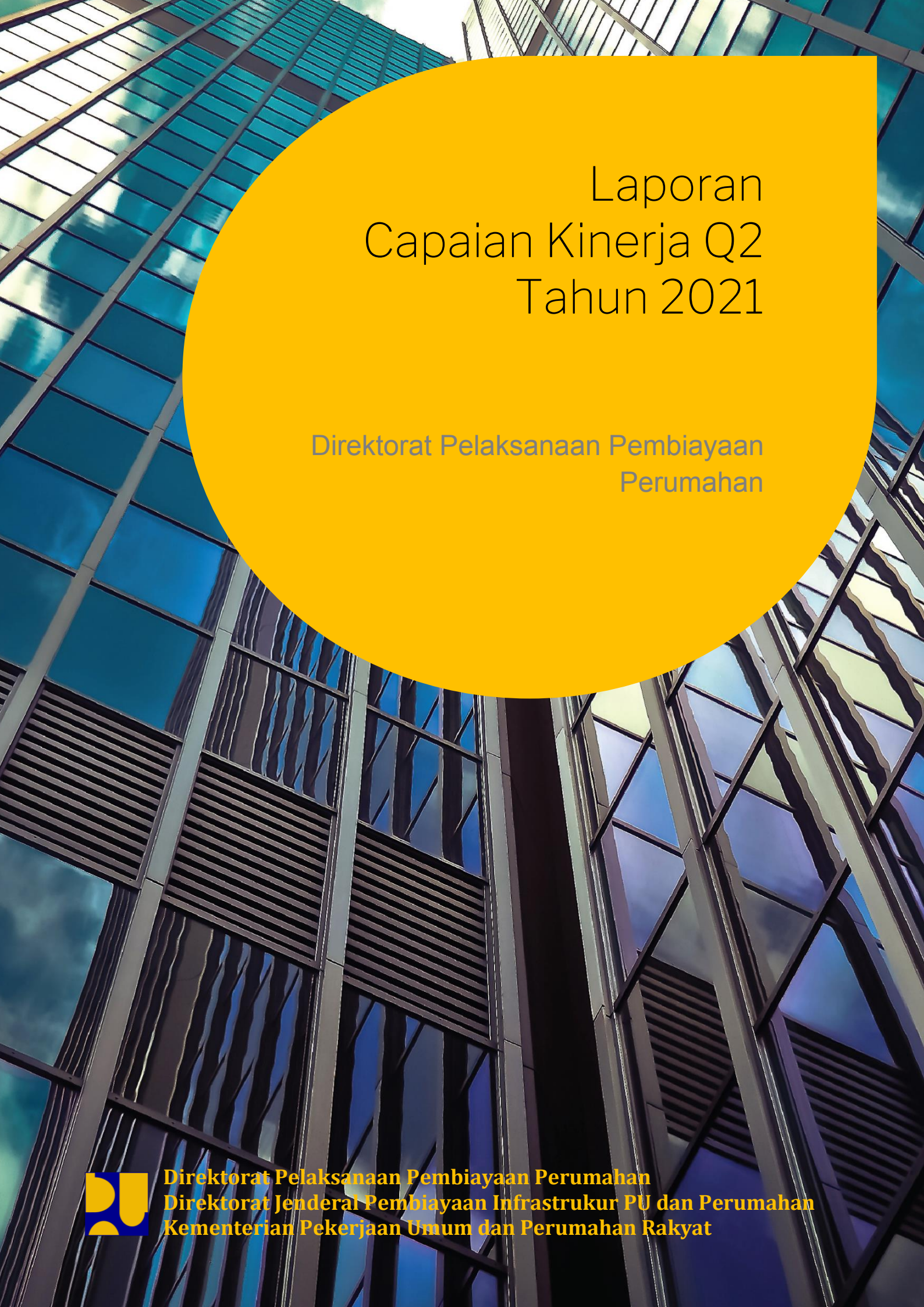
Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi KPBU Bidang Perumahan
Senin, 15 Maret 2021
09.30 s/d selesai
Aviary Hotel Bintaro dan Zoom Meeting



Kick off Meeting Tim KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung
Kamis, 25 Februari 2021
Pukul 13.30 s/d selesai
RR Dirjen PI Lantai 2 Wing 2 dan melalui Video Conference Zoom Meeting



LAMPIRAN



Laporan Capaian Kinerja Q2 Tahun 2021

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrukur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan izin-Nya Laporan Quartal 2 (Q2) Tahun Anggaran 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Q2 merupakan amanah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan laporan ini merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dan laporan pertanggungjawaban kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Q2 ini disajikan dengan mengukur sasaran, program, kegiatan, dan pencapaian kinerja yang dilakukan pada periode Bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa input, output, dan outcome yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang direalisasikan.

Penyusunan Laporan Q2 berdasarkan masukan dari seluruh Subdirektorat dan Mitra Kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Diharapkan dengan adanya Laporan Q2, dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada periode tersebut. Serta upaya untuk meningkatkan kinerja di periode berikutnya sehingga memperoleh ketercapaian mutu dalam mencapai tujuan.

Demikian Laporan Q2 disampaikan, mohon maaf jika dalam penyusunan masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk menyempurnakan laporan pada periode berikutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2021
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 197008201997031002

Ringkasan Eksekutif

Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp71.122.257.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) progam Kegiatan yaitu Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Progam Dukungan Manajemen. Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terkait Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target capaian pada Tahun Anggaran 2021, sedangkan Sasaran Kegiatan terkait dengan Program Dukungan Manajemen yaitu (1) Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Hingga akhir Q2 Tahun Anggaran 2021 (Bulan Juni 2021), Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dilihat dari e-monitoring online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status tanggal 30 Juni 2021 memiliki kinerja realisasi anggaran sebesar Rp13.370.636.000,00 atau sebesar 18,80% dari pagu anggaran Rp71.122.257.000,00.

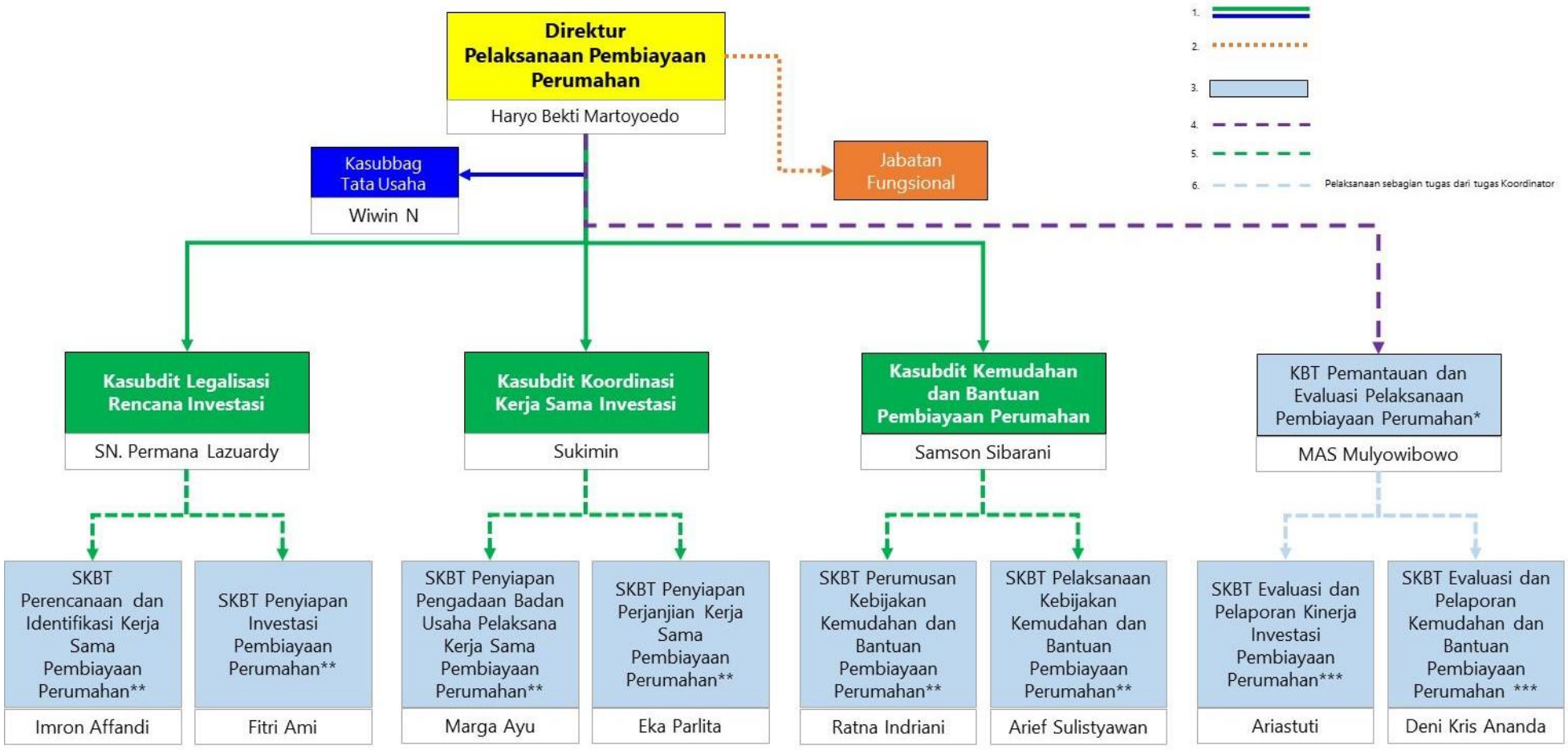
Proyek KPBU Bidang Perumahan

Kemudahan dan Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat memiliki rumah antara lain Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pada tahun Q2 2021, FLPP memiliki target penyaluran sebanyak 157.500 unit, target SBUM pada 2021 sebanyak 157.500 unit, dan untuk BP2BT memiliki target sebanyak 18.950 unit. Sedangkan untuk SSB pada tahun 2021 ini merupakan pembayaran untuk tahun sebelumnya (menggulung) dengan besar target penyaluran sebesar Rp 5.960.000.000.000,00. Pencapaian hingga 30 Juni 2021 untuk program FLPP adalah sebanyak 87.444 unit atau sebesar Rp9.521.744.250,876 capaian SBUM sebanyak 55.862 unit atau sebesar Rp226.664.000.000 dan BP2BT sebanyak 27 unit atau sebesar Rp1.070.000.000. Penyaluran SSB ulang tahun hingga 30 Juni 2021 adalah sebanyak 183.265 unit atau sebesar Rp259.237.184.208.

Tujuan dari Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kementerian PUPR turut hadir dalam memberikan dukungan agar proses kebutuhan dasar manusia yaitu rumah dapat terpenuhi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema oembiayaan perumahan dapat tercapai.

Struktur Organisasi



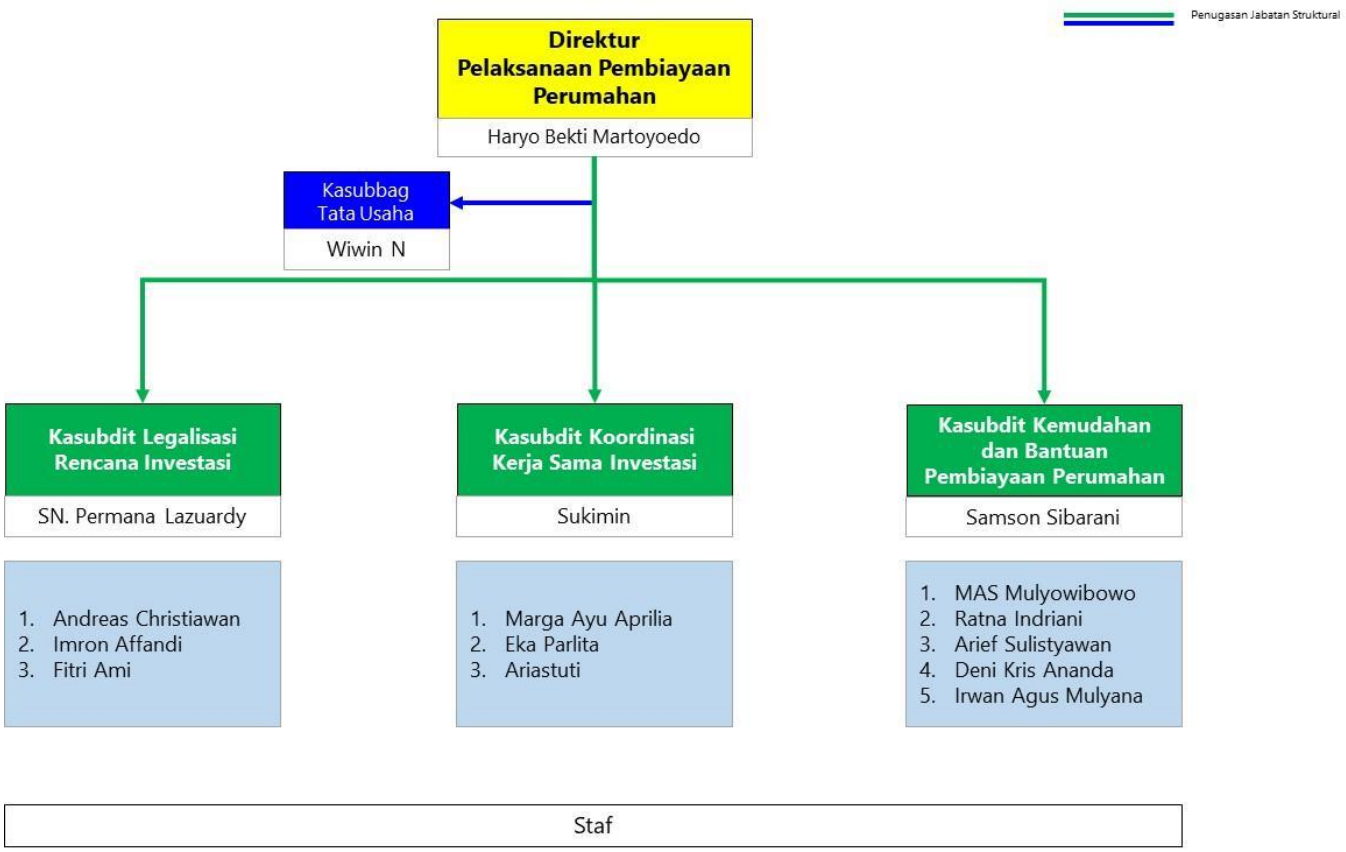
* *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.1a*

** *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.2a*

*** *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.2c*

Struktur Administrasi Organisasi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



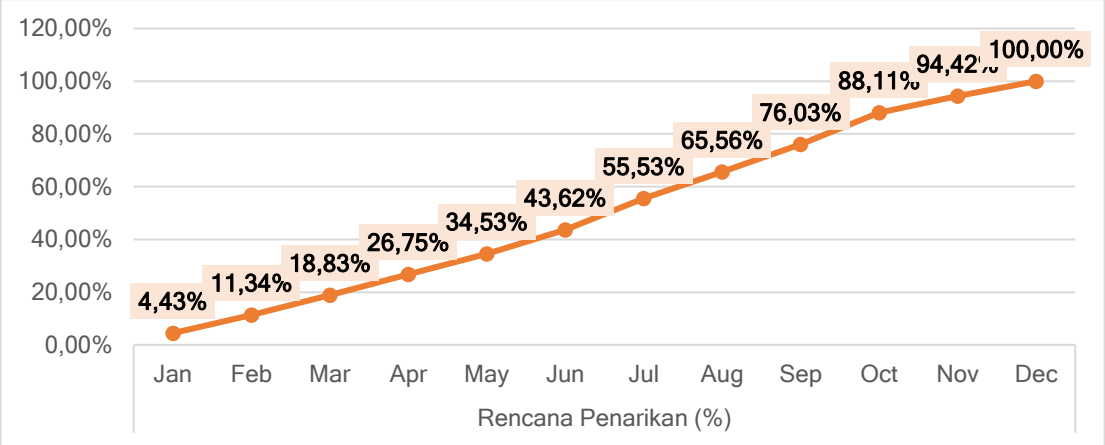
Perencanaan Kegiatan Keuangan

Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yaitu sebesar Rp71.122.257.000,00 Terdapat deviasi sebesar 23,74% dari rencana awal dikarenakan terdapat penambahan pagu BP2BT yang bersumber dana dari PHLN menjadi Rp45.121.627.000,00 sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Perumahan memiliki pagu semula Rp36.000.630.000,00 menjadi Rp71.122.257.000,00.

Progam Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari 2 (dua) progam Kegiatan yaitu Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Progam Dukungan Manajemen dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan
2. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Selama tatanan kenormalan baru, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengoptimalkan pemanfaatan ruang kerja sesuai aturan dan tetap memaksimalkan kegiatan melalui teknologi. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki rencana target penyerapan akhir tahun 2021 sebesar 100%.



Gambar 1 Rencana Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2021

Selama periode kuartal 2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah membuat rencana kegiatan dan prognosis anggaran, hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Lebih rinci rencana anggaran dan pelaksanaan kegiata dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Cascading Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00 %	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yag disusun dibandingkan dengan target	50,00%	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	50%	Penyusunan Program dan Anggara Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	50,00 %	15,00 %	54,00 %	24,25 %
												Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	50%	Penyusunan Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan	1	1	50,00 %			
										Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun Pekerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN)	1	2	200,00 %	40,0%		
														Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun TOD						
										Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	30%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi	40%	OBC	2	3	60,00 %	18,00 %		
												Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	60%	FBC	1	0	0,00%			
										Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia	2	2	100,00 %	20,00 %		

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
														Pengembangan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha						
										NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	-	0	0	100,00 %	15,00 %		
							Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50,00%	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan	35%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	60%	Penyusunan/Penyiapan Fasilitas e-Building Management untuk Mengukur Pencapaian Persyaratan Pemenuhan Availibility Paymen (Service Level Agreement)	3	3	60,00 %	21,00 %	43,00 %	
														Penyusunan Kriteria Penentuan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Bidang Perumahan						
														Penyusunan Dokumen Pendukung Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Perumahan						
												Jumah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	40%	*N/A*	*1*	0	0,00%			

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
										Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Penyiapan Model Pembinaan Teknis Pemantauan dan Supervisi KPBU Perumahan	1	1	100,00 %	35,00 %		
										Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	100 %	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	100,00 %	30,00 %		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00 %	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)		100,00%	Layanan Perkantoran	100 %	Jumlah Layanan Pelaksanaan Oprasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	100 %	Operasional Direktorat	1	1	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2,00%
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaa	50,00 %	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Fasilitasi Pembiayaan	30,00%	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: SMF (Dana Masyarakat)	70%	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan	8.460	8.460	70,00 %	100,00 %	30,00 %	42,06 %

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
	Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Permukiman yang Layak dan Aman	Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		n Perumahan		Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)	Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target						Perumahan Rakyat (SMF)						
												Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: Tapera (Dana Masyarakat)	30%	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	50.000	50.000	30,00 %			
							Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target	50,00%	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	40%	Jumlah Penyaluran Bantyuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	100 %	Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	2.150	1.357	63,12 %	25,25 %	27,79 %	
										Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	60%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SSB (BA.999.07)	50%	SSB	175.000	90.362	25,82 %	30,34 %		
												Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SBUM (BA.999.07)	50%	SBUM	263.000	130.184	24,75 %			
							Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingk	20,00%	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Jumah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayan Perumahan	50%	Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	3	3	83,33 %	81,67 %	26,33 %	

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
								an dengan target						Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		1				
														Penghitungan Harga Rumah Bersubsidi Tahun 2021		1				
												Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	30%	Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	2	60,00 %			
												Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	20%	-	0	-	20,0%			
										NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	100 %	Pemberdayaan Pelaku Pembangunan Rumah Bersubsidi	1	1	100,00 %	20,0%		
										Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem	15%	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem	100 %	Strategi Pelibatan Pemerintah Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan/Bant	4	4	100,00 %	15,00 %		

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
										Pembiayaan Perumahan		Pembiayaan Perumahan		uan Pembiayaan Perumahan						
														Penatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan dengan Geo-Enables Monitoring and Supervision (GEMS)						
														Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 1						
														Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 2						
										Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	15%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	100 %	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1	1	100,00 %	15,00 %		
														Operasional PHLN						
														Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT						
														Penyiapan Tata Kelola Pengawasan, Pengendalian, dan Penanganan						

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
														Pengaduan Program BP2BT						
														Pengembangan Kapasitas untuk Pembiayaan kepada Kelompok Penghasilan Tidak Tetap						

Tabel 2 Prognosis Anggaran Kuartal 2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)		
				Apr	May	Jun
Uker	**033.16**	**Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**71.122.257.000**			
Program	**033.16.IA**	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**60.871.627.000**	**28,08%**	**34,43%**	**42,48%**
Kegiatan	**4976**	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**60.871.627.000**	**28,08%**	**34,43%**	**42,48%**
KRO	**ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**5.500.000.000**	**12,60%**	**16,31%**	**22,53%**
RO	**4976.ABF.001**	**Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**5.500.000.000**	**12,60%**	**16,31%**	**22,53%**
Paket	**051**	**Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**4.150.000.000**	**9,04%**	**11,93%**	**15,54%**
	051.A	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	750.000.000	22,00%	28,00%	38,00%
	051.B	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	750.000.000	28,00%	38,00%	48,00%
	051.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.650.000.000	29,00%	36,00%	41,00%

	052	**Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayan Perumahan**	**600.000.000**	**18,00%**	**27,00%**	**39,00%**
	052.A	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	600.000.000	18,00%	27,00%	39,00%
	053	**Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	**28,00%**	**32,00%**	**48,00%**
	053.A	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	750.000.000	28,00%	32,00%	48,00%
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**750.000.000**	**20,00%**	**38,00%**	**43,00%**
RO	**4976.AFA.001**	**NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	**20,00%**	**38,00%**	**43,00%**
Komponen	**051**	**Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	**20,00%**	**38,00%**	**43,00%**
Paket	051.A	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	750.000.000	20,00%	38,00%	43,00%
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**1.500.000.000**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**
RO	**4976.EAL.001**	**Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1.500.000.000**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1.500.000.000**	**38,00%**	**43,00%**	**56,00%**
Paket	051.A	Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Konstruksi Rumah untuk MBR yang Mengikui Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	500.000.000	38,00%	43,00%	56,00%
	051.B	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	38,00%	43,00%	56,00%
KRO	**PEA**	**Koordinasi**	**500.000.000**	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**
RO	**4976.PEA.001**	**Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**
Paket	051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	500.000.000	**21,00%**	**36,00%**	**48,00%**

KRO	**QAH**	**Pelayanan Publik Lainnya**	**7.500.000.000**	**27,34%**	**35,08%**	**43,90%**
RO	**4976.QAH.001**	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**3.500.000.000**	**32,29%**	**40,89%**	**49,49%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**3.500.000.000**	32,29%	40,89%	49,49%
Paket	051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	3.500.000.000	32,29%	40,89%	49,49%
RO	**4976.QAH.002**	**Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**4.000.000.000**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**4.000.000.000**	23,00%	30,00%	39,00%
Paket	051.A	Dana Operaional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN	4.000.000.000	23,00%	30,00%	39,00%
KRO	**QFC**	**Subsidi kepada Keluarga**	**45.121.627.000**	**29,97%**	**36,17%**	**44,15%**
RO	**4976.QFC.001**	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**45.121.627.000**	**29,97%**	**36,17%**	**44,15%**
Komponen	**051**	**Penyaluran Bantua Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**45.121.627.000**	29,97%	36,17%	44,15%
Paket	051.A	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40.000.000.000	21,00%	28,00%	37,00%
	051.B	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5.121.627.000	100,00%	100,00%	100,00%
Program	**033.WA**	**Program Dukungan Manajamen**	**10.250.630.000**	**25,60%**	**34,71%**	**43,79%**
Kegiatan	**4194**	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**1.000.000.000**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**
KRO	**EAA**	**Layanan Perkantoran**	**1.000.000.000**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**
RO	**4194.EAA.006**	**Operasionalisasi Kantor Direktorat**	**1.000.000.000**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**
Komponen	**002**	**Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP**	**1.000.000.000**	**30,00%**	**40,00%**	**50,00%**
Paket	002.E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000.000	30,00%	40,00%	50,00%
Kegiatan	**4197**	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**9.250.630.000**	**25,13%**	**34,13%**	**43,11%**

KRO	**ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**5.096.630.000**	**24,92%**	**35,36%**	**45,51%**
RO	**4197.ABF.013**	**Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**664.320.000**	**28,24%**	**35,98%**	**45,23%**
Komponen	**051**	**Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**664.320.000**	**28,24%**	**35,98%**	**45,23%**
Paket	051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500.000.000	27,00%	34,00%	43,00%
		Belanja Penanganan Covid-19	164.320.000	**32,00%**	**42,00%**	**52,00%**
RO	**4197.ABF.014**	**Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1.000.000.000**	23,00%	31,00%	45,00%
Komponen	**051**	**Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1.000.000.000**	**23,00%**	**31,00%**	**45,00%**
Paket	051.A	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1.000.000.000	23,00%	31,00%	45,00%
RO	**4197.ABF.015**	**Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumaan**	**2.682.310.000**	24,79%	36,66%	46,74%
Komponen	**051**	**Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**2.682.310.000**	24,79%	36,66%	46,74%
Paket	051.A	Penyusunan OBC Proyek KPBU Perumahan	1.750.000.000	38,00%	45,00%	53,00%
	051.B	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	932.310.000	0,00%	21,00%	35,00%
RO	**4197.ABF.016**	**Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	25,00%	36,00%	42,00%
Komponen	**051**	**Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**750.000.000**	**25,00%**	**36,00%**	**42,00%**
Paket	051.A	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan	750.000.000	25,00%	36,00%	42,00%
KRO	**AEE**	**Kemitraan**	**2.500.000.000**	**26,40%**	**33,80%**	**40,60%**
RO	**4197.AEE.004**	**Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan**	**2.500.000.000**	26,40%	33,80%	40,60%
Komponen	**051**	**Pelaksanaaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1.500.000.000**	**26,00%**	**33,00%**	**41,00%**
Paket	051.A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1.500.000.000	26,00%	33,00%	41,00%

Komponen	**052**	**Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1.000.000.000**	**27,00%**	**35,00%**	**40,00%**
Paket	052.A	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	1.000.000.000	27,00%	35,00%	40,00%
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**500.000.000**	**27,00%**	**34,00%**	**42,00%**
RO	**4197.AFA.004**	**NSPK Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**27,00%**	**34,00%**	**42,00%**
Komponen	**051**	**Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan**	**500.000.000**	**27,00%**	**34,00%**	**42,00%**
Paket	051.A	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	500.000.000	27,00%	34,00%	42,00%
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**1.154.000.000**	**22,48%**	**29,48%**	**38,48%**
RO	**4197.EAL.007**	**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**854.000.000**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**854.000.000**	**23,00%**	**30,00%**	**39,00%**
Paket	051.A	Pemantauan dan Evaluasi KPBU Bidang Perumahan	854.000.000	23,00%	30,00%	39,00%
RO	**4197.EAL.008**	**Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**300.000.000**	**21,00%**	**28,00%**	**37,00%**
Komponen	**051**	**Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**300.000.000**	**21,00%**	**28,00%**	**37,00%**
Paket	051.A	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	300.000.000	21,00%	28,00%	37,00%
		RENCANA PENARIKAN DIT PPP SAMPAI DENGAN JUNI 2021	30.343.591.900	27,72%	34,47%	42,66%

Tabel 3 Realisasi Anggaran Kuartal 2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Q1 (x Rp 1,00)	Realisasi Q1 (%)		Realisasi Q2 (x Rp 1,00)	Realisasi Q2 (%)	
								Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Uker		**Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**				**69.985.584.000**	**2.573.187.000**	**7,27%**	**7,53%**	**10.541.536.000**	**15,06%**	**15,07%**
Program	**033.16.IA**	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**60.871.627.000**	**2.223.206.000**	**8,63%**	**8,87%**	**7.770.769.000**	**12,77%**	**13,10%**
Kegiatan	**4976**	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**				**60.871.627.000**	**2.223.206.000**	**8,63%**	**9,22%**	**7.770.769.000**	**12,77%**	**13,10%**
KRO	**ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**4**	**Rekomendasi Kebijakan**		**5.353.276.000**	**344.514.000**	**6,44%**	**6,62%**	**1.339.845.000**	**25,03%**	**24,90%**
RO	**4976.ABF.001**	**Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**4**	**Rekomendasi Kebijakan**		**5.353.276.000**	**344.514.000**	**6,44%**	**6,62%**	**1.339.845.000**	**25,03%**	**24,90%**
Komponen	**051**	**Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**		**4.062.705.000**	**327.302.000**	**8,06%**	**8,22%**	**1.143.530.000**	**28,15%**	**28,22%**
Paket	051.A	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	700.440.000	19.244.000	2,75%	3,00%	157.658.000	22,51%	22%
	051.B	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	712.265.000	18.620.000	2,61%	3,00%	175.429.000	24,63%	24,00%
	051.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Layanan	Swakelola	2.650.000.000	289.438.000	10,92%	11,00%	810.443.000	30,58%	31,00%
Komponen	**052**	**Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**600.000.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**

Paket	052.A	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	600.000.000	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Komponen	**053**	**Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**690.571.000**	**17.212.000**	**2,49%**	**3,00%**	**196.315.000**	**28,43 %**	**27,00 %**
Paket	053.A	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	690.571.000	17.212.000	2,49%	3,00%	196.315.000	28,43 %	27,00 %
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**1**	**NSPK**		**709.444.000**	**31.026.000**	**4,37%**	**5,00%**	**281.419.000**	**39,67 %**	**38,00 %**
RO	**4976.AFA.001**	**NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**709.444.000**	**31.026.000**	**4,37%**	**5,00%**	**281.419.000**	**39,67 %**	**38,00 %**
Komponen	**051**	**Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**709.444.000**	**31.026.000**	**4,37%**	**5,00%**	**281.419.000**	**39,67 %**	**38,00 %**
Paket	051.A	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	1	NSPK	Swakelola	709.444.000	31.026.000	4,37%	5,00%	281.419.000	39,67 %	38,00 %
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**2**	**Laporan**		**1.403.008.000**	**41.579.000**	**2,96%**	**1,64%**	**285.271.000**	**20,33 %**	**19,82 %**
RO	**4976.EAL.001**	**Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Laporan**		**1.403.008.000**	**41.579.000**	**2,96%**	**1,64%**	**285.271.000**	**20,33 %**	**19,82 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Laporan**		**1.403.008.000**	**41.579.000**	**2,96%**	**1,64%**	**285.271.000**	**20,33 %**	**19,82 %**
Paket	051.A	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	1	Laporan	Swakelola	459.231.000	1.980.000	0,43%	1,00%	12.752.000	2,78%	3,00%
	051.B	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Laporan	Swakelola	943.777.000	39.599.000	4,20%	4,00%	272.519.000	28,88 %	28,00 %

KRO	**PEA**	**Koordinasi**	**1**	**Kegiatan**		**1.204.401.000**	**67.168.000**	**5,58%**	**14,00 %**	**98.364.000**	**8,17%**	**20,00 %**
RO	**4976.PEA.001**	**Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Kegiatan**		**1.204.401.000**	**67.168.000**	**5,58%**	**14,00 %**	**98.364.000**	**8,17%**	**20,00 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Kegiatan**		**1.204.401.000**	**67.168.000**	**5,58%**	**14,00 %**	**98.364.000**	**8,17%**	**20,00 %**
Paket	051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat	1	Kegiatan	Swakelola	1.204.401.000	67.168.000	5,58%	14,00 %	98.364.000	8,17%	20,00 %
KRO	**QAH**	**Pelayanan Publik Lainnya**	**2**	**Layanan**		**7.079.871.000**	**738.919.000**	**10,44 %**	**10,30 %**	**1.998.843.000**	**28,23 %**	**27,21 %**
RO	**4976.QAH.001**	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**1**	**Layanan**		**3.380.920.000**	**518.383.000**	**15,33 %**	**15,00 %**	**1.185.799.000**	**35,07 %**	**34,00 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**1**	**Layanan**		**3.380.920.000**	**518.383.000**	**15,33 %**	**15,00 %**	**1.185.799.000**	**35,07 %**	**34,00 %**
Paket	051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1	Layanan	Swakelola	3.380.920.000	518.383.000	15,33 %	15,00 %	1.185.799.000	35,07 %	34,00 %
RO	**4976.QAH.002**	**Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1**	**Layanan**		**3.698.951.000**	**220.536.000**	**5,96%**	**6,00%**	**813.044.000**	**21,98 %**	**21,00 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1**	**Layanan**		**3.698.951.000**	**220.536.000**	**5,96%**	**6,00%**	**813.044.000**	**21,98 %**	**21,00 %**
Paket	051.A	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	1	Layanan	Swakelola	3.698.951.000	220.536.000	5,96%	6,00%	813.044.000	21,98 %	21,00 %
KRO	**QFC**	**Subsidi kepada Keluarga**	**1000**	**Rumah Tangga**		**45.121.627.000**	**1.000.000.000**	**2,22%**	**9,53%**	**3.767.027.000**	**8,35%**	**8,70%**
RO	**4976.QFC.001**	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1000**	**Rumah Tangga**		**45.121.627.000**	**1.000.000.000**	**2,22%**	**9,53%**	**3.767.027.000**	**8,35%**	**8,70%**
Komponen	**051**	**Penyaluran Bantua Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1000**	**Rumah Tangga**		**45.121.627.000**	**1.000.000.000**	**2,22%**	**9,53%**	**3.767.027.000**	**8,35%**	**8,70%**

Paket	051.A	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	1000	Rumah Tangga	Swakelola	40.000.000.000	0	0,00%	0,00%	640.000.000	1,60%	2,00%
	051.B	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	1	Pendampingan	Seleksi	5.121.627.000	1.000.000.000	19,53 %	84,00 %	3.127.027.000	61,06 %	61,06 %
Program	**033.WA**	**Program Dukungan Manajamen**				**9.113.957.000**	**349.981.000**	**3,83%**	**4,25%**	**2.770.767.000**	**30,40 %**	**28,25 %**
Kegiatan	**4194**	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**				**1.000.000.000**	**0**	**4,26%**	**5,00%**	**281.888.000**	**28,19 %**	**29,00 %**
KRO	**EAA**	**Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**		**1.000.000.000**	**0**	**4,26%**	**5,00%**	**281.888.000**	**28,19 %**	**29,00 %**
RO	**4194.EAA.006**	**Operasionalisasi Kantor Direktorat**	**1**	**Layaan**		**1.000.000.000**	**0**	**4,26%**	**5,00%**	**281.888.000**	**28,19 %**	**29,00 %**
Komponen	**002**	**Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP**	**1**	**Layanan**		**1.000.000.000**		**4,26%**	**5,00%**	**281.888.000**	**28,19 %**	**29,00 %**
Paket	002.E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1	Layanan	AU	1.000.000.000	42.609.000	4,26%	5,00%	281.888.000	28,19 %	29,00 %
Kegiatan	**4197**	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**				**8.113.957.000**	**349.981.000**	**4,31%**	**4,16%**	**2.488.879.000**	**30,67 %**	**28,16 %**
KRO	**ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**5**	**Rekomendasi Kebijakan**		**4.545.688.000**	**179.477.000**	**3,95%**	**3,82%**	**1.435.032.000**	**31,57 %**	**29,05 %**
RO	**4197.ABF.013**	**Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**461.179.000**	**19.916.000**	**4,32%**	**2,57%**	**90.845.000**	**19,70 %**	**12,23 %**
Komponen	**051**	**Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**461.179.000**	**19.916.000**	**4,32%**	**2,57%**	**90.845.000**	**19,70 %**	**12,23 %**
Paket	051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	296.859.000	19.916.000	6,71%	4,00%	90.845.000	30,60 %	19,00 %

	051.B	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Layanan	Swakelola	164.320.000	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
RO	**4197.ABF.014**	**Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**922.008.000**	**91.154.000**	**9,89%**	**10,00 %**	**473.599.000**	**51,37 %**	**48,00 %**
Komponen	**051**	**Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**922.008.000**	**91.154.000**	**9,89%**	**10,00 %**	**473.599.000**	**51,37 %**	**48,00 %**
Paket	051.A	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	922.008.000	91.154.000	9,89%	10,00 %	473.599.000	51,37 %	48,00 %
RO	**4197.ABF.015**	**Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumaan**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**		**2.501.770.000**	**49.033.000**	**1,96%**	**1,98%**	**685.679.000**	**27,41 %**	**26,24 %**
Komponen	**051**	**Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**		**2.501.770.000**	**49.033.000**	**1,96%**	**1,98%**	**685.679.000**	**27,41 %**	**26,24 %**
Paket	051.A	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	1.654.149.000	49.033.000	2,96%	3,00%	551.228.000	33,32 %	32,00 %
	051.B	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	847.621.000	0	0,00%	0,00%	134.451.000	15,86 %	15,00 %
RO	**4197.ABF.016**	**Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**660.731.000**	**19.374.000**	**2,93%**	**3,00%**	**184.909.000**	**27,99 %**	**25,00 %**
Komponen	**051**	**Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**660.731.000**	**19.374.000**	**2,93%**	**3,00%**	**184.909.000**	**27,99 %**	**25,00 %**
Paket	051.A	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	660.731.000	19.374.000	2,93%	3,00%	184.909.000	27,99 %	25,00 %
KRO	**AEE**	**Kemitraan**		**Rekomendasi Kebijakan**		**2.256.621.000**	**163.904.000**	**7,26%**	**6,94%**	**931.919.000**	**41,30 %**	**38,01 %**

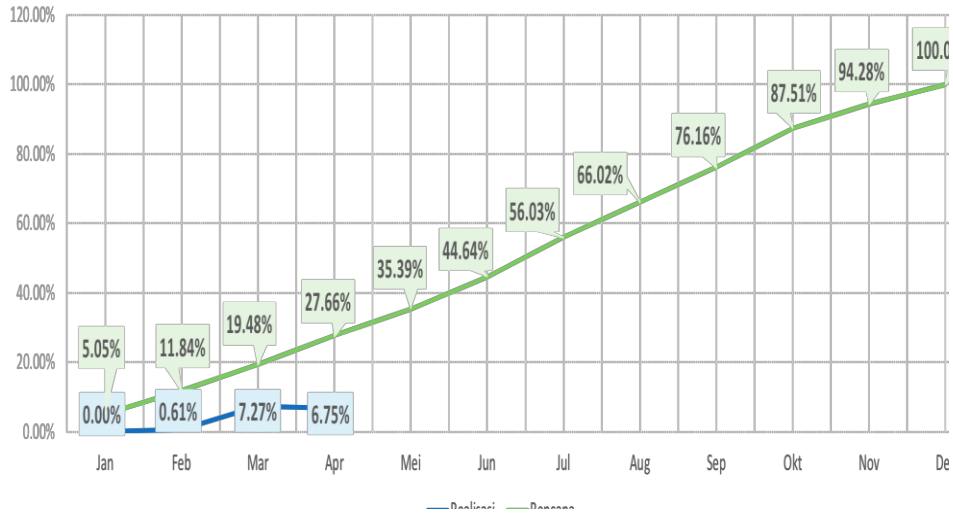
RO	**4197.AEE.004**	**Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan**	**1**	**Kesepakatan**		**2.256.621.000**	**163.904.000**	**7,26%**	**6,94%**	**931.919.000**	**41,30 %**	**38,01 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Dokumen**		**1.394.566.000**	**148.080.000**	**10,62 %**	**10,00 %**	**764.475.000**	**54,82 %**	**51,00 %**
Paket	051.A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1	Kesepakatan	Jasa Lainnya	1.394.566.000	148.080.000	10,62 %	10,00 %	764.475.000	54,82 %	51,00 %
Komponen	**052**	**Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Dokumen**		**862.055.000**	**15.824.000**	**1,84%**	**2,00%**	**167.444.000**	**19,42 %**	**17,00 %**
Paket	052.A	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	1	Kesepakatan	Jasa Lainnya	862.055.000	15.824.000	1,84%	2,00%	167.444.000	19,42 %	17,00 %
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**1**	**NSPK**		**375.310.000**	**6.600.000**	**1,76%**	**2,00%**	**26.400.000**	**7,03%**	**6,00%**
RO	**4197.AFA.004**	**NSPK Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**375.310.000**	**6.600.000**	**1,76%**	**2,00%**	**26.400.000**	**7,03%**	**6,00%**
Komponen	**051**	**Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**375.310.000**	**6.600.000**	**1,76%**	**2,00%**	**26.400.000**	**7,03%**	**6,00%**
Paket	051.A	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	1	NSPK	Jasa Lainnya	375.310.000	6.600.000	1,76%	2,00%	26.400.000	7,03%	6,00%
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**2**	**Laporan**		**936.338.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**95.528.000**	**10,20 %**	**8,94%**
RO	**4197.EAL.007**	**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**697.320.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**95.528.000**	**13,70 %**	**12,00 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**697.320.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**95.528.000**	**13,70 %**	**12,00 %**
Paket	051.A	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	1	Laporan	Jasa Lainnya	697.320.000	0	0,00%	0,00%	95.528.000	13,70 %	12,00 %
RO	**4197.EAL.008**	**Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**239.018.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**

Komponen	**051**	**Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**239.018.000**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Paket	051.A	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	Laporan	Jasa Lainnya	239.018.000	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%

Capaian
Kinerja Keuangan

APRIL 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada Bulan April 2021 dilihat dari *e-monitoring* online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut:



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan (*e-monitoring* akses 4 Mei 2021)

Kinerja realisasi anggaran sebesar Rp4.799.217.609,00 atau sebesar 6,75% dari pagu anggaran Rp71.122.257.000,00. Terdapat deviasi sebesar 20,91% dari rencana awal dikarenakan terdapat penambahan pagu BP2BT yang bersumber dana dari PHLN menjadi Rp45.121.627.000,00 sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Perumahan memiliki pagu semula Rp36.000.000.630,00 menjadi Rp71.122.257.000,00

Untuk rincian realisasi anggaran pada Bulan April 2021 dapat dilihat pada Table berikut :

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		
				Keu		
				Target	Capaian	Capaian
	Subdirektorat Legallsasi Rencana Investasi	6,532,310,000	826,707,500	23.58%	13.30%	13.88%
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500,000,000	33,517,500	22.00%	15.15%	16.00%
2	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1,000,000,000	401,518,000	23.00%	40.15%	41.00%
3	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1,750,000,000	162,520,000	38.00%	9.29%	10.00%
4	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	932,310,000	39,533,000	0.00%	4.24%	5.00%
5	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan	750,000,000	87,251,000	25.00%	11.63%	12.00%

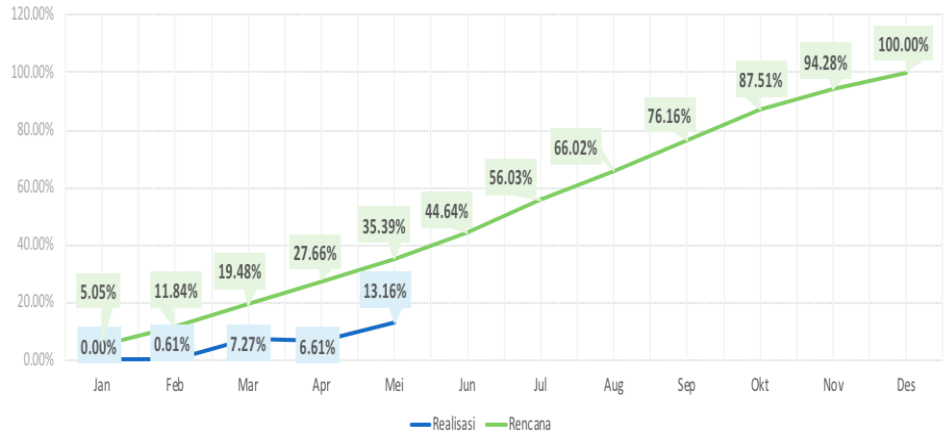
No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		
				Keu		
				Target	Capaian	Capaian
	Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan					
6	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	500,000,000	13,200,000	27.00%	2.64%	3.00%
7	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	600,000,000	0	18.00%	0.00%	0.00%
8	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	500,000,000	89,168,000	21.00%	17.83%	18.00%
	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	3,654,000,000	433,724,000	25.16%	11.87%	12.29%
1	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1,500,000,000	339,492,000	26.00%	22.63%	23.00%
2	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	1,000,000,000	67,232,000	27.00%	6.72%	7.00%
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	854,000,000	27,000,000	23.00%	3.16%	4.00%
4	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	300,000,000	0	21.00%	0.00%	0.00%
	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,500,000,000	566,391,718	29.00%	12.59%	13.22%
1	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	750,000,000	113,599,000	22.00%	15.15%	16.00%
2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	750,000,000	75,406,500	28.00%	10.05%	11.00%
3	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	750,000,000	98,170,300	28.00%	13.09%	14.00%
4	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	750,000,000	155,485,400	20.00%	20.73%	21.00%
5	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat	500,000,000	6,310,000	38.00%	1.26%	2.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		
				Keu		
				Target	Capaian	Capaian
	Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan					
6	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1,000,000,000	117,420,518	38.00%	11.74%	12.00%
	Layanan Perkantoran	3,814,320,000	720,797,000	28.00%	18.90%	19.05%
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1,000,000,000	166,832,000	30.00%	16.68%	17.00%
2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164,320,000	0	32.00%	0.00%	0.00%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,650,000,000	553,965,000	27.00%	20.90%	21.00%
	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	49,121,627,000	1,491,154,000	21.16%	3.04%	3.14%
1	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40,000,000,000	0	21.00%	0.00%	0.00%
2	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5,121,627,000	1,000,000,000	21.00%	19.53%	20.00%
3	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	4,000,000,000	491,154,000	23.00%	12.28%	13.00%
	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	3,500,000,000	760,443,391	32.29%	21.73%	22.00%
1	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	3,500,000,000	760,443,391	32.29%	21.73%	22.00%
	Total	71,122,257,000	4,799,217,609	23.00%	6.75%	7.02%

Tabel. Realisasi Anggaran Pada April TA. 2021
(*e-monitoring* akses 4 Mei 2021)

MEI 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada Bulan Mei 2021 dilihat dari *e-monitoring* online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan (*e-monitoring* akses 4 Mei 2021)

Kinerja realisasi anggaran sebesar Rp9.361.877.000,00 atau sebesar 13,16% dari pagu anggaran Rp71.122.257.000,00. Terdapat deviasi sebesar 17,43% dari rencana awal dikarenakan terdapat penambahan pagu BP2BT yang bersumber dana dari PHLN menjadi Rp45.121.627.000,00 sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Perumahan memiliki pagu semula Rp36.000.000.630,00 menjadi Rp71.122.257.000,00

Untuk rincian realisasi anggaran pada Bulan Mei 2021 dapat dilihat pada Table berikut :

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		
				Keu		Fisik
				Target	Capaian	Capaian
	Subdirektorat Legallsasi Rencana Investasi	6,532,310,000	1,346,485,000	33.91%	20.82%	21.15%
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500,000,000	76,921,000	28.00%	18.11%	19.00%
2	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1,000,000,000	455,691,000	31.00%	45.57%	46.00%
3	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1,750,000,000	429,569,000	45.00%	24.55%	25.00%
4	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	932,310,000	109,307,000	21.00%	11.72%	12.00%
5	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	750,000,000	156,833,000	36.00%	20.91%	21.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		
				Keu		Fisik
				Target	Capaian	Capaian
6	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	500,000,000	19,800,000	34.00%	3.96%	4.00%
7	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	600,000,000	0	27.00%	0.00%	0.00%
8	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	500,000,000	98,364,000	36.00%	19.67%	20.00%
	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	3,654,000,000	881,090,000	32.44%	24.11%	24.61%
1	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1,500,000,000	696,898,000	33.00%	46.46%	47.00%
2	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	1,000,000,000	151,944,000	35.00%	15.19%	16.00%
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	854,000,000	32,248,000	30.00%	3.78%	4.00%
4	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	300,000,000	0	28.00%	0.00%	0.00%
	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,500,000,000	740,657,000	37.00%	16.46%	17.17%
1	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	750,000,000	135,853,000	28.00%	18.11%	19.00%
2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	750,000,000	93,942,000	38.00%	12.53%	13.00%
3	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	750,000,000	173,930,000	32.00%	23.19%	24.00%
4	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan	750,000,000	165,585,000	38.00%	22.08%	23.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		
				Keu		Fisik
				Target	Capaian	Capaian
	Mikro Perumahan Bagi MBR					
5	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	500,000,000	7,340,000	43.00%	1.47%	2.00%
6	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1,000,000,000	164,007,000	43.00%	16.40%	17.00%
	Layanan Perkantoran	3,814,320,000	966,417,000	37.31%	25.34%	25.67%
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1,000,000,000	281,888,000	40.00%	28.19%	29.00%
2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164,320,000	0	42.00%	0.00%	0.00%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,650,000,000	684,529,000	36.00%	25.83%	26.00%
	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	49,121,627,000	4,339,629,000	28.16%	8.83%	9.46%
1	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40,000,000,000	520,000,000	28.00%	1.30%	2.00%
2	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5,121,627,000	3,127,027,000	28.00%	61.06%	61.06%
3	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	4,000,000,000	692,602,000	30.00%	17.32%	18.00%
	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	3,500,000,000	1,087,599,000	40.89%	31.07%	32.00%
1	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi	3,500,000,000	1,087,599,000	40.89%	31.07%	32.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		
				Keu		Fisik
				Target	Capaian	Capaian
	Bantuan Uang Muka Perumahan					
Total		71,122,257,000	9,361,877,000	30.59%	13.16%	13.78%

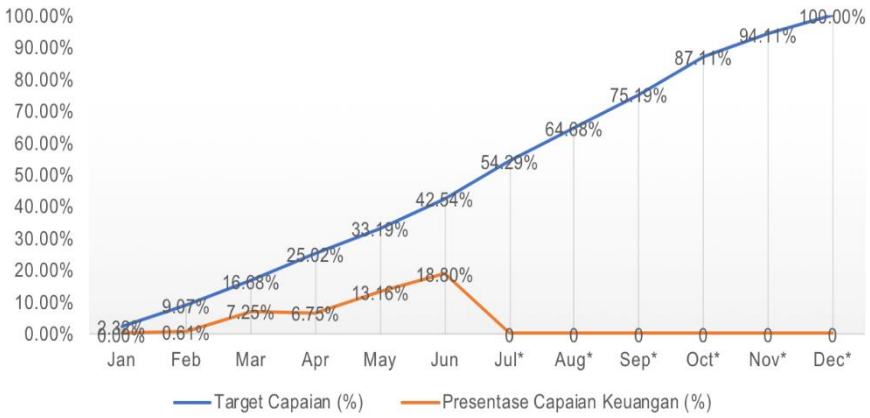
Tabel. Realisasi Anggaran Pada April TA. 2021
(*e-monitoring* akses 31 Mei 2021)

Juni 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada bulan Juni 2021 dilihat dari e-monitoring online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status tanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut:

Kinerja realisasi anggaran sebesar Rp13.370.636.000,00 atau sebesar 18,80% dari pagu anggaran Rp71.122.257.000,00.

Terdapat deviasi sebesar 23,74% dari rencana awal dikarenakan terdapat penambahan pagu BP2BT yang bersumber dana dari PHLN menjadi Rp45.121.627.000,00 sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Perumahan memiliki pagu semula Rp36.000.000.630,00 menjadi Rp71.122.257.000,00.



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan

Rincian realisasi anggaran pada Bulan Juni 2021 dapat dilihat pada Tabel 1. Detail dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	6,532,310,000	1,967,240,000	30.52%	30.82%
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500,000,000	112,955,000	27.88%	28.00%
2	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1,000,000,000	508,737,000	50.87%	51.00%
3	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1,750,000,000	646,520,000	36.94%	37.00%
4	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	932,310,000	203,237,000	21.80%	22.00%
5	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	750,000,000	270,207,000	36.03%	37.00%
6	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	500,000,000	61,720,000	12.34%	13.00%
7	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	600,000,000	15,050,000	2.51%	3.00%
8	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	500,000,000	148,814,000	29.76%	30.00%
	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	3,654,000,000	1,108,261,000	30.33%	30.74%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
1	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1,500,000,000	793,515,000	52.90%	53.00%
2	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	1,000,000,000	190,792,000	19.08%	20.00%
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	854,000,000	123,954,000	14.51%	15.00%
4	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	300,000,000	0	0.00%	0.00%
	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,500,000,000	1,210,000,000	26.89%	27.28%
1	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	750,000,000	209,074,000	27.88%	28.00%
2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	750,000,000	188,759,000	25.17%	26.00%
3	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	750,000,000	209,674,000	27.96%	28.00%
4	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	750,000,000	301,663,000	40.22%	41.00%
5	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	500,000,000	13,862,000	2.77%	3.00%
6	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1,000,000,000	286,968,000	28.70%	29.00%
	Layanan Perkantoran	3,814,320,000	1,404,246,000	36.82%	36.97%
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1,000,000,000	348,313,000	34.83%	35.00%
2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164,320,000	0	0.00%	0.00%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,650,000,000	1,055,933,000	39.85%	40.00%
	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	49,121,627,000	6,178,281,000	12.58%	12.90%
1	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40,000,000,000	1,070,000,000	2.68%	3.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
2	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5,121,627,000	4,089,477,000	79.85%	80.00%
3	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	4,000,000,000	1,018,804,000	25.47%	26.00%
	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	3,500,000,000	1,502,608,000	42.93%	43.00%
1	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	3,500,000,000	1,502,608,000	42.93%	43.00%
	Total	71,122,257,000	13,370,636,000	18.80%	19.14%

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pada Juni TA. 2021

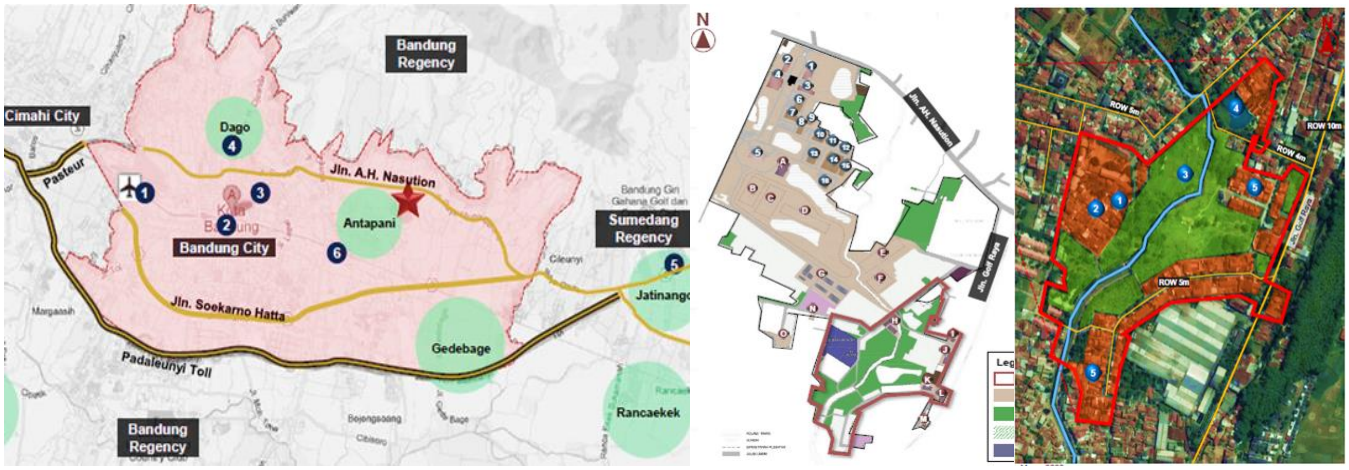
(*e-monitoring* akses 30 Juni 2021)

01 Proyek KPBU Perumahan

Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Pembangunan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung merupakan salah satu upaya pemenuhan backlog perumahan nasional yang masuk ke dalam program penyediaan infrastruktur sektor perumahan dan permukiman, dimana saat ini terdapat permintaan cukup tinggi untuk perumahan dengan harga yang terjangkau. Terdapat sekitar 64,1 juta unit rumah di Indonesia, sekitar 20% di antaranya berada dalam kondisi buruk dan diperkirakan 820.000 hingga 1 juta unit rumah baru dibutuhkan setiap tahun untuk menanggapi permintaan perumahan tahunan dari pertumbuhan populasi, pembentukan rumah tangga baru, dan migrasi ke daerah perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah mengidentifikasi satu bidang tanah yaitu, Komplek Pusjatan. Jl. AH. Nasution Kota Bandung, untuk pengembangan unit perumahan yang terjangkau dengan target pasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini disusun menggunakan skema KPBU dan akan memanfaatkan area komersial, sehingga dapat melakukan subsidi silang bagi harga sewa rendah dan mengurangi beban pada anggaran PJPK.



Gambar Lokasi KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

PROJECT PROFILE

PJPK	:	Kementerian PUPR
Lingkup Proyek	:	Design – Build – Finance – Maintain – Transfer (DBFMT)
Lokasi	:	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung
Bentuk Kerja Sama	:	KPBU *Solicited*
Bentuk Pengembalian Investasi	:	*Availibility Payment* (AP)
Jumlah Tower	:	11 Tower Rusunawa (Rusunawa – 4, Rusunawa Jangka Panjang – 3, Rusunawa Komersial – 4)
Jumlah Unit	:	2.378 Unit

Proyek KPBU Karawang Spuur

Indonesia sedang mengalami urbanisasi yang pesat. Sesuai dengan "Dokumen Penilaian Proyek dari Program Nasional Perumahan Terjangkau IBRD", kota-kota di negara tersebut tumbuh dengan laju 4,1% per tahun antara tahun 2000 hingga tahun 2010, lebih cepat daripada negara-negara Asia lainnya (dibandingkan dengan 3,8 persen di Cina, 3,1 persen di India dan 2,8 persen di Thailand). Pada tahun 2012, penduduk perkotaan mencapai 52% dari total penduduk dan pada tahun 2025, hampir 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. 18 juta dari 21 juta pekerjaan yang diciptakan diantara tahun 2001 dan tahun 2011 berada di daerah perkotaan, menandai pergeseran besar pekerjaan ke kota.

Menurut RPJMN 2020-2024, arah kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a) kawasan industri/KEK; (b) Kawasan pariwisata; (c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; (d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi; (e) keterkaitan desa dan kota; (f) kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga dan 187 lokasi prioritas, termasuk di dalamnya 92 pulau terluar; (g) daerah tertinggal; dan (h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. Program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional. Untuk itu, pemerintah terus berusaha dalam mewujudkan hunian layak bagi MBR yang sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan yaitu pada Kawasan/wilayah prioritas pembangunan nasional, salah satunya di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang didominasi oleh aktivitas sektor industri yang menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktivitas lain sebagai multiplier effect salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dengan dibangunnya Rumah Susun bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dengan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Karawang Regency



Project Site



Proyek KPBU Perumahan Karawang Spuur adalah proyek perumahan rakyat di atas lahan milik Kementerian PUPR seluas 1,9 ha. Lokasi proyek KPBU berada di Jalan Karawang Spuur, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Proyek KPBU Perumahan Karawang Spuur berlokasi di kawasan pengembangan Karawang Transit Oriented Development (TOD). Lahannya terletak di kawasan perkotaan Karawang, beberapa menit dari sekolah, universitas, dan kawasan industri. Selain itu lokasi proyek memiliki aksesibilitas yang tinggi, hanya beberapa menit dari pintu tol Karawang Barat 1, dan halte bus Karaba Indah. Pada proyek ini, direncanakan akan dibangun 2 tower,

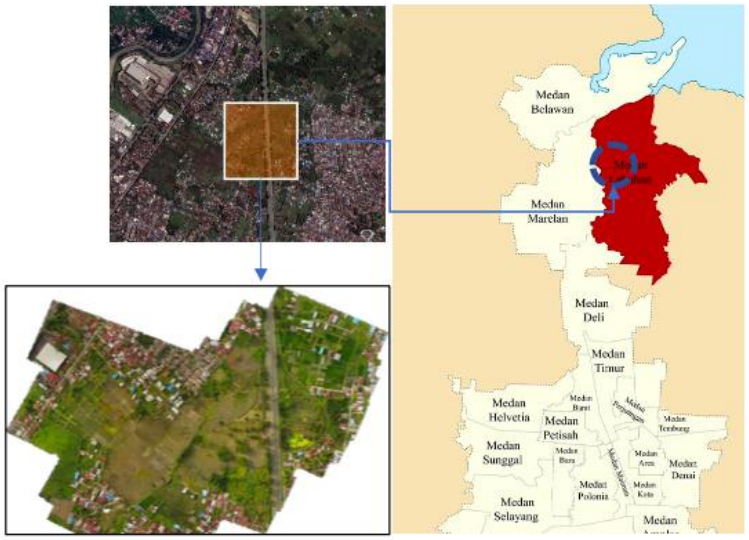
25 lantai, dengan total 1.175 unit hunian dan beberapa keperluan umum, seperti co-working space, green area, komersial, dan fasilitas sosial lainnya.

Ruang lingkup proyek KPBU Karawang Spuur adalah mennggunakan DBFOMT (Desain - Konstruksi - Pembiayaan – Operasi - Pemeliharaan dan Transfer).

Status: OBC

Proyek KPBU Desa Besar Medan

Dalam memenuhi kewajiban pemerintah dalam bidang pembiayaan perumahan, selain melalui bantuan atau kemudahan pembiayaan perumahan untuk MBR yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2017 bahwa proyek bidang perumahan dapat dilakukan dengan menggunakan Skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk di dalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional. Untuk itu, pemerintah terus berusaha dalam mewujudkan hunian layak bagi MBR yang sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan yaitu pada Kawasan/wilayah prioritas pembangunan nasional.



Gambar Lokasi Proyek KPBU Desa Besar Medan

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang didominasi oleh aktifitas sektor industri/jasa. Pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktifitas lain sebagai multiplier effect salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Tentu saja hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dibangunnya Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Proyek KPBU dalam Pendampingan Penyiapan

Selain mengembangkan proyek KPBU diatas lahan BMN PUPR, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga melakukan fasilitasi pendampingan proyek KPBU diantara yaitu Proyek KPBU Daan Mogot, Proyek KPBU Sei Mangkei, dan Proyek KPBU Paldam Siliwangi

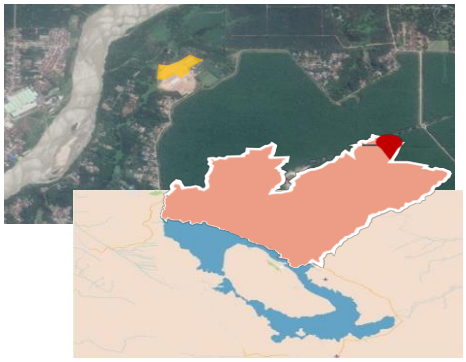
Proyek KPBU Daan Mogot

DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi di Indonesia yang didominasi oleh aktifitas sektor industri/jasa. Pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktifitas lain sebagai *multiplier effect* salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Tentu saja hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dengan dibangunnya Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Proyek KPBU Daan Mogot merupakan proyek yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 47.599 m2 (sesuai peta bidang)

Proyek KPBU Sei Mangkei

Proyek ini dibangun oleh PJPK untuk memenuhi kebutuhan pemukiman bagi pekerja di kawasan Industri KEK Seimangkei



Gambar Lokasi Proyek KPBU Sei Mangkei

Proyek KPBU Paldam Siliwangi

Proyek KPBU Paldam Siliwangi merupakan proyek yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang memiliki luas sebesar 1.1 ha



Gamba wangi

Pelaksanaan Kegiatan KPBU Perumahan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
1	Rapat Pembahasan Revisi CPS dan Konsep Laporan RDS KPBU Karawang Spuur	Senin, 5 April 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Setelah melaksanakan 3-4 kali pembahasan, maka CPS telah dinilai layak dan dapat diterima 2. Hasil RDS perlu disempurnakan terkait data responden, metode penelitian dan analisa perlu lebih dalam dan optimal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini karena analisis dan kelola informasi yang diberikan saat ini masih belum optimal. Beberapa hal yang masih menjadi koreksi dan catatan untuk konsultan adalah sebagai berikut: a. Hasil analisis belum menjawab penting atau tidaknya pelaksanaan proyek KPBU Karawang Spuur, yang mana hal ini merupakan salah satu yang terpenting dalam penyusunan CPS b. Masih diperlukan *breakdown* terkait MBR dengan tarif atas dan tarif bawah, dan antara MBR dan NonMBR. Data ini penting, seharusnya konsultan telah selesai mengidentifikasi dan menguraikan hal tersebut di dalam RDS c. Penyelesaian CPS dan RDS ini dikatakan terlambat/tidak sesuai dengan rencana kerja	Penyempurnaan hasil RDS sesuai masukan Tim Teknis oleh Konsultan
2	Rapat Persiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Perumahan Tahun 2021	Rabu, 7 April 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	Persamaan substansi dan ekspektasi terhadap muatan SP yang akan disusun oleh Konsultan. Diharapkan dapat menjadi satu langkah percepatan dalam rangka penyiapan proyek yang menjadi *concern* saat ini yaitu TOD, maupun IKN yang nantinya akan bersifat insidentil dan arahan oleh para pimpinan untuk menyiapkan. Hasil dari SP ini nantinya dapat menjadi stok proyek-proyek KPBU potensial yang sekiranya dapat disiapkan.	*Kick off meeting*, DJPI melalui Dit. PPP mulai *launching* mencari potensi KPBU lain, dengan berfokus kepada kawasan TOD. Target: Proses identifikasi sudah selesai April 2021.
3	Rapat Pembahasan Kemajuan OBC KPBU Rusun Desa Besar Medan	Kamis, 8 April 2021	1. OBC diperkirakan akan rampung pada bulan Mei 2021 dan lanjut ke tahap persiapan FBC, RFP, RFG, PPP, dan *Market Sounding* 2. Tahap konstruksi direncanakan mulai pada 1 Juli 2022 dengan periode konstruksi 36 bulan dan konstruksi	1. Proses untuk kelengkapan dokumen OBC, fokus ke opsi yang paling maksimum dari segi *cost* yaitu opsi 1 Jika pada akhirnya opsi yang akan digunakan adalah opsi 2 maka akan lebih mudah untuk

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
		Video Conference via Zoom Meeting	direncanakan akan mulai pada Bulan Juli 2022 selama 36 bulan dan masa konsesi selama 23 tahun 3. Optimasi desain terupdate adalah 2156 unit, 9 Tower dengan susuan Rusunawa MBR tipe 27 & 36, Rusunawa menengah tipe 27 & 36 dan Rusunawa mewah/apartemen tipe 36. 4. Secara *legal assesment*, terdapat tiga opsi skema pembiayaan KPBU: a. *User Changes Model* b. *Availability Payment* (AP): pembayaran ketersediaan berdasarkan standar kinerja. Pemerintah harus menjamin perolehan pendapatan c. *Viability Gap Fund* (VGF): di mana proyek dengan kelayakan finansial rendah memberikan hibah (atau dukungan keuangan lainnya dari pemerintah) hingga persentase yang ditentukan dari biaya proyek, sehingga layak secara finansial sebagai PPP.	mengurangi dari *financial model* yang sudah ada.
4	Rapat Pembahasan Persiapan Konsultasi Publik KPDBU Rusun Daan Mogot	Jumat, 9 April 2021 Hotel Mercure Jakarta Sabang dan *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Pelaksanaan konsultasi publik direncanakan akan dibagi kepada 2 (dua) tahap. Peserta pada tahap pertama konsultasi publik adalah stakeholders bidang perumahan. Sedangkan peserta tahap kedua konsultasi publik adalah tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan perangkat administrasi Jakarta Barat, serta BUMN/BUMD 2. Jadwal pelaksanaan Konsultasi Publik belum ditentukan oleh Pemprov DKI, namun mekanisme pelaksanaan konsultasi publik direncanakan akan dilakukan melalui *Zoom Meeting* 3. Berkaitan dengan adanya kontradiksi antara UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, isu permasalahan telah sampai pada tahap penyampaian kepada Menko, saat ini Kementerian PUPR tengah menunggu jawaban atas hal tersebut 4. Studi Pendahuluan merupakan dasar untuk pelaksanaan konsultasi publik yang mana pada SP teridentifikasinya *stakeholders* terkait yang benar-benar sesuai dengan konteks KPBU Daan Mogot. Konsultasi publik merupakan suatu agenda dimana diharapkan dapat menjaring masukan	Dit. PPP akan mendampingi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyiapan proyek KPDBU Daan mogot

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			sebanyak-banyaknya demi kemajuan Proyek KPDBU Daan Mogot 5. Kementerian PUPR melalui DJPI melakukan fungsi pendampingan dan membantu penyiapan dalam konsultasi publik. 6. Dengan adanya data kebutuhan hunian di Provinsi DKI Jakarta, diharapkan proyek KPDBU ini dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari PJPK	
5	Rapat Pembahasan Hasil Reviu OBC (*Outline Business Case*) Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	13 April 2021 Hotel Grantage BSD dan melalui *Teleconference* via Zoom	1. Secara keseluruhan hasil reviu Dokumen *Outline Business Case* (OBC) mendapat nilai 94,6% 2. Nilai reviu Kajian Risiko sebesar 85%, perlu menambahkan kajian risiko yang berdampak signifikan terhadap proyek karena analisa yang ada masih bersifat umum 3. Terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya yaitu penetuan BLU, pelimpahan kewenangan PJPK pada unit organisasi terkait, konfirmasi dengan *stakeholder* terkait penggunaan dan pemanfaatan tanag, diperlukan beberapa peraturan pendukung seperti status penggunaan dari bangunan rumah susun, skema pengembalian HAM, transfer aset tarif sewa dan diperlukan tindak lanjut terkait proses perizinan KSPI. 4. Direktorat Jenderal Perumahan menyarankan supaya biaya pembebasan lahan dibebankan ke dalam biaya investasi proyek . 5. Diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai kajian teknis terkit kondisi lahan, kebutuhan air, listrik, dan kondisi-kondisi lingkungan seperti banjir dan gempa.	1. Memperdalam kajian secara lebih intensif sesuai dengan hasil *Review* OBC; 2. Rapat berikutnya diharapkan setiap pihak yang terkait datang ahdir mewakili, sehingga dapat memahami dan menyiapkan tugas masing-masing sesuai delegasi tugas dari Keputusan Menteri dan juga mengkomunikasikan progres proyek kepada pimpinan masing-masing; 3. Memutuskan skema pembiayaan yang akan digunakan; 4. Tim KPBU dapat memberikan kontribusi perhitungan ulang kesesuaian nilai investasi mengingat adanya biaya lain yang belum diperhitungkan dalam biaya investasi seperti kemungkinan rekayasa teknis, dll.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
6	Peninjauan Lokasi Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	15 April 2021 Hotel Nexa Mercure Supratman dan melalui *Teleconference* via Zoom	1. Kemenko Bidang Perekonomian tengah menyusun revisi kebijakan terkait percepatan pembangunan KPBU yaitu revisi Perpes No 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur. 2. Adapun dasar revisi kebijakan tersebut merupakan usulan dari Kementerian Perhubungan melalui surat No. KL.002/1/2 PHB 2020 yang disampaikan pada tanggal 19 Mei 2020 dengan perihal Usulan Simplifikasi Proses Pelaksanaan KPBU di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan dari Kementerian PUPR yang disampaikan kepada Kemenko Perekonomian melalui Surat dengan nomor No. HK.02.02-Mn/1036 yang disampaikan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan perihal Usulan Simplifikasi Proses di Kementerian PUPR. 3. Adanya kebutuhan penyediaan infrastuktur yang tinggi dan lambatnya progress pelaksanaan KPBU, maka diperlukan percepatan pelaksanakan KPBU melalui simplifikasi proses KPBU. 4. Poin usulan dari kementerian PUPR yaitu: a. Penggabungan Proses Pembuatan kajian pada tahap perencanaan dan Persiapan b. Penggabungan tahap Prakualifikasi dengan dokumen penawaran c. Kombinasi dengan AP dan VGF, serta pengembangan skema - skema inovatif lainnya d. Upaya peningkatan Modal dari Luar Negeri melalui PII sebagai penjamin Nilai tukar. 5. Adanya peraturan Presiden No 42 tahun 2021 tentang kemudahan PSN fasilitas PDF diberikan untuk meningkatkan efektifitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU menjadi bentuk dukungan Kemenko Perekonomian dalam membantu proses percepatan pelaksanaan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Bina Harapan Cisaranten kota Bandung.	Terdapat kebijakan percepatan simplifikasi proses pelaksanaan proyek KPBU, diharapkan setiap Unit Organisasi fokus pada percepatan ini di masing - masing tugas dan fungsi; kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sangat mendukung Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung. Oleh karena itu, Kementerian PUPR perlu bersurat kepada Kemenko Perekonomian agar proyek KPBU Cisaranten dapat diusulkan dalam Proyek Strategis Nasional

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
7	Rapat Pembahasan Laporan RDS KPBU Rusun Desa Besar Medan	Jumat,16 April 2021 *Video Conference* via Zoom Meeting	1. Hasil dari RDS ini membutuhkan Konsultan untuk menghitung ulang *Capex Cost* dan hal tersebut membutuhkan waktu untuk dilakukan karena sudah berubah menjadi ide yang berbeda. Ketiga opsi desain melebihi apa yang dibutuhkan. Tentu, jumlah yang lebih rendah akan lebih baik, dan mungkin kita hanya butuh 5 tower kedepannya; dan 2. Opsi 2 (1.800 unit) dapat menjadi pilihan. Yang mana jika ingin membangun di kedua sisi untuk 10 tahun ke depan bisa menjadi bahan pertimbangan. Sekarang diketahui bahwa unit yang akan dikembangkan adalah kurang lebih 1000an unit.	1. Revisi dari t*echnical assessment* akan dilaksanakan pada hari Selasa, 20 April 2021; 2. Pada hari Kamis, 22 April 2021 akan ada misi bersama World bank; dan Jumat, 23 April 2021 PT. Amythas dapat melaksanakan rapat internal. Diharapkan OBC rampung di pekan berikutnya.
8	Rapat Lanjutan Pembahasan Hasil RDS KPDBU Daan Mogot	Selasa, 20 April 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Terdapat 5 (lima) hal yang dilaporkan dalam rapat ini, yaitu: survei pasar (rusun, apartemen, dan rumah tapak), survei kuantitatif, survei kualitatif, area komersial, dan kemajuan pekerjaan dan rencana penyelesaian. a. Survei pasar dilihat dari beberapa rusunawa di Jakarta, rumah tapak sewa atau milik termasuk kos-kosan, dan apartemen Jakarta Barat dan sekitarnya. b. Survei Kuantitatif dilaksanakan dengan penyebaran kuisioner *online* dan *offline* kepada 500 responden, yang terdiri atas 228 responden *offline*, dan 272 responden *online*. c. Survei Kualitatif dilakukan dengan cara wawancara dan FGD. d. Area komersial yang teridentifikasi adalah perkantoran dan pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. e. Kemajuan pekerjaan saat ini telah disusun laporan progres secara simultan oleh konsultan dan selanjutnya akan dilaporkan laporan final RDS. 2. Hasil analisis perlu disederhanakan menjadi hal yang bersifat demografis; dan Implikasi hasil RDS terhadap OBC belum terlihat sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap implikasi ini.	Masih diperlukan penyempurnaan hasil RDS dalam rangka OBC Proyek KPDBU Daan Mogot, dan selanjutnya akan disampaikan Laporan Final RDS

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
9	Rapat Pembahasan Revisi *Technical Assesment* KPBU Rusun Desa Besar Medan	Selasa, 20 April 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Berdasarkan hasil RDS yang telah disampaikan, hasilnya akan sangat mempengaruhi desain yang telah dirancang. Hal ini mengakibatkan butuhnya penyesuaian. Opsi desain yang dinilai paling mendekati adalah opsi desain ke-2. Hal yang perlu disesuaikan adalah konfigurasi unit terhadap *demand* yang telah dianalisis pada RDS dan direkomendasikan oleh JLL. Sebaiknya pembangunan dibagi menjadi 2 (dua) tahap pengembangan. Penentuan tahapan ini perlu dipikirkan sesuai kebutuhan dari *demand* saat ini; 2. Telah disepakati bahwa luasan unit 1BR adalah 27 m^2; 3. Yang menjadi concern adalah menghitung ulang berapa jumlah unit sebenarnya yang bisa kita sediakan dan penetapan fasilitas apa saja yang akan dikembangkan; 4. Harga konstruksi rumah susun sekitar 7jt-an per m^2 dan 9jt-an per m^2 untuk apartemen. Rusunawa mempunyai standar spesifikasi khusus, sedangkan apartemen dapat menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi; dan Diperlukan hitungan terbaru Capex dan Opex untuk OBC KPBU Rusun Desa Besar Medan.	Pihak PT. Amythas akan melakukan kalkulasi ulang terhadap jumlah unit aktual yang dapat di *provide* rusun dan apartemen. Perkiraan Capex dan Opex juga akan di *adjust* kembali untuk nanti akan dipresentasikan ke pihak World Bank.
10	Rapat Penyiapan Tapak Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan	Rabu, 21 April 2021 Hotel Royal Padjajaran Bogor dan *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Mekanisme perizinan dilakukan oleh badan usaha kemudian akan diverifikasi oleh Ditjen KA selama 30 hari. Apabila dokumen diterima maka akan diterbitkan izin perpotongan dan persinggungan yang mana pemegang izin akan memenuhi kewajiban persyaratan dalam peraturan. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasi ke direktorat prasarana; 2. Untuk sementara KA arah Medan-Belawan ini belum ada rencana pengembangan, tetapi bila dimungkinkan pada saat mengajukan perpotongan disiapkan untuk *double track* jadi bila nanti ada pengembangan DJKA tidak kesulitan dalam hal pengembangan kapasitas; 3. Terkait perlintasan disarankan *flyover*. Nanti perizinan pembangunan *flyover* KA dan *crossing* terpadu bisa dijadikan satu; 4. Terdapat jalur pipa pertagas di dalam lokasi proyek berupa pipa transmisi. Lokasi pipa berada di Jl. Ruminja dan segaris dengan jalan tol jadi tidak akan terganggu bila dibangun rusun di lokasi proyek;	1. DJPI akan berkoordinasi dgn Ditjen Bina Marga terkait berapa lahan yg betul-betul *idle* (lahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan) untuk dikembalikan dan bisa dikembangkan untuk proyek rusun; 2. Untuk masalah persinggungan rel KA, akan bersurat dengan DJKA terkait perizinan serta terkait struktur *flyover/underpass* yg sudah dirancang oleh tim konsultan sehingga bisa dilihat apakah rancangan desain tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada; 3. Tim BBWS akan berkoordinasi lebih lanjut untuk memberikan peta genangan banjir Kota Medan yang lebih detail ke tim Konsultan; dan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			5. Terkait dengan pipa PGN, lokasi pipa PGN tersebut agak jauh dari lokasi rusun. Untuk berkoordinasi bisa menghubungi *area head* Medan; 6. Dilihat dari aspek kegempaan, lokasi rusun Desa Besar Medan relatif aman dari gempa dan memiliki potensi tsunami yang kecil karena wilayahnya cukup jauh dari jalur sumber gempa sesar aktif dan sumber gempa megathrust Sumatera; 7. Frekuensi tingkat bahaya banjir di lokasi proyek masuk ke tingkat rendah; dan Lokasi proyek KPBU Desa Besar Medan berada di antara Sungai Deli dan Sungai Kera dimana Sungai Kera berfungsi sebagai	Terkait dengan bangunan liar, bisa berkoordinasi dengan BTP karena secara legal, bangunan-bangunan liar tersebut berada di tanah PT KAI atau Balai Teknik.
11	Rapat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan NAHP-PPP	Kamis, 22 April 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Berdasarkan hasil RDS KPBU Rusun Desa Besar, d*emand* tergolong rendah untuk Rusunawa dan Apartemen. Dari survei jumlah kamar yang cocok untuk pasar adalah 2BR. Terdiri dari 1020 unit (kombinasi MBR dan non-MBR). Berdasarkan jumlah tersebut, 3.828 orang terlayani; 2. Meski hasil RDS Daan Mogot berbeda dengan Medan. Namun, melihat tingginya kompentisi *property agent* di Jakarta perlu adanya *marketing agent* dan survei yang menyasar pada *property agent* (*developer/investor/marketing agent).* RDS di DKI Jakarta harus memperhatikan *price positioning*; 3. Lokasi proyek KPBDU Daan Mogot tergolong strategis, memiliki askes ke pusat kegiatan dan pemenuhan kebutuhan utama. Penyediaan air bersih masih menjadi persoalan. Dari 500 jawaban kuesioner menunjukan kebutuhan hunian terjangkau sangat besar. Minat akan kebutuhan hunian terjangkau di Jakarta Barat juga sangat besar; 4. *Financial Analysis* untuk Medan: Opsi pendapatan dari *free cash flow user charge model*, tahun 1 sampai 9 *cashflow* masih negatif, tahun ke-10 baru positif. Hasi dari *financial model analysis* 4 model *user charge*, VGF, AP and *hybrid model*. Hasilnya, project return untuk *user charge* negatif (dibawah ambang batas), untuk VGF IRR negatif, sementara untuk AP indicator DSCR dan IRR positif; 5. *Financial assessment*: untuk DKI Jakarta:	1. Penyusunan timeline sehingga setelah bulan Juni tetap akan ada yang melanjutkan untuk tahap pengajuan PDF Akan dilakukan diskusi terpisah yang membahas lebih rinci terkait masing-masing proyek.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			● *user charge*: IRR 2,3 untuk sewa jangka pendek and 2,1 untuk sewa jangka panjang (LTL). *Equity* IRR -0,2 untuk sewa and -0,8 untuk LTL. ● VGF: 1,3 untuk sewa jangka pendek dan 0,3 untuk LTL, dengan *equity* IRR 7,0 sewa dan 10,4 LTL. AP: IRR 12.8 untuk sewa dan *equity* IRR 12.6. DSCR rata-rata 2.9 dengan Rp 2,4 T dibayar pemerintah secara berkala selama 20 tahun.	
12	Rapat Persiapan *screening* dan Penyusunan SP KPBU Rusun TOD	Jumat, 23 April 2021 Qubika Boutique Hotel dan *Video Conference via Zoom Meeting*	1. *Timeline* rencana kerja dimulai dari April - November. Dimana penyusunan SP dimulai di bulan Mei - Juni, dan penyusunan DPP akan dilakukan di bulan Juli; 2. Rencana proyek yang sudah diidentifikasi terdiri dari (1) Rusun TOD – perpanjangan MRT; (2) TOD angkutan umum massal; (3) TOD Mamminasata - KA; (4) TOD Mamminasata – Jalan tol; 3. Data sementara untuk Analisa awal proyek untuk TOD Lebak Bulus - Rawa Buntu, Depok-Parung dari sisi potensi pengembalian investasi lebih tinggi dengan skema pengembalian biaya sewa (*user charge*) drpada AP. Sementara untuk Mamminasata - KA dan Mamminasata - Jalan tol nilainya sama antara AP dengan *user charge*; 4. Perencanaan lokasi potensi Kawasan TOD di jabodetabek untuk MRT akan dikembangkan (1) Lebak Bulus-Rawa Buntu, (2) North-south phase 2, (3) East-west: Cikarang-Balaraja, (4) Fatmawati-Taman Mini; 5. Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian Pulau Sulawesi, khusus untuk Mamminasata itu pengembangan jaringan layananan KA regional serta pengembangan KA Bandara Hasanudin; 6. Terkait dengan Jalan tol, Pelaksananaan DED dan konstruksi oleh BUJT ditargetkan Januari 2022-2024. Namun saat ini sedang ada isu yang dihadapi yaitu terkait biaya pengadaan tanah karena ada keterbatasan biaya maka pengadaan BUP diusulkan ditunda dan ada isu bahwa proyek jalan tol ini dikeluarkan dari PSN; dan	1. Dari titik-titik lokasi pengembangan TOD tersebut untuk dilihat apakah isu-isu yang ada serta bagaimana status lahannya; 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan data agar bisa mendukung penyiapan KPBU Rusun TOD; dan Rapat lanjutan nanti akan dipisahkan fokusnya, untuk yang Jabodetabek sendiri dan untuk fokus ke Sulawesi Selatan sendiri

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			Untuk dikembangkan sebagai kawasan TOD-jalan tol, yang paling potensial adalah Maros karena kawasan itu dekat dengan Bandara Hasanuddin.	
13	Rapat Usulan Fasilitas PSN untuk Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	27 April 2021 secara *offline* di Qubika Boutique Hotel dan secara *online* melalui *video conference*	1. Proyek ini sejalan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra PUPR untuk mewujudkan program 1 juta perumahan vertikal khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terutama dampak proyek ini terhadap perekonomian seperti tenaga kerja yang terserap sehingga proyek ini diusulkan sebagai PSN. 2. Pada tanggal 27 April 2021 terdapat konsultasi publik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai perubahan peraturan LKPP No 29 tahun 2018 dan peraturan Kepala LKPP No 19 tahun 2019 mengenai usulan percepatan pelaksanaan proyek KPBU dengan adanya perubahan di pasal 44 yakni disederhanakannya proses prakualifikasi *Request for Proposal* (RFP) dan *Request for Qualification* (RFQ) yang dipindahkan dalam lampiran. Terkait hal ini terdapat masukan diperlukannya koordinasi dengan PT Penjaminan Investasi Indonesia (PT PII). 3. Masukan dan tanggapan dari Kementerian Perekonomian terkait isu pengajuan KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung sebagai proyek PSN adalah a. Rencana aksi dinilai masih terlalu general, diperlukan rencana aksi yang lebih jelas dan jadwal yang jelas mengenai pelaksanaan proyek. b. Proyek yang diajukan sebagai PSN dinilai berdasarkan sisi kualitas, urgensi, kesiapan proyek dan dapat diselesaikan di 2024 tanpa meninggalkan proyek mangkrak. Serta diusulkan secepatnya tidak perlu menunggu bersama proyek lain.	1. Dalam mengusulkan proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung sebagai PSN perlu menyampaikan rincian urgensi, dan percepatan-percepatan yang dapat dihasilkan. Adapun urgensi proyek ini adalah: a. Proyek ini sesuai dengan RPJMN satu juta hunian vertikal bagi MBR b. Proyek KPBU pertama sebagai bentuk lain dari inovasi pendanaan bagi penyediaan hunian yang selama ini bergantung pada APBN. c. *Multiplier effect* sektor perumahan dapat menyerap banyak tenaga kerja 2. Akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan PT. PII terkait timeline akibat adanya perubahan peraturan LKPP No 29 tahun 2018 dan peraturan Kepala LKPP No 19 tahun 2019 mengenai usulan percepatan pelaksanaan proyek KPBU dengan adanya perubahan di pasal 44 tentang penyederhanaan proses KPBU (RFP dan RFQ).

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			4. Tidak terdapat format tertentu dalam pengajuan format usulan PSN	
14	Rapat Pembahasan SK Tim KPBU Rumah Susun Sewa Karawang Spuur, Kabupaten Karawang	Rabu, 28 April 2021 Melalui *video conference*	1. Pengecekan redaksional dari Tim Legal, BHKP dan usulan Direktur PPP; dan 2. Perubahan anggota tim sesuai usulan Ditjen Perumahan dan Ditjen Bina Marga	Paraf lembar kendali
15	Rapat Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Rumah Susun Negara di IKN	Rabu, 28 April 2021 Melalui *video conference*	1. Menindaklanjuti rapat-rapat sebelumnya mengenai persiapan-persiapan SP Rusun IKN; 2. Sampai saat ini keputusan dengan skema KPBU *Solicited*. DJPI akan menginisiasi SP; 3. Terdapat beberapa data yang dibutuhkan seperti: a. Jumlah ASN/TNI/POLRI yang akan pindah beserta segmentasi b. Jumlah KK yang ikut pindah selain yang disebut, rencana/tahapan pemindahan c. Desain/rancangan IKN yang akan dilaksanakan d. Isu terkait penyediaan perumahan IKN, serta kondisi *site* 4. Isu yang dihadapi terkait penyediaan perumahan IKN yaitu: a. Tipe rumah b. Cara penghunian (sewa/milik) c. Jenis rumah (Rusun umum/negara) d. Status lahan yang dikerjasamakan e. Akses menuju lokasi f. Integrasi antar sektor (SPAM, jalan, IPAL, dll) 5. Meski tanah IKN berstatus BMN, tetap perlu mengajukan permohonan hak pengelolan ke Menteri Agraria sesuai Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Thn. 1999 Tentang Tata Cata	Sektor-sektor dan lingkup yang akan ditawarkan kepada investor masih menjadi diskusi (apakah perumahan saja atau satu kawasan utuh). Untuk itu akan diadakan *serial discussion* untuk ke depannya bersama sektor-sektor lain. Jika proyek perumahan untuk aparat negara ini ingin berjalan *on time* maka harus ada koordinasi antar semua sektor. Direktorat PPP sendiri memiliki target pembuatan SP yang diharapkan *in line* dengan prinsip desain dari Direktorat Rumah Susun yang pengerjaannya dilakukan secara paralel.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hal Pengelolaan; 6. Karena status lahan IKN adalah Hutan Tanaman Industri (HTI), Badan Usaha harus mengusahakan izin hutan tersebut dengan KLHK berupa penyesuaian rencana/tata ruang; 7. Direktorat Rumah Susun sedang melelangkan *basic design*, bila sudah lelang diharapkan dapat langsung melanjutkan ke *design & build*; 8. Kebutuhan pembangunan hunian di 2022 mencapai Rp 222 T. Proyek perumahan IKN akan ditawarkan ke Badan Usaha berbentuk paket-paket yang akan di KPBUkan hingga tahun 2024 (mengacu ke gambar dokumentasi); 9. Perihal pengembalian investasi masih haris di*fix*kan, bila *user-charge* untuk ribuan ASN diperkirakan tidak akan lolos dari segi pembiayaan; dan 10. Untuk sektor pembiayaan perumahan, jalan dan jembatan progress sudah terlihat. Namun sektor permukiman yang sekarang menjadi *concern.*	
16	Rapat Lanjutan Penyiapan Proyek KPDBU Daan Mogot	Kamis, 29 April 2021 Melalui *video conference*	1. Berdasarkan hasil survey sementara saat ini, terdapat 191 ribu usia produktif yang menyewa hunian di sekitar lokasi KPDBU Daan Mogot; 2. Kesimpulan sementara dari survey yang dilakukan adalah lokasi proyek KPDBU dianggap strategis, kendala penyediaan air bersih dan kebutuhan hunian terjangkau di Jakarta Barat masih sangat besar; 3. Dari segmentasi sampel survei, Mayoritas meminati 36m^2 *non fully furnished*; 4. Dari hasil survei sementara, masih ada beberapa data yang belum tergambarkan dengan baik dan perlu dianalisis lebih jauh lagi, seperti; permasalahan *demand housing* yang perlu diselesaikan oleh proyek ini, area komersial seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan di sekitar, resiko ketidakhunian; 5. Jumlah responden tidak merata dan sedikit, sehingga kurang dapat meng-*capture demand* yang ada; 6. Belum adanya analisis terkait faktor *pricing* dan spesifikasi terhadap *demand* hunian di Jakarta Barat; dan	1. Rapat Pembahasan mengenai Desain dengan pertimbangan aspek lingkungan dan sosial di minggu pertama bulan Mei; dan 2. Rapat Pembahasan *Financial Modelling* Daan Mogot di minggu pertama bulan Mei

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			7. Perlu adanya kajian terkait penggunaan SKBG pada lahan BMD.	
17	Rapat Koordinasi Pembahasan Opsi Pengadaan Lahan Kandang Sapi dan Opsi Pemilihan Skema Pengembalian Investasi dalam Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	30 April 2021 The Grantage Hotel, Tanggerang dan *video conference*	1. Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung merupakan proyek yang akan dilaksanakan di atas tanah BMN Kementerian PUPR seluas ±5Ha di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung. Dari ±5Ha lahan sebagian besar lahan kosong, namun ada lahan yang digunakan sebagai kandang sapi sebesar 4.360M^2 dengan alas hak milik adat atas nama Doyot Hidayat yang kemudian dihibahkan kepada Hilman Charda dengan akta hibah. 2. Urgensi untuk melakukan pengadaan lahan yang digunakan sebagai kandang sapi tersebut karena lahan tersebut berada ditengah-tengah lokasi perencanaan proyek dan sebagai syarat untuk mengajukan proses KSPI, sebab untuk mengajukan proses KSPI ke Kementerian Keuangan salah satu syaratnya lahan proyek sudah *clean and clear.* 3. Terkait status (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam di FBC. Hal ini karena jangka waktu SKBG 30 tahun dan belum terdapat regulasi yang memadai. 4. Usulan opsi untuk pengadaan lahan kandang sapi saat ini ada tiga opsi yaitu: a. Sesuai Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka ada 2 opsi: 1. Lahan kandang sapi dibebaskan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Perumahan dengan dana APBN	1. Opsi pemilihan skema pengembalian investasi mengerucut pada skema *availibility payment,* karena merupakan skema paling menarik bagi investor dan skema lainnya belum mempunyai dasar regulasi. 2. Berdasarkan hasil perhitungan nilai opsi pengadaan lahan kandang sapi seluas 4360M^2 opsi pendanaan menggunakan AP lebih murah dibandingkan dengan Rp 48 Milyar dibandingkan opsi menggunakan pendanaan dari badan usaha sekitar 139 milyar. 3. Diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam di FBC terkait status (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			lalu setelah sudah dibebaskan kemudian diajukan untuk proses permohonan KSPI ke Kementerian Keuangan. 2. Proses permohonan KSPI diajukan terlebih dahulu dan pembebasan lahan kandang sapi dilakukan secara paralalel oleh Direktorat Jenderal Perumahan. b. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden No 71 tahun 2012 pasal 117A bahwa pendanaan tanah dapat bersumber dari Badan Usaha dan pembayaran dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.	
18	Rapat Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q1 TA.2021 Direktorat Pelakasanaan Pembiayaan Perumahan	3 Mei 2021 Hotel Aviary Bintaro dan secara *Telconference*	1. Kegiatan evaluasi capaian kinerja Q1 Tahun Anggaran 2021 dilakukan tidak hanya oleh Sub Direktorat yang berada di lingkup Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan saja, tetapi juga oleh mitra kerja Direktorat seperti PPDPP, PT. SMF, dan BP Tapera. 2. Pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan semula Rp36.000.630.000 menjadi Rp71.122.257.000 hal ini dikarenakan adanya penambahan dana PHLN untuk BP2BT sebesar Rp 35.121.627.000. Realisasi penyerapan per 28 April 2021 sebesar Rp 4.799.219.000 atau 6,75%. Sebagai pemilik pagu anggaran terbesar di lingkup DJPI, diharapkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dapat menjadi pengungkit penyerapan anggaran di tingkat Eselon I. 3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan perlu meningkatkan koordinasi dengan para mitra kerja, seperti halnya dengan Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) untuk membahas kapasitas fiskal DJP berkaitan dengan skema pembiayaan Proyek KPBU Perumahan, dan Strategi pencapaian target 1 juta rumah sesuai RPJMN;	1. Peningkatan koordinasi dengan Bank Penyalur terkait rendahnya realisasi penyerapan SSB. 2. Proses pencairan anggaran TA 2021 sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Satker. 3. Evaluasi capaian kinerja sebagai kegiatan rutin, karena hal ini dapat dijadikan *early warning* dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, sekaligus sebagai bukti dukung dalam pelaksanaan SAKIP.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan harus mengupload Laporan Bulanan lebih tepat waktu, karena hal ini merupakan bagian dari dokumen terkait SAKIP yang tertera di dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. 5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan harus menyiapkan manajemen risiko pada setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, sehingga dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi. Terutama persiapan apabila ada pemeriksaan oleh BPK terkait dengan Proyek KPBU.	
19	Rapat Pembahasan Analisis Teknis dan Analisa Lingkungan-Sosial KPDBU Rusun Daan Mogot	Selasa, 4 Mei 2021 melalui *video conference*	1. Terdapat 6 opsi desain yang disampaikan oleh tim arsitek, belum diputuskan mana yang akan dipakai; 2. Terkait RDS, tim perencana sudah menyusun konfigurasi jumlah lantai dan bangunan dengan perbandingan sebagai berikut: rusun apartemen 26%, umum 24%, subsidi 50%. Subsidi sesuai amanah UU 1 2011 dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang hunian berimbang; 3. Secara prinsip tidak ada *illegal settlement dan displacement*, tidak ada warga terdampak sehingga tidak perlu dilakukan relokasi; 4. Isu sosial yang harus cepat ditanggapi adalah terdapat 26 ilegal urban farming yang harus ditangani. Telah dilakukan identifikasi. Relokasi dan pembongkaran menunggu jadwal pembangunan fisik. Opsi penanganan menjadi pekerja bangunan/konstruksi; dan 5. Terdapat potensi konflik sosial akibat bertambahnya kepadatan penduduk lokasi: masyarakat local vs penghuni rusun, antar penghuni rusun MBR vs penghuni apartment, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Penanganan bisa berupa pemagaran lokasi, Kerjasama pengelolaan administrasi kependudukan dengan pihak kelurahan.	1. Akan ditentukan oleh tim mengenai desain yang akan digunakan; 2. Melakukan penanganan isu sosial dengan melibatkan warga sekitar menjadi pekerja bangunan atau sekuriti; dan 3. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan setempat pengelolaan administrasi kependudukan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
20	Rapat Pembahasan RDS *Report* KPBU Desa Besar Medan	Rabu, 5 Mei 2021 Melalui *video conference*	1. Hasil survei menunjukkan bahwa di Kota Medan saat ini tidak ada rusunami dengan perjanjian sewa jangka panjang (*long term lease*) oleh sebab itu proyek KPBU Desa Besar Medan ini nanti menjadi yang pertama dalam mengenalkan *long term lease apartment* di pasaran; 2. Untuk rusunawa saat ini yang tersedia hanya tipe studio dan/atau tipe 1BR sementara hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai tipe 2BR. Oleh sebab itu konsultan mengusulkan untuk membangun rusunawa dengan komposisi mayoritas 2BR dengan luas 28-32m^2; 3. Terkait dengan biaya sewa, untuk *low-rate* rusunawa direkomendasikan berada di kisaran Rp110.000-350.000/unit sementara untuk *high-rate* rusunawa di kisaran harga Rp140.000-420.000/unit; 4. Setelah mempertimbangkan hasil data yang disajikan oleh tim, maka lebih baik untuk mengembangkan skenario 2: Jika ternyata pasar tidak berminat atas rusunami dan *commercial apartment* (sewa bulanan) pada fase 1 maka pada fase 2 yang akan dikembangkan adalah rusun MBR; dan *Timeline* untuk pembangunan rusun di fase 1 semua di 2023 dengan asumsi konstruksi selesai dalam 1 tahun.	1. DJPI akan memberikan data untuk melihat potensi market Perumnas di Medan karena sejauh ini saingan rusunami hanya rumah tapak yang dikembangkan Perumnas; 2. Mengkaji tipe rusunawa yang akan dikembangkan untuk mengakomodir *demand* dari rusunami (*high rise/low rise*); 3. Dikhawatirkan data-data yang disajikan tidak menggambarkan kondisi *market demand* sesungguhnya oleh sebab itu konsultan akan mereviu kembali data sets yang mereka gunakan; 4. Konsultan akan menghitung desain yang efisien dan efektif berdasarkan hasil RDS terakhir; dan Setelah lebaran akan dilakukan konsinyasi untuk mendiskusikan opsi untuk desain sebagai lanjutan dari rapat ini.
21	Rapat Identifikasi Isu Dalam Penyediaan Sarusun dengan SKBG melalui Skema KPBU	Rabu, 5 Mei 2021 Melalui *video conference*	1. SKBG akan terbit bukan karena kepemilikan karena tidak mungkin dimiliki, terbit karena hak huni atau sewa jangka panjang untuk buktinya dalam bentuk SKBG; 2. Perbedaan SHM sarusun dengan SKBG sarusun, SHM sarusun itu diterbitkan untuk sarusun yang dibangun di atas tanah hak milik, sementara SKBG adalah hak sarusun yang dibangun di atas lahan HPL, HPL secara administratif dicatatkan sebagai BMN/BMD, dari karakteristiknya pertama tidak ada pengaturan terhadap jangka waktu, jika tidak ada jangka waktu berarti mirip dengan kepemilikan secara umum, artinya secara teoritis SHM itu bersifat mutlak, artinya sepanjang masa dia akan berlaku, dan seandainya pribadinya meninggal dunia dapat diwariskan, untuk konteksnya apakah ini sewa atau kepemilikan, kembalikan lagi pada prinsipnya hak milik atau sewa itu gunanya untuk memastikan pengembalian investasi sepanjang jangka waktu konsesi; dan	1. Tim *Expert* Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyiapkan bahan tayang untuk beberapa rapat terkait proyek KPBU Perumahan dan pembahasan lanjutan isu SKBG; dan Mengadakan beberapa rapat terkait KPBU Perumahan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			SKBG ini diterbitkan atas dasar perjanjian sewa atas tanahnya. SKBG diterbitkan tidak boleh melampaui masa sewa atas tanahnya. Dalam hal KPBU, Perhitungan masa konsesi KPBU biasanya melihat di KSPInya, sehingga KSPI harus inline dengan masa konsesi KPBU.	
22	Rapat Pembahasan *Financial* dan PPP Model KPDBU Daan Mogot	Kamis, 6 Mei 2021 Melalui *video conference*	1. *User charge* untuk sewa jangka pendek maupun jangka panjang tidak *viable* dan dari hasil sensitivitas menunjukkan sangat berat untuk mencapai *viable*. 2. Model VGF dapat *viable* pada skenario sewa jangka panjang sementara untuk sistem sewa tidak *viable*. Alternatif lain adalah pembiayaan badan usaha menggunakan sumber pendanaan dengan bunga rendah (PT. SMI) selain itu dari segi fiskal lebih ringan (Rp 550 Miliar); 3. Model AP *viable* secara finansial. Ini karena dibayar secara berkala selama masa konsensi namun dari segi fiskal cukup besar. Model ini cocok diterapkan pada proyek dengan fokus pemenuhan rusunawa MBR terprogram dan umum; 4. Model *hybrid* secara finansial baik sewa jangka pendek maupun sewa hak jangka panjang *viable*. Untuk *fiscal cost* lebih ringan dibandingkan model AP namun lebih besar dari VGF; dan 5. Tantangan yang dihadapi oleh Pemda DKI adalah masih tingginya jumlah rusun-rusun DKI yang belum terhuni, pergantian kepemimpinan gubernur yang semakin dekat dan beban fiskal yang tinggi. Oleh sebab itu Pemda keberatan untuk membiayai proyek ini dengan skema AP. Namun perlu digarisbawahi bahwa keputusan penggunaan skema AP tidak hanya berdasarkan keputusan dari PJPK saja tetapi juga berdasarkan reviu dari Kemenkeu, Bappenas, dan kementerian terkait.	1. Konsultan untuk segera menentukan jenis area komersial yang akan dikembangkan berdasarkan hasil RDS final; 2. Konsultan segera menyelesaikan perhitungan untuk area komersial sehingga dapat ditekan penggunaan APBD seminimal mungkin; 3. Konsultan akan mengkaji konfigurasi terbaik sehingga menghasilkan *revenue* yang optimal dengan menekan *cost*, terutama *construction cost*; dan 4. Pemda DKI untuk mengajukan PDF ke Kemenkeu untuk proses lanjutan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
23	Rapat Identifikasi Potensi KPBU Rusun TOD Perpanjangan MRT Lebak Bulus - Rawa Buntu	Jumat, 7 Mei 2021 Hotel Mercure BSD	1. Rencana - perpanjangan stasiun perpanjangan MRT Lebak Bulus-Rawa Buntu adalah St. Lebak Bulus, St. UM, St. UIN, St. Pasar Ciputat, St. Pustekkom, St. Pondok Cabe, St. Terminal Pondok Cabe, St. Pamulang Barat, St. Pondok Benda, St. Babakan, St. Puspitek, dan St. Rawa Buntu. Studi trase dilakukan oleh BPTJ; 2. Terkait kewenangan pembuatan masterplan, sebenarnya Pemprov DKI telah menyusun masterplan terkait MRT. Masterplan tersebut memuat panduan rancang kota dimana PT. MRT Jakarta berwenang sebagai pengelola kawasan; dan 3. Melihat potensi yang ada, perlu mempertimbangkan waktu yang lebih efisien antara penyiapan TOD dan hunian.	1. Terkait potensi stasiun 12 titik, PUPR bisa melakukan identifikasi terkait lahan di sekitar lokasi yang ditetapkan oleh BPTJ. Selanjutnya dapat melakukan pengajuan penetapan trase ke Menteri Perhubungan; 2. Terkait siapa yang harus membuat masterplan akan ditetapkan sesuai kewenangannya; dan Perlu membuat studi yang lebih komprehensif mengenai integrasi perumahan dengan transportasi.
24	Rapat Pembahasan Analisis RDS KPBU Rusun Desa Besar Medan	Senin, 10 Mei 2021. Melalui *video conference*	1. Terkait perhitungan *demand size*: Estimasi kebutuhan unit masing-masing segmentasi untuk tiga hingga lima tahun ke depan adalah rusunawa tipe I sebesar 300-530 unit, rusunawa tipe II sebesar 290-490 unit, rusunami sebesar 200-520 unit, apartemen komersil penyewaan jangka pendek sebesar 100-180 unit, dan apartemen komersil penyewaan jangka panjang sebesar 140-230 unit; dan 2. Terdapat dua rekomendasi pengembangan yang terdiri dari: a. Skenario 1: Rencana pembangunan dengan total 1.200 unit. Pada fase 1 akan dilakukan pembangunan 850 unit dengan penjabaran rusunawa I sebanyak 300 unit, rusunawa II sebanyak 300 unit, rusunami sebanyak 150 unit, dan apartemen komersil sewa jangka pendek sebanyak 100 unit. Pada fase 2 akan dilakukan pembangunan 350 unit dengan penjabaran rusunami sebanyak 200 unit dan apartemen komersil sewa jangka panjang sebesar 150 unit. Pada skenario 1 fase 1, pengembangan rusunami akan diperkenalkan ke pasar. Bila pengembangan ini dapat diserap pasar, skenario 1 tahap 2 baru dapat dikembangkan. b. Skenario 2: Rencana pembangunan dengan total 1.100 unit. Pada fase 1 akan dilakukan pembangunan 700 unit dengan penjabaran rusunawa I sebanyak 300 unit, Rusunawa II sebanyak 300 unit, dan apartemen komersil sewa jangka pendek sebanyak 100 unit. Rusunami tidak	1. Perlu segera diputuskan skenario pembangunan yang akan dipilih untuk dikembangkan; 2. Perlu dilakukan peninjauan lebih dalam terkait pembangunan tipologi *Walk-up Apartment* yang sejatinya akan memanfaatkan fungsi lahan lebih besar (sisi barat dan sisi timur lahan). Perlu dipertimbangkan pembangunan kedua sisi lahan menyangkut pengadaan jembatan layang untuk menyambungkan kedua sisi lahan; dan 3. Pengurangan jumlah pengadaan unit hunian dari hasil RDS sebelumnya berdampak pada perubahan model finansial.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			termasuk dikarenakan minat pasar yang rendah. Pada fase 2 akan dilakukan pembangunan 400 unit dengan penjabaran rusunawa I sebanyak 200 unit dan rusunawa II sebesar 200 unit.	
25	Rapat Pembahasan Analisis Teknikal dan Analisa Lingkungan-Sosial KPBU Rusun Desa Besar Medan	Selasa, 11 Mei 2021. melalui *video conference*	1. Pembangunan di sisi timur bisa dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun sebagai jawaban dari perkembangan *demand*; 2. Jumlah unit 1020 unit dengan 3828 jiwa dengan kebutuhan daya listrik 879 kVa, air 993 m^2/orang/hari; 3. Daya dukung listrik: pasokan listrik di medan masih *surplus* 45 juta pelanggan, sehingga masih bisa memenuhi kebutuhan Rusun Tol Berlmera yang mencapai 712 kVA dan untuk perdagangan jasa fasos dan fasum 163 kVA; 4. Kebutuhan layanan air minum: a. Total kebutuhan air = 2.140 m^3/hari b. Akan dipasok PDAM Tirtanadi Medan berdasarkan opsi perencanaan (meteran induk di jalur pipa distribusi terdekat) c. Bila PDAM belum bisa melayani maka: ● Membangun IPA (WTP) 30l/detik, sumber air baku dari Sungai Deli +/- 1 km ● Kebutuhan perencanaan: lokasi *water intake* dan *trase* jalur pipa transmisi, lahan untuk IPA 60,6 m2, kolam detensi untuk menampung air baku 460 m2 dan *clear well* 5. Sesuai peta genangan air/banjir Kota Medan, potensi banjir di lokasi pembangunan rusun adalah RENDAH. Namun lingkungan sekitar lokasi rawan genangan/banjir dengan intensitas SEDANG dan TINGGI. Sehingga dapat dilakukan mitigasi dengan prinsip *drainase* berwawasan lingkungan, yaitu: ● Pendekatan *Eco Drainage* (konservasi sumber daya air) ● Air larian menjadi cadangan air aku untuk kebutuhan domestik rusun	1. Pada tanggal 21-22 Mei akan diadakan konsinyasi agar tim dapat terinformasikan dengan baik; dan 2. Seluruh data yang diperoleh akan di *compile* sebagai dasar penyempurnaan OBC ini.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			● Air larian ditampung di kolam retensi (460 m^2), terkoneksi saluran *drainase* kota dan saluran *drainase* jalan tol.	
26	FGD Penyediaan Sarusun SKBG melalui Skema KPBU	Selasa, 18 Mei 2021 GrandKemang Jakarta dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Terkait pembaruan SKBG, ketika jangka waktu sewa tanah bersama yang di atasnya dibangun rusun berakhir di tahun ke-60 dan ingin dilakukan perpanjangan SKBG maka dilakukan perpanjangan sewa atas tanah oleh PPPSRS; 2. Penerbitan SKBG sarusun hanya untuk rusun umum milik yang diperuntukkan bagi MBR dan dalam kontrak KPBU nanti melampirkan dokumen penandatanganan perjanjian sewa atas tanah (selama 60 tahun) sebagai bentuk penguasaan tanah yang akan dikerjasamakan; 3. Terkait lahan BMN untuk sarusun SKBG, BMN PUPR yang disewa atau di KSPI dalam bentuk rusun, apabila dijual bukti kepemilikan sarusun tersebut berupa SKBG. Aset PUPR berupa tanah tidak akan beralih karena yang akan dikuasai MBR hanya bangunannya saja selama jangka waktu tertentu; 4. Terkait status aset setelah masa SKBG berakhir, apabila itu tanah BMN PUPR maka aset tanah berikut bangunannya kembali ke PUPR; dan 5. Skema pengembalian investasi bisa berupa dua kemungkinan, yaitu (1) Jual putus untuk unit SKBG-nya; dan (2) Jual putus untuk unit komersialnya. Untuk bukti kepemilikan legalnya bisa berupa SHM SRS, SKBG SRS dan SBKBG, dimana SBKBG untuk unit non hunian sementara untuk hunian berupa SHM SRS dan SKBG SRS.	1. Tim legal Kemenkeu akan memastikan jangka waktu KSPI dapat disamakan dengan SKBG; 2. Tim legal KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan mengonfirmasi apakah terminologi *long term lease* dapat dikaitkan dengan SKBG; 3. Tim legal KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan mengkaji apakah dengan menggunakan SKBG di atas HPL akan mendapat hak istimewa seperti kredit konstruksi; 4. Perlu dilakukan dua perbuatan hukum dimana yang pertama adalah perjanjian sewa atas tanah yang mengacu pada SKBG (selama 60 tahun) dan perbuatan hukum kedua adalah perjanjian kontrak Kerjasama yang mengacu ke ketentuan KPBU sehingga pemanfaatan selama jangka waktu tertentu ini dapat masuk ke dalam klausul kontraknya; dan 5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan mengadakan diskusi lanjutan mengenai skema pembiayaan yang akan diterapkan pada *Pilot Project* KPBU Cisaranten dan eksplorasi alternatif skema pembiayaan untuk Proyek Perumahan selanjutnya dengan *stakeholders* terkait.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
27	Rapat Pembahasan *Financial Modeling* Dokumen OBC Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	Rabu, 19 Mei 2021 Hotel Grantage BSD dan *video conference* aplikasi Zoom	1. Badan Usaha Pelaksana (BUP) akan bertanggung jawab merancang, mendanai, membangun, dan melaksanakan pemeliharaan tahunan dan berkala untuk pekerjaan struktural dan teknik sesuai persyaratan perjanjian KPBU. Cakupan BUP akan sama untuk skema model *Availability Payment* (AP) kecuali BUP juga akan memasarkan unit rumah susun terjangkau dan komersial, dan memfasiltasi transaksi sewa. Badan Layanan Umum (BLU) yang memfasiltasi transaksi sewa. 2. BLU akan bertanggung jawab atas operasi. Terdapat dua skema yaitu *Build Operate Transfer* (BOT) dan *Build Transfer Operate* (BTO) yang belum ditentukan. Sesuai Permen Bappenas No 2 tahun 2020 dan permen PUPR No 21 tahun 2018 KPBU cenderung BOT, namun masih memungkinkan BTO, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. 3. Berdasarkan hasil *Real Demand Survey* (RDS) kompetitor proyek ini adalah Bellazona. Target rusun sewa komersial Cisaranten berbeda dengan Bellazona yakni Bellazona menawarkan apartemen kelas atas. Sedangkan, proyek rumah suusn Cisaranten target pasar menengah ke bawah dengan harga yang telah dipertimbangkan. 4. SKBG dan *Long term lease* merupakan dua hal yang berbeda. SKBG merupakan tanda kepemilikan sewa berjangka, sedangkan belum terdapat regulasi definisi *long term lease* di Indonesia	1. Hal-hal yang berkembang akan didetailkan dalam FBC 2. DJPI atau DJP akan menjadwalkan sesi pertemuan penjelasan lebih lanjut mengenai *financial modeling* dalam Bahasa Indonesia dengan pihak *world bank*
28	Konsinyasi Penyusunan OBC KPBU Desa Besar Medan	Kamis-Jumat, 20-21 Mei 2021 Mercure BSD Tangerang	1. Proyek Rusun Desa Besar Medan cukup sensitif ketika ada peningkatan biaya investasi sebesar 10% atau penurunan keuntungan sebesar 10%; 2. Transfer resiko: *design, build, operate* dan *maintenan*ce sehingga pada akhir konsensi harus ada pengembalian aset dengan baik ke pemerintah. Lelang KPBU hanya AP nya dengan bentuk DBFOM;	3. Konsultan menyempurnakan OBC untuk diserahkan pada Senin 24 Mei 2021; dan Persiapan *market sounding* minggu depan (minggu ke-4 Mei 2021).

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			3. Perlu rencana mekanisme BP3 sebagai calon BLU dengan memberikan kriteria calon penghuni rusun MBR seperti UPT; 4. Terkait Jaminan Pemerintah, perlu indikasi jaminan pemerintah seperti apa yang ada dalam layanan proyek; dan 5. Perlu menjelaskan penyebab kemungkinan terjadi peristiwa gagal bayar dan terminasi, agar kedua hal tersebut dapat didiskusikan dengan PT. PII.	
29	*Kick Off Meeting* Tim KPBU Karawang Spuur	Selasa, 25 Mei 2021 Grand Kemang Jakarta dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. DJPI mendapatkan mandat dari PJPK terkait pembentukan Tim KPBU Karawang Spuur. Tim KPBU ini akan selesai tugasnya setelah tanda tangan kontrak transaksi. Selanjutnya akan dibentuk tim pengendalian oleh DJP. Dimungkinkan Tim KPBU ini akan dilibatkan lagi dalam tim pengendalian untuk mengetahui cikal bakal dan harapan dari proyek ini; 2. Proses KPBU Karawang Spuur saat ini sedang mengajukan PDF ke Bappenas dan Kemenkeu, sudah masuk dalam agenda Kemenkeu yang menerima PDF tahun 2021; 3. Mengenai lahan jalan lingkungan akan dikelola oleh BUP, namun tetap dapat digunakan untuk akses warga menuju kampung budaya baik warga rusun maupun di luar rusun; 4. Terkait *Service Level Agreement*, sudah berkoordinasi dengan DJP tentang Standar Pelayanan Minimal, harus ditetapkan bobotnya sehingga tidak bersengketa dengan badan usaha. Info terakhir masih disusun dalam bentuk juknis; 5. Secara fisik bangunan itu dioperasikan oleh badan usaha. Namun untuk pengelolaan keuangannya tetap ada pihak kita yang turut andil namun masih belum ditentukan siapa. Seluruh operasional dibayar dengan AP. Namun pendapatan dari sewa tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk *top-up* AP. Jadi perlu ditetapkan nanti siapa yang mengurus itu , BLU atau BP3; dan 6. Terkait *demand risk*, masih dalam pembahasan di OBC. Sejauh ini jika proyek tersebut menggunakan skema pengembalian AP maka risiko tersebut ditanggung oleh pemerintah.	1. DJPI akan bersurat kepada Tim KPBU untuk mengirimkan Studi Pendahuluan yang telah disusun; 2. Perlu adanya pembekalan/pelatihan dasar tentang KPBU dan penyediaan infrastruktur secara konvensional (Perbedaan signifikan KPBU dan konvensional) kepada Tim KPBU Karawang Spuur dan Cisaranten dari Bappenas dan Kemenkeu; dan 3. Perlu pembahasan lebih lanjut mengenai desain bangunan, porsi pengembalian OPEX dan CAPEX-nya dan standar pelayanan oleh badan usaha.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
30	Rapat Panitian Antar Kementerian (PAK) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpers tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat).	Selasa, 25 Mei 2021 di Hotel Aviary Bintaro dan melalui teleconferene aplikasi zoom	1. *Timeline* RPERPRES dimulai dari Minggu ke-V Januari 2021, jika sudah tidak ada pembahasan lanjutan, dapat segera di proses oleh teman-temen di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Diharapkan Bulan Juni 2021 sudah sampai meja Bapak Presiden. 2. Terkonfirmasi bahwa Menteri Ex-officio secara aturan dipebolehkan menerima honorarium dengan *benchmark* yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Pemberian Insentif hanya diberikan kepada unsur profesional saja dan tidak untuk Menteri ex-officio. 3. Persetujuan PRK dapat menggunakan daftar hadir pada rapat hari ini, sebagai pengganti approval paraf dari Kementerian Hukum dan HAM (formalitas pada kondisi Covid-19). 4. Disarankan untuk besaran pemberian honorarium berdasarkan devinitif angka saja. Sehingga pada keputusan Presiden nantinua langsung ditentukan besaran nominal honorarirum tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan *governance* yang tidak baik. Sebagai catatan saja, jika menggunakan persentase harus ada dasar yang kuat untuk menghindari keberpihakan subjek dan lain sebagainya. 5. 3 (tiga) opsi waktu yang ditawarkan untuk memulai pemberian honorarium yaitu sejak ditetapkan Komite Tapera Nov 2016, sejak pelantikan Maret 2019 atau sejak Kepmen November 2019. Tentunya dengan memastikan ketersediaan dana yang dimiliki.	1. Pihak yang menanggung pajak penghasilan adalah penerima honorarium (penghasilan bruto); 2. Menentukan realiasasi waktu memulainya pembayaran honorarium; 3. Akan dilakukan pengajuan Harmonisasi ke Kemenkumham.
31	Rapat Pembahasan *Market Sounding* KPBU Rusun Desa Besar Medan	Kamis, 27 Mei 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Setelah *draft* OBC final, maka perlu dilakukan penjajakan minat pasar. Penjajakan minat pasar ini untuk melihat apakah proyek yg kita rencanakan di Desa Besar ini sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai dengan *concern* dari investor. Status saat ini masih menunggu perbaikan *draft* OBC dari konsultan; 2. Perlu untuk menyamakan persepsi antar *stakeholder* dan pemerintah terkait proyek Rusun Desa Besar Medan; 3. Terkait undangan perlu dikonsultasikan kepada asosiasi pengembang, Direktorat Rusun dan instansi lainnya terkait	1. Perlu melakukan rapat penyamaan persepsi dengan instansi pemerintah yang berkaitan sebelum dilakukan *market sounding*; 2. Perlu melakukan diskusi dan kroscek terkait *financial model* untuk subsidi; 3. Perlu disiapkan dan *review* kembali terkait surat-surat yang berkaitan untuk *market sounding*;

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			perusahaan apa yang tepat untuk diundang sebagai usulan investor, sehingga tidak hanya pengembang yang diundang, namun perlu juga mengundang kontraktor swasta, perusahaan properti, dan *building operation*; 4. Bentuk dari *market sounding* ini nanti akan diskusi panel lalu dilanjutkan *one on one meeting* setelahnya.	4. Perlu melibatkan DJP serta meninjau kembali siapa yang akan dilibatkan menjadi narasumber; dan pembahasan draft dokumen transaksi RFP dan RFQ akan dibahas oleh subdit 2.
32	Rapat Pembahasan *Screening* KPBU Rusun TOD	Kamis, 27 Mei 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Perlu mengidentifikasi status kepemilikan lahan di kawasan TOD, karena akan mempengaruhi proses penyiapan KPBU rusun; 2. Jika menggunakan skema KPBU, segala aspek harus lebih jelas (trase, akses, lahan); 3. Pada hasil diskusi potensi TOD di lokasi Jabodetabek: a. TOD Terminal: TOD Polaris Plawad dalam tahap penandatanganan kontrak penyusunan OBC dan TOD Barangnangsiang direncanakan dengan skema BGS; b. Rencana jalur MRT dan LRT pada MRT N-S, E-W, LRT Cibubur-Bogor, dsb. 4. Beberapa masukan/info: a. Sudah terdapat perencanaan rusun di Rawa Buntu; b. Lebih baik prioritas pada TOD yang sudah direncanakan yaitu Jurang Mangu dan Rawa Buntu; 5. Kedepannya perlu: a. Lebih fokus ke rencana pembangunan rusun. TOD hanya berfungsi sebagai *trigger* kelayakan dari aspek *demand*; b. Pemanfaatan lahan BMN atau BMD untuk pembangunan Rusun menjadi kunci awal kelayakan proyek; c. Lokasi prioritas terpilih perlu dikaji lebih dalam lagi sebaga bagian dari *screening* termasuk pemilihan stasiun.	1. Usulan rencana kerja dari konsultan di Bulan Juni: a. Rapat Potensi Rusun Konsep TOD Jalur Depok Baru – Parung (Jawa Barat); b. Kunjungan lokasi lahan PU untuk potensi rusun di Lebak Bulus; c. Rapat identifikasi potensi rus un di Maminasata, Makassar; d. Rapat pembahasan draf dokumen Studi Pendahuluan (SP) berupa rapat internal. Rapat internal antar DJPI dan konsultan direncanakan akan diadakan setiap minggu untuk *update* dan diskusi kemajuan mingguan.
33	Rapat Pembahasan Konsep Awal IKN	Jumat, 28 Mei 2021 Swiss-BelHotel Bogor	1. Secara garis besar proyek KPBU Perumahan IKN akan menggunakan AP karena penerima manfaat (ASN, TNI, POLRI) tidak mampu untuk menutupi biaya CAPEX baik bila hunian diperjual belikan karena kemampuan bayar yang jauh lebih rendah dari nilai investasi.; 2. Rekomendasi Bentuk KPBU: Berdasarkan paparan Bappenas tanggal 17 Mei 2021 skema pengembalian untuk Pejabat	Dit. PPP akan melaporkan lebih lanjut kepada pimpinan karena ada hal-hal yang harus disiapkan oleh PUPR sebagai PJPK sementara.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			Negara- Eselon I- Eselon II- adalah KPBU AP atau APBN Eselon III-V dan jabatan fungsional adalah *User Charge*; 3. Rekomendasi PJPK: Kementerian PUPR menjadi PJPK sementara sampai dengan Badan Otorita Terbentuk; 4. Skema KPBU: DBFMOT (*Design – Build – Finance – Maintenance – Operate – Transfer*) atau BOT (*Building – Operate – Transfer*) yang lebih diperluas lingkupnya; 5. *Outstanding issue* yang harus menjadi perhatian ke depannya: a. Pengadaan lahan (kepastian status lahan, penanggung jawab penyediaan lahan alih fungsi hutan, pembebasan lahan masyarakat, pematangan lahan, serta proses KSPI atas pemanfaatan tanah negara jika diperlukan); b. Ruang lingkup KPBU Perumahan (kejelasan batasan ruang lingkup proyek KPBU Perumahan KIPP, Rumah PSU dan fasilitas pendukung serta pembagian tugas dalam penyediaan fasilitas pendukung dengan sektor lain); c. Rincian biaya investasi (apakan rincian biaya KPBU sudah termasuk PSU dan fasilitas, reviu harga hunian satuan, reviu perhitungan CAPEX dan OPEX, serta estrimasi kebutuhan AP); d. Kemampuan pengguna membayar (Analisis sementara menunjukan ASN tidak memiliki kemampuan skema kepemilikan tetapi memiliki kemampuan untuk sewa namun hanya bisa menutup biaya OPEX); e. Potensi penerimaan lainnya (Opsi hunian komersial atau hotel bisnis untuk fasilitasi kunjungan dinas ke KIPP); f. Skema pengembalian investasi AP (Hasil diskusi dengan pengembang menunjukkan bahwa pengembang tidak bersedia menanggung resiko *demand*)	
34	Tanggapan atas Permintaan Tambahan Informasi dan Analisis terkait Aspek Lingkungan dan Sosial dalam	Rabu, 2 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan *Public Private Partnership* (PPP) *Framework and Financing Development for Affordable Housing* (NAHP-PPP), diperlukan tambahan informasi dan analisa terkait aspek lingkungan dan sosial sesuai dengan permintaan dari World Bank; 2. Terdapat 13 poin aspek lingkungan dan 7 poin aspek sosial yang memerlukan kelengkapan tambahan informasi;	1. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan memberikan tanggapan kepada World Bank atas permintaan tambahan informasi dan analisa terkait aspek lingkungan dan sosial dalam penyiapan KPBU Desa Besar Medan; dan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
	Penyiapan KPBU Desa Besar Medan		3. Dengan adanya data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat, diharapkan kajian risiko lingkungan dan sosial yang disampaikan oleh konsultan PPP dapat mengkonfirmasi bahwa rencana pembangunan hunian serta fasilitas pendukungnya tidak akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, beragam (*diverse*), kompleks, dan berskala besar; dan 4. Berdasarkan kajian risiko tersebut, tim E & S World Bank dapat mengkaji kembali dan memastikan EA *Category* dari sub proyek tersebut.	2. Tim konsultan akan melakukan revisi sesuai arahan dan masukan dalam diskusi rapat.
35	Konsinyasi Pembahasan OBC KPDBU Rusun Daan Mogot	Kamis, 3 Juni 2021 Hotel Mercure Sabang Jakarta	1. Luas lahan untuk digunakan dalam proyek adalah 4.6 Ha dan total kapasitas hunian sebesar 1584 unit yang mana di dalamnya akan dibangun hunian dan bangunan lain seperti sarana perniagaan, kantor pengelola, bangunan service, parkir *basement*; 2. Bangunan Hunian terbagi menjadi: a. Rusunawa terprogram (MBR-1) dengan ukuran unit tipe 36; b. Rusunawa umum (MBR-2) dengan ukuran unit tipe 36 dan tipe 54; c. Apartemen dengan ukuran unit tipe 21, tipe 36 dan tipe 54. 3. Saat ini regulasi yang ada mengatur bahwa ukuran unit untuk MBR tidak boleh lebih dari 36m^2 sehingga perlu diperhatikan untuk ukuran unit yang ditawarkan pada rusunawa umum, mengingat konsep peruntukkannya untuk MBR-2; 4. Terkait dengan pemanfaatan aset BMD, akan ada perbedaan jumlah nilai yang harus dibayarkan antara pemrakarsa swasta murni dengan pemrakarsa BUMD. Oleh sebab itu sebelum melaksanakan kegiatan ini perlu koordinasi dengan BPAD untuk dilaksanakan penilaian aset terlebih dahulu; 5. Proyek ini layak untuk dilakukan dengan skema AP, VGF, dan *Hybrid*. Khusus model *hybrid*, skema AP bisa digunakan untuk membiayai MBR-1 (terprogram) dan untuk membiayai MBR-2 dapat menggunakan VGF. Namun demikian perlu diingat bahwa VGF merupakan pilihan terakhir (*last resort*) karena	1. Konsep *mixed-use* hunian-area komersial, *mall* dan perkantoran masih belum menemukan konfigurasi yang optimal sehingga konsultan perlu untuk memastikan bahwa konsep *mixed-use* tersebut benar-benar dapat menghasilkan *cost recovery* bukan malah menambah beban fiskal PJPK; 2. Perlu diskusi lebih lanjut mengenai pembangunan hunian komersial di atas lahan BMD; dan 3. Konsultan akan melakukan: a. Pengecekan kembali biaya konstruksi proyek; b. Memasukan berapa porsi pemerintah pusat apabila menggunakan skema *Hybrid*; c. Penjelasan lebih rinci risiko-risiko yang akan ditanggung oleh PJPK dan risiko risiko yang akan pindah ke swasta dalam *Public Sector Comparator* (PSC).

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			semakin besar VGF, maka akan semakin besar juga beban fiskal Pemerintah.	
36	Konsinyasi Penyiapan Dokumen Transaksi KPBU Rusun Desa Besar Medan	Jumat, 4 Juni 2021 The 101 Dharmawangsa, Jakarta	1. Dokumen transaksi ini merupakan salah satu bagian dari *output* fasilitasi NAHP PPP. Saat ini sifatnya masih *template* yang akan direvisi lagi saat proses transaksi sudah berjalan oleh tim pengadaan yang melibatkan DJP, DJPI, CK, dan BP2JK. 2. Dokumen RFQ yang disusun memuat: Informasi Umum, Informasi Proyek, Instruksi Kepada Peserta, Lembar Data Proyek, Kriteria Prakualifikasi, Isi Dokumen Kualifikasi; 3. Perlu menambahkan kriteria pengalaman perusahaan, bukan hanya tahap kontruksi tapi juga pengelolaan; 4. Perlu menambahkan persyaratan kepastian perusahaan tidak dalam keadaan pailit dan mitigasi apabila terjadi kepailitan; 5. Perlu penajaman terkait: a. Definisi perubahan hukum yang menjadi *concern* dari BUP, berkaitan dengan penjaminan yang akan dilakukan; b. Klaim atas lahan dari pihak ketiga 18. Sudah ada pasal klausul tentang tanah, karena lahan BMN/BMD maka harus ada *statement* yang jelas dari PJPK untuk membebaskan BUP dari segala tuntutan, dengan catatan tanah ini menggunakan skema KSPI. Sehingga tidak ada lagi istilah sewa terhadap lahan tersebut; c. *Timeline* pembatasan pengalihan saham yang diperbolehkan sampai kapan, jangan sampai ada klausul yang kontradiktif; d. Pajak serah terima aset, siapa yang akan menanggung jika BUP telah selesai dan diserahkan ke PJPK; e. Klausul pengesampingan imunitas kedualatan (*sovereign immunity*);	1. Lampiran dokumen transaksi akan disesuaikan dengan lampiran pada Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 2. Akan disiapkan catatan/notes mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian PJPK; dan 3. Memasukkan usulan rapat dalam dokumen yang disusun.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			f. Penyusunan lampiran, daftar persetujuan 2 (dua) utama apa saja yg diperoleh dan dijaga keberlakuannya oleh BUP perlu diinventarisir secara jelas dan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya; g. Pembayaran pengakhiran di letakkan di lampiran, perlu diperjelas utang senior termasuk bunga atau *hedging*/lindung nilai; h. *Stating* PJPK perlu dipertegas bentuknya seperti apa (*consent letter* atau perjanjian) dan yang menandatangani siapa aja; dan i. Penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh arbiter atau siapa.	
37	Pembahasan Reviu OBC Rusun Desa Besar Medan	Senin, 7 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Dalam satu minggu dokumen OBC yang dipersiapkan harus sudah sesuai dengan standar yg ditentukan, agar dapat dilanjutkan ke proses permohonan PDF; 2. Rincian hasil RDS mengenai kebutuhan, preferensi dan keterbatasan *Supply Multistory Housing* perlu di*highlight*; 3. Bappenas menyampaikan OBC harus memenuhi kriteria konten di dalamnya yaitu tujuh kategori kajian satu *outstanding issues* yang akan diselesaikan; dan 4. Masih terdapat inkonsistensi data, komponen perhitungan yang kurang tepat dan asumsi perhitungan yang perlu dikaji kembali, seperti rasio ONM, pendapatan parkir, bunga rendah, IRR, IDC dan beberapa perhitungan lainnya.	Tim Konsultan akan melakukan: 1. Perbaikan konsep OBC; 2. Revisi komponen perhitungan, penjelasan RDS dengan lebih rinci; dan 3. Pembahasan reviu lebih lanjut dengan Bappenas dan World Bank.
38	Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyiapan KPBU Perumahan	Selasa, 8 Juni 2021 Grantage Hotel dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	Berdasarkan hasil pembahasan SOP Penyiapan KPBU Perumahan, terdapat beberapa SOP yang perlu disusun, yaitu: 1. SOP Pelaksanaan Konsultasi Publik KPBU Perumahan; 2. SOP Penjajakan Minat Pasar KPBU Perumahan; 3. SOP Pembentukan Tim KPBU Perumahan; dan 4. SOP Penyiapan Dokumen Transaksi KPBU Perumahan.	Akan diadakan rapat finalisasi pembahasan SOP KPBU Bidang Perumahan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
39	Rapat Pembahasan Pengelolaan Dokumentasi dalam Penyiapan Proyek KPBU Bidang Perumahan	Selasa, 8 Juni 2021 Grantage Hotel BSD dan dilaksanakan secara *teleconference*	1. Kategori / Klasifikasi dokumen KPBU termasuk ke dalam Arsip Vital sehingga perlu untuk melakukan Tata Cara Pengelolaan Arsip Vital dan Perlu melakukan perlindungan dan pengamanan arsip vital. 2. Perlindungan dan pengamanan Arsip Vital yang dapat dilakukan yaitu penduplikasian, disimpan terpencar / dispersial, pemindahan ke pusat penyimpanan Arsip Vital, serta penyompanan data di tempat khusus. 3. Proses digitalisasi perlu melakukan langkah – langkah yang diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis yaitu: melakukan pengecekan dokumen, peralatan yang digunakan, pemindaian, meregistrasikan hasil alihmedia sebagai bukti bahwa hasil pindaian asli, penyimpanan, dan keamanan data. 4. Dokumen terkait KPBU perlu untuk diarsipkan dengan baik karena masa konsesi yang panjang, maka perlu diperhatikan juga terkait dengan langkah – langkah / tata cara pengarsipan terkait dengan arsip vital. Arsip / dokumen terkait KPBU yaitu: Renstra Unit Kerja dan Kementerian, Berkas Studi Pendahuluan, Berkas Penetapan KPBU Pemerintah, Berkas Kajian Awal / Studi Kelayakan, Berkas Perizinan (AMDAL/UKL/UPL), Berkas Pengadaan Tanah, Berkas Penetapan Prinsip / Izin Prinsip, Berkas Pengadaan / Pelelangan (dari tahap prakualifikasi s.d. penetapan pemenang), Berkas Pengendalian Perjanjian KPBU, Berkas Laporan Hasil Pelaksanaan KPBU.	Terkait kondisi aset KPBU dan sumber pendanaan Proyek KPBU yang berbagi dengan Badan Usaha sehingga cara pemberkasan arsip – arsip tersebut perlu diskusi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
40	Rapat Pembahasan Financial Model NAHP-PPP	Selasa, 8 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Perhitungan FIRR untuk *project* dan *equity* adalah sama, yang menjadi pembeda adalah pada FIRR *project*, *cash in* berupa *adjusted net income* dan *cash out* berupa total *project cost*. Sementara pada FIRR *equity*, *cash in* adalah *adjusted net income* dan *cash out* adalah *equity* dan cicilan pinjaman; 2. Terkait dengan *financial model* KPDBU Daan Mogot, jika menggunakan skema AP maka Pemda DKI ingin AP tersebut hanya untuk membiayai hunian MBR saja tanpa fasilitas komersial; dan 3. Biaya IPL hanya ada pada rusunami sementara untuk rusunawa tidak ada biaya tersebut karena tarif sewa di rusunawa sudah termasuk biaya IPL.	Konsultan akan melakukan: 1. Kajian tentang rencana pemanfaatan lahan/tanah yang tidak jadi dibangun apartemen dan fasilitas komersial. 2. Penghapusan biaya pembangunan hunian dan fasilitas komersial serta biaya IPL untuk skema AP 3. Penghitungan dan memasukkan biaya operasional di laporan 4. Diskusi dengan Pemda DKI terkait dengan besaran tarif sewa dan kenaikan tarif sewa per tahun serta regulasi yang mengatur.
41	Rapat Penyiapan Permohonan Project Development Facility (PDF) Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur	Rabu, 9 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. KemenPUPR tidak menganggarkan penyusunan OBC Karawang Spuur, karena penyusunan OBC ini disponsori oleh IIDF. Namun Kemenkeu menginformasikan bahwa penyusunan OBC akan disiapkan oleh Kemenkeu melalui PDF; 2. Kelengkapan pengajuan PDF telah mulai disiapkan oleh tim TA *expert*; 3. Dokumen SP yang diajukan untuk pengajuan PDF dapat menggunakan CPS Karawang Spuur, tetapi CPS ini terdapat beberapa bagian yang perlu dikaji kembali adalah hitungan *project cost* dan AP; dan 4. Bersamaan Pengajuan PDF melalui Menteri PUPR, juga perlu disampaikan surat mengenai nilai AP melalui Dirjen PI	Direktorat PPP akan melakukan: 1. Penyusunan konsep surat permohonan konfirmasi pendahuluan; 2. Penyusunan konsep dokumen rencana pengadaan lahan; dan 3. Peninjauan kembali hitungan CAPEX, OPEX dan estimasi AP
42	Rapat Lanjutan Pembahasan Konsep OBC KPDBU Daan Mogot	Kamis, 10 Juni 2021 Mercure Jakarta Sabang	1. Agenda pembahasan terdiri dari hasil perbaikan dari *market survey*, perbaikan *financial modelling* (pilihan antara konfigurasi *user charge* ataupun VGF), dan perbaikan untuk harga sewa tiap unit; 2. Dilakukan survei seputar masyarakat terprogram dimana mayoritas responden yang tergolong ke dalam Masyarakat Terprogram (58 orang dari 500 responden), merupakan MBR, sehingga bantuan subsidi untuk penetapan tarif sewa sangat berpengaruh signifikan; 3. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 55/2018 Tentang Retribusi Pelayanan Perumahan, perubahan tarif sewa segmentasi 1 (MBR & Terporgram) dari Rp500.000 – Rp650.000 menjadi Rp505.000;	1. Tim Konsultan akan melakukan pengecekan ulang tarif sewa yang paling ideal dengan melakukan simulasi *financial model*; dan 2. Tim Teknis akan melakukan pengecekan ulang terhadap CAPEX dan OPEX, dan mencari komposisi paling *feasible*.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			4. Untuk segmentasi 2, tarif sewa 36m^2 *non-fully furnished* (NFF) menjadi Rp 765rb-1jt dan 54m^2 NFF Rp1.350jt-1.720jt (berdasarkan evaluasi dari Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI No. 588/1-769.32 dan acuan ATP) 5. Dipaparkan rencana konfigurasi skenario tanpa area komersial dimana lokasi apartemen diganti menjadi Rusunawa Umum dan lokasi komersial/*mall* akan menjadi taman dan tempat parkir; dan 6. Dipaparkan juga ringkasan dari *financial model* dan disimpulkan untuk *user charge* murni dan VGF tidak layak. AP layak dengan asumsi konfigurasi Rusun yang ada (namun secara riset belum ditelaah apabila mal dan komersil dibangun jadi Rusunawa).	
43	Rapat FGD Minat Pasar KPBU Desa Besar medan	Jumat, 11 Juni 2021 Arosa Hotel, Bintaro Jakarta Selatan dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	Untuk melengkapi OBC maka telah dilakukan penjajakan minat pasar (*Market Sounding*) dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1) Penjelasan mengenai Strategi Pelaksanaan *Major Project* 2020-2024 Rusun Perkotaan oleh Direktorat Rumah Susun 2) Pemaparan tentang pengertian, mekanisme alur, dan keuntungan pelaksanaan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) oleh Bappenas; 3) Pemaparan tentang macam-macam ketersedian dan keuntungan yang didapat dari fasilitas Dukungan Pemerintah dalam Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur oleh Kementrian Keuangan; dan 4) Pemaparan mengenai *detail* rancangan dan rencana pembangunan Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan oleh KemenPUPR.	1. Tanggal 14-15 Juni 2021 para investor dan pengembang diberi kesempatan untuk melakukan penyampaian pertanyaan melalui *e-mail*; 2. Tanggal 17-18 Juni 2021 akan dilakukan penyampaian jawaban oleh PJPK (PUPR) melalu *e*-mail; 3. Penyampaian *feedback* atas kuisioner (FQ) dilakukan melalui link yang tersedia dan *Letter of Interest* (LoI) oleh investor melalui *E-mail* pada tangga 21-25 Juni 2021; dan 4. Tanggal 28 Juni akan dilaksanakan *video conference* ke-2 untuk diskusi yang lebih mendalam bagi investor yang mengajukan LoI.
44	Konsinyasi Finalisasi NAHP-PPP	Senin, 14 Juni 2021 Mercure BSD City, Tangerang dan melalui *video*	1. Diperlukan *timeline* yang dapat menjelaskan waktu penyelesaian proyek secara *detail*; 2. Perlu ditambahkan di bagian AMDAL bagaimana perizinan untuk pembuangan limbah dan izin lainnya yang diperlukan sebelum pelaksanaan konstruksi; dan 3. *Project* ini sedikit berbeda dari Medan, berdasarkan hasil RDS, *demand* sangat besar, maka perlu dibuat konfigurasi ruang	Tim Konsultan akan menindaklanjuti seluruh masukan dan perbaikan yang disampaikan di dalam rapat.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
		conference aplikasi Zoom	lingkup dan simulasi skema AP dari *project* ini sehingga *project* ini bisa membiayai dirinya sendiri.	
45	Rapat Pembahasan Laporan Akhir NAHP-PPP	Selasa, 15 Juni 2021 Mercure BSD City, Tangerang dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Dokumen Laporan Akhir harus disampaikan sesuai tata tertib administrasi; 2. AMDAL *project cost* yang menjadi *government support* tetap disebutkan dalam laporan dan digambarkan biaya-biayanya; 3. Terkait dengan denda secara *major output* yang diberikan, tim teknis dan konsultan berusaha dan berkomitmen akan menyelesaiakan sesuai jadwal; dan 4. Jika konsultan telah menyelesaikan pekerjaan, PUPR akan tetap melakukan *outstanding* isu yang ada di OBC sesuai peraturan KPBU.	1. Untuk OBC Medan akan dibuat sesuai masukan; dan 2. Untuk OBC Daan Mogot dokumennya agar disesuaikan dengan kajian yang baik dan sudah direviu oleh banyak pihak
46	*One-on-One Meeting* KPBU Rusun Desa Besar Medan	Rabu, 16 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. *One-on-One Meeting* ini menindaklanjuti FGD *Market Sounding* KPBU Rusun Desa Besar Medan yang telah dilaksanakan pada 11 Juni 2021; 2. Rapat dihadiri oleh Direktorat Pembiayaan Pelaksanaan Perumahan, PT. Amythas sebagai Konsultan, dan perwakilan PT. Hutama Karya sebagai pihak Badan Usaha yang menyatakan ketertarikan akan Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan melalui *Letter of Interest* (LoI); dan 3. Diskusi dilakukan mengenai *detail* teknis proyek, skema KPBU, skema pengembalian investasi, serta peran Badan Usaha jika turut andil dalam pengadaan hunian rusun MBR ini.	1. PT. Hutama Karya menyatakan siap untuk ikut andil sebagai kontraktor, namun masih sangsi dalam andil *maintenance* dan *operation*; dan 2. Perlu dicari dan dihubungi lagi investor-investor yang biasa bergerak di bidang *maintenance* dan *operation* untuk penyempurnaan dan implementasi proyek.
47	Rapat internal Pembahasan PSN	Kamis, 17 Juni 2021 Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan	1. Pengadaan lahan yang dibutuhkan dalam proyek KPBU disusun dengan menyesuaikan pada rencana tahapan KPBU, pengadaan lahan dilakukan oleh Dirjen Perumahan sesuai dengan tugas Permen PUPR 2/2021 2. Lokasi proyek ini bersifat strategis, terdapat dua jalan arteri di Bandung yaitu Jalan A.H. nasution dan Jalan Soekarno Hatta	Akan dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Fasilitas Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung pada tanggal 25 Juni 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
		Pembiayaan Perumahan	yang merupakan koridor transit utama yang menghubungkan wilayah barat kota bandung dengan wilayah timur kota bandung 3. Berdasarkan hasil telaah kriteria strategis terkait skema dan pendanaan, proyek ini disusun menggunakan skema KPBU dan berdasarkan kajian OBC pengembalian investasi menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan *Availibility Payment* (AP) dari PJPK dimulai dari rentang waktu 2025-2036 senilai nilai 168Milyar-287Milyar dengan asumsi kenaikan 5% setiap tahun	
48	Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN	Kamis, 17 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Rapat bertujuan untuk membahas progres penyusunan SP Proyek KPBU KIPP-IKN. Sebelumnya Dit. PPP telah membuat konsep *draft* SP dan sudah dibahas pada tanggal 28 Mei 2021 bersama DJP; 2. Dit. PPP akan menyusun SP berjalan paralel dengan arahan para pimpinan; 3. Sesuai kesepakatan rapat pada tanggal 28 Mei 2021, kawasan perumahan yang akan diKPBU-kan sampai dengan tahun 2024 adalah KIPP Cluster 1A; 4. Ditargetkan SP sudah final pada Desember 2021. Namun jika bisa selesai pada Q3 2021, maka Q4 dapat dimanfaatkan untuk pengajuan PDF, dan harapannya di Q1 2022 sudah mulai OBC; 5. Perumahan untuk TNI dan POLRI kemungkinan besar akan disediakan dengan skema KPBU juga, hal ini dikarenakan anggaran APBN belum tersedia untuk membiayai semua sektor di IKN; 6. Penyelesaian dokumen SP harus selesai ketika UU dan peraturan turunan terkait IKN terbit, hal ini bertujuan untuk tidak menyalahi aturan; dan *Outstanding issues* harus disertakan di dalam SP pada bab terakhir.	Diharapkan dapat menyampaikan hal-hal terkait proyek KPBU pada TA. 2022 termasuk proyek KPBU KIPP-IKN pada forum *Trilateral Meeting* tanggal 22 Juni 2021.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
49	Rapat Lanjutan Penyiapan Permohonan *Project Development Facility* (PDF) Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur	Kamis, 17 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Kebutuhan konfirmasi awal AP untuk kelengkapan pengajuan PDF Proyek KPBU Karawang Spuur, *breakdown* CAPEX dan OPEX dari konsultan telah dikaji kembali oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 2. Hasil perhitungan CAPEX oleh konsultan menggunakan asumsi potensi hunian 1.450 unit. Dimana nilai besaran CAPEX dengan tanpa *escalation* Rp525 M, dan nilai CAPEX dengan *escalation* Rp544 M. Sedangkan perhitungan AP yang diinginkan menggunakan asumsi potensi hunian 1.175 unit; 3. Total perhitungan sementara simulasi AP Proyek KPBU Karawang Spuur sebesar Rp135 M per tahun dengan total nilai *Project Cost* Rp641 M (akan dibuatkan kembali versi 1.175 unit hunian); 4. Pembayaran AP akan dilakukan secara bulanan, setelah ada penilaian pemenuhan parameter SLA yang dilakukan oleh BLU; 5. Karawang Spuur tidak ada rencana pembebasan lahan; dan Perlu dipastikan kembali dalam hal konsistensi angka pada setiap kelengkapan dokumen-dokumen PDF.	Konsultan akan melengkapi dan memperbaiki kelengkapan dokumen pengajuan PDF sesuai dengan masukan-masukan dalam diskusi
50	FGD Analisis Kebutuhan Penyediaan Rusun Berorientasi Transit pada Rencana Perpanjangan MRT Koridor Lebak Bulus – Rawa Buntu	Jumat, 18 Juni 2021 Hotel Aviary Bintaro dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Diskusi dikerucutkan pada kebijakan penyelenggaraan Kawasan TOD yang tengah dikembangkan serta analisis kebutuhan perumahan di Tangerang Selatan sebagai salah satu potensi lokasi pendirian Rusun MBR dengan skema KPBU; 2. Isu strategis yang di*highlight* pada rapat ini adalah terdapat *demand* yang signifikan oleh MBR terhadap kebutuhan perumahan. Dimana ketersediaan hunian banyak, tetapi tidak untuk MBR (semakin terpinggirkan); 3. Kebijakan, Strategi, dan Regulasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah mendukung dan tersediaan untuk pengembangan Rusun di daerah dengan Konsep TOD terutama di Lebak Bulus; dan Isu terkait lahan adalah tidak banyak lahan yang tersisa yang dapat dimanfaatkan. Di lain sisi membeli lahan dari masyarakat sangat mahal sementara APBD Kota Tangerang Selatan terbatas.	1. Dua lokasi yang sudah direncanakan sebagai Kawasan TOD adalah Jurang Mangu dan Rawa Buntu, dan Bapak Menteri PUPR berkenan TOD Rawa Buntu dijadikan sebagai *pilot project;* dan 2. Lokasi prioritas terpilih perlu dikaji lebih dalam lagi sebagai bagian dari *screening,* termasuk pemilihan stasiun.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
51	FGD Identifikasi Potensi KPBU Rusun di Kawasan Transit pada Rencana Angkutan Umum Massal Depok Parung	Senin, 21 Juni 2021 The Margo Hotel Depok dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	Rapat bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi Kawasan TOD di Depok-Parung yang dapat diintegrasikan dengan Rusun MBR: 1. Beberapa titik lokasi sudah ditinjau dengan hasil: ● Stasiun Depok dan Pondok Cina berpotensi TOD namun hasil kajian menjadi layak bersyarat karena kawasan-kawasan tersebut sudah padat terbangun; ● Area Jatijajar Depok berpotensi TOD namun dengan basis BRT bukan rel; ● Bogor pengembangan TOD belum berjalan, masih banyak kendala di pembangunan jalur transportasi seperti jaringan LRT yang baru terbangun sampai Cibubur; Untuk penyediaan hunian pada TOD masih perlu penguatan dari segi regulasi, penyesuaian RDTR dan RTRW, dan perlu juga distrukturkan KPBU yang tepat.	1. Dari data potensi pengembangan TOD yang sudah ada, akan diidentifikasi lahannya. Jika tidak memungkinkan, akan dilakukan rekonsiliasi lahan. Dalam hal ini diperlukan peran dari Pemerintah Kota Depok; 2. Akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut: ● Identifikasi lahan terhadap data potensi pengembangan TOD yang sudah ada di Kota Depok; *Mapping stakeholders* lebih detail.
52	Tindak Lanjut FGD Identifikasi Potensi KPBU Rusun di Kawasan Transit pada Rencana Angkutan Umum Massal Depok Parung	Senin, 21 Juni 2021 The Margo Hotel Depok dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Terdapat perbedaan antara potensi Kawasan TOD di Tangerang Selatan dan Depok. TOD Tangerang Selatan adalah Proyek lintas Provinsi, sehingga PJPK bisa BPTJ atau Pemkot Tangerang Selatan. Untuk Kawasan TOD Depok-Parung sepenuhnya milik Pemkot Depok, sehingga penentuan PJPK lebih jelas yaitu Pemkot Depok. 2. Saat ini perencanaan perumahan di Depok masih bersifat tersebar dan belum mengikuti perencanaan TOD; Dari segi angkutan massal, perencanaan MRT Lebak Bulus-Rawa Buntu lebih terencana, sedangkan Depok belum menentukan basis angkutan umum massalnya.	1. PUPR harus segera mengambil keputusan, lokasi mana yang paling tepat untuk selanjutnya ditindaklanjuti di dalam Studi Pendahuluan; 2. Akan lebih difokuskan ke Tangerang Selatan; dan Konsultan akan menyampaikan hasil studi dari data sekunder pada Minggu ke-1 Bulan Juli 2021.
53	Rapat Pembahasan Dukungan Penjaminan Proyek KPBU Rusun Daan Mogot	Rabu, 23 Juni 2021	1. Dalam penyempurnaan FBC pada proyek Rusun Desa Besar Medan perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan PT PII terkait struktur penjaminannya; 2. Saat ini masih dalam proses KSPI untuk lahan, sehingga akan mempengaruhi *timeline*, namun kemungkinan risiko yang ada akan lebih kecil dibanding jika melalui pengadaan hak; dan	1. Dit. PPP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera memutuskan mengenai skema pengembalian, dan waktu untuk pembentukan BLU beserta PJPKnya; Tim Konsultan melalui Dit. PPP akan segera menyampaikan *screening form* kepada PT PII.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
		Melalui *video conference* aplikasi Zoom	Perlu segera dilakukan proses pengajuan penjaminan untuk proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan ini.	
54	FGD Analisis Kebutuhan Rusun Negara KIPP-IKN	Kamis, 24 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Tujuan rapat adalah pembahasan penyiapan proyek KPBU Perumahan di KIPP-IKN dalam rangka penyusunan Studi Pendahuluan (SP); 2. Beberapa isu yang menjadi bahan diskusi: a. Terkait paket-paket KPBU, harus segera ditentukan *level of agreement* yang akan ditawarkan kepada investor, apakah berupa klaster-klaster perumahan atau beberapa kawasan utuh; b. Perlu diadakan pengkajian ulang mengenai pembagian tanggung jawab yang jelas kepada investor dalam pembangunan terutama yang bersifat lintas sektor seperti transportasi dan pelayanan lain; dan RUU IKN masih dalam tahap penandatanganan, maka penyusunan SP dilakukan secara paralel, diharapkan bulan Agustus sudah dapat dilakukan *groundbreaking*.	1. *Critcal* dan *outstanding issue* yang telah dibahas perlu dijabarkan pada SP; 2. Perlu adanya pertimbangan atas model yang paling sesuai dan *feasible* bila ruang lingkup KPBU Perumahan dijadikan KPBU per Kawasan dengan sarana dan prasarana lengkap; dan 3. Pada September 2021 sehingga sebelum 2022 sudah bisa mengajukan PDF ke Kemenkeu; dan Diharapkan DJPI tidak selesai menyusun SP untuk Zona 1A KIPP saja, namun berlanjut ke Zona 1B, 2 dan 3.
55	Rapat Pembahasan Tata Cara Pemanfaatan BMN untuk Penyediaan Sarusun SKBG melalui Skema KPBU	Kamis, 24 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Pemanfaatan BMN berupa tanah untuk pembangunan rusun dilakukan dengan cara sewa atau KSPI; 2. SKBG diterbitkan sebagai tanda bukti kepemilikan sarusun di atas lahan BMN berupa tanah dengan cara sewa; 3. SKBG diterbitkan setelah pembangunan selesai, kemudian dapat dijadikan jaminan fiducia; dan SKBG diterbitkan instansi teknis pemerintah setempat.	Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai: 1. Mekanisme *bundling* pada FBC; 2. SKBG melalui skema KPBU; SKBG untuk penanganan kawasan permukiman kumuh.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
56	Rapat Pembahasan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan	Senin, 28 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Kebutuhan air di proyek ini adalah 1300 m^3/hari. Terkait dengan hal tersebut PT PDAM sudah menyatakan kesanggupan mereka untuk menyediakan air di lokasi proyek; 2. Mekanisme penanganan persampahan rusunawa dilakukan secara mandiri oleh pengelola bersama penguhuni rusun, baik dari segi pemilahan, pemanfaatan sampai dengan pengolahan sampah. Hal ini sejalan dengan harapan Dinas Persampahan Kota Medan yang menyatakan bahwa kondisi TPA di lokasi sudah *over capacity*; 3. Diharapkan terdapat akses jalan lingkungan yang dapat dilewati selain jalan Yos Sudarso sebagai antisipasi sistem jaringan jalan; 4. Proyek ini akan menggunakan dua drainase yaitu drainase kota dan drainase tol. Terkait drainase tol, Jasamarga menyarankan untuk kelebihan air agar ditampung terlebih dahulu sebelum dialirkan langsung melalui drainase jalan tol mengingat drainase jalan tol sudah cukup tua sehingga khawatir akan *over capacity*. Disamping itu perlu juga diperhitungkan tentang siklus banjir 10 tahunan yang mungkin akan menyebabkan tanggul Sungai Deli jebol; 5. PT PGN dan Pertagas sudah menyatakan siap untuk menyuplai kebutuhan gas di lokasi proyek; 6. PT PLN siap untuk menyediakan kebutuhan listrik di kawasan proyek. Terkait dengan rencana dibangunnya panel surya, PT PLN juga siap untuk melaksanakan ekspor impor daya yang proses dan tata caranya akan mengikuti Peraturan Menteri ESDM No 49 Tahun 2018.	2. Konsultan akan melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1) Merinci kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang proyek Rusun Desa Besar Medan untuk selanjutnya diserahkan kepada Walikota Medan agar bisa dimasukkan dalam RPJMD; 2) Menghitung kapasitas kebutuhan gas dan menyusun rencana pengembangan pipa gas bumi di lokasi proyek; 3) Menghitung dan membandingkan biaya yang paling murah antara membangun pipa melalui jalur kereta api dengan melalui *flyover*; 4) Melengkapi dokumen ANDALALIN kepada Dishub Kota Medan untuk dirincikan indikasi permasalahan lalu lintas yang timbul dan mitigasi yang dilakukan di kawasan rusunawa; 5) Menyampaikan *timeline* pembangunan proyek ke PT PLN Utara untuk memastikan pada tahapan konstruksi perlu/tidaknya penggunaan daya energi listrik; 6) Dit. PPP akan menyurati PDAM Tirtanadi Kota Medan untuk dilakukan survei lapangan dengan menyesuaikan kondisi pandemi.
57	Rapat Finalisasi Pembahasan Usulan Fasilitas Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina	Senin, 28 Juni 2021 Teleconference melalu Zoom Meeting	1. Berikut ini hasil review kelengkapan dokumen untuk pengajuan PSN oleh Kemenko: a. Secara umum sudah memenuhi kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional, namun beberapa hal belum terpenuhi seperti dasar hukum dalam kreteria dasar	a. Perubahan nama proyek menjadi KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung (menghapus kata sewa). b. Penyiapan kelengkapan dokumen usulan PSN Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
	Harapan Kota Bandung		dan keselarasan antar sektor infrastuktur dalam Kriteria strategis. b. Perlu mengecek rencana tata ruang wilayah, penetapan lokasi, dan isu yang mungkin muncul c. Mempersiapkan rencana aksi untuk mendorong percepatan persetujuan PDF 2. Terdapat poin penting dari Kemenko: a. Surat pengajuan diajukan dari Menteri ke Menteri. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen dan dukungan oleh Menteri, sesuai dengan PP No 42 Tahun 2021, setiap 3 bulan PJPK wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kemenko dan Kemenko akan melaporkan setiap 6 bulan kepada Presiden b. Apabilla ingin mengajukan proyek ini pada Gelombang 1 perlu memiliki deadline minggu ini sudah terdapat pengajuan yang ditanda tangani Menteri.	Harapan Kota Bandung dan surat Menteri untuk disampaikan dalam Ratas c. Percepatan penyampaian usulan PSN kepada KPPIP, Kementerian Ekonomi d. Mendiskusikan secara internal terkait pengajuan PSN secara kesatuan, dan perlu menambahkan lokus lokasi.
58	Rapat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan NAHP-PPP	Kamis, 1 Juli 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Rapat bertujuan menindaklanjuti Rapat Finalisasi NAHP-PPP tanggal 15 Juni 2021, yang mana pada rapat tersebut disepakati bahwa Konsultan mendapatkan perpanjangan masa kontrak s.d 15 Juli 2021 untuk mencapai output yang diharapkan; 2. Pada periode kontrak, salah satu hal yang menjadi hambatan adalah kesulitan berkoordinasi antara Tim Teknis dan Tim Konsultan; 3. Terhitung tanggal 1 Juli 2021, masih ada 14 hari lagi menuju batas waktu pengumpulan terakhir. Dengan demikian, masih terdapat peluang mencapai *output* yang diharapkan dengan menyusun rencana kerja.	Berdasarkan *cecklist output* pada *drive sharing*, maka terdapat dokumen yang harus dilengkapi oleh Tim Konsultan, seperti: pelengkap OBC *Financial Model*, *Basic Design* dan FBC, TOR untuk AMDAL, ANDALALIN, dan LARAP.

Pelaksanaan Kegiatan KPBU Perumahan

(Undangan dari Luar)

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
1	Diskusi Pemanfaatan Skema KPBU untuk Penyediaan Perumahan di Ibu Kota Negara	Senin, 19 April 2021 *Video Conference via Zoom Meeting*	1. Kebutuhan perumahan di IKN tidak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran pemerintah mengakibatkan KPBU menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat menangani keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan perumahan. Kondisi ini memunculkan peluang bagi sektor swasta untuk ikut berkontribusi melalui skema KPBU dari tahap konstruksi, operasional dan pemeliharaan; 2. Berdasarkan arahan presiden, bahwa rencana penyediaan perumahan akan terbagi menjadi 20% pendanaan APBN dan 80% dengan pendanaan KPBU; 3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR berkewajiban menyediakan rumah bagi Menteri/Pejabat Tinggi Negara sampai Jabatan Fungsional sejumlah 199.677 orang. Penyediaan rencananya akan dilakukan bertahap, dan tahapan pemindahan ini masih menjadi bahan diskusi di Satgas IKN bidang Perumahan; dan 4. Pada prinsipnya pengembang berminat dengan pengembangan Ibu Kota ini dengan beberapa syarat, diantaranya: keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengembang serta kepastian hukum dari Pemerintah sebagai Pemrakarsa proyek KPBU ini.	Pelaksanaan Rapat Penyusunan SP Proyek KPBU di IKN sektor perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
2	Rapat Pembahasan Klarifikasi Permohonan *Project Development Facility* (PDF) Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	21 April 2021 *Teleconference* melalui *Zoom Meeting*	1. PDF akan menjawab isu pemilihan skema pengembalian investasi dan stuktur organisasi. Karena PDF akan memfasilitasi kajian FBC yang di dalamnya akan mengkaji lebih detail dan menghasilkan skema pengembalian investas yang tepat dengan proyek ini. 2. Dari tiga opsi pilihan skema pengembalian investasi yang ditawarkan dalam OBC (AP, User Charge dan HAM), AP (Avaibility Payment) adalah pilihan terbaik, karena merupakan opsi yang paling memungkinkan diminati oleh pasar. Sedangkan user charge akan memunculkan risiko	1. Akan dilakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai rencana penunjukan/pembentukan BLU terkait pengelolaan pendapatan sewa rusun sebagai PNBP 2. Akan dilakukan rapat pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Bandung terkait: - Penyediaan Air - Penyediaan Listrik

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			bagi BUP dan skema HAM (Hybrid Annuity Model) belum memiliki payung hukum. 3. Opsi struktur tidak direkomendasikan ditetapkan sekarang, karena dalam proyek KPBU keputusan akhir ada pada kajian FBC. 4. Beberapa masukan pada rapat penerbitan konfirmasi pendahuluan bersama DJA tanggal 19 April 2021 yakni: a. Kemampuan fiskal pada tahun 2022 akan terbatas mengingat adanya proyek rusun lainnya, kebijakan efisiensi anggaran, kebijakan penurunan angka defisit anggaran ke angka 3%. b. Tarif sewa rusun terdiri dari biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan. Diperlukan konfirmasi tarif sewa yang akan dikenakan apakah untuk menutup keseluruhan atau sebagian (tarif atas, menengah, bawah), kaitannya dengan adanya potensi sebagian biaya ditanggung oleh Kementerian PUPR.	- Perijinan - Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Susun
3	Rapat Pembahasan Potensi Skema KPBU dalam Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Jumat, 30 April 2021 Melalui *video conference*	1. Tujuan rapat ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait rencana pembangunan IKN yang akan dilaksanakan melalui KPBU; 2. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, bahwa penyiapan proyek IKN khususnya penyusunan SP akan dibiayai dengan VGF oleh Kementerian Keuangan. Namun, hal ini akan dikonfirmasi kembali oleh Bappenas kepada Kementerian Keuangan terkait waktu VGF ini dapat digunakan. Dan untuk fasilitas PDF akan disediakan oleh Kementerian Keuangan; 3. Untuk sektor perumahan, DJPI telah berkoordinasi dengan DJP terkait kebutuhan perkiraan investasi di KIPP sebesar 12.67T. Dengan demikian, dalam rangka penyiapan KPBU Rumah Susun di IKN, DJPI membutuhkan sebesar 15M di tahun 2022 untuk OBC-FBC-*Financial Close*. SP ditargetkan selesai tahun ini;	Bappenas akan membuat BA kegiatan rapat ini

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			4. Dengan adanya kebutuhan proyek ini dalam waktu singkat, maka DJPI membutuhkan langkah-langkah percepatan dalam menyiapkan proyek ini agar pada tahun 2023 sudah clear dan siap membangun; 5. Terdapat kemungkinan PJPK pembangunan proyek IKN adalah Badan Otorita; dan Perlu dipikirkan skema pengembalian investasi apakah akan murni APBN melalui AP atau *user charge* dari ASN yang menghuni.	
4	Rapat Koordinasi Pemindahan ASN ke IKN Baru – Aspek Infrastruktur	Rabu, 5 Mei 2021, Melalui *video conference*	1. Pembangunan belum bisa dilakukan pada 2021. Agar diberikan dana PDF ke PUPR sebagai PJPK untuk mempersiapkan skema build-lease-transfer sehingga tahun 2022 bisa berjalan hunian. Spread beban APBN bisa lebih murah. OPEX dan CAPEX sudah termasuk; dan Masih terbuka pemilihan kementrian lembaga yang akan dipindahkan di tahap awal yang bisa mendukung roda pemerintahan agar lebih baik. Sehingga perlu assessment kembali K/L mana yang paling dibutuhkan.	1. Perlu ada penyesuaian kembali terhadap presentase jumlah pemindahan ASN selagi baru memulai, sehingga ini juga jadi pertimbangan terhadap *timeline* tahap pemindahan; dan Penggunaan lokasi pembangunan gedung perkantoran yang kemudian bisa kita pakai *sharing*.
5	Tindak Lanjut Konsultan Penyusunan OBC Rusun Karawang Spuur	Rabu, 5 Mei 2021 Melalui *video conference*	1. Kualitas PT Taram sebagai konsultan proyek Karawang Spuur sangat tidak dianjurkan untuk dilanjutkan hal ini dapat dilihat dari catatan hasil dokumen CPS dan RDS yang masih memiliki banyak kekurangan, seperti analisis RDS yang kurang komprehensif dan penentuan nilai AP yang belum memperhitungkan konsep *time value of money* sehingga terindikasi *undervalue*; 2. Saat ini posisinya ada di tahap mulai terminasi dimana *written notice of termination sedang disiapkan. Dalam written notice* of termination, diberi jangka waktu untuk berakhirnya kontrak. Pada jangka waktu tersebut, PUPR masih bisa meminta konsultan untuk menyiapkan Dokumen Persiapan Proyek (DPP); 3. Ada 3 *output* yang menjadi pertimbangan untuk dibayarkan, dimana 2 dokumen berstatus diterima (I*nception Report* dan CPS) sementara satu dokumen berstatus tidak diterima dan butuh perbaikan (RDS). Untuk dua dokumen dengan	1. Melihat kemungkinan apakah dengan dokumen-dokumen yang sudah diterima dapat dilanjutkan untuk proses pengajuan PDF; 2. Pada 11 Mei 2021 tim Kemenkeu akan menyampaikan kelengkapan-kelengkapan apa yang harus disiapkan oleh tim teknis KPBU untuk pengajuan PDF serta implikasi ke project timeline secara keseluruhan jika bisa menggunakan PDF; dan 3. World Bank meminta kronologis dan dampak apabila tim konsultan diberlakukan terminasi sebagai justifikasi dalam surat yang akan dikirimkan oleh Kemenkeu ke World Bank di minggu ini.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			status diterima akan diproses untuk pembayaran, sementara untuk dokumen RDS akan ditolak dan tidak akan ada lagi proses perbaikan. Konsekuensi dari ditolaknya dokumen RDS artinya tim teknis KPBU tidak dapat menggunakan dokumen tersebut; 4. Opsi utama/prioritas adalah untuk segera masuk ke jalur *Project Development Facility* (PDF) dengan melihat opsi usulan dari DPP dengan harapan hal ini dapat mempercepat proses perumahan Karawang Spuur secara keseluruhan; dan Target Bulan Mei untuk menyelesaikan NOL ke World Bank untuk terminasi	
6	Rapat Pembahasan Lintas Sektor Penyiapan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Jumat, 7 Mei 2021 Melalui *video conference*	1. Saat ini PUPR sedang melakukan uji lahan untuk pembangunan istana negara, *drainase* utama, dan *intake* di Sungai Sepaku; 2. Kemungkinan adanya pergeseran jalan dari yang direncanakan semula karena arahan Bapak Presiden untuk mencari alternatif konstruksi jalan untuk memotong waktu perjalanan dari Kota Balikpapan ke Istana presiden di IKN; dan Untuk gedung kementerian dan lembaga diproses secara APBN sesuai arahan Menteri PUPR sementara untuk perumahan secara KPBU.	1. Bappenas meminta agar PUPR mengecek dan meng-*update* total biaya pendanaan untuk IKN; 2. Bappenas meminta dokumen teknis seperti SHP dan peta pembangunan sehingga datanya bisa disinkronkan dengan data Bappenas; 3. Menetapkan kriteria untuk Go dan No-Go pada analisis infrastruktur keseluruhan; 4. Merinci daftar proyek IKN untuk fungsional tahun 2024; dan Menentukan kebutuhan minimal infrastruktur dan skema pembiayaannya.
7	Rapat Koordinasi Konfirmasi Infrastruktur PUPR IKN dengan Skema KPBU	Senin, 10 Mei 2021. Melalui *video conference*	1. Terdapat 3 pembagian kawasan perencanaan IKN, yaitu: a. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas 6.569 ha; b. Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) dengan luas 56.181 ha; c. Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KPIKN) dengan luas: 256.000 ha. 2. Pelaksanaan tahap penyiapan proyek KPBU IKN Baru akan didukung fasilitas *Project Development Facility* (PDF) dari Kementerian Keuangan. DJPI perlu mempersiapkan Studi	1. Masing-masing Ditjen akan berkorespondensi dengan unit kerja terkait di DJPI untuk *updating* daftar proyek bidang PUPR terkait IKN Baru yang menggunakan skema KPBU; 2. Penyusunan daftar proyek bidang PUPR terkait IKN Baru dengan skema KPBU harus selesai disusun sebelum penyusunan Pagu Anggaran pada bulan Juni; dan

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			Pendahuluan dan Dokumen Permohonan PDF untuk proyek-proyek IKN yang didanai melalui skema KPBU; dan Proyek infrastruktur IKN sektor Perumahan masih perlu kajian ulang karena muncul tambahan kebutuhan perumahan untuk TNI dan POLRI sehingga mempengaruhi *basic design* yang sudah ditawarkan. Terdapat beberapa alternatif yaitu pendanaan melalui APBN, dengan skema KPBU, atau pengadaan oleh swasta.	Penyusunan Studi Pendahuluan proyek infrastruktur IKN dengan skema KPBU harus selesai di tahun 2021 agar tahap penyiapan dan transaksi dapat selesai di Kuartal IV Tahun 2022.
8	Pembahasan Keberlanjutan Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur	Selasa, 11 Mei 2021. Melalui *video conference*	2. Kelanjutan Konsultan dan aktivitas terkait konsultan: a. RDS tidak dapat diterima karena hasilnya jauh dari kebutuhan; b. Dokumen CPS dapat digunakan oleh Kementerian PUPR dan proses adminisrasi/pembayaran akan menjadi tanggung jawab Kemenkeu. 3. Pengajuan PDF: 2. Surat permohonan fasilitas sedang dalam proses penyusunan. Persyaratan pengajuan PDF tidak mensyaratkan sudah dapat konfirmasi AP terlebih dahulu baru PDF, namun paling tidak sudah mengirimkan, lalu diikuti dengan pengajaun PDF; 3. Studi Pendahuluan telah disusun tahun 2020 dan telah disempurnakan melalui fasilitas dari Kementerian Keuangan; 4. Laporan hasil konsultasi publik telah disusun oleh PJPK; 5. Informasi terkait AP: ● Sudah disebutkan dalam dokumen CPS yang disusun oleh konsultan namun Kemenkeu masih mempertimbangkan apakah ini *reasonable* karena tidak mengikuti *financial model* yang biasa dilakukan. ● Terkait kapasitas fiskal PUPR, anggaran Ditjen Perumahan akan ada pemanfaatan *multiyear* kontrak yg akan berakhir. Diharapkan dalam dokumen pendahuluan akan ada disebutkan bahwa	1. Perlu koordinasi lebih lanjut mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan PDF; dan Untuk konfirmasi AP perlu menyebutkan kemampuan fiskal masing-masing PJPK

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			akan menggunakan pemanfaatan *multiyear* kontrak ini dengan asumsi anggaran tidak berubah. Sehingga dapat dipastikan anggarannya tersedia. 6. Dokumen rencana pengadaan lahan, berdasarkan UU 20/2011 dan PMK 180/2020, untuk tanah BMN tidak memerlukan dokumen rencana pengadaan lahan; 7. Dokumen penetapan Tim KPBU sudah diterbitkan melalui Kep Dirjen PI Nomor 27/KPTS/DP/2021; dan Surat pernyataan PJPK sedang dalam proses internal PJPK.	
9	Rapat Koordinasi Proyek KPBU Sektor Perumahan IKN	Senin, 17 Mei 2021, *Video Conference via Zoom Meeting*	a. Dalam perencanaan awal pembiayaan IKN pemenuhan pembiayaan akan memanfaatkan KPBU sebesar 54,2%. Investasi Swasta dan BUMN sebesar 26,4% dan APBN Rupiah Murni sebesar 19,4%; b. Kemampuan pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR pada sektor hunian Pejabat Negara, ASN, TNI/POLRI sebesar 73.026 unit hunian KIPP dan 126.651 unit hunian Non KIPP; c. Terdapat perbedaan asumsi tipologi (jumlah lantai) dan luas unit (per kelas jabatan) antara Masterplan IKN dan UDD. Jika mengikuti Masterplan IKN maka jumlah perumahan yang dibangun akan berkurang dan sisanya dapat dibangun di Non KIPP. Namun hingga tahun 2024, infrastruktur pendukung hanya dibangun di KIPP; d. Masih terdapat area yang diperuntukkan untuk perumahan ASN yang belum *clean and clear*; e. Usulan Pokja Hankam agar kantor dan rumah POLRI/TNI dibangun dan didanai dari belanja PUPR. Namun, agar dananya dapat disediakan *on-top* dan tidak dari PN Pelayanan Dasar; f. Kementerian PPN/BAPPENAS mengusulkan menggunakan skema PDF untuk penyiapan OBC, FBC dan pendampingan transaksi; dan g. Jadwal hingga tahun 2024, dengan proses *business as usual*, konstruksi dapat dilakukan pada akhir tahun 2022.	Kementerian PPN/BAPPENAS akan menyelenggarakan rapat tindak lanjut Koordinasi Proyek KPBU Sektor Perumahan IKN dengan K/L terkait.
10	Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi	Jumat, 21 Mei 2021	1. KPBU Rusun Desa besar ditargetkan akan melakukan *market sounding* pada Bulan Juni 2021. Berdasarkan RDS,	1. Mengkonfirmasi progres permohonan PDF pada proyek KPBU Perumahan

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
	Perkembangan Status Proyek KPBU	Melalui *video conference* aplikasi Zoom	proyek ini akan fokus pada bentuk rusun sewa, dengan skema pengembalian AP. 2. Skema SKBG akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait isu yang berkembang dalam rencana penerapan *mix income* di proyek KPBU. 3. Fasilitas pedampingan Rusun Daan Mogot akan berakhir pada Bulan Juni 2021. Jika Pemda DKI selaku PJPK ingin melanjutkan pedampingan lanjutan, maka harus melakukan permohonan terlebih dahulu ke Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. 4. Arahan Pemerintah saat ini memfokuskan pada proyek-proyek KPBU *existing* yang memiliki status *financial closes* sebelum tahun 2024 dan menunda sementara pencarian potensial proyek KPBU Perumahan berikutnya.	2. Melakukan *update timeline*, progress, dan isu yang berkembang sesuai pada Proyek KPBU yang berada di Pipline Project. 3. Penyesuaian rencana kegiatan terhadap penyesuaian Lampiran E RKP tahun 2022
11	Rapat Pembahasan Proyek KPBU Infrastruktur PUPR di IKN	Senin, 24 Mei 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Akan diadakan *trilateral meeting* antara Menteri PUPR, Kemenkeu dan Bappenas mengenai penyiapan IKN terkait skema pembiayaan untuk penyiapan tanah, sehingga perlu koordinasi dan meminta informasi terakhir dari masing-masing unit organisasi kementerian PUPR; dan 2. IKN sektor Perumahan akan mengikuti arahan dan menyesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur sektor keciptakaryaan di area 1A IKN.	Pada 25 Mei 2021 diharapkan sudah terdapat *list* proyek-proyek yang akan dilaksanakan dengan KPBU
12	Pembahasan Hasil *Review* OBC Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan	Rabu, 9 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Terkait pengalihan lahan pada proyek ini akan di *update* dimana kepemilikan lahan diketahui milik dari Ditjen Bina Marga yang akan dialihkan kepada Ditjen Perumahan; 2. Perlu dilakukan studi mengenai lingkungan dan sosial dan perlu disesuaikan berdasarkan studi tersebut agar tidak menimbulkan gangguan sosial di masa depan; 3. PDPPI Kemenkeu belum menerima dokumen OBC Proyek KPBU Rusunawa Desa Besar Medan. Terkait proyek ini sangat penting untuk mempersiapkan fasilitas pendukungnya seperti air, listrik, pengelola sampah dan jalan akses agar manfaat ekonominya lebih besar; 4. VGF dan AP masih dalam tahap diskusi di internal Kemenkeu namun bila melihat regulasi saat ini belum	Akan diadakan *Market Sounding* Proyek KPBU Rusunawa Desa Besar Medan pada tanggal 11 Juni 2021 untuk melihat potensi minat pasar terhadap proyek ini.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			dimungkinkan. Diharapkan tim Konsultan untuk saat ini menghilangkan opsi *Hybrid* (VGF dan AP) dalam skema pengembalian proyek ini dengan mencari potensi skema pengembalian lain yang ada; 5. Kelembagaan perlu ada kelembagaan yang mendukung agar proyek ini berjalan dengan menggunakan *Hybrid Annuity Model* (HAM). Perlu diperhatikan apakah fasilitas pendukung pada proyek ini apakah termasuk lingkup BUP atau tidak apabila tidak termasuk dalam lingkup BUP. PJPK dapat berkoordinasi dengan para *stakeholder* terkait seperti PLN dan PDAM; 6. Tim konsultan hanya merekomendasikan AP untuk skema pengembaliannya dengan membandingkan beberapa opsi skema pengembalian; 7. Tim konsultan mengkaji beberapa opsi pendanaan mulai dari *user charge* berdasarkan hasil RDS, VGF, dan AP. Untuk opsi pendanaan yang *feasible* adalah model AP dengan masa konsesi 15 tahun; 8. SPM Proyek KPBU Rusunawa Desa Besar Medan sedang disusun. Terkait penyedia listrik dan air sudah dikoordinasikan dengan PDAM dan PLN. Dari aspek teknis akan berkoordinasi dengan PT KAI dikarenakan dalam menghubungkan air dan listrik tersebut ke Rusunawa terdapat rel kereta api; dan 9. Kajian hukum dan kelembagaan terkait lahan BMN perlu di-*clear*-kan apabila masih ada sengketa dan perlu ditambahkan pada kajian hukum mengenai mekanisme KSPI dan *detail* proses jadwal KSPI-nya.	
13	Rapat Pembahasan Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI	Rabu, 9 Juni 2021 Ruang Rapat Komisi V DPR RI	1. Pagu indikatif PUPR Rp 100,64 Triliun, untuk Cipta Karya Rp 12,5 Triliun, Perumahan Rp 5 Triliun dan DJPI Rp 250 Milyar). 2. DJPI telah melaksanakan pendandatanganan kerja sama proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau, dan KPBU SPAM Regional Karian Serpong. 3. Pada tahun 2021 Renja DJPI 273 Miliar (*Recofusing* menjadi Rp 232 Miliar), Renstra 2022 Rp 383 Miliar dan	1. Terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2021 Komisi V DPR RI meminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun anggaran 2021 2. Komisi V DPR RI sepakat untuk menyesuaikan rincian program, dan menyempurnakan RKA/K-L Eselon 1

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
			kebutuhan dana Rp 400 Miliar, pagu indikatif Rp 250 Miliar. 4. Dana yang dikelola DJPI terdapat tiga akun sebagai berukit: a. BA.033: gaji, operasional, kebijakan; BP2BT, penyiapan KPBU, FLPP, SSB & SBUM b. BA.999.03: KPR dan FLPP c. BA.999.07: KPR, SSB, dan SBUM 5. Realisasi bantuan pembiayaan perumahan per 8 Juni 2021: FLPP 75.342 Unit (Rp 8.198 Miliar), SSB 126.745 Unit (Rp 91.792 juta), SBUM 28.157 unit (Rp 114.572).	dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022 sesuai saran komisi V DPR
14	Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Perumahan IKN	Rabu, 16 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Sebagai tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, khususnya di bidang perumahan IKN; 2. Bahasan utama pada rapat ini adalah: a. konfirmasi kepastian jumlah ASN-TNI-Polri yang akan pindah ke IKN b. jumlah hunian berdasarkan bentuk dan luasan unit c. Jumlah pemindahan per tahun pentahapan untuk keperluan *basic design* yang sedang disusun oleh Direktorat Rusun, Ditjen Perumahan. 3. Telah dilakukan *excersie* jumlah pemindahan ASN/TNI/POLRI pada keempat alternatif rencana hunian, Ditjen Perumahan sendiri mengusulkan untuk memilih altermatif 2, dimana sampai Tahun 2024, pemindahan yang dapat tertampung adalah sebanyak 11.243 orang; 4. Terdapat data jumlah yang lebih mendetil untuk Kemhan-TNI dan Polri, dimana diharapkan hingga Tahun 2024 personel Kemhan-TNI yang pindah sebanyak 23.860 personel dan Polri 6.722. Dengan pembagian di KIPP sebanyak 19.383 personel. Jumlah ini cukup jauh berbeda dari data yang selama ini dipegang oleh Tim Satgas; dan 5. Terkait kebutuhan Kemhan, perlu diperhatikan banyak fasilitas-fasilitas militer Kemhan yang harus dibangun sebelum bisa sepenuhnya pindah ke IKN.	Diperlukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Keputusan terkait pertimbangan untuk mengubah hunian Menteri-Eselon I yang semula Rumah Tapak menjadi Rusun; 2. Sinkronasi data kesesuaian tipe-tipe dan zonasi hunian untuk TNI dan Polri berdasarkan standard yang ada; dan 3. pengkajian ulang mengenai rencana pemanfaatan lahan lain (contoh: zona 1B).

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
15	Rapat Evalusai Sakip	Kamis - Jumat, 17 - 18 Juni 2021 Bogor	1. Pada Evaluasi Sakip 2020, Dit.PPP mengevaluasi PDPP dan di evaluasi oleh Setditjen 2. Nilai Evaluasi Sakip 2020 (sementara) Dit PPP sebesar 79.21 meningkat dari nilai Sakip tahun 2019 sebelumnya sebesar 78.45 3. SOP atau tatalaksana terkait pengukuran kinerja, monitoring dan evalusi, serta pengumpulan data perlu disiapkan sebagai dokumen pendukung dalam peningkatan nilai sakip 4. Dalam melakukan evaluasi Sakip, seorang evaluator harus melakukan penilaian tiap komponennya dengan menyertakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Sehingga dalam pemberian nilainya berdasarkan bukti data dan perhitungan sebagai pendukung	1. Akan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sakip DIT. PPP Tahun 2020; 2. Meningkatkan kualitas Lakin 2021 DIT.PPP dengan mengacu pada komponen kriteria penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Sakip.
16	Undangan Rapat Pembahasan Lanjutan Kegiatan perbaikan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Pembiayaan Perumahan	Senin, 21 Juni 2021 Dari BPSDM, melalui *teleconference*	1. Kedudukan KPBU masih dalam satu ekosistem pembiyaan perumahan, dan perlu dijelaskan perbedaan pembiayaan perumahan konvesional dan dengan skema KPBU. 2. Pengawasan dan pengendalian dan/atau monitoring dan evaluasi terkait pembangunan proyek perumahan, karena adanya perubahan-perubahan kebijakan baik dari sisi administrasi maupun teknis perlu ditambahkan dalam materi pelatihan, sehingga dnegan harapan setelah mengikuti pelatihan peserta dapat mengetahui peran Pemerintah Daerah dan melakukan monitoring dan veluasi terhadap proses pembiayaan proyek. 3. Pada pendalaman materi pertanahan dapat berkonsultasi dengan badan Pertanahan terkait, mengenai proses perolehan hak atas tanah, dan persyaratan terkait bagaimana kondisi yang boleh diagungkan sebagai kredit.	1. Trim Pusbangkom JPW akan mendetailakn substansi materi sesuai dengan hasil penyepakatan dan NSPK yang berlaku 2. Rapat pembahasan selanjutnya diagendakan untuk membahas konsep modul dan bahan tayang dengan narasumber dan pihak unit organisasi terkait
17	Rapat Pembahasan mengenai keikutsertaan perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida) dalam pelaksanaan penjaminan proyek-	Selasa, 23 Juni 2021 Dari OJK, melalui *teleconference*	1. Jamkrida Provinsi memberikan jaminan bagi UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun belum *bankable*, sedangkan Jamkrida Nasional memberikan penjaminan bagi proyek nasional.	diskusi lebih lanjut dengan Direktorat Bina Kontruksi dengan melibatkan asosiasi perusahaan penjaminan

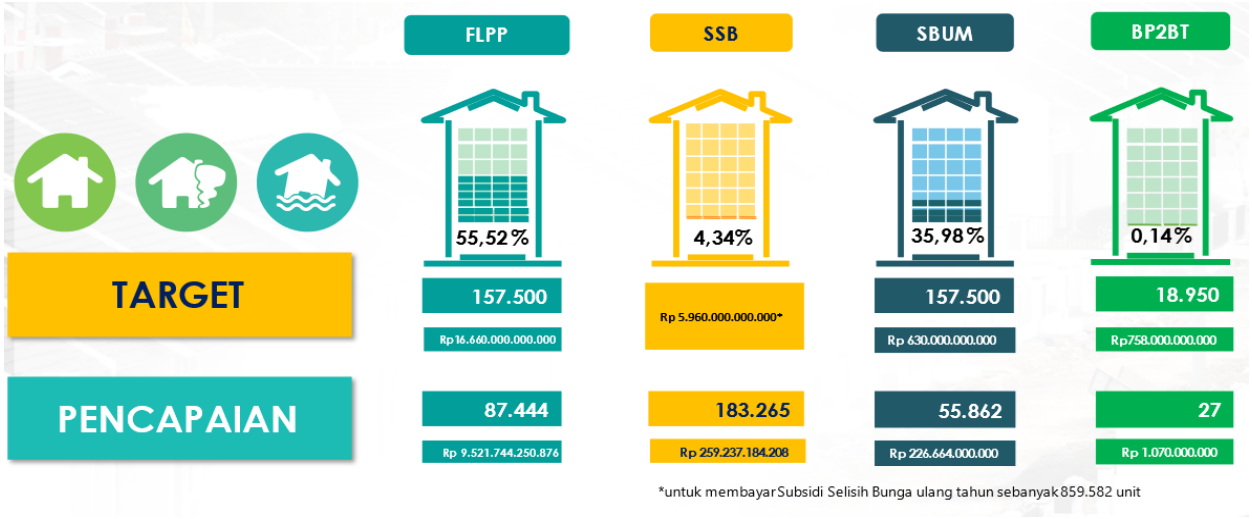
NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
	proyek di bawah Kementerian PUPR		2. Terkait perusahaan penjaminan diharapkan terdapat rekomendasi secara berkala dari OJK mengenai keadaan, rating dan kesehatan perusahaan penjamin. 3. Perusahaan penjamin perlu memiliki kredibilitas bagus, rating bagus dan yang utama kapasitas, agar jaminan dapat dicairkan apabila terdapat kondisi satu dan lain hal. 4. Rekomendasi dari OJK diharapkan tidak hanya diawal, namun secara berkala dan *up to date* agar memastikan kondisi terakhir dan *track record* perusahaan	
18	Rapat Pembiayaan dan Investasi IKN	Senin, 28 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Rapat Pembiayaan dan Investasi IKN membahas tentang: a. Penyiapan materi investasi dengan Arab Saudi yang rencananya akan dilakukan pada awal Juli 2021; b. *Updating* rencana penggunaan APBN dan KPBU untuk Infrastruktur IKN; c. Rencana pemaketan proyek untuk swasta. 2. Pada perencanaan infrastruktur zona 1A IKN tahun 2021-2024 direncanakan terdapat 3 (tiga) paket rancangan: a. Paket 1 terdiri dari pengembangan kawasan *Central Business District* (CBD) dikaitkan dengan pembangunan kawasan Perkantoran Pemerintahan; b. Paket 2 terdiri dari pengembangan hotel, restoran, dan *café* pada kawasan Permukiman atau Perkantoran; c. Paket 3 terdiri dari pengembangan sarana/prasarana pendidikan serta rumah sakit di area permukiman ASN zona 1B. (perluasan permukiman ASN ke 1B karena tidak memungkinkan kapasitas di 1A). 3. Terdapat diskusi mengenai pembagian tata guna lahan serta tantangan konsep pembangunan yang dijelaskan oleh Ketua Tim Kolaborasi Rancang Kota KIPP-IKN; 4. Paparan rapat diakhiri dengan penjelasan paket-paket KPBU (terdiri dari 6 paket) oleh di Tim Satgas Perumahan IKN.	1. Paket 3 yang kemungkinan akan menggunakan lokasi 1B, akan disampaikan kawasan yang sudah *clear and clean*; 2. Perencanaan pembangunan sudah sesuai standar perumahan dan sesuai arahan dari Presiden terdapat transformasi bermukim dan kota *green*, *smart*, dan *international*; 3. Terdapat wacana tentang penawaran pembangunan tahap 2 namun penawaran tahap 2 kepada investor swasta dirasa terlalu cepat sehngga dirasa jangan dilakukan dahulu; 4. Akan diadakan pembicaraan terkait regulasi luasan perumahan untuk Pejabat dan ASN.

NO	URAIAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POIN-POIN PENTING	TINDAK LANJUT
19	Rapat Progres Pelaksanaan Kegiatan PPP	Senin, 28 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Telah dibuat *sharing drive* untuk pengumpulan seluruh data dan laporan untuk seluruh kegiatan; 2. PT. Amythas diberikan tambahan waktu selama dua minggu untuk menyelesaikan OBC KPBU Desa Besar Medan dan Daan Mogot; Pihak Dit. PPP selaku Tim Teknis diharapkan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mempercepat kebutuhan koordinasi konsultan dan Pemerintah Provinsi.	1. Diharapkan PT. Amythas dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebelum waktu perpanjangan yg disetujui, yaitu dua minggu sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 berakhir; 2. Seluruh laporan dan data yang diperlukan dan diserahkan untuk dapat dilengkapi dan di*upload* pada *drive* bersama sebelum jatuh tempo.

02 Kemudahan dan Bantuan

Kemudahan dan Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat memiliki rumah antara lain Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Progres Capaian Produk Kemudahan dan Bantuan



Gambar Progres Capaian Produk Kemudahan dan Bantuan

Pada tahun Q1 2021, FLPP memiliki target penyaluran sebanyak 157.500 unit, target SBUM pada 2021 sebanyak 157.500 unit, dan untuk BP2BT memiliki target sebanyak 18.950 unit. Sedangkan untuk SSB pada tahun 2021 ini merupakan pembayaran untuk tahun sebelumnya (menggulung) dengan besar target penyaluran sebesar Rp5.960.000.000.000,00.

Pencapaian hingga 30 Juni 2021 untuk program FLPP adalah sebanyak 87.444 unit atau sebesar Rp9.521.744.250,876 capaian SBUM sebanyak 55.862 unit atau sebesar Rp226.664.000.000 dan BP2BT sebanyak 27 unit atau sebesar Rp1.070.000.000. Penyaluran SSB ulang tahun hingga 30 Juni 2021 adalah sebanyak 183.265 unit atau sebesar Rp259.237.184.208.

Perkembangan Regulasi

Perkembangan regulasi terkait Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan:

NO	URAIAN	STATUS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	**BP2BT /HMF** Rapermen PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	• Telah dilakukan 3 kali pembahasan draft RapermenPUPR dengan tim penyusun RapermenPUPR; • Penyampaian kembali penjelasan perubahan izin prakarsa melalui ND No. 205/ND/Pp/2021 tanggal 28 Mei 2021; • Telah dilakukan Konsultasi Publik RapermenPUPR pada hari Rabu, 9 Juni 2021; dan	• Menunggu perubahan izin prakarsa dari Biro Hukum; • Pengaturan syarat ketersediaan jaringan sumber air minum atau air bersih pada perumahan; • Pengaturan pemanfaatan rumah bekas;	• Penyempurnaan RapermenPUPR; • Pembahasan terkait lampiran pada RapermenPUPR

		• Telah dilakukan pembahasan mekanisme pelibatan BPR dan BPRS dengan melibatkan OJK pada 22 Juni 2021	• Dalam PMK 168, bantuan pemerintah dalam bentuk uang disalurkan melalui bank/pos penyalur. Bank dalam definisi adalah bank umum	
2.	**KPR Siap Bangun**	• Telah dilakukan 3 kali pembahasan skema KPR Siap Bangun melibatkan PPDPP, Perum Perumnas dan BP Tapera; • Pelaksanaan KPR Siap Bangun di 2021 menggunakan perubahan PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019	• Belum disepakati terkait muatan pengaturan dalam RapermenPUPR	• Akan dilakukan diskusi dengan Perbankan penerbit KPR Inden pada hari Senin, 12 Juli 2021
3.	**Kepesertaan FLPP di BP Tapera**	• Telah dilakukan *Kick Off Meeting* Tim Penyusun RapermenPUPR pada 6 Mei 2021; • Telah dilakukan 2 kali pembahasan RapermenPUPR melibatkan tim penyusun RapermenPUPR; • Telah diterbitkan SK Tim Penyusun RapermenPUPR melalui SK Dirjen PI No 25/KPTS/Dp/2021 tanggal 27 April 2021	• Masih memerlukan pembahasan RapermenPUPR	• Penyempurnaan RapermenPUPR; • Akan dilakukan pembahasan dengan tim penyusun RapermenPUPR pada Jumat, 9 Juli 2021.

Kegiatan Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan

Kegiatan pelaksanaan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang dilakukan selama Bulan April 2021 – Juni 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Rapat Pembahasan Skema Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Melalui Lembaga Pembiayaan	Senin, 5 April 2021 Aviary Hotel Bintaro, Tangerang Selatan, Banten dan melalui *video conference*	1. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengusulkan untuk menaikkan indeks penghasilan sampai dengan 49% dan skema pembiayaan perumahan melalui lembaga pembiayaan tidak hanya skala mikro saja sehingga masa tenor pinjaman dapat lebih dari 5 (lima) tahun 2. PT SMF mengusulkan: a. Untuk ke depan bantuan pembiayaan perumahan dapat bermitra juga dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena memiliki kemampuan menjangkau masyarakat sektor informal lebih luas b. Pembayaran angsuran dari masyarakat penerima BP2BT kepada perusahaan pembiayaan melalui rekening *escrow* PT SMF c. Penambahan kriteria persyaratan kelompok sasaran yaitu kolektibilitas oleh Debitur kepada Perusahaan Pembiayaan lancar minimal selama sebulan d. SMF bertugas untuk menguji kelayakan debitur, sedangkan Satker memastikan ketepatan sasarannya e. SMF melakukan *collateral due diligence refinancing* kepada Perusahaan Pembiayaan untuk persyaratan *refinancing* f. Pencairan dana BP2BT oleh SMF dan Satker dilakukan secara bersama-sama g. Penalangan dana oleh Perusahaan Pembiayaan sebesar 99% di bulan pertama setelah akad sebagai syarat untuk mendapatkan *refinancing* dari SMF.	1. PT SMF akan melakukan pengecekan terhadap pembatasan penghasilan dan potensi pasar pemanfaatan BP2BT 2. Melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan perusahaan asuransi terkait dengan komponen biaya asuransi yang dimasukkan ke dalam suku bunga 3. Melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia terkait dengan jaringan infrastruktur pengelolaan kredit/pembiayaan skala nasional.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			3. Kriteria persyaratan Perusahaan Pembiayaan berkinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk tetap dicantumkan 4. Diusulkan komponen biaya asuransi ketika akad untuk dimasukkan ke dalam komponen RAB.	
2	Rapat Pembahasan Skema KPR Siap Bangun	Selasa, 6 April 2021 Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, DJPI dan melalui *video conference*	1. Perlu dicermati kembali apakah skema KPR Siap Bangun merupakan KPR inden atau kredit konstruksi 2. PPDPP telah melakukan diskusi dengan PT SMF, dengan hasil sebagai berikut: a. Mengusulkan pencairan tahap pertama paling tinggi senilai lahan/kaveling agunan (30%), dan sisanya 70% pada saat rumah siap huni, sebagai mitigasi risiko pembangunan rumah b. Mengusulkan akad KPR Siap Bangun dilakukan 1 (satu) kali dan pencairan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap pencairan mensyaratkan jaminan sbb: 1) Jaminan pencairan tahap 1: IMB Induk/PBG kolektif dan PKS antara Bank dan Developer; 2) Jaminan pencairan tahap 2: Berita Acara Serah Terima (BAST), Akta Pengalihan Hak Tanggungan (APHT), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) dan ID struktur c. KPR Siap Bangun memiliki kesamaan karakteristik dengan produk KPR Syariah *Musyarakah Mutanaqishah* Inden (MMQ-Inden) dimana ketentuan jual beli disepakati di awal dan kepemilikan obyek berpindah dari pengembang ke MBR secara berangsur. 3. Perlu penegasan obyek yang diperjualbelikan pada saat masa inden, baik dari sisi dokumen maupun nilai	PPDPP akan melakukan kajian komprehensif skema KPR Siap Bangun dengan melibatkan DJPI, Kementerian Keuangan, perbankan, dan pengembang.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			4. Penggunaan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang sudah atas nama MBR, yang di atasnya akan dibangun rumah yang diperjanjikan, serta kelengkapan PSU pada kaveling sebagai salah satu syarat pencairan.	
3	Rapat Penyaluran Q1 KPR Bersubsidi dan BP2BT	Rabu, 7 April 2021 Swiss-Belhotel Serpong Intermark Indonesia dan melalui *video conference*	1. Diharapkan bank dapat turut serta memastikan kualitas bangunan rumah KPR Bersubsidi 2. Pencapaian Q1 dapat menjadi *early warning system* agar pelaksanaan penyaluran pada periode berikutnya tetap sesuai dengan prognosa yang sudah disusun 3. Pengajuan tagihan pembayaran SBUM untuk segera diproses, tidak ditunda dan tidak ditumpuk agar tidak mengganggu *cash flow* pengembang dalam pembiayaan perumahan 4. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perbankan dalam pelaksanaan penyaluran KPR Bersubsidi dan BP2BT pada Q1, yaitu antara lain: a. Ketersediaan alokasi dana DIPA tidak cukup b. Menyelesaikan data debitur di SIKASEP Tahun 2020 terlebih dahulu c. Penyesuaian sistem *host to host* antar pihak bank dengan BLU PPDPP d. Perubahan pimpinan pejabat yang berwenang untuk pengajuan tagihan pembayaran kepada PPDPP e. Permasalahan data pada sistem DUKCAPIL yang membutuhkan waktu 1 bulan yang menyebabkan calon debitur mengundurkan diri f. Khusus pada Bank NTT, akibat bencana alam badai seroja, saat ini akses dan listrik masih terbatas sehingga proses pemberkasan dan pencairan FLPP tertunda 5. Terkait BP2BT, calon debitur belum tertarik karena mengeluhkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga FLPP.	1. Bank Pelaksana akan segera mengajukan tagihan pembayaran kepada FLPP yang sudah akad kredit yang tertunda akibat permasalahan ketersediaan dana DIPA 2. Bank Pelaksana optimis bahwa penyaluran FLPP pada Q2 akan tercapai *on the track* sesuai dengan prognosa 3. Bank akan segera mengajukan tagihan pembayaran SBUM kepada Satuan Kerja 4. Penyaluran FLPP diharapkan akan tercapai sepenuhnya selambatnya pada Q3 5. Bank dan Pengembang agar memberikan hak akses yang sama kepada calon debitur untuk memperoleh program BP2BT. Jangan terlalu memfokuskan atau memprioritaskan pada FLPP.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
4	Rapat Expose Kualitas Konstruksi KPR Bersubsidi dan BP2BT	Rabu, 7 April 2021 Swiss-Belhotel Serpong Intermark Indonesia dan melalui *video conference*	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi selanjutnya dapat disediakan format yang sederhana dan standar sehingga dalam pelaksanaan di lapangan dapat diisi dengan lebih mudah dan cepat 2. Anggota tim yang melakukan monitoring dan evaluasi disusun yang memiliki pemahaman terkait konstruksi/fisik rumah subsidi 3. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada lokasi perumahan selanjutnya dapat mengikutsertakan pengkaji teknis/manajemen konstruksi sekaligus juga dengan membawa hasil SIMAK pengecekan agar dapat dicocokkan bersama di lapangan 4. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak dapat memberikan teguran langsung kepada pengembang. Namun, teguran bisa dilakukan dari Satker dan PPDPP kepada Bank Pelaksana. Kemudian dari Bank Pelaksana disampaikan kepada pengembang 5. Agar penyampaian laporan tidak menuliskan tulisan yang bersifat penafsiran, sajikan informasi dalam kondisi apa adanya yang berpedoman kepada ukuran/dimensi standar sesuai persyaratan teknis 6. Hasil dari tinjauan fisik/konstruksi dan PSU dari Tim Pemantauan dan Evaluasi agar disampaikan secara langsung kepada pengembang perumahan terkait yang melibatkan pihak bank 7. Kegiatan rapat koordinasi untuk penyampaian hasil dari kunjungan lapangan kepada pihak pengembang dan bank juga dapat mengikutsertakan dari unsur Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bina Konstruksi, para pakar/narasumber yang memiliki kemampuan untuk memberikan koreksi dan rekomendasi persyaratan teknis rumah sederhana sehat.	1. Laporan hasil tinjauan fisik/konstruksi rumah dan PSU yang sudah dilakukan pada tahap pertama akan disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal. Agar mendapatkan arahan lebih lanjut 2. Pelaksanaan rapat koordinasi kepada para pengembang dan bank pelaksana untuk menyampaikan hasil dan temuan di lapangan sekaligus menginformasikan panduan yang benar dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat sesuai aturan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
5	Diskusi Terbatas Penyaluran Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Melalui Lembaga Pembiayaan	Senin, 12 April 2021 Hotel Gran Mahakam dan melalui *teleconference* via Zoom	1. SMF mengusulkan konsep pembiayaan perumahan berbasis *refinancing* dengan usulan *pricing* 12%; 2. Diusulkan persyaratan Kesehatan Perusahaan Pembiayaan (PP) menjadi PK-3 untuk meningkatkan jumlah PP yang dapat ikut serta; 3. Jika biaya asuransi dimasukkan ke dalam RAB, maka dalam penyalurannya disalurkan 100% ke debitur dan ditarik kemudian untuk pembayaran premi asuransi; 4. Pemberian bantuan berbasis keluarga untuk suami dan istri, jika anak yang mengusulkan, NIK akan tercatat sebagai penerima bantuan dan tidak dapat mengajukan bantuan lagi di kemudian hari; 5. Dana bantuan dari Satker dikirimkan ke debitur terlebih dahulu; 6. Eksekusi kredit macet dilakukan berdasarkan prinsip lelang, pengembalian lelang atas dana subsidi pemerintah menjadi hak debitur; 7. Asuransi kredit sebagai pelengkap asuransi jiwa dan kebakaran diperlukan apabila tidak ada jaminan/agunan; dan 8. Ketentuan mengenai agunan kredit tidak diatur di dalam Permen PUPR, sebaiknya diatur oleh PP. Permen PUPR hanya mengatur mengenai alas hak yang sah sebagai syarat BP2BT.	Pihak SMF akan menindaklanjuti besaran *pricing* dengan PP secara terpisah.
6	Rapat Pembahasan Suku Bunga *Housing Microfinance* Melalui Lembaga Keuangan Bank	Rabu, 14 April 2021 Melalui *teleconference* via Zoom	1. Suku Bunga Rata-Rata Tertimbang dan Suku Bunga Dasar Kredit merupakan dua hal yang berbeda. Suku Bunga RRT merupakan suku bunga riil yang sudah disampaikan kepada debitur, sedangkan SBDK terbentuk dari biaya dana simpanan, biaya *overhead*, dan *profit margin* namun belum termasuk premi risiko; 2. Rata-rata margin untuk SUN 10 tahun saat ini berkisar 6,5% sampai dengan 6,6%; 3. Berdasarkan data satu tahun terakhir, secara agregat Suku Bunga RRT untuk KPR berkisar antara 8,2%-8,3%; 4. Untuk tipe rumah sampai dengan 21 rata-rata tertimbangnya sebesar 9,7%-10,5%, sedangkan	Data agregat suku bunga rata-rata tertimbang yang dibagi per jenis pembiayaannya dari Bank Indonesia dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan suku bunga kredit mikro perumahan BP2BT.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			untuk tipe rumah 22 – 70 rata-rata tertimbangnya sebesar 7,9% - 9% tergantung dari kelompok bank; 5. SBDK per Februari 2021 untuk KPR berkisar antara 7%-14%, sedangkan untuk kredit mikro lebih tinggi berkisar antara 8%-17%; 6. Kondisi pandemi menyebabkan risiko kredit meningkat, sehingga perlu mengkonfirmasi ke perbankan apakah untuk premi risiko kredit mikro dan kredit KPR meningkat; dan 7. Tidak ada standar acuan terhadap premi risiko dari OJK, namun umumnya apabila MBR yang sudah lama menjadi nasabah pada suatu bank premi risikonya akan lebih kecil daripada MBR yang sebelumnya belum pernah memiliki rekening di bank tersebut. Selain itu dari sisi pekerjaan MBR yang bekerja di sektor informal dan formal akan berbeda premi risikonya, masing-masing bank memiliki standar berbeda.	
7	Rapat Pembahasan Kepesertaan Penerima Manfaat FLPP di BP Tapera	Kamis, 15 April 2021 Melalui *teleconference* via Zoom	1. Usulan struktur organisasi telah disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan oleh Komisioner BP Tapera. Terdapat 84 SDM profesional PPDPP akan masuk ke dalam BP Tapera dan akan dilakukan proses *assessment*; 2. Perlu dilakukan FDG dengan melibatkan Biro Hukum Kementerian Keuangan, Ditjen. Anggaran dan BKF untuk membahas Pasal 25 ayat (3) PP No. 47 Tahun 2019 terkait nomenklatur dana murah jangka panjang “dapat” dihentikan apabila BP Tapera melembaga atau beroperasi penuh; 3. Sistem eFLPP dapat langsung dipindahkan dan digunakan oleh BP Tapera, namun sistem SiKasep, SiKumbang dan SiPetruk tergantung dari Kementerian PUPR apakah akan dimanfaatkan di BP Tapera atau di BP3; 4. Terkait dengan pemindahtanganan aset BMN menurut PP No. 28 tahun 2020 dapat dihibahkan, dijual (lelang) dan lainnya. Dalam hal aktiva tidak berwujud yang dicatat sebagai aset BLU dapat	1. Diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait penafsiran Pasal 25 ayat (3) PP No. 47 tahun 2019, khususnya kaitannya dengan penghentian dana FLPP, dengan melibatkan Biro Hukum K/L; 2. Akan dibahas lebih lanjut terkait dengan aset BMN melibatkan Biro-Biro yang terkait dengan BMN baik di Kementerian Keuangan maupun Kementerian PUPR, baik untuk aset yang akan langsung digunakan *(plug and play)* atau aset lain yang tidak secara langsung mendukung penyaluran FLPP; dan 3. Masih diperlukan pengaturan lebih detail terkait mekanisme, pengendalian, kerja sama, dan pengaturan lainnya dalam RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima Manfaat FLPP di BP Tapera.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			mengikuti mekanisme PP No. 28 tahun 2020, penghapusan aset BLU diserahkan kepada PUPR, untuk sistem/software mekanisme paling tepat adalah dihibahkan; 5. Mekanisme kerjasama BP Tapera dengan lembaga penerbit kredit harus tetap diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR karena pokok-pokok dari FLPP merupakan tugas dari Kementerian PUPR sehingga BP Tapera dalam membuat SOP dapat mengacu kepada Peraturan Menteri ini; dan 6. Perlu perhatian khusus terhadap MBR yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum (UM) dicatatkan sebagai peserta Tapera, tidak wajib membayar iuran, atau bisa dicatatkan sebagai peserta mandiri secara sukarela sampai dengan didaftarkan oleh pemberi kerja.	
8	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Jumat, 16 April 2021 Melalui *teleconference* via Zoom	1. *Task Team Leader* NAHP mengusulkan: a. agar waktu penyelesaian menjadi 5-6 bulan mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah yang bervariasi b. persyaratan bukti alas hak tanah yang sah dapat berbentuk girik/AJB atau surat pernyataan pejabat setempat, serta tidak diperlukan agunan/jaminan c. periode min. menabung agar tidak lebih dari 3 bulan dan minimum uang muka ditingkatkan menjadi 10% d. minimum luas bangunan ditingkatkan menjadi >36m2 agar menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas 2. Periode konstruksi 1 bulan didasari oleh produk SMF sejenis (PNM *Home Upgrading*) yang mensyaratkan waktu penyelesaian 14 hari dan besaran pembiayaan lebih rendah (Rp 10 juta); 3. BP2BT tidak mensyaratkan agunan/jaminan, tetapi harus memiliki bukti alas hak tanah yang sah;	1. World Bank secara prinsip menyetujui penyaluran BP2BT menggunakan lembaga keuangan bank dan non bank, terkait *pricing* diharapkan diserahkan kepada mekanisme pasar; 2. Terkait jenis alas hak yang sah sebagai persyaratan perbaikan swadaya BP2BT sedang menunggu konfirmasi dari Kementerian ATR/BPN; dan 3. SMF dan perusahaan pembiayaan akan menyampaikan hasil diskusi terkait besaran suku bunga atau *pricing* yang disepakati pada minggu ke-3 April.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			4. Pemerintah membebaskan masyarakat untuk memilih lembaga penyalur BP2BT baik melalui bank atau perusahaan pembiayaan; dan 5. Saat ini luasan maksimum rumah untuk perbaikan swadaya sama dengan pemilikan rumah yaitu 36 m^2 dan belum dapat ditingkatkan.	
9	Rapat Pembahasan Penyelesaian SBUM pada PT. Baruga Cipta Lestari	Jumat, 16 April 2021 Melalui *teleconference* via Zoom	1. Data dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tercatat sebanyak 46 orang yang terdaftar sebagai debitur dari PT Baruga Cipta Lestari yang terdiri dari 12 debitur KPR SSB dan 34 debitur KPR FLPP; 2. Debitur sebagai mana angka 1 dapat dirinci yaitu sebanyak 8 debitur KPR SSB sudah dicairkan SBUMnya, 6 debitur KPR FLPP melakukan akad sebelum PKS SBUM ditandatangani, dan 32 debitur (4 KPR SSB dan 28 KPR FLLP) tidak tercatat dalam data Satuan Kerja untuk pencairan SBUM dan perlu untuk diklarifikasi; 3. Dikonfirmasikan oleh PT Baruga Cipta Lestari bahwa pada saat akad calon debitur hanya membayar uang muka sebesar Rp 3.825.000.- dari total keseluruhan Rp 7.385.000.- dengan keyakinan kekurangan Rp 4.000.000,- akan terbayarkan saat SBUM dicairkan oleh Bank BRI; 4. Bank BRI Cabang Maros telah melakukan wawancara kepada *user* dari PT Baruga Cipta Lestari dan berdasarkan hasil wawancara bahwa *user* membayarkan uang muka seluruhnya yaitu sebesar Rp 7 juta sehingga dianggap *user* tidak mengajukan permohonan SBUM karena sanggup untuk membayar keseluruhan uang muka; 5. Pembayaran SBUM kepada PT Baruga Cipta Lestari tidak dapat dilakukan di tahun 2021 dikarenakan permasalahan perihal pencairan SBUM kepada PT Baruga Cipta Lestari baru diketahui pada awal tahun 2021, dimana komponen anggaran tahun 2021 sudah ditetapkan dan tidak dialokasikan untuk kurang bayar SBUM di tahun 2020;	Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, dan internal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			6. Ditekankan kembali bahwa SBUM merupakan sebuah komplemen dari program KPR Bersubsidi yang harus diberikan kepada MBR terlepas dari butuh atau tidaknya MBR tersebut.	
10	Rapat Pembahasan Skema Penyaluran Bantuan Pembiayaan Melalui Lembaga Pembiayaan	Kamis, 22 April 2021 Mercure Tangerang BSD City dan melalui *video conference*	1. Perlu dipastikan kembali terkait kesesuaian batasan dan indeks penghasilan kelompok sasaran untuk setiap zona wilayah; 2. Perlu ditegaskan kembali apakah perbaikan rumah swadaya termasuk dalam barang dan/atau jasa yang dimaksud Pasal 1 ayat 1 POJK No. 35/2018; 3. Disepakati bahwa perubahan skema pembiayaan rumah oleh PP yang semula hanya perbaikan swadaya, menjadi pemilikan, pembangunan dan perbaikan rumah swadaya; 4. Terkait persyaratan kelompok sasaran perbaikan swadaya (Pasal 9 ayat 3e), perlu ditetapkan indikator pengecekan kondisi rumah; 5. *Pricing* yang diusulkan oleh SMF adalah sebesar 11,75% dengan pengikatan hak tanggungan dan tidak termasuk biaya asuransi jiwa dan kebakaran; 6. Disepakati penghapusan syarat menambah tabungan jika dana swadaya tidak mencukupi pada pembangunan/perbaikan rumah swadaya; dan 7. Terkait perubahan-perubahan selain yang diajukan dalam Ijin Prakarsa, agar menyiapkan argumen dan narasi pada lampiran konsepsi secara detail.	1. Penggunaan definisi Perusahaan Pembiayaan dan barang dan/atau jasa dalam konteks pembiayaan perumahan akan didiskusikan dengan OJK; 2. SMF akan membuat simulasi biaya asuransi dan dampaknya terhadap *pricing*; 3. Pembiayaan rumah oleh perusahaan pembiayaan menjadi 3 skema (pemilikan, pembangunan dan perbaikan swadaya); 4. Rapat akan dilanjutkan pada minggu depan (tentatif tanggal 26-30 April 2021).

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
11	Rapat Evaluasi Kualitas Konstruksi KPR Bersubsidi dan BP2BT Tahun 2021	Senin, 26 April 2021 Royal Padjadjaran Hotel, Bogor, Jawa Barat dan melalui *video conference*	1. Persyaratan kelaikan fungsi bangunan terdiri dari: a. Persyaratan dokumen administratif bangunan gedung b. Persyaratan tata bangunan c. Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang mengacu kepada persyaratan rumah sederhana sehat sesuai Peraturan Menteri PUPR No 5/PRT/M/2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gedung dan Keputusan Menteri Kimpraswil No 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) 2. Kegiatan tinjauan fisik/konstruksi dilakukan pada sampel 56 (lima puluh enam) lokasi kawasan perumahan. Hasilnya menunjukkan masih ditemukan ketidaksesuaian dimensi terbangun dari komponen struktural rumah terhadap persyaratan rumah sederhana sehat; 3. Pertemuan evaluasi ini adalah sebagai *early warning system* bagi para pengembang dalam menyediakan perumahan yang mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah; 4. Diharapkan ada komitmen pengembang dalam menindaklanjuti mitigasi rumah subsidi yang terlanjur sudah dibangun sehingga rumah-rumah tersebut dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan.	Hasil Tinjauan Fisik/Konstruksi Rumah dan PSU Program KPR Bersubsidi & BP2BT akan disampaikan pada Bank Pelaksana, Asosiasi Pengmbang Perumhan dan Pengembang.
12	Rapat Pembahasan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	Jumat, 30 April 2021 The Grantage Hotel & Sky Lounge, Tangerang, Banten dan melalui *video conference*	1. Definisi barang dan/atau jasa yang dapat dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan (PP) pada Pasal 1 ayat (1) POJK No. 35/2018 mencakup seluruh barang dan jasa termaksud rumah dan jasa tukang; 2. Amanat Pasal 2 ayat (1) POJK No. 35/2018 bertujuan memisahkan kegiatan usaha yang bersifat produktif dan konsumtif, sedangkan KPR termasuk dalam kegiatan usaha Pembiayaan Multiguna (konsumtif) karena pembiayaan	1. SMF dan PP melakukan pertemuan kembali untuk memastikan komitmen PP dalam menjalankan program HMF BP2BT; 2. Rapat terpisah untuk membahas kinerja BP2BT dengan *Task Team Leader* NAHP akan dilaksanakan minggu ke-1 Mei 2021; 3. Diskusi lebih lanjut melibatkan Kementerian ATR/BPN, untuk mengkonfirmasi penggunaan bukti alas hak yang sah;

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			diberikan kepada debitur untuk konsumsi dan bukan modal usaha (produktif); 3. Skema KPR oleh PP yang bekerjasama dengan SMF termasuk dalam kategori Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Pasal 3 ayat (3) huruf b); 4. Urgensi persyaratan `PP memiliki PKS dengan PP Sekunder Perumahan` dalam RapermenPUPR adalah untuk menekan *rate* suku bunga PP di angka 11,5% dengan adanya *cost of fund* yang rendah dari SMF; 5. Usulan SMF mengenai `penyediaan dana melalui pengerahan dan pemupukan dana dari Pembiayaan Sekunder Perumahan` tidak dimasukan dalam RapermenPUPR disebabkan mekanisme tersebut sepenuhnya menjadi wewenang SMF dan PP; dan 6. Perlu dicermati kembali biaya pengurusan Sertifikat Hak Milik dalam komponen biaya pembangunan dan perbaikan rumah swadaya, mengingat syarat bukti alas Hak yang sah minimal dalam proses peralihan (Pasal 19 ayat 3) dimana sudah selesai proses pembayaran ke BPN.	4. Akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan status RapermenPUPR menjadi perubahan atau pencabutan; dan 5. Rapat pembahasan RapermenPUPR akan dilanjutkan minggu ke-2 Mei 2021.
13	Rapat Pembahasan Penyelesaian Dampak Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Debitur KPR Bersubsidi	Selasa, 4 Mei 2021 Qubika Boutique Hotel, Tangerang, Banten dan melalui *video conference*	1. Bank BTN melaporkan 323 debitur KPR Bersubsidi dan Komersial yang terdampak bencana di Provinsi NTT, dimana 40 rumah rusak parah, 133 rusak sedang, dan 150 rusak ringan; 2. Kerusakan rumah KPR Bersubsidi akibat bencana alam di Provinsi NTT paling banyak terjadi di bagian atap dan plafon; 3. Skema Restrukturisasi untuk debitur KPR Bersubsidi: a. hanya dapat dilakukan apabila terdapat permohonan dari debitur dan setelah bank melakukan penilaian kredit debitur; b. berupa penundaan pokok dan/atau bunga selama 12 bulan dan sisa kredit diangsur selama jangka waktu kredit tanpa penambahan tenor sehingga pengembalian	1. Bank Pelaksana akan melakukan pendataan dan pelaporan kondisi debitur KPR Bersubsidi kepada DJPI setiap terjadi bencana; dan 2. Saat ini tidak ada penundaan pembayaran angsuran oleh debitur KPR Bersubsidi yang terdampak bencana sehingga belum membutuhkan penanganan lebih lanjut.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			dana FLPP ke PPDPP tetap sesuai jadwal; dan c. didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. 4. Saat ini kondisi kredit debitur KPR Bersubsidi yang terdampak bencana alam di Provinsi NTT masih berstatus lancar dan tidak ada penundaan pembayaran.	
14	Rapat Pembahasan Konsep SK Tim Koordinasi Persiapan Pengalihan Dana FLPP kepada BP Tapera	Selasa, 4 Mei 2021 Qubika Boutique Hotel, Tangerang, Banten dan melalui *video conference*	1. Penyusunan Rapermen adalah kewenangan tim yang dibentuk Dirjen Pembiayaan Infrastruktur (PI) berdasarkan PermenPUPR No. 24/2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, bukan kewenangan tim koordinasi; 2. Pada dasarnya pelaksanaan pengalihan dilakukan oleh PPDPP sebagai penerima mandat Surat Menteri Keuangan, tugas tim memberikan usulan/rekomendasi, bukan sebagai pelaksana pengalihan; 3. Reviu hanya dilakukan oleh BPKP, tim bertugas untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan persiapan; 4. Perlu dicermati kembali terkait ruang lingkup pengalihan, apakah likuidasi atau alih status, dan dalam bentuk dana FLPP saja atau beserta Barang Milik Negara (BMN); 5. BLU PPDPP masih memiliki anggaran di 2022 berupa insentif Q4-2021 sehingga opsi likuidasi tidak dapat dilaksanakan di tahun ini; 6. Secara prinsip disepakati bersama bahwa penyiapan usulan konsep BLU ex-PPDPP dilakukan oleh tim koordinasi; dan 7. Diusulkan alternatif konsep BLU ex-PPDPP dapat menjadi BLU khusus KPBU Perumahan atau BLU untuk mengelola seluruh dana kemudahan, namun diperlukan keputusan dari Dirjen PI.	1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal akan diperbaiki sesuai dengan masukan dan usulan yang diberikan pada rapat ini; dan 2. Sosialisasi dan penempatan anggota tim pada subtim akan dilakukan sesuai dengan Surat dari masing-masing K/L.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
15	*Kick Off Meeting* Tim Penyusun RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	Kamis, 6 Mei 2021 Qubika Boutique Hotel, Tangerang, Banten dan melalui *video conference*	1. Amanat Mekanisme Pembiayaan pada Rapermen berasal dari Pasal 64-65 PP 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, Pasal 17 Rancangan PMK (RPMK) Pengalihan Dana, dan Surat Menteri Keuangan No. S-168/MK.06/2021; 2. Terkait pekerja mandiri, akan diatur oleh pihak yang paling berkepentingan yaitu BP Tapera; bukan dalam RapermenPUPR. Alternatif lainnya adalah merevisi PP 25/2020; 3. Agar Rapermen tidak menggunakan nomenklatur yang tidak tercantum dalam UU No. 4/2016 dan PP No. 25/2020, seperti KPR Sejahtera dan Peserta Sukarela; 4. Saat ini sedang disiapkan 1 (satu) tim penyiapan pengalihan termasuk di dalamnya pengalihan aset berwujud dan tak berwujud, SDM, dll, namun menunggu RPMK Pengalihan Dana terlebih dahulu agar ada keterkaitan; 5. Penerbitan Rapermen ini menunggu diterbitkan RPMK terlebih dahulu; 6. Diusulkan revisi Pasal 17 ayat 1 RPMK Pengalihan Dana, menambahkan 'ketentuan mengenai pemanfaatan dana FLPP; dan 7. Dana FLPP dikelola secara terpisah dari dana Tapera sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 34 UU No. 9/2020 tentang APBN.	1. Memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan dana FLPP dalam RPMK Pengalihan Dana; dan 2. Penggunaan nomenklatur dalam Rapermen akan didiskusikan lebih lanjut.
16	Rapat Pembahasan BP2BT dengan World Bank	Kamis, 6 Mei 2021 Qubika Boutique Hotel, Tangerang, Banten dan melalui *video conference*	1. BTN konvensional masih berkomitmen untuk mencapai target sesuai PKS, meskipun ada keterlambatan pencapaian target Q1 karena mengejar target penyaluran FLPP; 2. BTN Syariah sudah memenuhi target penyaluran FLPP, sehingga dalam waktu dekat diharapkan dapat mengejar ketertinggalan penyaluran BP2BT di Q1. BTN Syariah telah berkomitmen untuk hal ini; 3. BNI masih belum ada rencana perubahan PKS, namun masih berkomitmen memenuhi target sesuai PKS. Demikian juga sama halnya dengan Bank Jateng;	Berdasarkan data-data yang ada, potensi terbesar saat ini terkonsentrasi di Provinsi Jawa Tengah sehingga potensi ini yang akan segera ditindaklanjuti oleh Satker.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			4. Proses pengujian verifikasi yang selama ini dikeluhkan oleh pengembang telah dibuktikan diproses secara cepat oleh Satker. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengembang bahwa pengajuan BP2BT tidak sesulit yang dibayangkan; 5. Satker diharapkan dapat memberikan sedikit tekanan kepada bank pelaksana sehingga dapat mencapai target sesuai dengan yang tertuang dalam PKS; 6. Dengan pertimbangan bahwa tahun 2021 sudah tidak ada lagi SSB/SSM, harapannya dapat membuka ruang bagi produk BP2BT agar lebih menarik bagi pasar; dan 7. Target pada pada Q2 tidak terpenuhi, World Bank mengusulkan dua opsi yakni menghentikan program BP2BT atau mengalihkan ke program BSPS.	
17	Rapat Pembahasan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	Jumat, 7 Mei 2021 Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan melalui *video conference*	1. Disepakati klasifikasi perbaikan struktural dan non struktural pada Rapermen mengacu pada PermenPUPR No. 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Pasal 13); 2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Perbaikan Swadaya dibutuhkan untuk perbaikan struktural, sedangkan perbaikan non struktural dan perluasan tidak membutuhkan persyaratan PBG; 3. Syarat pernyataan laik fungsi pada Rumah Tapak Umum atau Sarusun (Pasal 14) dihapuskan, mempertimbangkan bukti laik fungsi sudah ada saat tahap serah terima. 4. Pengaturan pengalihan kepemilikan Sarusun (Pasal 15 ayat 1a) dalam hal pewarisan dan perikatan pemilikan setelah jangka waktu 20 tahun, merujuk pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja; 5. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pada perbaikan rumah swadaya, tidak dilakukan pengalihan kepemilikan oleh Bank (Pasal 15 ayat 3a), melainkan dengan cara-cara yang disepakati bersama antara debitur dan Bank dan tidak diatur dalam RapermenPUPR;	RapermenPUPR tentang Skema BP2BT akan disesuaikan dengan kesepakatan rapat.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			6. Surat pernyataan minat oleh Bank harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan tidak dilakukan pengecualian dalam Rapermen, apabila Direktur Utama berhalangan maka akan merujuk pada Anggaran Dasar masing-masing Bank/Perusahaan Pembiayaan; dan 7. Dilakukan penyederhanaan format surat pernyataan MBR menjadi satu surat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. MBR pekerja perlu melampirkan surat keterangan pendapatan ketika meminta tanda tangan Lurah/Kepala Desa.	
18	Rapat Pembahasan Skema *Housing Micro Finance* (HMF)	Senin, 10 Mei 2021 Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan melalui *video conference*	1. Terkait penyampaian dokumen permohonan secara elektronik, tidak menjadi masalah sepanjang dokumen dikirimkan melalui email resmi bank pelaksana dan dapat dilacak/ditelusuri pihak pengirimnya; 2. Diusulkan terkait perbaikan struktural pada perbaikan swadaya (Pasal 13A), agar meliputi 'penambahan atau perbaikan sebagian'; 3. Diusulkan perubahan istilah 'indeks penghasilan' menjadi 'indeks dana BP2BT' (Pasal 22 ayat 2 dan 4); 4. Akan disusun kembali format-format surat dan lampiran dalam rapermen sesuai dengan 3 (tiga) skema pembiayaan; 5. Rancangan Kepmen Batasan dan Indeks Dana BP2BT akan mengacu pada KepmenPUPR No. 411/2021 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batas Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya dan akan dibedakan antara pemilikan dan pembangunan swadaya dengan perbaikan swadaya; dan 6. Format surat pernyataan verifikasi laporan kemajuan fisik akan disusun dan disesuaikan dengan skema perbaikan swadaya (Pasal 28).	1. RapermenPUPR akan disesuaikan dengan kesepakatan rapat; 2. Menyiapkan perhitungan besaran dan indeks dana BP2BT untuk skema perbaikan swadaya; dan 3. Format-format dalam rapermen akan disusun ulang dan disesuaikan dengan 3 (tiga) skema pembiayaan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
19	Rapat Koordinasi Penyiapan Pengalihan Dana FLPP ke BP Tapera	Senin, 10 Mei 2021 Ruang Rapat 1, Lt. 2, Wing 3 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1. PPDPP telah bersurat kepada BPKP perihal reviu dana FLPP dan akan dilakukan rapat melibatkan BPKP; 2. PPDPP menginventarisasi kembali aset-aset yang berkaitan dengan layanan dan sifatnya *urgent* untuk diserahkan kepada BP Tapera serta mekanisme penyerahan asetnya masih perlu dikoordinasikan dengan Biro BMN dan bagian yang menangani BMN di DJPI; 3. Penggunaan dana PNBP (BA 033) tergantung dengan kebutuhan yang diajukan oleh PPDPP sebagai pengguna anggaran saat ini, sedangkan biaya operasionalisasi dana FLPP di BP Tapera untuk tahun 2022 akan menggunakan imbal jasa OIP; 4. Ada rencana penghentian layanan KPR FLPP untuk ASN karena adanya *initial project* BP Tapera dimana hal ini perlu dikomunikasikan pada masyarakat dan Bank BTN sebagai partner untuk *initial project* BP Tapera; 5. Terkait kelompok penghasilan pada Rancangan Peraturan BP Tapera dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok penghasilan, sedangkan besarannya ditetapkan dalam Keputusan BP Tapera, skema ini akan diterapkan pada saat *initial project*; dan 6. Kepala Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan menginformasikan bahwa aset PPDPP yang tercatat sebagai aset DJPI adalah kendaraan, sedangkan untuk komputer, peralatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab KPA PPDPP.	3. Dalam rangka pengalihan dana FLPP diharapkan agar dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan unsur Sekretariat Jenderal PUPR, Kementerian Keuangan serta lembaga terkait lainnya; 4. Agar BP Tapera memperjelas skema pelaksanaan *initial project*, termasuk hal-hal terkait dengan layanan terhadap ASN; 5. Pada pertemuan selanjutnya, terhadap 11.000 unit *initial project*, diharapkan BP Tapera menampilkan mana yang menjadi bagian dari Perumnas dan mana yang merupakan mitra BTN; dan 6. Mengaharapkan agar PPDPP menyiapkan kajian mengenai opsi tindak lanjut kelembagaan PPDPP pasca pengalihan Dana FLPP untuk Menteri PUPR.
20	Rapat Pembahasan Skema *Housing Micro Finance* (HMF)	Selasa, 11 Mei 2021 Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan melalui *video conference*	1. Terkait pencairan (Pasal 28), agar surat pernyataan verifikasi untuk setiap skema pembiayaan dipisahkan sebagai berikut: a. Pemilikan melampirkan pernyataan laik fungsi dari pengembang; b. Pembangunan swadaya melampirkan verifikasi laporan kemajuan fisik;	RapermenPUPR akan disesuaikan dengan kesepakatan rapat.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			c. Perbaikan swadaya melampirkan laporan kemajuan fisik dan laporan pernyelesaian perbaikan. 2. Agar dibuat ayat baru bahwa tata cara pelaksanaan uji petik ditetapkan dalam Juknis; 3. Agar pencairan pada skema pemilikan dan pembangunan swadaya melalui Perusahaan Pembiayaan disamakan dengan skema melalui Bank Pelaksana; 4. Tanda terima uang/kwitansi pembayaran dari bank pelaksana dihapuskan dari persyaratan permintaan pencarian dana disebabkan pencairan dana BP2BT hanya dilakukan 1 (satu) kali; dan 5. Perlu diatur skema perbaikan, agar tidak terjadi kondisi dimana bank pelaksana yang mencairkan kredit dalam 1 (satu) tahap dapat langsung melakukan pencairan dana BP2BT, meskipun progres fisik perbaikan belum ada.	
21	Rapat Pembahasan Skema *Housing Microfinance* (HMF)	Senin, 17 Mei 2021 Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Perlu disiapkan konsep surat perubahan izin prakarsa kepada Biro Hukum terkait; 2. Uji petik pada tahap pencairan tetap dilaksanakan, terkait mekanisme, tata cara, dan dokumentasi hasil uji petik tidak diuraikan dalam RapermenPUPR, melainkan dalam Juknis; 3. Perlu dibahas lebih lanjut mengenai penyaluran dana BP2BT melalui Perusahaan Pembiayaan (PP) Pelaksana pada skema pemilikan dan pembangunan swadaya, mengingat PP tidak memiliki rekening simpanan dan tidak menggunakan sistem *reimburse*; 4. Denda keterlambatan pemindahbukuan menyesuaikan dengan data publikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu semula suku bunga deposito tiga bulan LPS menjadi suku bunga penjaminan LPS; 5. Pengujian kualitas bangunan dilakukan melalui aplikasi Sipetruk dan dokumen kertas kerja MK; dan	1. Akan disiapkan konsep surat perubahan izin prakarsa kepada Biro Hukum terkait; 2. Akan dibahas lebih lanjut mengenai rekening Satker untuk penyaluran dana melalui Perusahaan Pembiayaan Pelaksana pada skema pemilikan dan pembangunan swadaya; dan 3. RapermenPUPR akan disesuaikan dengan kesepakatan rapat.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			6. Kemajuan pembahasan RapermenPUPR atas perubahan Permen No. 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT sampai dengan Pasal 42.	
22	Rapat Pembahasan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	Rabu, 19 Mei 2021 The Grantage Hotel & Sky Lounge, Tangerang, Banten dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Arahan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pengaturan terkait penyelesaian kredit bermasalah agar disamakan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 sehingga perlakuan terhadap debitur pada setiap program sama; 2. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 menjadi salah satu acuan dalam pengaturan RapermenPUPR namun tidak masuk dalam konsideran menimbang dalam rangka penyederhanaan penyebutan; 3. Perlu pembahasan lebih lanjut apakah *credit scoring* perlu ditambahkan dalam pengaturan RapermenPUPR pada bagian pengaturan Verifikasi oleh Bank Pelaksana atau Perusahaan Pembiayaan Pelaksana (Pasal 21) sebagai upaya agar masyarakat informal dapat masuk dalam pembiayaan perbankan; 4. Klausa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dipakai dalam RapermenPUPR karena spesifikasi kelengkapan rumah dan sarusun tidak sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; 5. Adanya perubahan pengaturan pada persyaratan rumah yang dapat difasilitasi oleh BP2BT; 6. Dalam rangka asas kesetaraan, kesepakatan bersama penyaluran BP2BT ditandatangani oleh Direktur Utama, namun ditambahkan pengaturan dalam hal direktur utama berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh direksi yang berwenang; dan 7. Kemajuan pembahasan Rapermen atas perubahan Permen No. 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT dengan Tim Penyusun sampai dengan Pasal 26.	1. Akan dibahas lebih lanjut mengenai: a. Pengaturan alas hak yang sah dalam kepemilikan tanah dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN pada minggu ke-4 bulan Mei 2021; dan b. Perlakuan terhadap rumah dan sarusun yang dialihkan kepemilikannya apakah dapat difasilitasi dengan BP2BT atau tidak. 2. RapermenPUPR akan disesuaikan dengan kesepakatan rapat.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
23	Rapat Pembahasan Skema KPR Siap Bangun	Jumat, 21 Mei 2021 Ruang Rapat 1, Lt. 2, Wing 3 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Arahan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, PermenPUPR mencantumkan kebijakan umum mengenai pemanfaatan dana FLPP untuk KPR Siap Bangun, tetapi mekanisme dan teknis penyalurannya diatur dalam Peraturan BP Tapera; 2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengusulkan agar PermenPUPR yang mengatur mekanisme penggunaan dana FLPP untuk KPR Siap Bangun berbentuk *pilot project*, dimaksimalkan untuk dilaksanakan oleh PPDPP s.d. Oktober 2021, dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh BP Tapera; 3. BP Tapera perlu segera menyiapkan mekanisme KPR Siap Bangun sehingga setelah pengalihan di akhir Oktober 2021, program KPR Siap Bangun bisa berjalan bersamaan dengan produk Tapera lainnya; 4. Pada *cut off* akhir Oktober 2021 saldo dana FLPP akan membeku sampai dialihkan penuh ke BP Tapera, sehingga Program KPR Siap Bangun dengan Dukungan Dana FLPP perlu direviu ulang; dan 5. PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019 menjadi tidak berlaku setelah dana FLPP dikelola oleh BP Tapera sehingga akan dilakukan pengusulan pencabutan.	1. BP Tapera akan dilibatkan dalam rapat pembahasan skema KPR Siap Bangun selanjutnya; 2. PPDPP akan melakukan FGD KPR Siap Bangun melibatkan DJPI, Bank, Pengembang, dan Yayasan Perlindungan Konsumen untuk menentukan objek yang diperjualbelikan pada masa inden; dan 3. Akan disiapkan surat balasan kepada Biro Hukum yang menyampaikan dokumen teknis, perkiraan pemberlakuan Permen, dan bahwa Permen merupakan *pilot project* yang nantinya akan dilanjutkan dalam Peraturan BP Tapera.
24	Rapat Pembahasan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	Jumat, 21 Mei 2021 Ruang Rapat 1, Lt. 2, Wing 2 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dan *video conference* aplikasi Zoom	1. Diusulkan acuan ketentuan peralihan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar sesuai dengan masa berlakunya; 2. Lampiran RapermenPUPR disiapkan oleh Satker BP2BT; 3. Permintaan pencairan dana BP2BT untuk rumah yang dibangun oleh kontraktor dilakukan setelah rumah jadi seratus persen (100%), untuk rumah yang dibangun oleh MBR sendiri dilakukan setelah pencairan kredit tahap terakhir, sedangkan untuk perusahaan pembiayaan dilakukan setelah rumah jadi seratus persen (100%) dibiayai oleh	1. Akan dilakukan uji publik terhadap RapermenPUPR; 2. Tim perumus melakukan perbaikan atas masukan hasil uji publik dan finalisasi *draft* RapermenPUPR dan disampaikan kepada Biro Hukum untuk keperluan harmonisasi; dan 3. RapermenPUPR akan disesuaikan dengan kesepakatan rapat.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			perusahaan pembiayaan pelaksana kemudian di*reimburse*; 4. Terkait tanda rumah bersubsidi disamakan dengan PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019 yaitu berupa stiker atau plat yang dilengkapi dengan penanda digital (*quick response code*); 5. Perlu disepakati terkait data-data yang akan ditampilkan pada saat pengecekan QR *Code* rumah bersubsidi; 6. SK Penerima Manfaat merupakan data yang *confidential* karena berisi daftar calon penerima manfaat yang lolos dan tidak lolos, disarankan penyampaian SK Penerima Manfaat hanya sampai perbankan, sedangkan untuk calon penerima manfaat diberikan pemberitahuan bahwa SK telah diterbitkan dan akad dapat segera dilakukan; dan 7. Disampaikan bahwa pengaturan *credit scoring* masuk ke dalam pasal 21 ayat (4a) bahwa pedoman internal Bank Pelaksana atau Perusahaan Pembiayaan Pelaksana dapat dikembangkan sistem pemeringkatan kelayakan kredit pemohon.	
25	Rapat Percepatan Pelaksanaan BP2BT Triwulan 2	Jumat, 21 Mei 2021 Ruang Rapat 1, Lt. 2, Wing 2 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dan *video conference* aplikasi Zoom	1. BTN menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, BP2BT mulai diminati oleh calon pemohon setelah kuota FLPP habis tersalurkan; 2. BNI optimis BP2BT akan tersalurkan secara optimal di Bulan Oktober 2021; 3. Diharapkan Bank Pelaksana dengan target FLPP sudah terpenuhi agar dapat mulai fokus menyalurkan BP2BT di Triwulan 2; 4. Bank Pelaksana diperbolehkan menyalurkan BP2BT kepada kelompok masyarakat *non-fix income* dengan strategi masing-masing; dan 5. Penyaluran BP2BT perlu difokuskan untuk meyakinkan Kementerian Keuangan dan Bank Dunia bahwa yang sudah ditargetkan dapat tercapai.	1. Agar masing-masing Bank Pelaksana dapat melaporkan data potensi yang dimiliki dan kapasitas penyaluran terkini untuk BP2BT; dan 2. Akan dilakukan percepatan pembangunan Rumah Swadaya khususnya di Jawa Tengah dengan melibatkan instansi daerah untuk memastikan status tanah dan penerbitan IMB.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
26	Rapat Pembahasan Alas Hak Atas Tanah pada Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Kamis, 27 Mei 2021 Qubika Boutique Hotel dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Pemberian hak atas tanah harus memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Calon penerima manfaat program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SHM kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai lokasi tanah; 3. Kerjasama program BP2BT dan PTSL dimungkinkan dilakukan namun terdapat batas waktu yang sesuai tahun anggaran; 4. Proses pengurusan sertifikat tanah bisa rampung dalam 30 hari, mulai dari pendaftaran sampai penerbitan sertifikat apabila dokumen yang dipersyaratkan lengkap.	Alas hak yang sah atas tanah dalam rangka pengajuan KPR untuk pembangunan/perbaikan rumah dalam program BP2BT, akan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR terkait program atau dalam Juknis Penyaluran BP2BT yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
27	Rapat Pembahasan Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Kamis, 27 Mei 2021 Qubika Boutique Hotel dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Pada Daftar Hasil Pengujian Pemohon agar ditambahkan tanda tangan Tim Penguji; 2. Stiker atau Plat semula bertuliskan KPR Bersubsidi menjadi KPR BP2BT; 3. Perlu disortir kembali antara: a. Format yang membutuhkan versi berbeda untuk Bank dan Perusahaan Pembiayaan; dan b. Format yang cukup satu versi saja untuk digunakan Bank maupun Perusahaan Pembiayaan; 4. SK Penerima Manfaat tidak perlu tembusan ke Kepala Dinas/Satuan Perangkat Daerah dan Pemohon BP2BT; dan 5. Kemajuan pembahasan rapermen atas perubahan Permen No. 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT dengan Tim Penyusun sampai dengan Lampiran.	1. Lampiran dan Format Surat dalam RapermenPUPR akan disesuaikan dengan kesepakatan rapat; 2. Akan dilakukan uji publik terhadap RapermenPUPR; dan 3. Tim Perumus akan melakukan perbaikan atas masukan hasil uji publik dan finalisasi *draft* RapermenPUPR yang akan disampaikan kepada Biro Hukum untuk keperluan harmonisasi.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
28	Rapat Pembahasan Awal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Tahap Pasca Penyaluran TA 2021	Kamis, 27 Mei 2021 Qubika Boutique Hotel dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Diusulkan 4 (empat) opsi pelaksanaan kegiatan, yaitu: a. *Online* survei; b. Kunjungan lapangan pada lokasi sampel; c. Menggunakan jasa surveyor; dan d. Menggunakan Tenaga Pendukung Penyaluran (TPP); 2. Sampel debitur/nasabah/penerima manfaat tahun 2016-2020 sebesar 56.279 unit; 3. Agar pelaksanaan monev pasca penyaluran difokuskan pada hasil temuan BPK, yaitu tingkat keterhunian; 4. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan agar berkoordinasi dengan PPDPP dan Satker SSB/SSM dan Satker BP2BT dengan menitipkan kuesioner kepada mereka. Harap disiapkan konsep, mekanisme dan *tools*-nya; Diusulkan agar dilakukan sensus debitur/nasabah/penerima manfaat pada awal tahun dan memberikan *shock therapy*, yaitu apabila tidak memberikan *feedback* (mengisi kuesioner) maka penyaluran subsidi terhadap penerima manfaat tersebut akan di-*hold*.	1. Akan dilakukan *exercise* terhadap jumlah SDM dan jumlah sampel agar sesuai dengan kemampuan; 2. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan akan berkoordinasi dengan PPDPP, Satker SSB/SSM dan Satker BP2BT terkait kuesioner; dan 3. Akan disiapkan konsep kalimat pengantar pada kuesioner *online* yang bersifat keras.
29	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Warga Perumahan Cerme Prisma Land Gresik	Senin, 31 Mei 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Pengembang, Bank Pelaksana, dan warga perumahan diharapkan bersama-sama: a. Melakukan upaya rekayasa teknologi untuk penanganan banjir jangka pendek; b. Melakukan pendekatan dan menghadap Pemda Kab. Gresik. 2. Pengelolaan Kali Lamong merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, koordinasi lebih lanjut dalam bentuk Rencana Usulan Kegiatan (RUK) perlu dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah jangka panjang; 3. Peraturan Kepala Daerah diharapkan bisa mewadahi ketentuan dokumen Amdal/UKL-UPL. Perlu ditinjau kembali mitigasi risiko banjir dalam dokumen tersebut;	1. Pengembang akan membuat kajian penyebab banjir dan permohonan tindak lanjut kepada Pemda; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik akan berkoordinasi dengan BBWS terkait pengelolaan Kali Lamong; dan 3. Bank BTN Syariah akan berkoordinasi dengan BTN Konvensional untuk melakukan upaya mitigasi risiko permasalahan ini.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			4. Sebelum berlakunya Permen PUPR No. 20 Tahun 2019, proses akad diperkenankan pada saat PSU perumahan belum terbangun, tetapi tetap ada kewajiban pengembang untuk menyediakan alternatif; dan 5. Dana retensi yang masih tersedia pada Bank Pelaksana, bisa dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya penanganan banjir.	
30	Rapat Koordinasi BP2BT di Provinsi Jawa Tengah	Kamis, 3 Juni 2021 Hotel Novotel Semarang, Jawa Tengah dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Pengembang dan Perbankan telah berupaya mempromosikan BP2BT, namun minat masyarakat masih cenderung lebih tinggi pada program FLPP; 2. Saat ini BTN Jateng sedang melakukan *pilot project* BP2BT Swadaya di daerah Kab. Pekalongan terhadap segmen *non-fixed income*, yaitu dengan kelompok nelayan yang berlokasi di pesisir sebanyak ± 40 orang; 3. Dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi pada: a. tanah belum terdaftar (seperti Letter C, Petok D) harus mengisi formulir Riwayat Penguasaan Tanah, pada tanah warisan dilakukan pemecahan terlebih dahulu untuk tiap ahli waris dan akta waris; b. tanah negara yang masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis, harus memperhatikan pemegang hak terdahulu untuk dilakukan pembaharuan hak; c. tanah negara bebas, harus ada surat keterangan menempati tanah dari Lurah, permohonan sertifikat akan diajukan Lurah ke BPN. 4. Akta Jual Beli (AJB) diterbitkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk peralihan tanah bersertifikat, sedangkan PPJB (Perjanjian Pendahuluan Jual Beli) diterbitkan oleh Notaris untuk pelepasan hak (misal: HGU);	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Perbankan dan Asosiasi Pengembang akan terus mensosialisasikan BP2BT Swadaya kepada masyarakat; dan 2. Akan dilakukan uji publik Rapermen BP2BT pada 9 Juni 2021.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			5. Bapak Eko Haryono selaku perwakilan dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah mempersilakan perbankan untuk melakukan Akad debitur didasari *covernote* dari Notaris-PPAT; dan 6. Ada 2 (dua) tahapan pengalihan pada tanah negara yang belum bersertifikat, yaitu (i) Perseroan melakukan pelepasan HGU dengan akta pelepasan dari Notaris, dan (ii) Penerbitan SK pemberian hak kepada individu, dilanjutkan penerbitan sertifikat.	
31	Rapat Pembahasan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima Manfaat FLPP pada BP Tapera	Senin, 7 Juni 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. RapermenPUPR mengatur perlakuan penerima manfaat FLPP akad tahun 2010-2021 maupun calon penerima manfaat FLPP yang belum menjadi anggota Tapera di tahun 2022 dan seterusnya, sedangkan Peraturan BP Tapera mengatur tata cara pencatatan kepesertaannya; 2. Dana FLPP tidak akan digabungkan dengan dana peserta disebabkan karakteristik dan suku bunga dana berbeda. Namun, pemanfaatan dana FLPP bisa beriringan dengan pemanfaatan dana peserta; 3. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera menyanggupi penetapan dan pencatatan penerima manfaat dana FLPP dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dana FLPP dialihkan ke BP Tapera; 4. Pekerja swasta masih difasilitasi FLPP sampai 2027 karena tidak ada fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan selama belum menjadi peserta Tapera; dan 5. Pembahasan RapermenPUPR tentang Mekanisme Kepesertaan Masyarakat yang Telah Menerima Manfaat Dana FLPP dan Persyaratan Pelaksanaan Program FLPP pada BP Tapera dari Judul s.d. Pasal 3a.	Akan dilakukan rapat pembahasan RapermenPUPR lanjutan pada minggu ketiga Juni 2021 (jadwal tentatif).

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
32	Rapat Tindak Lanjut Audiensi dengan DPN PERKASA terkait dengan Bidang Pembiayaan Perumahan	Selasa, 8 Juni 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Disampaikan bahwa DPN Perkasa memiliki lahan seluas 30,1 Hektar di Desa Tajur, Kabupaten Bogor dan akan dibangun sebanyak 3.000 unit rumah; 2. Anggota DPN Perkasa di Pemalang, Jawa Tengah memiliki lahan seluas 2 Hektar dan sebanyak 150 anggotanya sudah memiliki kaveling tanah dan sudah bersertifikat yang rencananya akan mengajukan BP2BT ke Bank Jateng; 3. Diusulkan bagi anggota DPN Perkasa memberikan data-data yang diperlukan dalam pemanfaatan BP2BT kepada bank pelaksana dalam rangka memastikan kelayakan atau kemampuan calon debitur. Selain itu, untuk memberikan keyakinan tambahan bagi bank pelaksana, DPN Perkasa dapat menggunakan mekanisme tanggung renteng bagi anggotanya; dan 4. Salah satu persyaratan permohonan BP2BT Swadaya adalah ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang layak.	Ketua DPN Perkasa akan menginformasikan kepada para anggotanya mengenai persyaratan dan fitur BP2BT dan FLPP.
33	Undangan Konsultasi Publik RapermenPUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rabu, 9 Juni 2021 Aviary Hotel Bintaro, Tangerang Selatan dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	Tanggapan dan masukan atas RapermenPUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan: 1. Batas penghasilan perbaikan rumah swadaya disamakan dengan pemilikan dan pembangunan; 2. Batas luas bangunan lebih luas dari 36m^2 dan luas tanah di atas 200 m^2, mempertimbangkan kondisi riil di daerah masih banyak yang memiliki luas di atas batasan; 3. Alas hak yang sah dapat mengakomodasi bukti selain sertifikat (girik) karena mayoritas tanah milik masyarakat ultra mikro belum didaftarkan/bersertifikat; 4. Persyaratan Perusahaan Pembiayaan Pelaksana pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam penyaluran pembiayaan perumahan dapat dipertimbangkan kembali karena sangat sedikit perusahaan pembiayaan yang menyediakan	Akan disusun Berita Acara Konsultasi Publik RapermenPUPR tentang BP2BT.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			pembiayaan perumahan (hanya 20 dari 170 perusahaan); 5. Syarat perusahaan pembiayaan pelaksana selain telah melakukan PKS dengan SMF, juga memanfaatkan dana dari SMF; dan 6. Pengaturan penyaluran bantuan agar jangan terlalu *rigid* seperti mensyaratkan PBG, NPWP, SLF.	
34	Rapat Koordinasi BP2BT pada Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Jumat, 11 Juni 2021 Ruang Rapat Dit. PPP Lantai 3 Wing 2	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang ingin mencari informasi lebih detail mengenai program BP2BT; 2. Dinas PRKP Kota Palembang bermaksud untuk memfasilitasi masyarakat pada proyek kawasan perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land dengan program BP2BT.; 3. Untuk memperoleh bantuan program BP2BT, calon debitur tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Calon debitur diarahkan untuk memilih Bank Pelaksana sebagai penyalur dana program BP2BT. Diusulkan BTN dapat menjadi Bank Pelaksana; dan 4. Kelompok masyarakat dari segmen *non-fixed income* diarahkan untuk dapat berkoordinasi dengan BUMD PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT. SP2J) sebagai penjamin untuk memfasilitasi program BP2BT.	Akan diadakan rapat pembahasan lanjutan dengan melibatkan calon debitur, pengembang, bank pelaksana dan PT. SP2J.
35	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Banjir Bandang di Sentani, Jayapura	Selasa, 15 Juni 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Upaya yang telah dilakukan oleh Bank BTN adalah sebagai berikut: a. Perumahan Yahim Gajah Mada: dari 199 debitur, sebanyak 102 debitur sudah restrukturisasi, 97 debitur belum restrukturisasi; b. Perumahan Nauli: dari 93 debitur, 68 sudah restrukturisasi dan 25 belum retrukturisasi. 2. Debitur yang belum mendapatkan restrukturisasi keberatan untuk tetap membayar angsuran. Tuntutan mereka adalah pembebasan hak tagih, khususnya tagihan pokok;	1. Apabila diperlukan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan bersurat ke Kementerian Keuangan untuk mengajukan permohonan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi masyarakat terdampak banjir; dan 2. Tim dari Direktorat PPP akan segera melakukan kunjungan lapangan bersama Ditjen Perumahan, PPDPP, Bank BTN, Bank BPD Papua untuk memperoleh data dan informasi terkini dengan melibatkan Ditjen SDA untuk menindaklanjuti normalisasi sungai; dan

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			3. Relaksasi yang dapat diberikan Bank BTN adalah dalam bentuk diskon bunga dan diskon denda; 4. Saat ini debitur yang masih tinggal di daerah Sentani hanya di Perumahan Yahmi Gajah Mada sebanyak 40 debitur (di bagian depan). Sementara 159 debitur dengan kondisi rumah rusak berat sudah tidak lagi tinggal di lokasi perumahan; dan 5. Sebanyak 93 debitur di Perumahan Nauli sudah tidak lagi tinggal di lokasi perumahan karena rumahnya sudah 'hilang' atau tidak dapat dihuni lagi.	3. Bank BTN akan menyerahkan data-data yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah.
36	Audiensi dengan Sekda Kabupaten Jayapura Membahas Persiapan Rapat Koordinasi Penanganan Rumah KPR Bersubsidi Paska Banjir Kabupaten Jayapura	Kamis, 17 Juni 2021 Aula Kantor Bupati Jayapura dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Temuan dari hasil kunjungan lapangan: a. Perumahan Nauli: 1) Akibat banjir bandang: 35 unit masih kondisi baik, 69 unit hanyut, 20 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 35 unit belum terbangun; 2) Lokasi perumahan merupakan lintasan aliran sungai; 3) Warga sudah tidak mengangsur dan minta penghapusan hak tagih dari Bank BTN. b. Perumahan Bintang Timur: 1) Akad mulai dilakukan pada tahun 2017; 2) Bank BPD Papua telah melakukan penundaan pembayaran denda dan bunga KPR sejak 2019; 3) Perumahan dibangun di daerah aliran sungai; 4) Sudah ada bantuan tanggul dari BWS Papua; 5) Warga meminta relokasi ke tempat yang lebih aman. c. Perumahan Yahim Gajah Mada: 1) Unit rumah yang dibangun melalui KPR Bank Papua, belum ada IMB; 2) 100 unit rumah memiliki IMB difasilitasi BTN, sisanya hanya izin prinsip; 3) Kondisi perumahan tergenang dan tidak dapat dihuni; 4) Antar warga masih belum sepakat apakah relokasi atau normalisasi sungai.	~~A~~kan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada Jumat 18 Juni 2021.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			2. Tiga Isu Strategis: a. Pemutihan KPR debitur terdampak banjir; b. Relokasi penghuni perumahan; c. Normalisasi sungai.	
37	Rapat Koordinasi Penanganan Rumah KPR Bersubsidi Paska Bencana Banjir Kabupaten Jayapura	Jumat, 18 Juni 2021 Aula Kantor Bupati Jayapura dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Penyelesaian permasalahan mengerucut kepada pemutihan KPR Bersubsidi sebagaimana permohonan warga agar dibebaskan dari kewajiban mengangsur; 2. Pemutihan KPR dan Penetapan status FLPP yang tidak bisa ditagihkan oleh Bank Pelaksana, mengingat dana bergulir tersebut merupakan investasi pemerintah, maka perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK berkaitan dengan regulasi eksisting; 3. Dana *outstanding* pada Bank BTN ± Rp 38 Milyar dan Bank Papua kurang lebih Rp 35 Milyar bagi seluruh debitur terdampak bencana banjir bandang; 4. Kawasan perumahan yang terdampak banjir sudah tidak bisa difungsikan kembali untuk membangun perumahan baru; 5. Harapan warga untuk relokasi belum bisa terpenuhi, berkaitan dengan ketersediaan lahan dan biaya untuk pembangunan perumahan baru; dan 6. Penanganan normalisasi sungai telah dan sedang dilakukan menggunakan dana APBN, APBD 1 dan APBD 2, namun belum mampu menangani lokasi perumahan agar bebas banjir. Hal ini dikarenakan lokasi perumahan ada di daerah resapan/tampungan air, daerah aliran sungai dan jalur sungai baru yang terbentuk dari banjir Gunung Cyclop.	1. Bank Pelaksana bersedia mengikuti keputusan dari Kementerian Keuangan dan OJK terkait pemutihan KPR dan pengembalian dana FLPP; dan 2. Sisa *outstanding* dimungkinkan akan dilunasi oleh negara, namun tetap dengan konsekuensi masyarakat terdampak tidak memiliki rumah baru sebagai pengganti.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
38	Undangan Rapat Pembahasan Pengaturan Partisipasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam BP2BT	Selasa, 22 Juni 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Per Desember 2020, terdapat 500 BPR yang memiliki produk KPR, dengan total KPR Rp4 triliun. Angka ini kecil jika dibandingkan total kredit BPR Rp114 triliun; 2. Penilaian kesehatan BPR dilakukan setiap bulan berdasarkan 4 (empat) kategori, yakni sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sedangkan penilaian kesehatan BPRS dibagi ke dalam 5 peringkat komposit (PK 1-5); 3. Terkait penyamaan batasan penilaian kesehatan BPR/BPRS, indikator yang dapat digunakan, yakni BPR/BPRS tidak termasuk daftar "bank dalam pengawasan intensif", memiliki modal inti minimum Rp6 miliar, dan menggunakan rasio-rasio seperti LDR, NPL, dan CAR; 4. OJK tidak menerbitkan surat keterangan kesehatan kepada BPR/BPRS, melainkan menerbitkan surat pembinaan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa BPR/BPRS telah memenuhi ketentuan; 5. Jika BPR/BPRS akan berpartisipasi dalam BP2BT maka pembayarannya harus melalui rekening pada Bank Umum; dan 6. SMF telah menawarkan pembiayaan kepada BPRS untuk kredit perumahan tetapi masih terkendala dalam menentukan jenis akad syariah yang dapat digunakan.	OJK akan menyiapkan informasi BPR/BPRS yang menyalurkan KPR serta karakteristik produk KPR yang disalurkan untuk disampaikan pada pertemuan selanjutnya.
39	Rapat Pembahasan Permasalahan Penyaluran FLPP oleh PT. Artha Graha Internasional Tbk.	Selasa, 22 Juni 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Debitur bernama Tengku Zulfikar melakukan akad kredit Desember 2016 jatuh tempo Desember 2027 (tenor 11 tahun), tunggakan pertama terjadi pada Agustus 2017 dan dikategorikan sebagai kredit macet (NPL) pada Februari 2019; 2. Hingga 3 Juli 2021, muncul hak klaim untuk menyelesaikan NPL kepada Askrindo. Bank AGI masih memberi tenggat waktu karena Debitur berjanji melakukan penyetoran. Namun, sampai pertangahan 2020 tidak ada kejelasan dari debitur sehingga Bank AGI mengajukan hak klaim kepada Askrindo dan cair di Januari 2021;	1. Direktorat PPP akan mengirimkan surat permintaan kronologis kepada Bank AGI, terdiri dari kronologis beserta salinan dokumen legal, profil kredit dan karakter debitur, mekanisme lelang, mekanisme hak klaim dan subrogasi, alternatif solusi penyelesaian; dan 2. Akan disiapkan surat tanggapan Menteri PUPR kepada Kuasa Hukum debitur.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			3. Dalam surat debitur, disebutkan adanya kesepakatan bahwa Bank AGI memberikan toleransi cicilan sepanjang waktu tertentu. Namun, relaksasi tidak dapat dilakukan setelah hak klaim muncul. Bank AGI memiliki kewajiban subrogasi, ke Askrindo untuk mengembalikan dana talangan dengan cara menjual aset; 4. Ketika kredit dikategorikan NPL, bank mempunyai hak mengajukan klaim 1 kali (ada batas kadaluarsa), setelah klaim dibayarkan, Askrindo memiliki hak subrogasi yaitu hak untuk memperoleh pengembalian dana talangan yang dapat berasal dari (i) penjualan atau lelang rumah, atau (ii) pelunasan oleh debitur baik secara penuh atau mengangsur; 5. Pelunasan dari debitur dapat diterima Askrindo sepanjang ada porsi subrogasi yang dibayarkan dari angsuran debitur dimana 70% Askrindo, 30% Bank; dan 6. Bank AGI perlu menyampaikan kepada Direktorat PPP dan PPDPP runtutan kronologis beserta salinan dokumen legal, profil kredit dan karakter debitur, mekanisme lelang, mekanisme hak klaim dan subrogasi, alternatif solusi penyelesaian.	
40	Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Masa Berlaku KepmenPUPR No. 411/KPTS/M/2021	Kamis, 24 Juni 2021 Ruang Rapat Dit. PPP dan melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. KepmenPUPR No. 411/KPTS/M/2021 telah diterbitkan sejak 7 April 2021 dan berpengaruh kepada penyaluran FLPP kaitannya dengan perubahan batas penghasilan MBR tidak kawin dari Rp 8.000.000,- menjadi Rp 6.000.000; 2. Sosialisasi kepada Bank Pelaksana belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut berdampak kepada 645 debitur (data per 3 Juni 2021) yang telah melakukan SP3K atau perjanjian kredit setelah tanggal 7 April 2021 masih menggunakan ketentuan KepmenPUPR No. 242/KPTS/M/2019 berpotensi dibatalkan subsidinya; 3. Direktur Utama PPDPP menginformasikan per 24 juni 2021, sudah ada 800 an MBR yang melalukan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan bersama dengan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR akan menyiapkan konsep perubahan KepmenPUPR No. 242/KPTS/M/2019 untuk menambahkan klausul masa transisi untuk mengakomodasi perjanjian kredit yang telah berjalan dari bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			akad menggunakan dasar KepmenPUPR No. 242/KPTS/M/2019; 4. Bapak Dirjen telah mengusulkan dispensasi sampai dengan SP3K tanggal 30 Juni 2021 melalui surat No. 93/ND/Dp/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Penyesuaian Batasan Penghasilan MBR untuk KPR Bersubsidi dan sudah turun disposisi Bapak Menteri bahwasanya setuju selama tidak ada peraturan yang dilanggar; 5. Alternatif yang paling memungkinkan adalah perubahan kepmen program yaitu KepmenPUPR No. 242/KPTS/M/2019 bukan KepmenPUPR No. 411/KPTS/M/2021 karena sifatnya sebagai batas tertinggi penghasilan yang harus diacu dan juga tidak bisa berlaku mundur; 6. Perubahan KepmenPUPR No. 242/KPTS/M/2019 harus menyesuaikan dengan KepmenPUPR No. 411/KPTS/M/2021 terkait dengan batasan penghasilan dan menambahkan klausul masa transisi; 7. Peraturan program pada Ditjen Perumahan tidak terdampak dengan diterbitkannya KepmenPUPR No. 411/KPTS/M/2021.	
41	Rapat Pembahasan Perubahan KepmenPUPR No. 242/KPTS/M/2020	Rabu, 30 Juni 2021 Melalui *video conference* aplikasi Zoom	1. Permen 01/2021 dan Kepmen 411/2021 adalah peraturan induk, sedangkan Permen 20/2019 dan Kepmen 242/2019 adalah peraturan program. Apabila ada perubahan pada peraturan induk yang bertentangan dengan peraturan program, maka yang harus disesuaikan adalah peraturan programnya; 2. Proses penerbitan SP3K dan pengujian sebelum tanggal penetapan Kepmen baru tetap berjalan diakomodasi oleh Kepmen 242/2019, selanjutnya SP3K yang diterbitkan setelah tanggal penetapan Kepmen Baru harus merujuk pada batas penghasilan dalam Kepmen Baru; 3. PPDPP akan menghentikan penerbitan SP3K dengan batas penghasilan Kepmen 242/2019 per 30 Juni 2021 pukul 00.00 WIB;	1. PPDPP akan koordinasi secara internal dan komunikasi dengan perbankan sehubungan dengan implementasi rancangan kepmen; 2. Dit PPP akan menyiapkan *Draft* Perubahan KepmenPUPR berdasarkan hasil pembahasan.

NO	KEGIATAN	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN	POINT-POINT PENTING	RENCANA TINDAK LANJUT
			4. Dasar penggunaan tanggal 30 Juni 2021 sebagai *cut-off* penerbitan SP3K adalah Poin 5 Surat Dirjen PI kepada Bapak Menteri PUPR; 5. Revisi Kepmen 242/2019 berupa Kepmen baru dengan menyesuaikan batasan penghasilan sesuai Kepmen 411/2021, mengatur masa transisi penerbitan SP3K, dan mencabut berlakunya Kepmen 242/2019; 6. *Pending matters* mengenai pengaturan batas kawin di Papua dan Papua Barat, serta pengaturan program KPR SSB/SSM dalam Kepmen Baru akan dilaporkan kepada pimpinan.	

Status MoU dan PKS

1. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana FLPP & SBUM TA 2021

No	Nama Bank	Kuota SBUM FLPP	Status		
			Kesepakatan Bersama (KSB)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) FLPP dengan PPDPP	Perjanjian Kerja Sama (PKS) SBUM dengan Satker
1	Bank Artha Graha	1.600	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
2	BRI	6.000	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
3	Bank Papua	400	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
4	Bank Nagari	900	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
5	Bank Nagari Syariah	200	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
6	Bank Jambi	1.450	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
7	Bank Jambi Syariah	300	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
8	Bank DIY	125	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
9	Bank SULSELBAR	1.350	MoU sudah ditandatangani tgl 30-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
10	Bank SULSELBAR Syariah	900	MoU sudah ditandatangani tgl 30-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
11	Bank Aceh Syariah	800	MoU sudah ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
12	Bank NTB Syariah	1.800	MoU sudah ditandatangani tgl 18-03-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
13	BNI Syariah	600	MoU sudah ditandatangani tgl 23-04-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
14	Bank BJB	5.700	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
15	BTN	72.000	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
16	BTN Syariah	9.000	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
17	Bank KALBAR	1.600	MoU sudah ditandatangani tgl 07-04-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
18	Bank KALBAR Syariah	200	MoU sudah ditandatangani tgl 07-04-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
19	Bank KALSEL	600	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
20	Bank KALSEL Syariah	700	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
21	Bank SUMUT	500	MoU sudah ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
22	Bank SUMUT Syarah	1.000	MoU sudah ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
23	Bank MANDIRI	3.000	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
24	Bank JATENG	200	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
25	Bank JATENG Syariah	200	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
26	BNI	17.500	MoU sudah ditandatangani tgl 30-08-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
27	Bank JATIM	300	MoU sudah ditandatangani tgl 13-10-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021

No	Nama Bank	Kuota SBUM FLPP	Status		
			Kesepakatan Bersama (KSB)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) FLPP dengan PPDPP	Perjanjian Kerja Sama (PKS) SBUM dengan Satker
28	Bank JATIM Syariah	1.550	MoU sudah ditandatangani tgl 13-10-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
29	Bank SUMSELBABEL	1.700	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
30	Bank SUMSELBABEL Syariah	500	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
31	Bank KALTENG	300	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
32	BRI Syariah	13.500	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
33	Bank KALTIMTARA	300	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
34	BRI AGRO	550	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
35	Bank NTT	450	MoU sudah ditandatangani tgl 03-08-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
36	Bank SULTENG	325	MoU sudah ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 02-02-2021
37	Bank RIAU KEPRI	300	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
38	Bank RIAU KEPRI Syariah	225	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
39	Bank DKI	25	MoU sudah ditandatangani tgl 20-05-2020	PKS ditandatangani tgl 15-02-2021	Sudah TTD KPA tgl 15-03-2021
40	Bank BJB Syariah	700	MoU sudah ditandatangani tgl 22-02-2021	PKS ditandatangani tgl 01-03-2021	Sudah TTD KPA tgl 31-03-2021
Total Sbum Flpp		149.350			

2. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana SSB Menggulung TA 2021

No	Nama Bank	Status	
		Kesepakatan Bersama (KSB)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
1	BTN	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 04-02-2021
2	BNI	MoU sudah ditandatangani tgl 30-08-2016	Sudah TTD KPA tgl 15-02-2021
3	BRI	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 15-03-2021

3. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana BP2BT TA 2021

Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT (TA 2021)						Target Dalam PKS	Prognosa 2021	Status	
No	Nama Bank	Jenis Perolehan Rumah (Unit)						*Memorandum of Understanding* (MoU)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
		Rumah Tapak	Satuan Rusun	Rumah Swadaya	Total Penyaluran				
1	BTN	11.000	-	-	11.000	11.000	10.926	MoU sudah ditandatangani tanggal 27-01-2021	Sudah PKS Tanggal 28-01-2021
2	BNI	1.000	-	-	1.000	1.000	500	Masih menggunakan MoU sebelumnya yang berlaku sampai tahun 2024	Sudah PKS Tanggal 28-01-2021

Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT (TA 2021)						Target Dalam PKS	Prognosa 2021	Status	
No	Nama Bank	Jenis Perolehan Rumah (Unit)						*Memorandum of Understanding* (MoU)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
		Rumah Tapak	Satuan Rusun	Rumah Swadaya	Total Penyaluran				
3	Bank JATENG	205	-	245	450	450	200	MoU sudah ditandatangani tanggal 28-01-2021	Sudah PKS Tanggal 22-03-2021
4	Bank SUMSEL BABEL	330	-	-	330	330	50	MoU sudah ditandatangani tanggal 28-01-2021	Sudah PKS Tanggal 21-04-2021
5	BRI	1.000	-	200	1.200	-	100	MoU sudah ditandatangani tanggal 15-06-2021	Proses PKS (Komparasi dan masukan bagian legal BRI dikirim 11-08-2021)
6	Bank MANDIRI	5.000	-	-	5.000	500	500	MoU sudah ditandatangani tanggal 28-01-2021	Sudah PKS Tanggal 28-05-2021
Total		18.535	-	445	18.980	13.280	12.276		

04 Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Tujuan dari Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kementerian PUPR turut hadir dalam memberikan dukungan agar proses kebutuhan dasar manusia yaitu rumah dapat terpenuhi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema pembiayaan perumahan dapat tercapai. Berikut merupakan sebagain dari banyaknya dukungan yang telah dilakukan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan:

1. Menyampaikan respon/tanggapan terhadap Notisi Sementara kepada Pengendali Teknis BPKP melalui surat nomor UM 0201/Pp/81 tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Respon dan Tanggapan Terhadap Notisi Sementara;
2. Dukungan IT melalui sistem eFLPP yang bisa langsung dipindahkan dan digunakan oleh BP Tapera;
3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang mekanisme kepesertaan masyarakat yang telah menerima manfaat dana FLPP;
4. Pelibatan BP Tapera dalam penyusunan Skema KPR Siap bangun, dengan mencantumkan kebijakan umum mekanisme dan teknis penyalurannya pada Peraturan BP Tapera;
5. Pembentukan Sekretariat Komite Tapera dengan melakukan pembahasan bersama Bapak Sony Loho (Anggota Komite Tapera) dan BP Tapera;
6. Penyampaian konsep SK Tim Koordinasi persiapan pengalihan dana FLPP ke dalam dana Tapera ke Biro Hukum melalui surat No.HK 0101-Ps/268, pada Tanggal 28 Mei 2021;
7. Penerbitan Keputusan Menteri PUPR Nomor 558/KPTS/M/2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Pembentukan Keanggotaan PAK Rperpres Honorarium ,Insentif, dan manfaat tambahan lainnya Komite Tapera;
8. Melaksanakan rapat pembahasan ditingkat Pantia Antar Kementerian (PAK) terkait Rperpres Honorarium, Insentif dan Manfaat tambahan lainnya Komite Tapera yang kemudian akan dilakukan Harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM.
9. Merencanakan pengalihan Dana FLPP dari BLU PPDPP ke BP Tapera pada Bulan November 2021, dengan dilakukan 1 (satu) kali melalui Pelaksanaan Reviu yang akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
10. Penyusunan Rencana Kerja Pemindahan Pengelolaan Data, Aplikasi, dan Infrastruktur PPDPP ke BP Tapera;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengalihan Dana FLPP ke Dalam Dana Tabungan Perumahan Rakyat;
12. Melakukan pembahasan pengaturan Peserta Pekerja Mandiri BP Tapera dalam hal besaran angka iurannya;
13. Berkoordinasi dalam Penyusunan RPMK tentang Mekanisme Pengalihan Dana FLPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah.

Pelaksanaan Kegiatan Tapera

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat
1	Jumat, 9 April 2021	Undangan untuk hadir dan memberikan sambutan acara Rapat Teknis Rencana Perubahan Porsi Pendanaan KPR FLPP	Aryaduta Hotel, Bandung, Jawa Barat
2	Rabu, 14 April 2021	Undangan Rapat Pembahasan Tapera, 14 - 15 April 2021	Hotel Mercure BSD
3	Rabu, 21 April 2021	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	*Video Conference* Aplikasi *Zoom*
4	Senin, 26 April 2021	Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tapera	*Video Conference* Aplikasi *Zoom*
5	Kamis, 29 April 2021	Undangan *Introduction Of Guarantee for Housing Completion System and Measures to Increase the Housing Supply*: **(Session 4) *Guarantee Fulfillment and Risk Management***	*Video Lecture*
6		Diskusi Pembahasan *Workplan Housing Guarantee* KSP MOLIT Korea	*Video Conference* Aplikasi *Zoom*
7	Jumat, 30 April 2021	Undangan *Introduction Of Guarantee for Housing Completion System and Measures to Increase the Housing Supply*: **(Session 5) *Work Plan Seminar and Closing***	*Video Conference* Aplikasi *Zoom*
8	Kamis, 6 Mei 2021	Undangan Acara Sosialisasi dan Edukasi Efek Beragun Aset (EBA) Ritel	*Video Conference* Aplikasi *Zoom*
9	Kamis, 3 Juni 2021	Revisi Undangan Pemaparan dan Pembahasan Hasil Perhitungan Saldo Awal PNS Aktif	Hotel GranDhika
10	Rabu, 16 Juni 2021	Undangan Rapat Pembahasan Menggali Potensi Dukungan BP Tapera terhadap Proyek KPBU Bidang Perumahan	Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, DJPI

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Dalam penyiapan proyek KPBU Bidang Perumahan, pemberian dukungan kepada BP Tapera, dan pelaksanaan tugas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bentuk permasalahannya yang dijumpai berbeda-beda dari yang memiliki kompleksitas ringan sampai yang berat.

Berkoordinasi dengan berbagai Kementrian/Lembaga, berdiskusi dengan para stakeholder, dan berkonsultasi kepada para pakar konsultan kerap kali dilakukan untuk tercapainya penyelesaian permasalahan yang ada. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama Q2 2021, maka tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Proyek KPBU

NO	NAMA PROYEK	ISU	Tindak Lanjut
1	Proyek KPBU Cisaranten	1. Penentuan Skema Pengembalian Investasi (AP, HAM, dan VGF) 2. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Berkelanjutan di lokasi Proyek dan terkait AMDAL 3. Rencana Pengadaan Lahan Masyarakat 4. Penyusunan draft Surat Komitmen Menteri untuk pengajuan PSN	1. Pembahasan Isu OBC untuk didelivered & tindaklanjuti di FBC 2. Penyiapan KSPI 3. Persiapan Pengadaan BUP 4. Melakukan koordinasi terkait AMDAL dan Perizinan dengan PSSPP dan DJP 5. Percepatan penyampaian usulan PSN kepada KPPIP, Kementerian Ekonomi 6. Finalisasi draft Surat Komitmen Menteri
2	Proyek KPBU Desa Besar Medan	1. Perlu dilakukan split Sertipikat dan perubahan fungsi 2. Lahan BMN PUPR tercatat masih dalam pengelolaan PT Jasa Marga. Saat ini kewajiban pajak dibebankan kepada PT Jasa Marga. Perlu dilakukan pengembalian pengelolaan ke PUPR (DJBM) 3. Proses Serah Terima dari DJBM ke DJP 4. Permasalahan lingkungan Banjir	1. Pembentukan SK Tim KPBU 2. Pengajuan PPP Book 3. FBC dan Dok. Transaksi (target Juni) 4. Aspek Teknis dan Desain (aksesibilitaslahan, kebutuhan pembangunan fly over untuk melintasi jalur KA dan menghubungkan2bagian lahan 5. Pengajuan KSPI

NO	NAMA PROYEK	ISU	Tindak Lanjut
		5. Perlu dilakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial sesuai standar Bank Dunia 6. Potensi Relokasi Warga yang berada di sekitar rel yang akan dibangun jalur Perlintasan/Fly Over 7. Diperlukan penyiapan penggantian bagi warga yang saat ini melakukan kegiatan berkebun	
3	Proyek KPBU Karawang Spuur	1. Lokasi proyek termasuk dalam daerah macet, dikhawatirkan dapat memperparah kemacetan 2. Status Jalan Kampung Budaya merupakan BMD, diperlukan koordinasi terkait pengelolaan jalan tersebut 3. Saat musim hujan Sungai Cikalapa sering mengalami banjir, sehingga diperlukan pembangunan turap 4. Lahan proyek dilalui SUTT, sehingga berpengaruh pada aspek desain dan teknis 5. Adanya aktivitas pemanfaatan lahan dan bangunan pada tapak 6. Tanah masih perlu sertifikasi dari Sekjen PUPR ke DJP	Pengajuan PDF ke Kemenkeu untuk OBC - Tansaksi
4	Proyek KPBU Sei Mangkei	a. Kewenangan PJPK (Pemerintah Provinsi) dalam penyediaan perumahan bagi MBR tidak sesuai dengan UU No 23/2014 b. Perlu dilakukan reviu terhadap usulan teknis: Rusunawa dengan fungsi campuran (Apartemen dan Hotel)	Pelaksanaan PDF oleh PT PII

NO	NAMA PROYEK	ISU	Tindak Lanjut
5	Proyek KPBU Paldam Siliwangi	1. Kewenangan PJPK (Pemerintah Kota Bandung) dalam penyediaan perumahan bagi MBR tidak sesuai dengan UU No 23/2014 2. Relokasi warga yang sekarang menempati rumah dinas TNI – AD di atas lahan PALDAM 3. Penggantian aset BMN TNI –AD yang berada di atas lahan PALDAM	1. KoordinasI dengan TNI–AD terkait relokasi warga dan penggantian aset 2. Penyusunan Kajian Hukum da 2 Kelembagaan terkait kewenangan PJPK dalam pembangunan Rusun PALDAM yang ditujukan untuk masyarakat terdampak program Kota Bandung
6	Proyek KPBU Daan Mogot	1. Optimalisasi lahan karena termasuk KKOP Cengkareng 2. Pemprov DKI berharap fungsi nnon hunian bisa mensupport penerimaan sehingga tidak memerlukan AP 3. Akses dan ketersediaan air bersih (koordinasi dengan SPAM Karian Serpong)	FGD Riviu Pasar untuk melengkapi OBC
7	Proyek KPBU Hunian Bagi ASN di Ibu Kota Negara	1. Perubahan zonasi khususnya bidang perumahan dilakukan oleh tim kolaborasi pada saat rapat pembahasan tanggal 19 Mei 2021 2. Penentuan alternatif tipologi perumahan yang akan digunakan di IKN masih menunggu kajian dari Bappenas 3. Kesanggupan Ditjen CK untuk menyediakan layanan air minum, limbah dan sampah hingga tahun 2024 hanya pada zona 1a	1. Pembahasan Reviu SP (15 Juli 2021) 2. Pengajuan PDF

Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah selama Q2 2021, maka rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian pembahasan Rapermen perubahan atas PermenPUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
2. Penyiapan Pengalihan Dana FLPP Penyusunan SK Tim Pengalihan Dana FLPP antar Kementerian, Reviu Dana FLPP, Integrasi Sistem dan Data SIKASEP - FLPP, SSB/SSM, SBUM, dan BP2BT dengan BP Tapera, Penyiapan struktur organisasi pengelola dana FLPP di BP Tapera dan SDM PPDPP, Pengalihan aset pendukung penyaluran dana FLPP di BP Tapera Tahun 2022, Penyiapan RPBP Pengelolaan Dana FLPP di BP Tapera, Penyiapan BAST, Penyiapan kerja sama OIP, novasi kerja sama bank pelaksana FLPP, dan kegiatan pendukung pengalihan dana FLPP lainnya.
3. Melakukan Uji Publik terkait Rapermen perubahan atas PermenPUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
4. PPDPP akan membuat kajian terkait konsep KPR Siap Bangun dan melakukan FGD dengan melibatkan DJPI, Bank Pengembang, dan YLKI/BPKN;
5. Penyelesaian terkait Rapermen BP2BT, Rapermen KPR Siap Bangun, dan Rapermen Kepesertaan FLPP di BP Tapera;
6. Tindak lanjut terkait Penyiapan Pengalihan Dana FLPP Penyusunan SK Tim Pengalihan Dana FLPP antar Kementerian, Reviu Dana FLPP, Integrasi Sistem dan Data SIKASEP - FLPP, SSB/SSM, SBUM, dan BP2BT dengan BP Tapera, Pengalihan aset pendukung penyaluran dana FLPP di BP Tapera Tahun 2022, Penyiapan RPBP Pengelolaan Dana FLPP di BP Tapera, Penyiapan BAST, Penyiapan kerja sama OIP, novasi kerja sama bank pelaksana FLPP, dan kegiatan pendukung pengalihan dana FLPP lainnya.

Pelaksanaan Dukungan Tapera

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah selama Q2 2021, maka rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan dukungan kepada BP Tapera adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Raperpres Honorarium; dan Pembahasan Rapermen Pengalihan Peserta FLPP.
2. Mangajukan Harmonisasi terkait RPerpers tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat ke Kementerian Hukum dan HAM.
3. Meminta BLU PPDPP untuk segera menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (Laporan Keuangan) sejak Tahun 2010 s.d 2020 (per tahun) untuk kebutuhan reviu oleh BPKP;
4. Menyelesaikan pengembalian dana Taperum-PNS kepada para PNS Pensiun/ahli waris paling lambat 3 tahun sejak dana Taperum-PNS dialihkan oleh Tim Likuidasi kepada BP Tapera;
5. Pemindahan pengelolaan data, aplikasi, dan infrastruktur PPDPP pada BP Tapera dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada MBR;
6. Sinkronisasi data peserta BP Tapera untuk pasar potensial proyek KPBU Perumahan dan diskusi lanjutan dengan instansi terkait (Kemenkeu & Bappenas);
7. Koordinasi penyusunan Peraturan Peserta Pekerja Mandiri BP Tapera dan RPMK Mekanisme Pengalihan Dana FLPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah.

LAMPIRAN

Dokumen Lainnya

01 KPBU

1. Draft Surat Dukungan Menteri Untuk proyek Kpbu Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Bandung

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Jakarta, April 2021

Yth.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN), salah satu strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau. Hal tersebut dituangkan dalam Major project Rumah Susun Perkotaan dengan target 1 juta unit pada tahun 2024 dengan lokasi prioritas ada 6 kawasan yang salah satunya adalah Bandung Raya. Target tersebut untuk menjawab permasalahan backlog perumahan yang menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 11.4 Juta pada Tahun 2015.

Proyek Rumah Susun Sewa Cisaraten Bina Harapan Kota Bandung merupakan salah satu proyek untuk mencapai target RPJMN dimaksud yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Studi Pendahuluan serta Prastudi Kelayakan Awal yang sudah disusun, proyek ini direncanakan untuk menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Proyek ini ditargetkan untuk dapat menyediakan 1008 unit Rumah Susun Sewa, 802 unit Rumah Susun Sewa Jangka Panjang, 928 Rumah Susun Sewa Komersial di Kawasan Bandung Raya dan beroperasi pada tahun 2024. Estimasi awal Biaya Modal (CAPEX) adalah sebesar Rp1.074 Miliar dan Biaya Operasional (OPEX) adalah sebesar Rp275 Miliar dengan pengembalian investasi melalui skema pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Bandung dan stakeholder terkait lainnya untuk pengembangan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung.

Mengingat pentingnya pencapaian target 1 juta unit sesuai RPJMN, dengan ini kami mengusulkan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut kami lampirkan data dan informasi terkait proyek sebagai pemenuhan kriteria PSN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan;
4. Deputi Bidang Kemaritiman Sekretaris Kabinet;
5. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas;
7. Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
8. Direktur Utama LMAN.

2. SK Tim KPBU Penyediaan Rusunawa Karawang Spuur, Kabupaten Karawang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7260793

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR: 27 / KPTS / Dp / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEWA KARAWANG SPUUR, KABUPATEN KARAWANG

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Rumah Susun Sewa Kawarang Spuur, Kabupaten Karawang, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan membentuk Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
b. bahwa para Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Karawang Spuur, Kabupaten Karawang.

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 APRIL 2021
DIREKTUR JENDERAL,

EKO D. HENDROERWANTO
NIP. 196107121989121001

3. Mandat Pendelegasian dalam Penyediaan Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang Spuur

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 419 /KPTS/M/2021
TENTANG
MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEWA CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA BANDUNG DAN KARAWANG SPUUR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri dapat memberikan mandat kepada direktur jenderal dan/atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjadi PJPK yang ditetapkan melalui keputusan Menteri;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang Spuur, perlu memberikan mandat kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab proyek kerjasama kepada pimpinan unit organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek

KELIMA : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Jenderal Perumahan masing-masing melaporkan pelaksanaan mandat sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

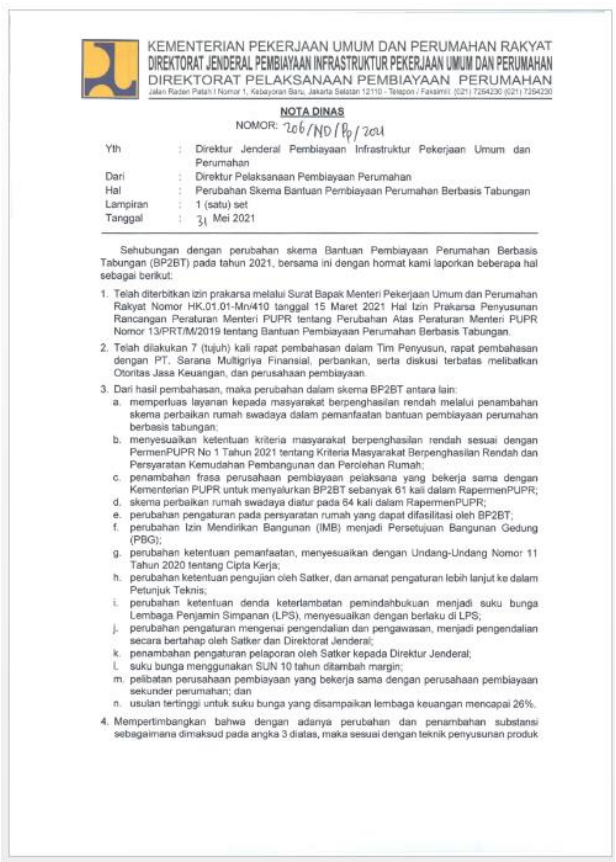
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

02. Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Lampiran Dokumen)

1. Rapermen PUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Penyampaian kembali penjelasan perubahan izin prakarsa melalui ND No. 206/ND/Pp/2021 tanggal 31 Mei 2021.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili: (021) 7264230 (021) 7254230

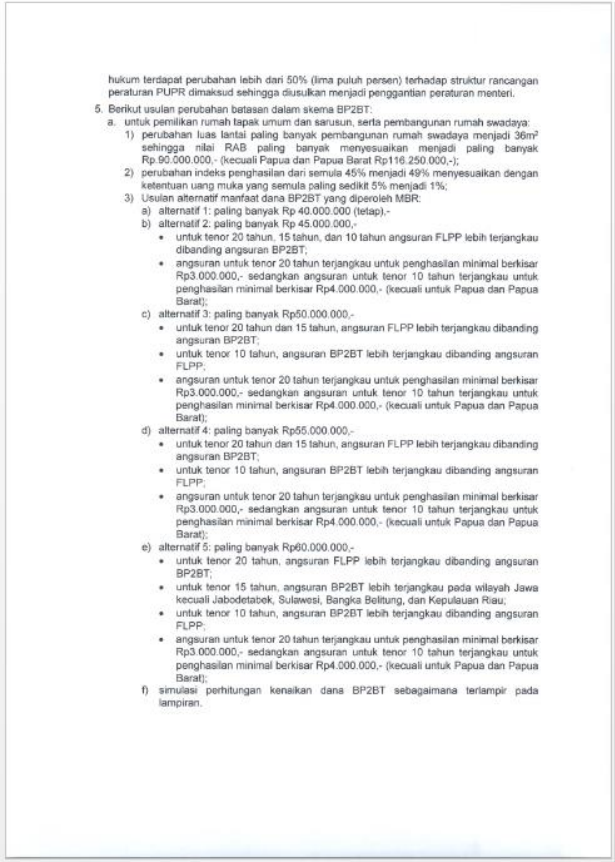
NOTA DINAS

NOMOR: 206/ND/Pp/2021

Yth	:	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dari	:	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Hal	:	Perubahan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
Lampiran	:	1 (satu) set
Tanggal	:	31 Mei 2021

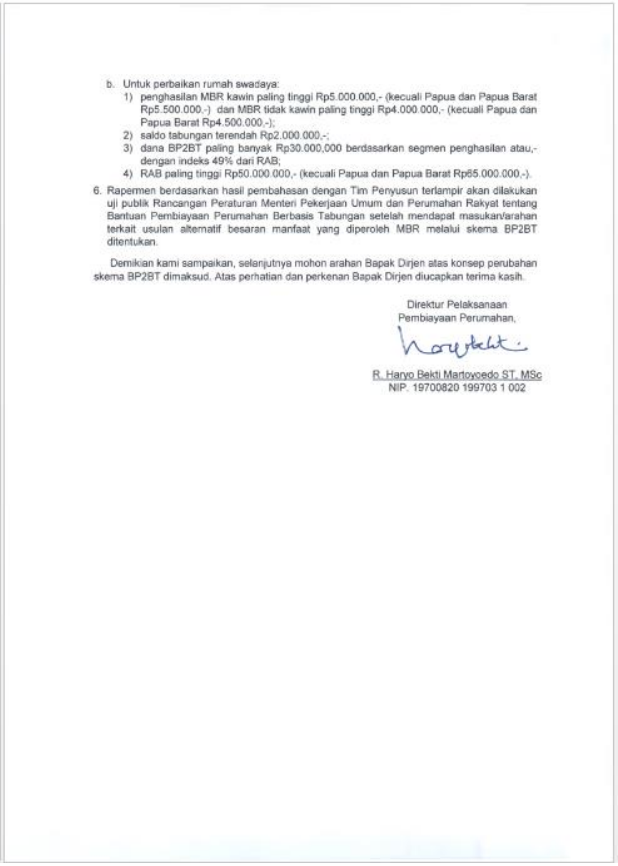
Sehubungan dengan perubahan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada tahun 2021, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan izin prakarsa melalui Surat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.01.01-Mn/410 tanggal 15 Maret 2021 Hal Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.
2. Telah dilakukan 7 (tujuh) kali rapat pembahasan dalam Tim Penyusun, rapat pembahasan dengan PT. Sarana Multigriya Finansial, perbankan, serta diskusi terbatas melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, dan perusahaan pembiayaan.
3. Dari hasil pembahasan, maka perubahan dalam skema BP2BT antara lain:
   a. memperluas layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui penambahan skema perbaikan rumah swadaya dalam pemanfaatan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan;
   b. menyesuaikan ketentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan PermenPUPR No 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;
   c. penambahan frasa perusahaan pembiayaan pelaksana yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk menyalurkan BP2BT sebanyak 61 kali dalam RapermenPUPR;
   d. skema perbaikan rumah swadaya diatur pada 64 kali dalam RapermenPUPR;
   e. perubahan pengaturan pada persyaratan rumah yang dapat difasilitasi oleh BP2BT;
   f. perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
   g. perubahan ketentuan pemanfaatan, menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   h. perubahan ketentuan pengujian oleh Satker, dan amanat pengaturan lebih lanjut ke dalam Petunjuk Teknis;
   i. perubahan ketentuan denda keterlambatan pemindahbukuan menjadi suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyesuaikan dengan berlaku di LPS;
   j. perubahan pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan, menjadi pengendalian secara bertahap oleh Satker dan Direktorat Jenderal;
   k. penambahan pengaturan pelaporan oleh Satker kepada Direktur Jenderal;
   l. suku bunga menggunakan SUN 10 tahun ditambah margin;
   m. pelibatan perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; dan
   n. usulan tertinggi untuk suku bunga yang disampaikan lembaga keuangan mencapai 26%.
4. Mempertimbangkan bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan substansi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka sesuai dengan teknik penyusunan produk



hukum terdapat perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap struktur rancangan peraturan PUPR dimaksud sehingga diusulkan menjadi penggantian peraturan menteri.

5. Berikut usulan perubahan batasan dalam skema BP2BT:
   a. untuk pemilikan rumah tapak umum dan sarusun, serta pembangunan rumah swadaya:
      1) perubahan luas lantai paling banyak pembangunan rumah swadaya menjadi 36m² sehingga nilai RAB paling banyak menyesuaikan menjadi paling banyak Rp.90.000.000,- (kecuali Papua dan Papua Barat Rp116.250.000,-);
      2) perubahan indeks penghasilan dari semula 45% menjadi 49% menyesuaikan dengan ketentuan uang muka yang semula paling sedikit 5% menjadi 1%;
      3) Usulan alternatif manfaat dana BP2BT yang diperoleh MBR:
         a) alternatif 1: paling banyak Rp 40.000.000 (tetap),-
         b) alternatif 2: paling banyak Rp 45.000.000,-
            - untuk tenor 20 tahun, 15 tahun, dan 10 tahun angsuran FLPP lebih terjangkau dibanding angsuran BP2BT;
            - angsuran untuk tenor 20 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp3.000.000,- sedangkan angsuran untuk tenor 10 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp4.000.000,- (kecuali untuk Papua dan Papua Barat);
         c) alternatif 3: paling banyak Rp50.000.000,-
            - untuk tenor 20 tahun dan 15 tahun, angsuran FLPP lebih terjangkau dibanding angsuran BP2BT;
            - untuk tenor 10 tahun, angsuran BP2BT lebih terjangkau dibanding angsuran FLPP;
            - angsuran untuk tenor 20 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp3.000.000,- sedangkan angsuran untuk tenor 10 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp4.000.000,- (kecuali untuk Papua dan Papua Barat);
         d) alternatif 4: paling banyak Rp55.000.000,-
            - untuk tenor 20 tahun dan 15 tahun, angsuran FLPP lebih terjangkau dibanding angsuran BP2BT;
            - untuk tenor 10 tahun, angsuran BP2BT lebih terjangkau dibanding angsuran FLPP;
            - angsuran untuk tenor 20 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp3.000.000,- sedangkan angsuran untuk tenor 10 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp4.000.000,- (kecuali untuk Papua dan Papua Barat);
         e) alternatif 5: paling banyak Rp60.000.000,-
            - untuk tenor 20 tahun, angsuran FLPP lebih terjangkau dibanding angsuran BP2BT;
            - untuk tenor 15 tahun, angsuran BP2BT lebih terjangkau pada wilayah Jawa kecuali Jabodetabek, Sulawesi, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau;
            - untuk tenor 10 tahun, angsuran BP2BT lebih terjangkau dibanding angsuran FLPP;
            - angsuran untuk tenor 20 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp3.000.000,- sedangkan angsuran untuk tenor 10 tahun terjangkau untuk penghasilan minimal berkisar Rp4.000.000,- (kecuali untuk Papua dan Papua Barat);
         f) simulasi perhitungan kenaikan dana BP2BT sebagaimana terlampir pada lampiran.



   b. Untuk perbaikan rumah swadaya:
      1) penghasilan MBR kawin paling tinggi Rp5.000.000,- (kecuali Papua dan Papua Barat Rp5.500.000,-) dan MBR tidak kawin paling tinggi Rp4.000.000,- (kecuali Papua dan Papua Barat Rp4.500.000,-);
      2) saldo tabungan terendah Rp2.000.000,-;
      3) dana BP2BT paling banyak Rp30.000,000 berdasarkan segmen penghasilan atau,- dengan indeks 49% dari RAB;
      4) RAB paling tinggi Rp50.000.000,- (kecuali Papua dan Papua Barat Rp65.000.000,-).
6. Rapermen berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Penyusun terlampir akan dilakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan setelah mendapat masukan/arahan terkait usulan alternatif besaran manfaat yang diperoleh MBR melalui skema BP2BT ditentukan.

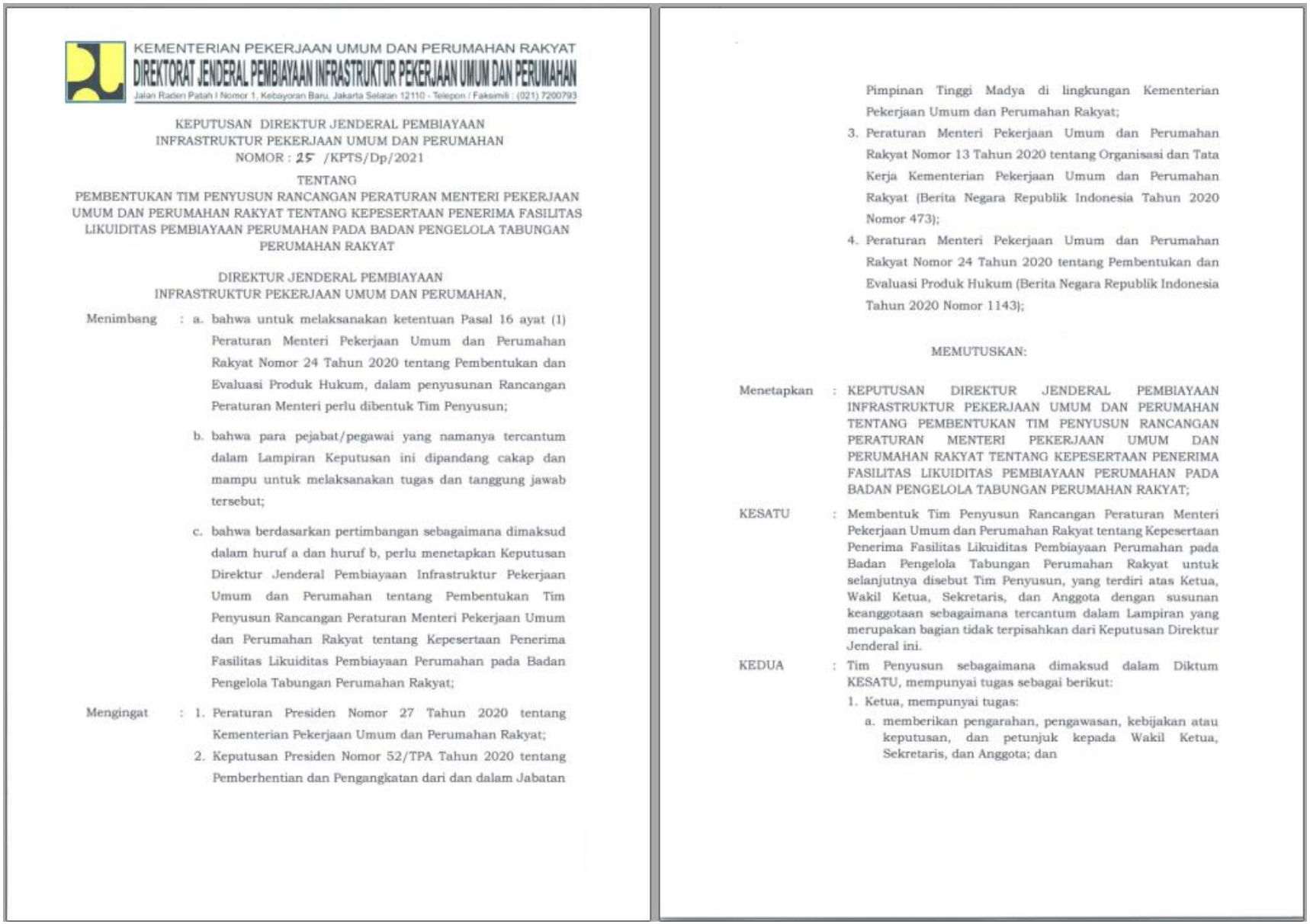
Demikian kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan Bapak Dirjen atas konsep perubahan skema BP2BT dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak Dirjen diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo ST, MSc
NIP. 19700820 199703 1 002

2. Kepesertaan FLPP

Telah diterbitkan SK Tim Penyusun RapermenPUPR melalui SK Dirjen PI No 25/KPTS/Dp/2021 tanggal 27 April 2021.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : 25 /KPTS/Dp/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KEPESERTAAN PENERIMA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KEPESERTAAN PENERIMA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun, yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua, mempunyai tugas:
   a. memberikan pengarahan, pengawasan, kebijakan atau keputusan, dan petunjuk kepada Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota; dan

b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi serta alternatif keputusan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
   a. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi untuk membantu Ketua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan; dan
   b. berkoordinasi dengan Ketua, Sekretaris, dan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
3. Sekretaris, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Anggota terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; dan
   b. membantu Ketua dalam penyusunan dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
4. Anggota, mempunyai tugas:
   a. berkoordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
   b. merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun dinyatakan berakhir pada saat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diundangkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021, Tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 2021

DIREKTUR JENDERAL,

EKO D. HERIPOERWANTO
NIP. 196107121989121001

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Senin, 17 Mei 2021
Aplikasi Zoom Meeting
Rapat Koordinasi Proyek KPBU Sektor Perumahan IKN



Senin, 5 April 2021
Aviary Hotel Bintaro, Tangerang Selatan, Banten
Rapat Pembahasan Skema Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Melalui Lembaga Pembiayaan



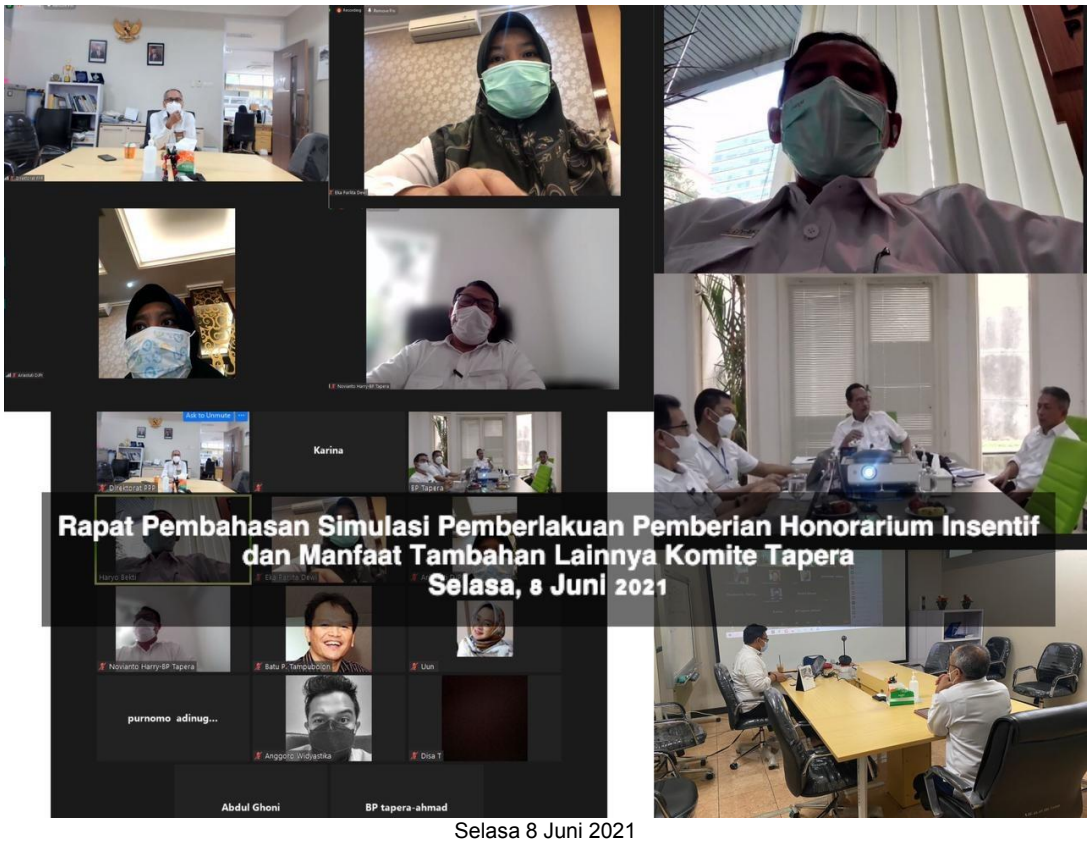
Selasa, 4 Mei 2021
Qubika Boutique Hotel, Tangerang, Banten
Rapat Pembahasan Konsep SK Tim Koordinasi Persiapan Pengalihan Dana FLPP kepada BP Tapera



Kamis, 17 Juni 2021
Aula Kantor Bupati Jayapura
Audiensi dengan Sekda Kabupaten Jayapura Membahas Persiapan Rapat Koordinasi
Penanganan Rumah KPR Bersubsidi Paska Banjir Kabupaten Jayapura

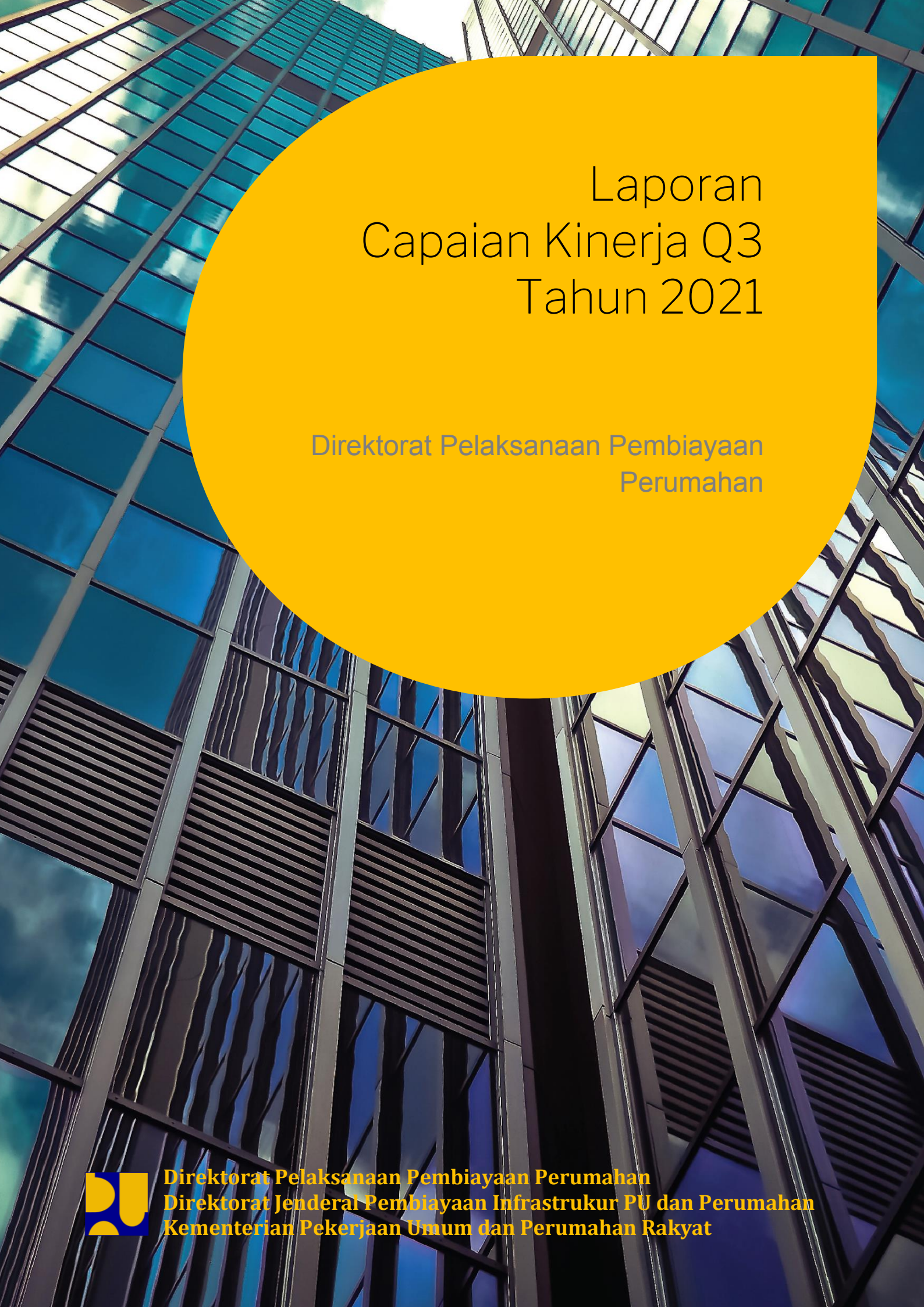


Rabu 30 Juni 2021
Aplikasi Zoom Meeting
Rapat Pembahasan Penyusunan AMDAL Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung



Selasa 8 Juni 2021
Aplikasi Zoom Meeting
Rapat Pembahasan Simulasi Pemberlakuan Pemberian Honorarium Insentif dan
Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tapera

LAMPIRAN



Laporan Capaian Kinerja Q3 Tahun 2021

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrukur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan izin-Nya Laporan Quartal 3 (Q3) Tahun Anggaran 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Q3 merupakan amanah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan laporan ini merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dan laporan pertanggungjawaban kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Q3 ini disajikan dengan mengukur sasaran, program, kegiatan, dan pencapaian kinerja yang dilakukan pada periode Bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021, sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa input, output, dan outcome yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang direalisasikan.

Penyusunan Laporan Q3 berdasarkan masukan dari seluruh Subdirektorat dan Mitra Kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Diharapkan dengan adanya Laporan Q3, dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada periode tersebut. Serta upaya untuk meningkatkan kinerja di periode berikutnya sehingga memperoleh ketercapaian mutu dalam mencapai tujuan.

Demikian Laporan Q3 disampaikan, mohon maaf jika dalam penyusunan masih terdapat banyak kekurangan. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk menyempurnakan laporan pada periode berikutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, September 2021
Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 197008201997031002

Ringkasan Eksekutif

Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Kuartal 2 yaitu sebesar Rp71.122.257.000,00 dikarenakan terdapat penambahan pagu BP2BT yang bersumber dana dari PHLN menjadi Rp45.121.627.000,00 sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Perumahan memiliki pagu semula Rp36.000.630.000,00 menjadi Rp71.122.257.000,00. Kemudian terdapat peerubahan pagu akibat refocusing dan realokasi anggaran pada Bulan Juli 2021 menjadi Rp69.985.584.000,00, dan kemudian pada Bulan Agustus 2021terdapat refocusing dan realokasi anggaran kembali, sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjadi sebesar Rp67.033.335.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) progam Kegiatan yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Progam Dukungan Manajemen. Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terkait Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target capaian pada Tahun Anggaran 2021, sedangkan Sasaran Kegiatan terkait dengan Program Dukungan Manajemen yaitu (1) Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Hingga akhir Q3 Tahun Anggaran 2021 (Bulan September 2021), Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada bulan September 2021 sebesar Rp48.289.082.000,00 atau sebesar 72,04% dari pagu anggaran Rp67.033.335.000,00. Telah dilakukan *refocusing* anggaran semula pada Bulan April 2021 sebesar Rp71.122.257.000,00 menjadi Rp69.985.584.000,00 kemudian dilakukan kembali *refocusing* anggaran menjadi Rp67.033.335.000,00.

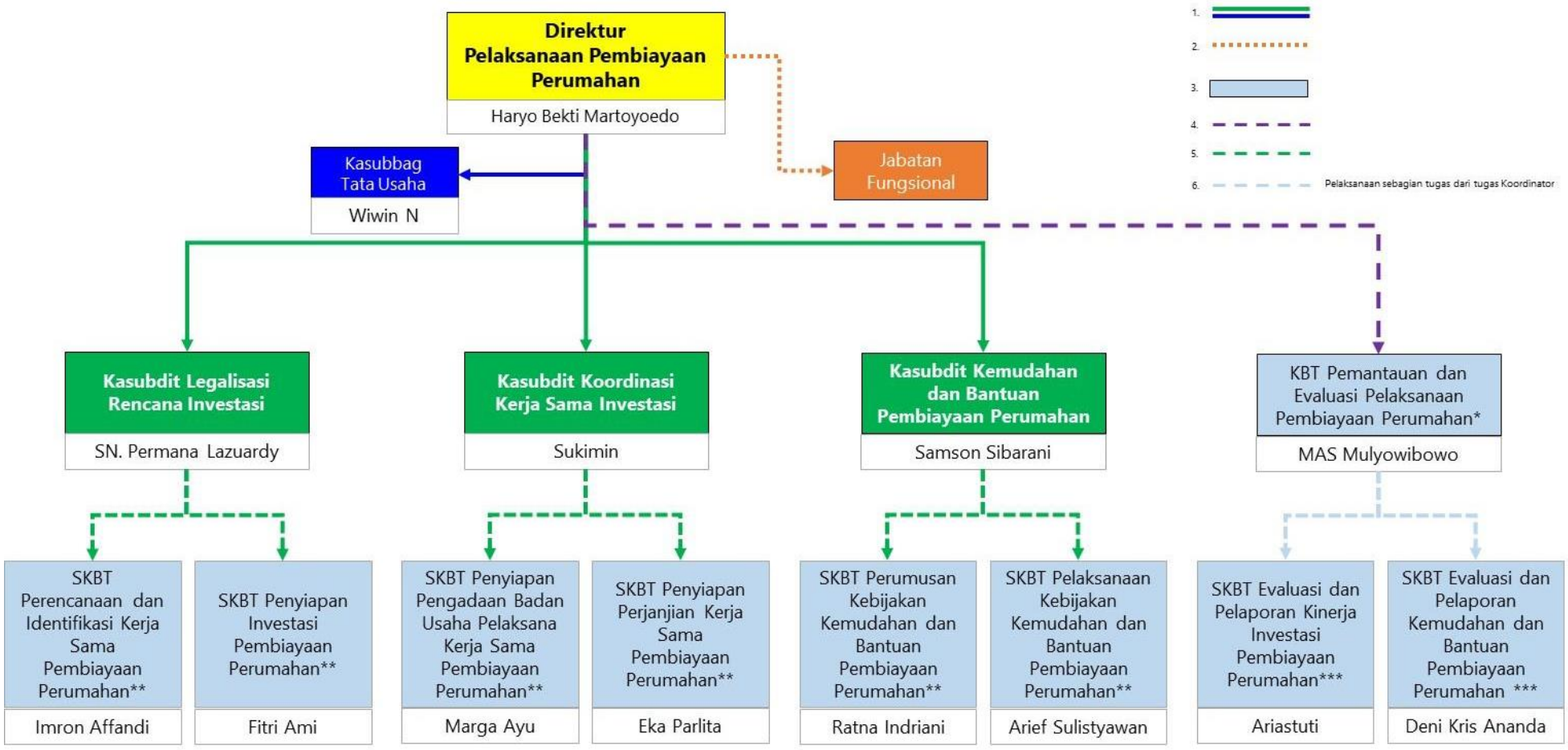
Proyek KPBU Bidang Perumahan

Kemudahan dan Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat memiliki rumah antara lain Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pada tahun Q3 2021, FLPP memiliki target penyaluran sebanyak 157.500 unit, target SBUM pada 2021 sebanyak 157.500 unit, dan untuk BP2BT memiliki target sebanyak 12.276 unit. Sedangkan untuk SSB pada tahun 2021 ini merupakan pembayaran untuk tahun sebelumnya (menggulung) dengan besar target penyaluran sebesar Rp 5.960.000.000.000,00. Pencapaian hingga 30 September 2021 untuk program FLPP adalah sebanyak 148.657 unit atau sebesar Rp16.251.802.183.511 capaian SBUM sebanyak 99.438 unit atau sebesar Rp402.516.000.000 dan BP2BT sebanyak 791 unit atau sebesar Rp31.270.000.000. Penyaluran SBK ulang tahun hingga 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.242.679.893.070.

Tujuan dari Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kementerian PUPR turut hadir dalam memberikan dukungan agar proses kebutuhan dasar manusia yaitu rumah dapat terpenuhi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema oembiayaan perumahan dapat tercapai.

Struktur Organisasi



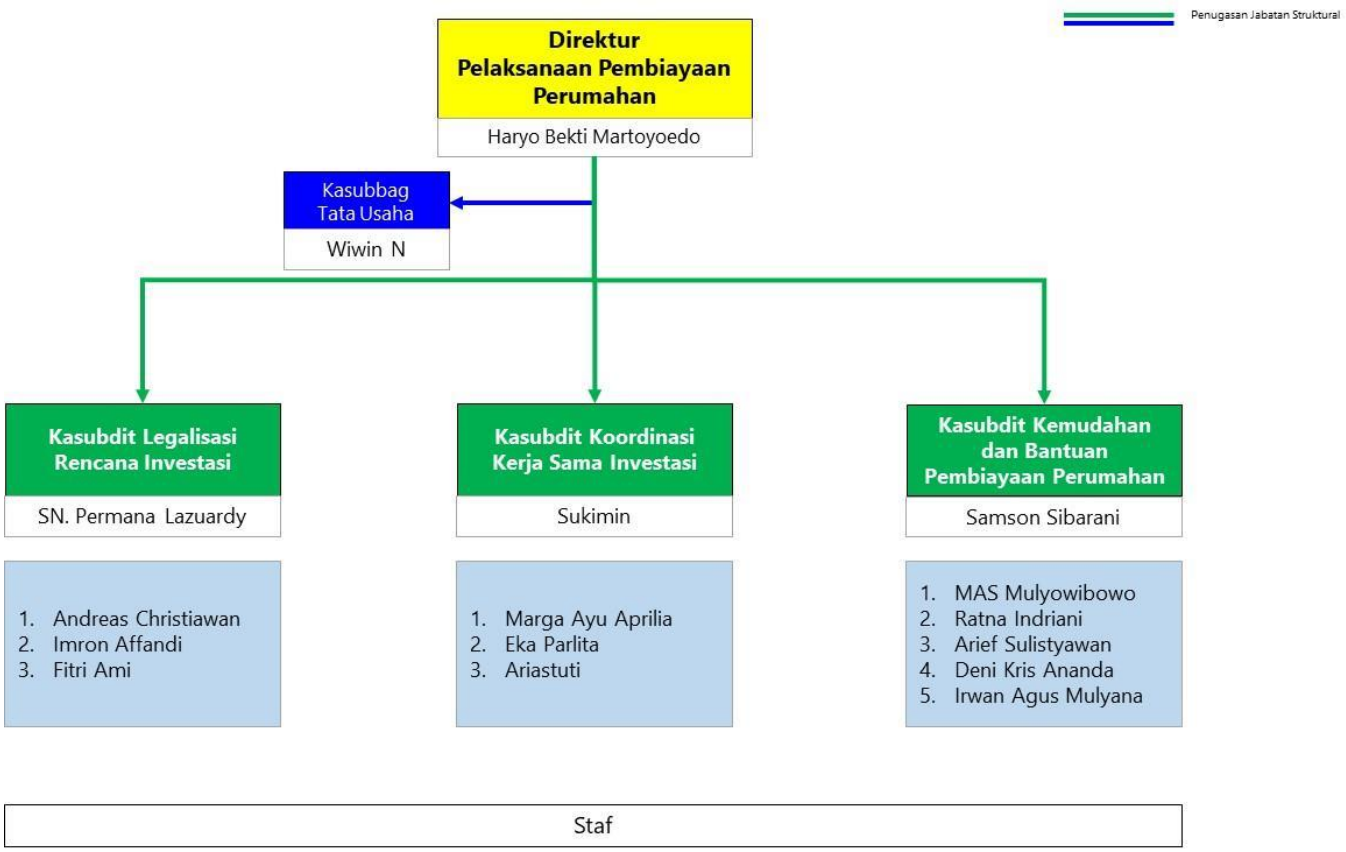
* *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.1a*

** *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.2a*

*** *Berdasarkan SE 29/2020 Poin E.2c*

Struktur Administrasi Organisasi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



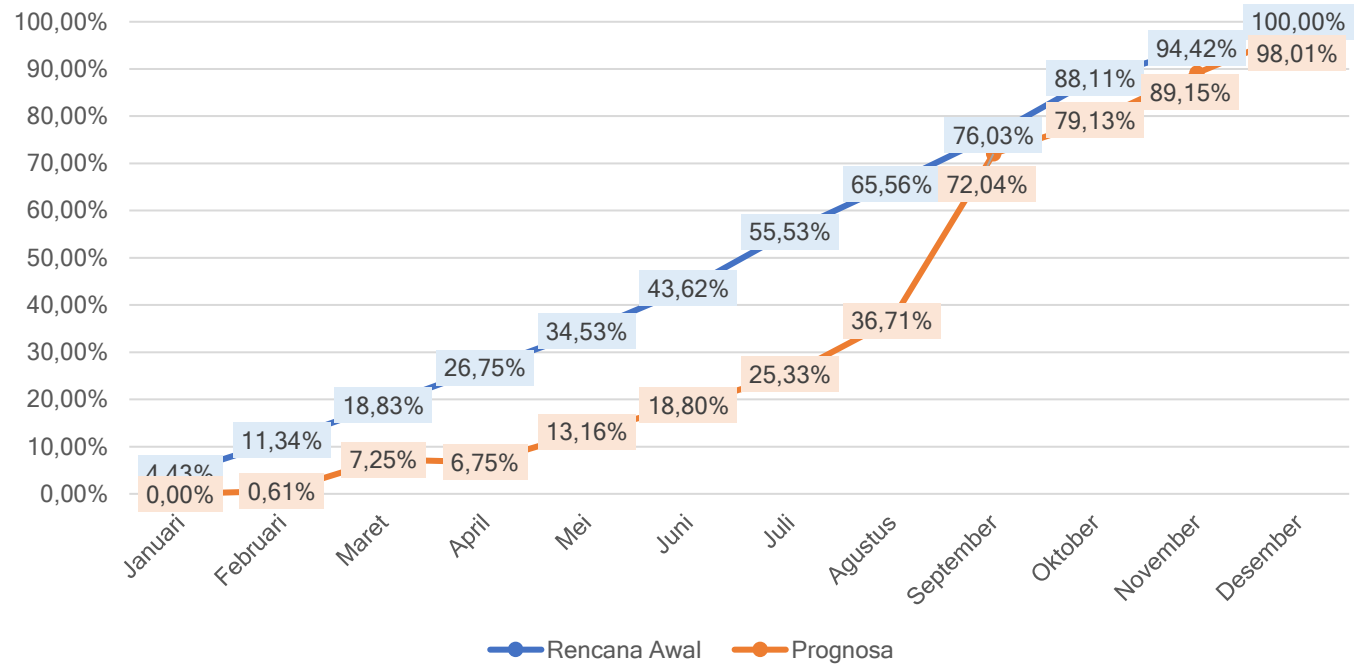
Perencanaan Kegiatan Keuangan

Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada bulan April 2021 sebesar Rp71.122.257.000,00. Telah dilakukan *refocusing* anggaran menjadi Rp69.985.584.000,00 kemudian dilakukan kembali *refocusing* anggaran menjadi Rp67.033.335.000,00. Berdasarkan data dari *e-monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status 30 September 2021, Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada bulan September 2021 sebesar Rp48.289.082.000,00 atau sebesar 72,04% dari pagu anggaran Rp67.033.335.000,00

Progam Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari 2 (dua) progam Kegiatan yaitu Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Progam Dukungan Manajemen dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan
2. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Selama tatanan kenormalan baru, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengoptimalkan pemanfaatan ruang kerja sesuai aturan dan tetap memaksimalkan kegiatan melalui teknologi. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki rencana target penyerapan akhir tahun 2021 sebesar 100%. Kemudian disesuaikan dengan keadaan penyerapan anggaran yang telah dilakukan, sehingga prognosa kinerja anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjadi 98,01%



Gambar 1 Rencana Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2021

Selama periode Q3 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah membuat rencana kegiatan dan prognosis anggaran, hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan untuk dapat mencapai target

yang telah ditetapkan. Lebih rinci rencana anggaran dan pelaksanaan kegiata dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Cascading Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00 %	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yag disusun dibandingkan dengan target	50,00%	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	50%	Penyusunan Program dan Anggara Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	50,00 %	15,00 %	54,00 %	24,25 %
												Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	50%	Penyusunan Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan	1	1	50,00 %			
										Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun Pekerja atau Aparatur Sipil Negara (ASN)	1	2	200,00 %	40,0%		
														Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun TOD						
										Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	30%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi	40%	OBC	2	3	60,00 %	18,00 %		
												Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	60%	FBC	1	0	0,00%			
										Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia	2	2	100,00 %	20,00 %		

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
														Pengembangan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha						
										NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	-	0	0	100,00 %	15,00 %		
							Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50,00%	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan	35%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	60%	Penyusunan/Penyiapan Fasilitas e-Building Management untuk Mengukur Pencapaian Persyaratan Pemenuhan Availibility Paymen (Service Level Agreement)	3	3	60,00 %	21,00 %	43,00 %	
														Penyusunan Kriteria Penentuan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Bidang Perumahan						
														Penyusunan Dokumen Pendukung Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang Perumahan						
												Jumah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	40%	*N/A*	*1*	0	0,00%			

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
										Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Penyiapan Model Pembinaan Teknis Pemantauan dan Supervisi KPBU Perumahan	1	1	100,00 %	35,00 %		
										Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	100 %	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	100,00 %	30,00 %		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00 %	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)		100,00%	Layanan Perkantoran	100 %	Jumlah Layanan Pelaksanaan Oprasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	100 %	Operasional Direktorat	1	1	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2,00%
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaa	50,00 %	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Fasilitasi Pembiayaan	30,00%	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	100 %	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: SMF (Dana Masyarakat)	70%	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan	8.460	8.460	70,00 %	100,00 %	30,00 %	42,06 %

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
	Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Permukiman yang Layak dan Aman	Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		n Perumahan		Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)	Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target						Perumahan Rakyat (SMF)						
												Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: Tapera (Dana Masyarakat)	30%	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	50.000	50.000	30,00 %			
							Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target	50,00%	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	40%	Jumlah Penyaluran Bantyuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	100 %	Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	2.150	1.357	63,12 %	25,25 %	27,79 %	
										Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	60%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SSB (BA.999.07)	50%	SSB	175.000	90.362	25,82 %	30,34 %		
												Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka: SBUM (BA.999.07)	50%	SBUM	263.000	130.184	24,75 %			
							Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingk	20,00%	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Jumah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayan Perumahan	50%	Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	3	3	83,33 %	81,67 %	26,33 %	

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
								an dengan target						Pengembangan dan Penyempurnaan Skema Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		1				
														Penghitungan Harga Rumah Bersubsidi Tahun 2021		1				
												Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	30%	Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	2	60,00 %			
												Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	20%	-	0	-	20,0%			
										NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	100 %	Pemberdayaan Pelaku Pembangunan Rumah Bersubsidi	1	1	100,00 %	20,0%		
										Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem	15%	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem	100 %	Strategi Pelibatan Pemerintah Daerah dalam Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan/Bant	4	4	100,00 %	15,00 %		

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
										Pembiayaan Perumahan		Pembiayaan Perumahan		uan Pembiayaan Perumahan						
														Penatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan dengan Geo-Enables Monitoring and Supervision (GEMS)						
														Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 1						
														Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Wilayah 2						
										Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	15%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	100 %	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1	1	100,00 %	15,00 %		
														Operasional PHLN						
														Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT						
														Penyiapan Tata Kelola Pengawasan, Pengendalian, dan Penanganan						

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
														Pengaduan Program BP2BT						
														Pengembangan Kapasitas untuk Pembiayaan kepada Kelompok Penghasilan Tidak Tetap						

Tabel 2 Prognosis Anggaran Kuartal 3 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)		
				Juli	Agustus	September
Uker	033.16	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	67.033.335.000			
Program	033.16.IA	Perumahan dan Kawasan Permukiman	58.371.627.000	54,99%	64,97%	75,49%
Kegiatan	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	58.371.627.000	54,99%	64,97%	75,49%
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4.813.401.000	55,04%	65,73%	74,92%
RO	4976.ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4.813.401.000	55,04%	65,73%	74,92%
Paket	051	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	3.868.637.000	53,00%	66,50%	76,50%
	051.A	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	596.290.000	48,00%	68,00%	78,00%
	051.B	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	622.347.000	58,00%	65,00%	75,00%
	051.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.650.000.000	61,00%	73,00%	80,00%

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)		
				Juli	Agustus	September
	052	**Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayan Perumahan**	**354.126.000**	61,00%	73,00%	80,00%
	052.A	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	354.126.000	**58,00%**	**68,00%**	**78,00%**
	053	**Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**590.638.000**	58,00%	68,00%	78,00%
	053.A	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	590.638.000			
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**602.384.000**	**56,00%**	**68,00%**	**86,00%**
RO	**4976.AFA.001**	**NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**602.384.000**	**56,00%**	**68,00%**	**86,00%**
Komponen	**051**	**Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**602.384.000**	**56,00%**	**68,00%**	**86,00%**
Paket	051.A	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	602.384.000	56,00%	68,00%	86,00%
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**1.157.375.000**	**68,00%**	**76,00%**	**86,00%**
RO	**4976.EAL.001**	**Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1.157.375.000**	**68,00%**	**76,00%**	**86,00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1.157.375.000**	**68,00%**	**76,00%**	**86,00%**
Paket	051.A	Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Konstruksi Rumah untuk MBR yang Mengikui Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	363.791.000	68,00%	76,00%	86,00%
	051.B	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan	793.584.000	68,00%	76,00%	86,00%
KRO	**PEA**	**Koordinasi**	**729.558.000**	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**
RO	**4976.PEA.001**	**Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**729.558.000**	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)		
				Juli	Agustus	September
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**729.558.000**	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**
Paket	051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	729.558.000	**59,00%**	**67,00%**	**77,00%**
KRO	**QAH**	**Pelayanan Publik Lainnya**	**5.947.282.000**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**
RO	**4976.QAH.001**	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**2.974.484.000**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**2.974.484.000**	53,00%	62,00%	74,00%
Paket	051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	2.974.484.000	53,00%	62,00%	74,00%
RO	**4976.QAH.002**	**Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**2.972.798.000**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**2.972.798.000**	53,00%	62,00%	74,00%
Paket	051.A	Dana Operaional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN	2.972.798.000	53,00%	62,00%	74,00%
KRO	**QFC**	**Subsidi kepada Keluarga**	**45.121.627.000**	**48,48%**	**60,36%**	**70,88%**
RO	**4976.QFC.001**	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**45.121.627.000**	**48,48%**	**60,36%**	**70,88%**
Komponen	**051**	**Penyaluran Bantua Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**45.121.627.000**	48,48%	60,36%	70,88%
Paket	051.A	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40.000.000.000	48,00%	60,00%	71,00%
	051.B	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5.121.627.000	52,00%	63,00%	70,00%
Program	**033.WA**	**Program Dukungan Manajamen**	**8.661.708.000**	**56,88%**	**67,03%**	**77,40%**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)		
				Juli	Agustus	September
Kegiatan	**4194**	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**886.080.000**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**
KRO	**EAA**	**Layanan Perkantoran**	**886.080.000**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**
RO	**4194.EAA.006**	**Operasionalisasi Kantor Direktorat**	**886.080.000**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**
Komponen	**002**	**Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP**	**886.080.000**	**65,00%**	**75,00%**	**85,00%**
Paket	002.E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	886.080.000	65,00%	75,00%	85,00%
Kegiatan	**4197**	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**7.775.628.000**	**56,01%**	**66,17%**	**76,58%**
KRO	**ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**4.516.609.000**	**57,77%**	**67,04%**	**76,99%**
RO	**4197.ABF.013**	**Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**446.350.000**	**56,73%**	**64,47%**	**72,97%**
Komponen	**051**	**Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**446.350.000**	**56,73%**	**64,47%**	**72,97%**
Paket	051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	282.030.000	55,00%	62,00%	70,00%
		Belanja Penanganan Covid-19	164.320.000	**62,00%**	**72,00%**	**82,00%**
RO	**4197.ABF.014**	**Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**922.008.000**	52,00%	63,00%	75,00%
Komponen	**051**	**Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**922.008.000**	**52,00%**	**63,00%**	**75,00%**
Paket	051.A	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	922.008.000	52,00%	63,00%	75,00%
RO	**4197.ABF.015**	**Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumaan**	**2.501.770.000**	60,40%	69,48%	79,57%
Komponen	**051**	**Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**2.501.770.000**	60,40%	69,48%	79,57%

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)		
				Juli	Agustus	September
Paket	051.A	Penyusunan OBC Proyek KPBU Perumahan	1.654.149.000	67,00%	74,00%	82,00%
	051.B	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	847.621.000	48,00%	61,00%	75,00%
RO	**4197.ABF.016**	**Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**646.481.000**	57,00%	66,00%	74,00%
Komponen	**051**	**Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**646.481.000**	**57,00%**	**66,00%**	**74,00%**
Paket	051.A	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan	646.481.000	57,00%	66,00%	74,00%
KRO	**AEE**	**Kemitraan**	**2.050.417.000**	**54,40%**	**66,40%**	**77,60%**
RO	**4197.AEE.004**	**Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan**	**2.050.417.000**	54,40%	66,40%	77,60%
Komponen	**051**	**Pelaksanaaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1.279.384.000**	**54,00%**	**66,00%**	**78,00%**
Paket	051.A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1.279.384.000	54,00%	66,00%	78,00%
Komponen	**052**	**Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**771.033.000**	**55,00%**	**67,00%**	**77,00%**
Paket	052.A	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	771.033.000	55,00%	67,00%	77,00%
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**366.067.000**	**56,00%**	**67,00%**	**75,00%**
RO	**4197.AFA.004**	**NSPK Pembiayaan Perumahan**	**366.067.000**	**56,00%**	**67,00%**	**75,00%**
Komponen	**051**	**Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan**	**366.067.000**	**56,00%**	**67,00%**	**75,00%**
Paket	051.A	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	366.067.000	56,00%	67,00%	75,00%
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**842.535.000**	**51,70%**	**61,48%**	**73,22%**
RO	**4197.EAL.007**	**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**634.946.000**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Jumlah Biaya (x Rp 1,00)	Rencana Penarikan (%)		
				Juli	Agustus	September
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**634.946.000**	**53,00%**	**62,00%**	**74,00%**
Paket	051.A	Pemantauan dan Evaluasi KPBU Bidang Perumahan	634.946.000	53,00%	62,00%	74,00%
RO	**4197.EAL.008**	**Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**207.589.000**	**48,00%**	**60,00%**	**71,00%**
Komponen	**051**	**Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**207.589.000**	**48,00%**	**60,00%**	**71,00%**
Paket	051.A	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	207.589.000	48,00%	60,00%	71,00%

Tabel 3 Realisasi Anggaran Kuartal 3 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Uker		**Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**				**67.033.335.000**	**19.396.742.481**	**28,94 %**	**29,71 %**	**23.861.444.498**	**36,18 %**	**36,54 %**	**32.307.740.598**	**48,20 %**	**49,20 %**
Program	**033.16.IA**	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**58.371.627.000**	**15.156.155.381**	**25,96 %**	**26,89 %**	**18.907.179.725**	**32,99 %**	**33,39 %**	**27.207.015.825**	**46,61 %**	**47,84 %**
Kegiatan	**4976**	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**				**58.371.627.000**	**15.156.155.381**	**25,96 %**	**26,89 %**	**18.907.179.725**	**44,51 %**	**44,52 %**	**27.207.015.825**	**46,61 %**	**47,84 %**
KRO	**ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**4**	**Rekomendasi Kebijakan**		**4.813.401.000**	**2.218.594.200**	**46,09 %**	**47,09 %**	**2.612.382.883**	**54,27 %**	**55,27 %**	**2.753.899.483**	**57,21 %**	**61,03 %**
RO	**4976.ABF.001**	**Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan**	**4**	**Rekomendasi Kebijakan**		**4.813.401.000**	**2.218.594.200**	**46,09 %**	**47,09 %**	**2.612.382.883**	**54,27 %**	**55,27 %**	**2.753.899.483**	**60,03 %**	**61,03 %**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Komponen	**051**	**Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**		**3.868.637.000**	**1.815.446.200**	**46,93 %**	**47,92 %**	**2.202.123.736**	**56,92 %**	**58%**	**2.337.040.336**	**60,41 %**	**61,41 %**
Paket	051.A	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	596.290.000	313.550.200	**52,58 %**	53,58 %	381.262.200	63,94 %	64,94 %	387.862.200	65,05 %	66,05 %
	051.B	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	622.347.000	232.191.000	**37,31 %**	38,31 %	289.190.500	46,47 %	47,47 %	289.805.500	46,57 %	47,57 %
	051.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Layanan	Swakelola	2.650.000.000	1.269.705.000	**47,91 %**	48,91 %	1.531.671.036	57,80 %	58,80 %	1.659.372.636	62,62 %	63,62 %
Komponen	**052**	**Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**354.126.000**	**45.034.000**	**12,72 %**	**13,72 %**	**45.033.500**	**12,72 %**	**13,72 %**	**45.033.500**	**51,00 %**	**52,00 %**
Paket	052.A	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	354.126.000	45.034.000	12,72 %	13,72 %	45.033.500	12,72 %	13,72 %	45.033.500	12,72 %	13,72 %
Komponen	**053**	**Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**590.638.000**	**358.114.000**	**60,63 %**	**61,63 %**	**365.225.647**	**61,84 %**	**62,84 %**	**371.825.647**	**62,95 %**	**63,95 %**
Paket	053.A	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	590.638.000	358.114.000	60,63 %	61,63 %	365.225.647	61,84 %	62,84 %	371.825.647	62,95 %	63,95 %
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**1**	**NSPK**		**602.384.000**	**324.546.000**	**53,88 %**	**54,88 %**	**331.146.100**	**54,97 %**	**55,97 %**	**337.746.100**	**56,07 %**	**57,07 %**
RO	**4976.AFA.001**	**NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**602.384.000**	**324.546.000**	**53,88 %**	**54,88 %**	**331.146.100**	**54,97 %**	**55,97 %**	**337.746.100**	**56,07 %**	**57,07 %**
Komponen	**051**	**Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**602.384.000**	**324.546.000**	**53,88 %**	**54,88 %**	**331.146.100**	**54,97 %**	**55,97 %**	**337.746.100**	**56,07 %**	**57,07 %**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Paket	051.A	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	1	NSPK	Swakelola	602.384.000	324.546.000	53,88 %	54,88 %	331.146.100	54,97 %	55,97 %	337.746.100	56,07 %	57,07 %
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**2**	**Laporan**		**1.157.375.000**	**360.172.000**	**31,12 %**	**32,12 %**	**418.320.518**	**36,14 %**	**37,14 %**	**432.450.518**	**37,36 %**	**38,36 %**
RO	**4976.EAL.001**	**Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Laporan**		**1.157.375.000**	**360.172.000**	**31,12 %**	**32,12 %**	**418.320.518**	**36,14 %**	**37,14 %**	**432.450.518**	**37,36 %**	**38,36 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Laporan**		**1.157.375.000**	**360.172.000**	**31,12 %**	**32,12 %**	**418.320.518**	**36,14 %**	**37,14 %**	**432.450.518**	**37,36 %**	**38,36 %**
Paket	051.A	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	1	Laporan	Swakelola	363.791.000	63.418.000	17,43 %	18,43 %	64.568.000	17,75 %	18,75 %	71.228.000	19,58 %	20,58 %
	051.B	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Laporan	Swakelola	793.584.000	296.754.000	37,39 %	38,39 %	353.752.518	44,58 %	45,58 %	361.222.518	45,52 %	46,52 %
KRO	**PEA**	**Koordinasi**	**1**	**Kegiatan**		**729.558.000**	**163.813.000**	**22,45 %**	**23,45 %**	**257.088.000**	**35,24 %**	**36,24 %**	**287.074.500**	**39,35 %**	**40,35 %**
RO	**4976.PEA.001**	**Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Kegiatan**		**729.558.000**	**163.813.000**	**22,45 %**	**23,45 %**	**257.088.000**	**35,24 %**	**36,24 %**	**287.074.500**	**39,35 %**	**40,35 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Kegiatan**		**729.558.000**	**163.813.000**	**22,45 %**	**23,45 %**	**257.088.000**	**35,24 %**	**36,24 %**	**287.074.500**	**39,35 %**	**40,35 %**
Paket	051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat	1	Kegiatan	Swakelola	729.558.000	163.813.000	22,45 %	23,45 %	257.088.000	35,24 %	36,24 %	287.074.500	39,35 %	40,35 %
KRO	**QAH**	**Pelayanan Publik Lainnya**	**2**	**Layanan**		**5.947.282.000**	**2.737.553.181**	**46,03 %**	**47,03 %**	**3.192.765.524**	**59,61 %**	**54,68 %**	**3.432.368.524**	**57,71 %**	**58,71 %**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
RO	**4976.QAH.001**	**Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**1**	**Layanan**		**2.974.484.000**	**1.581.808.181**	**53,18 %**	**54,18 %**	**1.773.088.831**	**59,61 %**	**60,61 %**	**1.931.781.831**	**64,95 %**	**65,95 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka**	**1**	**Layanan**		**2.974.484.000**	**1.581.808.181**	**53,18 %**	**54,18 %**	**1.773.088.831**	**59,61 %**	**60,61 %**	**1.931.781.831**	**64,95 %**	**65,95 %**
Paket	051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	1	Layanan	Swakelola	2.974.484.000	1.581.808.181	53,18 %	54,18 %	1.773.088.831	59,61 %	60,61 %	1.931.781.831	64,95 %	65,95 %
RO	**4976.QAH.002**	**Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1**	**Layanan**		**2.972.798.000**	**1.155.745.000**	**38,88 %**	**39,88 %**	**1.419.676.693**	**47,76 %**	**48,76 %**	**1.500.586.693**	**50,48 %**	**51,48 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1**	**Layanan**		**2.972.798.000**	**1.155.745.000**	**38,88 %**	**39,88 %**	**1.419.676.693**	**47,76 %**	**48,76 %**	**1.500.586.693**	**50,48 %**	**51,48 %**
Paket	051.A	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	1	Layanan	Swakelola	2.972.798.000	1.155.745.000	38,88 %	39,88 %	1.419.676.693	47,76 %	48,76 %	1.500.586.693	50,48 %	51,48 %
KRO	**QFC**	**Subsidi kepada Keluarga**	**1000**	**Rumah Tangga**		**45.121.627.000**	**9.351.477.000**	**20,73 %**	**21,63 %**	**12.095.476.700**	**26,81 %**	**27,81 %**	**19.963.476.700**	**44,24 %**	**45,24 %**
RO	**4976.QFC.001**	**Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1000**	**Rumah Tangga**		**45.121.627.000**	**9.351.477.000**	**20,73 %**	**21,63 %**	**12.095.476.700**	**26,81 %**	**27,81 %**	**19.963.476.700**	**44,24 %**	**45,24 %**
Komponen	**051**	**Penyaluran Bantua Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan**	**1000**	**Rumah Tangga**		**45.121.627.000**	**9.351.477.000**	**20,73 %**	**21,63 %**	**12.095.476.700**	**26,81 %**	**27,81 %**	**19.963.476.700**	**44,24 %**	**45,24 %**
Paket	051.A	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	1000	Rumah Tangga	Swakelola	40.000.000.000	5.262.000.000	13,16 %	14,16 %	8.006.000.000	20,02 %	21,02 %	15.874.000.000	39,69 %	40,69 %
	051.B	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	1	Pendampingan	Seleksi	5.121.627.000	4.089.477.000	79,85 %	80,00 %	4.089.476.700	79,85 %	80,85 %	4.089.476.700	79,85 %	80,85 %
Program	**033.WA**	**Program Dukungan Manajamen**				**8.661.708.000**	**4.240.587.100**	**48,96 %**	**48,70 %**	**4.954.264.773**	**57,62 %**	**57,75 %**	**5.100.724.773**	**58,89 %**	**59,87 %**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Kegiatan	**4194**	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**				**886.080.000**	**399.626.000**	**45,10 %**	**50,96 %**	**453.084.262**	**51,13 %**	**52,13 %**	**505.652.262**	**57,07 %**	**58,07 %**
KRO	**EAA**	**Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**		**886.080.000**	**399.626.000**	**45,10 %**	**50,96 %**	**453.084.262**	**51,13 %**	**52,13 %**	**505.652.262**	**57,07 %**	**58,07 %**
RO	**4194.EAA.006**	**Operasionalisasi Kantor Direktorat**	**1**	**Layaan**		**886.080.000**	**399.626.000**	**45,10 %**	**50,96 %**	**453.084.262**	**51,13 %**	**52,13 %**	**505.652.262**	**57,07 %**	**58,07 %**
Komponen	**002**	**Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP**	**1**	**Layanan**		**886.080.000**	**399.626.000**	**45,10 %**	**50,96 %**	**453.084.262**	**51,13 %**	**52,13 %**	**505.652.262**	**57,07 %**	**58,07 %**
Paket	002.E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1	Layanan	AU	886.080.000	399.626.000	45,10 %	50,96 %	453.084.262	51,13 %	52,13 %	505.652.262	57,07 %	58,07 %
Kegiatan	**4197**	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**				**7.775.628.000**	**3.840.961.100**	**49,40 %**	**48,45 %**	**4.501.180.511**	**58,35 %**	**58,39 %**	**4.595.072.511**	**59,10 %**	**60,07 %**
KRO	**ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**	**5**	**Rekomendasi Kebijakan**		**4.516.609.000**	**2.250.743.000**	**49,83 %**	**50,41 %**	**2.749.882.911**	**60,88 %**	**61,85 %**	**2.774.774.911**	**61,43 %**	**62,40 %**
RO	**4197.ABF.013**	**Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**446.350.000**	**156.505.000**	**35,06 %**	**33,94 %**	**168.549.000**	**37,76 %**	**38,39 %**	**175.149.000**	**39,24 %**	**39,87 %**
Komponen	**051**	**Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**446.350.000**	**156.505.000**	**35,06 %**	**33,94 %**	**168.549.000**	**37,76 %**	**38,39 %**	**175.149.000**	**39,24 %**	**39,87 %**
Paket	051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	282.030.000	156.505.000	55,49 %	53,72 %	168.549.000	59,76 %	60,76 %	175.149.000	62,10 %	63,10 %
	051.B	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Layanan	Swakelola	164.320.000	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %
RO	**4197.ABF.014**	**Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**922.008.000**	**530.437.000**	**57,53 %**	**58,53 %**	**588.936.962**	**63,88 %**	**64,88 %**	**588.936.962**	**63,88 %**	**64,88 %**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Komponen	**051**	**Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**922.008.000**	**530.437.000**	**57,53 %**	**58,53 %**	**588.936.962**	**63,88 %**	**64,88 %**	**588.936.962**	**63,88 %**	**64,88 %**
Paket	051.A	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	922.008.000	530.437.000	57,53 %	58,53 %	588.936.962	63,88 %	64,88 %	588.936.962	63,88 %	64,88 %
RO	**4197.ABF.015**	**Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumaan**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**		**2.501.770.000**	**1.125.902.000**	**45,00 %**	**46,01 %**	**1.478.862.449**	**59,11 %**	**60,11 %**	**1.485.462.449**	**59,38 %**	**60,38 %**
Komponen	**051**	**Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**		**2.501.770.000**	**1.125.902.000**	**45,00 %**	**46,01 %**	**1.478.862.449**	**59,11 %**	**60,11 %**	**1.485.462.449**	**59,38 %**	**60,38 %**
Paket	051.A	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	1.654.149.000	808.965.000	48,91 %	49,91 %	1.161.925.450	70,24 %	71,24 %	1.168.525.450	70,64 %	71,64 %
	051.B	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	847.621.000	316.937.000	37,39 %	38,39 %	316.936.999	37,39 %	38,39 %	316.936.999	37,39 %	38,39 %
RO	**4197.ABF.016**	**Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**646.481.000**	**437.899.000**	**67,74 %**	**67,27 %**	**513.534.500**	**79,44 %**	**80,44 %**	**525.226.500**	**81,24 %**	**82,24 %**
Komponen	**051**	**Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**		**646.481.000**	**437.899.000**	**67,74 %**	**67,27 %**	**513.534.500**	**79,44 %**	**80,44 %**	**525.226.500**	**81,24 %**	**82,24 %**
Paket	051.A	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	Swakelola	646.481.000	437.899.000	67,74 %	67,27 %	513.534.500	79,44 %	80,44 %	525.226.500	81,24 %	82,24 %
KRO	**AEE**	**Kemitraan**		**Rekomendasi Kebijakan**		**2.050.417.000**	**1.206.873.100**	**58,86 %**	**54,72 %**	**1.296.433.900**	**63,23 %**	**64,23 %**	**1.322.833.900**	**64,52 %**	**65,52 %**
RO	**4197.AEE.004**	**Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan**	**1**	**Kesepakatan**		**2.050.417.000**	**1.206.873.100**	**58,86 %**	**54,72 %**	**1.296.433.900**	**63,23 %**	**64,23 %**	**1.322.833.900**	**64,52 %**	**65,52 %**

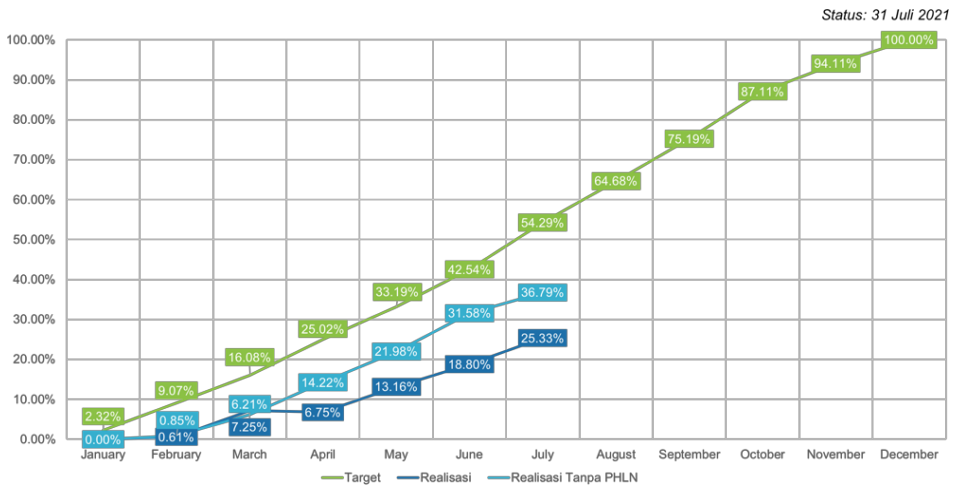
Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Komponen	**051**	**Pelaksanaaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Dokumen**		**1.279.384.000**	**959.715.100**	**75,01 %**	**69,82 %**	**1.034.415.100**	**80,85 %**	**81,85 %**	**1.047.615.100**	**81,88 %**	**82,88 %**
Paket	051.A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1	Kesepakatan	Jasa Lainnya	1.279.384.000	959.715.100	75,01 %	69,82 %	1.034.415.100	80,85 %	81,85 %	1.047.615.100	81,88 %	82,88 %
Komponen	**052**	**Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Dokumen**		**771.033.000**	**247.158.000**	**32,06 %**	**29,67 %**	**262.018.800**	**33,98 %**	**34,98 %**	**275.218.800**	**35,69 %**	**36,69 %**
Paket	052.A	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	1	Kesepakatan	Jasa Lainnya	771.033.000	247.158.000	32,06 %	29,67 %	262.018.800	33,98 %	34,98 %	275.218.800	35,69 %	36,69 %
KRO	**AFA**	**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria**	**1**	**NSPK**		**366.067.000**	**137.090.000**	**37,45 %**	**37,53 %**	**143.689.500**	**39,25 %**	**40,25 %**	**150.289.500**	**41,06 %**	**42,06 %**
RO	**4197.AFA.004**	**NSPK Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**366.067.000**	**137.090.000**	**37,45 %**	**37,53 %**	**143.689.500**	**39,25 %**	**40,25 %**	**150.289.500**	**41,06 %**	**42,06 %**
Komponen	**051**	**Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan**	**1**	**NSPK**		**366.067.000**	**137.090.000**	**37,45 %**	**37,53 %**	**143.689.500**	**39,25 %**	**40,25 %**	**150.289.500**	**41,06 %**	**42,06 %**
Paket	051.A	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	1	NSPK	Jasa Lainnya	366.067.000	137.090.000	37,45 %	37,53 %	143.689.500	39,25 %	40,25 %	150.289.500	41,06 %	42,06 %
KRO	**EAL**	**Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**	**2**	**Laporan**		**842.535.000**	**246.255.000**	**29,23 %**	**27,38 %**	**311.174.200**	**41,23 %**	**33,51 %**	**347.174.200**	**41,21 %**	**42,21 %**
RO	**4197.EAL.007**	**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**634.946.000**	**198.999.000**	**31,34 %**	**29,54 %**	**261.793.500**	**41,23 %**	**42,23 %**	**297.793.500**	**46,90 %**	**47,90 %**
Komponen	**051**	**Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**634.946.000**	**198.999.000**	**31,34 %**	**29,54 %**	**261.793.500**	**41,23 %**	**42,23 %**	**297.793.500**	**46,90 %**	**47,90 %**
Paket	051.A	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	1	Laporan	Jasa Lainnya	634.946.000	198.999.000	31,34 %	29,54 %	261.793.500	41,23 %	42,23 %	297.793.500	46,90 %	47,90 %
RO	**4197.EAL.008**	**Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**207.589.000**	**47.256.000**	**22,76 %**	**20,77 %**	**49.380.700**	**23,79 %**	**24,79 %**	**49.380.700**	**23,79 %**	**24,79 %**

Cascading	Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Target (Vol.)	Satuan	Metode	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (x Rp 1,00)	Realisasi Juli (%)		Realisasi Agustus (x Rp 1,00)	Realisasi Agustus (%)		Realisasi September (x Rp 1,00)	Realisasi September (%)	
								Keu.	Fisik.		Keu.	Fisik		Keu.	Fisik
Komponen	**051**	**Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**	**1**	**Laporan**		**207.589.000**	**47.256.000**	**22,76 %**	**20,77 %**	**49.380.700**	**23,79 %**	**24,79 %**	**49.380.700**	**23,79 %**	**24,79 %**
Paket	051.A	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	Laporan	Jasa Lainnya	207.589.000	47.256.000	22,76 %	20,77 %	49.380.700	23,79 %	24,79 %	49.380.700	23,79 %	24,79 %

Capaian
Kinerja Keuangan

JULI 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada Bulan Juli 2021 dilihat dari *e-monitoring* online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 31 Juli 2021 sebagai berikut:



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan (*e-monitoring* akses 31 Juli 2021)

Kinerja realisasi anggaran sebesar Rp18.012.371.000,00 atau sebesar 25,33% dari pagu anggaran Rp71.122.257.000,00. Terdapat deviasi sebesar 28,29% dari rencana awal dikarenakan terdapat penambahan pagu BP2BT yang bersumber dana dari PHLN menjadi Rp45.121.627.000,00 sehingga pagu Direktorat Pelaksanaan Perumahan memiliki pagu semula Rp36.000.000.630,00

Untuk rincian realisasi anggaran pada Bulan Juli 2021 dapat dilihat pada Table berikut:

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	6,532,310,000	2,309,372,000	36.72%	37.12%
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500,000,000	119,555,000	41.81%	42.00%
2	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1,000,000,000	530,437,000	53.04%	54.00%
3	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1,750,000,000	785,980,000	44.91%	45.00%
4	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	932,310,000	316,937,000	33.99%	34.00%
5	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	750,000,000	285,499,000	38.07%	39.00%
6	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	500,000,000	107,100,000	21.42%	22.00%
7	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	600,000,000	15,050,000	2.51%	3.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
8	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	500,000,000	148,814,000	29.76%	30.00%
	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	3,654,000,000	1,453,128,000	39.77%	40.04%
1	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1,500,000,000	959,715,000	63.98%	64.00%
2	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	1,000,000,000	247,158,000	24.72%	25.00%
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	854,000,000	198,999,000	23.30%	24.00%
4	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	300,000,000	47,256,000	15.75%	16.00%
	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	4,500,000,000	1,582,393,000	35.16%	35.44%
1	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	750,000,000	313,550,000	41.81%	42.00%
2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	750,000,000	232,191,000	30.96%	31.00%
3	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	750,000,000	358,114,000	47.75%	48.00%
4	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	750,000,000	318,366,000	42.45%	43.00%
5	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	500,000,000	63,418,000	12.68%	13.00%
6	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1,000,000,000	296,754,000	29.68%	30.00%
	Layanan Perkantoran	3,814,320,000	1,544,089,000	40.48%	41.13%
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1,000,000,000	348,313,000	34.83%	35.00%
2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164,320,000	0	0.00%	0.00%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,650,000,000	1,195,776,000	45.12%	46.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	49,121,627,000	9,541,581,000	19.42%	19.58%
1	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40,000,000,000	4,358,000,000	10.90%	11.00%
2	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5,121,627,000	4,089,477,000	79.85%	80.00%
3	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	4,000,000,000	1,094,104,000	27.35%	28.00%
	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	3,500,000,000	1,581,808,000	45.19%	46.00%
1	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	3,500,000,000	1,581,808,000	45.19%	46.00%
	Total	71,122,257,000	18,012,371,000	25.33%	25.57%

Tabel. Realisasi Anggaran Pada Juli TA. 2021
(e-*monitoring* akses 30 Juli 2021)

AGUSTUS 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada Bulan Agustus 2021 dilihat dari *e-monitoring* online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut:



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan
(*e-monitoring* akses 31 Agustus 2021)

Kinerja realisasi anggaran sebesar Rp24.607.448.000,00 atau sebesar 36,71% dari pagu anggaran Rp67.033.335.000,00.

Telah dilakukan refocusing anggaran semula pada Bulan April 2021 sebesar Rp71.122.257.000,00 menjadi Rp69.985.584.000,00 kemudian dilakukan kembali refocusing anggaran menjadi Rp67.033.335.000,00. Kinerja anggaran yang disandingkan dengan target, capaian tanpa PHLN (Rupiah Murni), dan prognosa kinerja anggaran hingga akhir tahun 2021 pada kurva S.

Untuk rincian realisasi anggaran pada Bulan Agustus 2021 dapat dilihat pada Table berikut:

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
	Subdirektorat Legallsasi Rencana Investasi	**5,802,040,000**	**3,195,695,000**	**55.28%**	**55.83%**
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	282,030,000	168,549,000	63.94%	64.00%
2	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	922,008,000	588,937,000	63.88%	64.00%
3	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1,654,149,000	1,161,925,000	70.24%	71.00%
4	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	847,621,000	316,937,000	37.39%	38.00%
5	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	646,481,000	513,535,000	79.44%	80.00%
6	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	366,067,000	143,690,000	39.25%	40.00%
7	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	354,126,000	45,034,000	12.72%	13.00%
8	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	729,558,000	257,088,000	35.24%	36.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	**2,892,952,000**	**1,607,609,000**	**55.57%**	**55.82%**
1	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1,279,384,000	1,034,415,000	80.85%	81.00%
2	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	771,033,000	262,019,000	33.98%	34.00%
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	634,946,000	261,794,000	41.23%	42.00%
4	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	207,589,000	49,381,000	23.79%	24.00%
	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	**3,569,034,000**	**1,785,146,000**	**50.02%**	**50.27%**
1	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	596,290,000	381,262,000	63.94%	64.00%
2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	622,347,000	289,191,000	46.47%	47.00%
3	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	590,638,000	365,226,000	61.84%	62.00%
4	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	602,384,000	331,146,000	54.97%	55.00%
5	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	363,791,000	64,568,000	17.75%	18.00%
6	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	793,584,000	353,753,000	44.58%	45.00%
	Layanan Perkantoran	**3,700,400,000**	**1,984,755,000**	**53.64%**	**53.99%**
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	886,080,000	453,084,000	51.13%	52.00%
2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164,320,000	0	0.00%	0.00%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,650,000,000	1,531,671,000	57.80%	58.00%
	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	**48,094,425,000**	**14,261,154,000**	**29.65%**	**29.78%**
1	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40,000,000,000	8,752,000,000	21.88%	22.00%
2	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5,121,627,000	4,089,477,000	79.85%	80.00%
3	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	2,972,798,000	1,419,677,000	47.76%	48.00%
	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	**2,974,484,000**	**1,773,089,000**	**59.61%**	**60.00%**

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	**Fisik**
				Capaian	**Capaian**
1	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	2,974,484,000	1,773,089,000	59.61%	60.00%
Total		67,033,335,000	24,607,448,000	36.71%	36.91%

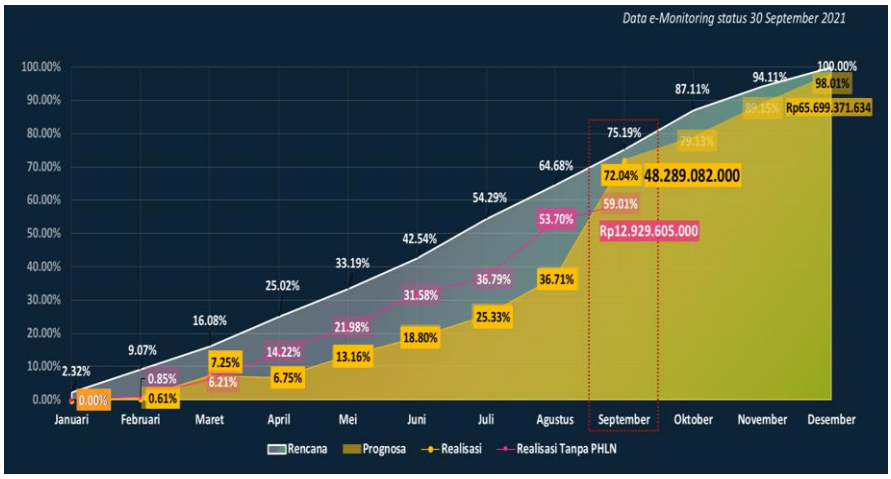
Tabel. Realisasi Anggaran Pada Agustus TA. 2021
(*e-monitoring* akses 31 Agustus 2021)

September 2021

Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2021 pada bulan September 2021 dilihat dari e-monitoring online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status tanggal 30 September 2021, sebagai berikut:

Kinerja realisasi anggaran sebesar Rp48.289.082.000,00 atau sebesar 72,04% dari pagu anggaran Rp67.033.335.000,00

Telah dilakukan refocusing anggaran semula pada Bulan April 2021 sebesar Rp71.122.257.000,00 menjadi Rp69.985.584.000,00 kemudian dilakukan kembali refocusing anggaran menjadi Rp67.033.335.000,00. Kinerja anggaran yang disandingkan dengan target, capaian tanpa PHLN (Rupiah Murni), dan prognosa kinerja anggaran hingga akhir tahun 2021 pada kurva S.



Gambar Kurva S Capaian Progres Keuangan
(*e-monitoring* akses 30 September 2021)

Rincian realisasi anggaran pada Bulan September 2021 dapat dilihat pada Tabel 1. Detail dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
	Subdirektorat Legallsasi Rencana Investasi	**5,802,040,000**	**3,483,202,000**	**60.18%**	**60.59%**
1	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	282,030,000	175,149,000	65.16%	66.00%
2	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	922,008,000	702,565,000	76.20%	77.00%
3	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	1,654,149,000	1,170,205,000	70.74%	71.00%
4	Penyiapan Dukungan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Perumahan	847,621,000	336,197,000	39.66%	40.00%
5	Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan	646,481,000	527,147,000	81.54%	82.00%
6	Penyusunan Standar Penyiapan KPBU Perumahan	366,067,000	228,290,000	62.36%	63.00%
7	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	354,126,000	45,034,000	12.72%	13.00%
8	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumaha Rakyat	729,558,000	298,615,000	40.93%	41.00%

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
	Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	**2,892,952,000**	**1,818,699,000**	**62.87%**	**63.25%**
1	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1,279,384,000	1,047,615,000	81.88%	82.00%
2	Pendampingan Pelaksaaan Pengadan Badan Usaha KPBU Perumahan	771,033,000	422,109,000	54.75%	55.00%
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan KPBU Bidang Perumahan	634,946,000	298,694,000	47.04%	48.00%
4	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	207,589,000	50,281,000	24.22%	25.00%
	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	**3,569,034,000**	**1,824,371,000**	**51.12%**	**51.54%**
1	Penyiapan Penyempurnaan Rumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	596,290,000	388,562,000	65.16%	66.00%
2	Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan Sistem Pembiayaan Perumahan	622,347,000	290,521,000	46.68%	47.00%
3	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	590,638,000	371,826,000	62.95%	63.00%
4	Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR	602,384,000	338,546,000	56.20%	57.00%
5	Penyempurnaan Pedoman Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahandan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan antuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	363,791,000	72,578,000	19.95%	20.00%
6	Pemantuan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	793,584,000	362,338,000	45.66%	46.00%
	Layanan Perkantoran	**3,700,400,000**	**2,319,701,000**	**62.69%**	**63.30%**
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	886,080,000	535,141,000	60.39%	61.00%
2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164,320,000	0	0.00%	0.00%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,650,000,000	1,784,560,000	67.34%	68.00%
	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	**48,094,425,000**	**36,860,064,000**	**76.64%**	**77.38%**
1	Pelaksanaan Penyaluran BP2BT	40,000,000,000	31,270,000,000	78.18%	79.00%
2	Pendampingan Program Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT	5,121,627,000	4,089,477,000	79.85%	80.00%
3	Operasional Bantuan Pembiayan Perumahan Berbasis Tabungan	2,972,798,000	1,500,587,000	50.48%	51.00%
	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	**2,974,484,000**	**1,983,045,000**	**66.67%**	**67.00%**

No	Paket Kegiatan	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
				Keu	Fisik
				Capaian	Capaian
1	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumhan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	2,974,484,000	1,983,045,000	66.67%	67.00%
Total		**67,033,335,000**	**48,289,082,000**	**72.04%**	**72.70%**

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pada September TA. 2021

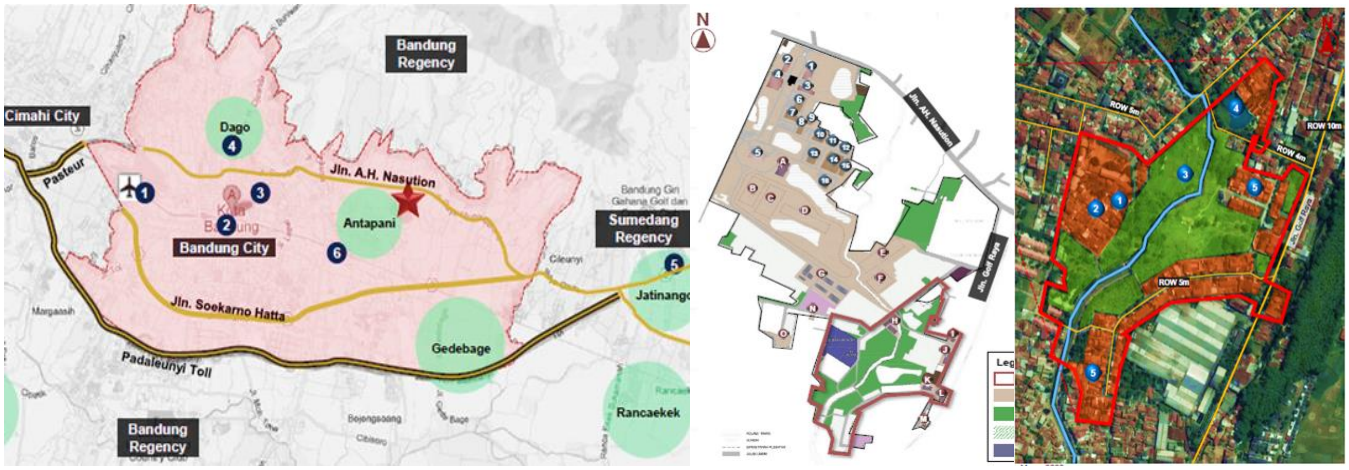
(*e-monitoring* akses 30 September 2021)

01 Proyek KPBU Perumahan

Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Pembangunan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung merupakan salah satu upaya pemenuhan backlog perumahan nasional yang masuk ke dalam program penyediaan infrastruktur sektor perumahan dan permukiman, dimana saat ini terdapat permintaan cukup tinggi untuk perumahan dengan harga yang terjangkau. Terdapat sekitar 64,1 juta unit rumah di Indonesia, sekitar 20% di antaranya berada dalam kondisi buruk dan diperkirakan 820.000 hingga 1 juta unit rumah baru dibutuhkan setiap tahun untuk menanggapi permintaan perumahan tahunan dari pertumbuhan populasi, pembentukan rumah tangga baru, dan migrasi ke daerah perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah mengidentifikasi satu bidang tanah yaitu, Komplek Pusjatan. Jl. AH. Nasution Kota Bandung, untuk pengembangan unit perumahan yang terjangkau dengan target pasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini disusun menggunakan skema KPBU dan akan memanfaatkan area komersial, sehingga dapat melakukan subsidi silang bagi harga sewa rendah dan mengurangi beban pada anggaran PJPK.



Gambar Lokasi KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

PROJECT PROFILE

PJPK	:	Kementerian PUPR
Lingkup Proyek	:	Design – Build – Finance – Maintain – Transfer (DBFMT)
Lokasi	:	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung
Bentuk Kerja Sama	:	KPBU *Solicited*
Bentuk Pengembalian Investasi	:	*Availibility Payment* (AP)
Jumlah Tower	:	11 Tower Rusunawa (Rusunawa – 4, Rusunawa Jangka Panjang – 3, Rusunawa Komersial – 4)
Jumlah Unit	:	2.378 Unit

Proyek KPBU Karawang Spuur

Indonesia sedang mengalami urbanisasi yang pesat. Sesuai dengan "Dokumen Penilaian Proyek dari Program Nasional Perumahan Terjangkau IBRD", kota-kota di negara tersebut tumbuh dengan laju 4,1% per tahun antara tahun 2000 hingga tahun 2010, lebih cepat daripada negara-negara Asia lainnya (dibandingkan dengan 3,8 persen di Cina, 3,1 persen di India dan 2,8 persen di Thailand). Pada tahun 2012, penduduk perkotaan mencapai 52% dari total penduduk dan pada tahun 2025, hampir 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. 18 juta dari 21 juta pekerjaan yang diciptakan diantara tahun 2001 dan tahun 2011 berada di daerah perkotaan, menandai pergeseran besar pekerjaan ke kota.

Menurut RPJMN 2020-2024, arah kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a) kawasan industri/KEK; (b) Kawasan pariwisata; (c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; (d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi; (e) keterkaitan desa dan kota; (f) kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga dan 187 lokasi prioritas, termasuk di dalamnya 92 pulau terluar; (g) daerah tertinggal; dan (h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. Program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional. Untuk itu, pemerintah terus berusaha dalam mewujudkan hunian layak bagi MBR yang sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan yaitu pada Kawasan/wilayah prioritas pembangunan nasional, salah satunya di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang didominasi oleh aktivitas sektor industri yang menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktivitas lain sebagai multiplier effect salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dengan dibangunnya Rumah Susun bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dengan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Karawang Regency



Project Site



Proyek KPBU Perumahan Karawang Spuur adalah proyek perumahan rakyat di atas lahan milik Kementerian PUPR seluas 1,9 ha. Lokasi proyek KPBU berada di Jalan Karawang Spuur, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Proyek KPBU Perumahan Karawang Spuur berlokasi di kawasan pengembangan Karawang *Transit Oriented Development* (*TOD*). Lahannya terletak di kawasan perkotaan Karawang, beberapa menit dari sekolah, universitas, dan kawasan industri. Selain itu lokasi proyek memiliki aksesibilitas yang tinggi, hanya beberapa menit dari pintu tol Karawang Barat 1, dan halte bus Karaba Indah. Pada proyek ini, direncanakan akan dibangun 2 tower,

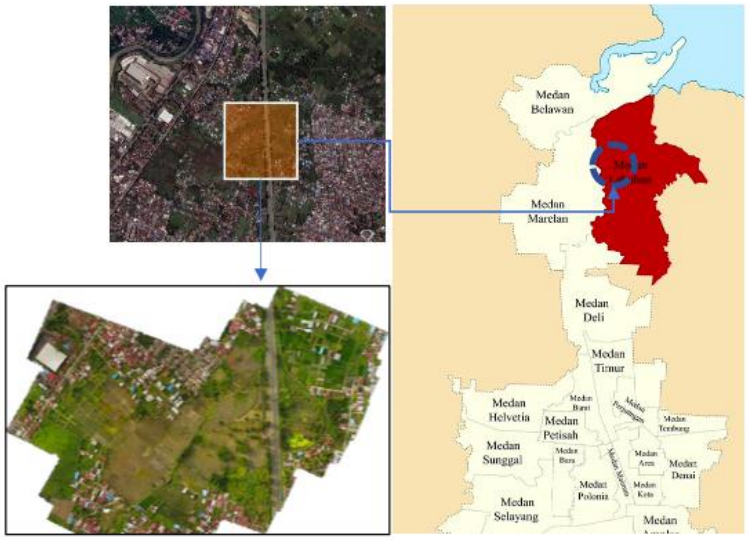
25 lantai, dengan total 1.175 unit hunian dan beberapa keperluan umum, seperti co-working space, green area, komersial, dan fasilitas sosial lainnya.

Ruang lingkup proyek KPBU Karawang Spuur adalah mennggunakan DBFOMT (Desain - Konstruksi - Pembiayaan – Operasi - Pemeliharaan dan Transfer).

Status: OBC

Proyek KPBU Desa Besar Medan

Dalam memenuhi kewajiban pemerintah dalam bidang pembiayaan perumahan, selain melalui bantuan atau kemudahan pembiayaan perumahan untuk MBR yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2017 bahwa proyek bidang perumahan dapat dilakukan dengan menggunakan Skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk di dalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional. Untuk itu, pemerintah terus berusaha dalam mewujudkan hunian layak bagi MBR yang sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan yaitu pada Kawasan/wilayah prioritas pembangunan nasional.



Gambar Lokasi Proyek KPBU Desa Besar Medan

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang didominasi oleh aktifitas sektor industri/jasa. Pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktifitas lain sebagai multiplier effect salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Tentu saja hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dibangunnya Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.

Proyek KPBU dalam Pendampingan Penyiapan

Selain mengembangkan proyek KPBU diatas lahan BMN PUPR, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga melakukan fasilitasi pendampingan proyek KPBU diantara yaitu Proyek KPBU Daan Mogot, Proyek KPBU Sei Mangkei, dan Proyek KPBU Paldam Siliwangi

Proyek KPBU Daan Mogot

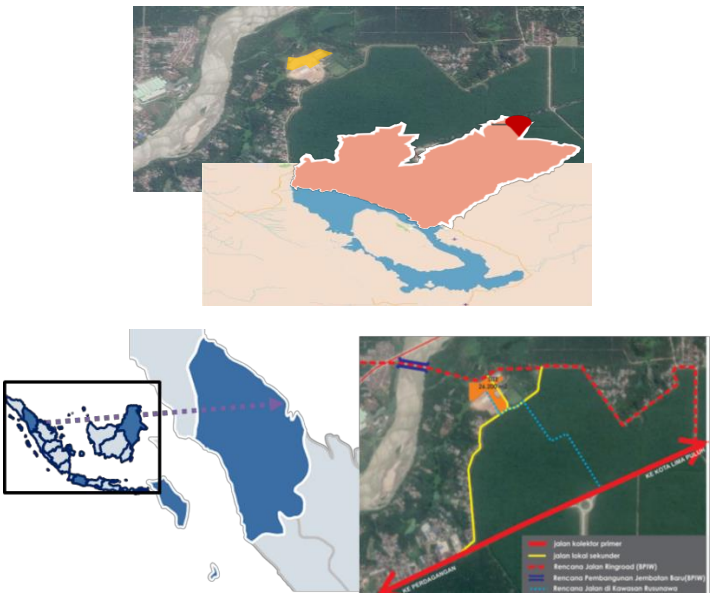
DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi di Indonesia yang didominasi oleh aktifitas sektor industri/jasa. Pertumbuhan industri yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi tumbuhnya aktifitas lain sebagai *multiplier effect* salah satunya yaitu kebutuhan akan hunian. Tentu saja hal ini akan memberi dampak terhadap kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja buruh pabrik/masyarakat berpenghasilan rendah beserta fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya karena sebagian besar pekerja berasal dari luar kawasan. Dengan dibangunnya Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja dan fasilitas pendukung (terintegrasi) lainnya, para pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak huni, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya pada lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dan biaya sewa untuk hunian yang terjangkau.



Proyek KPBU Daan Mogot merupakan proyek yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 47.599 m2 (sesuai peta bidang)

Proyek KPBU Sei Mangkei

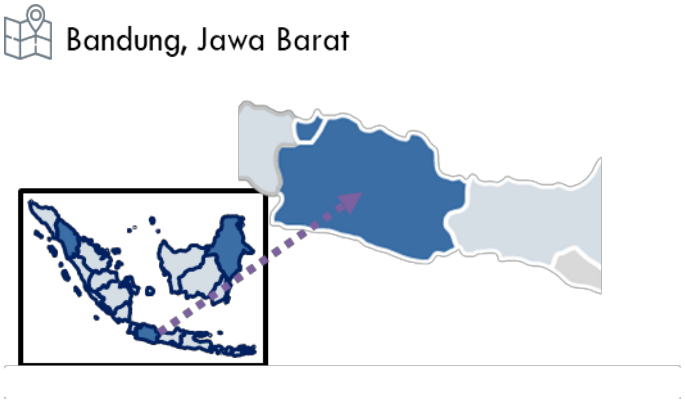
Proyek ini dibangun oleh PJPK untuk memenuhi kebutuhan pemukiman bagi pekerja di kawasan Industri KEK Seimangkei



Gambar Lokasi Proyek KPBU Sei Mangkei

Proyek KPBU Paldam Siliwangi

Proyek KPBU Paldam Siliwangi merupakan proyek yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang memiliki luas sebesar 1.5 ha. Direncanakan akan membangun 3 Tower dengan jumlah 1.087 unit.





Gambar Lokasi Proyek KPBU Paldam Siliwangi

Pelaksanaan Kegiatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah melakukan kegiatan KPBU Bidang Perumahan sebagai berikut:

1. **Rapat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan NAHP-PPP**
   Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:
   1. Rapat bertujuan menindaklanjuti Rapat Finalisasi NAHP-PPP tanggal 15 Juni 2021, yang mana pada rapat tersebut disepakati bahwa Konsultan mendapatkan perpanjangan masa kontrak s.d 15 Juli 2021 untuk mencapai *output* yang diharapkan;
   2. Pada periode kontrak, salah satu hal yang menjadi hambatan adalah kesulitan berkoordinasi antara Tim Teknis dan Tim Konsultan;
   3. Terhitung tanggal 1 Juli 2021, masih ada 14 hari lagi menuju batas waktu pengumpulan terakhir. Dengan demikian, masih terdapat peluang mencapai **output** yang diharapkan dengan menyusun rencana kerja.

   Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah berdasarkan *checklist output* pada *drive sharing*, maka terdapat dokumen yang harus dilengkapi oleh Tim Konsultan, seperti: pelengkap OBC *Financial Model*, *Basic Design* dan FBC, TOR untuk AMDAL, ANDALALIN, dan LARAP.

2. ***Capacity Building* Skema Pengembalian Investasi KPBU Perumahan**
   Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:
   1. Tujuan penyelenggaraan *Capacity Building* ini adalah peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi KPBU perumahan, agar hal-hal yang menjadi hambatan atau sesuatu yang belum terpikirkan dapat diantisipasi untuk kelancaran proyek;
   2. FGD dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi. Pada Sesi I membahas Pilihan Skema Pengembalian Investasi dalam Proyek KPBU dan Ketentuan terkait Kewajiban dan Dukungan Finansial Pemerintah dalam proyek KPBU dan KPDBU, dilanjutkan pada Sesi II yang membahas kemampuan fiskal pemerintah terhadap skema pengembalian investasi.
   3. Pokok pembahasan pada Sesi I:
      a. Pengembalian investasi dalam proyek KPBU kepada investor bisa melalui tarif, *availability payment* dan bentuk lainnya yakni kombinasi dengan kegiatan komersial baik itu *mix used*, TOD atau pemanfaatan BMN;
      b. *User charge* merupakan pengembalian bagi investor menggunakan tarif yang dibebankan kepada pengguna atas manfaat yg didapatkannya. Hasil pembebanan tarif ini digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh badan usaha. Biasanya pengelolaan *user charge* ini dikelola langsung oleh badan usaha yang bersangkutan pada proyek tersebut;
      c. *Availability payment* yakni pembayaran dari PJPK selama masa kontrak sesuai ketersediaan layanan yang diberikan BUP. Adapun apabila terdapat penerimaan dari proyek tersebut, tidak bisa langsung diterima oleh badan usaha namun dikelola oleh PJPK baik melalui UPT ataupun BLU;
      d. Dalam hal mengakses sumber dana lain untuk memperoleh dukungan pembiayaan untuk membangun infrastrukstur perumahan dibutuhkan kreatifitas untuk mendapatkan sumber dana lain yang *cost of fund* nya rendah antara lain melalui dana filantropi atau sumber dana *green finance*, dan kombinasi PJPK;
      e. Struktur pengembalian investasi untuk perumahan sebaiknya menggunakan AP karena KPBU Perumahan diarahkan untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi MBR dan kelompok masyrakat yang taraf ekonominya lebih rendah;

f. Dukungan pemerintah dalam proyek KPBU adalah membantu PJPK agar sukses melibatkan swasta untuk membangun sarana infrastruktur dan men-*deliver* layanan yg diinginkan melalui PDF maupun VGF.
g. Terkait pembangunan rusun untuk MBR Dalam UU 23/2014 sudah tegas disebutkan untuk MBR, kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat, namun Pemda dapat berpartisipasi dalam hal penyediaan fasum fasos yang mendukung rusun MBR tersebut.

4. Pokok pembahasan pada Sesi II:
   a. Perlu diingat bahwa pada saat merencanakan/menyiapkan proyek KPBU yang nantinya akan menggunakan skema AP, maka pada pagu indikatif menjadi krusial terkait dengan besaran alokasi KPBU yang akan membebani Belanja K/L tersebut;
   b. *Concern* dari KPBU AP adalah kepastian. Hal ini dikarenakan menjadi salah satu pertimbangan penting yang dilihat dari para investor sebelum memutuskan untuk membuat perjanjian dengan pemerintah;
   c. Dalam hal Proyek KPBU dengan skema pengembalian AP, maka DJA terlebih dahulu akan melihat kepada kemampuan fiskal PJPK (K/L), penetapan batas atas (*ceiling*) untuk alokasi pembayaran AP (kumulatif), dan memastikan pengalokasian anggaran untuk pembayaran AP;
   d. KPBU dengan AP nantinya akan menjadi Variabel Belanja mengikat selain Belanja Pegawai, Operasional, dll;
   e. Proyek KPBU Perumahan di Kementerian PUPR yang sudah dimintakan data kemampuan fiskalnya adalah Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung melalui pagu Ditjen Perumahan;
   f. Belanja AP termasuk jenis Belanja Barang dan Jasa dan dialokasikan pada Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga→ Belanja Kontribusi→ Belanja Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan→ Belanja Ketersediaan Layanan (AP);
   g. Jika telah ditentukan pada saat perjanjian bahwa skema pengembalian investasi menggunakan AP, maka seharusnya tidak ada tambahan dari *revenue*. Artinya, proses pengembalian antara AP dan penggunaan *revenue* itu merupakan 2 (dua) proses yang berbeda. Namun, *revenue* ini dapat digunakan dan dikelola untuk pemeliharaan;
   h. Mekanisme *user pay* tidak langsung dapat digunakan oleh BU/BLU, namun prosesnya harus masuk ke kas negara/daerah terlebih dahulu. Kemudian, dengan adanya izin penggunaan, maka dapat dibelanjakan untuk belanja lainnya.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Terkait PJPK bersama, masih diperlukan koordinasi antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta PJPK untuk perumusan pembagian tugas antara pusat dan daerah;
2. Untuk ketiga *pilot project* (Medan, DKI, dan Cisaranten) dimohon agar proyeknya dapat diteruskan;
3. DJPI melalui Dit. PPP akan mendampingi penyiapan dan diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagi proyek KPBU Perumahan lainnya.

3. Rapat Pembahasan Kemajuan Pekerjaan NAHP-PPP KPDBU Rusun Daan Mogot

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 5 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Tim Konsultan mengusulkan opsi 1: Rusunawa MBR, Umum, Apartemen dan Pasar Modern;
2. Berdasarkan perhitungan dari Tim Konsultan, perhitungan *Project Cost* menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual per unit. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa perhitungan sementara belum menunjukkan KPDBU Rusun Daan Mogot tidak layak untuk dikerjasamakan;

3. Perlu dipahami bahwa VGF akan diberikan oleh Kementerian Keuangan pada saat akhir masa konstruksi, sehingga perlu dipikirkan biaya sementara sebelum terfasilitasi VGF; dan
4. Perlu dielaborasi kembali *financial model* sampai dengan proyek KPDBU ini dapat dikatakan "layak".

Tindak Lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Akan diadakan FGD *Review* Pasar pada 12 Juli 2021, bertujuan meng-*capture* proses *market sounding*; dan
2. Akan dibuat sesi khusus membahas *Financial Model* pada tanggal 6 Juli 2021, dalam rangka pelaksanaan FGD *Review* Pasar.

4. Rapat Pembahasan Reviu Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 5 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pembahasan reviu internal antara Tim Penyusun Studi Pendahuluan (SP) Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN dengan tim *legal expert* Dit. PPP DJPI; dan
2. Dilakukan beberapa revisi dan pemberian masukan dalam kelengkapan bab Kriteria Kepatuhan serta bab Kriteria Faktor Penentu Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*).

Tindak Lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Pada bab Kriteria Kepatuhan, perlu ditulis *highlight* (kesimpulan) pada tiap akhir sub pembahasan serta dibutuhkan tabel dasar hukum di bagian awal sebagai pembuka atau latar belakang dari subbab ini;
2. Pada Bab *Value for Money,* perlu ditinjau kembali tentang tinjauan fleksibilitas Badan Usaha Pelaksana;
3. Perlu adanya bab tambahan yang membahas tentang *outstanding issues.*

5. Rapat Pembahasan Penyiapan SK Tim KPBU dan Kepmen Pendelegasian KPBU Rusun Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka penyiapan dan pembentukan Tim KPBU serta penyusunan rancangan kepmen Pendelegasian Proyek KPBU Desa Besar Medan;
2. Proyek KPBU Desa Besar telah mendapat tawaran dari Kemenkeu agar diusulkan untuk pengajuan PDF ke Kemenkeu (menyusul Proyek KPBU Cisaranten yang telah mendapat persetujuan PDF, dan Proyek KPBU Karawang Spuur yang saat ini dalam proses pengajuan PDF);
3. Perlu dipersiapkan dalam hal pengajuan PDF adalah:
    - Tim KPBU dan Kepmen Pendelegasian;
    - *Draft* Kepmen Pendelegasian Desa Besar Medan;
4. Mandat tersebut diberikan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum Dan Perumahan dan Direktur Jenderal Perumahan;
5. Pembentukan Tim KPBU dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan saat ini sedang disusun *Draft* Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang pembentukan tim KPBU dalam penyediaan Rusun Desa Besar Medan; dan
6. Diusulkan selain Biro Keuangan, Biro Perencanaan juga diharapkan dapat masuk ke dalam SK Tim KPBU.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah akan diagendakan rapat pembahasan Rancangan SK Tim KPBU dan *draft* Kepmen Pendelegasian Proyek KPBU Desa Besar Medan.

6. Pembahasan *Financial Model* Proyek KPDBU Rusun Daan Mogot

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. *Financial Model* Proyek Daan Mogot terlalu konservatif dibandingkan dengan proyek-proyek KPBU lainnya; dan
2. Untuk proyek KPDBU rusun Daan Mogot, yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi *project IRR* adalah *project cost* dan *project revenu*e. Oleh sebab itu dua hal tersebut penting untuk di reviu lebih jauh agar mencapai viabilitas yang optimal. Beberapa saran yang diusulkan adalah menurunkan *project cost* hingga 10-20% dan mencari alternatif untuk area komersial selain mall.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Konsultan akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
   - Mengkaji ulang *unit cost* pada *financial model* proyek Daan Mogot;
   - Membandingkan harga LTL perbulan dengan harga sewa per bulan;
   - Merekonfigurasi tingkat kapasitas hunian dari 1600 unit menjadi 1000 unit;
2. FGD potensi pasar KPDBU Rusun Daan Mogot diundur menjadi tanggal 14 Juli 2021.

7. FGD Perumusan Spesifikasi Keluaran Proyek KPBU Rumah Susun

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. FGD dilaksanakan dalam rangka penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan pada Proyek KPBU Perumahan yang mana memerlukan *benchmark* atau parameter dengan standar yang jelas dalam pengukuran hasil *output* Proyek KPBU Rumah Susun;
2. Spesifikasi keluaran meliputi cakupan, parameter, dan indikator layanan suatu Proyek Rumah Susun dalam aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kemudahan Bangunan Hunian, khususnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung;
3. Untuk melengkapi ketentuan spesifikasi keluaran, maka diadakanlah pembahasan dan diskusi yang diawali dengan pemaparan materi dari beberapa pihak terkait seperti:
   a. Ketentuan dan Contoh Spesifikasi Keluaran yang Digunakan dalam Proyek KPBU oleh Dit. Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas;
   b. Ketentuan Keandalan Bangunan Gedung Rumah Susun oleh Dit.Bina Teknik Perumahan dan Permukiman, DJCK; dan
4. Konsep Standar Layanan Rumah Susun oleh Dit. Rusun, DJP.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Pembahasan spesifikasi keluaran Proyek KPBU Rumah Susun dilakukan dari aspek makro (isu perumahan secara global) hingga teknis yang ketentuan teknis yang mendetail. Termasuk kebutuhan regulasi untuk penerbitan *Service Level of Agreement* (SLA), yang dapat disamakan menjadi dasar *output* proyek KPBU antara Badan Usaha dan Pemerintah; dan
2. Selain penetapan parameter teknis, ketentuan pembiayaan proyeknya juga harus dilihat. Dimana perlu dibentuk pula ketentuan pembayaran AP dari Pemerintah Pusat (dalam hal ini PUPR) kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) bilamana *output-output* tersebut tidak terpenuhi.

8. FGD *Benchmarking* Pembangunan dan Pengelolaan Sewa pada Rusun ASN PUPR

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Penentuan biaya sewa rumah negara masih menggunakan dasar hukum Kepmen Kimpraswil No. 373 tahun 2001;
2. Rumah negara terbagi atas 3 golongan, golongan 1 dan 2 untuk disewa berdasarkan jabatan tertentu, golongan 3 dapat dimiliki dengan mengangsur atau skema pembayaran lainnya oleh ASN;

3. Pada pasal 70 ketentuan penyewaan rusun negara sebagaimana dimaksud dalam PP rumah negara berlaku secara mutatis mutandis;
4. Saat ini biro keuangan sedang mengembangkan sistem e-PNBP sirusun untuk mempermudah pengelolaan rusun; dan
5. Saat ini sedang berproses usulan RPP PNBP.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Diskusi lanjutan terkait proses penyiapan KPBU rusun negara IKN termasuk penerapan PNBP sewa nya;
2. Penyampaian informasi perkembangan RPP PNBP.

9. Rapat Pembahasan Rancangan SK Tim KPBU dan Kepmen Pendelegasian Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Secara isi, *draft* dokumen SK Tim KPBU yang dibuat sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, hanya saja masih kurang dari segi Kepmen Pendelegasian Proyek KPBU;
2. Terkait dengan keabsahan penandatangan dokumen SK tim KPBU, tim DJPI perlu meninjau lebih lanjut dokumen pengangkatan Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur apakah dengan jabatan Plt masih memiliki wewenang untuk menandatangani dokumen SK tim KPBU tersebut;
3. Dimungkinkan untuk membuat SK tim KPBU perumahan yang sifatnya general selama tugas dan kewenangannya tidak berubah. Namun perlu diperhatikan apakah beban SK tersebut akan menjadi terlampau berat atau tidak.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. DJPI akan membuat rancangan Kepmen Pendelegasian Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan;
2. DJPI akan berkonsultasi dengan Biro Hukum terkait rancangan Kepmen Desa Besa Medan serta *Draft* SK KPBU;
3. Setelah berdiskusi dengan Biro Hukum, DJPI agar segera berkoordinasi dengan Sesditjen untuk membicarakan proses selanjutnya.

10. Rapat Pembahasan FBC Rusun Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Terkait penyempurnaan dokumen FBC, tidak banyak berubah dari dokumen OBC namun ada beberapa bagian baik itu dari sistematika penulisan maupun substansi dalam dokumen yang perlu disempurnakan;
2. Terkait dengan *green building* selain menggunakan *international standard* sesuai saran World Bank, juga perlu memperhatikan Permen PUPR No 21/2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau dan PP 16/2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Untuk konsep *green building* yang sudah dikaji oleh EDGE hasilnya sudah terefleksi dalam kajian finansial namun masih belum terefleksi secara detil dalam konsep desain serta pengaruhnya terhadap *electricity* dan *water usage*;
4. Proyek Rusun Desa Besar Medan akan menggunakan AP namun berapa tarif *support* optimal agar VGF viable masih belum dikalkulasikan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Konsultan akan:
   - Membuat detil *breakdown* perhitungan OPEX dalam FBC;
   - Memperbaiki detil biaya *Operational* dan *Maintenance* (OM) karena biaya OM antara bangunan gedung dan jalan masih digabung menjadi satu;

2. Dokumen kajian AMDAL dan ANDALALIN agar dimasukkan dalam dokumen FBC.

11. FGD Identifikasi Potensi Pasar pada Proyek KPDBU Rusun Daan Mogot

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan rencana proyek KPBDU Rusun Daan Mogot kepada badan usaha dan calon investor, BUMN, BUMD, dan pengembang untuk melihat apa yang sudah disiapkan dan juga tentunya untuk memperoleh masukan rekomendasi maupun tanggapan terkait bentuk komersial yang dapat diaplikasikan ke dalam proyek ini agar dapat menghasilkan potensi *revenue* yang dapat mempengaruhi pengembalian investasi proyek ini;
2. Dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan turunannya, dapat dipertimbangan untuk mengaplikasikan PJPK bersama dalam proyek ini. Dimana nanti akan terdapat pembagian tugas dan wewenang antara Pemprov DKI dan PUPR, misalnya dengan membangun Rusun di lahan BMD namun menggunakan menggunakan anggaran PUPR;
3. Terkait dengan kemungkinan untuk menggunakan mekanisme AP yang bersumber dari APBD, secara lembaga Kementerian Dalam Negeri memerlukan beberapa hal yang harus dikaji ulang karena ketika menggunakan AP maka beban itu akan menjadi beban APBD dalam kurun waktu tertentu, sehingga Pemprov DKI perlu memastikan ketersediaan fiskalnya mengingat kondisi pandemi seperti saat ini;
4. Terkait dengan desain dari proyek ini, yang akan ditetapkan oleh Pemprov DKI adalah spesifikasi keluarannya bukan spesifikasi Input. Spesifikasi keluaran tersebut yang nantinya menjadi layanan yang akan dikerjasamakan atau dipenuhi oleh BUP, namun untuk spesifikasi input dan desain dapat didiskusikan lebih lanjut antara BUP dan PJPK;
5. Terkait perizinan, dalam proyek ini pihak DPRKP berkomiten untuk mendampingi BUP dalam hal perizinan. Saat ini masih dilaksanakan pembahasan relaksasi beberapa ketentuan dengan DPMPTSP dan Dinas Cipta Karya Pemprov DKI;
6. Berkaitan dengan usulan sumber pendapatan dari kios, perlu dipertimbangkan kondisi *new normal* dimana transaksi masyarakat didominasi *via online*;
7. Berkaitan dengan usulan sumber pendapatan dari perkantoran, perlu dipertimbangkan *supply* ruang perkantoran yang terdapat dalam desain saat ini dengan impact *Work from Home*.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perlu disempurnakan kajian OBC dan FBC sesuai dengan masukan dari narasumber dan peserta rapat sehingga dapat menjadi satu proposal bisnis yang menarik bagi pihak developer maupun pihak pemberi pembiayaan.

12. Rapat Pembahasan Reviu Konsep Studi Pendahuluan Proyek kPBU Perumahan KIPP-IKN Tahap I

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Tujuan diadakannya rapat adalah untuk memperoleh tanggapan dan umpan balik dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Tim Kolaborasi Rancang Kota KIPP-IKN terkait substansi konsep Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN, memperoleh dukungan data dan membahas *outstanding issues* dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PUPR sebagai PJPK sementara;
2. Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Direktorat Perkotaan, Permukiman dan Perumahan Kementerian PPN/Bappenas, dokumen Studi Pendahuluan telah memenuhi kelengkapan sebesar 87% sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020. Dari 19 *item* yang dinilai, sebesar 16,5 *item* sudah memenuhi kriteria dan 2,5 *item* masih membutuhkan perbaikan;
3. Berdasarkan hasil reviu yang disampaikan oleh Dit. Perkim, Kementerian PPN/Bappenas, beberapa hal yang patut menjadi perhatian, diantaranya:

a. Penyiapan proyek ini secara spesifik mencantumkan detil area yang dibangun untuk mempertajam penyiapan proyek;
b. Penggunaan rujukan data terbaru yang mengacu pada *Masterplan* IKN yang sudah disesuaikan oleh Satgas IKN PUPR, serta memperhatikan konsistensi data; dan

4. Dibutuhkan adanya pencantuman bahwa Kementerian PUPR merupakan PJPK sementara hingga nantinya Badan Otorita IKN terbentuk, sehingga perhitungan beban AP seharusnya tidak menggerus anggaran pelayanan publik;
5. Tim Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (PPI-IKN), sedang menyusun *basic design* dari Rumah Susun yang berlokasi di Zona 1A KIPP-IKN dan menyiapkan *Key Performance Indicator* (KPI) Perumahan IKN.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. PJPK akan melakukan peninjauan dan penyempurnaan atas kelengkapan dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN;
2. PJPK akan mengumpulkan catatan-catatan terkait Konsultasi Publik mengenai IKN yang telah dilaksanakan oleh beberapa Kementerian sebelumnya;
3. Bila dirasa kurang, PJPK akan melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik kembali dalam waktu dekat;
4. Terkait dengan permohonan PDF PJPK perlu mendapatkan konfirmasi mengenai hal-hal yang mungkin saja tidak perlu dilampirkan pada persyaratan, seperti konfirmasi AP;
5. Diharapkan agar Tim Satgas PPI-IKN terus melakukan *update* kepada PJPK terkait perubahan data terbaru yang valid;
6. Terkait dengan *scope* KPBU, PJPK akan menyiapkan Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN Tahap I sesuai dengan batasan dan deliniasi kawasan KPBU yang akan dtetapkan.

13. Rapat Pembahasan Laporan Pekerjaan NAHP-PPP

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Rapat bertujuan untuk melakukan pembahasan *Final Report* (Laporan Akhir) terkait Proyek NAHP-PPP dari PT. Amythas selaku Konsultan NAHP-PPP;
2. Merupakan pembahasan terakhir yang dilakukan oleh konsultan sebelum melakukan *submit* laporan setelah dilakukannya penyempurnaan selama kurang lebih satu bulan. Laporan diharapkan memenuhi seluruh persyaratan baik dari aspek substansi dan administrasi untuk nantinya akan menghasilkan satu produk yang dapat diutilisasi;
3. Laporan akhir terhadap dua proyek NAHP-PPP, yaitu KPDBU Rusun Daan Mogot - Jakarta Barat dan KPBU Rusun Desa Besar Medan, sudah disampaikan laporan oleh konsultan per 5 Juli 2021 dengan total pengerjaan selama 13 bulan. Tim teknis Dit. PPP DJPI sudah mempelajari laporan yang disampaikan dan melakukan pengecekan sesuai dengan *Term of References* (TOR) yang ditetapkan;
4. Seluruh keluaran dokumen pada tahap penyiapan, perencanaan dan transaksi sudah dirampungkan oleh PT. Amythas. Namun, terdapat catatan pada Proyek KPDBU Rusun Daan Mogot dimana Pemerintah Provinsi DKI sebagai PJPK belum melakukan Konsultasi Publik.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah World Bank akan melakukan reviu dan pengecekan akhir, dan selanjutnya konsultan akan melakukan penyampaian dokumentasi laporan secara fisik (*hard copy*) dan menyelesaikan administrasi legal dengan Satker.

14. Rapat Pembahasan Rancangan Kepmen Mandat Sebagian Kewenangan PJPK KPBU Rusun Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Terkait dengan Kepmen Mandat Sebagian Kewenangan PJPK KPBU Rusun Desa Besar Medan sudah *clear*;

2. Mengenai isu apakah Plt. Dirjen PI dapat menandatangani SK Tim KPBU apa tidak, perlu ditanyakan pengalaman Plt di tempat lain, apakah masih bisa mengeluarkan Kepmen atau hal lain.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Melanjutkan *draft* Kepmen dengan penandatanganan sirkuler sampai ke Menteri;
2. Untuk isu lain, akan menunggu keputusan Bapak Plt. Dirjen PI apakah akan tetap menandatangani SK Tim KPBU.

15. Rapat Tindak Lanjut Fasilitasi Penyiapan Proyek KPBU Rusun Daan Mogot

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. GIF adalah *global collaboration platform* yang memberikan dukungan atas penyiapan (*preparation*), *structuring* dan *de-risking* proyek-proyek infrastruktur yang *bankable*, *sustainable* dan *high quality* di negara-negara berkembang. Bentuk dukungan yang diberikan bisa berupa *funding* serta *technical support* agar proyek pemerintah dapat menarik minat swasta;
2. Produk yang ditawarkan GIF ada tiga yaitu:
   a. PRA (*Project Readiness Assessment*) → GIF *funding* sebesar USD 50K-100K (grant)
   b. PDA (*Project Definition Activites*) → GIF *funding* sebesar USD 350k-500k (grant)
   c. PPSA (*Project Preparation and Structuring Activities*) → mengarah ke tahap *commercial/financial close* → GIF *funding* sebesar USD 1-2M → Sifatnya *reimburseable*
3. Terkait PPSA, bisa dilakukan secara paralel dengan PDA atau bahkan PRA. Hanya saja untuk fasilitas PPSA, karena ini berupa transaction, tidak dapat disupervisi oleh World Bank. Oleh sebab itu IFC diperlukan sebagai advisor;
4. Untuk proyek Medan dan Daan Mogot, fasilitas PDA bisa tetap melanjutkan mekanisme yang ada dimana PUPR akan me-*lead* dan dari sisi dokumen cukup membutuhkan *Letter of Agreement* dari Bapak Menteri. Sementara untuk fasilitas PPSA, karena ini berupa fasilitas transaksi, perlu dibicarakan lebih lanjut dengan PJPK masing-masing proyek.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. DJPI akan berkoordinasi dgn Biro PAKLN untuk membicarakan tentang fasilitas dari World Bank, baik ~~itu~~ yang berupa PDA maupun PPSA;
2. DJPI akan berdiskusi dengan Pemda DKI sebagai PJPK proyek Daan Mogot terkait fasilitas yang ditawarkan World Bank ini;
3. PSSPP akan mendiskusikan kemungkinan fasilitas GIF *funding* ini bisa digunakan untuk sektor-sektor infrastruktur lain.

16. Rapat Pembahasan Kemajuan KPBU Rusun TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Rapat bertujuan untuk membahas progres identifikasi potensi KPBU rumah susun di kawasan TOD;
2. Berdasarkan hasil pembahasan 2 (dua) FGD, rencana TOD perpanjangan Lebak Bulus-Rawa Buntu dinilai lebih potensial dibandingkan dengan Depok-Parung dilihat dari sisi kesiapan Pemerintah Daerah dalam rencana pengembangan kawasan TOD;
3. Kawasan yang difokuskan ada 3 (tiga) yaitu: Lebak Bulus, Pondok Cabe, dan Rawa Buntu;
4. Dari ketiga kawasan dapat dilihat bahwa ketiganya cukup potensial untuk pengembangan rusun, namun ada kelebihan dan kekurangan di setiap lokasi;

5. Secara regulasi, kawasan TOD Lebak Bulus sudah dapat diimplementasikan karena peraturan-peraturan yang ada telah mendukung pengembangan kawasan TOD Lebak Bulus, termasuk Panduan Rancang Kota (UDGL);
6. Untuk kawasan TOD Pondok Cabe dan Rawa Buntu masih perlu dipastikan ada atau tidaknya PRK.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Tim Konsultan agar dapat menyelesaikan *Draft* SP KPBU Rusun di Kawasan TOD;
2. Akan diselenggarakan Rapat Pembahasan *Draft* SP KPBU Rusun di Kawasan TOD pada tanggal 30 Juli 2021.

17. FGD Kelembagaan dalam Skema KPBU untuk Penyediaan Rusun SKBG

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. BP3 merupakan Lembaga non-struktural yang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU serta memiliki fungsi untuk mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Saat ini BP3 masih dalam proses pembentukan, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2022. Dalam pelaksanaan pengelolaan, BP3 menjadi mitra P3SRS;
3. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (P3SRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik/penghuni sarusun;
4. P3SRS bisa membentuk pengelolaan, mengelola sendiri atau menunjuk pengelola berbadan hukum untuk mengelola rusun SKBG. P3SRS, atas persetujuan pemilik, juga dapat menunjuk BP3 untuk mengelola rusun SKBG karena dalam rusun SKBG pemilik memiliki hak untuk mengelola;
5. Opsi BLU PPDPP sebagai *paying agent* pada pembayaran atas ketersediaan layanan AP untuk KPBU bidang perumahan mengingat tahun depan tusi PPDPP pindah ke BP Tapera sehingga celah ini bisa dimanfaatkan oleh PUPR;
6. Skenario skema pemanfaatan lahan BMN ada 2 (dua), yaitu:
   - Apabila skemanya hanya sewa maka menggunakan skema KSPI;
   - Apabila dia menggunakan skema SKBG, maka jenis pemanfaatan BMN nya adalah skema sewa. Apabila skenario dua yang dipakai maka diharapkan yang menjadi pihak penyewa aset BMN ini adalah mitra KPBU dan bukan *end user*/penghuni rusun.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Kementerian PUPR harus memastikan bahwa BLU yang dibentuk nanti memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan dan potensi *revenue* yang berkelanjutan;
2. Perlu dilakukan *stakeholder mapping* terkait kedudukan BP3, P3SRS dan BUP;
3. Perlu dikaji lebih lanjut apakah masa konsesi 60 tahun ini akan menarik minat pasar;
4. Untuk proyek infrastruktur dengan skema KPBU, penggunaan dana APBN untuk diminimalisir sehingga pada proyek ini perlu diptimalkan sumber dana dan sumber *revenue* yang tidak berasal dari APBN.

18. Rapat Pembahasan Penyiapan Pengalihan Aset BMN PUPR untuk Pilot Project KPBU Rumah Susun

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Rapat bertujuan untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 26 Maret 2021 tentang penyiapan KSPI untuk KPBU Perumahan di atas lahan BMN PUPR;
2. Terdapat tiga lokasi KPBU rusun yang rencananya akan memanfaatkan lahan BMN PUPR, yaitu Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, Desa Besar Medan, dan Karawang Spuur;
3. Penguasaan lahan pada saat ini adalah:
   a. Cisaranten oleh Dit. Bintek Jalan dan Jembatan, DJBM;

b. Desa Besar Medan oleh Dit. Jalan Bebas Hambatan, DJB;
c. Karawang Spuur oleh Setjen PUPR;

4. Pada dasarnya, semua pihak yang masih menguasai lahan BMN ini bersedia melakukan BAST kepada Ditjen Perumahan, dan Setjen PUPR siap memfasilitasi BAST ini;
5. Pada lokasi yang dibutuhkan splitzing sertifikat, maka dapat berjalan paralel dengan penyiapan proyek KPBU.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilaksanakan diskusi terpisah yang membahas secara khusus Proyek KPBU Desa Besar Medan.

19. Rapat Pembahasan Konsep SP KPBU Rusun TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 26 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Rapat dalam rangka penyampaian progres Studi Pendahuluan (SP) terkait penyiapan Proyek Rusun KPBU yang terintegrasi dengan kawasan TOD;
2. Pembahasan bertujuan untuk memastikan aspek dalam draf dokumen SP yang masih perlu dilengkapi agar saat laporan progres disampaikan ke para *stakeholders* terkait, bisa mendapat umpan balik dan masukan serta menjadi pegangan untuk lanjut ke tahap selanjutnya;
3. 3 (tiga) lokasi yang berhasil diidentifikasi dan dianalisis pada draf SP ini adalah Kawasan TOD Lebak Bulus, TOD Pondok Cabe, dan TOD Rawa Buntu dengan nilai masing-masing lokasi sebesar 90, 26,25 dan 77,85 secara berurutan. Dimana penilaian dilakukan dengan cara *scoring* atau pembobotan berdasarkan 12 (dua belas) parameter sebagai berikut:
   (1) Lahan yang dapat dikembangkan menjadi rusun;
   (2) Simpul moda transportasi publik yang tersedia eksisting;
   (3) Ketentuan pemanfaatan ruang;
   (4) Penanggung jawab/pengelola kawasan;
   (5) Regulasi KKPO;
   (6) Rencana penyediaan hunian vertikal yang terjangkau;
   (7) *Demand* dan bangkitan pergerakan penumpang;
   (8) Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah;
   (9) Rencana penyediaan rusun belum spesifik bagi kelompok sasaran MBR;
   (10) Panduan Rancang Kota (PRK) pengembangan Kawasan TOD;
   (11) Kejelasan lokasi stasiun;
   (12) Kondisi kontur lahan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Perlu dilakukan penjajakan potensi lahan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk dikembangkan lokasi rusun MBR yaitu Jurangmangu, Pondok Ranji, Sudimara dan Serpong;
2. Tim Konsultan akan mematangkan kajian, melakukan *list down* kebutuhan data dan kepastian konfirmasi kepada para *stakeholders* di pertemuan FGD pada minggu pertama Agustus.

20. Rapat Pembahasan Identifikasi Kebutuhan Perizinan Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur dan Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Perizinan yang dibutuhkan untuk Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur:
   a. Persetujuan Pendahuluan;
   b. Pembayaran Ketersediaan Layanan;
   c. Konfirmasi akhir Pembayaran Ketersediaan Layanan;
   d. Persetujuan KSPI;
   e. Persetujuan Lingkungan;

f. SK Kumham pendirian Badan Usaha;
g. Nomor Induk Berusaha;
h. Izin Usaha;
i. NPWP;
j. Surat Keterangan Domilisi Perusahaan;
k. Persetujuan Bangunan Gedung;
l. Sertifikat Laik Fungsi;
m. Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH).

2. Perizinan yang dibutuhkan untuk Rumah Susun Desa Besar Medan:
   a. Persetujuan Pendahuluan;
   b. Pembayaran Ketersediaan Layanan;
   c. Konfirmasi akhir Pembayaran Ketersediaan Layanan;
   d. Persetujuan KSPI;
   e. Persetujuan Lingkungan;
   f. SK Kumham pendirian Badan Usaha;
   g. Nomor Induk Berusaha;
   h. Izin Usaha;
   i. NPWP;
   j. Surat Keterangan Domilisi Perusahaan;
   k. Persetujuan Bangunan Gedung;
   l. Sertifikat Laik Fungsi;
   m. Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH);
   n. Izin Perlintasan/Persinggungan dengan rel kereta api;
3. Berdasarkan Permen LHK 38 tahun 2019 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk pembangunan Gedung di lahan yang ≥ 5 ha maka dibutuhkan izin AMDAL Kategori C dengan lama penyusunan paling lama 60 (enam puluh) hari;
4. Informasi dari Direktorat Rumah Susun, apabila Luas lahan Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur dan Rumah Susun Desa Besar Medan <5ha maka tidak diperlukan perizinan AMDAL namun diganti dengan UKL-UPL.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Dit. PPP akan bersurat ke DJP untuk meminta informasi terkait hal-hal yang perlu disiapkan dalam hal perizinan pembangunan Rusun.

21. FGD Pembahasan Hasil *Screening* Lokasi KPBU Rusun TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan rumah/hunian terjangkau merupakan kewenangan Kementerian PUPR, namun untuk pelaksanaan TOD bukan kewenangan PUPR;
2. Hunian terjangkau perlu didefinisikan lebih lanjut;
3. Tantangan dalam kajian ini terletak pada lahan yang direncanakan, dan bagaimana penyiapan lahan tersebut;
4. Dengan model KPBU, penyediaan hunian yang dirancang adalah rumah susun sewa, bukan investasi/dimiliki;
5. Dengan konsep tersebut diharapkan harga dapat terkendali, karena kepemilikan tidak pindah tangan atau tetap di pemerintah;
6. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan TOD antara lain: Insentif-disinsentif, Perencanaan Partisipatif, dan Preservasi Permukiman, Bisnis, dan Jasa.

Tindak lanjut dari kegiatan ini Diperlukan beberapa hal:

1. Diskusi mengenai penyiapan lahan;
2. Dukungan pemerintah daerah dalam rangka penyiapan dokumen mengenai pengaturan TOD di wilayah masing-masing;
3. Diskusi dengan otorita bandara mengenai KKOP di kawasan Pondok Cabe.

22. *Follow-Up* FGD Pembahasan Hasil *Screening* Lokasi KPBU Rusun TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Rapat pembahasan mengenai *Follow Up* FGD Pembahasan Hasil *Screening* Lokasi KPBU Rusun TOD yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Agustus 2021, dihadiri oleh Tim Teknis Dit. PPP serta Tim Konsultan TOD;
2. Beberapa kesimpulan terkait kepastian status lahan, yaitu:
   a. Lahan kawasan TOD Lb. Bulus memiliki potensi yang besar, pihak MRT dan Dinas Provinsi DKI menyarankan untuk segera berkoordinasi agar dapat memperoleh informasi ter-*update* terkait status lahan;
   b. Perlu adanya kunjungan lapangan ke lokasi di Rawa Buntu dan Jurangmangu serta koordinasi dengan Pemkot Tangerang Selatan untuk memperoleh informasi kepastian lahan yang lebih *valid*;
   c. Terkait lokasi di Kawasan TOD Pondok Cabe, BPTJ telah menawarkan lahan kepemilikan mereka untuk diutilisasi;
   d. Diusulkan untuk pembuatan satu dokumen SP dengan beberapa paket berupa titik lokasi di dalamnya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Perbaikan dan kelengkapan dokumen SP Proyek Rusun TOD akan berjalan paralel;
2. Direncanakan rapat pembahasan identifikasi status tanah/lahan;
3. Konsultan akan mendesain struktur pertanyaan pada *Real Demand Survey* (RDS) serta pemetaan respondennya

23. Rapat Tindak Lanjut Penyiapan FBC dan Dokumen TransaksiProyek KPBU Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Rapat ini untuk menindaklanjuti hasil FGD bersama PT. PII terkait Pembahasan Teknis *Outline Business Case* (OBC) Proyek KPBU Rumah Susun Desa Besar Kota Medan dalam rangka persiapan proses penjaminan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Juli 2021;
2. Tujuan rapat antara lain:
   - Melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai agenda penyiapan Proyek KPBU Rusun Desa besar Medan untuk kedepannya;
   - Merumuskan tanggapan atas masukan dari PT. PII pada FGD Pembahasan Teknis OBC Proyek KPBU Rumah Susun Desa Besar Kota Medan tekait aspek legal, teknis, ekonomi dan finansial, serta lingkungan dan sosial pada dokumen terkait;
   - *Overview* kedua atas hasil checklist reviu dokumen OBC Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan juga telah disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas secara informal. Berdasarkan hasil reviu tersebut, dokumen OBC seperti yang dimaksudkan di atas telah memenuhi kelengkapan sebesar 77,2%. Dengan beberapa kajian yang masih membutuhkan perhatian lebih lanjut meliputi Bab Kajian Lingkungan dan Sosial dengan nilai 50%, Bab Kajian Bentuk KPBU dengan nilai 50%, serta Bab Kajian Masalah yang Perlu Ditindaklanjuti sebesar 33%.

Tindak lanjut dari kegiatan ini DJPI akan melakukan:

1. Perbaikan dan penyempurnaan dokumen OBC Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan berdasarkan masukan dari PT. PII dan checklist reviu yang telah disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk selanjutnya dilakukan pengusulan final Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan ke dalam PPP Book;
2. Koordinasi dengan PT. PII terkait proses penjaminan pemerintah. Terkait hal tersebut, akan dilakukan pengisian dan penyampaian formulir penyaringan proyek atau *screening form* kepada PT. PII.

24. Pembahasan Konsep Kesepakatan Induk Fasilitas PDF Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) angka 4 sudah relevan dengan lingkup fasilitas sampai dengan pelaksanaan transaksi KPBU;
2. Ketentuan pasal 6 memberikan pemahaman kepada pihak kedua bahwa pelaksanaan fasilitas yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan melalui pelaksana fasilitas;
3. Untuk terwujudnya Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten tergantung pada penyusunan dokumen dan kegiatan yang dihasilkan;
4. Penyelesaian sengketa pada pasal 17 dilakukan dengan musyawarah mufakat tidak dengan BANI.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan diskusi lebih lanjut terkait Kesepakatan Induk Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten dengan Biro Hukum dan Kementerian Keuangan.

25. Pembahasan Tanggapan PT. PII terhadap Rusun Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Tujuan pembahasan adalah untuk menindaklanjuti hasil FGD bersama PT. PII terkait Pembahasan Teknis OBC Proyek KPBU Rumah Susun Desa Besar Kota Medan dalam rangka persiapan proses penjaminan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Juli 2021 lalu;
2. Pokok-pokok pembahasan rapat terkait aspek legal, teknis, ekonomi dan finansial, serta lingkungan dan sosial dalam dokumen OBC.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah Konfirmasi Pendahuluan AP, Dokumen Perizinan Lingkungan, dan KSPI. Hal-hal tersebut akan diproses paralel dengan proses pengajuan penjaminan ke PT. PII;
2. DJPI akan terus berkoordinasi dengan PT. PII, salah satunya akan dilakukan pengisian dan penyampaian formulir penyaringan proyek/*screening form* kepada PT. PII.

26. Pembahasan Persiapan RDS Rusun TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Survei untuk RDS dilakukan terhadap pasar perumahan melalui *interview* secara *online* kepada pengelola, pemilik rusun eksisting, masyarakat pengguna MRT dan KRL, serta penduduk wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan;
2. Dibutuhkan koordinasi dengan PT MRT Jakarta, PT KAI dan K/L lainnya, terkait dengan penyebaran kuesioner baik secara langsung kepada konsumen maupun melalui sosial media;
3. Perlu perbaikan kuesioner agar lebih komprehensif dan memuat mengenai *responsive gender*.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan rapat:

1. Pembahasan mengenai lahan pada tanggal 18 Agustus 2021;
2. Persiapan RDS dan finalisasi kuesioner pada tangal 23 Agustus 2021.

27. Rapat Pembahasan Proyek KPBU Karawang Spuur dengan PT. SMI

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Merupakan pertemuan pertama antara PT. SMI dengan Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan selaku simpul KPBU sektor perumahan setelah adanya MoU antara PT. SMI dengan DJPI;
2. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proyek KPBU Perumahan yang akan dikerjakan oleh PT. SMI dan IIF yaitu Proyek KPBU Karawang Spuur terkait progres penyiapan proyek beserta hal-hal yang menjadi isu dalam proyek.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah PT. SMI dan DJPI melalui Dit. PPP akan terus berkoordinasi baik secara formal maupun informal guna mempermudah keberlanjutan proyek KPBU Karawang Spuur yang ditangani oleh PT. SMI dan IIF.

28. **Pembahasan Penyiapan Konfirmasi Pendahuluan AP KPBU Rusun Desa Besar Medan**
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini terdapat dua hal yang menjadi *gap* pada Proyek Desa Besar Medan, yaitu:
    1. Pengajuan *PPP Book* masih dalam proses;
    2. Belum dilakukan konfirmasi awal AP hal ini dikarenakan estimasi besaran AP yang telah disusun oleh PT. Amythas banyak dikritisi, terutama pada saat kegiatan *Market Sounding* dari Kemenkeu dan PT. PII terkait besaran AP yang terus meningkat setiap tahunnya.

    Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:
    1. *Finance Expert* Dit. PPP akan segera melakukan reviu dan menghitung ulang *financial model* Proyek KPBU Rusun Desa Besar Medan dan menetapkan besaran AP final yang bersifat *flat*;
    2. Akan segera diproses pengiriman konfirmasi awal AP ke Kementerian Keuangan.

29. **Rapat Identifikasi dan Potensi Lahan Rusun di Kawasan TOD Lebak Bulus**
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:
    1. Rapat dilaksanakan melakukan identifikasi dan potensi lahan untuk penyediaan rumah susun pada Kawasan TOD Lebak Bulus dalam rangka mendorong terlaksananya penyelenggaraan proyek KPBU rumah susun di kawasan transit;
    2. Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2 lokasi lahan) maupun milik Pemerintah pusat (Pasar Jumat milik PUPR) merupakan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mengembangkan KPBU Rusun;
    3. Agenda yang menjadi pokok-pokok pembahasan dalam rapat ini adalah:
        - Penjabaran Hasil *screening* potensi lahan untuk pembangunan KPBU Rusun di Kawasan TOD Lebak Bulus yang telah dilakukan oleh Tim Konsultan TOD;
        - Potensi, kesiapan dan status kepemilikan lahan di kawasan TOD Lebak Bulus utk pengembangan rusun oleh PT. MRT;
        - Potensi lahan dan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan rusun di kawasan TOD oleh Pemenrintah Provinsi DKI; dan
        - Potensi Lahan Kementerian PUPR di Kawasan Pasar Jumat dan Tangerang Selatan oleh Biro Pengelolaan BMN Sekjen PUPR.

    Tindak lanjut dari kegiatan ini Dibutuhkan pendetailan lokasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI dan BMN PUPR.

30. **Rapat Pendahuluan Konsep Kesepakatan Induk PDF Karawang Spuur**
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:
    1. Permohonan PDF karawang masih berada di tangan evaluator dan belum ada update terbaru;
    2. Kementerian Keuangan sedang menyiapkan template terbaru untuk kesepakatan induk dengan harapan agar proses dapat berjalan lebih cepat. Saat ini, dapat digunakan base dari KPBU Sei Mangkei mengingat proyek ini telah mendapatkan legal opinion dari Tim Legal PDPPI;
    3. Terdapat *output* yang dipersyaratkan oleh PDPPI yaitu laporan awal, kondisi prasyarat dan hal-hal yang perlu diselesaikan oleh PJPK untuk memastikan projek tersebut dapat berjalan;
    4. Kementerian Keuangan melalui PDPPI akan menyusun KMK (Keputusan Menteri Keuangan) yang menunjuk PT SMI dibantu oleh IIF untuk menangani Proyek KPBU Karawang Spuur.

    Tindak lanjut dari kegiatan ini *Template* Kesepakatan Induk PDF akan segera diselesaikan oleh PDPPI Kementerian Keuangan.

31. **Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PDF Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung**
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Persetujuan prinsip pemberian dukungan PDF dari Kementerian Keuangan kepada PJPK (Kementerian PUPR) diberikan pada tanggal 5 Juli 2021;
2. Ruang lingkup dan *timeline* fasilitas PDF terdiri atas Persiapan PDF (2 bulan), *Inception Report* (2 bulan), FBC (10 bulan), PQ (3 bulan), *RfP & Signing* (7 bulan), *Financial Close* (6 bulan);
3. Beberapa isu/*critical path* terkait proyek ini yaitu:
   a. Perlu pelebaran jalan ke lokasi proyek karena akan menggunakan alat berat ketika konstruksi;
   b. PJPK harus melakukan koordinasi dengan PDAM dan PLN terkit pemenuhan air dan listrik;
   c. Akan dilakukan RDS untuk mengkonfirmasi jumlah unit yang akan dibangun;
   d. Penentuan tarif sewa;
   e. Kajian terkait pembentukan BLU;
   f. Pengalihan hak tanah dan pembebasan lahan kendang sapi;
   g. Kajian kapasitas fiskal;
   h. Kajian pemilihan Skema BOT atau BTO;
   i. Penggunaan konsep *green building*;
   j. Pengajuan KSPI ke Kementerian Keuangan.
4. Penyusunan Dokumen FBC akan mengacu pada Permen PPN No 2/2020 dan akan dilakukan pendalaman dari Dokumen OBC sebelumnya; dan
5. Dalam pelaksanaan PDF ini, Kementerian Keuangan menunjuk PT PII sebagai pelaksana fasilitas dibantu dengan PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Akan dilakukan rapat lanjutan terkait persiapan PDF;
2. PJPK perlu menyelesaikan Kesepakatan Induk agar PDF dapat diproses.

32. Rapat Lanjutan Persiapan RDS KPBU Rusun TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pembahasan terkait struktur pertanyaan dan strategi penyebaran kuesioner RDS untuk masyarakat umum, developer, calon pengelola rusun, perusahaan dan pengelola kontrakan dalam meninjau kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur rusun pada kawasan TOD; dan
2. Kuesioner akan dibagikan secara offline pada tiga titik transit pada Kawasan TOD yang telah dianalisis sebelumnya, yaitu Lebak Bulus, Rawa Buntu, dan Pondok cabe, serta secara *online*.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Tim konsultan TOD akan merapikan format kuesioner RDS;
2. Akan diadakan FGD untuk meminta tanggapan konsep RDS dari para *stakeholders* terkait seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

33. Rapat Identifikasi dan Potensi Lahan KPBU Rusun di Kawasan TOD Pondok Cabe

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pokok-pokok pembahasan dalam rapat:
   a. Penyampaikan hasil *screening* potensi lahan untuk pembangunan KPBU Rusun di Kawasan TOD Pondok Cabe oleh Tim Konsultan;
   b. Paparan potensi Lahan untuk Pembangunan Rusun TOD Pondok Cabe oleh BPTJ;
2. Tanggapan dan umpan balik mengenai potensi dan kepemilikan lahan oleh Pemerintah Pusat/Daerah (BMN/D) dari Dinas Perhubungan Tangsel, Bappeda Tangsel, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tangsel, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Tangsel, serta Dinas Perumahan dan Permukiman Tangsel;
3. Terdapat potensi lahan milik BPTJ yang terletak pada Terminal Pondok Cabe untuk selanjutnya dapat dikaji pemanfaatannya sebagai Rumah Susun.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. DJPI akan mengkaji potensi lahan BMN milik BPTJ yang terletak pada Terminal Pondok Cabe;

2. Selain potensi lahan (Lebak Bulus, Rawa Buntu, Pondok Cabe), perlu juga melihat potensi lahan-lahan yang berada pada stasiun-stasiun MRT lain pada jalur koridor yang sama;
3. Direncanakan kegiatan kunjungan lapangan (*site visit*) setelah PPKM berakhir.

34. Pembahasan Lanjutan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN Tahap 1

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Penyampaian tanggapan DJPI terkait masukan dan perbaikan draf awal SP Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN Tahap 1 (satu) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Tim Satgas Perumahan IKN;
2. Pembahasan *timeline* terkait agenda perencanaan dan penyiapan proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Dokumen *basic design* Kawasan Perumahan 1A KIPP-IKN serta pedetilan area komersil diharapkan telah dirampungkan oleh Tim Satgas Perumahan pada pertengahan Bulan September;
2. Akan dilaksanakan pembahasan penentuan aternatif pemaketan KPBU;
3. Pengajuan dokumen SP kepada Kementerian Keuangan direncanakan pada September ini;
4. DJPI akan bersurat kepada Tim Satgas Perumahan IKN terkait permohonan data-data yang masih diperlukan dalam rangka kelengkapan dokumen SP.

35. Rapat Pembahasan Dokumen RFP & RFQ Proyek KPBU Rusunawa Desa Besar Medan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Beberapa peraturan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan masih mengacu kepada peraturan/kebijakan terdahulu, sehingga perlu ada pembaharuan beberapa peraturan/kebijakan;
2. Perlu adanya penyesuaian pihak yang menyangga di RFP adalah PJPK bukan panitia pengadaan;
3. Di dalam Dokumen Pengadaan, Jadwal proses pelelangan masih kosong, sehingga perlu ditentukan jadwal perhari untuk proses lelang;
4. Jika di dalam perjanjian tidak ditentukan perjanjian OM maka dikhawatirkan tidak akan ada tanggung jawab dari pihak Swasta dalam melaksanakan OM jika terjadi kesalahan pada kontruksi;
5. Untuk skema Pengadaan perlu diputuskan akan menggunakan *scoring* atau finansial terbaik. Jika menggunakan skoring perlu pembobotan untuk Teknis dan Finansial, namun jika menggunakan finansial terbaik lebih mudah yaitu dengan cara melihat isi dari finansialnya saja;
6. Untuk lampiran RFP perlu dilengkapi dengan Rancangan perjanjian dan Info Memo;
7. Perlu perhatian penetapan bobot masih *scoring* teknis 70% dan finansial 30% yang dinilai tidak cocok dengan penggunaan skema AP.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Akan dilakukan Rapat Koordinasi dengan Subdit Legalisasi Rencana Investasi terkait Dokumen FBC yang akan disusun agar selaras dengan Dokumen Pengadaan yang akan disusun oleh Tim di Subdit Koordinasi Kerjasama Investasi;
2. Tim Tenaga Ahli KPBU akan mengecek kembali dokumen–dokumen terkait dengan Proyek KPBU Rusunawa Desa Besar Medan.

36. Rapat Persiapan Pelaksanaan RDS KPBU Rumah Susun di Kawasan TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan RDS akan dilakukan secara kuantitatif melalui daring maupun Luring dengan target responden dari pelaksanaan RDS ini adalah sebanyak 400 responden/sampel dan kualitatif dengan memperoleh data sekunder dari instansi terkait dan pelaksanaan wawancara dengan narasumber dari pengembang;

2. Perlu dilakukan mitigasi dengan menyebarkan kuisioner secara daring dengan jumlah lebih banyak untuk memaksimalkan jumlah responden;
3. Perlu konfigurasi pembangunan rusun bagi MBR dan komersial. Masyarakat kelompok menengah atas (komersial) menjadi penting untuk meningkatkan kelayakan proyek KPBU Rumah Susun secara finansial dengan cara men*generate revenue* dan dapat dilakukan subsidi silang dengen kelompok MBR;
4. Titik sekitar stasiun Lebak Bulus dan Rawa Buntu dinilai sangat strategis sehingga hal ini dapat menangkap *revenue generation* dan optimalisasi dengan cara *mixed use function*;
5. Teori *Housing Career* dapat digunakan untuk efisiensi dalam penyediaan sarana;
6. Perlu meng-*capture* dampak program pembangunan terhadap masyarakat di lokasi esksisting;
7. Perlu mencermati ketersediaan lahan agar dapat segera memperhitungkan CAPEX-nya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Konsultan akan memperbaiki kuisioner; dan
2. Dit.PPP akan membuat permohonan secara tertulis terkait data sekunder kepada instansi terkait.

37. Kunjungan Lapangan ke Lokasi TOD Pondok Cabe

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 2 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Terminal Pondok Cabe direncanakan sebagai pengganti Terminal Lebak Bulus yang sekarang beralih fungsi sebagai stasiun MRT;
2. Terminal Pondok Cabe merupakan Terminal tipe A, yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan sehingga tanah ini termasuk dalam BMN, dengan Status Lahan HPL dengan Jenis TOD Subkota;
3. Terminal Pondok Cabe memiliki luas keseluruhan kurang lebih 2,5 hektar. Terdiri dari bangunan utama seluas 2.550 meter persegi, terminal angkutan dalam kota seluas 1.125 meter persegi, terminal bus antar kota (zona pengendapan) seluas 2.500 meter persegi ditambah 2.870 meter persegi, serta 1.800 meter persegi untuk lahan terminal;
4. Kondisi eksisting Terminal Pondok Cabe untuk melayani bus antar kota dan dalam kota, ke depannya terminal ini juga akan diintegrasikan dengan BRT (Transjakarta);
5. Kawasan ini berada di Wilayah KKOP yang memiliki ketentuan ketinggian maksimal bangunan adalah 39 meter atau dapat dibangun ± 10 lantai.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan diselenggarakan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk membahas hasil kunjungan lapangan.

38. Rapat Pembahasan Konfigurasi dan Spesifikasi Keluaran KPBU Perumahan IKN

1. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:
2. Agenda pembahasan meliputi:
   a. Pendetilan jumlah tipe unit hunian dan informasi mengenai luasan rumah tapak serta jumlah lantai pada rumah susun;
   b. Kepastian alternatif pembangunan;
   c. Progres *basic design* yang sedang disusun oleh DJP; serta
   d. *Update* terkini terkait konfigurasi dan perbedaan spesifikasi hunian bagi masing-masing peruntukan (ASN/TNI/Polri);
3. Dapat dipastikan bahwa total hunian yang dapat ditampung di area 1A tetap pada angka 11.268 unit hunian. Namun, belum ada kepastian jumlah tetap untuk TNI/Polri dari Pokja Hankam;
4. *Basic design* dari area West Residence sedang disiapkan oleh DJP. Sedangkan DJCK sedang menyusun Rencana Tata Bangunan;
5. Rencana pemaketan penawaran hunian KPBU masih dalam proses pengkajian oleh Tim Satgas. Direncanakan pada tahun 2022, biaya pembangunan sebanyak 1.497 unit hunian akan menggunakan APBN terlebih dahulu, dan pada tahun 2023 (5.969 unit hunian) serta 2024 (3.802 unit hunian) akan ditawarkan melalui skema KPBU.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk bisa masuk ke OBC dan FBC harus bisa segera ditentukan harga pembangunan unit agar bisa mendapat gambaran jumlah total investasi keseluruhan;
2. DJPI akan melakukan *update* data pada dokumen studi pendahuluan;
3. Besar harapan pertengahan bulan September dokumen SP sudah bisa difinalisasi untuk selanjutnya dikordinaskan dengan Bappenas dan Kemenkeu;
4. Direncanakan pertemuan kembali antar DJPI dan Tim Satgas pada hari Jumat, 10 September 2021.

39. Rapat Informal Pembahasan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan KIPP-IKN dengan Tim Satgas IKN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 10 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Agenda rapat meliputi reviu dan pembahasan terkait kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen SP tersebut.
2. Beberapa informasi data yang menjadi perhatian adalah:
   - Penghilangan alternatif 1, 2, 3, dan 4 dalam penyediaan hunian di lingkungan KIPP-IKN dan hanya akan terdapat satu opsi alternatif tipologi peruntukan rumah (Rumah Tapak tipe 400 untuk Menteri, Rumah Susun tipe 250 untuk Pejabat Negara dan Eselon 1, tipe 120 untuk Eselon II, tipe 70 untuk eselon III, tipe 50 untuk Jabatan Fungsional, serta Asrama/Barak untuk Prajurit Hankam);
   - Pembagian sumber pembiayaan hunian dimana Rumah Tapak bersumber dari APBN, sedangkan terdapat Rusun yang anggaran pembangunannya berasal dari APBN, ada pula yang memakai skema dari KPBU;
   - Kepastian jumlah anggaran total yang dibutuhkan telah mencakup kawasan perumahan, tidak hanya bangunan hunian;
   - Pertimbangan pembangunan area komersil di kawasan lain selain 1A (1B atau 2) untuk membuka peluang lebih besar dalam mendapatkan sumber pengembalian investasi;
3. Pendetilan konsep dan *basic design* baru dilakukan pada kawasan West Residence, 1A, diharapkan bisa terdapat pendetilan seperti ini lagi khususnya untuk kawasan lain seperti 1B.

Tindak lanjut dari kegiatan ini DJPI adalah:

1. DJPI akan mencoba membuat prakiraan pemaketan kawasan yang akan di KPBU-kan (akan dilakukan pemilihan terhadap hunian yang dibiayai dengan KPBU saja);
2. Beberapa *crosscheck* yang harus dilakukan untuk menunjang kelengkapan informasi pada dokumen SP Proyek KPBU Perumahan IKN adalah:
   - Tim Satgas akan menanyakan kepada pihak Tim Kolaborasi apakah ada pendetilan desain dan konsep kawasan untuk area selain *West Residence*;
   - Dit. PPP DJPI akan berkoordinasi dengan Dit. Rusun DJP terkait detil RAB pembangunan perumahan di KIPP-IKN. DJPI akan mengundang DJP secara resmi dalam Rapat Penentuan Biaya Harga Satuan Pembangunan Kawasan Rusun di IKN dengan skema KPBU;
   - Melakukan konfimasi ke Pak Dedy selaku Ketua Bidang Perumahan Tim Satgas PPI-IKN tentang kemungkinan penggabungan paket investasi 1A dan 1B untuk startegi inevetasi agar membuat proyek ini lebih menarik bagi Swasta serta mengurangi beban Pemerintah.

40. Rapat Pembahasan Komitmen Tertulis terkait Permohonan PDF Proyek KPBU Karawang Spuur

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 10 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Kemenkeu membalas surat permohonan PDF dengan permintaan surat komitmen yang memuat tentang penentuan standar layanan, fleksibelitas jumlah hunian sesuai RDS, penentuan *paying agent* dan altrnatif kualitas infrastruktur yang tertuju ke dirjen PI dan dirjen DJP;
2. Dit. PPP telah membuat konsep surat yang memuat seluruh isu komitmen yang diminta untuk diberi masukan dari kedua dirjen.

Tindak lanjut dari kegiatan adalah:

1. Direktur PPP akan menyampaikan nota dinas yang berisi konsep surat komitmen untuk Kemenkeu kepada Dirjen PI dan dirjen DJP untuk memintakan masukan dan arahan agar supaya surat balasan tersebut diketahui dan disetujui oleh kedua dirjen;
2. Surat komitmen tersebut akan disampaikan oleh dirjen PI.

41. Identifikasi Struktur KPBU Perumahan dan Potensi Peran Perumnas

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 10 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Dari hasil identifikasi awal, terdapat beberapa alternatif kedudukan Perum Perumnas dalam struktur Proyek KPBU Perumahan sejalan dengan ruang lingkup penugasan Perum Perumnas terkait dengan penyediaan tanah dan/atau perolehan tanah, pelaksanaan pembangunan rumah tapak dan susun sewa dan/atau rumah susun milik, dan peningkatan kualitas rumah susun;
2. Dari pengalaman proyek KPBU di berbagai sektor, secara garis besar terdapat 2 (dua) potensi peran BUMN dalam struktur Proyek KPBU, yaitu:
   a. **Sebagai bagian dari Badan Usaha Pelaksana**:
      1) Perumnas turut berpartisipasi sebagai peserta lelang;
      2) Perumnas sebagai *stand by partner* bagi peserta lelang. Perumnas akan menjadi bagian dari Badan Usaha Pelaksana bersama dengan pemenang lelang.
   b. **Sebagai bagian dari PJPK:**
      1) PJPK Menteri PUPR dapat menugaskan Perumnas untuk menjadi *paying agent* dan/atau pengelola Rumah Susun yang dibangun melalui KPBU;
      2) Perumnas sebagai PJPK;
         Penugasan khusus kepada Perumnas sebagaimana yang telah diusulkan dalam Raperpres Penugasan kepada Perumnas.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu menunggu arahan Bapak Dirjen untuk pelaksanaan kegiatan *FGD* Struktur Proyek KPBU Perumahan dan Potensi Peran Perum Perumnas KPBU sektor Perumahan dengan mengundang Bappenas, Kemenkeu, Perum Perumnas, PT. PII, dan PT. SMI yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 secara *hybrid* di luar kantor dan *online.*

42. Rapat Lanjutan Struktur KPBU dan Peran Perumnas

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Agenda pembahasan terkait legalitas Perumnas serta opsi keterlibatan Perumnas dalam KPBU Perumahan;
2. Terdapat 4 (empat) opsi peran krusial Perumnas yang terdiri dari:
   - Perumnas sebagai PJPK berdasarkan Penugasan Menteri PUPR;
   - Perumnas sebagai Peserta Pengadaan;
   - Perumnas sebagai *Standby Partner* bagi Peserta Pengadaan;
   - Perumnas sebagai *Paying Agent* yang melakukan operasional KPBU.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan diselenggarakan FGD Peran Perumnas dalam Struktur Proyek KPBU Perumahan pada hari Senin, 20 September 2021.

43. *Review Master Plan* Pasar Jumat, Konsep TOD Pasar Jumat, Konsep TOD Pondok Cabe

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Maksud dan tujuan Rapat untuk mempersiapkan bahan tayang Rapat Pembahasan Reviu *Master Plan* Pasar Jumat yang dilaksanakan pada 17 September;
2. Potensi Pemanfaatan Lahan BMN PUPR Pasar Jumat terdiri dari:
   a. Optimalisasi aset BMN berupa lahan dan peningkatan kualitas rusun:
      - Rusun Binamarga, 10 Blok 4 lantai, total 200 unit (dibangun tahun 1974-1980);
      - Rusun Ciptakarya, 5 blok 4 lantai, total 100 unit (dibangun mulai tahun 1975-1980);
      - Rusun Perumnas, 2 Tower 9 lantai, total 96 unit (dibangun tahun 2000);
   b. Rencana revitalisasi Rusun Binamarga, Ciptakarya dan Perumnas tersebut sudah pernah diusulkan dalam *Master plan* Kawasan Pasar Jumat yang disusun oleh DJP pada

Tahun 2017. Selain tidak efisien, karena hanya dibangun rusun 4 lantai, kualitasnya juga sudah menurun sejalan dengan usia bangunan yang sudah hampir mencapai akhir *life cycle* bangunan gedung 50 tahun.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah PT. SMI dan DJPI melalui Dit. PPP akan terus berkoordinasi baik secara formal maupun informal guna mempermudah keberlanjutan proyek KPBU Karawang Spuur yang ditangani oleh PT. SMI dan IIF.

44. Rapat Pembahasan Reviu *Master Plan* Pasar Jumat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

1. Rapat pembahasan:
   - Mendapatkan informasi terkini dan mendetil terkait Potensi Lahan BMN Pasar Jumat;
   - Mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai *Master Plan* Kawasan Pasar Jumat yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2017 dan *Master Plan* Kawasan Pasar Jumat yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2020;
   - Menyampaikan usulan pemanfaatan Lahan pada BMN Pasar Jumat untuk pembangunan Proyek KPBU Rusun TOD yang terintegrasi dengan Rencana Perpanjangan MRT Lebak Bulus – Rawa Buntu.
2. Lahan BMN Kementerian PUPR pada Kawasan Pasar Jumat seluas ±16 Ha terdiri dari Rumah Dinas, Rusunawa, dan Balai Pelatihan SDM Kementerian PUPR. Luas wilayah Kompleks Pasar Jumat dengan sertifikat tanda kepemilikan aset BMN Kementerian PUPR adalah seluas 89.676 m^2. Dimana sebagian lahan lain sudah diperjualbelikan dan merupakan hak milik (SHM) dari penghuni Rumah Tapak sekitar;
3. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Perumahan telah menyusun Rencana Penataan dan Pengembangan Perumahan Pasar Jumat sebagai tindak lanjut dari kondisi eksisting Rusun yang sudah tidak layak. Terdapat 17 (tujuh belas) tower Rusun eksisting pada Kawasan Pasar Jumat. 10 (sepuluh) tower Rusun Bina Marga, 5 (lima) tower Rusun Cipta Karya, dan 2 (dua) Rusun Perumnas;
4. Selanjutnya, *Master Plan* Kawasan Pasar Jumat tersebut diserahkan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2020 dalam rangka penyesuaian kembali. Terdapat 11.502 m^2 persil tower Rusun yang direncanakan pada *Master Plan* ini, total 4 (empat) tower Rusun dengan tower yang sudah terbangun sebanyak 1 (satu) tower Rusun peruntukan ASN;
5. Oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, diusulkan pembangunan Rusun Tingkat Tinggi (18–24 lantai) sebanyak 5 Tower (sebanyak 2.300 unit) sebagai pengganti Rusun Binamarga, Ciptakarya dan Perumnas dengan skema *mix-used* yang diperuntukkan bagi: relokasi penghuni rusun eksisting; ASN PUPR; MBR dan komersial (dalam rangka *cross subsidy*). Rusun tersebut akan terintegrasi dengan kawasan TOD Stasiun MRT Lebak Bulus. Pembangunan Rusun TOD Pasar Jumat termasuk penataan lingkungan kawasan kantor PUPR Pasar Jumat.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Kementerian PUPR akan menyiapkan Rusun Pasar Jumat dalam rangka Penataan Kawasan Kompleks Pasar Jumat yang terintegrasi dengan Kawasan TOD Lebak Bulus, dimana PT. MRT berlaku sebagai pengelola kawasan;
2. Perlu adanya rencana revitalisasi terhadap Rusun-rusun eksisting serta fasilitasi terhadap para penghuninya;
3. Perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai skema pembiayaan dalam penyediaan Rusun TOD;
4. Kementerian PUPR akan mendorong Perumnas untuk terlibat secara aktif dengan Proyek PUPR agar memiliki kemampuan dan *awareness* terhadap penugasan atau sebagai *business entity* yang akan menjalankan proyek.

45. FGD Peran Perumnas dalam Struktur Proyek KPBU Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 20 September 2021, bertempat di Hotel GrandKemang Jakarta. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

1. Latar belakang Penugasan Perum Perumnas dalam penyediaan rumah adalah PP No 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional, dan arahan Menteri PUPR agar **Perum Perumnas melayani MBR** serta arahan Wakil

Presiden dalam Rapat Penguatan Kebijakan MBR untuk Mempercepat Upaya Penyediaan Rumah untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional salah satunya adalah **Perum Perumnas sebagai *standby buyer or seller*;**

2. Dalam mendukung penugasan ini, sedang disiapkan Raperpres Penugasan Perum Perumnas yang saat ini sedang dalam tahap pengajuan kembali permohonan izin prakarsa penyusunan Raperpres kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara;
3. Lingkup penugasan Perum Perumnas dalam Raperpres sesuai dengan mandat PP Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perum Perumnas, yakni Penyediaan Tanah dan/atau Perolehan Tanah, Pembangunan Rumah dan Peningkatan Kualitas;
4. Potensi dukungan pemerintah terkait penugasan Perum Perumnas antara lain:
   a. Pemanfaatan lahan *idle* milik pemerintah, agar mengurangi beban Perum Perumnas dalam penyediaan lahan;
   b. Bantuan pengadaan Prasarana, Sarana dan Umum (PSU);
   c. Pemberian jaminan kelayakan usaha maupun pemberian pinjaman dengan bunga yang kompetitif;
   d. Dukungan PMN untuk restrukturisasi hutang dan penguatan keuangan perusahaan;
   e. Peraturan/kebijakan yang mengatur perpajakan maupun batasan harga jual.
5. Berdasarkan kajian yang telah disusun oleh Tim Legal Advisor, struktur keterlibatan Perumnas dapat dibagi atas perannya sebagai berikut:
   a. Sebagai bagian dari PJPK:
      1) Perumnas sebagai penerima mandat *paying agent* dan pelaksana operasional rumah susun sewa dari PJPK Menteri PUPR;
      2) Perumnas sebagai penerima mandat *paying agent* dari PJPK Menteri PUPR dan Pelaksana Operasional yang ditunjuk oleh P3SRS;
      3) Perumnas sebagai PJPK.
   b. Sebagai bagian dari BUP:
      1) Perumnas sebagai peserta pengadaan dan dapat bermitra/melakukan konsorsium dengan badan usaha lain;
      2) Perumnas sebagai *standby partner* dari pemenang lelang, dimana Perumnas akan menjadi bagian dari BUP bersama dengan pemenang lelang;
      3) Perumnas sebagai badan usaha pemrakarsa KPBU bagi yang belum mencapai tahap penyiapan;
      4) Perumnas sebagai pemenang lelang yang ditunjuk langsung sebagai mitra pemanfaatan barang milik negara.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan pembahasan mengenai:

1. Daftar usulan proyek Perumnas;
2. Peran Perumnas sebagai *asset management unit*;
3. Rencana pengembangan Rusun Pasar Jum'at.

46. Pembahasan Internal Proyek KPBU TOD Pondok Cabe

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 22 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu

1. Isu yang akan dibahas dalam rapat dengan BPTJ:
   a. Terdapat keterbatasan lantai/unit yang dibangun, untuk itu perlu dikaji lebih lanjut apakah proyek ini layak untuk dilakukan secara KPBU karena ada kriteria unit minimum agar layak secara finansial maupun ekonomis;
   b. Usulan lokasi proyek rusun TOD;
   c. Konsep KPBU yang diusulkan adalah KPBU gabungan dimana yang menjadi PJPK adalah Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR.
2. Masukan atas materi yang disampaikan pada rapat dengan BPTJ:
   a. Perlu memasukkan lokasi kantor terminal menjadi salah satu opsi lahan dan menampilkan kelebihan dan kekurangan dari setiap usulan lokasi lahan;
   b. Perlu memastikan lokasi MRT dan memberikan usulan kepada PT MRT Jakarta dan BPTJ terkait lokasi ideal agar kawasan tersebut terintegrasi dengan rusun TOD;
   c. Perlu memerhatikan kembali terkait aspek legal mengenai KPBU gabungan, siapa yang akan menjadi *lead*-nya, dan apa yang perlu dipersiapkan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan pembahasan dengan BPTJ.

47. Rapat Penyiapan Dukungan PT. SMF dalam Proyek KPBU Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 23 September 2021, bertempat di Hotel Park Regis Arion Kemang, Jakarta. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

1. Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, memberikan perluasan dan peningkatan peran PT SMF, salah satunya adalah mendukung pembiayaan KPBU;
2. Proyek KPBU menjadi salah satu program strategis Perseroan yang sudah termasuk di dalam RKAP 2021;
3. Alternatif peran SMF dalam proyek KPBU sektor perumahan akan dilakukan secara bertahap dengan opsi sebagai berikut:
   a. Peran 1 (satu): SMF bekerjasama dalam *capacity building* dan *sharing knowledge* SMF berkolaborasi dengan SMV lainnya dalam penyiapan proyek;
   b. Peran 2 (dua): Sebagai *Lenders*, berupa pembiayaan Kredit Modal Kerja Konstruksi sindikasi dengan beberapa Lembaga Keuangan;
   c. Peran 3 (tiga): *Equity Investors*
4. Dalam peran 2 (dua) dan 3 (tiga) SMF membutuhkan penugasan dari Pemerintah baik dari Kementerian Keuangan atau Kementerian PUPR;
5. Dalam hal pengembalian pokok, perlu adanya kepastian terkait dengan sumber pembayaran pengembalian pokok dari anggaran Pemerintah (*Availability Payment*) atau pembayaran dari penyewa (tarif);
6. Dalam meningkatkan *capacity building*, tim KPBU SMF akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh pihak PT PII;
7. PT SMF akan melakukan kolaborasi bersama dengan PT SMI dengan ruang lingkup yaitu:
   a. Peningkatan kapasitas dan/atau diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Penanggung Jawab Proyek KPBU pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait yang mendukung pengembangan proyek infrastruktur;
   b. Identifikasi dukungan, skema pembiayaan, dan pengembangan struktur proyek KPBU dalam rangka upaya percepatan proyek KPBU khususnya sektor perumahan secara inovatif;
   c. Kolaborasi implementasi dukungan penyiapan dan transaksi proyek, skema pembiayaan dan struktur proyek KPBU dalam rangka sinergi *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan;
   d. Dalam hal PT SMF mengambil peran 2 (dua) dan 3 (tiga), maka SMF akan melakukan kajian untuk meminta penugasan dari Pemerintah.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan melakukan:
   a. Pemetaan mengenai peran PT SMF dalam mendukung proyek KPBU perumahan sesuai dengan regulasi yang ada;
   b. Simulasi *financing*, yang nantinya akan dibawa ke *forum;*
2. PT SMF akan menyiapkan kajian mengenai potensi produk-produk SMF yang dapat mendukung proyek KPBU perumahan.

48. Rapat Pembahasan Penyiapan KSPI dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 24 September 2021, bertempat di Hotel Mercure Karawang. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

1. Status kemajuan Proses Sertifikasi Lahan BMN Karawang Spuur:
   a. Biro BMN sudah melakukan:
      - Identifikasi dan verifikasi terhadap data lahan baik secara fisik maupun legal;
      - Pembuatan pengamanan dengan memasang tanda penguasaan fisik tanah (patok/pagar/papan nama);
      - Koordinasi dengan KPKNL dan Kantah BPN Kab. Karawang;
      - Telah membuat pengajuan pengukuran dan pemberian hak pakai kepada kantah setempat;
      - Penunjukkan batas tanah dan Kantah BPN melakukan pengukuran batas tanah tersebut;

b. Ditjen Perumahan siap menerima pengalihan asset yang nanti akan dikoordinasikan dengan Tim KPBU Karawang Spuur.

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan;
   a. *Timeline* penyiapan persetujuan KSPI agar bisa sejalan dengan *timeline* KPBU;
   b. Skema pemanfaatan BMN: Perlu diperhatikan bersama mengenai aspek komersial dari pemanfaatan bmn, akan berdampak *trafficness* yg akan terlibat dalam proyek;
   c. Perlu melibatkan DJKN dalam rapat selanjutnya mengingat Kemenkeu berperan sebagai pengelola barang;
   d. Lokasi proyek perlu menjadi perhatian, batasan-batasan yang akan dikerjasamakan, lingkup KPBU nya perlu diperjelas dalam kajian;
   e. Terkait lahan jalan kampung budaya yang merupakan BMD perlu dirincikan kembali apakah pengelolaannya akan diserahkan ke pusat atau masih tetap dikelola oleh daerah dan dikeluarkan dari aset yang dikerjasamakan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Proses sertfikasi dan miitigasi isu lahan;
2. Mengonfirmasi kembali kepada Kantah BPN terkait penerbitan SK Pemberian Hak Pakai dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai;
3. Penyusunan *Timeline.*

49. *Sharing Session* Persiapan Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 24 September 2021, bertempat di The Grantage Hotel, Tangerang Selatan. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

1. PT. PII memperoleh mandat dari Kementerian Keuangan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Dalam tugasnya PT. PII memiliki tiga mandat yaitu *Project Development Facility*, Penjaminan KPBU dan Penjaminan Kredit;
3. Terdapat 13 *project* yang dipegang oleh PT. PII mulai dari sektor jalan, SPAM, rumah sakit, kereta api dan yang terbaru salah satunya adalah proyek KPBU Rusun Cisaranten;
4. Isu yang perlu dikaji dalam FBC terkait aspek teknis, finansial dan komersial adalah ketersediaan lahan, ketersediaan akses jalan ke lokasi proyek, ketersediaan utilitas (listrik dan air), konektivitas lokasi proyek, kepastian tingkat permintaan (*demand*);
5. Isu yang perlu dikaji dalam FBC terkait aspek hukum dan kelembagaan adalah kebutuhan regulasi terkait tarif rusun yang dibangun melalui skema KPBU, lingkup komersial pada pembangunan rusun MBR, kebutuhan pembentukan BLU dan Perumnas sebagai pa*ying agent;*
6. Pembentukan panitia pengadaan harus berjumlah ganjil minimal 5 orang (dapat ditambah sesuai kebutuhan) dan panitia pengadaan sudah harus siap sebelum PQ;
7. Fungsi pengadaan dalam KPBU agar menghasilkan Badan Usaha yang kompeten dan dapat menghasilkan Infrastruktur yang memenuhi aspek *Value for Money*;
8. Persiapan pengadaan terdiri dari beberapa tahap diantaranya, konfirmasi kesiapan proyek, konfirmasi minat pasar, pemberitahuan informasi awal, penyusunan jadwal pengadaan & rancangan pengumuman, penyusunan & penetapan dokumen pengadaan dan pengelolaan data *room*.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Sebelum memasuki PQ, dalam OBC terdapat isu-isu yang perlu ditindaklanjuti, hal tersebut perlu direview dan diakomodir dalam penyusunan FBC;
2. Akan segera dibentuk panitia pengadaan, menyusun SK penetapan panitia pengadaan, walau terdapat klausul yang berbeda, namun sudah tidak bisa diubah, dan akan disesuaikan.

50. Rapat Pembahasan Usulan Rusun TOD Pondok Cabe

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 29 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka diskusi penentuan potensi opsi lahan, gagasan tipologi hunian, serta bentuk skema penyediaan rusun pada lahan terminal Pondok Cabe di kawasan TOD Pondok Cabe;
2. Beberapa isu diskusi:

a. Usulan lokasi dan gagasan rencana pembangunan rusun pada TOD Pondok Cabe;
b. Kepastian rencana lokasi dan *timeline* proyek stasiun MRT Pondok Cabe;
c. Mekanisme pemanfaatan BMN untuk proyek KPBU gabungan;
d. Mekanisme PJPK gabungan untuk pembangunan rusun yang terintegrasi dengan terminal Pondok Cabe dan stasiun MRT;

3. Terdapat 3 (tiga) skenario pembangunan rusun pada opsi lahan di kawasan TOD Pondok Cabe:
   a. **Skenario 1**: Pemanfaatan lahan BMN Terminal Pondok Cabe dengan mengutilisasi area parkir bus dan bangunan Terminal Pondok Cabe;
   b. **Skenario 2**: Penggunaan salah satu lahan dari 4 (empat) opsi lahan yang terletak di sisi utara dan selatan Terminal Pondok Cabe. Namun, harus dilakukan pengadaan lahan melalui pembebasan lahan penduduk/tanah kosong;
   c. **Skenario 3**: Pengadaan lahan akan dilakukan satu kesatuan dengan pengadaan lahan terase dan stasiun MRT;
4. Apabila pengadaan proyek ini menggunakan skema KPBU dengan lahan BMN BPTJ, maka akan terbentuk konsep PJPK gabungan (Rusun dan MRT) antara Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan;
5. Yang dipersiapkan oleh Kementerian PUPR adalah rusun yang terintegrasi dengan kawasan TOD, bukan kawasan TOD itu sendiri. Sehingga diharapkan penyediaan hunian ini dapat menjadi *trigger* penataan kawasan TOD Pondok Cabe;
6. Beberapa bentuk dukungan yang dibutuhkan:
   a. Status kepemilikan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dari setiap opsi lahan;
   b. Rencana terase, lokasi stasiun, dan skenario pengadaan lahan MRT Pondok Cabe;
   c. Izin pemanfaatan pengembangan lahan parkir bus dan kantor pengelola Terminal Pondok Cabe.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Akan diadakan diskusi lebih lanjut dengan PT. MRT dan PT. LRT agar terbentuk hunian yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi;
2. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dalam penyiapan terminal dan stasiun MRT Pondok Cabe ke depannya.

51. FGD Tindak Lanjut Pemenuhan Kebutuhan Air pada Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 30 September 2021, bertempat di The Luxton Hotel, Bandung dan melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

Isu pembahasan:

1. Kondisi lokasi proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung mengalami kesulitan memperoleh air bersih terutama pada musim kemarau;
2. Belum terdapat sistem perpipaan yang menjangkau lokasi proyek;
3. Kebutuhan air bersih Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung yaitu 1,5 – 2 mid atau sekitar 20 l/detik dengan rencana operasional di tahun 2025.

Kesimpulan: solusi jangka pendek yang bisa dimanfaatkan air baku dari IPA Paket Cipamokolan dengan pertimbangan:

1. Kapasitas yang masih memungkinkan;
2. Jarak yang relatif lebih dekat dengan lokasi proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung;
3. Masuk dalam rencana bisnis PDAM Tirtawening dalam waktu dekat;
4. Anggaran yang dibutuhkan untuk IPA Paket Cipamokolan adalah sebesar Rp16M (anggaran di luar jaringan perpipaan) dengan skema pembiayaan diusulkan melalui DAK oleh Pemerintah Kota Bandung.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Pembahasan sinkronisasi *timeline* antara SPAM Kertasari dan IPA Cipamokolan dengan *timeline* proyek KPBU Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung;
2. Koordinasi dengan Ditjen Cipta Karya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kota Bandung dalam rangka penyiapan anggaran untuk Proyek IPA Paket Cipamokolan.

52. Rapat Pembahasan Konsep Studi Pendahuluan Proyek Rusun TOD

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Oktober 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini yaitu:

1. Sebelumnya telah dilaksanakan identifikasi awal (*screening)* dan didapatkan 3 (tiga) lokasi potensi lahan penyediaan Rusun TOD, yaitu:
   a. Lahan BMN PUPR Pasar Jumat Lebak Bulus;
   b. Lahan BMN BPTJ Terminal Pondok Cabe;
   c. Proyek Rusun Perumnas di Stasiun Rawa Buntu;
2. Dokumen SP hampir mencapai tahap akhir, untuk selanjutnya akan ditentukan apakah SP akan terdiri dari 2 (dua) dokumen untuk opsi lahan pada TOD Lebak Bulus dan TOD Pondok Cabe atau menjadi satu kesatuan;
3. Berdasarkan *self-assessment* yang dilakukan, untuk penyusunan draf dokumen SP proyek Rusun pada Kawasan TOD Lebak Bulus sudah mencapai angka 96% terkait keterisian serta 94% terkait kedalaman materi;
4. Sementara untuk penyusunan draf dokumen SP proyek Rusun pada Kawasan TOD Pondok Cabe sudah mencapai angka 96% terkait keterisian serta 93% terkait kedalaman materi.

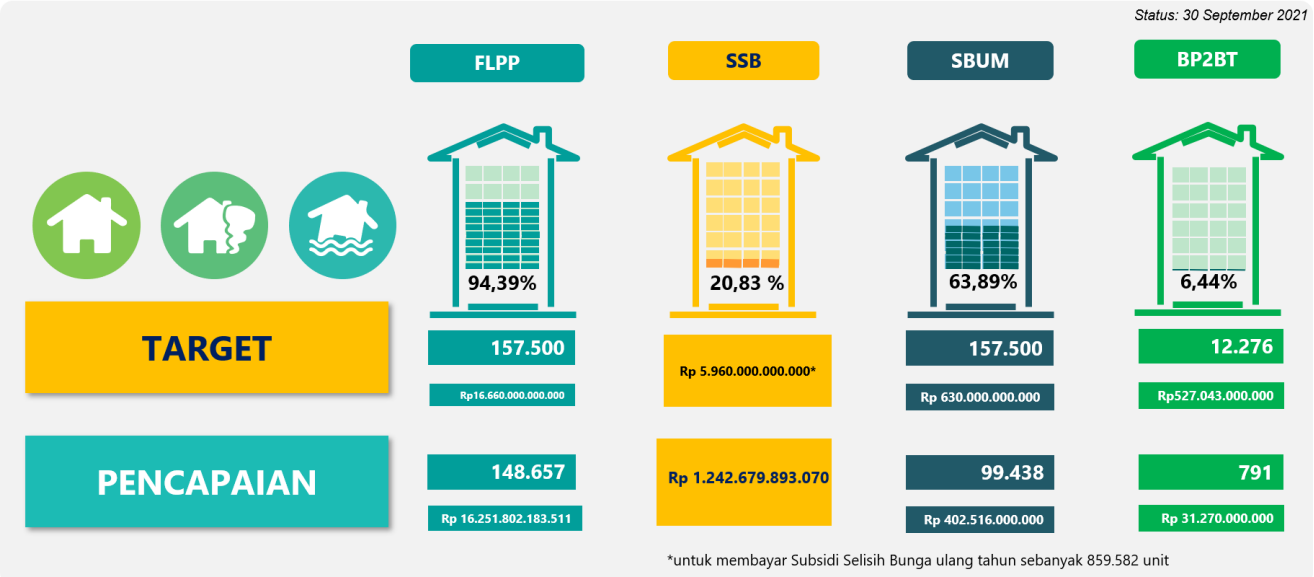
Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Konsultan akan melengkapi kekurangan pada dokumen SP terkait beberapa aspek:
   a. Penyediaan opsi jenis Rusun masih terbuka, tidak tertutup pada opsi Rusunawa saja namun bisa berupa Rusunami/Komersial mengingat letak lahan yang sangat strategis, terutama lahan BMN Pasar Jumat;
   b. Penentuan pembiayaan proyek dengan AP atau *user-pay* akan dikaji lagi;
2. DJPI segera mengirimkan draf dokumen SP ini ke Bappenas untuk dinilai;
3. Akan dilakukan pembahasan draf SP ini dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 untuk meminta masukan terkait beberapa hal yang masih perlu dikonfirmasi;
4. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pengelola Kawasan Pasar Jumat dalam rangka memastikan perolehan pemanfaatan lahan BMN untuk pembangunan Rusun TOD;
5. Terkait lahan Terminal Pondok Cabe, akan dilakukan konfirmasi dan koordinasi terkait kepastian MRT dan perolehan pemanfaatan lahan BMN untuk pembangunan Rusun TOD

02 Kemudahan dan Bantuan

Kemudahan dan Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat memiliki rumah antara lain Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Progres Capaian Produk Kemudahan dan Bantuan



Gambar Progres Capaian Produk Kemudahan dan Bantuan

Pada tahun Q1 2021, FLPP memiliki target penyaluran sebanyak 157.500 unit, target SBUM pada 2021 sebanyak 157.500 unit, dan untuk BP2BT memiliki target sebanyak 18.950 unit. Sedangkan untuk SSB pada tahun 2021 ini merupakan pembayaran untuk tahun sebelumnya (menggulung) dengan besar target penyaluran sebesar Rp5.960.000.000.000,00.

Pencapaian hingga 30 September 2021 untuk program FLPP adalah sebanyak 148.657 unit atau sebesar Rp16.251.802.183.511 capaian SBUM sebanyak 99.438 unit atau sebesar Rp402.516.000.000 dan BP2BT sebanyak 791 unit atau sebesar Rp31.270.000.000. Penyaluran SSB ulang tahun hingga 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.242.679.893.070.

Perkembangan Regulasi

Perkembangan regulasi terkait Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan:

NO	URAIAN	STATUS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penyusunan Rapermen PUPR Tentang BP2BT	• Izin prakarsa Bapak Menteri PUPR; • SK Dirjen PI Tentang Pembentukan Tim Penyusun RapermenPUPR; • Telah dilakukan 13 kali pembahasan draft RapermenPUPR;	• Harmonisasi melibatkan antar kementerian/lembaga .	• Akan dilakukan harmonisasi RapermenPUPR Tentang BP2BT pada tanggal 8 Oktober 2021.

		• Telah dilakukan Konsultasi Publik pada 9 Juni 2021; • Berita Acara, RapermenPUPR, dan RakepmenPUPR dalam proses di Biro Hukum.		
2.	Penyusunan Rapermen PUPR Tentang KPR Siap Bangun	• Izin Prakarsa Bapak Menteri PUPR, tanggal 7 Juli 2021; • SK Dirjen PI Tentang Pembentukan Tim Penyusun RapermenPUPR; • Telah dilakukan 6 kali pembahasan Skema dan Penyusunan Rapermen; • Telah dilakukan uji publik pada 9 September 2021; • Telah dilakukan pembahasan finalisasi RapermenPUPR; • Berita Acara, RapermenPUPR, dan bahan tayang telah disampaikan kepada Setditjen.	• Kesepakatan dalam substansi Rapermen (Besaran angsuran pada masa pembangunan, pembayaran dana FLPP Tahap kesatu, dan penyelesaian pengembang wanprestasi).	• Harmonisasi RapermenPUPR.
3.	Penyusunan Rapermen PUPR Tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	• Merupakan salah satu Proleg Kementerian PUPR Tahun 2021; • SK Tim Penyusun RapermenPUPR melalui SK Dirjen PI; • Telah dilakukan 11 kali pembahasan RapermenPUPR; • Telah dilakukan uji publik pada, 23 September 2021.	• Pengaturan segmentasi program FLPP dan Tapera dalam bentuk Permen, Kepmen atau SE Menteri PUPR; • Usulan BP Tapera terkait kelompok sasaran FLPP tahun 2022 dibatasi menjadi MBR Non-ASN dan SBUM untuk peberima manfaat FLPP dan Peserta Tapera; • Penambahan rincian data penerima manfaat FLPP yang diserahkan oleh PPDPP kepada BP Tapera.	• Melakukan pembahasan dengan Tim Penyusun RapermenPUPR; • Menyampaikan Berita Acara, RapermenPUPR disertai dengan bahan tayang, penjelasan umum dan analisis kesesuaian kepada Setditjen; • Harmonisasi RapermenPUPR.

4.	Revisi DIPA TA 2021 untuk penambahan kuota BP2BT	• Anggaran BP2BT saat ini tersedia untuk 1.000 unit sedangkan Permohonan Dana BP2BT sudah mencapai 2.110 pemohon, dengan SK Penerima Manfaat yang sudah diterbitkan sebanyak 1.425 unit; • Prognosis Bank Pelaksana TA 2021 sebanyak 12.276 unit.	• Perlu dilakukan Revisi DIPA percepatan penarikan pinjaman.	• Mengajukan permohonan Revisi DIPA kepada DJA dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terjadi. • Memastikan Bagian Anggaran, Sesditjend telah membuat Surat Permohonan Review APIP untuk pelaksanaan revisi DIPA percepatan penarikan pinjaman.
5.	Pelaksanaan Monev KPR Bersubsidi dan BP2BT	• Telah dilaksanakan monev tahap persiapan (pada awal tahun 2021), monev tahap penyaluran (sepanjang tahun 2021) serta monev tinjauan kualitas konstruksi (mei 2021); • Dalam tahap pelaksanaan monev pasca penyaluran (keterhunian) melalui metoda kunjungan lapangan, wawancara online, dan debitur mengisi kuesioner e-monev; • Debitur yang telah dilaksanakan monev untuk BP2BT kurang lebih sebanyak 80 debitur.	• Perlu percepatan pelaksanana monev untuk SSB dengan target sampel sebanyak 11.976 unit; • Perlu segera melaksanaan monev untuk BP2BT.	• Melaksanaan Rapat Koordinasi dengan Satker PIPUP dan Satker DJPI agar terdapat pemahaman yang sama dalam pelaksanaan monev keterhunian rumah.
6.	Penyusunan Harga Jual Rumah yang Difasilitasi KPR Bersubsidi Tahun 2021	• Telah dilakukan 1 kali rapat persiapan dengan melibatkan internal DJPI, Ditjen Perumahan dan Ditjen Cipta Karya; • Telah dilakukan 3 kali pembahasan dengan melibatkan	• Kesepakatan dalam hal metode perhitunga, model dan spesifikasi rumah tapak dan Rusun; • Pelaksanaan survei harga bahan material.	• Penyusunan SK Tim Perumusan dan Penghitungan Harga Jual; • Pembahasan secara rutin setiap minggu.

		internal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan Expert di bidang perumahan.		
7.	Pengaturan SBUM Pasca Pengalihan Dana FLPP Ke BP Tapera	• Substansi sudah dimasukkan ke dalam Rapermen Kepesertaan.	• Kerjasama antara Bank Pelaksana, Staker Ditjen Pembiayan Infrastruktur, dan BP Tapera.	• Sinkronisasi pengaturan RapermenPUPR dan RPBP tentang penyaluran FLPP.
8.	Revisi Juknis Monev KPR Bersubsidi dan BP2BT	• Draft Revisi Juknis telah diserahkan kepada BHK.	• Perlu pembahasan dengan BHKP terkait masukan yang telah diberikan pada draft revisi juknis.	• Melaksanaan Rapat Koordinasi penyelesaian perbaikan SE Dirjen No 10 Tahun 2020 terkait Juknis Pemantauan dan Evaluasi.

Pelaksanaan Kegiatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah melakukan kegiatan pelaksanaan Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan sebagai berikut:

1. **Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Rumah KPR Bersubsidi Paksa Bencana Banjir Kabupaten Jayapura**

   Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

   1. Kewajiban Bank Papua dan Bank BTN untuk mengembalikan sisa pinjaman pokok dan tarif masih tetap berlaku sesuai dengan yang dijadwalkan di dalam PKS;
   2. Pemutihan pinjaman oleh Bank Pelaksana kepada PPDPP sebaiknya dikoordinasikan dengan Direktorat PPK BLU DJPB Kemenkeu;
   3. Dari sisi regulasi, kewenangan relokasi berada di Pemerintah Daerah dan anggarannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD;
   4. Selama pokok pinjaman debitur belum lunas, status kredit macet pada debitur akan tetap tercatat di SLIK OJK yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan pinjaman di lembaga keuangan manapun;
   5. Apabila status bencananya tidak termasuk dalam katagori bencana nasional, sesuai dengan pasal 6 dan 7 POJK Nomor 45/POJK.03/2017 maka bencana banjir di Sentani tidak memenuhi syarat sebagai daerah yang terdampak bencana yang layak untuk mendapatkan perlakuan khusus;
   6. Kementerian Keuangan kiranya dapat melakukan kebijakan diskresi terkait hapus tagih atas pinjaman pokok sehingga debitur tidak lagi tercatat di dalam daftar kredit macet;
   7. Perlu pendekatan ke Pemerintah Daerah terkait anggaran untuk relokasi dan penentuan status bencana.

   Tindak Lanjut dari kegiatan ini yaitu:

   1. Akan dilakukan rapat koordinasi lebih lanjut dengan OJK, Kementerian Keuangan, Bank BTN, Bank Papua dan PPdPP terkait kebijakan yang dapat diberikan kepada debitur KPR bersubsidi akibat banjir di Kabupaten Jayapura;

   2. Menyusun laporan kepada Wakil Menteri PUPR terkait kemungkinan kebijakan yang dapat ditetapkan untuk debitur KPR bersubsidi korban banjir Kabupaten Jayapura.

2. **Rapat Pembahasan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 5 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pengaturan persyaratan memiliki NPWP bagi kelompok sasaran mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur masayarakat wajib memiliki NPWP;
2. Indeks penghasilan untuk perbaikan rumah swadaya sebesar 49%;
3. Manfaat dana BP2BT untuk pemilikan dan pembangunan rumah yang diperoleh MBR paling banyak sebesar Rp45.000.000,- dengan batas penghasilan mengikuti Keputusan Menteri PUPR Nomor 411 Tahun 2021;
4. Program BP2BT dikhususkan untuk MBR sektor informal dan Program FLPP dikhususkan untuk MBR sektor formal;
5. Rumah bekas akibat gagal bayar akan dialihkan ke BP3 sehingga ketika rumah dilelang dapat dipastikan tetap dimanfaatkan oleh MBR;
6. Syarat tingkat kesehatan untuk BPR adalah kategori sehat selama 6 bulan terakhir;
7. BPR dan BPRS disyaratkan harus bekerjasama dengan PT. SMF dan mendapat dukungan permodalan dari PT. SMF; dan
8. Menambahkan kewajiban pelaporan Bank Pelaksana yaitu wajib melampirkan NPWP debitur yang pada saat akad KPR masih dalam proses pembuatan dan SPT Tahunan debitur yang belum diberikan.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan:

1. Menyusun surat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan kepada Direktur Utama PPDPP perihal segmentasi kelompok sasaran FLPP khusus MBR sektor formal;
2. Melakukan kajian yang komprehensif terkait pemanfaatan kembali rumah bekas akibat gagal bayar dan pembahasan yang melibatkan pihak yang berkepentingan;
3. Melakukan pembahasan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait syarat ketersediaan jaringan sumber air minum atau air bersih pada perumahan;
4. Melakukan pembahasan lanjutan terkait lampiran pada RapermenPUPR (jadwal tentatif); dan
5. Meminta arahan Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terkait pemberian fasilitas BP2BT terhadap rumah bekas akibat gagal bayar yang dapat mengakibatkan kerugian negara karena memberikan dana BP2BT secara berulang untuk satu rumah yang sama.

3. **Rapat Pembahasan Skema BP2BT Melalui Perusahaan Pembiayaan dan BPR/BPRS**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Diusulkan agar penyaluran bantuan tetap mengacu kepada ketentuan PMK No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yaitu kepada Bank yang telah bekerja sama dengan BUN;
2. Terkait dengan pengaturan rekening K/L diatur dalam PMK No. 182/PMK.05/2017 pasal 38 mengatur bahwa pengelolaan rekening Sakter harus berada di Bank yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan BUN;
3. Dalam pemanfaatan lembaga penyalur juga perlu memperhatikan dari sisi akuntabilitas yang berkaitan dengan pemeriksaan BPK;
4. BPR dan BPRS memiliki bunga jaminan yang lebih tinggi sehingga risiko BPR dan BPRS sebagai salah satu lembaga penyalur bantuan lebih tinggi;
5. BPR dan BPRS tidak bisa menerbitkan giro, secara teknologi masih kurang dibanding Bank Umum, artinya banyak hal-hal yang dimiliki oleh Bank Umum namun tidak dimiliki oleh BPR dan Perusahaan Pembiayaan; dan

6. Mekanisme *reimbursement*, *channeling*, atau *pass through* perlu didiskusikan lebih lanjut karena tanggung jawab sepenuhnya pada KPA, selain itu diperlukan *assessment* dari sisi teknologi, pelaporan, monitoring dan lain-lain berikut juga risiko-riskonya untuk penyaluran di luar Bank Umum.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah *Draft* RapermenPUPR tentang BP2BT akan disesuaikan dengan hasil rapat.

4. Rapat Pembahasan RapermenPUPR tentang Perubahan PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Muatan materi KPR Siap Bangun berasal dari konsep Kepmen yang diajukan oleh PPDPP, namun setelah memperoleh masukan dari berbagai pihak, konsep tersebut sudah tidak ideal untuk diadopsi secara utuh sehingga perlu disepakati ulang terkait skema KPR Siap Bangun yang akan diatur dalam Rapermen;
2. Pengaturan KPR Siap Bangun pada saat dana FLPP telah beralih ke BP Tapera (2022) diakomodasi dengan memberikan amanat kepada BP Tapera pada 2-3 pasal terakhir, sedangkan mekanisme secara detail akan diatur dalam Peraturan BP Tapera;
3. Konsekuensi KPR Siap Bangun jika menggunakan skema pembayaran bertahap 50:50, dimana pembayaran Tahap I 50% di atas kaveling tanah matang akan bertentangan dengan (i) pengaturan PPJB yang mensyaratkan keterbangunan 20% dan (ii) mekanisme Kredit Konstruksi;
4. Kualitas rumah terjaga karena MBR ikut mengawasi pembangunan dan harga rumah lebih murah akibat pemangkasan beban bunga Kredit Konstruksi, hal ini tidak dapat menjadi spirit KPR Siap Bangun karena (i) peran pengawasan pembangunan ada pada MK, MBR tidak memiliki kompetensi untuk mengawasi kualitas konstruksi dan (ii) tidak ada kontrol/jaminan bahwa KPR Siap Bangun benar-benar menurunkan harga rumah; dan
5. Permasalahan utama KPR Inden dari perspektif Perbankan:
    a. Pembangunan rumah yang tidak selesai dapat dimitigasi dengan seleksi pengembang secara ketat dan *buy back guarantee* antara Pengembang dan Bank dimana pengembang berkomitmen melunasi/mengambil alih piutang/membeli kembali jaminan milik debitur;
    b. Pemecahan sertifikat tidak selesai dapat dimitigasi dengan dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan rumah.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan melakukan rapat lanjutan melibatkan Perbankan penerbit KPR Inden pada minggu ke-3 Juli 2021, dengan materi pembahasan:

1. Manfaat yang diperoleh debitur dengan adanya skema KPR Inden;
2. Aspek legalitas, rekam jejak, dan keuangan dari Pelaku Pembangunan;
3. Aspek legalitas Proyek Perumahan;
4. Identifikasi dan Mitigasi risiko, dalam hal pembangunan tidak sesuai jadwal atau kualitas rumah tidak sesuai ketentuan; dan
5. Muatan mekanisme pengawasan dan pengendalian.

5. Rapat Pembahasan Skema KPR Siap Bangun/KPR Inden

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Bank BTN mengusulkan pada KPR Siap Bangun agar retensi dilakukan sejak pencairan pertama, apabila proyek terhenti di tengah jalan, masih tersisa dana 50% *plus* retensi untuk melanjutkan bangunan beserta PSU;
2. PPDPP mengusulkan pada KPR Siap Bangun, pencairan Tahap I maksimal 30% dan fasilitas KPR Siap Bangun hanya diberikan apabila telah terkumpul minimal 25 debitur untuk mencapai skala ekonomis;

3. Usulan Bank BNI terkait KPR Siap Bangun (i) pencairan kredit dari bank tetap dilakukan satu kali di awal dalam jumlah *full* plafon, mengingat Bank mengembalikan dana dan tarif FLPP kepada PPDPP dihitung penuh sejak awal/tidak bertahap, dan (ii) syarat sertifikat tanah telah dipecah di awal sehingga ketika ada wanprestasi, Bank dapat mengeksekusi jaminan karena tanah telah terikat HT;
4. *Buyback guarantee* sulit diterapkan pada rumah subsidi karena ada porsi dana subsidi yang wajib dikembalikan kepada pemerintah ketika pengembang wanprestasi;
5. BP Tapera tidak dapat memberikan Kredit Konstruksi secara langsung kepada pengembang, melainkan melalui skema efek/surat utang oleh Deputi Pemupukan;
6. Benefit KPR Inden lebih banyak ditujukan untuk pengembang dibandingkan untuk debitur.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Bank BTN akan menyiapkan komparasi efektifitas KPR Inden dan Kredit Konstruksi;
2. Perbankan akan menyiapkan satu diagram aliran dana KPR Inden;
3. Direktorat PPP akan melakukan diskusi lanjutan membahas pengendalian dan mitigasi risiko KPR Siap Bangun dari perspektif Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

6. Rapat Pembahasan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pengaturan mengenai pengalihan rumah gagal bayar disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, yaitu:
   a. Pengalihan dilakukan dalam hal pewarisan dan telah dihuni 5 (lima) tahun untuk rumah umum tapak dan 20 (dua puluh) tahun untuk sarusun umum; dan
   b. Pengalihan dilakukan melalui badan yang menangani pengalihan kepemilikan rumah umum.
2. Pengaturan terkait rumah dapat dialihkan dalam hal kepentingan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah merupakan hubungan perdata antara debitur dengan perbankan, sehingga dapat diselesaikan oleh debitur dan perbankan sesuai dengan perjanjian kreditnya;
3. Pengaturan terkait penjualan kembali rumah *second* menunggu pengaturan dari Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3);
4. BP2BT dikategorikan sebagai bantuan pemerintah yang sifatnya adalah belanja barang sehingga tidak dikembalikan kepada pemerintah, oleh karena itu MBR yang gagal bayar tetap dihitung pernah mendapatkan subsidi;
5. Perlu dilakukan pembahasan melibatkan auditor dari sisi pertanggungjawaban administrasi keuangan negara untuk menjaring masukan terkait obyek bantuan yang hilang/rumah gagal bayar;
6. Program BP2BT akan berakhir di tahun 2022, sehingga pengaturan BP2BT harus lebih berfokus kepada penyempurnaan/perbaikan skema yang sudah ada;
7. Beberapa klausul dalam UU Cipta Kerja memungkinkan pemerintah untuk membentuk atau menunjuk badan, saat ini sedang digagas konsep pengembangan PPDPP salah satunya berfungsi sebagai aset manajemen unit, dimana salah satu kegiatannya adalah pengalihan rumah sehingga sebelum BP3 beroperasi ada baiknya PPDPP difungsikan sebagai cikal bakalnya.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah RapermenPUPR tentang BP2BT disesuaikan dengan hasil rapat.

7. Rapat Pembahasan Skema KPR Siap Bangun

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Sebaiknya ketentuan tahapan pencairan diserahkan kepada masing-masing bank dikarenakan setiap bank memiliki kebutuhan yang berbeda dan masing-masing sudah memiliki manajemen risiko;
2. Diusulkan untuk mengatur jumlah maksimal pembangunan yang dapat dilakukan pengembang dengan fasilitas KPR Inden;
3. OJK tidak mengatur spesifik jenis KPR, mengatur ketentuan angsuran yang dibebankan ke masyarakat, alternatif angsuran diserahkan ke masing-masing bank. OJK hanya mengatur prinsip-prinsip tertentu bagaimana manajemen internal bank untuk meberikan kredit, hal ini diatur dalam POJK Nomor 3 Tahun 2017;
4. Bank Indonesia mengecualikan ketentuan LTV untuk program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
5. OJK menetapkan ketentuan LTV untuk kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program pemerintah pusat sebesar 100%.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah Tim Penyusun Rapermen tentang Perubahan atas Permen No.20/PRT/M/2019 akan menyesuaikan pengaturan skema KPR Siap Bangun sesuai dengan hasil pembahasan.

8. Rapat Pembahasan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Terkait dengan pencapaian BP2BT, saat ini sudah ada 72 debitur yang telah menerima SK Penerima Manfaat dan 33 debitur yang telah menerima pencairan dana BP2BT, sehingga total realisasi telah mencapai 105 unit;
2. Isu dari Bank Pelaksana yaitu bank akan mempercepat penyaluran BP2BT akhir Oktober setelah kuota FLPP habis, namun Dit. PPP sudah menyampaikan ke bank agar mulai menyalurkan BP2BT mulai dari sekarang dan meminta bank untuk menyampaikan target yang realistis berdasarkan kondisi saat ini;
3. Arahan dari Bapak Plt. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan agar Bank Pelaksana dan Pengembang ikut mempromosikan BP2BT dan diarahkan pada segmen *non-fixed income*;
4. Saat ini penyaluran FLPP sudah mencapai 98.001 unit. Ada kabar bahwa FLPP akan habis pada Bulan Agustus, sehingga perlu arahan dari Bapak Plt. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terkait kuota penyaluran tahun ini apakah perlu ditambah atau tidak. Apabila menghabiskan dana yang tersedia, Rp 19 Triliun, maka dipastikan realisasi akan melebihi 157.000 unit;
5. Akibat PPKM penyaluran FLPP mengalami penurunan penyaluran, karena (i) pelaksanaan akad yang harus dihadiri bersama notaris; (ii) survey perbankan kepada debitur tidak dapat dilakukan;
6. Diusulkan untuk merevisi DIPA karena: (i) terkait dengan potensi kenaikan kuota FLPP di atas 157.000 unit, maka perlu menyiapkan dana SBUM juga. Sumber dana SBUM dapat menggunakan dana SSB; (ii) masih terdapat tunggakan sebesar Rp 7-8 Miliar untuk SSB bulan Desember 2019.

Tindak Lanjut dari kegiatan ini adalah hasil pembahasan akan disampaikan kepada Plt. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.

9. Rapat Pembahasan Pengalihan Rumah KPR Bersubsidi dan BP2BT

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pasal 55 UU Cipta Kerja menjadi dasar pembentukkan BP3 yang kemudian diterbitkan Perpres No. 9 Tahun 2021 tentang BP3, pada Pasal 5 ayat (2) huruf f mengatur bahwa pelaksanaan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu tugas dari BP3. Namun, substansi kemudahan

dan/atau pembangungan dan perolehan rumah MBR belum diatur di dalam Perpres No. 9 Tahun 2021. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut;

2. Dalam UU dan Perpres jelas diamanatkan bahwa BP3 bertugas sebagai pelaksana, sedangkan sebagai regulator adalah Direktorat Jenderal Perumahan maupun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pada saat BP3 beroperasi seharusnya sudah ada landasan hukum yang menjadi pedoman bagi BP3;
3. Terkait rumah *second* seharusnya merupakan mekanisme perdata biasa karena MBR dengan bank terikat kontrak;
4. Dalam perubahan PermenPUPR No. 20 tahun 2019 tidak perlu diatur mengenai rumah *second*, pengaturan tersebut dapat dimuat dalam konsep Permen baru sebagai penyiapan transformasi tugas BP3;
5. Di dalam UU dibatasi apabila penghunian lebih dari 5 tahun atau 20 tahun boleh dialihkan, apabila penghunian kurang dari 5 tahun atau 20 tahun kemudian mengalami gagal bayar maka mekanisme ini perlu diatur untuk dilaksanakan oleh BP3;
6. Proses lelang tetap menggunakan mekanisme bank, bahwa kemudian lelang tersebut langsung ditunjuk pembeliannya oleh BP3, hal ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan OJK dan meminta OJK menyiapkan skema khusus agar BP3 dapat membeli rumah *second*;
7. Perlu adanya regulasi yang mengatur peruntukan sisa dari hasil lelang setelah dibayarkan kepada bank untuk melunasi *outstanding* apakah sisanya akan dikembalikan kepada debitur saja atau dikembalikan ke debitur dan pemerintah, hal ini dikhawatirkan akan menjadi objek pemeriksaan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Perumahan terkait dengan BP3;
2. Terkait dengan *database* aset KPR FLPP akan dikoordinasikan dengan PPDPP.

10. Rapat Pembahasan Pengendalian Pelaksanaan KPR Bersubsidi dan BP2BT

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. SE Nomor: 10/56/Dp/2020 merupakan pengendalian dari program KPR Subsidi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2019 dan program BP2BT yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2019;
2. Agar dalam merivisi SE Nomor: 10/56/Dp/2020 tidak terjadi tumpang tindih dengan Petunjuk Teknis Program KPR Subsidi dan Program BP2BT yang disusun oleh masing-masing Satker dan harus berpedoman apa yang diamanat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2019 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2019;
3. Terkait tahap pasca penyaluran pada SE Nomor: 10/56/Dp/2020 adanya perbedaan bahwa program KPR Subsidi dilaksanakan oleh satker sedangkan program BP2BT dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal;
4. Beberapa poin-poin perubahan secara substansi terhadap revisi SE Nomor: 10/56/Dp/2020 antara lain:
    a. Penggabungan tugas dan tanggungjawab antara program KPR Subsidi dan program BP2BT pada matriks;
    b. Perubahan pada nomenklatur Satker;
    c. Perubahan tanggungjawab pada program BP2BT yang semula dilakukan oleh Satker menjadi Direktorat Jenderal pada tahap pasca penyaluran;

d. Perubahan pada pola hubungan kerja yang semula berada di tahap persiapan dan tahap pasca penyaluran menjadi di semua tahap (Persiapan, Penyaluran dan pasca penyaluran);
e. Perubahan tata cara Pemantauan dan Evaluasi pada tahap pasca penyaluran yang semula ditetapkan seluruhnya oleh SE Nomor: 10/56/Dp/2020 menjadi masing-masing Petunjuk Teknis (SE) pada program KPR Subsidi dan program BP2BT.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan akan melakukan finalisasi Draft revisi SE Nomor: 10/56/Dp/2020 yang telah disepakati di dalam rapat pembahasan untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan.

11. Rapat Pembahasan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 2 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Mekanisme nasabah/debitur melakukan akad kredit BP2BT secara langsung dengan Perusahaan Pembiayaan/BPR/BPRS akan bertentangan dengan PMK 168/2015 dimana penyaluran bantuan pemerintah hanya disalurkan melalui Bank/Pos Penyalur yang memiliki perjanjian kerja sama dengan BUN;
2. Apabila Perusahaan Pembiayaan/BPR/BPRS sebagai perpanjangan tangan dari Bank Pelaksana dalam hal menghimpun nasabah, maka pengaturan pada Rapermen hanya sebatas kriteria lembaga keuangan lainnya sebagai pencari nasabah dan tidak perlu diatur secara rinci;
3. Tekait kerja sama Perbankan dengan Lembaga Keuangan Lain pada Pasal 3 ayat (10) RapermenPUPR tentang BP2BT perlu ditambahkan prasyarat kondisi Lembaga Keuangan Lain dan Bank Pelaksana, hal yang dikerja samakan, serta mekanismenya;
4. Pada praktiknya akad kredit tetap dengan Bank Pelaksana karena belum ada dasar hukum untuk melakukan akad kredit dengan lembaga keuangan lainnya selain itu bisnis proses akan semakin panjang, pelibatan lembaga keuangan lainnya dapat dilakukan dari sisi penjaminan atau dari sisi mencari debiturnya kaitannya dengan audit BPK/BPKP; dan
5. Dit. PSSPP bersama tim di Dit. PPP sedang mengupayakan *pilot project* dengan pembiayaan melalui Multifinance dan *channeling* ke PT. SMF, terdapat beberapa kendala salah satunya Multifinance sangat bergantung kepada produk dari PT. SMF sedangkan PT. SMF dalam pengembangan produk bergantung kepada regulasi yang ada khususnya PermenPUPR tentang BP2BT.

2.Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. *Draft* Rapermen disesuaikan dengan hasil rapat;
2. Menyusun konsep Berita Acara Tim Penyusun RapermenPUPR tentang BP2BT;
3. Pembahasan melibatkan Kementerian Keuangan terkait skema linkage BP2BT.

12 Rapat Pembahasan Permohonan Bantuan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perumahan Bagi Personil Polda Kalimantan Utara

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Salah satu pengembang di Provinsi Kalimantan Utara yaitu PT Bumi Rahayu akan melakukan pembangunan perumahan yang berlokasi tepat di depan kantor Polda Kaltara, dengan asumsi bahwa perumahan tersebut mayoritas akan dihuni oleh anggota Polda Kaltara maka diharapkan adanya bantuan dari Kementerian PUPR baik dari sisi penyediaan PSU maupun pembiayaannya;
2. Anggota Polda Kaltara dapat memanfaatkan FLPP sebagai bantuan pembiayaan perumahan dengan mendaftarkan diri ke sistem SiKasep, PPDPP siap membantu terkait pengenalan sistem SiKasep dan cara penggunaannya;
3. Surat Kapolda Kaltara kepada Bapak Menteri telah diterima oleh Ditjen. Perumahan pada bulan Februari 2021. Hal ini ditindaklanjuti dengan penugasan kepada SNVT Kaltara untuk melakukan survei lapangan terkait lokasi yang direncanakan akan dibangun;
4. Berdasarkan survei, terdapat persyaratan yang belum dipenuhi sesuai dengan dengan PermenPUPR No. 3/PRT/M/2018 yaitu:

a. Dalam dokumen rencana pembangunan disebutkan bahwa pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 96 unit rumah, hal ini perlu disesuaikan menjadi paling sedikit 100 unit rumah untuk MBR;
b. Paling sedikit unit yang sudah terbangun adalah sebanyak 50 unit rumah.

5. Diharapkan persyaratan dapat dilengkapi sebelum akhir Tahun 2021 sehingga dapat dilakukan verifikasi teknis dan bantuan dapat diberikan pada Tahun 2022; dan
6. Permohonan bantuan PSU dilakukan melalui sistem SiBaru.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Polda Kaltara telah bekerjasama dengan Bank BTN dan Bank BRI yang merupakan Bank Penyalur FLPP dan BP2BT sehingga perolehan bantuan pembiayaan perumahan untuk anggota Polda Kaltara dapat dikoordinasikan dengan kedua bank tersebut;
2. Polda Kaltara akan berkoordinasi dengan pengembang terkait timeline penyelesaian pembangunan perumahan; dan
3. Polda Kaltara akan melakukan sosialisasi kepada anggota Polda Kaltara dengan melibatkan Bank BTN, Bank BRI, dan Pengembang juga dalam rangka memastikan profil dari masing-masing pengembang.

13. Rapat Pembahasan Skema Linkage Penyaluran BP2BT

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Bank Penyalur adalah Bank Pelaksana yang sudah memiliki kerja sama dengan Bendahara Umum Negara (BUN);
2. Dana BP2BT disalurkan melalui Bank Penyalur kepada debitur, sedangkan kredit KPR dapat berasal dari Bank Pelaksana maupun Lembaga Keuangan lain seperti BPR dan BPRS;
3. PMK 168/2015 tidak mengatur mengenai debitur harus membuka rekening di Bank Penyalur, namun kaitannya dengan kemudahan dan biaya pemindahbukuan dianjurkan debitu membuka rekening di Bank Penyalur;
4. Mekanisme kerja sama antara Kementerian PUPR, Bank Pelaksana, dan Lembaga Keuangan lain diatur di dalam Petunjuk Teknis;
5. Terkait pengembalian bantuan pemerintah tidak diatur di dalam PMK 168/2015, perlu berkonsultasi dengan Ditjen Kekayaan Negara.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah melakukan pembahasan finalisasi RapermenPUPR tentang BP2BT melibatkan Tim Penyusun.

14. Rapat Perlakuan Rumah KPR Bersubsidi dan BP2BT bagi Debitur/Nasabah Gagal Bayar

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Mekanisme KPR Bersubsidi dilengkapi dengan asuransi kredit, kebakaran dan jiwa sehingga pada saat terjadi gagal bayar akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (subrogasi), namun penjualan agunan tetap dilakukan oleh Bank Pelaksana;
2. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam surat pernyataan debitur (debitur menjual/menyewakan/tidak menghuni rumah/melanggar ketentuan) maka harus mengembalikan subsidi yang diterima, sedangkan terhadap debitur gagal bayar/NPL tidak diatur dalam PermenPUPR;
3. Belum ada regulasi di Kementerian Keuangan yang mengatur perlakuan terhadap dana bantuan pemerintah atas debitur yang gagal bayar, apakah harus dikembalikan ke negara atau tidak.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan pembahasan mekanisme pengalihan rumah gagal bayar dengan melibatkan Tim Penyusun RapermenPUPR pada Senin 16 Agustus 2021.

15. Rapat Pembahasan Perlakuan Subsidi Perumahan/Bantuan Pemerintah Akibat Debitur/Nasabah Gagal Bayar dalam KPR Bersubsidi dan BP2BT

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Berdasarkan penggunaan akun belanja, dana BP2BT yang disalurkan kepada MBR dan kemudian terjadi gagal bayar tidak perlu dikembalikan ke negara;
2. Perlu kesepakatan terkait nomenklatur rumah yang difasilitasi KPR Bersubsidi dan BP2BT merupakan rumah umum;
3. Perlu adanya mitigasi risiko terhadap rumah yang mengalami gagal bayar;
4. Beberapa isu yang perlu mendapat arahan Pimpinan:
    a. dari sisi MBR, apakah bantuan pemerintah terhadap debitur gagal bayar harus dikembalikan ke negara dan bagaimana mekanismenya;
    b. dari sisi pengalihan, apakah mekanisme pengalihan rumah terhadap debitur gagal bayar dengan menggunakan mekanisme lelang atau tanpa meknisme lelang;
    c. acuan harga jual untuk rumah akibat gagal bayar, apakah menggunakan harga pasar pada tahun berjalan atau harga Keputusan Menteri pada tahun berjalan; dan
    d. bagaimana melakukan *appraisal* rumah akibat gagal bayar dan siapa pihak yang melakukannya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan diadakan rapat pembahasan mengenai gambaran skema jual beli rumah MBR yang terjadi gagal bayar sampai dengan dilakukannya penyelesaian oleh bank.

16. Rapat Pembahasan RapermenPUPR No. 20/PRT/M/2019

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Skema KPR Siap Bangun/KPR Inden disatukan ke dalam bab tersendiri;
2. Pembayaran tarif dan pokok tetap dikenakan kepada Bank Pelaksana;
3. Alternatif pembayaran angsuran oleh debitur:
    a. Penundaan pembayaran angsuran dan pokok sampai dengan rumah selesai dibangun;
    b. Pembayaran angsuran pokok dan bunga sebesar baki debet sesuai tahapan pencairan; atau
    c. Pembayaran bunga saja sampai dengan rumah selesai dibangun.
4. Sehubungan dengan dialihkannya dana FLPP ke BP Tapera perlu dilakukan addendum pada MoU dan PKS antara Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Bank Pelaksana;
5. SBUM bukan merupakan FLPP namun hanya bagian yang menempel pada FLPP yang mana pengelolaannya oleh Kementerian PUPR, sehingga ketika PermenPUPR No. 20/2019 dicabut maka akan dicabut dan digantingan dengan Permen SBUM yang di dalamnya mengatur SSB gulungan kedepannya; dan
6. Kepala BHKP mengusulkan di dalam Permen ini ada pengaturan bahwa FLPP dan SBUM berhenti di bulan Oktober/November 2021, kemudian bagaimana mekanisme pembayaran gulungan SSB dan ditambah KPR Inden dalam bab tersendiri.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Terkait pembayaran angsuran oleh debitur menunggu masukan PPDPP dari ketiga alternatif yang diusulkan opsi mana yang paling tidak berisiko;
2. Rapermen disesuaikan berdasarkan hasil rapat; dan
3. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut Terkait MoU dan PKS.

17 Rapat Persiapan Penyusunan Harga Jual Rumah yang Difasilitasi dengan KPR Bersubsidi Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Spesifikasi teknis Rumah Susun dan Rumah Tapak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagai salah satu dasar dalam penghitungan harga jual rumah tahun 2022;
2. Rumah Tapak dan Rumah Susun disarankan wajib memiliki PBG dan SLF, mempertimbangkan proses penerbitan PBG dan SLF saat ini sudah lebih mudah dan cepat karena menggunakan sistem SIMBG yang dapat diakses oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Saran dan masukan salam Perumusan dan Penyusunan Harga Jual Rumah Bersubsidi Tahun 2022:

a. Perlu mempertimbangkan peraturan terkait Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota;
b. Perlu dilakukan *excercise* proporsi antara unit hunian dan unit non-hunian;
c. Rumah Tapak yang dapat difasilitasi dengan KPR Bersubsidi tidak lebih murah dari Rumah Khusus;
d. Batasan harga jual Sarusun dapat menggunakan pendekatan kota metropolitan;
e. Perlu dipertimbangkan Rusun *Low Rise* agar harga jual dan biaya perawatan lebih murah;
f. Kriteria MBR untuk Rumah Susun dan Rumah Tapak tidak perlu dibedakan;
g. Kepemilikan Rumah Susun tidak difasilitasi dengan FLPP dan SSB, melainkan bantuan uang muka dikarenakan memiliki *value loan amount* yang besar;
h. Dapat dipertimbangkan pembangunan rumah susun di atas lahan milik BMN atau BMD dengan bukti kepemilikan SKBG;
i. Perlu dibuat formulasi perhitungan harga jual rumah bersubsidi yang baku sehingga tahun selanjutnya hanya perlu melakukan *updating* data; dan
j. Perlu mempertimbangan kondisi daya beli masyarakat serta data *supply* rumah subsidi tahun 2021.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Finalisasi *draft* SK Tim Penyusun dan Perhitungan harga jual rumah tahun 2022;
2. Akan disusun RAB rumah tahun 2022 dengan spesifikasi teknis mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2021.

18. Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran BP2BT Tahun 2021

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Realisasi penyaluran BP2BT per 20 Agustus 2021 sebesar 187 unit dibandingkan dengan target awal sebesar 948 unit, menjadi pertimbangan Bank Dunia terhadap alokasi dana BP2BT pada program NAHP, opsi tindak lanjut yaitu perubahan target dan relokasi dana BP2BT ke program BSPS;
2. Masukan Bank Dunia terhadap pelaksanaan BP2BT tahun 2022 agar target BP2BT lebih realistis dan dilengkapi dengan strategi-strategi pencapaian target dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan program lainnya di tahun 2022;
3. Upaya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan optimis dapat merealisasikan BP2BT tahun 2021 dengan pertimbangan:
   a. Adanya komitmen Bank BTN untuk pemenuhan target penerbitan SK Penerima Manfaat diakhir Agustus 2021 sebanyan 1.000 unit;
   b. Melakukan langkah-langkah percepatan proses dalam penerbitan SK Penerima Manfaat dan pencairan dana BP2BT;
   c. Percepatan revisi PermenPUPR tentang BP2BT; dan
   3. Penyaluran FLPP selesai pada bulan Oktober 2021 berkaitan dengan pengalihan dana FLPP ke BP Tapera.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Melakukan percepatan penerbitan revisi PermenPUPR tentang BP2BT; dan
2. Percepatan proses penerbitan SK Penerima Manfaat dan pencairan Dana BP2BT

19. Rapat Pembahasan RapermenPUPR tentang Perubahan PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Agustus 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pengaturan terkait KPR Inden dipisahkan ke dalam satu bab tersendiri semacam *lex specialist* karena terdapat kondisi yang tidak setara dimana pada skema regular MBR menerima rumah dalam keadaan siap huni sedangkan pada perbaikan Permen ini dibuka opsi kondisi rumah belum siap huni/siap bangun;
2. Kesepakatan teknis penulisan dan substansi pengaturan:
   a. Jaminan aset senilai harga jual rumah dikalikan jumlah rumah yang direncanakan dilakukan PPJB dengan KPR Sejahtera;
   b. Persyaratan pengembang kolektibilitas kredit/pembiayaan dalam kondisi lancar dan tidak dalam daftar hitam di bidang jasa konstruksi dan jasa keuangan;

c. Terkait penghunian yaitu menghuni Rumah Umum Tapak sebagai tempat tinggal setelah dilakukan serah terima berdasarkan berita acara serah terima;
d. Tercantum dalam surat pernyataan bahwa debitur bersedia menerima rumah siap huni setelah selesai dibangun;
e. Batas waktu penyelesaian pembangunan rumah oleh bank pelaksana apabila pengembang wanprestasi adalah paling lama 2 bulan sejak tenggat waktu penyelesaian pembangunan oleh pengembang;
f. Perlu ditambahkan pengaturan perlindungan MBR;
g. Terhadap objek serah terima akan diberikan jaminan pemeliharaan rumah selama 3 bulan sejak ditandatangani BAST rumah;
h. Menambahkan Pasal 41g ayat (6) dan ayat (7) terkait penagihan angsuran kepada debitur/nasabah;
i. Laporan penyelesaian pembangunan rumah umum tapak Pasal 41l ayat (12) huruf c dihapus;
j. Pasal 29 ayat (4) huruf e poin 4 dan pasal 74 ayat (5) huruf d tentang ketentuan pindah karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik dihapus, menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. *Draft* RapermenPUPR diperbaiki sesuai hasil rapat; dan
2. Akan dilakukan uji publik melibatkan Perbankan.

20. Rapat Persiapan Penyusunan Harga Jual Rumah yang Difasilitasi dengan KPR Bersubsidi Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Spesifikasi teknis Rumah Susun dan Rumah Tapak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagai salah satu dasar dalam penghitungan harga jual rumah tahun 2022;
2. Untuk RAB Rumah Susun, agar diestimasikan berdasarkan rusunami *mixed-use*;
3. Untuk RAB Rumah Tapak, agar diestimasikan berdasarkan jenis rumah tunggal, kopel, atau deret;
4. Mengingat harga jual rumah bersubsidi akan ditetapkan tahun 2022, maka diusulkan agar perhitungan RAB mempertimbangkan nilai inflasi.

Tindak lanjut dari kegiatan ini RAB Rumah Susun dan Rumah Tapak tahun 2022 disusun berdasarkan spesifikasi teknis mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2021 dan mempertimbangkan nilai inflasi.

21. Rapat Pembahasan Penanganan Terhadap Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Jayapura

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 8 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Upaya relokasi sudah pernah dilakukan dengan penyediaan lahan yang didukung oleh Dana Siap Pakai (DSP) sejumlah Rp6,97 Milyar, lahan sudah di *land clearing* namun tidak jadi digunakan karena tidak semua warga terdampak bersedia pindah;
2. Pada 2020, BNPB telah menyalurkan Dana Bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebesar Rp275 M yang disalurkan Kepada BPBD Kab. Jayapura;
3. Dukungan terhadap debitur terdampak dapat melihat kepada contoh kasus:

a. Bencana di Sulawesi Tenggara, Pemda dapat membantu proses pembaharuan dokumen R3P;
b. Bencana di NTB, Instruksi Presiden tentang Tanggap Masa Darurat sebagai dasar perpanjangan pemanfaatan dana DSP;

4. Rencana pembangunan rusun memungkinkan dilakukan dengan memperhatikan hukum adat di Papua terkait perizinan kepada Ondoafi (Ketua Adat) setempat;
5. Dari sisi lokasi, pembangunan rusun di Perumahan Bintang Timur kurang layak dari aspek keamanan, lahan untuk pembangunan rusun perlu dikaji lebih lanjut;

6. Terkait opsi relokasi, dibutuhkan informasi lebih mendalam tentang preferensi dari korban bencana untuk Rusun, rumah tapak atau pengembalian uang;
7. Rusun yang dibangun bagi MBR dengan ketentuan sewa harus di atas lahan milik pemerintah. Belum ada preseden atau regulasi yang mengatur ketentuan pembangunan Rusun dengan dana APBN untuk menjadi hak milik, mengingat status korban bencana adalah debitur KPR Bersubsidi; dan
8. Lokasi yang nanti akan digunakan untuk membangun Rusun harus *clear and clean* bersertifikat atas nama Pemda dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Pemda Kab. Jayapura perlu berkomunikasi dengan masyarakat terdampak bencana banjir bandang untuk memastikan kemungkinan relokasi mandiri atau relokasi ke Rusun dengan lahan yang sudah siap; dan
2. Diperlukan pembaharuan data dan informasi masyarakat terdampak yang telah menerima bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari BNPB yang telah disalurkan melalui BPBD Kab Jayapura.

22. Uji Publik Perubahan PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 9 September 2021, bertempat di Qubika Boutique Hotel, Tangerang. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Masukan Peserta Rapat:
   a. Konfirmasi mengenai sertifikat lahan merupakan sertifikat induk atau pecah pada KPR Siap Bangun
   b. Jaringan listrik dikecualikan dalam komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang harus dipenuhi pengembang;
   c. Kenaikan porsi harga jual rumah umum tapak sebagai dasar pencairan FLPP tahap pertama, dari semula 35% menjadi 40% sesuai dengan praktik KPR inden pada rumah komersil;
   d. Ketentuan terkait frekuensi dan durasi penyampaian laporan pemantauan oleh Bank pelaksana diatur dalam Rapermen;
   e. Perlu adanya *standard operating procedure* (SOP) berisi *service level agreement* (SLA) atau durasi setiap proses verifikasi, agar pencairan tepat waktu;
   f. Penyeragaman bentuk aset jaminan yang diserakan kepada Bank;
   g. Penyeragaman sanksi yang diberikan jika pembangunan melebihi waktu 3 (tiga) bulan;
   h. Ketentuan angsuran sesuai progres pencairan akan sulit diimplementasikan oleh Bank, pengaturan angsuran debitur agar menjadi ranah perbankan;
2. Tanggapan dari BP Tapera berfokus pada perlindungan MBR sebagai debitur, yakni mengingatkan bahwa kolektibilitas SLIK konsumen MBR harusnya tidak terpengaruh ketika angsuran terhenti akibat pengembang tidak menyelesaikan pembangunan dalam waktu 3 bulan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah melakukan pembahasan melibatkan Bank Pelaksana dan Asosiasi Pengembang.

23. Rapat Pembahasan Mekanisme Penyaluran KPR Siap Bangun

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 10 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Ketentuan mengenai bentuk jaminan aset tidak perlu diatur di dalam Rapermen;
2. Bank BRI mengusulkan agar ketentuan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembangunan diperpanjang dari 2 bulan menjadi maksimal 3 bulan;
3. Pengembang agar menyediakan rumah contoh untuk KPR Siap Bangun;
4. Bank akan memitigasi pengembang bermasalah dengan surat kuasa untuk menunjuk kontraktor untuk meneruskan pembangunan dengan dana yang bersumber dari cadangan pencairan;
5. Menyepakati pengalihan kewajiban angsuran debitur kepada pengembang pada saat pengembang tidak dapat menyelesaiakan pembangunan dalam waktu 3 bulan sampai dengan rumah selesai terbangun;

6. Bank BTN dan Bank BRI setuju porsi pencairan FLPP tahap kesatu sebesar 40% dari harga jual rumah.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah:

1. Perwakilan Bank BTN akan mengirimkan perhitungan amortisasi kredit pada KPR Syariah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan besaran angsuran debitur, serta materi mengenai sertifikat yang diterbitkan di atas HPL;
2. Pembahasan akan dilanjutkan dengan pending matters terkait porsi pencairan FLPP tahap pertama, besaran angsuran debitur, dan penggunaan HGB di atas HPL.

24. Rapat Pembahasan Skema KPR Siap Bangun

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Himperra mengusulkan Pemberian Kredit Konstruksi diberikan sejalan dengan KPR Siap bangun dengan pembagian porsi pendanaan sebesar 65% dari total RAB rumah berasal dari Kredit Konstruksi dan sisanya sebesar 35% berasal dari KPR Siap Bangun;
2. Dapat dibuat pengaturan yang berbeda terhadap persyaratan pengembang yang telah mendapatkan fasilitas Kredit Konstruksi dan tidak. Himperra mengusulkan 2 skenario:
   a. Bagi pengembang dengan tanah/lahan berstatus sertifikat pecah, diberikan kredit Konstruksi sebesar 55% dari RAB rumah, cadangan retensi sebesar 10%, dan KPR Siap Bangun sebesar 35%; dan
   b. Bagi pengembang dengan tanah/lahan berstatus sertifikat induk, diberikan Kredit Konstruksi 55%, cadangan retensi sebesar 20%, dan sisanya dari KPR Siap bangun sebesar 25%.
3. Perum Perumnas memberikan usulan:
   a. Tanah/lahan dengan status HPL dapat difasilitasi oleh KPR siap Bangun dikarenakan saat ini Perum Perumnas masih memiliki tanah/lahan dengan status HPL;
   b. Jangka waktu penyelesaian pembangunan menjadi 4 (empat) bulan dengan waktu penyelesaian oleh bank jika pengambang wanprestasi selama 3 (tiga) bulan;
   c. Pencairan tahap pertama sebesar 50%;
   d. Terdapat relaksasi dalam penyelesaian PSU perumahan terutama listrik dan air dikarenakan keterlambatan berasal dari perusahaan penyedia (PLN dan PDAM);
   e. Jaminan yang diberikan pengembang kepada perbankan dapat berupa *Buy Back Guarantee* pada masa konstruksi atau berupa Bank Garansi;
   f. Memberikan *grace period* pada angsuran debitur pada masa konstruksi sampai dengan BAST rumah; dan
   g. Proyek yang telah diajukan Kredit Konstruksi ke perbankan perlu tetap diakomodir dalam program KPR Siap Bangun.
4. Pemberlakuan HPL pada Perum Perumnas bersifat *lex specialist*, sehingga pada Perum Perumnas dimungkinkan menaruh HGB di atas HPL dan selanjutnya displitzing menjadi Sertifikat Hak Milik;
5. Usulan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:
   a. Penujukkan kontraktor pengganti dalam hal gagal bangun merupakan rekomendasi dari asosiasi pengembang, atau dapat diatur bahwa asosiasi pengembang wajib menunjuk kontraktor jika salah salah satu anggotanya wanprestasi;
   b. Kementerian PUPR agar dapat melakukan MoU dengan PLN dan PDAM dalam hal penyediaan lsitrik dan air untuk perumahan yang difasilitasi subsidi; dan
   c. Pelaporan yang dilakukan perbankan tidak dibatasi jangka waktu melainkan berdasarkan progres pembangunan sehingga sejalan dengan PKS antara bank dan pengembang yang merujuk pada progress pembangunan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini RapermenPUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan disesuaikan dengan hasil rapat.

25. Rapat Pembahasan Kebijakan Pembiayaan Perumahan bagi MBR Sektor Formal dan Informal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 15 September 2021, bertempat di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, Ged. A, DJPI dan melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh telah melakukan pendataan dan diketahui terdapat potensi sebanyak 500 orang masyarakat di Kota Payakumbuh yang memiliki minat untuk memperoleh fasilitas BP2BT;
2. Terdapat 1 (satu) perumahan di Kota Payakumbuh yang perolehannya dapat difasilitasi BP2BT dengan sebanyak 4 (empat) unit rumah telah dilakukan pencairan dana BP2BT dan sebanyak 10 (sepuluh) calon debitur masih dalam proses verifikasi data oleh Bank BTN;
3. Dari sebanyak 17 pengembang yang aktif dalam pembangunan perumahan di kota Payakumbuh, hanya ada 11 yang telah terdaftar dalam sistem Sireng dan sisanya adalah pengembang yang masih bersifat perorangan;
4. Berdasarkan data yang dimiliki dinas PKP Kota Payakumbuh, pembangunan rumah yang difasilitasi program FLPP di Kota Payakumbuh meningkat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 900 rumah, sedangkan untuk program BP2BT belum ada realisasi;
5. MBR sektor formal dan informal di Kota Payakumbuh dapat difasilitasi FLPP maupun BP2BT. Sebagai informasi, per 15 September 2021, masih terdapat kuota BP2BT tahun 2021 sebanyak 11.875 unit rumah atau sebesar Rp511.169.000.000- yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Payakumbuh.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Kementerian PUPR akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh dalam penyaluran program BP2BT kepada MBR sektor formal dan informal di Kota Payakumbuh; dan
2. Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh akan mengarahkan pengembang perseorangan di Kota Payakumbuh untuk bergabung dalam salah satu asosiasi pengembang dan mendaftar di sistem.

26. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Dana BP2BT TA 2021

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Bank Pelaksana tetap berkomitmen dalam menyalurkan dana program BP2BT TA 2021 sesuai dengan prognosis penyaluran yang telah disampaikan sebelumnya dengan total 12.276 unit;
2. Target Bank Pelaksana dalam prognosis pada bulan sebelumnya yang belum tercapai akan direalisasikan pada Bulan Oktober dan November 2021;
3. Per tanggal 16 September 2021, permohonan dana BP2BT ke Satker sudah mencapai 1.709 pemohon dengan pencairan dana yang telah dilakukan sebesar 401 pemohon;
4. DIPA PHLN untuk penyaluran dana BP2BT saat ini baru tersedia untuk penyaluran 1.000 unit senilai Rp40 Milliar.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu Bank Pelaksana akan tetap menyalurkan dana BP2BT sesuai dengan prognosis yang telah disampaikan dan target yang belum tercapai akan direalisasikan pada Bulan Oktober dan November 2021.

27. Rapat Penyusunan Harga Jual Rumah yang Difasilitasi dengan KPR Bersubsidi Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Disepakati *prototype* rumah sebagai dasar penentuan harga jual rumah yang difasilitasi KRP Bersubsidi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, dengan bahan material yang umumnya digunakan di lapangan;
2. Penyusunan harga jual rumah tidak membatasi bahan material dan teknologi bangunan yang digunakan, melainkan memberikan batas minimum spesifikasi rumah dan batas maksimal harga rumah yang dapat difasilitasi KPR Bersubsidi;
3. Perbedaan lebar kaveling pada Kepmen Kimpraswil No. 403/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana (lebar 6 meter) dan PP No. 16/2021 tentang Bangunan Gedung tidak (lebar 5 meter) tidak mempengaruhi perhitungan harga jual rumah.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Akan dilakukan diskusi lanjutan dengan melibatkan Pengembang pada pekan ke-3 September 2021 (jadwal tentatif);
2. Balai Ditjen Cipta Karya dan Balai Ditjen Perumahan akan dilibatkan dalam menyediakan informasi harga bahan bangunan di kabupaten/kota setempat;
3. RAB Rumah Susun dan Rumah Tapak tahun 2022 disusun berdasarkan spesifikasi teknis mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2021.

28. Rapat Penyaluran Dana BP2BT TA 2021

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 22 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Bank Pelaksana masih berkomitmen dalam menyalurkan program BP2BT TA 2021 sesuai dengan prognosis penyaluran yang telah disampaikan sebelumnya dengan total 12.276 unit;
2. Bank pelaksana telah melakukan langkah-langkah percepatan sehingga keterlambatan penyaluran di bulan sebelumnya akan direalisasikan pada bulan Oktober dan November 2021;
3. Bank pelaksana akan mempercepat realisasi penyaluran dana BP2BT pada bulan Oktober - November, dikarenakan batas akhir pengajuan pencairan dana dari Satker BP2BT ke KPPN yaitu pertengahan bulan Desember;
4. Bank pelaksana akan memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen debitur yang diajukan ke Satker BP2BT agar SK Penerima Manfaat dapat segera diterbitkan;
5. Status penyaluran BP2BT per tanggal 22 September 2021, Permohonan dana BP2BT ke Satker sudah mencapai 1.757 pemohon dengan SK penerima manfaat yang sudah diterbitkan sebanyak 1.547 pemohon dan telah dilakukan pencairan sebanyak 425 pemohon;
6. DIPA PHLN untuk penyaluran dana BP2BT saat ini baru tersedia untuk penyaluran 1.000 unit senilai Rp. 40 Milliar.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu dalam rangka mengakomodasi kebutuhan anggaran penyaluran dana BP2BT sesuai dengan target prognosis yang telah disampaikan Bank Pelaksana maka perlu dilakukan revisi DIPA PHLN penyaluran dana BP2BT untuk percepatan penarikan pinjaman.

29. Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program KPR Bersubsidi dan BP2BT TA 2021

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 23 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi direncanakan menggunakan tiga metode yakni pengisian kuisioner *online*, kunjungan lapangan dan wawancara *virtual*;
2. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan untuk debitur SSB/SSM dan BP2BT yang telah melakukan akad lima tahun terakhir;
3. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemanfaatan dan keterhunian rumah yang telah difasilitasi program SSB/SSM dan BP2BT;
4. Data yang masuk dari kuisioner *online* akan dipantau secara berkala dan apabila dinilai perlu akan dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian terget sesuai jumlah sampel debitur untuk setiap program.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu Bank Pelaksana siap mendukung dan turut berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai rencana yang telah disampaikan.

30. Rapat Pembahasan Implementasi Konversi Qanun Aceh Kredit Konvesional (KC Banda Aceh)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 23 September 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan konversi Qanun kredit Bank BTN KC Banda Aceh ke KCS Banda Aceh perlu segera diproses mengingat ketentuan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah harus dijalankan selambat-lambatnya 31 Desember 2021;
2. 81% portofolio kredit konsumer KC Banda Aceh merupakan KPR subsidi sehingga memerlukan arahan dari Kementerian PUPR terkait perlakuan konversi KPR subsidi

(FLPP, SSA/SSB, dan BP2BT) ke KC syariah dalam hal: (i) Dokumen sertifikat dan SKMHT (Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan) dan (ii) Perubahan Perjanjian Kredit (PK) dan asuransi dari akad konvensional ke akad syariah atau cukup dengan *addendum* saja;
3. Diusulkan agar konversi dilakukan setelah 31 Oktober 2021, mengingat saat ini sedang dilaksanakan reviu dana FLPP oleh BPKP. Hal ini dikhawatirkan konversi akan mengubah jumlah outstanding dan jadwal angsuran debitur;
4. Perlu dilakukan simulasi konversi sejak perjanjian awal hingga posisi *outstanding* saat ini sehingga tidak terjadi perubahan jadwal angsuran;
5. Mayoritas kredit yang dikonversi adalah KPR SSA/SSB dengan jumlah outstanding Rp 598 milyar dari total Rp 716 miliyar sehingga perlu diperhatikan teknis jadwal angsuran bayangan dan amortisasi KPR SSA/SSB setelah dikonversi.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu Divisi Syariah Bank BTN akan menyiapkan simulasi konversi kredit KC Banda Aceh, sejak perjanjian awal sampai dengan posisi outstanding saat ini untuk KPR SSA/SSB dan KPR BP2BT, dan sejak perjanjian awal sampai dengan posisi outstanding setelah 31 Oktober 2021 untuk KPR FLPP.

31. Sosialisasi Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Pegawai Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 29 September 2021, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat DPP PDI Perjuangan. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Ada 80 orang pegawai Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan yang masuk kategori MBR dan belum memiliki rumah. Diharapkan agar pegawai yang memenuhi persyaratan dapat difasilitasi melalui program KPR FLPP dan/atau BP2BT untuk memperoleh rumah;
2. BTN menyampaikan data dan dokumen persyaratan pegawai Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan agar disampaikan ke Bank melalui Pengembang;
3. Proses pengajuan KPR akan difasilitasi melalui BTN Cabang Bogor dan dimediasi oleh PIC dari BTN Pusat;
4. Diinformasikan oleh Pengembang Perumahan Pesona Kahuripan bahwa saat ini sedang ada proses pembangunan rumah subsidi pesona Kahuripan 3 di daerah Cileungsi Jawa Barat sebanyak 1.000 unit dengan rincian 400 unit tahap I, 200 unit tahap II dan 400 unit tahap III;
5. Terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli untuk memperoleh rumah yang difasilitasi oleh program kemudahan dan bantuan dari pemerintah.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan akan memberikan data-data pegawai kepada Pengembang dan BTN untuk dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan kelompok sasaran.

32. Audiensi dengan PT Bangun Bantala Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Oktober 2021, bertempat di Ruang Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. Tujuan audiensi adalah membuka kemungkinan penerapan teknologi “Rumah Kita” dari PT Bangun Bantala Indonesia dalam program KPR Bersubsidi dan BP2BT;
2. PT Bangun Bantala Indonesia memiliki teknologi “Rumah Kita” (Kualitas, Instan, Tangguh, Aman) kombinasi kolom beton bertulang dan rangka batang baja ringan (*Truss*) sebagai sistem struktur prefab rumah sederhana dan berdasarkan Surat Keterangan Penilaian Kesesuaian Teknologi Nomor 003/S-Ket/Ct/2020 tanggal 29 September 2020 dari Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya dinyatakan dapat dipertimbangkan untuk dapat digunakan pada pembangunan perumahan sebagai Kategori Desain Seismik (KDS): A, B dan C;
3. Teknologi ini menawarkan kecepatan pembangunan rumah 108 hari dengan ketahanan bangunan mencapai 50 tahun;
4. Teknologi ini dapat diterapkan untuk memproduksi sampai dengan 500 unit rumah.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

1. Akan dilakukan studi banding ke perumahan yang telah memanfaatkan teknologi “Rumah Kita” yakni Perumahan Grand Cikarang City dan/atau Perumahan Perumnas Kwala Bekala Medan;

2. Pelaksanaan sosialisasi berbagai teknologi pembangunan perumahan melibatkan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai panelis, serta pengembang, perbankan dan Pemerintah Daerah sebagai peserta.

33. Pembahasan Penyusunan Harga Jual Rumah yang difasilitasi dengan KPR Bersubsidi Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Oktober 2021 melalui *video conference*. Beberapa poin dari kegiatan ini adalah:

1. *Expert* di bidang Perumahan (Bapak Tri Yuwono) telah mencoba membuat draft model perhitungan harga jual rumah tapak dengan hasil perhitungan Rp226 juta untuk tipe 36/60 (luas tanah 60m^2);
2. Disarankan dalam model perhitungan agar spesifikasinya tetap memperhatikan standar aturan yang berlaku dalam PP 16/2021;
3. Agar dalam metode perhitungan dikelompokkan biaya langsung dan biaya tidak langsung sesuai dengan PermenPUPR 28/2016. Perlu dicermati bahwa biaya tidak langsung (biaya umum dan keuntungan) tidak boleh lebih dari 15%;
4. Diusulkan agar dibuatkan model perhitungan rumah tapak untuk tipe 27m^2 sekaligus;
5. Bapak Tri Yuwono akan tetap membuat konsep model perhitungan harga jual rumah susun, namun menyarankan untuk menambah estimator khusus untuk menghitung bangunan tinggi rusun.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu Bapak Tri Yuwono akan menyempurnakan model perhitungan harga jual rumah tapak (tipe 27m^2 dan 36m^2) dan rumah susun

Status MoU dan PKS

1. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana FLPP & SBUM TA 2021

No	Nama Bank	Kuota	Status		
			Kesepakatan Bersama (KSB)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) FLPP dengan PPDPP	Perjanjian Kerja Sama (PKS) SBUM dengan Satker
1	Bank Artha Graha	1.600	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
2	Bank BNI	17.500	MoU ditandatangani tgl 30-08-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
3	Bank BRI	6.000	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
4	Bank BRI Agro	550	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
5	Bank BTN	72.000	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
6	Bank BTN Syariah	9.000	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
7	Bank Mandiri	3.000	MoU ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
8	Bank Syariah Indonesia (BSI)	14.100	MoU ditandatangani tgl 03-03-2021	PKS ditandatangani tgl 04-03-2020	Sudah TTD KPA tgl 04-03-2021
9	Bank Mega Syariah	20	MoU ditandatangani tgl 03-05-2021	PKS ditandatangani tgl 02-08-2021	Sudah TTD KPA tgl 02-08-2021
10	BPD Aceh Syariah	800	MoU ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
11	BPD BJB	5.700	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
12	BPD BJB Syariah	700	MoU ditandatangani tgl 22-02-2021	PKS ditandatangani tgl 01-03-2021	Sudah TTD KPA tgl 31-03-2021
13	BPD DIY	125	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
14	BPD DKI	41	MoU ditandatangani tgl 20-05-2020	PKS ditandatangani tgl 15-02-2021	Sudah TTD KPA tgl 15-03-2021
15	BPD Jambi	1.450	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
16	BPD Jambi Syariah	300	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 28-01-2021
17	BPD Jateng	200	MoU ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
18	BPD Jateng Syariah	200	MoU ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
19	BPD Jatim	300	MoU ditandatangani tgl 13-10-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
20	BPD Jatim Syariah	1.550	MoU ditandatangani tgl 13-10-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
21	BPD Kalbar	1.600	MoU ditandatangani tgl 07-04-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
22	BPD Kalbar Syariah	200	MoU ditandatangani tgl 07-04-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
23	BPD Kalsel	600	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
24	BPD Kalsel Syariah	700	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
25	BPD Kalteng	300	MoU ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
26	BPD Kaltimtara	500	MoU ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
27	BPD Nagari	900	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
28	BPD Nagari Syariah	200	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021

29	BPD NTB	1.800	MoU ditandatangani tgl 18-03-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
30	BPD NTT	450	MoU ditandatangani tgl 03-08-2016	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
31	BPD Papua	400	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
32	BPD Riau Kepri	300	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
33	BPD Riau Kepri Syariah	225	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
34	BPD Sulselbar	1.350	MoU ditandatangani tgl 30-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
35	BPD Sulselbar Syariah	900	MoU ditandatangani tgl 30-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
36	BPD Sulteng	325	MoU ditandatangani tgl 17-12-2020	PKS ditandatangani tgl 19-01-2021	Sudah TTD KPA tgl 02-02-2021
37	BPD Sulutgo	45	MoU ditandatangani tgl 12-03-2020	PKS ditandatangani tgl 10-08-2021	Sudah TTD KPA tgl 10-08-2021
38	BPD Sumselbabel	1.700	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
39	BPD Sumselbabel Syariah	500	MoU ditandatangani tgl 08-12-2020	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
40	BPD Sumut	500	MoU ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
41	BPD Sumut Syariah	1.000	MoU ditandatangani tgl 02-12-2019	PKS ditandatangani tgl 18-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 27-01-2021
Total		149.631			

2. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana SSB Menggulung TA 2021

No	Nama Bank	Status	
		Kesepakatan Bersama (KSB)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
1	BTN	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 04-02-2021
2	BNI	MoU sudah ditandatangani tgl 30-08-2016	Sudah TTD KPA tgl 15-02-2021
3	BRI	MoU sudah ditandatangani tgl 08-12-2020	Sudah TTD KPA tgl 15-03-2021

3. Rencana Penyaluran Bank Pelaksana BP2BT TA 2021

Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT (TA 2021)						Target Dalam PKS	Prognosa 2021	Status	
No	Nama Bank	Jenis Perolehan Rumah (Unit)						*Memorandum of Understanding* (MoU)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
		Rumah Tapak	Satuan Rusun	Rumah Swadaya	Total Penyaluran				
1	BTN	11.000	-	-	11.000	11.000	10.926	MoU sudah ditandatangani tanggal 27-01-2021	Sudah PKS tanggal 28-01-2021
2	BNI	1.000	-	-	1.000	1.000	500	Masih menggunakan MoU sebelumnya	Sudah PKS tanggal 28-01-2021

								yang berlaku sampai tahun 2024	
3	Bank Jateng	205	-	245	450	450	200	MoU sudah ditandatangani tanggal 28-01-2021	Sudah PKS tanggal 22-03-2021
4	Bank Sumsel Babel	330	-	-	330	330	50	MoU sudah ditandatangani tanggal 28-01-2021	Sudah PKS tanggal 21-04-2021
5	BRI	1.000	-	200	1.200	-	100	MoU sudah ditandatangani tanggal 15-06-2021	Sudah PKS tanggal 20-09-2021
6	Bank Mandiri	5.000	-	-	5.000	500	500	MoU sudah ditandatangani tanggal 28-01-2021	Sudah PKS tanggal 28-05-2021
Total		18.535	-	445	18.980	13.280	12.276		

04 Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Tujuan dari Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kementerian PUPR turut hadir dalam memberikan dukungan agar proses kebutuhan dasar manusia yaitu rumah dapat terpenuhi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan bagi skema pembiayaan perumahan dapat tercapai. Berikut merupakan sebagian dari banyaknya dukungan yang telah dilakukan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan:

1. Penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera;
2. Pengelompokkan peserta Tapera ditetapkan atau dicatatkan akan didasari oleh penghasilan terkini penerima manfaat FLPP yang akan didata ulang oleh BP Tapera;
3. Melakukan diskusi lanjutan keberlangsungan program SBUM dan pemanfaatan dana FLPP untuk program SBUM setelah dana FLPP beralih ke BP Tapera dan Mekanisme Kepesertaan Masyarakat yang Telah Menerima Manfaat Dana FLPP dan Persyaratan Pelaksanaan Program FLPP pada BP Tapera dari Judul s.d. Pasal;
4. Melibatkan BP Tapera pada kegiatan Hapernas 2021 untuk pengenalan profil dan progress BP Tapera saat ini;
5. Pembahasan Konsep Laporan Hasil Evaluasi atas Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat kepada Presiden;
6. Melakukan reviu Hasil Pengawasan BPKP terhadap Likuidasi Aset Bapertarum-PNS;
7. Pengharmonisasian RPMK tentang Pengalihan Dana FLPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah;
8. Pembahasan lanjutan RPerpres Honorarium Insentif dan Manfaat Tambahan terkait besaran Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat.
9. Melakukan *review* perhitungan nilai deposito yang diterima oleh BP Tapera atas likuidasi aset Bapertarum-PNS
10. Pembentukan Sekretariat Komite Tapera yang memperhatikan komposisi menyesuaikan dengan catatan Bapak Sekjen Kementerian PUPR dan Hasil Rapat Koordinasi dengan Bapak Sonny Loho dan BP Tapera;

Pelaksanaan Kegiatan Tapera

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat
1	Jumat, 9 Juli 2021	Rapat Penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	*Video conference*
2	Senin, 26 Juli 2021	Rapat Koordinasi Konsep Laporan Komite Tapera kepada Presiden	*Video conference*
3	Rabu, 28 Juli 2021	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP terhadap Likuidasi Aset Bapertarum-PNS	*Video conference*
4	Kamis, 29 Juli 2021	Rapat Penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	*Video conference*
5	Senin, 2 Agustus 2021	Rapat Koordinasi Konsep Laporan Hasil Evaluasi atas Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat kepada Presiden	*Video conference*
6	Senin, 16 Agustus 2021	Rapat Penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP tapera	*Video conference*
7	Kamis, 26 Agustus 2021	Rapat Pembahasan Penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	*Video conference*
8	Jumat, 27 Agustus 2021	Rapat Pembahasan Hasil Review Perhitungan Nilai Deposito yang diterima oleh BP Tapera	*Video conference*
9	Senin, 30 Agustus 2021	Rapat Penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	*Video conference*
10	Selasa, 7 September 2021	Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPKP atas Likuidasi Aset Bapertarum-PNS	*Video conference*
11	Jumat, 10 September 2021	Rapat Pembahasan Konsep Laporan Hasil Evaluasi atas Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat Kepada Presiden	Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, DJPI
12	Senin, 13 September 2021	Rapat Pembahasan Pembentukan Sekretariat Komite Tapera	*Video conference*
13	Senin, 13 September 2021	Rapat Pembahasan Penyusunan RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	*Video conference*
14	Selasa, 14 September 2021	Rapat Pembahasan Konsep Laporan Komite Tapera kepada Presiden	*Video conference*
15	Jumat, 17 September 2021	Rapat Tindak Lanjut Konfirmasi Hasil Pengawasan Atas Likuidasi Aset Bapertarum PNS	*Video conference*
16	Kamis, 23 September 2021	Uji Publik RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera	*Video conference*

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Dalam penyiapan proyek KPBU Bidang Perumahan, pemberian dukungan kepada BP Tapera, dan pelaksanaan tugas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bentuk permasalahannya yang dijumpai berbeda-beda dari yang memiliki kompleksitas ringan sampai yang berat.

Berkoordinasi dengan berbagai Kementrian/Lembaga, berdiskusi dengan para stakeholder, dan berkonsultasi kepada para pakar konsultan kerap kali dilakukan untuk tercapainya penyelesaian permasalahan yang ada. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama Q3 2021, maka tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Proyek KPBU

NO	NAMA PROYEK	ISU	Tindak Lanjut
1	Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	1. Penentuan Skema Pengembalian Investasi (AP, HAM, dan VGF) 2. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Berkelanjutan di lokasi Proyek dan terkait AMDAL 3. Rencana Pengadaan Lahan Masyarakat 4. Penyusunan draft Surat Komitmen Menteri untuk pengajuan PSN	1. Penandatanganan Kesepakatan Induk 2. Sinkronisasi timeline antara SPAM Kertasari dan IPA Cipamokolan dengan *timeline* proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung terkait pemenuhan kebutuhan air; 3. Sinkronisasi Kebijakan Pemanfaatan BMN dengan Penggunaan SKBG dan pengajuan izin pemanfaatan BMN kepada pengelola Barang; 4. Persiapan Pengadaan BUP, Pembentukan Panitia Pengadaan; 5. Percepatan penyampaian usulan PSN kepada KPPIP; 6. Pemenuhan Skema AP akan diputuskan dalam FBC.
2	Proyek KPBU Desa Besar Medan	1. Perlu dilakukan split Sertipikat dan perubahan fungsi 2. Lahan BMN PUPR tercatat masih dalam pengelolaan PT Jasa Marga. Saat ini kewajiban pajak dibebankan kepada PT Jasa Marga. Perlu dilakukan pengembalian pengelolaan ke PUPR (DJBM)	1. Akan dilakukan split sertifikat dan perubahan fungsi lahan; 2. Penyusunan Kepmen Mandat PJPK dan Pembentukan Tim KPBU; 3. Koordinasi Serah Terima Aset BMN dari DJBM ke DJP (didahului splitzing dan pengembalian hak pengelolaan dari Jasa Marga) dan Penyiapan ijin KSPI; 4. Koordinasi Perizinan: AMDAL, ANDALALIN dan pembangunan flyover; 5. Penyempurnaan OBC dan Penyiapan Transaksi.

NO	NAMA PROYEK	ISU	Tindak Lanjut
		3. Proses Serah Terima dari DJBM ke DJP 4. Potensi relokasi warga dan mitigasi dampak banjir.	
3	Proyek KPBU Karawang Spuur	1. Lokasi proyek termasuk dalam daerah macet, dikhawatirkan dapat memperparah kemacetan 2. Status Jalan Kampung Budaya merupakan BMD, diperlukan koordinasi terkait pengelolaan jalan tersebut 3. Saat musim hujan Sungai Cikalapa sering mengalami banjir, sehingga diperlukan pembangunan turap 4. Lahan proyek dilalui SUTT, sehingga berpengaruh pada aspek desain dan teknis 5. Tanah masih perlu sertifikasi dari Sekjen PUPR ke DJP	1. Pengajuan PDF ke Kemenkeu untuk OBC – Tansaksi 2. Koordinasi dengan Pemkab Karawang terkait pengelolaan Jalan Kampung Budaya (BMD). 3. Penyiapan Serah Terima Aset dari Sekjen ke DJP dan Penyiapan ijin KSPI
4	Proyek KPBU Sei Mangkei	1. Kewenangan PJPK (Pemerintah Provinsi) dalam penyediaan perumahan bagi MBR tidak sesuai dengan UU No 23/2014 2. Perlu dilakukan reviu terhadap usulan teknis: Rusunawa dengan fungsi campuran (Apartemen dan Hotel)	1. Pelaksanaan PDF oleh PT PII 2. Melengkapi persyaratan Kesepekatan Induk
5	Proyek KPBU Paldam Siliwangi	1. Kewenangan PJPK (Pemerintah Kota Bandung) dalam penyediaan perumahan bagi MBR tidak sesuai dengan UU No 23/2014 2. Relokasi warga yang sekarang menempati rumah dinas TNI – AD di atas lahan PALDAM	1. KoordinasI dengan TNI–AD terkait relokasi warga dan penggantian aset 2. Opsi PJPK Gabungan 3. Penyusunan Kajian Hukum da 2 Kelembagaan terkait kewenangan PJPK dalam pembangunan Rusun PALDAM yang ditujukan untuk masyarakat terdampak program Kota Bandung . 4. Perbaikan permohonan PDF

NO	NAMA PROYEK	ISU	Tindak Lanjut
		3. Reviu kajian kembali oleh Tim ITB, untuk memastikan apakah proyek tersebut tetap dapat dilakukan melalui skema KPBU atau dengan skema konvensional.	
6	Proyek KPBU Daan Mogot	1. Optimalisasi lahan karena termasuk KKOP Cengkareng 2. Pemprov DKI berharap fungsi nnon hunian bisa mensupport penerimaan sehingga tidak memerlukan AP 3. Akses dan ketersediaan air bersih (koordinasi dengan SPAM Karian Serpong)	1. FGD Riviu Pasar untuk melengkapi OBC 2. Koordinasi dengan SPAM Karian Serpong; 3. Eksplorasi skema pembiayaan alternatif diluar skema pembiayaan AP.
7	Rusun TOD	Kesiapan lahan untuk proyek KPBU Rusun TOD: • TOD Lebak Bulus: BMN PUPR Pasar Jumat • TOD Pondok Cabe: BMN Kemenhub Terminal Pondok Cabe • TOD Rawa Buntu: Aset PT KAI (sudah ada Rusunami Perumnas)	1. Finalisasi SP 2. Konsultasi Publik 3. RDS dan Draft OBC 4. Koordinasi dengan BPTJ dan Perumnas
8	Proyek KPBU Hunian Bagi ASN di Ibu Kota Negara	1. Penentuan alternatif tipologi perumahan yang akan digunakan di IKN masih menunggu kajian dari Bappenas 2. Kesanggupan Ditjen CK untuk menyediakan layanan air minum, limbah dan sampah hingga tahun 2024 hanya pada zona 1a 3. UU IKN belum disahkan 4. Perubahan zonasi khususnya bidang perumahan dilakukan oleh tim kolaborasi pada saat rapat pembahasan tanggal 19 Mei 2021	1. Finalisasi SP dan penyampaian ke Bappenas/Kemenkeu 2. Rencana kunjungan lapangan 3. Pengajuan PDF

Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah selama Q3 2021, maka rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan perkembangan penyusunan RapermenPUPR terkait Perubahan Atas PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Penyusunan Harga Jual Rumah yang Difasilitasi dengan KPR Bersubsidi Tahun 2022;
3. Penyusunan surat jawaban dari KPA Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan kepada Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terkait tindak lanjut hasil audit BPK Tahun 2021 dengan melampirkan rencana aksi*/timeline* kegiatan;
4. Penyusunan RapermenPUPR tentang Mekanisme Kepesertaan Masyarakat yang Telah Menerima Manfaat Dana FLPP dan Pelaksanaan Program FLPP pada BP Tapera;
5. Menyiapkan Skema KPR Siap Bangun dalam penyusunan RapermenPUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
6. Melakukan revisi DIPA PHLN penyaluran dana BP2BT untuk percepatan penarikan pinjaman. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan anggaran penyaluran dana BP2BT sesuai dengan target prognosis yang telah disampaikan Bank Pelaksana.

Pelaksanaan Dukungan Tapera

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah selama Q3 2021, maka rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan dukungan kepada BP Tapera adalah sebagai berikut:

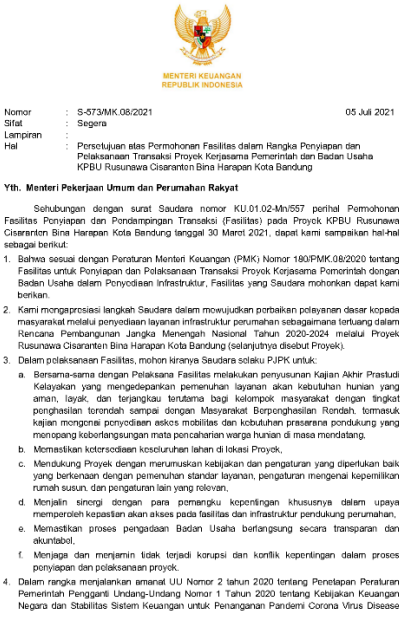
1. Rekonsiliasi penghitungan dan penetapan kembali atas saldo deposito beserta dana pemupukannya yang disimpan dalam rekening bank BRI, BNI dan Mandiri serta BTN pada portepel Kemenkeu;
2. Penyusunan usulan anggota Sekretariat Komite Tapera sesuai arahan Sekjen PUPR;
3. Menyampaikan hasil rekonsiliasi dengan Perbankan kepada Itjen Kementerian PUPR setelah dilakukan verifikasi oleh Subdit Kepatuhan Intern Direktorat PSSPP Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Penyusunan RPerpres Honorarium, Insentif dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tapera (Harmonisasi di Kemenkumham).

LAMPIRAN

Dokumen Lainnya

01 KPBU

1. Persetujuan atas Permohonan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung (No.S-573/MK.08/2021).



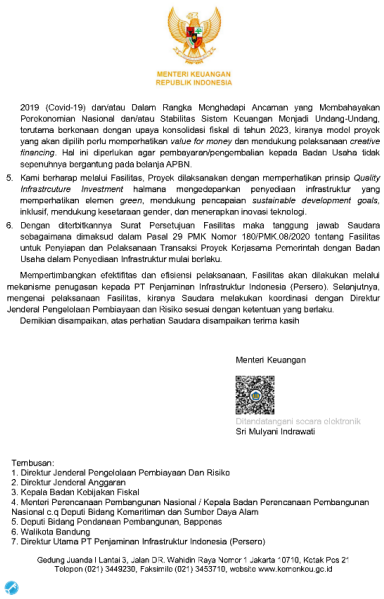
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-573/MK.08/2021 05 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan atas Permohonan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor KU.01.02-Mn/557 perihal Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi (Fasilitas) pada Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung tanggal 30 Maret 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Fasilitas yang Saudara mohonkan dapat kami berikan.
2. Kami mengapresiasi langkah Saudara dalam mewujudkan perbaikan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penyediaan layanan infrastruktur perumahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melalui Proyek Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung (selanjutnya disebut Proyek).
3. Dalam pelaksanaan Fasilitas, mohon kiranya Saudara selaku PJPK untuk:
   a. Bersama-sama dengan Pelaksana Fasilitas melakukan penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan yang mengedepankan pemenuhan layanan akan kebutuhan hunian yang aman, layak, dan terjangkau terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat penghasilan terendah sampai dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, termasuk kajian mengenai penyediaan askes mobilitas dan kebutuhan prasarana pendukung yang menopang keberlangsungan mata pencaharian warga hunian di masa mendatang,
   b. Memastikan ketersediaan keseluruhan lahan di lokasi Proyek,
   c. Mendukung Proyek dengan merumuskan kebijakan dan pengaturan yang diperlukan baik yang berkenaan dengan pemenuhan standar layanan, pengaturan mengenai kepemilikan rumah susun, dan pengaturan lain yang relevan,
   d. Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan khususnya dalam upaya memperoleh kepastian akan akses pada fasilitas dan infrastruktur pendukung perumahan,
   e. Memastikan proses pengadaan Badan Usaha berlangsung secara transparan dan akuntabel,
   f. Menjaga dan menjamin tidak terjadi korupsi dan konflik kepentingan dalam proses penyiapan dan pelaksanaan proyek.
4. Dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terutama berkenaan dengan upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023, kiranya model proyek yang akan dipilih perlu memperhatikan *value for money* dan mendukung pelaksanaan *creative financing*. Hal ini diperlukan agar pembayaran/pengembalian kepada Badan Usaha tidak sepenuhnya bergantung pada belanja APBN.

5. Kami berharap melalui Fasilitas, Proyek dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip *Quality Infrastrcuture Investment* halmana mengedepankan penyediaan infrastruktur yang memperhatikan elemen *green*, mendukung pencapaian *sustainable development goals*, inklusif, mendukung kesetaraan gender, dan menerapkan inovasi teknologi.
6. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas maka tanggung jawab Saudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PMK Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mulai berlaku.

Mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, Fasilitas akan dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selanjutnya, mengenai pelaksanaan Fasilitas, kiranya Saudara melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih

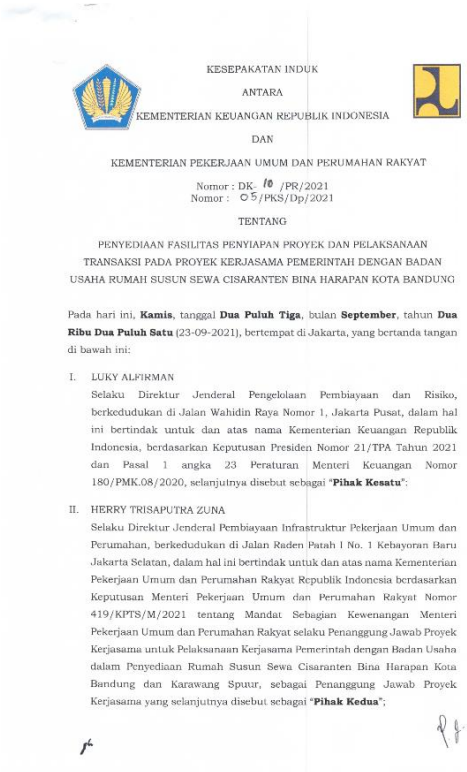
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
6. Walikota Bandung
7. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 2
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id

2. Kesepakatan Induk Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR, Tentang Penyediaan Fasilitas Penyiapaan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek KPBU Rusunawa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung.



KESEPAKATAN INDUK
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor : DK-10/PR/2021
Nomor : 05/PKS/Dp/2021

TENTANG

PENYEDIAAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA RUMAH SUSUN SEWA CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA BANDUNG

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Tiga**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (23-09-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. LUKY ALFIRMAN
Selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, berkedudukan di Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/TPA Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kesatu**";

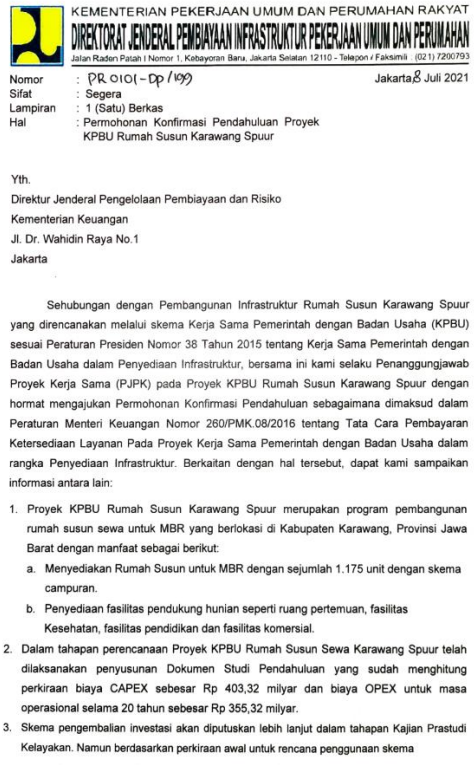
II. HERRY TRISAPUTRA ZUNA
Selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berkedudukan di Jalan Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 419/KPTS/M/2021 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Karawang Spuur, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";



Kesepakatan Induk ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Induk ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
Luky Alfirman	Herry Trisaputra Zuna
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

3. Permohonan Konfirmasi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili (021) 7200793

Nomor : PR.0101-Dp/109 Jakarta, 8 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Konfirmasi Pendahuluan Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta

Sehubungan dengan Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun Karawang Spuur yang direncanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, bersama ini kami selaku Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) pada Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur dengan hormat mengajukan Permohonan Konfirmasi Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan informasi antara lain:

1. Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur merupakan program pembangunan rumah susun sewa untuk MBR yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan manfaat sebagai berikut:
   a. Menyediakan Rumah Susun untuk MBR dengan sejumlah 1.175 unit dengan skema campuran.
   b. Penyediaan fasilitas pendukung hunian seperti ruang pertemuan, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas komersial.
2. Dalam tahapan perencanaan Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Karawang Spuur telah dilaksanakan penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan yang sudah menghitung perkiraan biaya CAPEX sebesar Rp 403,32 milyar dan biaya OPEX untuk masa operasional selama 20 tahun sebesar Rp 355,32 milyar.
3. Skema pengembalian investasi akan diputuskan lebih lanjut dalam tahapan Kajian Prastudi Kelayakan. Namun berdasarkan perkiraan awal untuk rencana penggunaan skema *Availability Payment*, kami berkomitmen untuk menyediakan anggaran sebesar Rp 96 miliar per tahun.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur

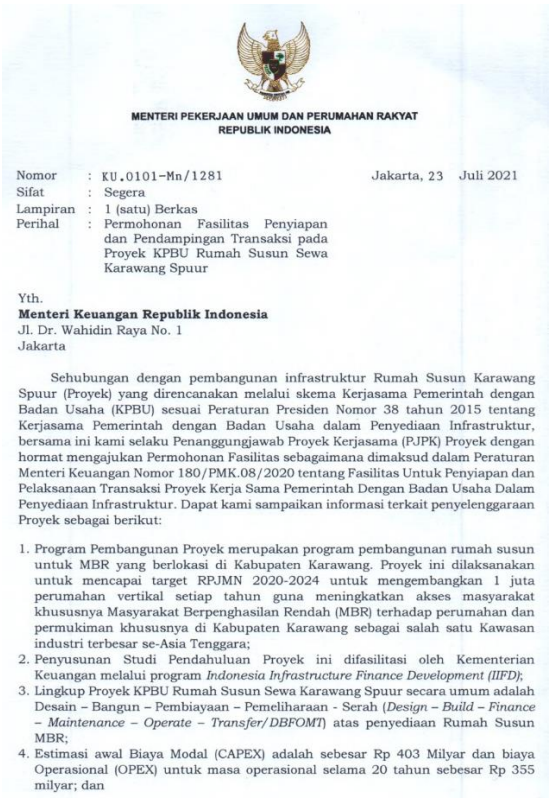
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Eko D. Heripoerwanto
NIP. 196107121989121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pedampingan Transaksi pada Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Karawang Spuur



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : KU.0101-Mn/1281 Jakarta, 23 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Karawang Spuur

Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur Rumah Susun Karawang Spuur (Proyek) yang direncanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, bersama ini kami selaku Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) Proyek dengan hormat mengajukan Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dapat kami sampaikan informasi terkait penyelenggaraan Proyek sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Proyek merupakan program pembangunan rumah susun untuk MBR yang berlokasi di Kabupaten Karawang. Proyek ini dilaksanakan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk mengembangkan 1 juta perumahan vertikal setiap tahun guna meningkatkan akses masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan dan permukiman khususnya di Kabupaten Karawang sebagai salah satu Kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara;
2. Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek ini difasilitasi oleh Kementerian Keuangan melalui program *Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD)*;
3. Lingkup Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Karawang Spuur secara umum adalah Desain – Bangun – Pembiayaan – Pemeliharaan - Serah (*Design – Build – Finance – Maintenance – Operate – Transfer/DBFOMT*) atas penyediaan Rumah Susun MBR;
4. Estimasi awal Biaya Modal (CAPEX) adalah sebesar Rp 403 Milyar dan biaya Operasional (OPEX) untuk masa operasional selama 20 tahun sebesar Rp 355 milyar; dan
5. PJPK telah melaksanakan Konsultasi Publik yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap secara daring pada tanggal 10 Juli 2020, 20 Juli 2020 dan 12 Agustus 2020.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur tersebut telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dapat diberikan fasilitas pada Tahap Penyiapan Proyek dan Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU. Untuk itu, kami sampaikan permohonan fasilitas penyiapan proyek berupa fasilitas pada tahap penyiapan proyek dan fasilitas Pendampingan Transaksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Bersama surat permohonan ini, kami berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan yang diperlukan untuk pemberian dukungan dan kami bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari segala dokumen, informasi baik berupa data atau angka dan/atau segala pernyataan mengenai proyek KPBU yang disediakan, dibuat dan disampaikan untuk pengajuan permohonan.

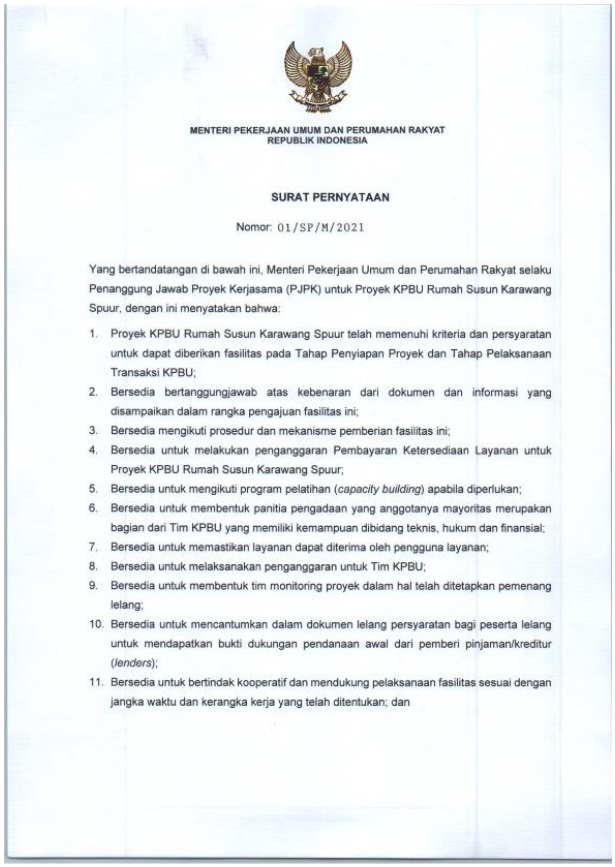
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu Menteri kami mengucapkan terimakasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
7. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. Surat Pernyataan Menteri PUPR Selaku PJPK Untuk Proyek KPBU Rusun Sewa Karawang Spuur



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 01/SP/M/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dapat diberikan fasilitas pada Tahap Penyiapan Proyek dan Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU;
2. Bersedia bertanggungjawab atas kebenaran dari dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka pengajuan fasilitas ini;
3. Bersedia mengikuti prosedur dan mekanisme pemberian fasilitas ini;
4. Bersedia untuk melakukan penganggaran Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur;
5. Bersedia untuk mengikuti program pelatihan (*capacity building*) apabila diperlukan;
6. Bersedia untuk membentuk panitia pengadaan yang anggotanya mayoritas merupakan bagian dari Tim KPBU yang memiliki kemampuan dibidang teknis, hukum dan finansial;
7. Bersedia untuk memastikan layanan dapat diterima oleh pengguna layanan;
8. Bersedia untuk melaksanakan penganggaran untuk Tim KPBU;
9. Bersedia untuk membentuk tim monitoring proyek dalam hal telah ditetapkan pemenang lelang;
10. Bersedia untuk mencantumkan dalam dokumen lelang persyaratan bagi peserta lelang untuk mendapatkan bukti dukungan pendanaan awal dari pemberi pinjaman/kreditur (*lenders*);
11. Bersedia untuk bertindak kooperatif dan mendukung pelaksanaan fasilitas sesuai dengan jangka waktu dan kerangka kerja yang telah ditentukan; dan



12. Bersedia melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan dalam rangka permohonan fasilitas pada tahap Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi untuk Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur.

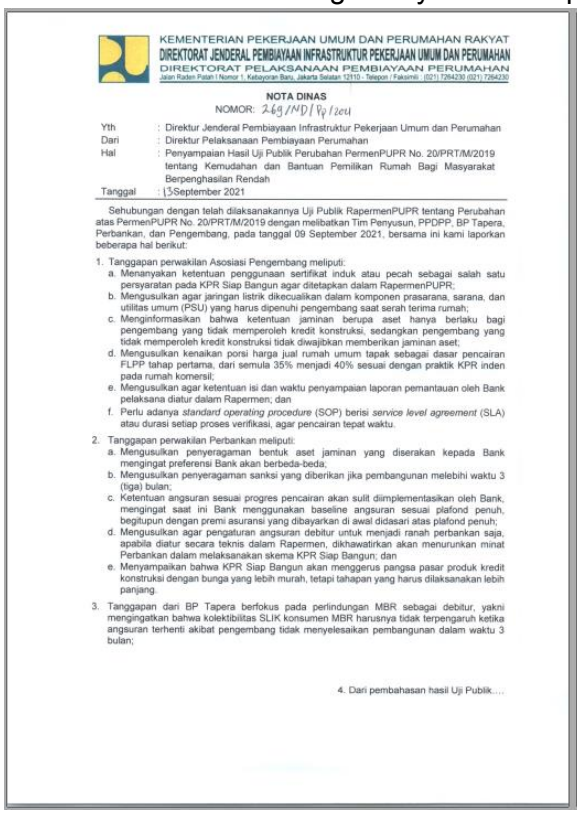
Jakarta, 23 Juli 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

02. Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Lampiran Dokumen)

1. Penyampaian Hasil Konsultasi Publik RapermenPUPR tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tanggal 9 September 2021.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264230 (021) 7264230

NOTA DINAS

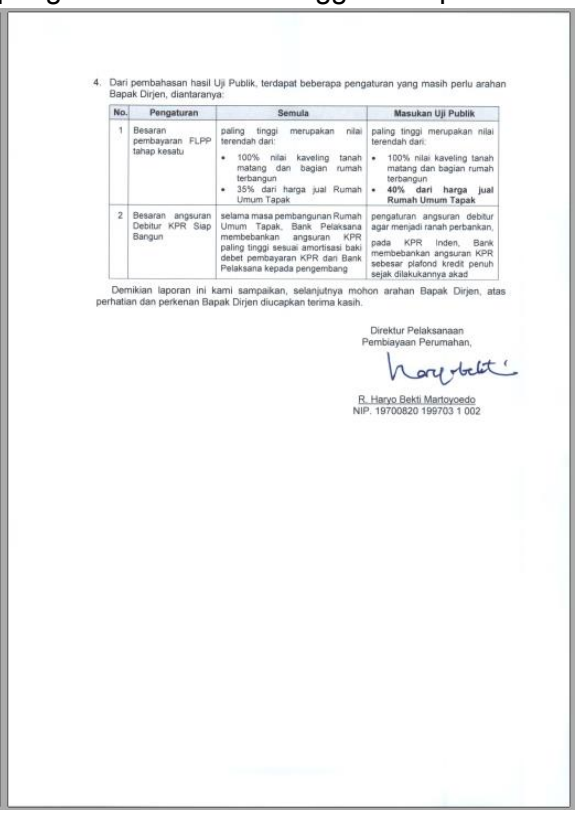
NOMOR: 269/ND/Dp/2021

Yth : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Hal : Penyampaian Hasil Uji Publik Perubahan PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tanggal : 13 September 2021

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Publik RapermenPUPR tentang Perubahan atas PermenPUPR No. 20/PRT/M/2019 dengan melibatkan Tim Penyusun, PPDPP, BP Tapera, Perbankan, dan Pengembang, pada tanggal 09 September 2021, bersama ini kami laporkan beberapa hal berikut:

1. Tanggapan perwakilan Asosiasi Pengembang meliputi:
   a. Menanyakan ketentuan penggunaan sertifikat induk atau pecah sebagai salah satu persyaratan pada KPR Siap Bangun agar ditetapkan dalam RapermenPUPR;
   b. Mengusulkan agar jaringan listrik dikecualikan dalam komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang harus dipenuhi pengembang saat serah terima rumah;
   c. Menginformasikan bahwa ketentuan jaminan berupa aset hanya berlaku bagi pengembang yang tidak memperoleh kredit konstruksi, sedangkan pengembang yang tidak memperoleh kredit konstruksi tidak diwajibkan memberikan jaminan aset;
   d. Mengusulkan kenaikan porsi harga jual rumah umum tapak sebagai dasar pencairan FLPP tahap pertama, dari semula 35% menjadi 40% sesuai dengan praktik KPR inden pada rumah komersil;
   e. Mengusulkan agar ketentuan isi dan waktu penyampaian laporan pemantauan oleh Bank pelaksana diatur dalam Rapermen; dan
   f. Perlu adanya *standard operating procedure* (SOP) berisi *service level agreement* (SLA) atau durasi setiap proses verifikasi, agar pencairan tepat waktu.
2. Tanggapan perwakilan Perbankan meliputi:
   a. Mengusulkan penyeragaman bentuk aset jaminan yang diserakan kepada Bank mengingat preferensi Bank akan berbeda-beda;
   b. Mengusulkan penyeragaman sanksi yang diberikan jika pembangunan melebihi waktu 3 (tiga) bulan;
   c. Ketentuan angsuran sesuai progres pencairan akan sulit diimplementasikan oleh Bank, mengingat saat ini Bank menggunakan baseline angsuran sesuai plafond penuh, begitupun dengan premi asuransi yang dibayarkan di awal didasari atas plafond penuh;
   d. Mengusulkan agar pengaturan angsuran debitur untuk menjadi ranah perbankan saja, apabila diatur secara teknis dalam Rapermen, dikhawatirkan akan menurunkan minat Perbankan dalam melaksanakan skema KPR Siap Bangun; dan
   e. Menyampaikan bahwa KPR Siap Bangun akan menggerus pangsa pasar produk kredit konstruksi dengan bunga yang lebih murah, tetapi tahapan yang harus dilaksanakan lebih panjang.
3. Tanggapan dari BP Tapera berfokus pada perlindungan MBR sebagai debitur, yakni mengingatkan bahwa kolektibilitas SLIK konsumen MBR harusnya tidak terpengaruh ketika angsuran terhenti akibat pengembang tidak menyelesaikan pembangunan dalam waktu 3 bulan;

4. Dari pembahasan hasil Uji Publik....



4. Dari pembahasan hasil Uji Publik, terdapat beberapa pengaturan yang masih perlu arahan Bapak Dirjen, diantaranya:

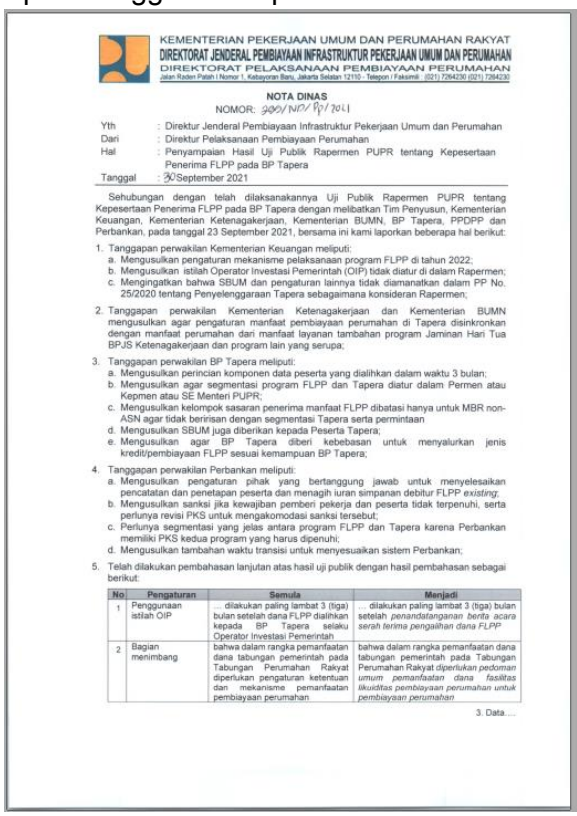
No.	Pengaturan	Semula	Masukan Uji Publik
1	Besaran pembayaran FLPP tahap kesatu	paling tinggi merupakan nilai terendah dari: • 100% nilai kaveling tanah matang dan bagian rumah terbangun • 35% dari harga jual Rumah Umum Tapak	paling tinggi merupakan nilai terendah dari: • 100% nilai kaveling tanah matang dan bagian rumah terbangun • **40% dari harga jual Rumah Umum Tapak**
2	Besaran angsuran Debitur KPR Siap Bangun	selama masa pembangunan Rumah Umum Tapak, Bank Pelaksana membebankan angsuran KPR paling tinggi sesuai amortisasi baki debet pembayaran KPR dari Bank Pelaksana kepada pengembang	pengaturan angsuran debitur agar menjadi ranah perbankan, pada KPR Inden, Bank membebankan angsuran KPR sebesar plafond kredit penuh sejak dilakukannya akad

Demikian laporan ini kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan Bapak Dirjen, atas perhatian dan perkenan Bapak Dirjen diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 19700820 199703 1 002

2. Penyampaian Hasil Konsultasi Publik RapermenPUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera tanggal 23 September 2021



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264230 (021) 7264230

NOTA DINAS

NOMOR: 290/ND/Dp/2021

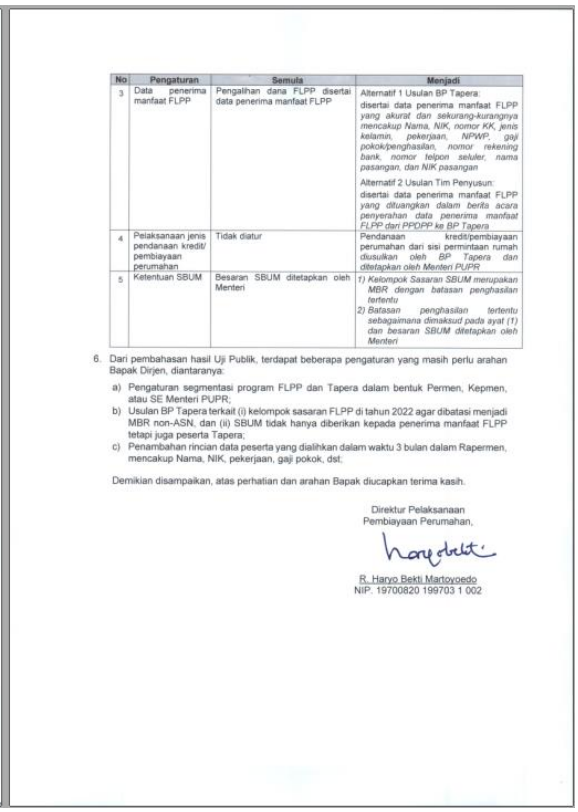
Yth : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Hal : Penyampaian Hasil Uji Publik Rapermen PUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera
Tanggal : 30 September 2021

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Publik Rapermen PUPR tentang Kepesertaan Penerima FLPP pada BP Tapera dengan melibatkan Tim Penyusun, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, BP Tapera, PPDPP dan Perbankan, pada tanggal 23 September 2021, bersama ini kami laporkan beberapa hal berikut:

1. Tanggapan perwakilan Kementerian Keuangan meliputi:
   a. Mengusulkan pengaturan mekanisme pelaksanaan program FLPP di tahun 2022;
   b. Mengusulkan istilah Operator Investasi Pemerintah (OIP) tidak diatur di dalam Rapermen;
   c. Mengingatkan bahwa SBUM dan pengaturan lainnya tidak diamanatkan dalam PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera sebagaimana konsideran Rapermen;
2. Tanggapan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN mengusulkan agar pengaturan manfaat pembiayaan perumahan di Tapera disinkronkan dengan manfaat perumahan dari manfaat layanan tambahan program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan dan program lain yang serupa;
3. Tanggapan perwakilan BP Tapera meliputi:
   a. Mengusulkan perincian komponen data peserta yang dialihkan dalam waktu 3 bulan;
   b. Mengusulkan agar segmentasi program FLPP dan Tapera diatur dalam Permen atau Kepmen atau SE Menteri PUPR;
   c. Mengusulkan kelompok sasaran penerima manfaat FLPP dibatasi hanya untuk MBR non-ASN agar tidak beririsan dengan segmentasi Tapera serta permintaan
   d. Mengusulkan SBUM juga diberikan kepada Peserta Tapera;
   e. Mengusulkan agar BP Tapera diberi kebebasan untuk menyalurkan jenis kredit/pembiayaan FLPP sesuai kemampuan BP Tapera;
4. Tanggapan perwakilan Perbankan meliputi:
   a. Mengusulkan pengaturan pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pencatatan dan penetapan peserta dan menagih iuran simpanan debitur FLPP *existing*;
   b. Mengusulkan sanksi jika kewajiban pemberi pekerja dan peserta tidak terpenuhi, serta perlunya revisi PKS untuk mengakomodasi sanksi tersebut;
   c. Perlunya segmentasi yang jelas antara program FLPP dan Tapera karena Perbankan memiliki PKS kedua program yang harus dipenuhi;
   d. Mengusulkan tambahan waktu transisi untuk menyesuaikan sistem Perbankan;
5. Telah dilakukan pembahasan lanjutan atas hasil uji publik dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

No	Pengaturan	Semula	Menjadi
1	Penggunaan istilah OIP	... dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana FLPP dialihkan kepada BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah	... dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah *penandatanganan berita acara serah terima pengalihan dana FLPP*
2	Bagian menimbang	bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tabungan pemerintah pada Tabungan Perumahan Rakyat diperlukan pengaturan ketentuan dan mekanisme pemanfaatan pembiayaan perumahan	bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tabungan pemerintah pada Tabungan Perumahan Rakyat *diperlukan pedoman umum pemanfaatan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk pembiayaan perumahan*

3. Data....



No	Pengaturan	Semula	Menjadi
3	Data penerima manfaat FLPP	Pengalihan dana FLPP disertai data penerima manfaat FLPP	Alternatif 1 Usulan BP Tapera: disertai data penerima manfaat FLPP *yang akurat dan sekurang-kurangnya mencakup Nama, NIK, nomor KK, jenis kelamin, pekerjaan, NPWP, gaji pokok/penghasilan, nomor rekening bank, nomor telpon seluler, nama pasangan, dan NIK pasangan* Alternatif 2 Usulan Tim Penyusun: disertai data penerima manfaat FLPP *yang dituangkan dalam berita acara penyerahan data penerima manfaat FLPP dari PPDPP ke BP Tapera*
4	Pelaksanaan jenis pendanaan kredit/ pembiayaan perumahan	Tidak diatur	Pendanaan kredit/pembiayaan perumahan dari sisi permintaan rumah *diusulkan oleh BP Tapera dan ditetapkan oleh Menteri PUPR*
5	Ketentuan SBUM	Besaran SBUM ditetapkan oleh Menteri	*1) Kelompok Sasaran SBUM merupakan MBR dengan batasan penghasilan tertentu* *2) Batasan penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran SBUM ditetapkan oleh Menteri*

6. Dari pembahasan hasil Uji Publik, terdapat beberapa pengaturan yang masih perlu arahan Bapak Dirjen, diantaranya:
   a) Pengaturan segmentasi program FLPP dan Tapera dalam bentuk Permen, Kepmen, atau SE Menteri PUPR;
   b) Usulan BP Tapera terkait (i) kelompok sasaran FLPP di tahun 2022 agar dibatasi menjadi MBR non-ASN, dan (ii) SBUM tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat FLPP tetapi juga peserta Tapera;
   c) Penambahan rincian data peserta yang dialihkan dalam waktu 3 bulan dalam Rapermen, mencakup Nama, NIK, pekerjaan, gaji pokok, dst;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 19700820 199703 1 002

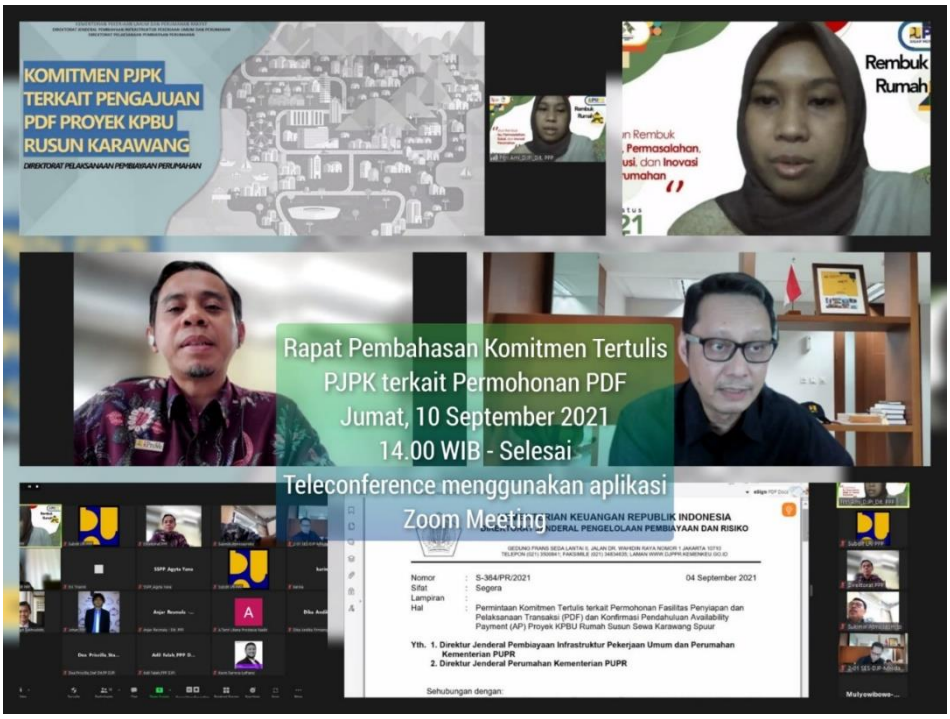
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Selasa, 29 Juli 2021
Aplikasi Zoom
Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Program KPR Sejahtera FLPP Tahun 2022



Selasa, 24 Agustus 2021
Aplikasi Zoom dan Kanal Youtube
Rembuk Rumah, Dalam Rangka Memperingati Hari Perumahan Nasionala



Jumat, 10 September 2021
Aplikasi Zoom
Rapat Pembahasan Komitmen Tertulis PJPK terkait Permohonan PDF



Kamis, 30 September 2021
The Luxton Hotel, Bandung & Aplikasi Zoom
Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Pemenuhan Air pada
Proyek KPBU Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung



Kamis, 30 September 2021
Aplikasi Zoom Meeting
Rapat Pembahasan BLU PPDPP Pasca Pengalihan FLPP ke BP Tapera

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264230 (021) 7264230

NOTA DINAS
NOMOR: 367/ND/Pp/2021

Yth : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Hal : Penyampaian Laporan dan Prosiding Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan: Reviu Capaian RPJMN 2020-2024 dan Pengembangan *Housing Ecosystem*
Tanggal : 3 Desember 2021

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan: Reviu Capaian RPJMN 2020-2024 dan Pengembangan *Housing Ecosystem,* bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan dihadiri oleh seluruh staf Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan serta perwakilan dari: Bank BTN; Perum Perumnas; PT. SMF; BP TAPERA; Kementerian PPN/Bappenas: Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, dan Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR: DJP, DJPI, BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP); Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto MCP., TeknikTata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
2. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka melakukan Reviu terhadap capaian RPMJN 2020-2024 bidang perumahan dan pembahasan mengenai pengembangan *housing ecosystem* dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 dengan agenda sebagai berikut:
   a. Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan secara luring *(offline)* dan daring (*online)* melalui *teleconference* pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021
   b. Kunjungan lapangan ke *Pilot Project Green and Affordable Housing* di Gandus, Kota Palembang pada hari Sabtu, 20 November 2021.
3. Pokok Pembahasan dalam Raker:
   a. Evaluasi RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan Tahun 2020-2021, Reviu Kinerja Tahun 2020-2021 terhadap Renstra 2020-2024, serta Target Kinerja Tahun 2022
      1) Target dan Capaian Akses Perumahan

Indikator	Capaian 2020	Target RPJMN 2024
Akses Rumah Layak Huni (%)	59,54 %	70%
Rasio Outsanding KPR terhadap PDB(%)	3,22%	4 %

      2) Capaian realisasi KPR FLPP, SSB, SBUM, BP2BT, TAPERA dan SMF sampai dengan bulan November 2021 terhadap target RPJMN dan Renstra Bidang Pembiayaan Perumahan tahun 2020-2024 baru mencapai 390.016 unit (28,7%). Masih terdapat gap hampir 1,4 juta unit rumah dari target RPJMN 2020-2024.
      3) Evaluasi terhadap penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan: masih terfokus pada rumah tapak dan pekerja formal, rendahnya pengawasan terhadap kualitas bangunan, dan lokasinya menjauh dari pusat kota.
      4) Rencana Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2022 adalah sebesar 200.042 Unit atau Rp 28,2 Triliun. Setelah Dana FLPP dialihkan ke BP Tapera pada tahun 2021, target penyaluran FLPP akan menjadi tugas BP Tapera dengan target 309.000 unit pada 2022, 390.000 unit pada 2023 dan 390.000 unit pada 2024.

5) Target ...

5) Target KPBU sektor perumahan berdasarkan Renstra 2020-2024 sebanyak 9 lokasi, yang kemudian dalam diskusi dengan Bappenas bertambah menjadi 13 lokasi (termasuk penyiapan IKN).

b. Pengembangan *Housing Ecosystem* dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dan percepatan implementasi kebijakan di bidang perumahan melalui intervensi pemerintah baik dari sisi *supply* maupun *demand*, dalam penciptaan iklim investasi atau iklim usaha yang kondusif.
   1) Hasil kajian Potensi Permintaan dan Kemampuan Membayar per Kelas Pendapatan:
      i. menggunakan basis data Susenas dan Sakernas untuk penentuan kelompok penerima manfaat dengan mengkonversi pengeluaran menjadi pendapatan.
      ii. pembagian isu terkait *Backlog* dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kedalam backlog kepemilikan dan backlog kepenghunian sesuai kelas pendapatan.
   2) Terdapat 2 (dua) konsep Ekosistem Perumahan, yaitu:
      i. Ekosistem Perumahan Generik yang terbagi dalam beberapa Sub-ekosistem Perumahan, yaitu: (i) sisi supply, (ii) sisi demand, (iii) BP3 sebagai fungsi *Asset Management Unit* (AMU), (iv) BP3 sebagai Paying Agent, dan (v) BP3 sebagai Bank Data *Housing Queue* Nasional;
      ii. Ekosistem Perumahan Tematik yang terbagi atas (i) Rumah Terjangkau Berbasis Komunitas (*Community Based Affordable Housing*), dan (ii) Rumah Terjangkau dan Berwawasan Hijau/Lingkungan (*Green Affordable Housing*)
   3) Pengembangan ekosistem perumahan perlu memperhatikan: pemetaan peran *stakeholder*, pengadaan lahan, penjaminan, pendataan masyarakat terkait housing *housing queue* serta perencanaan dan pengawasan
   4) Focus Group Discussion (FGD) mengenai Kerangka Kerja Ekosistem Perumahan pertama rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021.

4. Tindak Lanjut:
   a. Klasifikasi dan segmentasi target sasaran pada masing-masing program atau fasilitasi Pemerintah untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan
   b. PT. SMF bersama Bank BTN diminta untuk menyiapkan skema pembiayaan yang menyasar segmen berpenghasilan diatas Rp 8 juta (di atas MBR).
   c. Penajaman konsep ekosistem perumahan:
      1) Pendetailan terhadap Piramida *Housing Demand* berdasarkan tingkat pendapatan
      2) *Housing queue* dimandatkan ke pemerintah kabupaten/kota.
      3) Penjaman peran *stakeholder* dan proses bisnis dalam sub ekosistem

Adapun prosiding dan seluruh materi dalam kegiatan tersebut dapat diakses melalui tautan: http://bit.do/RakerPembPerumahan2021. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 19700820 199703 1 002

5) Target KPBU sektor perumahan berdasarkan Renstra 2020-2024 sebanyak 9 lokasi, yang kemudian dalam diskusi dengan Bappenas bertambah menjadi 13 lokasi (termasuk penyiapan IKN).

b. Pengembangan *Housing Ecosystem* dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dan percepatan implementasi kebijakan di bidang perumahan melalui intervensi pemerintah baik dari sisi *supply* maupun *demand*, dalam penciptaan iklim investasi atau iklim usaha yang kondusif.
   1) Hasil kajian Potensi Permintaan dan Kemampuan Membayar per Kelas Pendapatan:
      i. menggunakan basis data Susenas dan Sakernas untuk penentuan kelompok penerima manfaat dengan mengkonversi pengeluaran menjadi pendapatan.
      ii. pembagian isu terkait *Backlog* dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kedalam backlog kepemilikan dan backlog kepenghunian sesuai kelas pendapatan.
   2) Terdapat 2 (dua) konsep Ekosistem Perumahan, yaitu:
      i. Ekosistem Perumahan Generik yang terbagi dalam beberapa Sub-ekosistem Perumahan, yaitu: (i) sisi supply, (ii) sisi demand, (iii) BP3 sebagai fungsi *Asset Management Unit* (AMU), (iv) BP3 sebagai Paying Agent, dan (v) BP3 sebagai Bank Data *Housing Queue* Nasional;
      ii. Ekosistem Perumahan Tematik yang terbagi atas (i) Rumah Terjangkau Berbasis Komunitas (*Community Based Affordable Housing*), dan (ii) Rumah Terjangkau dan Berwawasan Hijau/Lingkungan (*Green Affordable Housing*)
   3) Pengembangan ekosistem perumahan perlu memperhatikan: pemetaan peran *stakeholder*, pengadaan lahan, penjaminan, pendataan masyarakat terkait housing *housing queue* serta perencanaan dan pengawasan
   4) Focus Group Discussion (FGD) mengenai Kerangka Kerja Ekosistem Perumahan pertama rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021.

4. Tindak Lanjut:
   a. Klasifikasi dan segmentasi target sasaran pada masing-masing program atau fasilitasi Pemerintah untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan
   b. PT. SMF bersama Bank BTN diminta untuk menyiapkan skema pembiayaan yang menyasar segmen berpenghasilan diatas Rp 8 juta (di atas MBR).
   c. Penajaman konsep ekosistem perumahan:
      1) Pendetailan terhadap Piramida *Housing Demand* berdasarkan tingkat pendapatan
      2) *Housing queue* dimandatkan ke pemerintah kabupaten/kota.
      3) Penjaman peran *stakeholder* dan proses bisnis dalam sub ekosistem

Adapun prosiding dan seluruh materi dalam kegiatan tersebut dapat diakses melalui tautan: http://bit.do/RakerPembPerumahan2021. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 19700820 199703 1 002



MEETING PROCEEDINGS

RAPAT KERJA:
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Palembang, 19-20 November 2021

"Reviu Capaian RPJMN 2020-2024 dan Pengembangan *Housing Ecosystem*"

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

DAFTAR ISI

Pendahuluan 3

Latar Belakang 3

Maksud dan Tujuan Kegiatan 4

Metode Penyelenggaraan 4

Peserta 4

Agenda Kegiatan 6

Laporan dan Pembukaan 8

Agenda Hari Pertama

Panel I: Reviu Capaian RPJMN 2020-2024 9

Reviu RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan 9

Evaluasi Program Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024 13

Reviu Kinerja Target RPJMN dan Renstra Bidang Perumahan TA. 2020-2024 14

Diskusi Panel I 17

Panel II: *Housing Ecosystem* 23

Potensi Permintaan dan Kemampuan Membayar per Kelas Pendapatan 23

Pendetilan Ruang Lingkup Sistem dan Subsistem Ekosistem Perumahan 27

Peran *Stakeholders* dalam Memastikan Ketepatan Sasaran dan Kualitas Konstruksi Perumahan 33

Rumah Murah Hemat dan Kuat, Green Housing in Palembang 38

Diskusi Panel II 40

Penutupan Rapat Kerja 44

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut 44

Agenda Hari Kedua

Kunjungan Lapangan 45

Lampiran 46

Undangan Rapat 46

Dokumentasi 47

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Renstra K/L), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hierarki ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pada periode Renstra dan RJPMN 2020-2024. Sehingga, pada tahun 2022, seluruh K/L akan memasuki paruh waktu pelaksanaan Renstra dan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, diperlukan persiapan *midterm review* Renstra Ditjen PI dan Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Dit. PPP) Tahun 2020-2024. *Midterm review* ini dilakukan untuk mengevaluasi target dan capaian renstra Dit. PPP pada tahun 2020-2021, serta menentukan arah, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang diterjemahkan ke dalam struktur program dan anggaran Dit. PPP TA. 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam RPJMN 2020-2024 telah disebutkan bahwa arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengembangan sebuah ekosistem perumahan (*housing ecosystem*) untuk mensinergikan peran dan keterkaitan antar *stakeholders* dalam sistem penyelenggaraan perumahan. *Key Stakeholders* di dalam *housing ecosystem*, yaitu: PT. SMF, BP Tapera, Perumnas, PPDPP, dan Bank BTN.

Dalam rangka mereviu RPJMN 2020-2024 dan sekaligus persiapan *midterm review*, serta pengembangan *housing ecosystem*, perlu dilaksanakan **"Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan: Reviu Capaian RPJMN 2020-2024 dan Pengembangan** ***Housing Ecosystem***".

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud pelaksanaan rapat kerja ini adalah mendukung pemenuhan target RPJMN 2020-2024 salah satunya melalui pengembangan dan pemantapan sinergi pemangku kepentingan dalam *housing ecosystem.*

Tujuan dilaksanakannya Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan adalah :

1. Reviu capaian RPMJN 2020-2024 bidang perumahan
2. Pengembangan *housing ecosystem* dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024.

Metode Penyelenggaraan

Kegiatan Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan ini dilaksanakan secara luring (*offline)* dan daring (*online*) melalui *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 19 November 2021 yang terdiri dua sesi pemaparan dan diskusi. Rincian waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja ini adalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Jumat-Sabtu, 19-20 November 2021
Waktu	:	08.00 - selesai
Tempat	:	Hotel Santika Premiere Bandara - Palembang Palembang Park, Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam No.168-169, Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961

Rapat kerja ini diawali dengan penjelasan dari berbagai Narasumber dengan tema "Reviu Capaian RPJMN 2020 - 2024 dan Pengembangan *Housing Ecosystem*". Metode pembahasan diawali dengan penyampaian materi oleh Narasumber dan dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab. Bahan paparan dapat diakses melalui: https://bit.ly/materiRakerPembiayaanPerumahan19112021. Rangkaian Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan ke *Pilot Project Green and Affordable Housing* di Gandus, Kota Palembang pada hari Sabtu, 20 November 2021.

Peserta

Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan melibatkan kurang lebih 60 (enam puluh) peserta, yang mewakili:

1. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
2. Direktur Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Sarana dan Prasaeana, Bappenas;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR
4. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

7. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
8. Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
10. Kepala Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
11. Kepala Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
12. Kepala Sub Direktorat Kemudahan dan Bantuan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
13. Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
14. Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto MCP., TeknikTata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
15. Ary Rahman Wahyudi, S.T., Murb&RegPlg., Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
16. Muh. Abdul Syukur Mulyowibowo, S.Kom., M.T., Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
17. Denik Haryani, S.T., M.Sc, Sub Koordinator Bidang Tugas Strategi Pembiayaan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
18. Moammar Alzia Viqolbi, M.T., Sub Koordinator Bidang Tugas Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
19. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
20. Komisioner BP Tapera;
21. Direktur Utama PT. SMF;
22. Direktur Utama Perum Perumnas;
23. Direktur Utama Bank BTN.

Agenda Kegiatan

Berikut merupakan agenda kegiatan pada Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan:

Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan:

"Reviu Capaian RPJMN 2020-2024 dan Pengembangan *Housing Ecosystem*".

Palembang, 19-20 November 2021

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator/PJ
Jumat, 19 November 2021				
1.	08.00-09.00	Registrasi		Panitia
2.	09.00-09.10	Pembukaan		
3.	09.10-09.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya		
4.	09.15-09.20	Pembacaan Doa		
5.	09.20-09.30	Sambutan Pembukaan dan Arahan	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan	
6.	09.30-11.00	**Pleno I: Reviu Capaian RPJMN 2020-2024**		Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, DJPI
		1. Evaluasi RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan Tahun 2020-2021	**Narasumber:** 1. Direktur Perumahan dan Permukiman, Bappenas 2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, DJP 3. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, DJPI **Penanggap:** 1. Komisioner BP TAPERA 2. Direktur Utama PPDPP 3. Direktur Utama PT. SMF 4. Direktur Utama Perum Perumnas 5. Direktur Utama Bank BTN	
		2. Reviu Kinerja Tahun 2020-2021 terhadap Renstra 2020-2024, serta Target Kinerja Tahun 2022		
7.	11.00-11.30	Diskusi dan Tanya Jawab		
8.	11.30-13.30	ISHOMA		
9.	13.30-15.30	**Pleno II: Pengembangan *Housing Ecosystem* untuk Mendukung RPJMN 2020-2024**		Fitri Ami Handayani, Sub Koordinator Bidang Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumaan, Direktorat Pelaksanan Pembiayaan Perumahan
		1. Penyepakatan *Database Housing Demand* (berdasarkan desil)	Martin Daniel Siyaranamual, *Chief of Economist*, PT. SMF	
		2. Pendetilan Ruang Lingkup Sistem dan Subsistem dan Rencana Kerja dalam *Housing Ecosystem*	Ary Rahman Wahyudi, Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, DJPI	
		3. *Pilot Project Green and Affordable Housing*	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator/PJ
		4. Peran *Stakeholders* dalam Memastikan Ketepatan Sasaran dan Kualitas Konstruksi Perumahan	Kepala Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, DJPI	
10.	15.30-16.30	Diskusi dan Tanya Jawab		
11.	16.30-17.00	Penutupan Rapat Kerja	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan perumahan	Panitia
Sabtu, 20 November 2021				
1.	07.00-08.00	Perjalanan Menuju Lokasi *Pilot Project Green and Affordable Housing* di Gandus		Panitia
2.	08.00-09.30	Kunjungan Lapangan *Pilot Project Green and Affordable Housing*		
3.	09.30-10.30	Perjalanan Menuju Lokasi Akad Massal		
4.	10.30-12.00	Pelaksanaan Akad Massal BP2BT di Dreamland		
5.	12.00-14.00	Makan Siang dan Penutupan		

LAPORAN DAN PEMBUKAAN

Laporan Ketua Panitia Raker Pembiayaan Perumahan

Disampaikan oleh Permana Lazuardy selaku Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

- Tema yang diangkat dalam acara ini adalah Reviu Capaian RPJMN 2020-2024 dan Pengembangan *Housing Ecosystem*.
- Terdapat 60 peserta baik yang hadir secara daring dan luring. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari: Pejabat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, BP Tapera, PT SMF, Perum Perumnas, serta perwakilan Perbankan.
- Kegiatan rapat hari ini terdiri dari dua pleno, dimana pleno I mengenai "Reviu Capaian RPJMN 2020-2024" dimoderatori oleh Bapak R. Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan Pleno II mengenai "Pengembangan *Housing Ecosystem* untuk Mendukung RPJMN 2020-2024" dimoderatori oleh Ibu Fitri Ami, Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan. Dilanjutkan acara Kunjungan Lapangan *Pilot Ptoject Green and Affordable Housing* esok hari

Pembukaan Rapat

Disampaikan oleh Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian PUPR.

- Terkait penyediaan perumahan di Indonesia terdapat tantangan yang cukup berat dalam hal mewujudkan ketersediaan rumah layak huni, diantaranya:
  1. Penyediaan dukungan kredit renovasi;
  2. Target peningkatan rasio KPR dari 2.9% menjadi 4% pada tahun 2024 salah satunya dengan membentuk *covered bond*;
  3. Terkait dengan penyediaan 1 juta *public housing*, maka diperlukan kerjasama dari *key stakeholders* seperti peran pemda untuk memetakan demand di metropolitan, peran perumnas sebagai *offtaker*, dan peran PT SMF untuk menyediakan kredit konstruksi;
  4. Mendorong proyek-proyek KPBU Perumahan untuk segera terealisasi; dan
  5. Merevisi aturan terkait tenor pinjaman FLPP dari 20 tahun menjadi 30 tahun sehingga EMI (*Equated Monthly Installment*) menjadi terjangkau dan memungkinkan Perumnas untuk membangun di dalam kota.
- Terkait dengan definisi MBR, perlu benar-benar diperhatikan terkait segmen mana yang masuk ke dalam *economic weaker system* oleh sebab itu pengelompokkan desil penghasilan perlu dilakukan secara teliti dan seksama.
- Kedepannya diharapkan agar sektor informal dapat dijangkau oleh Tapera.

AGENDA HARI PERTAMA
PANEL I: REVIU CAPAIAN RPJMN 2020-2024

Moderator: R. Haryo Bekti Martoyoedo selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Reviu RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan

Narasumber: Nurul Wajah Mujahid selaku Perencana Ahli Madya, Direktorat Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas

Urbanisasi di Indonesia belum dapat terkelola dengan baik, Kekuatan aglomerasi yang seharusnya menjadi pendorong dan nilai tambah perekonomian (meningkatkan *economy growth*), namun harus dikurangi oleh *congestion factor* akibat *urban sprawl*, dimana perumahan menjadi salah satu faktor pendorongnya, salah satunya adalah rumah subsidi. Residu dari belum mapannya sistem penyediaan perumahan/*urban housing ecosystem* ini yang menghasilkan permukiman-permukiman kumuh di perkotaan.

Pembiayaan perumahan di Indonesia dianggap tidak responsif karena: (i) mayoritas pembangunan rumah dilakukan secara swadaya; dan (ii) mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pekerja dengan pengahasilan tidak tetap (*non-fixed income*). Namun di satu sisi, memang anggaran Rp. 12T anggaran FLPP dan subsidi lainnya hanya dialokasikan untuk sektor perumahan formal, kurang dari Rp. 2T berupa bantuan pemerintah untuk perumahan swadaya. Padahal, perumahan swadaya merupakan *driver* utama tumbuhnya pemukiman yag tidak teratur, tidak layak, tidak memilki struktur tata bangunan dan lingkungan.

Beberapa faktor pencetus yang belum dapat kita handle di level perkotaan antara lain:

- Urbanisasi yang disebabkan pertambahan penduduk alami, migrasi desa ke kota, reklasifikasi desa menjadi kota;
- Pesoalan kemiskinan dimana kemampuan dan kapasitas finansial masyarakat yang tidak memadai.

Beberapa faktor risiko yang belum dapat kita handle di level perkotaan antara lain:

- Manajemen lahan perkotaan yang kurang baik bagi masyarakat miskin dan rentan;
- Standar konstruksi dan pengawasan pembangunan rumah masih lemah, khususnya rumah swadaya;
- Lemahnya penegakan peraturan tata ruang;
- Terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan terhadap pembiayaan dan perumahan/*financial market*;
- Terbatasnya kemampuan manajemen perkotaan;
- Terbatasnya regulasi operasional.

Arah kebijakan dan strategi pencapaian RPJMN 2020-2024 harus difokuskan pada peningkatan akses rumah layak huni secara bertahap.

Perihal perubahan indikator dalam RPJMN 2020-2024, terdapat pergeseran target dan indikator dari *backlog* menjadi target SDGs dan berbagai Mandat UU, yaitu akses terhadap rumah yang *adequate*, *safe*, and *affordable.* Indikator utama adalah presentasi rumah tangga yang memiliki akses dan tinggal di rumah layak, berdasarkan ketahanan konstruksi, akses air minum, akses sanitasi, dan luas yang nyaman per kapita. Sedangkan, indikator makro tambahan yang patut juga menjadi perhatian adalah permukiman kumuh, *backlog* perumahan, serta keamanan bermukin (lahan).

Pada tahun 2018, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau adalah sebesar 56,75%. Selanjutnya, pada tahun 2020 mencapai 59,54%, dimana target Indonesia adalah menuju angka 70% di 2024. Jika ingin mengejar *no one left behind* (target capaian 100%) pada tahun 2030, maka kita harus melakukan upaya dua kali lipat lebih keras.

Dalam rangka mencapai target SDGs 2030 yaitu 100% akses rumah layak huni, disusun beberapa skenario pencapaian, yaitu:

- Jika *effort business as usual* (BAU) maka target ini baru akantercapai pada Tahun 2041.
- Jika *effort* dilakukan 1,4 x maka target akan tercapai pada Tahun 2035.
- Jika *effort* dilakukan 2x lipat maka target akan tercapai pada Tahun 2030.

Pada tahun 2020, target dan capaian akses perumahan sudah mencapai angka 59,54% dan rasio *outstanding* KPR terhadap PDB sudah mencapai 3,22% dari target 4%.

Perbandingan target dan prognosis bantuan pembiayaan perumahan TA 2021(capaian TW III tahun 2021 dan target DIPA tahun 2021) dijabarkan sebagai berikut:

- FLPP capaian 42,11% (178.728 unit) dari total target 1 layanan 157.500 unit;
- BP2BT capaian 54.265 (1.834 unit) dari total target 1.000 unit;
- SSB dan SBUM capaian 69,8% (SBUM 124.326 unit dan SSB 767.605 unit) dari total target berupa 1 layanan sejumlah 200.000 unit;
- Fasilitasi pembiayaan perumahan (SMF dan Tapera) capaian 43% dari total target 1 layanan sejumlah 119.000 unit.

Public review expenditure yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukan bahwa meningkatnya anggaran KPR subsidi tidak diiringi dengan peningkatkan volume target. Beberapa kritikan pada bidang penyediaan perumahan meliputi:

- 99,5% hanyalah satu jenis rumah, yaitu tipologi rumah tapak;
- 90% adalah masyarakat bergaji formal;
- Kurangnya kontrol terhadap kualitas konstruksi; serta
- 90% penyediaan perumahan ada di daerah *rural* dan bukan merupakan area metropolitan.

Diharapkan diskusi akan Ekosistem Perumahan hari ini dapat membalik tren angka di atas menjadi lebih ramah terhadap yang sebaliknya.

Rekomendasi terhadap proses perencanaan dan pemograman sebagai dasar pertimbangan penentuan kebijakan program perumahan/RKP 2022, temenuan tahap 1 meliputi:

1) Rencana Kerja Pemerintah belum sepenuhnya menjelaskan korelasi PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas serta MP dikaitkan dengan dukungan Alokasi Anggaran K/L dalam mewujudkan Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional;
2) Rencana Kerja Pemerintah belum sepenuhnya mencakup Proyek Strategis Nasional dan KPBU/non-KPBU;
3) Terdapat RO Prioritas yang tidak direncanakan pada RKP, namun ditambahkan pada RENJA dan RKA K/L;
4) Terdapat RO Prioritas RKP yang berubah target, anggaran, lokasi, serta tidak dianggarkan pada aplikasi SAKTI tanpa didukung dokumentasi yang memadai.

Temuan tahap 2 meliputi:

1) Rencana Kerja Pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan Perencanaan pada Bendahara Umum Negara;
2) Penganggaran BA BUN belum terdapat pendanaan dalam rangka mendukung agenda Prioritas Nasional.

Lima proyek KPBU yang belum tercantum dalam RKP 2022, karena KPBU Rusun sedang dalam Penyapan Transaksi meliputi (i) Rusun Cisaranten; (ii) Rusun Karawang Spuur; (iii) Rusun Daan Mogot; (iv) Rusun Sei Mangkei; dan (v) Rusun Desa Besar.

Tema RKP tahun 2022 meliputi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural: Pemulihan Industri Perumahan.

Terkait perkembangan indikator RPJMN Perumahan dan Permukiman, di tahun 2022 akan difokuskan pada perbaikan permukiman kumuh.

Capaian rumah tangga yang menempati hunian yang layak dan terjangkau tahun 2015-200 dan proyeksi target 2021-2024 dimana target ini akan tercapai di tahun 2024 dengan kerja 1,4 kali lebih keras.

Secara umum, persebaran provinsi yang memiliki capaian diatas capaian nasional hampir sama dengan jumlah provinsi yang memiliki capaian di bawah capaian nasional. Provinsi Papua dengan 28,56% mempunyai capaian paling rendah, sementara provinsi dengan capaian tertinggi adalah DI Yogyakarta yaitu sebesar 86,19%.

Hingga saat ini, terdapat 22 (dua puluh dua) provinsi menyampaikan target RPJMDnya yang sesuai RPJMN di tahun 2024, dan target ini di*cascading*kan dapat target kabupaten/kota. Ke depannya pemerintah diharapkan dapat fokus terhadap bagaimana mencapai target 70% nasional dan target-target yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Masalah yang masih kental dihadapi oleh bidang penyediaan perumahan Indonesia adalah ketidaklayakan akses sanitasi, kualitas bangunan masih hampir 10%, serta bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal (berupa SHM/SHGB/SHRS) juga masih lamban pergerakannya, padahal

ini menjadi syarat *secure tenure* ke depannya. Namun sekali lagi, fokus kita bukan kepada kepemilikan rumah, melainkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau.

Beranjak pada profil kebutuhan dan penyediaan perumahan layak huni di daerah, rata-rata proporsi progam belanja fungsi perumahan terhadap total belanja provinsi adalah 1,65%, dimana tertingga adalah Jakarta 4,6%. Dari angka tersebut dikuadrankan, didapatkan 4 (empat) kuadran (daerah) berdasarkan *willingness* dan *ability*nya. Beberapa daerah yang termasuk dalam *low hanging fruit* atau butuh *trigger* untuk sedikit lagi mencapai targetnya adalah DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan yang memerlukan insentif adalah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Papu butuh insentif.

Pada *demand* side, kebutuhan RT (pada seluruh desil pengeluaran) di masing-masing provinsi berbeda antara satu dan lainnya, dalam hal pembelian rumah baru dan perbaikan kualitas rumah. Hampir 7% RT berpotensi menjadi pasar untuk kepemilikan rumah baru. Namun terdapat kebutuhan dukungan untuk perbaikan rumah baru yang cukup signifikan. Lebih dari 45% RT memiliki kondisi rumah yang padat, tidak layak huni, akses air minum yang kurang baik, atau sanitasi yang kurang. Potensi pasar untuk perbaikan rumah dapat difokuskan pada Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Banten.

Pada sebaran RTLH terhadap kepadatan penduduk, terdapat korelasi antar kepadatan penduduk dengan jumlah rumah tidak layak huni. Lalu, pada sebaran RTLH terhadap kemiskinan, terdapat korelasi positif antara kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni. Implikasinya, pemerintah akan sulit mendongkrak masyarakat miskin ketika perumahan dan permukimannya yang mereka tinggali tidak baik, akan sulit masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Fokus yang diperlukan ke depan meliputi:

- *Urban regeneration* (revitalisasi metropolitan melalui *urban regeneration*): memperbaiki kota kumuh, meningkatkan daya saing perekonomian, meningkatkan inklusifitas, dan menciptakan kota berkelanjutan.
- Usulan skala **peremajaan permukiman** yang diajukan adalah:
  1) *Track 1* Peremajaan kampung kota (skala lokal), melalui:
     a. Penataan melalui konsolidasi tanah vertikal (*low rise*) 2-4 lantai;
     b. Cocok untuk kawasan yang bertumbuh cukup pesat dari waktu ke waktu;
     c. Melibatkan lebih sedikit *stakeholders* (pelaku utama pemerintah dan masyarakat); serta
     d. Mayoritas melibatkan pendanaan pemerintah/pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat.
  2) *Track 2* Peremajaan skala kawasan, melalui:
     a. *Mixed-use Development* (residensial, komersial, dll);
     b. Cocok untuk kawasan yang mengalami *development pressure* tinggi;
     c. *Multistakeholders* (pemerintah, badan usaha sebagai investor, dan masyarakat); serta
     d. Mayoritas bertumpu kepada pembiayaan/investasi yang sirkular.

- **Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan**. Bentuk program yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah meliputi replikasi program yang sudah ada (pemerintah daerah melakukan investasi APBD ke program yang sudah berjalan seperti FLIPP) atau mengembangkan program baru (pemerintah daerah mengembangkan program subsidi perumahan baru unruk MBR). Sebagai contoh, Jawa Barat akan mereplikasi FLPP.
- **Pembiayaan mikro perumahan**, contohnya adalah peminjaman pembiayaan perumahan bagi MBR sektor informal. Contoh penerapan ada di provinsi Sumatera Selatan (pemanfaatan lembaga penjaminan/koperasi untuk komunitas MBR dalam mengakses BP2BT) dan Jawa Tengah (memberikan pinjaman pembelian lahan dari perbankan, dengan memanfaatkan Jamkrida sebagai lembaga penjamin).

- Contoh penerapan kerjasama pengembangan perumahan antara pemerintah dan masyarakat meliputi:
  - Program "Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Omah".
  - DAK Integrasi 2021 Perumahan Komunitas Weleri Asri Kabupaten Kendal.
  - Perumahan Sehat Komunal Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo.
  - Perumahan Komunitas Penyapu Jalan Kota Prabumulih, Prov. Sumatera Selatan.
- Diharapkan pemaparan ini dapat menjadi *trigger* memikirkan ekosistem perumahan dengan lebih mementingkan pembangunan perumahan yang bersifat swadaya dan mendukung masyarakat *non-fixed income*.

Evaluasi Program Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024

Narasumber: Edward Abdurrahman selaku Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR

- Secara keseluruhan target DJP dalam RPJMN 2020-2024 ada sebanyak Rp 57T dimana terbagi kedalam pembangunan rumah swadaya sebanyak Rp 27T, pembangunan rumah susun sebanyak Rp 18T, bantuan PSU rumah umum sebanyak Rp 3T, dukungan manajemen dan output non fisik lain sebanyak Rp 4T dan pembangunan rumah khusus sebanyak Rp 2T. Sementara dari sisi anggaran terdapat penambahan sebanyak Rp 1,32T di tahun 2021 sehingga alokasi DIPA DJP menjadi Rp 9,02T.
- Perkiraan capaian kinerja DJP TA 2021 berdasarkan target renstra untuk rumah susun adalah 90%, di rumah khusus sebesar 218.9%, untuk rumah swadaya sebesar 237,57% dan untuk bantuan PSU sebesar 64%.
- Dari tahun berjalan, permasalah yang dihadapi oleh DJP diantaranya:
  - Lahan yang belum *clean and clear* dan adanya perpindahan lokasi pada pembangunan rusun dan rusus;

- Akses lokasi yang sulit dijangkau menyebabkan terjadinya keterlambatan suplai material dan mobilisasi alat serta sulit mendapatkan tenaga kerja/tukang
- Pendataan calon penerima bantuan (CPB) yang masih belum efektif mengakibatkan banyaknya data CPB yang tidak valid sehingga memperlambat penyaluran BSPS;
- Terlambatnya pelaksanaan bantuan PSU karena penyiapan badan jalan yang belum selesai dan hasil tes kepadatan tanah belum dilaksanakan.

- Arah kebijakan dan prioritas bidang perumahan dan permukiman tahun 2022 diantaranya (1) Penyediaan akses rumah layak huni (*Major Project* Rusun Perkotaan, BSPS, Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera, PSU Rumah Umum); (2) Penanganan permukiman kumuh yang disinergikan dengan Cipta Karya; dan (3) Fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP dan penyaluran mikro kredit perumahan bagi masyarakat *non-fixed income*)
- Fokus kegiatan di tahun 2022 adalah:
  - Kegiatan berbasis *Multi Years Contract* (MYC);
  - Kegiatan yang direktif dan aspiratif;
  - Kegiatan yang berhubungan dengan OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi);
  - Kegiatan TA 2021 yang direlaksasi ke TA 2022;
  - Proyek Strategis Nasional (PSN); dan
  - Padat Karya Tunai dan Dukungan UMKM

Reviu Kinerja Target RPJMN dan Renstra Bidang Perumahan TA. 2020-2024

Narasumber: Agus Sulaeman selaku Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, DJPI, Kementerian PUPR

Target RPJMN dan Renstra Bidang Pembiayaan Perumahan 2020-2024 melalui intervensi langsung pemerintah sebanyak 5.000.000 unit rumah, yang terbagi atas Kolaborasi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat) sebanyak 3.450.000 unit, Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebanyak 50.000 unit, TAPERA 500.000 unit, Subsidi Perumahan 900.000, BP2BT 100.000.

Berdasarkan Target RPJMN dan Renstra Bidang Pembiayaan Perumahan tahun 2020-2024, realisasi KPR FLPP, TAPERA, SMF SSB SBUM BP2BT masih terdapat gap hampir 1,4 juta unit rumah. Pencapaian sampai dengan bulan November 2021 hanya sebesar 28,7%, angka tersebut sebagian besar merupakan kontribusi dari KPR FLPP dan SSB serta sebagian kecil dari BP2BT dan Tapera.

Target penyaluran program pembiayaan perumahan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- KPR FLPP 157.500 unit rumah;
- BP2BT 1000 unit;
- SSB tidak ada penerbitan baru;
- SBUM sama dengan FLPP sebanyak 157.500 unit rumah.

Sampai dengan 18 November 2021 tercatat BP Tapera sudah bisa menerbitkan KPR terhadap 32 (tiga puluh dua) unit rumah. Hal ini mencerminkan masih ada kesulitan BP TAPERA mencapai target penyaluran KPR. Berdasarkan distribusi ini terlihat tantangan ke depan, kita perlu mendorong percepatan pemindahan FLPP ke BP Tapera, karena KPR Tapera masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan

Penyerapan KPR FLPP sudah diatas 100 %, hal ini disebabkan selain karena faktor harga rumah yang tidak naik, juga terdapat pengembalian investasi yang melebihi target.

Untuk status realisasi (pencairan SP2D) BP2BT per 15 November 2021 baru mencapai 1.834 unit rumah, dengan anggaran sebesar 72,4 miliar. Berdasarkan data yang diperoleh dari PPK, sampai saat ini sudah terdapat pengajuan ke satker sebanyak 17.279 pemohon, angka ini sudah diatas DIPA yang kita miliki yakni 11.865 unit. Pengujian penetapan yang dilakukan oleh satker sudah mencapai 10.036 pemohon, pengajuan untuk SK penerima manfaat 9949 pemohon, dan permohonan pencairan 2584 pemohon.

Permohonan ke satker sudah melampaui unit target yang ditetapkan dalam DIPA. Maka dari itu perlu menyiapkan perlakuan terhadap 17.279 pemohon yang sudah masuk ke satker. Apabila seluruh pemohon memenuhi persyaratan, maka perlu perhatian khusus, mengingat status sudah tanggal 18 November, revisi DIPA sulit untuk dilakukan.

Rencana Pembiayaan Perumahan tahun 2022, meliputi:

- KPR FLPP dianggarkan sebanyak Rp 23 trilyun, dimana pada DIPA tahun 2022 telah dianggarakan Rp 19,1 trilyun dan sisanya berasal dari dana bergulir. Angka ini diharapakan bisa memfasilitasi sebanyak 200.000 Unit Rumah. Untuk BP2BT, strateginya berdasarkan tahun sebelumnya, saat ini baru dianggarkan sebesar Rp 1,6 miliar dengan total unit sebesar 42 unit. Dalam perjalananya dapat di *top up*;
- Untuk SSB telah dianggarkan sebanyak Rp 4,39 trilyun. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran subsidi tahun sebelumnya sebanyak 769.903 unit rumah;
- Untuk SBUM jumlah anggarannya sebanyak Rp 812 miliar untuk memfasilitasi sebanyak 200.000 unit rumah;
- Apabila KPR FLPP ditahun depan sama dengan tahun sebelumnya, realisasi di atas target yang di tetapkan Perlu jadi perhatian Bersama apabila realisasinya melebihi target, maka bagaimana dengan bantuan uang mukanya.

Pada tahun 2021, kekurangan dari anggaran Bantuan Uang Muka kita realokasi dari alokasi SSB. Untuk 2022, apabila anggaran SSBnya sudah habis maka perlu mencari cara lain untuk memenuhi target FLPP diatas 200.000 unit.

Berkaitan dengan rencana kedepan yakni gabungan FLPP dan BP Tapera, Mulai tahun 2022 ke atas, target antara BP Tapera dan KPR FLPP akan sama-sama di eksekusi oleh BP TAPERA. Di tahun 2022-2023 bisa bersama memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 309.000 unit rumah pada 2022, 390.000 unit rumah pada 2023 dan 390.000 unit rumah pada 2024.

Berkaitan dengan rencana perluasan program, proses yang akan dikembangkan kedepannya adalah pembahasan mengenai desil *backlog* dan sebagainya yang perlu digali lebih dalam khususnya masalah besarannya.

Perlu dilakukan penajaman mengenai angka untuk golongan menengah ke atas. Jika kita lihat saat ini, golongan MBR itu masuk pada desil 2,4-7,8. Namun diatas MBR perlu dipastikan kembali angkanya.

Terkait bantuan skema perluasan program baik dari sisi *supply* maupun sisi *demand*, ada beberapa hal yang belum tersedia dan akan ditawarkan misalnya dari sisi *supply* akan ditawarkan program *slum upgrading*, KPBUM, dan dari sisi demand akan ditawarkan KPR siap bangun, KPR sewa beli, dan subsidi rusun perkotaan.

Proses pengalihan FLPP dari BLU PPDPP ke BP Tapera, proses evaluasi *monitoring*, terkait program FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP, minggu ini laporan BPKP akan selesai dan akan disampaikan ke Dirjen PI dan BP Tapera.

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PUPR dan BPTapera yakni terkait dengan FLPP, Sikumbang, Sikasep dan Sipetruk sudah diselesaikan dan sudah di tandatangani oleh Kepala Pusdastin, untuk selanjutnya akan ditandatangani oleh komisioner BP Tapera.

Terkait dengan PKS BMN, disepakati bahwa pemanfaatan BMN yang terkait langsung dengan KPR FLPP ditargetkan selesai pada 28 November 2021.

Terkait KPBU, di sektor perumahan berdasarkan Renstra KPBU sektor Perumahan targetnya selama 5 tahun kedepan ada 9 lokasi yang bisa dikerjasamakan. Pada tahun 2022, berdasarkan diskusi dengan Kementerian PPN/Bappenas target tersebut berkembang menjadi 13 lokasi.

Penyiapan SP IKN sudah dilaksanakan, tahun depan diharapkan bisa mendapatkan PDF untuk *feasibility study* dan sebagainya.

Sampai dengan akhir tahun 2021, proses KPBU perumahan belum bisa sampai tahap transaksi.

Hal-hal yang perlu di eksekusi kedepan untuk mencapai Target RPJMN antara lain:

- Melakukan relakasi target;
- Penguatan database *supply* ataupun *demand*;
- Segmentasi dan distribusi target KPR program;
- Penguatan monitoring bank pelaksana terkait penyaluran bantuan sesuai kuota;
- Pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan sesuai segmentasi penghasilan masyarakat;
- Implementasi ekosistem perumahan.

DISKUSI PANEL I

Berakhirnya sesi pemaparan dari ketiga Narasumber pada sesi panel I dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanggapan+ antar peserta dan pembicara rapat.

Nama Penanggap	Pertanyaan/Tanggapan
Adi Setianto (BP Tapera)	• Kinerja BP Tapera tahun ini memang masih jauh dari apa yang diharapkan, melihat data yang ada sepertinya *engine* dan cara kerja kami banyak yang harus diperbaiki. *Learning curve* kami baru dimulai namun kami punya data. Sampai saat ini BP Tapera baru mencapai 35 KPR, ASN sudah megajukan FLPP (akan dibantu oleh Kementerian PUPR), sehingga paling tidak nanti kami bisa mendapatkan total 50% untuk KPR. Namun dikarenakan waktu yang mepet, realisasi akan berada di awal tahun 2022. Kami akan terus berusaha agar target kami di 2021 bisa terus berproses sekarang dan realisasi di awal tahun, karena di tahun 2022 sudah akan bergerak ke target baru. • *Engine* di BP Tapera akan digunakan untuk penyaluran dana Tapera, sedangkan FLPP di tahun 2022 akan di *trigger* oleh dana yang ada di PPDPP. Untuk komitmen akan kami tetap kejar target sebagaimana yang ada di RPJMN 2020-2024.
Arief Sabaruddin (PPDPP)	• Terkait dengan beberapa program yang ada di Kementerian PUPR, seperti FLPP, BP2BT, BP Tapera, saya kira di sini kita butuh segera melakukan klasifikasi target sasaran (dibedakan). Kalau target sasaran sama, program-program ini bisa menjadi bersaing. Jangan sampai beberapa program meng-*handle* target sasaran yang sama. • Menanggapi terkait kualitas, PPDPP sudah mempersiapkan aplikasi Si Petruk dan sudah diuji coba 3 bulan terakhir ini. Diharapkan Pak Adi dapat melanjutkan di Tapera. Sistemnya cukup bagus, dimana rekaman data untuk tahapan pelaksanaan sudah bisa dipantau, sehingga jika kualitas tidak benar, secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Ini akan sangat meringankan pekerjaan, namun di sisi lain PR kita adalah bagaimana nanti *output* Si Petruk ini bisa menjadi subtitusi atau alat untuk memudahkan pemda dalam menerbitkan SLF, jadi tidak perlu ada lagi tim teknis yang megkaji kualitas, tetapi outputnya SI Petruk ini dapat diakui dan menggantikan hal tersebut. Dengan bangunan yang kecil-kecil dan cukup massal saya kira akan sangat merepotkan pemda atau tim teknis yang dibentuk oleh pemda. Tetapi bila aplikasi di Petruk ini dapat diterima oleh pemda sebagai dasar penerbitan SLF, nantinya akan sangat memudahkan realisasi rumah subsidi.

Nama Penanggap	Pertanyaan/Tanggapan
	• Ketiga, saya menyarankan juga bahwa dari sisi *suppy* kita baru meyiapkan dua tipe rumah, yaitu rumah susun dan rumah tapak. Tentunya ke depannya kita juga harus bisa memberikan fasilitas FLPP/subsidi ini untuk rumah-rumah maisonet atau maisonet tumpuk (lahan bisa relatif lebih kecil, namun standar kenyamanan dan kesehatan penghuni tetap terpenuhi) dalam rangka mendukung efisiensi lahan. Contohnya lahan yang di depan menjadi milik penghuni bawah, dan lahan di belakang menjadi milik penghun atas. Pengaturan tentang maisonet, Perumnas bisa cek lagi di Klender ataupun Sukaluyu di Bandung, bangunan-bangunan maisonet masih berdiri yang dibangun pada tahun 1971-72, sehingga *urban sprawl* yang dikhawatirkan Pak Direktur Jenderal bisa di-*arrange* setidaknya.
Atik Niene Nierani .I (PPDPP)	Target dan realisasi penyaluran FLPP tahun 2020-2024: Target Renstra kami tahun 2020 102.500, alokasi DIPA 102.500, dan realisasi penyaluran 109.253. Tahun 2021 ini target Renstra adalah 157.500, alokasi DIPA 157.500, dan realisasi penyaluran sebesar 178.728. Di tahun berikutnya, 2022, mungkin akan 200.000 untuk BP Tapera, dan seterusnya. Pada tanggal 31 Oktober 2021 terdapat *cutoff* penyaluran FLPP dan akan segera dialihkan ke BP Tapera.  Cut-off penyaluran FLPP tahun 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2021 Target kinerja FLPP tahun 2022-2024 dialihkan ke BP Tapera Saat ini sedang dilakukan proses review BPKP untuk pengalihan dana FLPP ke BP Tapera
Heliantopo M. (PT. SMF)	• Menanggapi pertanyaan Pak Nurul yang dipresentasikan, untuk poin SMF terdapat tanda tanya, kami mohon waktu untuk berdikusi dengan Pak Nurul terkait dengan target 50.000 itu apakah spesifik KPR ASN/TNI POLRI. • Terkait KPR program FLPP, untuk tahun ini kami sudah menyelesaikan penyaluran KPR FLPP, mungkin ada sedikit lagi yang belum di *reimburse* ke kami dari Bank BTN kurang lebih jumlahnya ratusan miliar. Untuk tahun 2022, kami sudah beberapa kali izin bertemu dengan tim di BP Tapera untuk melakukan pembahasan

Nama Penanggap	Pertanyaan/Tanggapan
	terkait dengan pelaksanaan KPR FLPP porsi 25% dari SMF. Mohon dukungan Pak Adi supaya SMF bisa berkontribusi dan berjalan lancar. • Terkait dengan desil, perluasan mandat SMF dilakukan untuk mensasar segmen-segmen yang belum terlayani sesuai arahan Pak Dirjen. Sebagai contoh, SMF bekerjasama dengan PNM untuk pembiayaan mikro perumahan, seperti perbaikan/renovasi rumah untuk desil paling bawah desil dengan kisaran pinjaman hanya Rp 4 juta. Ini bersifat berputar, misal pertama dapur yang diperbaiki, lalu genteng, lalu ada yang mendukung usahanya. Untuk tahun ini SMF juga *piloting* pembiayaan konstruksi khusus pada sisi supply untuk rumah-rumah FLPP/rumah program agar perputarannya lebih lancar. • Ke depannya, akan ada perluasan mandat yang kami pikirkan salah satunya adalah sewa-beli (sedang dalam tahap kajian), dengan tujuan mensasar segmen-segmen yang tidak *bankable*. Sehingga mekanismenya nanti mereka bisa menyewa terlebih dahulu baik 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan sampai lunas, setelah itu dihibah. • Dalam perluasan itu pula kami sudah bisa berpartisipasi dalam KPBU. Kami sendang menunggu arahan Pak Dirjen PUPR, sekiranya SMF bisa berpartisipasi di bagian mana di skema KPBU. • Terdapat beberapa program lain seperti *housing financing guarantee* juga sudah ditanyakan oleh Bapak Haryo. Dalam program kerja kami memang masih cukup panjang, sesuai dengan peraturan OJK, harus bisa membuat institusi/perusahaan baru (tidak bisa langsung SMF). • Saat ini, kami juga melakukan berbagai macam inisiatif terkhusus segmen *non-fixed income* yang selama ini belum terlayani seperti *driver* transportasi *online*. Secara detil program-program *non-fixed income* akan kami laporan ke Kementerian PUPR secara khusus.
Kurniawan Priambada (Perum Perumnas)	• Akan disampaikan 2 (dua) hal dari sisi *supply* dan *demand*. Dari data-data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa FLPP masih menjadi primadona, dimana ini sejalan dengan data kami. Jika kuota FLPP habis, maka serapan pasar akan ikut menurun, walaupun kami juga coba dengan alternatif pembiayaan-pembiayaan lain, seperti BP2BT atau tadi sempat disampaikan kami juga bekerjasama dengan BPJSTK dan BTN sebagai penyalur juga mencoba alternatif pembiayaan melalui MLT (Manfaat Layanan Tambahan) yang berdasarkan Permenaker 17/2021. Hal ini menjadi alternatif untuk membantu masyarakat

Nama Penanggap	Pertanyaan/Tanggapan
	karena *plafond* bantuan uang muka sebesar Rp 150 juta dan *plafond* KPR hingga Rp 500 juta. Selain itu, perlu ke depan dilakukan perecananaan pembiayaan masyarakat informal, dimana potensi serapan dari segmen ini sangat tinggi. • Terkait pembiayaan perumahan dari kacamata kami, Perumnas sebagai *developer* perlu merencanakan pembiayaan dari sisi *supply* melalui kredit konstruksi yang murah. Kedepannya juga bisa berkolaborasi dengan PT. SMF. • Pembiayaan konstruksi ini sudah kami terima sebelumnya melalui mekanisme pasar, yang mana *cost of fund*-nya cukup tinggi cukup, ditambah dengan *inventory turnover* kami yang masih cukup panjang, ini juga cukup membenani *financial figure* yang kami dapat dari tahun ke tahun. Di tahun ini, kami sudah mulai sedikit-sedikit mengurangi biaya tersebut dengan adanya rastruktur keuangan yang kami lakukan dan kami ajukan juga dalam kajian untuk menunjang raperpres penugasan pada Perumnas, bahwa dalam pembiayaan konstruksi ini menjadi *concern* agar kami dapat men-*deliver* rumah dengan biaya usaha yang lebih efisien. • Selain itu kami juga sedang menjajaki kerjasama dengan Semen Indonesia Group untuk melakukan efisiensi di biaya konstruksinya. Ini juga yang nantinya akan menjadi peran pada ekosistem perumahan dalam pemenuhan target RPJMN, dimana terdapat poin *supply* pembiayaan murah untuk konstruksi yang harus dipikirkan bersama fungsi dengan *offtaker*. Fokus yang tidak kalah penting adalah terkait *raw material,* tanahnya agar bisa berkolaborasi dengan Bank Tanah.
Rudi (Perum Perumnas)	• Dari sisi informal, perlu adanya kejelasan regulasi dan *support* dari Kementerian PUPR maupun pihak perbankan. Pada pasar informal terdapat *demand* yang cukup besar namun sangat sulit direalisasikan dikarenakan tidak adanya standarisasi formal. Sehingga, terkadang perbankan memilih solusi untuk di-"formalkan", padahal itu agak sulit. Untuk itu, perlu dipertanyakan mengapa FLPP tidak berani memberikan angsuran kredit perumahan pada segmen informal, padahal hunian bukanlah benda bergerak. • Dari sisi pengadaan lahan, khususnya untuk regulasi pengadaan lahan di luar Jakarta, seharusnya ada *support* dari pemerintah daerah dalam pengendalian harga lahan, sehingga kadang-kadang program FLPP dari sisi pengadaan lahan terlalu tinggi dan menjadi tidak efisien. Jika regulasi pemeritntah daerah itu bagus harga tanah ini juga bisa ditekan, mengngat *cost* tanah cukup besar dari struktur biaya harga pokok (kebutuhan tanah di FLPP hampir 30-40%), itu juga menjadi masukan buat kami. Khusus wilayah DKI Jakarta, kita sama-sama tahu sangat sulit

Nama Penanggap	Pertanyaan/Tanggapan
	untuk mendapatkan lahan kecuali untuk proyek *high-rise* untuk rusun. Selama ini yang dikerjasamakan Perumnas adalah lahan-lahan milik negara atau BUMN lainnya. Perumnas masih membutuhkan beberapa dukungan dari Pemerintah, khususnya untuk pemanfaatan lahan BMN, karena terkadang yang menjadi kendala adalah status kepemilikan tanah tersebut, terlebih yang menyangkut aset. Jika regulasi pemanfataan lahan dapat diperjelas, saya rasa banyak lahan-lahan BMN lain yang tersebar di seluruh Jakarta dapat dimanfaatkan khususnya untuk pembangunan apartemen atau rusun subsidi di DKI Jakarta.
Mochamad Yut Penta (Bank BTN)	• Kalau kita memperhatikan evaluasi RPJMN, saya sangat tertarik dengan *fact finding* Pak Nurul, bahwa anggarannya meningkat, namun *volume target* tidak sebanding. Kedua, fakta bahwa hanya ada *one type of housing*, *one type of consumer*, *lack of construction politic control, and 90% in rural and non-metro area*. Saya langsung melihat bawah ini betul sekali, sangat *valid*, namun saya coba lihat apakah ini sudah didukung dengan *lead indicator* di RPJMN tersebut? Di RPJMN indikator output (*lead indicator*), nampaknya memang kita harus ditujukan kepada keempat area ini. • Sebagai contoh, *one type of housing* adalah rumah tapak semua, sebetulnya di *lead indicator* kita harusnya ada penetapan tata ruang yang mana *low-rise* building mana *high-rise* building, berapa alokasi tanah yang sudah ditetapkan untuk keduanya. Berikut dengan perangkat-perangkat *lead indicator* lainnya, termasuk program untuk bisa mendorong pembangunan *low-rise atau high-rise*. • Berikutnya adalah *one type of consumer*, yang terjamah hanya *formal salary* saja, bagaimana dengan *non-fixed income*nya? Kembali saya liat di *lead indicator*nya memang tidak ada juga. Seharusnya kita punya *lead indicator,* setidaknya ada program untuk *non-fixed income* di *lead indicator* tersebut. • Begitu juga dengan *lack of construction politic control*, sederhannya sudah berapa jumlah surveyor bersertifikasi yang bisa nanti programnya di*attach* dengan penyaluran KPR bersubsidi? Sistematika ini layaknya *management project or control*, nampaknya menurut hemat saya, harus diatur ulang supaya kita bisa mendapatkan angka *lack indicator*nya. • Kesimpulannya, *lead indicator* ini yang perlu kita *redefine,* dibuatkan programnya, kemudian kita turunkan. Siapakah yang akan melakukan tugas ini? Apakah perbankan, K/L, SMF, atau siapa? Ini yang saya liat memang tidak ada korelasi antara *fact finding* Pak Nurul dengan *lead indicatornya*. Saya kurang paham

Nama Penanggap	Pertanyaan/Tanggapan
	apakah *lead indicator* menjadi bagian program dari kementerian teknis terkait, seharusnya dengan adanya ekosistem perumahan ini, *lead indicator* disebarkan juga ke masing-masing *stakeholder.*
Herry Trisaputra Zuna (Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR)	• Jika kita lihat tampilan Pak Nurul, kita konsisten bahasanya dengan keempat krtikan penyediaan perumahan tadi memang itu yang kita hadapi. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Penta bahwa *lead indicator*nya tidak ada, menurut saya *lead indicator* itu ada. Misalnya, kalau ditanyakan rusun di perkotaan, maka *major project* 1 juta itu adalah rusun perkotaan. • Jika tadi SMF menyatakan bahwa sudah masuk ke ranah desil bawah dengan PMN, maka kita sepakati menjadi program kita di desil 1-2 dengan konsep serupa, housing micro finance. Lalu di desil yang lebih tinggi dilakukan dengan skema swadaya dengan BP2BT. • Prof. Arief mengingatkan untuk jangan lagi membuat program dengan sasaran segmen yang sama. Oleh sebab itu perlu pengelompokan yang jelas, misalnya Tapera fokus di ASN, FLPP fokus di non-formal,dst. • PT. SMF Bersama Bank BTN untuk membuat produk pembiayaan sebagai motor penggerak yang menyasar segmen berpenghasilan diatas Rp 8 juta. • Terkait dengan permasalahan tanah yang disebutkan oleh Perumnas, maka nanti bisa merapat ke BPN. • Temuan-temuan ini agar ditindak lanjuti oleh Dit PPP.
Haryo Bekti M. (Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan)	Kesimpulan moderator: • Bapak Adi telah menyampaikan dimana posisi BP Tapera dan target ke depannya seperti apa. Untuk strategi secara detil nanti akan kita lihat lagi rencananya seperti apa. • Ada beberapa hal yang membutuhkan *support* dari pemerintah, nanti kita lihat kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh Perumnas sehingga dpat bergerak untuk menjalankan RPJMN. • Hari ini kita ngambil komitmen Bank BTN siap kalau tiba-tiba ditugaskan untuk menyiapkan rasio *mortgage* terhadap GDP naik dari 2.9% ke 4%. • Setelah raker ini akan disiapkan beberapa hal dan juga nanti akan disampaikan ke masing-masing penanggap yang telah menyatakan komitmennya.

PANEL II: *HOUSING ECOSYSTEM*

Moderator: Fitri Ami Handayani selaku Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi Pembiayan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Potensi Permintaan dan Kemampuan Membayar per Kelas Pendapatan

Narasumber: Martin Daniel Siyaranamual selaku *Chief of Economist*, PT. SMF

- 5 (lima) poin penting yang dibahas pada pemaparan ini adalah:
  - (i) Basis data Susenas dan Sakernas: basis data menjadi krusial karena isu yang sedang dibahas dapat berubah ketika kedua data ini mulai digunakan. Sebagai contoh, jika berbicara mengenai 12 juta sebagai *housing backlog* yang sering menjadi patokan bersama, angka tersebut merupakan jumlah *backlog* total. Padahal, terdapat lapisan kelompok-kelompok tertentu yang sebenaranya tidak perlu diakomodir oleh Pemerintah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan awal bahwa angka 12 juta *housing backlog* adalah *overestimated*. Namun, terdapat kelompok-kelompoak yang mana negara harus sediakan dan berikan bantuan terkait hunian. Implikasi ke depannya akan berhubungan dengan kapasitas dan kebutuhan fiskal yang disediakan untuk program-program pembiayaan perumahan;
  - (ii) *Backlog* dan rumah tidak Layak Huni (RTLH);
  - (iii) Konversi pengeluaran menjadi pendapatan: BPS selalu mengeluarkan informasi terkait pengeluaran, tetapi informasi terkait pendapatan tidak pernah dipublikasikan;
  - (iv) Kerangka kerja studi ekosistem perumahan: hal-hal apa saja yang perlu untuk dipersiapkan dan dijadikan bukti saat menyusun *whitepaper* terkait Arah Kebijakan Perumahan Nasional;
  - (v) Rencana kajian berikutnya: *supply* perumahan.
- BPS memiliki dua *dataset* yang terkait dengan penghidupan masyarakat dan keadaan ketenagakerjaan Indonesia, yaitu survei sosial ekonomi nasional (**Susenas**) dan survei angkatan kerja nasional (**Sakernas**).
- Susenas: - Dilakukan dua kali dalam setahun, Maret dan September;
  - Sampel tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan total sampel 1,1 juta individu;
  - Mencakup seluruh penghidupan masyarakat Indonesia (kepemilikan rumah, jenis rumah, layak huni/tidak layak huni, jumlah anggota keluarga, dsb), akan tetapi tidak ada informasi terkait penghasilan.
- Sakernas: - Dilakukan dua kali dalam setahun, Februari dan Agustus;
  - Sampel tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan total sampel 793 ribu penduduk usia kerja.
  - Mencakup seluruh aspek ketenagakerjaan (sektor formal/informal), termasuk penghasilan, akan tetapi informasi terkait gig economy belum ada.

- Dalam internal ekosistem perumahan, konversi pengeluaran dilakukan dengan menggunakan informasi pengeluaran pada Susenas Maret 2020 menjadi pendapatan dengan menggunakan informasi yang ada di Sakernas Februari 2020. Untuk tahun berikutnya, konversi dilakukan dengan memperhatikan apakah ada perubahan di dalam salah satu *dataset*.
- ***Backlog* dan RTLH**: Rumah sebagai hak dasar dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi yaitu berupa (i) Kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah masih sangat besar, namun (ii) Kemampuan (daya beli) masih rendah, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Untuk itu, harus dipikirkan terkait pembagian kelas-kelas masyarakat ini. Studi *World Bank* telah membagi klasifikasi pendapatan masyarakat Indonesia ke dalam 5 kelas, yaitu (i) miskin; (ii) rentan; (iii) menengah baru (*emerging middle class*), (iv) menengah; dan (v) kaya. *World Bank* membagi kelas-kelas ini berdasarkan garis kemiskinan.
  - Kelas miskin merupakan masyarakat yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan;
  - Kelas rentan merupakan masyarakat yang pengeluarannya 1,5x dari garis kemiskinan;
  - Kelas menengah baru merupakan masyarakat yang pengeluarannya 3,5x garis kemiskinan;
  - Kelas kaya adalah masyarakat yang pengeluarannya 17x dari garis kemiskinan.

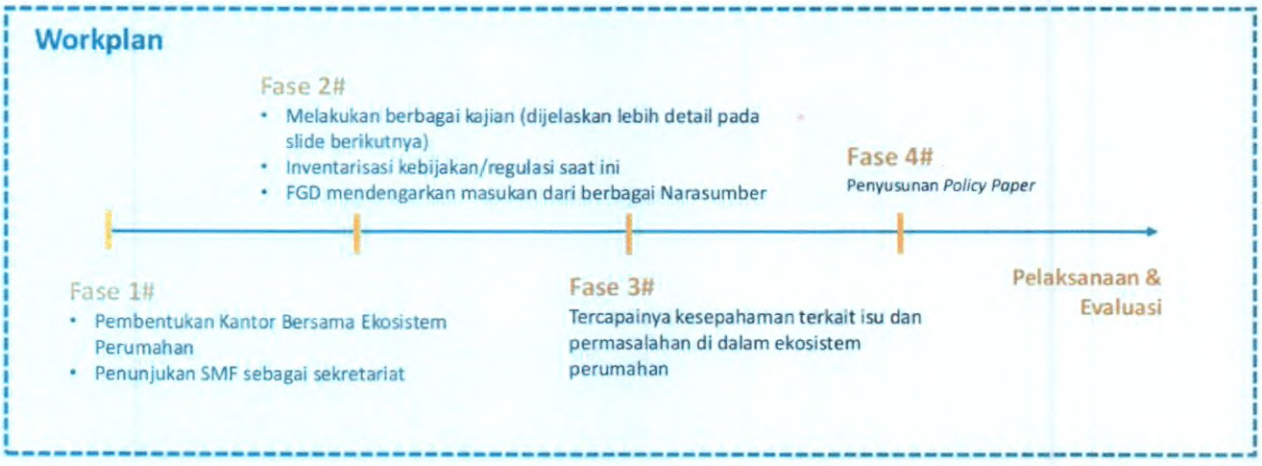
  Sedangkan dalam UU Perumahan, selalu dikaitkan menjadi pendapatan. Sehingga, harus dicari cara untuk mengkonversikan angka pengeluaran ini ke dalam angka pendapatan.
- Pada kondisi sosio-ekonomi dan kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia pada tahun 2020, keluarga yang tidak memiliki rumah mencapai 12,75 juta keluarga (*backlog* kepemilikan), dari jumlah tersebut, terdapat 6,88 juta keluarga yang tidak memiliki hunian (*backlog* kepenghunian). Jika dilihat objektivitas tujuan kebijakan perumahan yang lebih baik adalah bukan angka 12,75 juta yang menjadi isu, namun jauh di bawah angka tersebut.
- Sedangkan pada grafik di sisi kanan, dijelaskan tentang bagaimana angka *backlog* tersebut dibagi sesuai kelas-kelas pendapatan yang ada yang disebut sebagai desil. Dimana populasi dibagi ke dalam 10 (sepuluh) kelas yang sama besarnya, sebagai contoh desil 1 adalah 10% pertama penduduk Indonesia yang paling miskin, desil 10 adalah 10% penduduk Indonesia terkaya, dan seterusnya.
- Pembagian **isu *backlog* kepemilikan** dapat dipecah berdasarkan kabupaten/kota, namun isu *backlog* ini terjadi dimana masyarakat paling kaya dan paling miskin di provinsi tersebut, sehingga perlu dibuat pendetilan fokus pada desil 1 hingga desil 5. Namun, tidak disarankan untuk dilakukan hingga tingkat kecamatan karena kualitas data sampel akan turun jika bergerak ke sesuatu yang lebih detil.
- Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur adalah tiga provinsi dengan backlog kepemilikan paling besar. Untuk Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi dengan backlog kepemilikan tertinggi. Distribusi backlog per provinsi ini sejalan dengan proses urbanisasi yang terjadi di Indonesia.
- Kebutuhan hunian per provinsi (**isu *backlog* kepengehunian**) serupa dengan isu *backlog* kepmilikan di mana distribusui *backlog* per provinsi ini sejalan dengan prosese urbanisasi yang terjadi di Indonesia.

- Jika diperhatikan, terkait isu *backlog* kepemilikan maupun kepenghunian, antar desil tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Namun jika berbicara mengenai akses rumah layak huni, maka hasilnya akan berbeda. Mengambil satu indikator, sebagai contoh kepemilikan *septic tank*, pada desil pertama (10% masyarakat Indonesia termiskin) terdapat kurang dari 60% rumah yang terkoneksi dengan *septic tank*. Jika kita liat desil ke-10, maka terdapat lebih dari 90% rumah yang sudah terkoneksi dengan *septic tank*. Artinya, pendapatan menjadi krusial dalam menentukan apakah sebuah keluarga bisa mendapatkan rumah yang layak huni atau tidak.
- **Konversi Pengeluaran Menjadi Pendapatan**: Rata-rata penghasilan pekerja per bulan per desil. Data dari Sakernas menunjukan bahwa terdapat pekerja dengan pendapatan 350.000 per bulan, namun ada juga yang memiliki penghasilan 200 juta per bulan.
- Ketika sudah mendapatkan data mengenai pengeluaran dan informasi mengenai pendapatan, maka dikonversika pengeluaran tersebut menjadi pendapatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

MEAN PENGELUARAN PER RUMAH TANGGA PER BULAN			
	Min	Mean	Max
Desil 1	135.619	1.374.116	1.788.581
Desil 2	1.788.586	2.049.585	2.297.012
Desil 3	2.297.021	2.525.165	2.751.205
Desil 4	2.751.209	2.984.206	3.221.248
Desil 5	3.221.252	3.472.972	3.735.436
Desil 6	3.735.438	4.034.905	4.353.766
Desil 7	4.353.786	4.733.758	5.161.036
Desil 8	5.161.074	5.700.097	6.333.286
Desil 9	6.333.295	7.296.964	8.578.036
Desil 10	8.578.083	13.526.517	20.340.692

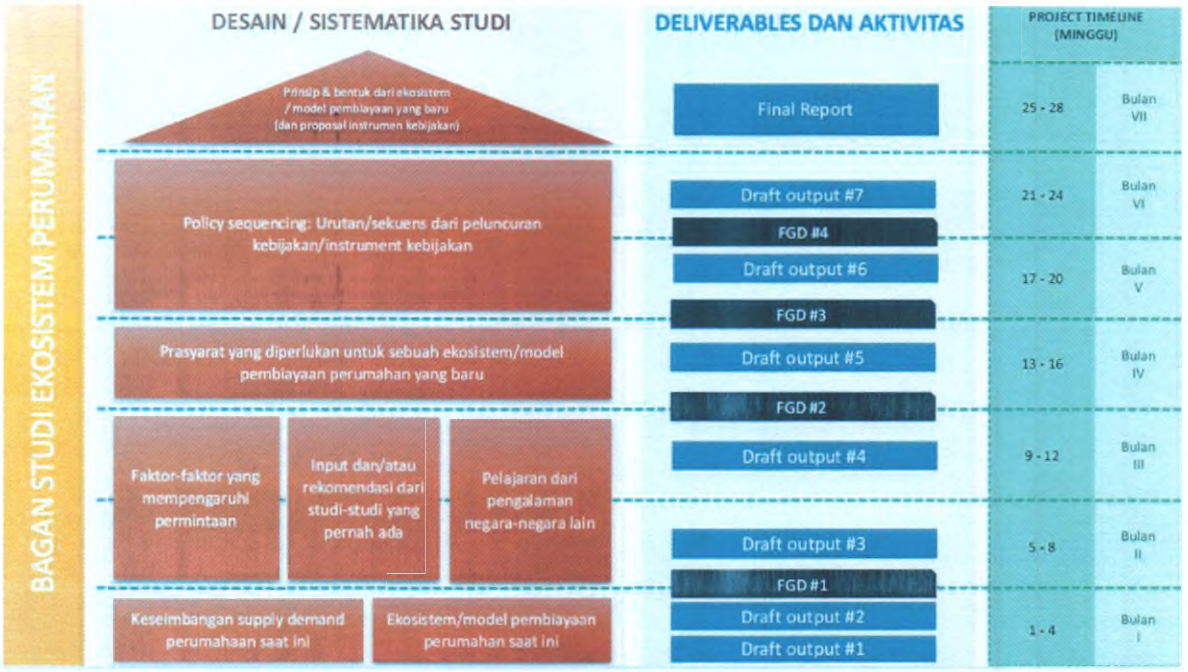
MEAN PENDAPATAN PER RUMAH TANGGA PER BULAN			
	Min	Mean	Max
Desil 1	137.924	730.250	1.048.498
Desil 2	1.048.499	1.406.994	1.758.765
Desil 3	1.758.783	2.073.480	2.400.395
Desil 4	2.400.395	2.793.390	3.001.297
Desil 5	3.001.297	3.579.030	4.000.268
Desil 6	4.000.268	4.503.225	5.000.729
Desil 7	5.000.730	5.659.180	6.004.750
Desil 8	6.004.757	7.161.215	8.006.026
Desil 9	8.006.027	9.565.606	11.707.653
Desil 10	11.707.708	18.900.253	297.129.792

- **Kerangka kerja Ekosistem Perumahan**: dari informasi yang sudah tersedia dan diolah, PT. SMF mencoba untuk mengejawantahkan tugas dan amanah yang sudah diberikan oleh Kementerian PUPR. Pada dasarnya, PT. SMF mencoba untuk menyusun kajian-kajian yang dapat digunakan untuk *input whitepaper* untuk Arah Kebijakan Perumahan di Indonesia.



- Dimulai dari paling bawah, adalah keseimbangan antara *supply* dan *demand* Perumahan serta model pembiayaan perumahan saat ini. Antar *stage* isu terdapat sesi diskusi atau pembahasan antara

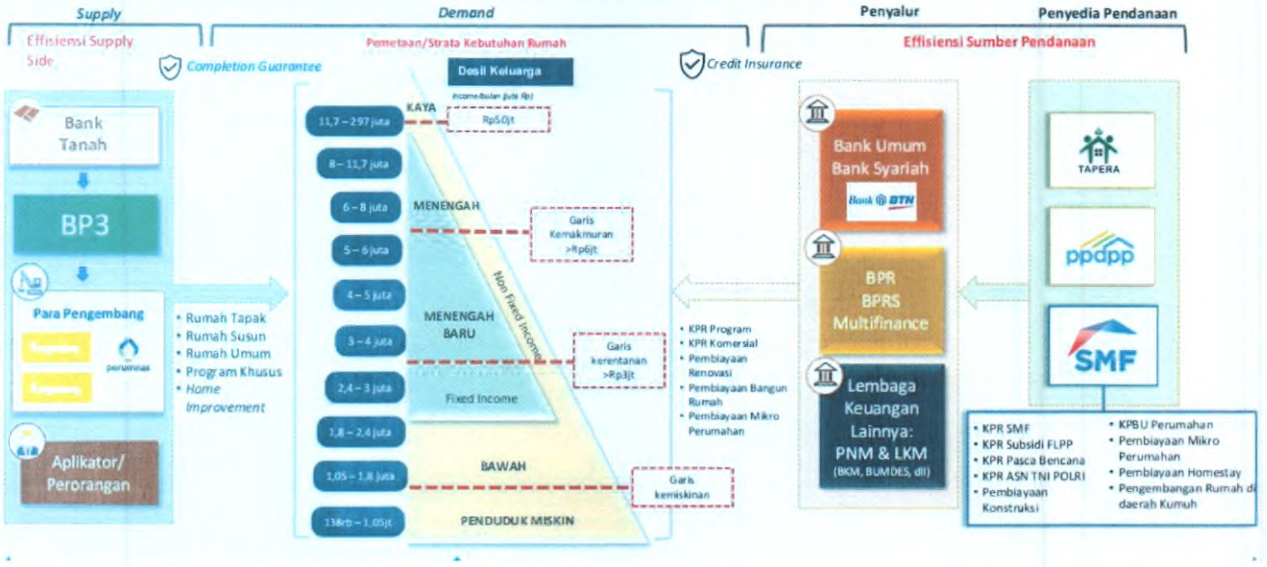
stakeholders mengenai isu-isu tersebut. Hasil akhirnya adalah *whitepaper* terkait Arah Kebijakan Perumahan Indonesia.



- *Focus Group Discussion* (FGD) pertama rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021. Dengan tujuan sebagai berikut:
  - *Kick off* proses pembentukan *whitepaper*;
  - Menciptakan persamaan persepsi terkait kebutuhan akan ekosistem di antara *key stakeholders* perumahan;
  - Upaya menciptakan kelompok kerja bersama (Pokja) yang beranggotakan *key stakeholders*;
  - Forum untuk mendiskusikan atau menyamakan berbagai konsep, definisi, data, informasi, dan tantangan dan hambatan dalam praktek yang ada saat ini; serta
  - Terbentuknya kesepahaman yang tertuang dalam *whitepaper* terkait isu-isu sektor perumahan.
- Materi pada FGD pertama ini meliputi:
  - Statistik perumahan *vs* jumlah keluarga berdasarkan kabupaten dan provinsi;
  - Distribusi demografi Indonesia (spasial, kelompok pendapatan, jenis pekerjaan);
  - Tinjauan terhadap daya beli masyarakat terhadap rumah;
  - Tinjauan terhadap keterkaitan hulu-hilir industri perumahan dan ekspor-impor sektor perumahan;
  - Jumlah pengembang dan lembaga penunjang dan tipologi perumahan dan pembiayaan yang tercipta saat ini;
  - Proyeksi demografi dan kebutuhan perumahan sampai tahun 2030;
  - Kebijakan yang telah ada dalam 30 tahun terakhir serta efek yang ditimbulkan, termasuk alokasi APBN untuk perumahan dan realisasinya.

- Peserta yang diakomodasi dalam FGD ini adalah Kementerian Keuangan (DJKN, BKF, DJA, DJPB, DJPPR), Kementerian PPN/Bappenas, DJPI PUPR, BP Tapera, Perum Perumnas, Bank BTN, serta PT. SMF.

PIRAMIDA DALAM EKOSISTEM PERUMAHAN DI INDONESIA



** garis pada piramida masih dapat didiskusikan*

- **Rencana kajian berikutnya di tahun 2022 adalah terkait *supply* perumahan**. Tujuan utama kajian adalah menganalisis jumlah *supply* rumah yang tersedia dan distribusi berdasarkan letak geografis, melakukan proyeksi pertumbuhan *supply* rumah, menganalisis *supply-demand mismatch*, serta menganalisis efek faktor-faktor sosio-ekonomi terhadap penyediaan rumah.

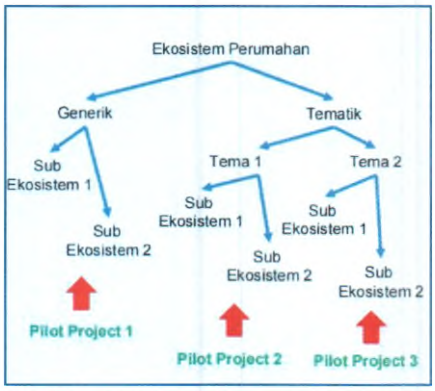
Pendetilan Ruang Lingkup Sistem dan Subsistem Ekosistem Perumahan

Narasumber: Ary Rahman Wahyudi selaku Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, DJPI, Kementerian PUPR

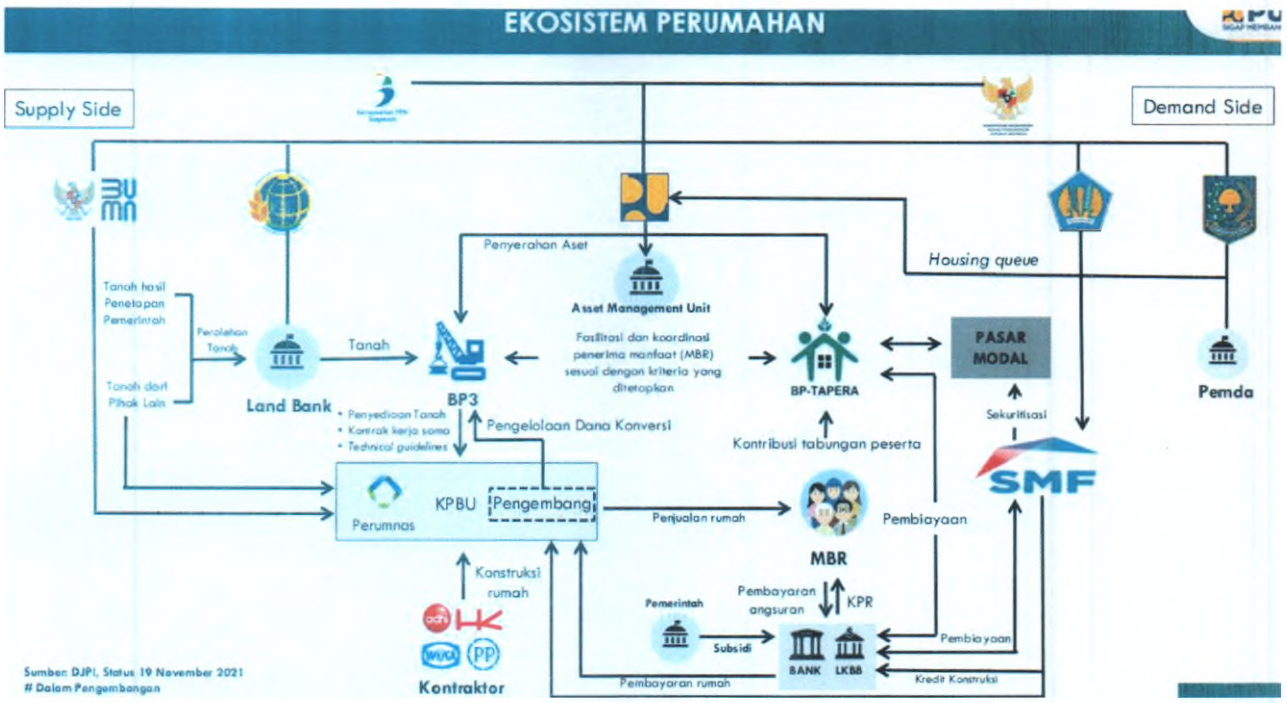
- Kajian mengenai Ekosistem Perumahan masih dalam proses pendalaman dan sangat membutuhkan masukan dari peserta rapat terkait dengan apa seharusnya yang ada dalam ekosistem perumahan ini. Latar belakang: amanat isu dan tantangan
- Latar belakang dikembangkannya Ekosistem Perumahan adalah sebagai berikut:
  - Amanat RPJMN 2020-2024 dalam pemenuhan target akses hunian 11 juta rumah tangga hingga tahun 2024.
  - Terbatasnya akses pembiayaan perumahan oleh Mayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  - Pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian lingkungan
  - Pertumbuhan rumah semakin mengarah ke luar kawasan perkotaan (fenomena *urban sprawl*), sehingga waktu tempuh semakin lama;

- Pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau serta berwawasan lingkungan (mendukung inisiatif hijau);
- Mendorong iklim industri material konstruksi/bangunan yang terjangkau dengan kualitas mumpuni, harapannya mampu menekan harga rumah; dan
- Tata kelola pemerintahan di sektor perumahan, baik di sisi *supply* maupun *demand*, dirasa belum optimal dalam percepatan pencapaian target yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

- **Ekosistem Perumahan** adalah mekanisme dan proses yang dibentuk atas hubungan timbal balik antara para pemangku sektor perumahan, baik disisi *supply* maupun *demand*, dalam penciptaan iklim investasi atau iklim usaha yang kondusif (efektif dan efisien). Ekosistem perumahan dianggap penting karena:
  - Dalam peningkatan kinerja dan percepatan implementasi kebijakan, ekosistem perumahan merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah, di sisi *supply* maupun *demand*, dalam penciptaan iklim investasi atau iklim usaha yang kondusif, khususnya di bidang perumahan;
  - Dalam ekosistem perumahan, pemerintah dapat berperan sebagai *enabler environment*, dalam hal ini sebagai regulator, fasilitator, serta promotor;
  - Implementasi konsep sirkuler (*Closed Loop Economy)*, dapat mendorong mekanisme/model bisnis (sektor perumahan) yang lebih berkelanjutan (*sustainable*), yang dapat berimplikasi langsung terhadap kualitas lingkungan (*environmental quality*), kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), dan keadilan/kesetaraan sosial (*social equity*);
  - Ekosistem perumahan (konsep *Closed Loop*), dapat mendorong perbaikan sistem layanan (*service system*) contoh diantaranya perbaikan/penyederhanaan regulasi dan lembaga, serta perbaikan irisan tugas dan fungsi antar *stakeholder* perumahan.
- **Apa rupa produk akhir dari Ekosistem Perumahan?** Telah dilakukan pengkajian terkait letak Ekosistem Perumahan ini, apakah di level Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, atau kah Keputusan Direktur Jenderal. Di mana semakin tinggi maka akan semakin bersifat tidak fleksibel, akan menjadi sangat rigid dalam menyikapi perubahan padahal Housing Ekosistem bersifat sangat dinamis. Sehingga diusulkan pada produk akhirnya, hasil kajiannya akan berupa Keputusan Menteri. Dipertimbangkan pula, bila penetapan berasal dari maka Direkrotar Jenderal Perumahan sebagai sisi supply dan sisi pembiayaan dapat terayomi. Pada struktur ini terdapat 2 (dua) konsep Ekosistem Perumahan, pertama adalah generik dengan pembagian sub ekosistemnya dan kedua bersifat tematik. Pada masing-masing ekosistem akan dilakukan *pilot project* dengan konteks perumusan kebijakan.

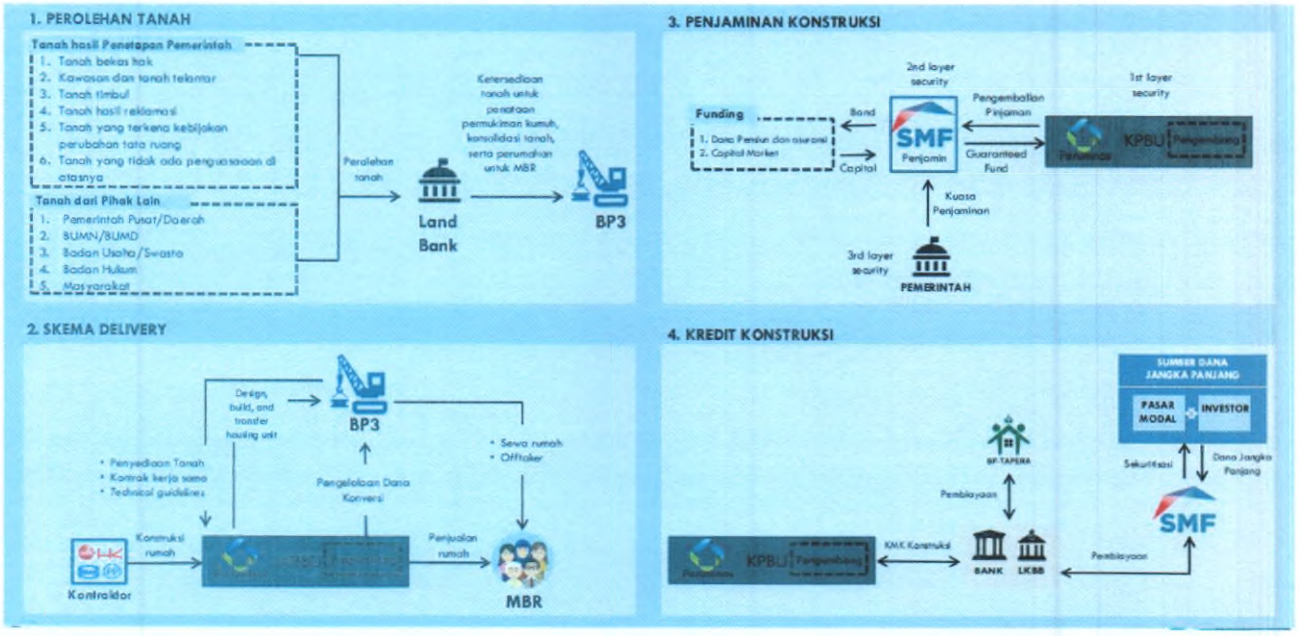


- **Ekosistem Perumahan (generik):**

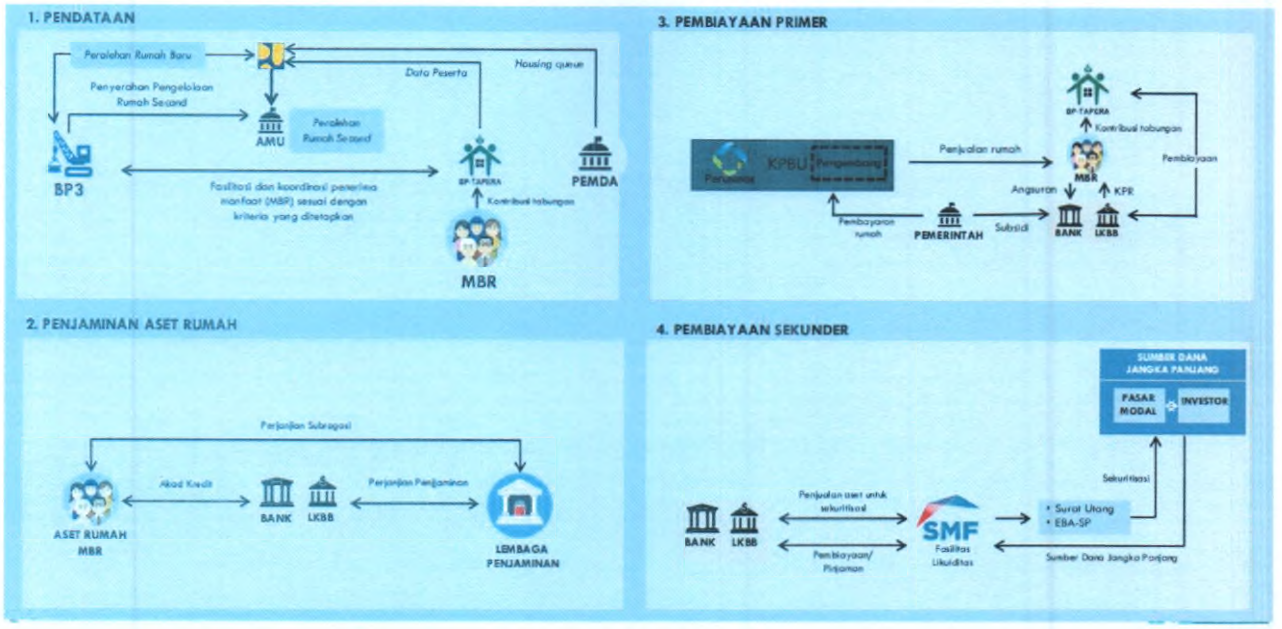


Ekosistem generik sudah sering digunakan oleh K/L atau BUMN yang terlibat langsung dalam Ekosistem Perumahan. Pada *supply side* terdapat peran dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN, dimana Kementerian ATR/BPN akan mengemban konsep kelembagaan *Land Banking* untuk penetapan tanah. *Land Banking* akan digunakan oleh BP3 selaku *Contracting Agency* dalam kegiatan-kegiatan KPBU. Sedangkan, Perumnas dapat diposisikan sebagai *paying agent* atau *joint venture* dengan para pengembang. Dari sisi *demand* terdapat peran lembaga seperti BP Tapera, PT. SMF, Pemda, serta penerima manfaat MBR maupun bank. Dari Ekosistem Perumahan Generik, dibagi lagi ke dalam beberapa Sub-ekosistem Perumahan, yaitu:

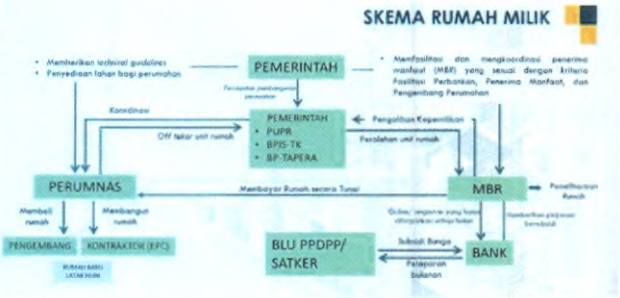
1. **Sub-ekosistem Perumahan (sisi *supply*).** Beberapa *key activities* sisi *supply* meliputi:



2. Sub-ekosistem Perumahan (sisi *demand*). Beberapa *key activities* sisi *demand* meliputi:

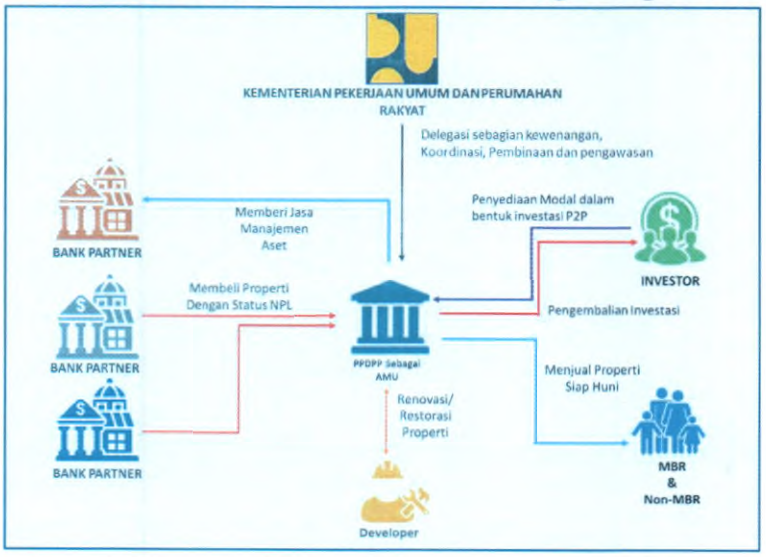






Dalam skema rumah sewa ini Perumnas bisa berperan dalam memberi rumah dari pengembang ataupun berkontrak untuk membangun rumah tapak ataupun hunian bertingkat. Untuk skema rumah milik terdapat tambahan BLU PPDPP/Satker dan produk pembiayaan perumahan yang akan dihubungkan ke bank yang nantnya dapat dimanfaatkam oleh MBR.

3. Sub-ekosistem Perumahan: BP3 sebagai fungsi *Asset Management Unit* (AMU)

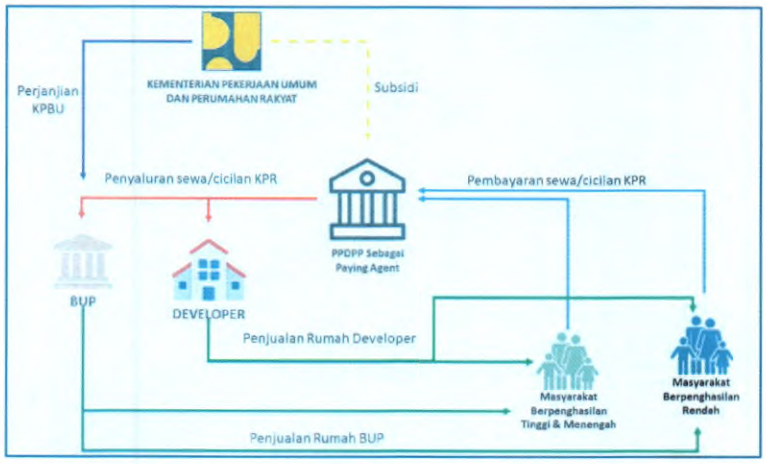


- Jika terdapat aset dengan status NPL yang dimiliki bank, maka aset tersebut akan dibeli BP3 lewat pengadaan aset.
- Kemudian, BP3 akan menawarkan kepada pengembang dari sisi *demand* untuk melakukan renovasi atau restorasi sehingga layak huni kembali. Kebutuhan dana untuk membeli, merenovasi dan restorasi dapat memanfaatkan dana investasi dari

investor yang berada di sisi *demand* secara paralel, denganmenawarkan imbal hasil investasi tersebut yang berasal dari penjualan rumah.

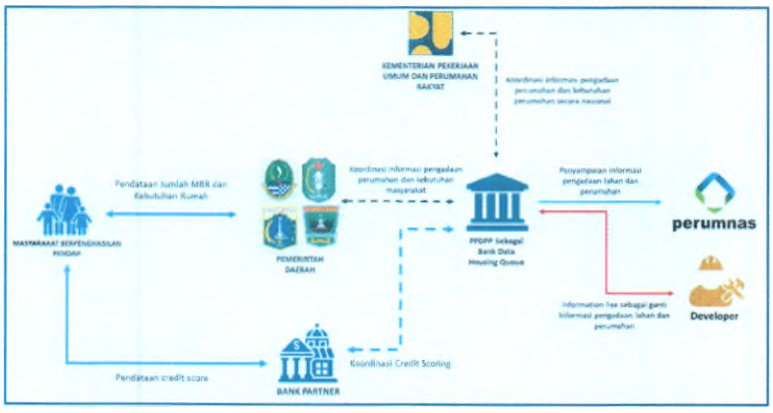
- Pada akhirnya, masyarakat, MBR atau Non-MBR, yang membutuhkan rumah akan ditawarkan rumah tersebut dengan skema pembayaran yang menyesuaikan status pembeli, sehingga MBR dapat menikmati beberapa kemudahan dalam membeli rumah.

4. Sub-ekosistem Perumahan: BP3 sebagai fungsi *Paying Agent*



- BP3 akan bertindak sebagai penyalur pembiayaan rumah layak huni bagi MBR dan non-MBR, menjadi perantara BUP/Kontraktor yang membangun rumah kepada masyarakat. Selain itu, BP3 akan memfasilitasi kemudahan pembayaran rumah dan menjadi salah satu solusi kebutuhan RPJMN 2020-2024 akanakses pembiayaan perumahan dan fasilitas pembiayaan yang ramah MBR.

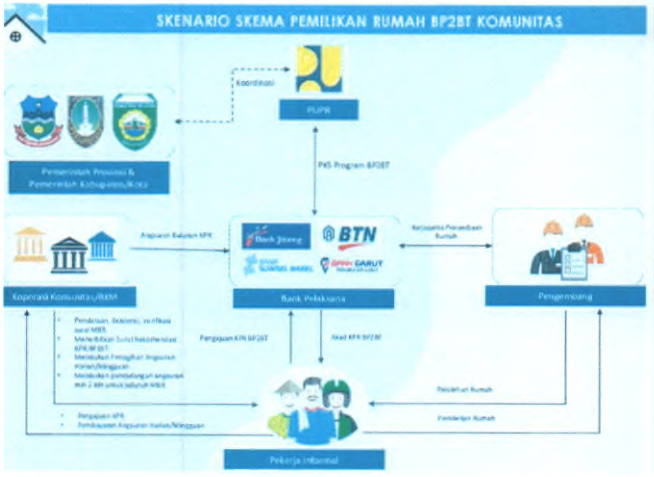
5. Sub-ekosistem Perumahan: BP3 sebagai fungsi Bank Data *Housing Queue* Nasional



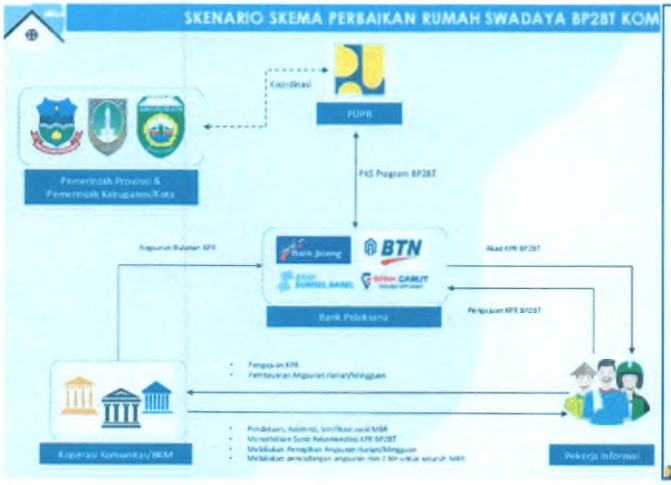
- BP3 akan bertindak sebagai pengumpul data atau Bank Data dari informasi-informasi *Housing Queue* dalam skala nasional.
- BP3 akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang melaksanakan pengumpulan data primer dan mengolah data ini menjadi data-data informasi kebutuhan perumahanyang sudah disesuaikan dengan jumlah MBR.
- Selain itu, bank partner akan berkoordinasi juga dengan BP3 dalam masalah *credit scoring*, untuk menilai kemampuan pembayaran MBR. Dari data yang sudah disempurnakan tersebut, maka akan diteruskan kepada Perum Perumnas untuk pengambilan keputusan pengadaan lahan dan perumahan.
- BP3 juga bisa mengakomodir kebutuhan *developer* secara komersial jika mereka juga ingin memiliki data tersebut dengan imbal hasil berupa *information fee* (*grafik di halaman berikutnya*).

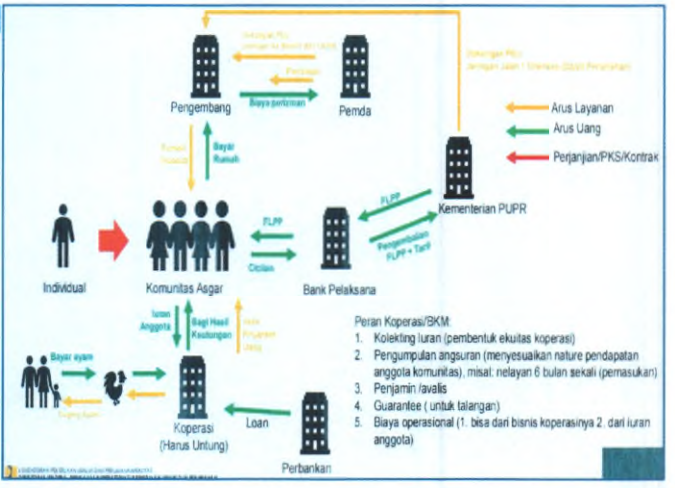
- **Ekosistem Perumahan (Tematik):**

  1. **Rumah Terjangkau Berbasis Komunitas (*Community Based Affordable Housing*)**

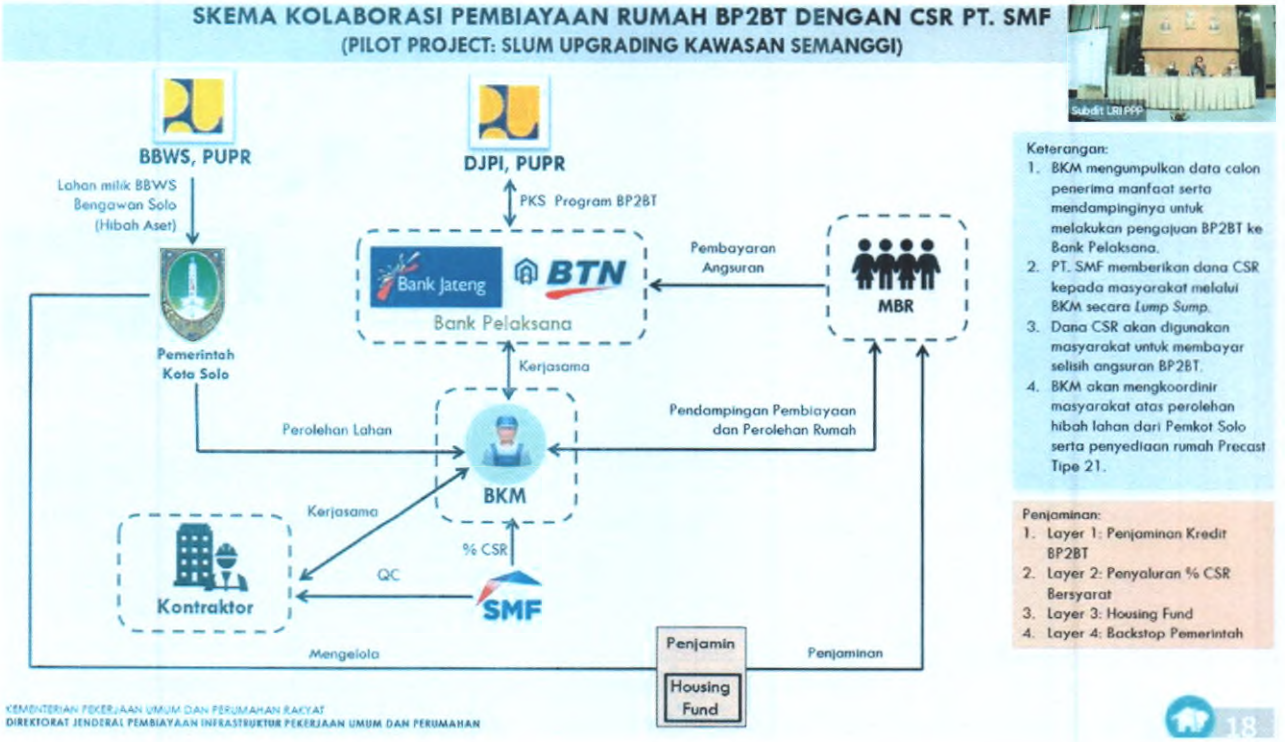








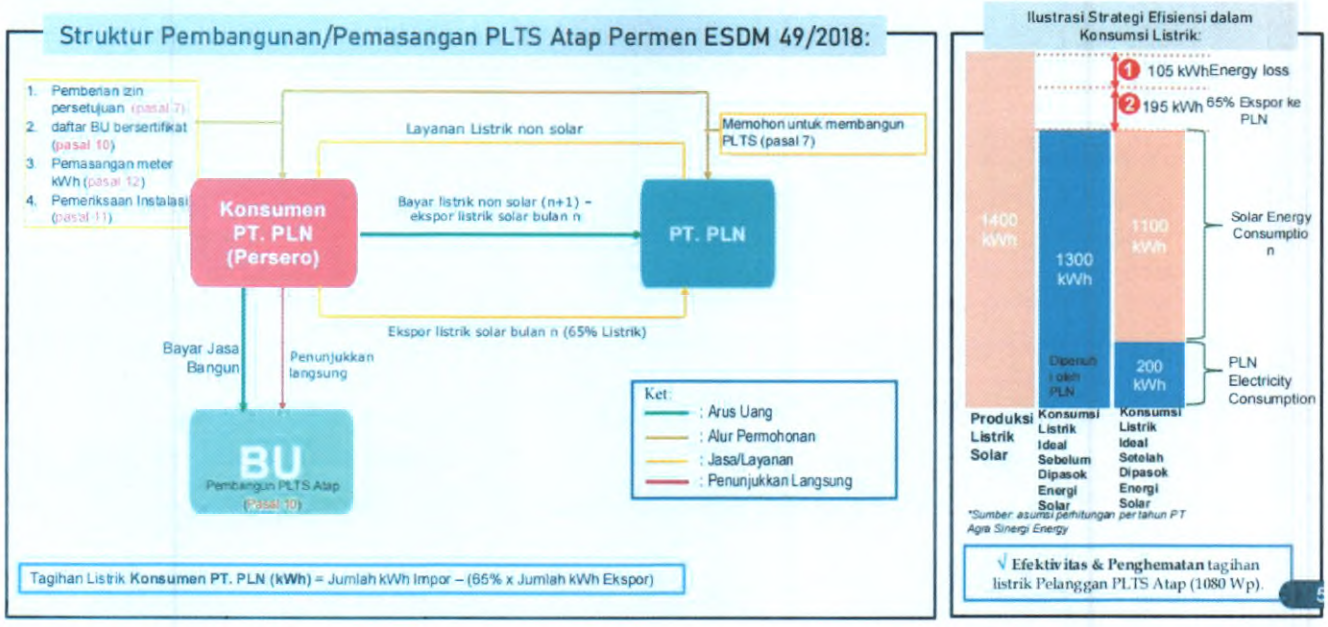
Slum upgrading Kawasan Semanggi sebagai percontohan (*pilot project*):



2. Rumah Terjangkau dan Berwawasan Hijau/Lingkungan (*Green Affordable Housing)*

Ide besar yang ada adalah membentuk rumah subsidi memiliki akses pada ruang-ruang hijau.

Struktur Proyek Pembangunan PLTS Atap Permen ESDM 49/2018



- Di bawah adalah rekapitulasi beberapa lokasi *pilot project* untuk merumuskan Ekosistem Perumahan yang generik maupun tematik:
  - *Green Affordable Housing* dengan BP2BT di Palembang, Musi Rawas, Lubuk Linggau;
  - *Slum Upgrading* dengan KPBU di Kedaung Tangerang;
  - *Green Affordable Housing* dengan BP2BT di Semarang; dan
  - Kolaborasi *Slum Upgrading* dengan BP2BT di Semanggi, Solo.
- Terdapat beberapa ide besar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan PUPR dalam rencana pengembangan Ekosistem Perumahan tematik ke depannya. Pertama, ide perumahan sebagai pembangkit listrik yang mendukung gerakan *Green Initiatives (energy economics)*, dimana rumah subsidi dalam skala kawasan mampu menghasilkan listrik dan dapat diekspor ke *grid* PLN. Kedua, rumah hijau dapat ditanamkan pohon-pohon yang produktif, diantaranya adalah konsep *urban farming* yang akan meng*capture agriculture economics* berupa hasil penjualan produk-produk pertanian.

Peran *Stakeholders* dalam Memastikan Ketepatan Sasaran dan Kualitas Konstruksi Perumahan

Narasumber: Samson Sibarani selaku Kepala Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, DJPI, Kementerian PUPR

- Pada rapat ini, kami Ingin mendapatkan masukan bagaimana memastikan ketepatan sasaran dan bagaimana kita mendefinisikan ketepatan sasaran
- Jika kita lihat praktik dan temuan saat ini semakin banyak permasalahan yang menyebabkan MBR penerima bantuan itu tidak tepat sasaran, selalu ada celahnya. Sehingga jika kita merumuskan dalam suatu kebijakan, yang selalu dilakukan adalah persyaratan untuk mencegah itu akibatnya semakin lama semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh MBR tersebut. Sehingga alangkah baiknya dari awal kita bisa mendefinisikan ketepatan sasaran melalui pengoptimalan peran dari masing-masing *stakeholder*.
- **Tantangan pembiayaan perumahan**
  1) *Affordability*: **tersedianya rumah untuk semua golongan masyarakat (desil). Tingkat bunga yang relative rendah,** *intermediary cost* **yang efisien**.Tidak semua masyarakat dapat membeli rumah tanpa bantuan pemerintah. Masih terdapat masyarakat Indonesia yang berpenghasilan cukup rendah. Maka dari itu dalam rangka meningkatkan *affordability* masyarakat, pemerintah menyalurkan kemudahan bantuan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah dapat menyalurkan kemudahan bantuan ini kepada orang yang tepat dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
  2) **Industrialisasi Material Konstruksi: industrialisasi material konstruksi rumah murah, atau yang mampu menekan biaya konstruksi**. Di lain sisi, jika kita melihat kualitas rumah saat ini yang difasilitasi untuk MBR masih banyak konstruksinya yang kurang benar dan biaya konstruksinya meningkat setiap tahun. Karena dari sisi pembangunan perumahan untuk MBR ini masih menggunakan teknologi yang konvensional. Maka dari itu bagaimana kita melakukan Industrialisasi pembagunan perumahan untuk MBR. Karena memang kalau kita lihat dari total unit rumah, perumahan untuk MBR ini jumlahnya sangat kecil tapi jika kita kalikan dengan target setiap tahunnya, maka bisa kita dorong pembangunan perumahan ini ke arah industrialisasi.
  3) *Accessibility*: **setiap keluarga dapat mengakses rumah. Untuk setiap penjaminan/***guarantee* **fund/ pembuatan program khusus FLPP** *non-fixed income* **KPR ASN-TNI POLRI pembiayaan mikro perumahan.** Masyarakat dalam mengakses kemudahan dan bantuan tidak gampang karena persyaratan dari sisi Lembaga keuangan maupun dari sisi kesatkeran masih cukup banyak dokumen-dokumen yang perlu dipenuhi.
  4) **Pemukiman kumuh &** *city planning*: **KOTAKU, KPBU Rusunawa.** Dari sisi penghunian rumah, masih terdapat lingkungan perumahan yang kumuh (*slum area*), sehingga perlu dilakukan perbaikan rumah baik dari sisi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Jadi ini merupakan program yang perlu di dorong.
  5) *Urban Sprawling*: **pertumbuhan rumah menjangkau hingga diluar batas kawasan perkotaan.** Pembanguan rumah semakin jauh dari kawasan perkotaan. Apabila dilihat dari sisi Jarak tempuh semakin jauh dan memakan waktu, padahal idealnya waktu tempuh antara tempat

tinggal dan tempat beraktivitas itu maksimal satu jam, sehingga apabila di atas itu, dari sisi menghuni di luar kota itu menjadi semakin tidak efisien lagi.

6) **Housing Carreer: Rusunawa-*long*lease-milik/ *type* 21-36-72 dst): TOD *long-lease*.** Pemenuhan rumah dilihat dari sisi kecukupan ruang, tipe- tipe rumah yang dimiliki masyarakat juga harus disesuaikan dengan kemampuannya. Misalnya dengan kemampuannya saat ini masyarakat tersebut hanya dapat membeli rumah yang kecil atau apabila kemampuan masyarakat tersebut meningkat, masyarakat tersebut dapat melakukan perubahan dari rumah yang kecil menjadi rumah yang besar atau membeli rumah yang lebih besar. Maka dari itu, *Housing stock* perlu jadi perhatian juga. Sehingga apabila masyarakat ingin melakukan perpindahan dari rumah yang kecil ke yang besar sudah tersedia aturan-aturan mengenai *Refresh mortgage* nya.

- **Adapun kendala terkait dengan keterjangkauan rumah antara lain:**

1) Sisi *demand:*
   - Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*);
   - Adanya praktik jual beli rumah di masyarakat, sehingga harga tidak dapat dikontrol;
   - Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan;
   - Kenaikan harga rumah lebih tinggi dibanding kenaikan penghasilan;
   - Harga rumah meningkat setiap tahunnya disebabkan adanya kenaikan bahan material maupun harga tanah;
   - Kurangnya data kebutuhan perumahan berbasis *by name by address*;
   - Biaya bunga pembiayaan perolehan rumah yang tinggi.
2) Sisi *Supply:*
   - Kurang berkembangnya industrialisasi material konstruksi di Indonesia;
   - Keterbatasan lahan perumahan;
   - Dari segi tata ruang, peruntukan lahan untuk perumahan masih minim;
   - Biaya bunga modal kerja/konstruksi yang tinggi;
   - Terbatas dan tidak meratanya tukang dan pengawas pembangunan yang terampil;
   - Ketersediaan tukang yang terampil belum tersebar di seluruh wilayah di Indonesia

- **Rantai Pasok Perumahan sisi *supply***

1) Pengadaan lahan

   Dari sisi *supply*, masalah pertanahan masih menjadi tantangan. Contoh kasus rumah swadaya, kita masih mensyaratkan sertifikat sedangkan proses perubahan menjadi sertifikat hak milik itu membutuhkan proses yang cukup lama sehingga ini menjadi tidak responsive dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Selain itu berikut beberapa masalah yang dihadapi terkait pengadaan lahan :
   - Lahan di perkotaan semakin terbatas;
   - Harga lahan semakin meningkat;
   - Keterbatasan akses perumahan dengan pusat kegiatan masyarakat;

- Perencanaan perumahan dan PSU (listrik, air, dll) tidak sinkron, seharusnya pengadaan terhadap PSU ini sudah dilakukan t-1 karena terkait dengan pengalokasian anggaran dari perusahaan penyedia layanan.

Beberapa solusi yang bisa ditawarkan:

- Percepatan pembentukan Bank Tanah;
- Optimalisasi Fungsi BP3 sebagai *land banking* untuk perumahan dan kerjasama dengan pengembang, agar harga tanah dapat terkontrol;
- Pemanfaatan Lahan BUMN/BUMD/BMN/BMD yang terbengkalai untuk pembangunan perumahan; serta
- Optimalisasi ruang dengan membangun rumah vertikal.

2) Perencanaan dan Desain

Dari sisi perencanaan dan desain, perencanaan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan atau kaidah yang telah diatur dalam regulasi, misalnya hunian berimbang. Sampai saat ini pengembang masih cenderung mengabaikan konsep hunian berimbang sehingga kompensasi terhadap pelanggaran ini perlu kita tingkatkan. Beberapa masalah lain yang dihadapi meliputi:

- Rendahnya pengawasan hasil pembangunan rumah dengan perencanaan;
- Hunian berimbang belum dilaksanakan

Beberapa solusi yang dapat ditawarkan:

- Optimalisasi pemanfaatan SiPetruk;
- Mengutamakan kualitas konstruksi bangunan dari estetika desain rumah;
- Sertifikasi pelaksana konstruksi;
- Meningkatkan peran pemda dalam mengedukasi dan mengontrol pelaksana konstruksi terkait kualitas rumah baik rumah tapak maupun rumah vertikal.

3) Perizinan

Dari sisi perizinan, sampai saat ini pemda masih menganggap perizinan sebagai *income*, seharusya perizinan itu sebagai alat pengendalian. Perbedaan pendapat ini yang perlu diselaraskan.Beberapa masalah yang masih dihadapi meliputi:

- Terbitnya perizinan tidak seusai RDTR/RTRW;
- Masih terdapat biaya ilegal dalam perizinan;
- Masih terdapat kendala dalam penerbitan PBG di daerah;
- Masih rendahnya insentif perizinan;
- Pembangunan rumah susun bagi MBR

Beberapa solusi yang ditawarkan meliputi:

- Percepatan proses perizinan dengan *Sistem Online Single Submission* (OSS);
- Insentif perizinan bagi pemda yang melaksanakan proses perizinan dengan baik dan cepat;
- Relaksasi perizinan

4) Konstruksi Bangunan;

Terkait dengan konstruksi rumah, pembangunan rumah di Indonesia sebagian besar dilakukan secara manual sehingga kualitasnya tidak terstandar dengan baik dan masyarakat masih *complain* dengan rumah yang dibangun. Sehingga masih melakukan renovasi sebelum melakukan penghunian. Beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi:

- Kualitas konstruksi tidak sesuai dengan peraturan perundangan;
- Belum adanya industrialisasi material konstruksi;
- Terbatasnya tukang dan pengawas konstruksi terampil;
- Pengawasan

Beberapa solusi yang ditawarkan meliputi:

- Standardisasi bahan bangunan berdasarkan wilayah;
- Sertifikasi tukang dan pengawas bangunan;
- Mempercepat pelaksanaan Arsap;
- Pendanaan Tapera untuk KMK konstruksi;
- Subsidi bunga KMK konstruksi untuk pembangunan rumah MBR.

- **Rantai pasok perumahan sisi** *demand*

1) Perolehan Rumah

Skema yang ada saat ini belum mengarah pada skema sewa beli maupun pembangunan rumah swadaya. Meskipun skema untuk rumah swadaya sudah mulai namun masih belum memadai dan dilirik oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membeli rumah dari pengembang dimana biaya transaksinya lebih tinggi. Permasalahan yang dihadapi:

- Sumber pembiayaan masih mahal;
- Biaya transaksi jual beli dan KPR tinggi;
- *Mismatch* pendanaan dan pembiayaan perumahan;
- MBR sektor informal kurang *bankable*;
- *Gap* penghasilan dan harga jual rumah semakin tinggi.

Beberapa solusi yang ditawarkan meliputi:

- Peningkatan akses MBR sektor informal melalui penjaminan;
- Membuka kerja sama dengan lembaga keuangan non-bank (*multifinance*);
- Membebaskan atau memberikan Insentif terhadap biaya-biaya yang memberatkan konsumen (BPHTB, PPN, asuransi). Harusnya program ini diskronkan dengan pemda;
- Memperpanjang tenor pembiayaan;
- Mempercepat kepesertaan Tapera (*pool of fund*).

2) Pendataan MBR

Dari sisi *demand*, fungsi pendataan MBR sangat penting mulai dari perencanaan maupun fasilitasi membutuhkan data tersebut, agar kita mengetahui target masyarakat yang perlu kita fasilitasi. Sampai saat ini meskipun sudah terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah di*develop* untuk

pendataan perolehan rumah seperti Sikasep, namun pada praktiknya datanya masih kurang memadai. Permasalahan terdiri dari:

- Data MBR belum terintegrasi secara nasional;
- Beberapa pemerintah daerah belum melakukan pendataan MBR.

Beberapa solusi yang ditawarkan meliputi:

- Percepatan penerapan sistem *housing queue;*
- Indikator untuk melakukan *housing queue*, misal penduduk asli daerah, jumlah keluarga yang dimiliki dan status rumah;
- BP3 berkolaborasi dengan Pemda melakukan pendataan MBR yang membutuhkan rumah.

- Peran Pemda dalam Ekosistem Perumahan
  - Melakukan pendataan terhadap Masyarakat berpenghasilan rendah di daerahnya
  - Melakukan pengendalian terhadap kualitas fisik bangunan melalui SLF dan PBG
  - Membuat peraturan mengenai pengembangan wilyah sesuai dengan RTRW/RDTR
  - Memberikan kemudahan terhadap perijinan rumah bagi MBR dan penyediaan PSU

Rumah Murah Hemat dan Kuat, Green Housing in Palembang

Narasumber: Basyaruddin Akhmad selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Segmen konsumen rumah subsidi BP2BT terbagi menjadi 3, yaitu (1) *Bankable* & *Fixed Income*; (2) *Fixed Income* dan (3) *Non-fixed Income*. Dari ketiga ini segmen *non-fixed income* masih kurang dijangkau oleh pemerintah. Alternatif bagi masyarakat *non-fixed income* untuk mendapatkan akses BP2BT adalah dengan membentuk komunitas (seperti komunitas pemulung, komunitas ojol, dsb)

Lokasi pembangunan perumahan BP2BT ada sebanyak 460 unit di Gandus yang sedang pembangunan tahap 1 dan 2.000 unit proses NIB & SHM Kepemilikan untuk tahap 2 & 3, 100 unit di Prabumulih, 350 unit di Lubuk Linggau (proses pengajuan di PUPR), serta 290 unit di Musi Rawas (proses pengajuan di PUPR).

Perlu adanya revisi di UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah karena di undang-undang tersebut mensyaratkan Dinas Perkim Provinsi membangun RTLH bila terjadi bencana.

Sinergi pembangunan perumahan MBR BP2BT dengan berbagai phak (Semen Indonesia Group (SIG), PT Len Agra, *World Bank*, Bappenas PUPR, CSR BUMN-BUMD & swasta serta PT Karya Anak Negeri) inilah yang kemudian membawa konsep green housing kedalam proyek pembangunan di Gandus.

Dinas Perkim juga telah menandatangani MoU dengan SIG untuk membangunkan DynaHome Monolithic dimana 9 unit di Palembang telah siap untuk akad kredit.

Rencana pembangunan greenhouse DynaHome, Sumsel adalah sebagai berikut.

No	Lokasi	Unit Rumah	Mulai Pekerjaan	Phase 1 Q4 2021-Q1 2022		Phase 2 Q1 2022 – Q2 2022		Phase 3 Q2 2022-Q4 2022		Phase 4 Q1 2023-Q3 2023	
				Jumlah unit dibangun	Jumlah Group	Jumlah unit dibangun	Jumlah Group	Jumlah unit dibangun	Jumlah Group	Jumlah unit dibangun	Jumlah Group
1	Gandus, Palembang	300	Q4 2021	20 Unit	1	96 Unit	2	156 Unit	3	-	-
2	Lubuk Linggau	350	Q1 2022	-	-	48 Unit	1	96 Unit	2	206 Unit	4
3	Musi Rawas	290	Q2 2022	-	-	48 Unit	1	96 Unit	2	146 Unit	3

DISKUSI PANEL II

Berakhirnya sesi pemaparan dari keempat Narasumber pada sesi panel II dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antar peserta dan pembicara rapat.

Nama Peserta	Pertanyaan/Tanggapan
Kurniawan Priambada (Perumnas)	Perumnas sudah berkoordinasi dengan tim SIG dan sudah meninjau rumah contoh di Sentul dan memang dari struktur pembiayaannya, DynaHome ini sangat efisien dan kedepannya kami sedang menjajaki untuk berkerjasama dengan SIG terkait DynaHome di beberapa lokasi.
Mochmad Yut Penta (Bank BTN)	• BTN serius ingin menggarap *non-fixed income* dan disini ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti: - *Case by case customize* per komunitas → Perbankan cukup melakukan reviu dari pengepul (*financially bonded*); dan - Standar massal → *non-fixed income* harus menabung di bank dalam kurun waktu tertentu agar bank memiliki catatan kemampuan membayar mereka.
Eko Heri Purwanto (Kementerian PUPR)	• Adakah rencana penerapan IPAL terpadu? • Untuk *solar system* apakah untuk individu atau berlaku satu komplek?
Basyaruddin Akhmad (Disperkim Palembang)	• Terkait *non-fixed income*, kita sudah membentuk komunitas pemulung berdaya. • Disamping itu kita melihat ada celah untuk melakukan efisiensi biaya sehingga memungkinkan harga rumah turun menjadi Rp 110-120 juta. Sehingga apabila masuk BP2BT dimana uang muka sebesar Rp 40 juta akan disubsidi pemerintah, sangat mungkin bagi komunitas tersebut untuk mengkreditkan sisanya yang Rp 70-80 juta. • Terkait dengan IPAL terpadu, sudah menggunakan biotank dan untuk *pilot project green housing* di Palembang, sudah menyarankan ke pengembang untuk menggunakan *biotank* baik itu individu ataupun komunal.
Nurul Wajah Mujahid (Bappenas)	• Terkait dengan pendataan, faktor yang paling penting diantaranya adalah kesepakatan berdasarkan indikator-indikator global dan nasional, kemudian indikator tersebut tersebut juga harus sederhana, serta ketersediaan data yang regular dengan metodologi yang baku seperti susenas. • Terkait data susenas harus dicek kembali untuk standar *error* di tingkat kabupaten/kota.

Nama Peserta	Pertanyaan/Tanggapan
Tantra Rifai (Kementerian PUPR)	• Betul yang disampaikan Pak Martin bahwa sebaran 11 juta *backlog* itu tersebar dari yang tidak punya uang sama sekali sampai ke *crazy rich*. Dan ini merupakan PR bagaimana memisahkan angka simbolis 11 juta tadi menjadi angka potensial yang dapat di *handle* oleh Kementerian PUPR maupun berkolaborasi dengan K/L lain. • Pendekatan *backlog* juga berubah, dari sebelumnya untuk mereka yang benar-benar tidak punya rumah menjadi mereka yang tidak memiliki rumah di daerah tempat tinggalnya saat ini walaupun di daerah asal memiliki rumah. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengembangan dari *database* yang dilakukan Pak Martin terkait mana yang memang domisili, mana yang non domisili. Sehingga nanti didapatkan segmentasi yang jelas. • Terkait dengan slide *housing ecosystem*, disebutkan bahwa kedepannya BP3 difungsikan sebagai *data demand center* sehingga perlu mensikronisasikan HREIS di BP3. • Yang masih belum disepakati adalah apakah nanti HREIS ada di BP3 dan BP Tapera atau bagaimana? Lalu seperti apa pembagian perannya, apakah pengampu data perumahan nanti akan di DJP dan sub koordinator di BP3 dan BP Tapera atau seperti apa? • Terkait *housing career* diharapkan ini bisa segera diimplementasikan dan bagaimana mengimplementasikan kedalam Permen PUPR karena menjadi catatan di Kementerian Keuangan bahwa alokasi anggaran untuk subsidi dan pembiayaan kita tidak efisien.
Martin Daniel Siyaranamual (PT SMF)	Dalam mengeluarkan angka-angka tersebut, sudah berkoordinasi dengan Mas Ary dan tim HREIS sehingga data yang digunakan oleh tim HREIS dan data yang kami gunakan itu sama, bersumber dari susenas.Yang belum adalah konversi dari pengeluaran ke pendapatan keluarga karena informasi yang tersedia di susenas hanya informasi pengeluaran.
Eko Heri Purwanto (Kementerian PUPR)	• Mengenai ekosistem, sebelumnya telah bergulir pembahasan ini 1-2 tahun yang lalu disamping itu juga Menteri PUPR telah menugaskan untuk membahas ekosistem ini di forum PKP sehingga jangan sampai sesuatu yang telah bergulir ini kita lakukan *reinventing*. • Bisakah ekosistem yang sedang kita *develop* ini menjawab *outcome* dari RPJMN, seperti bagaimana meningkatkan persentase KPR terhadap GDP? Bagaimana mempercepat penyediaan rumah layak huni? Bagaimana untuk mengentaskan *backlog*? Bagaimana untuk mencapai 1 juta *public housing*?

Nama Peserta	Pertanyaan/Tanggapan
	• Pak Haryo sebelumnya sempat membuat *roadmap* SPPI (Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia) namun akhirnya tidak lanjut. Khawatir jika cara kerja kita masih seperti itu maka kejadian ini akan berulang. • Usul membentuk sub-ekosistem khusus untuk *mortgage*
Herry Trisaputra Zuna (Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR)	• Terkait dengan ekosistem ada dua yang harus kita buat yaitu (1) Piramida yang dibuat Pak Martin angka-angkanya tolong di detailkan dan (2) Nantinya akan ada *housing queue* yang mandatnya ke pemerintah kabupaten/kota sehingga jelas apa yang dibutuhkan dari masing-masing segmen. Kemudian ekosistem itu perlu menggambarkan siapa yang ada di sana. • Sementara untuk di sub ekosistem perlu menggambarkan bisnis prosesnya. Oleh sebab itu nanti *housing ecosystem* yang telah disusun oleh Pak Ary coba di rapikan kembali.
Mochmad Yut Penta (Bank BTN)	Izin berkolaborasi dengan Subdit Kemudahan dan Bantuan serta PT SMF.
Titin (Disperkim Provinsi Sumsel)	• Terkait sistem pendataan yang dibuat oleh Subdit Kemudahan Bantuan, kami sebagai *user* apakah memungkinkan agar *rank* 1 itu tingkat pendapatan? • Terkait dengan jumlah keluarga bisa pindah dari *ranking* 2 ke *ranking* kesekian. • Bisa ditambahkan di dalam data, apakah yang bersangkutan memilkik komunitas atau tidak. • Perlu memasukkan kepemilikan lahan ke dalam konsep *housing queue*. • Terkait perubahan IMB menjadi PBG ini menjadi lebih rumit sehingga perlu dilaksanakan bimtek Kembali di seluruh Indonesia
Martin Daniel Siyaranamual (PT SMF)	Siap untuk memastikan tidak ada *reinventing* seperti yang disebutkan Pak Eko Heri
Ary Rahman Wahyudi (Kementerian PUPR)	Akan di *follow up* terkait dengan arahannya dan akan berkolaborasi dengan Pak Martin

Nama Peserta	Pertanyaan/Tanggapan
Samson Sibarani (Kementerian PUPR)	• Kami sangat terbuka dengan tawaran kerjasama . • Terkait dengan indikator dan pembobotan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah namun minimalnya ketujuh item tersebut ada. • Terkait dengan sosialisasi PBG, akan kami sampaikan ke unit organisasi yang akan mengurus sosialisasi PBG.
Fitri Ami (Kementerian PUPR)	Kesimpulan Moderator: • Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Perkim Provinsi Sumatera Selatan sangat menginspirasi sekali, bahwa ini tidak hanya tentang bagaimana para pelaku perumahan berkolaborasi tetapi juga ada *value added* didalamnya seperti hemat listrik, hemat energi, dll. Kalau ini bisa dikembangkan maka pencapaian RPJMN tidak hanya sekedar hunian yang layak dan terjangkau tetapi juga ada nilai tambahnya. • Ke depannya perlu kita sepakati bersama termasuk dengan Kementerian Keuangan dan *stakeholders* lain terkait dengan pengembangan HREIS dan mungkin redefinisi konsep *backlog*. • Kita terus berproses menuju penyediaan *housing for all* dan sekarang ini tidak hanya terjangkau dari sisi harga, waktu tempuh, dan berkelanjutan, tetapi juga memberikan nilai tambah. • Harus segera mengklasifikasi segmentasi sasaran proyek. • Perlu adanya kesepakatan apakah akan menggunakan data penghasilan atau data pengeluaran karena nomenklatur di undang-undang kita adalah berdasarkan penghasilan, yang terpenting adalah bagaimana me-*maintain* agar data kita bisa konsisten. Mungkin perlu membuat panduan membaca, mengolah dan me-*maintain* data itu juga. • Memastikan ekosistem yang didesain dahulu masih *in-line* dengan yang saat ini kita susun serta memasukkan *roadmap* SPPI ke dalam subsistem

PENUTUPAN RAPAT KERJA

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

1) Saat ini penyediaan perumahan tidak hanya terjangkau dari sisi harga, waktu tempuh, dan berkelanjutan, tetapi juga seharusnya memberikan nilai tambah.
2) Perlu segera mengimplementasikan *housing career* dan mengintegrasikannya ke dalam Peraturan Menteri sehingga anggaran subsidi dapat teralokasi lebih efisien.
3) PT. SMF akan berkolaborasi dengan Bank BTN dalam pembuatan produk pembiayaan sebagai motor penggerak yang menyasar segmen berpenghasilan diatas Rp 8 juta.
4) Perlu dilakukan klasifikasi sasaran penerima program bantuan agar tidak saling tumpang tindih.
5) Perlu adanya kesepakatan apakah akan menggunakan data penghasilan atau mengkonversi data pengeluaran ke penghasilan dalam pembagian segmen sasaran pembiayaan perumahan.
6) Terkait dengan ekosistem dan subekosistem perumahan, dari sisi ekosistem sudah lengkap sementara dari sisi subekosistem perlu disederhanakan kembali dan dicari benang merahnya.

AGENDA HARI KEDUA
KUNJUNGAN LAPANGAN

- Saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan penyiapan proyek percontohan (*pilot project*) *Green and Affordable Housing* bagi MBR yang berlokasi di Gandus, Palembang dengan luas lahan 4,5 Ha. Lokasi berada 13 Km dari pusat kota Palembang atau sekitar 45 (empat puluh lima) menit waktu tempuh dengan kendaraan bermotor.
- Pelaksanaan pembangunan rumah yang diusung oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan ini menggunakan pendekatan kebutuhan masyarakat.
- Saat ini, 460 unit hunian sedang dalam proses pembangunan untuk tahap 1, yang mana 7 (tujuh) unit sudah terbangun. Akad 9 (sembilan) unit hunian siap dilakukan pada bulan November 2021.
- Untuk tahap pembangunan 2 dan 3, 2.000 unit sedang dalam tahap proses NIB dan SHM Kepemilikan.
- Perumahan hijau dan terjangkau yang dibangun di Gandus sedang dalam proses sertifikasi dari *EDGE Advance Certified Level 2 (40%)* yang akan dikembangkan dengan *Green Enviroment dan Zero Carbon*. Di setiap *cluster* akan dilengkapi dengan:
  1) Penerangan menggunakan *solar cell;*
  2) Perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan *bio digester*;
  3) Pemberdayaan komunitas yang ada di dalam *Cluster* Gandus sesuai dengan kemampuan anggotanya yang merupakan sinergitas dari CSR BUMN/BUMD/Swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
- Konsep *Green Housing* di Palembang sendiri megedepankan prinsip:
  1) Hemat energi: mengurangi rasio jendela terhadap tembok, penghawaan alami, pencahayaan hemat energi, pemanfaatan *solar panel*;
  2) Hemat air: pemanfaatan keran hemat air di dapur dan kamar mandi;
  3) Hemat material: menggunakan *precast* beton/*sandwich panel* untuk dinding eksternal dan *plaster board* pada *metal stud* untuk dinding internal.





LAMPIRAN

Undangan Rapat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264230 (021) 7264230

Nomor : UM 0100-Dp/458
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan

Jakarta, 12 November 2021

Yth. Bapak/Ibu
(daftar terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka mendukung pemenuhan target RPJMN 2020-2024 salah satunya melalui pengembangan dan pemantapan sinergi pemangku kepentingan dalam *housing ecosystem*, perlu dilakukan Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan untuk mereviu RPJMN 2020-2024 dan sekaligus membahas persiapan *midterm review*, serta pengembangan *housing ecosystem* (KAK terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat – Sabtu, 19-20 November 2021
Waktu : 08.00 – selesai
Tempat : Hotel Santika Premiere Bandara – Palembang
Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam No.168-169, Kebun Bunga,
Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961

Pelaksanaan rapat dilakukan sesuai Protokol Kesehatan Penangangan Covid-19 dan peserta diharapkan membawa hasil PCR/*swab test* antigen yang masih berlaku (maksimal 7 (tujuh) hari) pada saat registrasi.

Mengingat pentingnya acara ini, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Untuk konfimasi dan Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Fina (0822 6253 9100).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
NIP. 19700820 199703 1 002

Tembusan :
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dokumentasi

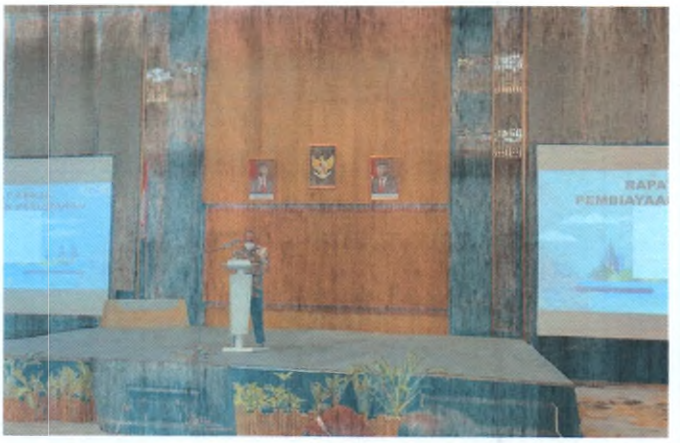
1) Rapat Kerja Pembiayaan Perumahan pada tanggal 19 November 2020.

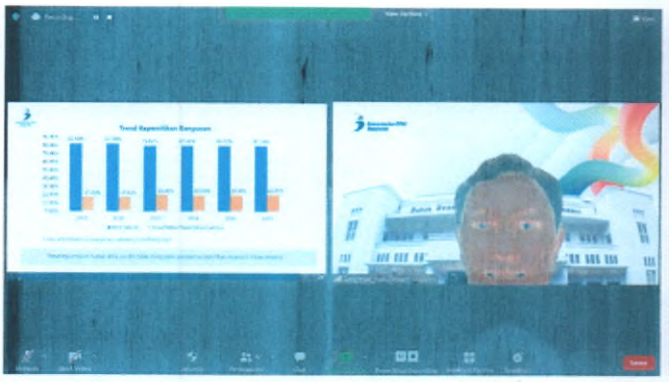




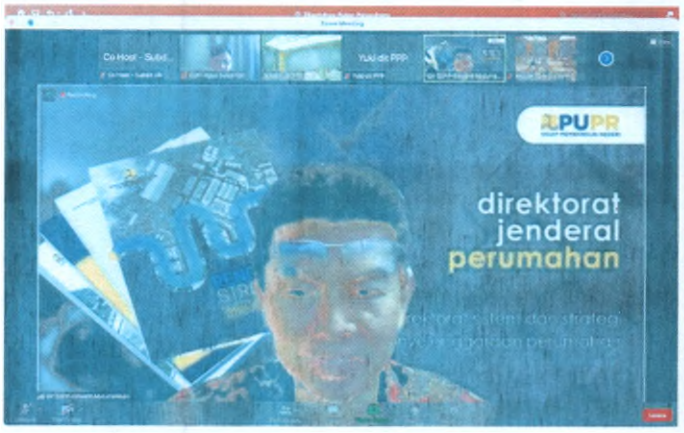


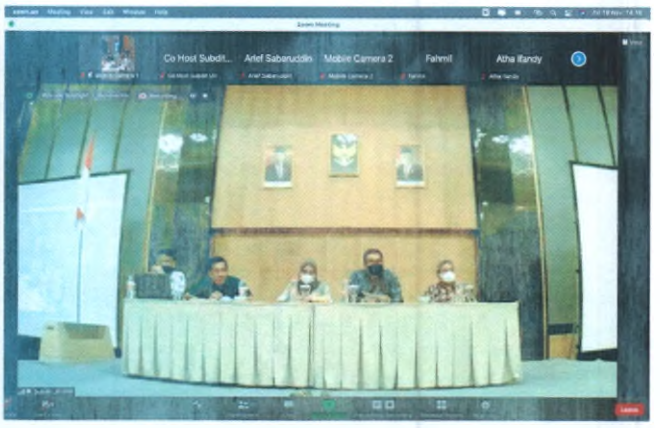









direktorat
jenderal
perumahan


Co Host Subdit...
Arief Sabaruddin
Mobile Camera 2
Fahmil
Atha Randy


Rumah Murah Hemat Kuat dan Aman
Green
Housing
in Palembang
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi Sumatera Selatan
Oleh : Ir Basyaruddin Akhmad, MSc


EKOSISTEM PERUMAHAN
Ary Rahman Wahyudi
Palembang, 19 November 2021


SMF
Potensi Permintaan dan Kemampuan Membayar per Kelas Pendapatan



2) Kunjungan Lapangan *Pilot Project Green and Affordable Housing* di Gandus pada tanggal 20 November 2021











LAMPIRAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5798-3490-0622-3877

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 200.821.494.000	(DUA RATUS MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	185.821.494.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	185.821.494.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	15.000.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	175.071.494.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	175.071.494.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.750.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.750.000.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.750.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.750.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	175.071.494.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.094.305.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	20.127.189.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	87.850.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				25.750.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				25.750.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	3.250.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	3.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.750.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	9.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	4.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	5.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		312,00	Rumah Tangga	10.000.000.000
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	312.00	Orang	10.000.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				175.071.494.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				67.094.305.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05		Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06		Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08		Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	52.094.305.000
Rincian Output	: 01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	26.292.062.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	2.690.000.000
Rincian Output	: 01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	890.000.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	1.300.000.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	1.500.000.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	500.000.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	500.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	1.500.000.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	6,00	Layanan	2.700.000.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	2.00	Layanan	800.000.000
			02 EAG.002	MoU dengan APH dan Instansi Lain terkait	1.00	Layanan	400.000.000
			03 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	3.00	Layanan	1.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8	:	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	300.000.000
		02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	1.200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	4,00	Layanan	1.900.000.000
Rincian Output	:	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	2.00	Layanan	1.100.000.000
		02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	800.000.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.800.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	500.000.000
		02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	300.000.000
		03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	1.000.000.000
Kegiatan	:	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			20.127.189.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11	:	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	9,00	Rekomendasi Kebijakan	11.827.189.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
		02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.327.189.000
		03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	1.300.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan		1.00	Kegiatan	1.300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi		4,00	Layanan	2.000.000.000
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		4.00	Layanan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal		3,00	Laporan	3.000.000.000
Rincian Output	:	01 EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	3.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan	2.000.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	2.000.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				87.850.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		29,00	Rekomendasi Kebijakan	50.050.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000
		02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	5.00	Rekomendasi Kebijakan	11.550.000.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	9.200.000.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	5.750.000.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	21,00	Kesepakatan	22.396.000.000
Rincian Output	: 01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	4.000.000.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	7.500.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	6.800.000.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	4.096.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18 :	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		5,00	NSPK	3.700.000.000
Rincian Output :	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	1.200.000.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.000.000.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 19 :	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		14,00	Laporan	11.704.000.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Laporan	950.000.000
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
	03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Laporan	6.500.000.000
	04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
	05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	2.200.000.000
	06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
	07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
	08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp. 200.821.494.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 185.821.494.000	(2) RPLN	US$ 1.041.667 Rp. 15.000.000.000
2. PNBP	Rp. 0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 15.000.000.000	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIANDEVELOPMENTB	USD						
		3455-INO	USD	13,70					
		1F1NDHGA	IDR	200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONALBANK	USD						
		8717-ID	USD	1.013,70					
		1HG72SWA	IDR	14.800.000,00	3	14.800.000			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**26.292.062**	**173.119.432**	**1.410.000**	**-**	**-**	**200.821.494**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**25.750.000**	**-**	**-**	**-**	**25.750.000**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**25.750.000**	**-**	**-**	**-**	**25.750.000**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	3.250.000	-	-	-	3.250.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.250.000	-	-	-	3.250.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**26.292.062**	**147.369.432**	**1.410.000**	**-**	**-**	**175.071.494**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**26.292.062**	**39.392.243**	**1.410.000**	**-**	**-**	**67.094.305**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	2.690.000	-	-	-	2.690.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.690.000	-	-	-	2.690.000	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**20.127.189**	**-**	**-**	**-**	**20.127.189**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	11.827.189	-	-	-	11.827.189	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	8.277.189	-	-	-	8.277.189	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	RK 1F1NDHGA
02	PLN	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**87.850.000**	**-**	**-**	**-**	**87.850.000**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	50.050.000	-	-	-	50.050.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	49.900.000	-	-	-	49.900.000	139	
02	PLN	-	150.000	-	-	-	150.000	140	RK 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	22.396.000	-	-	-	22.396.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	22.396.000	-	-	-	22.396.000	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	3.700.000	-	-	-	3.700.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.700.000	-	-	-	3.700.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:5798-3490-0622-3877

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	11.704.000	-	-	-	11.704.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	11.704.000	-	-	-	11.704.000	139	
	JUMLAH	**26.292.062**	**173.119.432**	**1.410.000**	**-**	**-**	**200.821.494**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.733.156	16.756.778	200.821.494
		BELANJA PEGAWAI	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.191.161	26.292.062
		BELANJA BARANG	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.424.670	14.448.062	173.119.432
		BELANJA MODAL	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.555	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.149.291	25.750.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.145.519	2.149.291	25.750.000
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.590.629	5.597.386	67.094.305
		51 BELANJA PEGAWAI	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.191.161	26.292.062
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.282.143	3.288.670	39.392.243
		53 BELANJA MODAL	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.555	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.680.442	20.127.189
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.676.977	1.680.442	20.127.189
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.329.659	87.850.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.320.031	7.329.659	87.850.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:5798-3490-0622-3877

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4653-8672-1154-6332

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 01
Tanggal : 18 Februari 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 159.369.850.000	(SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	144.369.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	15.000.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	133.619.850.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	133.619.850.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.750.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.750.000.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.750.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.750.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	133.619.850.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.967.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	13.080.661.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				25.750.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				25.750.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	7.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	3.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	4.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		312,00	Rumah Tangga	10.000.000.000
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	312.00	Orang	10.000.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				133.619.850.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				61.967.862.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05		Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06		Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08		Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	52.094.305.000
Rincian Output	: 01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	26.292.062.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.258.516.000
Rincian Output	: 01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	416.431.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	608.135.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	233.950.000

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.805.200.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	406.000.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	2.399.200.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	500.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	605.692.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	605.692.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	961.922.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	427.204.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	534.718.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8	:	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	799.725.000
Rincian Output	:	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.383.000
		02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	699.342.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	3,00	Layanan	1.190.282.000
Rincian Output	:	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	587.600.000
		02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	602.682.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	842.220.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	233.950.000
		02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	467.900.000
Kegiatan	:	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			13.080.661.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11	:	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	7.465.661.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
		02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.965.661.000
		03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	1.300.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan		1.00	Kegiatan	1.300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi		4,00	Layanan	1.715.000.000
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		4.00	Layanan	1.715.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal		3,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan	1.100.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.100.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				58.571.327.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		26,00	Rekomendasi Kebijakan	35.061.252.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.452.379.000
		02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	7.550.000.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	6.900.000.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.362.243.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	664.320.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.682.310.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.762.243.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.800.000.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	4.600.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.862.243.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18 :	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		5,00	NSPK	2.693.832.000
Rincian Output :	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	800.000.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	893.832.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 19 :	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		12,00	Laporan	8.054.000.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	800.000.000
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
	03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.600.000.000
	04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
	05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.600.000.000
	06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
	07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
	08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	159.369.850.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000			(2) RPLN	US$ 1.041.667	Rp.	15.000.000.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	13,70					
		1F1NDHGA	IDR	200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	1.013,70					
		1HG72SWA	IDR	14.800.000,00	3	14.800.000			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**26.292.062**	**131.667.788**	**1.410.000**	**-**	**-**	**159.369.850**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**25.750.000**	**-**	**-**	**-**	**25.750.000**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**25.750.000**	**-**	**-**	**-**	**25.750.000**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**26.292.062**	**105.917.788**	**1.410.000**	**-**	**-**	**133.619.850**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**26.292.062**	**34.265.800**	**1.410.000**	**-**	**-**	**61.967.862**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	605.692	-	-	-	605.692	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	605.692	-	-	-	605.692	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	961.922	-	-	-	961.922	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	961.922	-	-	-	961.922	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	799.725	-	-	-	799.725	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	799.725	-	-	-	799.725	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	842.220	-	-	-	842.220	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	842.220	-	-	-	842.220	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**13.080.661**	**-**	**-**	**-**	**13.080.661**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	7.465.661	-	-	-	7.465.661	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.915.661	-	-	-	3.915.661	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	RK 1F1NDHGA
02	PLN	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**58.571.327**	**-**	**-**	**-**	**58.571.327**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	35.061.252	-	-	-	35.061.252	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	34.911.252	-	-	-	34.911.252	139	
02	PLN	-	150.000	-	-	-	150.000	140	RK 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:4653-8672-1154-6332

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	139	
	JUMLAH	**26.292.062**	**131.667.788**	**1.410.000**	**-**	**-**	**159.369.850**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	12.729.600	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.297.501	13.665.238	159.369.850
		BELANJA PEGAWAI	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.191.161	26.292.062
		BELANJA BARANG	10.421.114	10.989.015	10.989.015	10.989.015	10.989.015	10.989.015	10.989.015	10.989.015	10.989.015	10.989.015	10.989.015	11.356.522	131.667.788
		BELANJA MODAL	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.555	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.203.587	25.750.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.140.583	2.203.587	25.750.000
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.640.242	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.208.143	5.246.188	61.967.862
		51 BELANJA PEGAWAI	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.190.991	2.191.161	26.292.062
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.331.756	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.899.657	2.937.472	34.265.800
		53 BELANJA MODAL	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.495	117.555	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.133.255	13.080.661
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.086.128	1.133.255	13.080.661
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	5.082.208	58.571.327

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	4.862.647	5.082.208	58.571.327

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:4653-8672-1154-6332

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0089-0960-1387-0003

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 02
Tanggal : 15 April 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 206.484.097.000	(DUA RATUS ENAM MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	144.369.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	62.114.247.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0089-0960-1387-0003

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	145.612.470.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	145.612.470.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	60.871.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	60.871.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0089-0960-1387-0003

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	145.612.470.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.967.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	25.073.281.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					60.871.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan					60.871.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan					
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan			4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan			1.00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			2,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan			2.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi			1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)		1.00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya			2,00	layanan	7.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)		1.00	Layanan	3.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)		1.00	Layanan	4.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6 :	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output :	01 QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program :	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				145.612.470.000
Kegiatan :	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				61.967.862.000
Indikator Kinerja Kegiatan :	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1 :	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	52.094.305.000
Rincian Output :	01 EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	26.292.062.000
	02 EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03 EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2 :	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.258.516.000
Rincian Output :	01 EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	416.431.000
	02 EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	608.135.000
	03 EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	233.950.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.805.200.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	406.000.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	2.399.200.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	500.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	605.692.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	605.692.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	961.922.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	295.848.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	666.074.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8	:	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	799.725.000
Rincian Output	:	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.383.000
		02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	699.342.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	3,00	Layanan	1.190.282.000
Rincian Output	:	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	520.000.000
		02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	670.282.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	842.220.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	233.950.000
		02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	467.900.000
Kegiatan	:	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			25.073.281.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11	:	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	15.592.789.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.965.661.000
		03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan		1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi		4,00	Layanan	1.715.000.000
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		4.00	Layanan	1.715.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal		3,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan	1.100.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.100.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				58.571.327.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		26,00	Rekomendasi Kebijakan	35.061.252.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.452.379.000
		02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	7.550.000.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.440.000.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	6.900.000.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.160.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.362.243.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	664.320.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.682.310.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.762.243.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.800.000.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	4.600.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.862.243.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18	:	4197.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	2.693.832.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	800.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	893.832.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 19	:	4197.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12,00	Laporan	8.054.000.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	800.000.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.600.000.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.600.000.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0089-0960-1387-0003

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Ket :			Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	206.484.097.000		a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000			(2) RPLN	US$ 4.313.490	Rp.	62.114.247.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	13,70					
		1F1NDHGA	IDR	200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	4.240,70					
		1HG72SWA	IDR	61.914.247,00	3	61.914.247			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0089-0960-1387-0003

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**26.292.062**	**178.782.035**	**1.410.000**	**-**	**-**	**206.484.097**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**60.871.627**	**-**	**-**	**-**	**60.871.627**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**60.871.627**	**-**	**-**	**-**	**60.871.627**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0089-0960-1387-0003

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**26.292.062**	**117.910.408**	**1.410.000**	**-**	**-**	**145.612.470**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**26.292.062**	**34.265.800**	**1.410.000**	**-**	**-**	**61.967.862**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	26.292.062	25.802.243	-	-	-	52.094.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	605.692	-	-	-	605.692	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0089-0960-1387-0003

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	605.692	-	-	-	605.692	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	961.922	-	-	-	961.922	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	961.922	-	-	-	961.922	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	799.725	-	-	-	799.725	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	799.725	-	-	-	799.725	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	842.220	-	-	-	842.220	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	842.220	-	-	-	842.220	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**25.073.281**	**-**	**-**	**-**	**25.073.281**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0089-0960-1387-0003

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	15.592.789	-	-	-	15.592.789	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.915.661	-	-	-	3.915.661	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	RK 1F1NDHGA
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**58.571.327**	**-**	**-**	**-**	**58.571.327**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	35.061.252	-	-	-	35.061.252	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	34.911.252	-	-	-	34.911.252	139	
02	PLN	-	150.000	-	-	-	150.000	140	RK 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	139	
	JUMLAH	**26.292.062**	**178.782.035**	**1.410.000**	**-**	**-**	**206.484.097**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.091.874	7.694.796	9.729.397	11.502.336	18.971.251	20.127.929	28.588.344	28.993.348	26.373.000	22.902.365	13.616.443	9.893.014	206.484.097
		BELANJA PEGAWAI	1.814.152	1.814.152	1.919.321	1.919.321	3.654.597	1.919.321	3.654.597	1.919.321	1.919.321	1.919.321	1.919.321	1.919.321	26.292.062
		BELANJA BARANG	6.263.622	5.866.544	7.781.877	9.526.616	15.133.355	18.025.308	24.708.147	26.834.328	24.270.379	20.856.144	11.598.422	7.917.293	178.782.035
		BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	5.211.500	3.642.264	4.259.080	4.188.933	4.214.500	5.240.000	6.374.850	6.511.000	6.127.500	8.407.850	3.823.500	2.870.650	60.871.627
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.211.500	3.642.264	4.259.080	4.188.933	4.214.500	5.240.000	6.374.850	6.511.000	6.127.500	8.407.850	3.823.500	2.870.650	60.871.627
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.293.601	2.327.058	2.685.901	3.308.145	7.942.725	6.329.614	8.982.741	7.699.182	6.224.782	5.170.888	4.668.065	4.335.161	61.967.862
		51 BELANJA PEGAWAI	1.814.152	1.814.152	1.919.321	1.919.321	3.654.597	1.919.321	3.654.597	1.919.321	1.919.321	1.919.321	1.919.321	1.919.321	26.292.062
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	465.348	498.805	738.380	1.332.425	4.104.829	4.226.993	5.102.544	5.540.161	4.122.161	3.124.668	2.650.045	2.359.441	34.265.800
		53 BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	125.366	183.035	283.328	534.061	767.242	2.056.009	4.773.953	6.413.745	5.137.515	3.071.477	1.228.591	498.958	25.073.281
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	125.366	183.035	283.328	534.061	767.242	2.056.009	4.773.953	6.413.745	5.137.515	3.071.477	1.228.591	498.958	25.073.281
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	461.407	1.542.440	2.501.088	3.471.197	6.046.784	6.502.306	8.456.800	8.369.421	8.883.203	6.252.150	3.896.287	2.188.245	58.571.327

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	461.407	1.542.440	2.501.088	3.471.197	6.046.784	6.502.306	8.456.800	8.369.421	8.883.203	6.252.150	3.896.287	2.188.245	58.571.327

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:0089-0960-1387-0003

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3006-0010-8050-2055

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 03
Tanggal : 07 Juli 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 217.084.097.000	(DUA RATUS TUJUH BELAS MILIAR DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	154.969.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	154.969.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	62.114.247.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	156.212.470.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	156.212.470.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	60.871.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	60.871.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	156.212.470.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.567.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	25.073.281.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				60.871.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				60.871.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	750.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	500.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	7.500.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	3.500.000.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	4.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6 :	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output :	01 QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program :	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				156.212.470.000
Kegiatan :	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				72.567.862.000
Indikator Kinerja Kegiatan :	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1 :	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	62.694.305.000
Rincian Output :	01 EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	36.892.062.000
	02 EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03 EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2 :	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.258.516.000
Rincian Output :	01 EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	416.431.000
	02 EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	608.135.000
	03 EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	233.950.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.805.200.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	431.180.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	2.374.020.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	500.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	605.692.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	605.692.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	961.922.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	249.272.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	712.650.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8	:	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	799.725.000
Rincian Output	:	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.383.000
		02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	699.342.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	3,00	Layanan	1.190.282.000
Rincian Output	:	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	586.808.000
		02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	603.474.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	842.220.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	233.950.000
		02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	467.900.000
Kegiatan	:	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			25.073.281.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11	:	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	15.592.789.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.965.661.000
		03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	: 01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.715.000.000
Rincian Output	: 01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.715.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.500.000.000
Rincian Output	: 01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	1.100.000.000
Rincian Output	: 01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.100.000.000
Kegiatan	: 4197		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			58.571.327.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
	2. 02		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
	3. 03		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
	4. 04		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	35.061.252.000
Rincian Output	: 01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.452.379.000
	02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	7.550.000.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.440.000.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	6.900.000.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.160.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.362.243.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	664.320.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.682.310.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.762.243.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.800.000.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	4.600.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.862.243.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18 :	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		5,00	NSPK	2.693.832.000
Rincian Output :	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	800.000.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	893.832.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	500.000.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 19 :	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		12,00	Laporan	8.054.000.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	800.000.000
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	300.000.000
	03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.600.000.000
	04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
	05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.600.000.000
	06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	300.000.000
	07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	854.000.000
	08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	300.000.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	217.084.097.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	154.969.850.000			(2) RPLN	US$ 4.254.401	Rp.	62.114.247.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	13,70					
		1F1NDHGA	IDR	200.000,00	3	200.000			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	4.240,70					
		1HG72SWA	IDR	61.914.247,00	3	61.914.247			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**36.892.062**	**178.782.035**	**1.410.000**	**-**	**-**	**217.084.097**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**60.871.627**	**-**	**-**	**-**	**60.871.627**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**60.871.627**	**-**	**-**	**-**	**60.871.627**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	750.000	-	-	-	750.000	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**36.892.062**	**117.910.408**	**1.410.000**	**-**	**-**	**156.212.470**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**36.892.062**	**34.265.800**	**1.410.000**	**-**	**-**	**72.567.862**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.258.516	-	-	-	1.258.516	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.805.200	-	-	-	2.805.200	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	605.692	-	-	-	605.692	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	605.692	-	-	-	605.692	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	961.922	-	-	-	961.922	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	961.922	-	-	-	961.922	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	799.725	-	-	-	799.725	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	799.725	-	-	-	799.725	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.190.282	-	-	-	1.190.282	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	842.220	-	-	-	842.220	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	842.220	-	-	-	842.220	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**25.073.281**	**-**	**-**	**-**	**25.073.281**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	15.592.789	-	-	-	15.592.789	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.915.661	-	-	-	3.915.661	139	
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	RK 1F1NDHGA
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.715.000	-	-	-	1.715.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**58.571.327**	**-**	**-**	**-**	**58.571.327**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	35.061.252	-	-	-	35.061.252	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	34.911.252	-	-	-	34.911.252	139	
02	PLN	-	150.000	-	-	-	150.000	140	RK 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	12.762.243	-	-	-	12.762.243	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.693.832	-	-	-	2.693.832	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3006-0010-8050-2055

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	8.054.000	-	-	-	8.054.000	139	
	JUMLAH	**36.892.062**	**178.782.035**	**1.410.000**	**-**	**-**	**217.084.097**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.778.849	8.374.907	10.543.471	12.281.231	20.436.676	20.869.523	30.123.844	29.795.035	27.176.033	23.745.711	14.349.443	10.609.375	217.084.097
		BELANJA PEGAWAI	2.545.552	2.545.552	2.693.121	2.693.121	5.127.997	2.693.121	5.127.997	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	36.892.062
		BELANJA BARANG	6.219.197	5.815.255	7.822.150	9.531.710	15.125.379	17.993.102	24.770.248	26.862.214	24.299.613	20.925.690	11.557.622	7.859.854	178.782.035
		BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	5.211.500	3.642.264	4.259.080	4.188.933	4.214.500	5.240.000	6.374.850	6.511.000	6.127.500	8.407.850	3.823.500	2.870.650	60.871.627
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.211.500	3.642.264	4.259.080	4.188.933	4.214.500	5.240.000	6.374.850	6.511.000	6.127.500	8.407.850	3.823.500	2.870.650	60.871.627
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.015.925	3.037.266	3.511.985	4.113.631	9.402.631	7.089.748	10.480.109	8.477.325	6.990.721	5.952.977	5.414.241	5.081.303	72.567.862
		51 BELANJA PEGAWAI	2.545.552	2.545.552	2.693.121	2.693.121	5.127.997	2.693.121	5.127.997	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	36.892.062
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	456.272	477.613	790.665	1.364.111	4.091.334	4.213.328	5.126.512	5.544.505	4.114.300	3.132.957	2.622.420	2.331.783	34.265.800
		53 BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	125.366	183.035	283.328	534.061	767.242	2.056.009	4.773.953	6.413.745	5.137.515	3.071.477	1.228.591	498.958	25.073.281
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	125.366	183.035	283.328	534.061	767.242	2.056.009	4.773.953	6.413.745	5.137.515	3.071.477	1.228.591	498.958	25.073.281
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	426.057	1.512.342	2.489.077	3.444.606	6.052.303	6.483.766	8.494.932	8.392.965	8.920.297	6.313.407	3.883.111	2.158.463	58.571.327

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	426.057	1.512.342	2.489.077	3.444.606	6.052.303	6.483.766	8.494.932	8.392.965	8.920.297	6.313.407	3.883.111	2.158.463	58.571.327

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:3006-0010-8050-2055

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:3053-6547-1068-4603

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 04
Tanggal : 28 Juli 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 261.069.137.000	(DUA RATUS ENAM PULUH SATU MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	150.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	150.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	110.719.287.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	200.197.510.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	200.197.510.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	60.871.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	60.871.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	200.197.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.426.622.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	33.500.917.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	94.269.971.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				60.871.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				60.871.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	5.353.276.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.353.276.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	709.444.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	709.444.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.403.008.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.403.008.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	1.204.401.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	1.204.401.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	7.079.871.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	3.380.920.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	3.698.951.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6 :	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output :	01 QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program :	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				200.197.510.000
Kegiatan :	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				72.426.622.000
Indikator Kinerja Kegiatan :	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1 :	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	62.694.305.000
Rincian Output :	01 EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	36.892.062.000
	02 EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03 EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2 :	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.221.601.000
Rincian Output :	01 EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	404.142.000
	02 EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	588.077.000
	03 EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	229.382.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.763.835.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	391.362.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	2.372.473.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	500.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	242.118.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	708.024.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8 :	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output :	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000
	02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output 9 :	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	3,00	Layanan	1.183.113.000
Rincian Output :	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	583.547.000
	02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	599.566.000
Klasifikasi Rincian Output 10 :	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	818.496.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000
	02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
	03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	465.689.000
Kegiatan :	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			33.500.917.000
Indikator Kinerja Kegiatan :	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11 :	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	24.227.395.000
Rincian Output :	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
	02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.697.962.000
	03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.902.305.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan		1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi		4,00	Layanan	1.651.000.000
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		4.00	Layanan	1.651.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal		3,00	Laporan	1.401.917.000
Rincian Output	:	01 EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.401.917.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan	1.055.113.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.055.113.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				94.269.971.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		26,00	Rekomendasi Kebijakan	72.231.345.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.336.516.000
		02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.473.523.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	6.889.521.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	672.304.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	959.292.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.355.000.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	45.928.637.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.160.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.510.168.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.720.920.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.397.136.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.282.640.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	461.179.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.008.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.501.770.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	660.731.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	12.080.546.000
Rincian Output	: 01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.674.165.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	4.440.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.709.760.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.256.621.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18 :	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		5,00	NSPK	2.463.235.000
Rincian Output :	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	744.563.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	863.832.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	479.530.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	375.310.000
Klasifikasi Rincian Output 19 :	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		12,00	Laporan	7.494.845.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	767.945.000
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	275.011.000
	03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.450.000.000
	04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	300.000.000
	05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.504.045.000
	06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	261.506.000
	07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	697.320.000
	08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	239.018.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp. 261.069.137.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 150.349.850.000	(2) RPLN	US$ 7.583.513 Rp. 110.719.287.000
2. PNBP	Rp. 0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 110.719.287.000	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	3.342,81					
		1F1NDHGA	IDR	48.805.040,00	3	48.805.040			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	4.240,70					
		1HG72SWA	IDR	61.914.247,00	3	61.914.247			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**36.892.062**	**222.767.075**	**1.410.000**	**-**	**-**	**261.069.137**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**60.871.627**	**-**	**-**	**-**	**60.871.627**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**60.871.627**	**-**	**-**	**-**	**60.871.627**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	5.353.276	-	-	-	5.353.276	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.353.276	-	-	-	5.353.276	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	709.444	-	-	-	709.444	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	709.444	-	-	-	709.444	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.403.008	-	-	-	1.403.008	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.403.008	-	-	-	1.403.008	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	1.204.401	-	-	-	1.204.401	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	1.204.401	-	-	-	1.204.401	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	7.079.871	-	-	-	7.079.871	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	7.079.871	-	-	-	7.079.871	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**36.892.062**	**161.895.448**	**1.410.000**	**-**	**-**	**200.197.510**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**36.892.062**	**34.124.560**	**1.410.000**	**-**	**-**	**72.426.622**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	36.892.062	25.802.243	-	-	-	62.694.305	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	2.763.835	-	-	-	2.763.835	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.763.835	-	-	-	2.763.835	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	601.373	-	-	-	601.373	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	601.373	-	-	-	601.373	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	950.142	-	-	-	950.142	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	950.142	-	-	-	950.142	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	783.757	-	-	-	783.757	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	783.757	-	-	-	783.757	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	818.496	-	-	-	818.496	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	818.496	-	-	-	818.496	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**33.500.917**	**-**	**-**	**-**	**33.500.917**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	24.227.395	-	-	-	24.227.395	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.781.966	-	-	-	3.781.966	139	
02	PLN	-	8.818.301	-	-	-	8.818.301	140	RK 1F1NDHGA
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.651.000	-	-	-	1.651.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.651.000	-	-	-	1.651.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.401.917	-	-	-	1.401.917	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.401.917	-	-	-	1.401.917	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.055.113	-	-	-	1.055.113	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.055.113	-	-	-	1.055.113	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**94.269.971**	**-**	**-**	**-**	**94.269.971**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	72.231.345	-	-	-	72.231.345	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	32.244.606	-	-	-	32.244.606	139	
02	PLN	-	39.986.739	-	-	-	39.986.739	140	RK 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	12.080.546	-	-	-	12.080.546	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	12.080.546	-	-	-	12.080.546	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.463.235	-	-	-	2.463.235	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.463.235	-	-	-	2.463.235	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:3053-6547-1068-4603

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	7.494.845	-	-	-	7.494.845	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	7.494.845	-	-	-	7.494.845	139	
	JUMLAH	**36.892.062**	**222.767.075**	**1.410.000**	**-**	**-**	**261.069.137**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.726.621	8.208.907	10.318.180	12.044.468	20.025.408	20.348.257	29.382.577	36.375.301	26.476.427	43.728.604	14.035.259	31.399.128	261.069.137
		BELANJA PEGAWAI	2.545.552	2.545.552	2.693.121	2.693.121	5.127.997	2.693.121	5.127.997	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	36.892.062
		BELANJA BARANG	6.166.969	5.649.255	7.596.859	9.294.948	14.714.111	17.471.836	24.028.980	33.442.480	23.600.007	40.908.583	11.243.439	28.649.607	222.767.075
		BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	5.192.739	3.606.519	4.240.283	4.219.390	4.267.572	5.254.318	6.368.351	6.498.894	6.119.902	8.376.186	3.831.839	2.895.633	60.871.627
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.192.739	3.606.519	4.240.283	4.219.390	4.267.572	5.254.318	6.368.351	6.498.894	6.119.902	8.376.186	3.831.839	2.895.633	60.871.627
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.014.292	3.033.467	3.503.953	4.106.107	9.390.013	7.072.982	10.463.145	8.460.422	6.977.682	5.938.556	5.400.753	5.065.252	72.426.622
		51 BELANJA PEGAWAI	2.545.552	2.545.552	2.693.121	2.693.121	5.127.997	2.693.121	5.127.997	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	2.693.121	36.892.062
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	454.640	473.814	782.632	1.356.586	4.078.717	4.196.561	5.109.548	5.527.602	4.101.261	3.118.535	2.608.932	2.315.731	34.124.560
		53 BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	123.411	180.181	278.911	525.738	755.285	2.023.973	4.699.567	9.701.331	5.057.465	5.739.153	1.209.446	3.206.457	33.500.917
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	123.411	180.181	278.911	525.738	755.285	2.023.973	4.699.567	9.701.331	5.057.465	5.739.153	1.209.446	3.206.457	33.500.917
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	396.179	1.388.740	2.295.033	3.193.234	5.612.538	5.996.984	7.851.515	11.714.654	8.321.379	23.674.709	3.593.221	20.231.786	94.269.971

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	396.179	1.388.740	2.295.033	3.193.234	5.612.538	5.996.984	7.851.515	11.714.654	8.321.379	23.674.709	3.593.221	20.231.786	94.269.971

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:3053-6547-1068-4603

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1365-6650-8508-4200

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 05
Tanggal : 20 Agustus 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 250.069.137.000	(DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	110.719.287.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	191.697.510.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	191.697.510.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	58.371.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	58.371.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	58.371.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	58.371.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	70.177.235.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	88.777.231.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				58.371.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				58.371.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	602.384.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	602.384.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.157.375.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.157.375.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	729.558.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	729.558.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	5.947.282.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	2.974.484.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	2.972.798.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6 :	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output :	01 QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program :	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				191.697.510.000
Kegiatan :	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				70.177.235.000
Indikator Kinerja Kegiatan :	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1 :	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	61.010.563.000
Rincian Output :	01 EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	35.572.240.000
	02 EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03 EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	4.636.080.000
Klasifikasi Rincian Output 2 :	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.221.601.000
Rincian Output :	01 EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	404.142.000
	02 EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	588.077.000
	03 EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	229.382.000

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.198.190.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	391.362.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	1.806.828.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	550.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	242.118.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	708.024.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8 :	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output :	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000
	02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output 9 :	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	3,00	Layanan	1.183.113.000
Rincian Output :	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	583.547.000
	02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	599.566.000
Klasifikasi Rincian Output 10 :	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	818.496.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000
	02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
	03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	465.689.000
Kegiatan :	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			32.743.044.000
Indikator Kinerja Kegiatan :	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11 :	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	23.902.188.000
Rincian Output :	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
	02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.555.197.000
	03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.719.863.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.510.000.000
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.510.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.211.543.000
Rincian Output	:	01 EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.211.543.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	953.821.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	953.821.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			88.777.231.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	69.232.074.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.064.103.000
		02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.488.774.000

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.481.950.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	727.922.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	674.355.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.234.631.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	45.928.637.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.135.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.339.830.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.485.820.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.077.223.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.077.220.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	446.350.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.008.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.501.770.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	646.481.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	10.737.399.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.502.541.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	3.860.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.324.441.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.050.417.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18 :	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		5,00	NSPK	2.366.602.000
Rincian Output :	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	742.049.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	781.173.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	477.313.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	366.067.000
Klasifikasi Rincian Output 19 :	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		12,00	Laporan	6.441.156.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	824.409.000
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	216.657.000
	03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.019.200.000
	04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	150.000.000
	05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.194.260.000
	06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	194.095.000
	07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	634.946.000
	08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	207.589.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	250.069.137.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 3.339.387	Rp.	48.755.040.000
1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000			(2) RPLN	US$ 4.244.127	Rp.	61.964.247.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	3.342,81					
		1F1NDHGA	IDR	48.805.040,00	3	48.805.040			
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	4.240,70					
		1HG72SWA	IDR	61.914.247,00	3	61.914.247			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**35.572.240**	**213.086.897**	**1.410.000**	**-**	**-**	**250.069.137**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**58.371.627**	**-**	**-**	**-**	**58.371.627**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**58.371.627**	**-**	**-**	**-**	**58.371.627**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	602.384	-	-	-	602.384	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	602.384	-	-	-	602.384	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	729.558	-	-	-	729.558	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	729.558	-	-	-	729.558	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.572.240**	**154.715.270**	**1.410.000**	**-**	**-**	**191.697.510**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**35.572.240**	**33.194.995**	**1.410.000**	**-**	**-**	**70.177.235**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	601.373	-	-	-	601.373	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	601.373	-	-	-	601.373	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	950.142	-	-	-	950.142	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	950.142	-	-	-	950.142	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	783.757	-	-	-	783.757	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	783.757	-	-	-	783.757	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	818.496	-	-	-	818.496	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	818.496	-	-	-	818.496	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**32.743.044**	**-**	**-**	**-**	**32.743.044**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	23.902.188	-	-	-	23.902.188	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.456.759	-	-	-	3.456.759	139	
02	PLN	-	8.818.301	-	-	-	8.818.301	140	RK 1F1NDHGA
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	953.821	-	-	-	953.821	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	953.821	-	-	-	953.821	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**88.777.231**	**-**	**-**	**-**	**88.777.231**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	69.232.074	-	-	-	69.232.074	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	29.245.335	-	-	-	29.245.335	139	
02	PLN	-	39.936.739	-	-	-	39.936.739	140	RK 1F1NDHGA
02	PLN	-	50.000	-	-	-	50.000	140	RK 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:1365-6650-8508-4200

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	139	
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	139	
	JUMLAH	**35.572.240**	**213.086.897**	**1.410.000**	**-**	**-**	**250.069.137**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.539.151	7.894.142	9.607.563	11.234.901	18.890.141	19.082.658	27.840.156	34.222.407	24.785.970	42.806.557	13.135.690	32.029.800	250.069.137
		BELANJA PEGAWAI	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	4.980.114	2.490.057	4.980.114	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	3.201.502	35.572.240
		BELANJA BARANG	6.034.994	5.389.985	7.089.306	8.688.445	13.726.728	16.409.301	22.634.442	31.492.650	22.112.613	40.189.600	10.546.933	28.771.899	213.086.897
		BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	5.106.468	3.445.529	4.047.783	3.957.984	4.019.795	4.976.996	6.034.432	6.243.632	5.842.033	8.106.449	3.656.430	2.934.095	58.371.627
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.106.468	3.445.529	4.047.783	3.957.984	4.019.795	4.976.996	6.034.432	6.243.632	5.842.033	8.106.449	3.656.430	2.934.095	58.371.627
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.984.944	3.003.706	3.351.120	3.917.557	9.093.535	6.721.024	10.156.203	8.036.298	6.625.724	5.616.136	5.140.082	5.530.906	70.177.235
		51 BELANJA PEGAWAI	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	4.980.114	2.490.057	4.980.114	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	3.201.502	35.572.240
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	480.787	499.549	832.863	1.371.100	3.930.121	4.047.668	4.950.489	5.306.541	3.952.367	2.999.180	2.551.325	2.273.004	33.194.995
		53 BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	105.359	172.511	261.078	500.325	727.818	1.947.565	4.552.418	9.059.944	4.867.232	5.822.990	1.179.445	3.546.359	32.743.044
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	105.359	172.511	261.078	500.325	727.818	1.947.565	4.552.418	9.059.944	4.867.232	5.822.990	1.179.445	3.546.359	32.743.044
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	342.379	1.272.396	1.947.582	2.859.034	5.048.993	5.437.073	7.097.103	10.882.533	7.450.980	23.260.982	3.159.734	20.018.440	88.777.231

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	342.379	1.272.396	1.947.582	2.859.034	5.048.993	5.437.073	7.097.103	10.882.533	7.450.980	23.260.982	3.159.734	20.018.440	88.777.231

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:1365-6650-8508-4200

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8529-2510-6505-6483

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 06
Tanggal : 06 September 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 250.069.137.000	(DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	110.719.287.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	191.697.510.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	191.697.510.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	58.371.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	58.371.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	58.371.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	58.371.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	70.177.235.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	88.777.231.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				58.371.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				58.371.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	602.384.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	602.384.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.157.375.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.157.375.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	729.558.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	729.558.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	5.947.282.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	2.974.484.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	2.972.798.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				191.697.510.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				70.177.235.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05		Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06		Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08		Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	61.010.563.000
Rincian Output	: 01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	35.572.240.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	4.636.080.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.221.601.000
Rincian Output	: 01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	404.142.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	588.077.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	229.382.000

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.198.190.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	391.362.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	1.806.828.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	550.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	319.018.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	631.124.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8 :	4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output :	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000
	02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output 9 :	4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler		3,00	Layanan	1.183.113.000
Rincian Output :	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	583.547.000
	02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	599.566.000
Klasifikasi Rincian Output 10 :	4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan	818.496.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000
	02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
	03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	465.689.000
Kegiatan :	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan				32.743.044.000
Indikator Kinerja Kegiatan :	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 11 :	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		8,00	Rekomendasi Kebijakan	23.902.188.000
Rincian Output :	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
	02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.555.197.000
	03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.719.863.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan		1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi		4,00	Layanan	1.510.000.000
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		4.00	Layanan	1.510.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal		3,00	Laporan	1.211.543.000
Rincian Output	:	01 EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.211.543.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan	953.821.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	953.821.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				88.777.231.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		26,00	Rekomendasi Kebijakan	69.232.074.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.064.103.000
		02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.488.774.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.481.950.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	727.922.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	674.355.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.234.631.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	45.928.637.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.135.000.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.339.830.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.485.820.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.077.223.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.077.220.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	446.350.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.008.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.501.770.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	646.481.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	10.737.399.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.502.541.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	3.860.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.324.441.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.050.417.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18 :	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		5,00	NSPK	2.366.602.000
Rincian Output :	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	742.049.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	781.173.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	477.313.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	366.067.000
Klasifikasi Rincian Output 19 :	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		12,00	Laporan	6.441.156.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	824.409.000
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	216.657.000
	03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.019.200.000
	04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	150.000.000
	05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.194.260.000
	06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	194.095.000
	07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	634.946.000
	08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	207.589.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	250.069.137.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 3.342.811	Rp.	48.805.040.000
1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000			(2) RPLN	US$ 4.240.702	Rp.	61.914.247.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	3.342,81	2	48.805.040			
		1F1NDHGA	IDR	48.805.040,00					
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	4.240,70					
		1HG72SWA	IDR	61.914.247,00	3	61.914.247			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**35.572.240**	**213.086.897**	**1.410.000**	**-**	**-**	**250.069.137**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**58.371.627**	**-**	**-**	**-**	**58.371.627**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**58.371.627**	**-**	**-**	**-**	**58.371.627**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	602.384	-	-	-	602.384	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	602.384	-	-	-	602.384	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	729.558	-	-	-	729.558	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	729.558	-	-	-	729.558	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.572.240**	**154.715.270**	**1.410.000**	**-**	**-**	**191.697.510**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**35.572.240**	**33.194.995**	**1.410.000**	**-**	**-**	**70.177.235**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	601.373	-	-	-	601.373	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	601.373	-	-	-	601.373	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	950.142	-	-	-	950.142	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	950.142	-	-	-	950.142	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	783.757	-	-	-	783.757	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	783.757	-	-	-	783.757	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	818.496	-	-	-	818.496	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	818.496	-	-	-	818.496	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**32.743.044**	**-**	**-**	**-**	**32.743.044**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	23.902.188	-	-	-	23.902.188	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.456.759	-	-	-	3.456.759	139	
02	PLN	-	8.818.301	-	-	-	8.818.301	140	PL 1F1NDHGA
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	953.821	-	-	-	953.821	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	953.821	-	-	-	953.821	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**88.777.231**	**-**	**-**	**-**	**88.777.231**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	69.232.074	-	-	-	69.232.074	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	29.245.335	-	-	-	29.245.335	139	
02	PLN	-	39.986.739	-	-	-	39.986.739	140	PL 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	139	
	JUMLAH	**35.572.240**	**213.086.897**	**1.410.000**	**-**	**-**	**250.069.137**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.601.249	7.944.506	9.683.511	11.266.296	18.921.656	19.049.125	27.806.934	34.295.273	24.795.498	42.726.245	13.202.573	31.776.270	250.069.137
		BELANJA PEGAWAI	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	4.980.114	2.490.057	4.980.114	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	3.201.502	35.572.240
		BELANJA BARANG	6.097.092	5.440.349	7.165.254	8.719.839	13.758.243	16.375.768	22.601.221	31.565.517	22.122.141	40.109.289	10.613.817	28.518.368	213.086.897
		BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	5.116.284	3.467.837	4.065.927	3.975.831	4.037.642	4.994.843	6.052.576	6.261.479	5.859.880	8.124.593	3.674.277	2.740.456	58.371.627
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.116.284	3.467.837	4.065.927	3.975.831	4.037.642	4.994.843	6.052.576	6.261.479	5.859.880	8.124.593	3.674.277	2.740.456	58.371.627
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.981.099	3.009.858	3.351.560	3.915.585	9.092.661	6.720.584	10.135.249	7.999.228	6.626.283	5.621.572	5.163.710	5.559.845	70.177.235
		51 BELANJA PEGAWAI	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	4.980.114	2.490.057	4.980.114	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057	3.201.502	35.572.240
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	476.942	505.701	833.303	1.369.128	3.929.247	4.047.228	4.929.535	5.269.471	3.952.926	3.004.615	2.574.954	2.301.944	33.194.995
		53 BELANJA MODAL	14.100	14.100	28.200	56.400	183.300	183.300	225.600	239.700	183.300	126.900	98.700	56.400	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	155.284	193.907	261.078	500.325	727.818	1.947.565	4.552.418	8.988.622	4.867.232	5.822.990	1.179.445	3.546.359	32.743.044
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	155.284	193.907	261.078	500.325	727.818	1.947.565	4.552.418	8.988.622	4.867.232	5.822.990	1.179.445	3.546.359	32.743.044
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	348.581	1.272.903	2.004.945	2.874.555	5.063.536	5.386.133	7.066.691	11.045.944	7.442.103	23.157.090	3.185.142	19.929.609	88.777.231

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	348.581	1.272.903	2.004.945	2.874.555	5.063.536	5.386.133	7.066.691	11.045.944	7.442.103	23.157.090	3.185.142	19.929.609	88.777.231

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8529-2510-6505-6483

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 07
Tanggal : 15 Oktober 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 250.069.137.000	(DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	110.719.287.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	191.697.510.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	191.697.510.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	58.371.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	58.371.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	58.371.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	58.371.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	70.177.235.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	88.777.231.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				58.371.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				58.371.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	602.384.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	602.384.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.157.375.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.157.375.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	729.558.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	729.558.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	5.947.282.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	2.974.484.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	2.972.798.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		1.000,00	Rumah Tangga	45.121.627.000
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1000.00	Orang	45.121.627.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				191.697.510.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				70.177.235.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05		Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06		Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08		Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	61.010.563.000
Rincian Output	: 01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	35.572.240.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	4.636.080.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.221.601.000
Rincian Output	: 01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	404.142.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	588.077.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	229.382.000

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	2.198.190.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	391.362.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	1.806.828.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	570.000.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	430.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	379.018.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	571.124.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8	:	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output	:	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000
		02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	3,00	Layanan	1.183.113.000
Rincian Output	:	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	601.332.000
		02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	581.781.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	818.496.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000
		02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	140.370.000
		03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	465.689.000
Kegiatan	:	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			32.743.044.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11	:	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	23.902.188.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.555.197.000
		03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.719.863.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan		1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi		4,00	Layanan	1.510.000.000
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		4.00	Layanan	1.510.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal		3,00	Laporan	1.211.543.000
Rincian Output	:	01 EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	1.211.543.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		3,00	Laporan	953.821.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		3.00	Laporan	953.821.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				88.777.231.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman				
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		26,00	Rekomendasi Kebijakan	69.232.074.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.064.103.000
		02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.488.774.000

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.481.950.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	727.922.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	569.866.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.156.045.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	45.928.637.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.318.075.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.449.830.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.209.640.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.313.403.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.007.220.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	446.350.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.008.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.501.770.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	646.481.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	10.737.399.000
Rincian Output	: 01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.502.541.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	3.860.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.324.441.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.050.417.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18 :	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		5,00	NSPK	2.366.602.000
Rincian Output :	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	742.049.000
	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	781.173.000
	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	477.313.000
	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	366.067.000
Klasifikasi Rincian Output 19 :	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		12,00	Laporan	6.441.156.000
Rincian Output :	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	824.409.000
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	216.657.000
	03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.019.200.000
	04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	150.000.000
	05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.194.260.000
	06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	194.095.000
	07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	634.946.000
	08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	207.589.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	250.069.137.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 3.342.811	Rp.	48.805.040.000
1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000			(2) RPLN	US$ 4.240.702	Rp.	61.914.247.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	3.342,81	2	48.805.040			
		1F1NDHGA	IDR	48.805.040,00					
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	4.240,70					
		1HG72SWA	IDR	61.914.247,00	3	61.914.247			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**35.572.240**	**213.086.897**	**1.410.000**	**-**	**-**	**250.069.137**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**58.371.627**	**-**	**-**	**-**	**58.371.627**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**58.371.627**	**-**	**-**	**-**	**58.371.627**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	602.384	-	-	-	602.384	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	602.384	-	-	-	602.384	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	729.558	-	-	-	729.558	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	729.558	-	-	-	729.558	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	45.121.627	-	-	-	45.121.627	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.572.240**	**154.715.270**	**1.410.000**	**-**	**-**	**191.697.510**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**35.572.240**	**33.194.995**	**1.410.000**	**-**	**-**	**70.177.235**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.221.601	-	-	-	1.221.601	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.198.190	-	-	-	2.198.190	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	601.373	-	-	-	601.373	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	601.373	-	-	-	601.373	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	950.142	-	-	-	950.142	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	950.142	-	-	-	950.142	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	783.757	-	-	-	783.757	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	783.757	-	-	-	783.757	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.183.113	-	-	-	1.183.113	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	818.496	-	-	-	818.496	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	818.496	-	-	-	818.496	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**32.743.044**	**-**	**-**	**-**	**32.743.044**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	23.902.188	-	-	-	23.902.188	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.456.759	-	-	-	3.456.759	139	
02	PLN	-	8.818.301	-	-	-	8.818.301	140	PL 1F1NDHGA
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	953.821	-	-	-	953.821	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	953.821	-	-	-	953.821	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**88.777.231**	**-**	**-**	**-**	**88.777.231**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	69.232.074	-	-	-	69.232.074	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	29.245.335	-	-	-	29.245.335	139	
02	PLN	-	39.986.739	-	-	-	39.986.739	140	PL 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	10.737.399	-	-	-	10.737.399	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.366.602	-	-	-	2.366.602	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:8529-2510-6505-6483

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	6.441.156	-	-	-	6.441.156	139	
	JUMLAH	**35.572.240**	**213.086.897**	**1.410.000**	**-**	**-**	**250.069.137**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.944.564	8.203.296	9.515.046	15.842.574	14.025.145	15.481.445	14.049.362	17.681.715	23.936.980	78.572.235	25.561.956	25.254.818	250.069.137
		BELANJA PEGAWAI	1.671.895	2.027.618	3.094.785	2.596.774	3.379.363	3.343.791	2.312.196	2.383.340	2.418.912	4.090.808	4.090.808	4.161.952	35.572.240
		BELANJA BARANG	272.668	6.175.678	6.403.492	13.212.171	10.645.782	11.536.365	11.337.516	15.257.335	21.434.548	74.270.197	21.471.149	21.069.996	213.086.897
		BELANJA MODAL	0	0	16.770	33.630	0	601.290	399.650	41.040	83.520	211.230	0	22.870	1.410.000
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	0	367.728	1.799.756	1.289.476	3.808.054	2.852.432	3.947.112	4.835.209	8.309.975	26.895.507	1.406.098	2.860.281	58.371.627
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	367.728	1.799.756	1.289.476	3.808.054	2.852.432	3.947.112	4.835.209	8.309.975	26.895.507	1.406.098	2.860.281	58.371.627
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.944.564	4.673.293	5.319.962	5.455.695	6.972.308	5.935.646	5.122.011	4.682.414	4.807.717	8.262.663	8.055.018	8.945.945	70.177.235
		51 BELANJA PEGAWAI	1.671.895	2.027.618	3.094.785	2.596.774	3.379.363	3.343.791	2.312.196	2.383.340	2.418.912	4.090.808	4.090.808	4.161.952	35.572.240
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	272.668	2.645.675	2.208.407	2.825.291	3.592.945	1.990.566	2.410.165	2.258.034	2.305.285	3.960.625	3.964.210	4.761.123	33.194.995
		53 BELANJA MODAL	0	0	16.770	33.630	0	601.290	399.650	41.040	83.520	211.230	0	22.870	1.410.000
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	0	3.081.237	411.110	5.296.591	675.391	2.029.802	1.320.462	3.325.277	5.959.729	3.032.410	3.178.247	4.432.788	32.743.044
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	3.081.237	411.110	5.296.591	675.391	2.029.802	1.320.462	3.325.277	5.959.729	3.032.410	3.178.247	4.432.788	32.743.044
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	0	81.038	1.984.220	3.800.812	2.569.391	4.663.565	3.659.778	4.838.816	4.859.560	40.381.655	12.922.593	9.015.804	88.777.231

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	81.038	1.984.220	3.800.812	2.569.391	4.663.565	3.659.778	4.838.816	4.859.560	40.381.655	12.922.593	9.015.804	88.777.231

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:8529-2510-6505-6483

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0492-0900-5214-6811

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 08
Tanggal : 02 November 2021

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 684.669.137.000	(ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	545.319.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	545.319.287.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	545.319.287.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	191.697.510.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	191.697.510.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	492.971.627.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	492.971.627.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	492.971.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	492.971.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	71.341.555.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	87.612.911.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				492.971.627.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				492.971.627.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		4,00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		4.00	Rekomendasi Kebijakan	4.813.401.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK	602.384.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	602.384.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		2,00	Laporan	1.157.375.000
Rincian Output	:	01 EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		2.00	Laporan	1.157.375.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	729.558.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	(PN)	1.00	Kegiatan	729.558.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan	5.947.282.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	(PN)	1.00	Layanan	2.974.484.000
		02 QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	1.00	Layanan	2.972.798.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		11.865,00	Rumah Tangga	479.721.627.000
Rincian Output	: 01	QFC.001	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	(PN)	11865.00	Orang	479.721.627.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				191.697.510.000
Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				71.341.555.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	2. 02		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	3. 03		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	4. 04		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	5. 05		Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	6. 06		Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik				
	7. 07		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP				
	8. 08		Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EAA	Layanan Perkantoran		3,00	Layanan	61.010.563.000
Rincian Output	: 01	EAA.004	Gaji dan Tunjangan DJPI		1.00	Layanan	35.572.240.000
	02	EAA.005	Operasionalisasi Kantor DJPI		1.00	layanan	20.802.243.000
	03	EAA.006	Opersionalisasi Kantor Direktorat		1.00	1	4.636.080.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4,00	Layanan	1.281.601.000
Rincian Output	: 01	EAB.001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		1.00	laporan	404.142.000
	02	EAB.002	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		2.00	laporan	588.077.000
	03	EAB.003	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		1.00	laporan	289.382.000

				Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EAC	Layanan Umum	3,00	Layanan	1.848.190.000
Rincian Output		:	01 EAC.002	Tata Kelola TNDE dan Arsip	1.00	laporan	391.362.000
			02 EAC.003	Kerumahtanggaan	2.00	laporan	1.456.828.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EAD	Layanan Sarana Internal	2,00	unit	2.344.897.000
Rincian Output		:	01 EAD.003	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	1.00	unit	962.461.000
			02 EAD.004	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	1.00	unit	1.382.436.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	410.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.001	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.00	unit	410.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4194.EAF	Layanan SDM	260,00	orang	601.373.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Pengelolaan Pegawai	260.00	orang	601.373.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4194.EAG	Layanan Hukum	3,00	Layanan	950.142.000
Rincian Output		:	01 EAG.001	Advokasi Hukum	1.00	Layanan	379.018.000
			02 EAG.003	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	2.00	Layanan	571.124.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 8	:	4194.EAH		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3,00	Layanan	783.757.000
Rincian Output	:	01	EAH.001	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	1.00	Layanan	100.288.000
		02	EAH.002	Manajemen Transformasi Organisasi	2.00	Layanan	683.469.000
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4194.EAI		Layanan Kehumasan dan Protokoler	3,00	Layanan	1.368.313.000
Rincian Output	:	01	EAI.001	Strategi Komunikasi	1.00	Layanan	786.532.000
		02	EAI.002	Publikasi	2.00	Layanan	581.781.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4194.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	742.719.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Laporan Keuangan Unit Eselon I	1.00	Laporan	212.437.000
		02	EAL.002	Laporan Kinerja Unit Eselon II	1.00	Laporan	119.182.000
		03	EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	1.00	Laporan	411.100.000
Kegiatan	:	4195		Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			32.743.044.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 11	:	4195.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,00	Rekomendasi Kebijakan	23.902.188.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	11.627.128.000
		02	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	10.555.197.000
		03	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	1.719.863.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	12 :	4195.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	5.165.492.000
Rincian Output	: 01	AEA.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Pembiayaan Perumahan	1.00	Kegiatan	5.165.492.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.510.000.000
Rincian Output	: 01	EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.00	Layanan	1.510.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	3,00	Laporan	1.211.543.000
Rincian Output	: 01	EAK.001	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	1.211.543.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3,00	Laporan	953.821.000
Rincian Output	: 01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.00	Laporan	953.821.000
Kegiatan	: 4197		Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			87.612.911.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
	2. 02		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
	3. 03		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
	4. 04		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	16 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	68.330.294.000
Rincian Output	: 01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	805.791.000
	02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.488.774.000

			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4.00	Rekomendasi Kebijakan	5.002.802.000
	04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	727.922.000
	05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	569.866.000
	06	ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.156.045.000
	07	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4.00	Rekomendasi Kebijakan	45.928.637.000
	08	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.318.075.000
	09	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.449.830.000
	10	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.209.640.000
	11	ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.313.403.000
	12	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.007.220.000
	13	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	282.030.000
	14	ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.008.000
	15	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.501.770.000
	16	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	646.481.000
Klasifikasi Rincian Output	17 :	4197.AEE	Kemitraan	20,00	Kesepakatan	10.422.280.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.187.422.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	13.00	Kesepakatan	3.860.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.324.441.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	1.00	Kesepakatan	2.050.417.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output 18	:	4197.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	2.298.218.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	NSPK	673.665.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	781.173.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	477.313.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	366.067.000
Klasifikasi Rincian Output 19	:	4197.EAL		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12,00	Laporan	6.562.119.000
Rincian Output	:	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	945.372.000
		02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Laporan	216.657.000
		03	EAL.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.00	Laporan	3.019.200.000
		04	EAL.004	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Laporan	150.000.000
		05	EAL.005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Laporan	1.194.260.000
		06	EAL.006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Laporan	194.095.000
		07	EAL.007	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	634.946.000
		08	EAL.008	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.00	Laporan	207.589.000

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	684.669.137.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 3.342.811	Rp.	48.805.040.000
1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000			(2) RPLN	US$ 34.007.826	Rp.	496.514.247.000
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	545.319.287.000			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-	USD						
		3455-INO	USD	3.342,81	2	48.805.040			
		1F1NDHGA	IDR	48.805.040,00					
2	1	INTERNATIONAL BANK FOR	USD						
		8717-ID	USD	34.007,83					
		1HG72SWA	IDR	496.514.247,00	3	496.514.247			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**	**35.572.240**	**646.342.000**	**2.754.897**	**-**	**-**	**684.669.137**		
033.16.IA	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**-**	**492.971.627**	**-**	**-**	**-**	**492.971.627**		
4976	**Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan**	**-**	**492.971.627**	**-**	**-**	**-**	**492.971.627**		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	4.813.401	-	-	-	4.813.401	139	
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	602.384	-	-	-	602.384	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	602.384	-	-	-	602.384	139	
4976.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.157.375	-	-	-	1.157.375	139	
4976.PEA	Koordinasi	-	729.558	-	-	-	729.558	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	729.558	-	-	-	729.558	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.947.282	-	-	-	5.947.282	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	-	479.721.627	-	-	-	479.721.627	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	479.721.627	-	-	-	479.721.627	140	RK 1HG72SWA
033.16.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.572.240**	**153.370.373**	**2.754.897**	**-**	**-**	**191.697.510**		
4194	**Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**35.572.240**	**33.014.418**	**2.754.897**	**-**	**-**	**71.341.555**		
4194.EAA	Layanan Perkantoran	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	35.572.240	25.438.323	-	-	-	61.010.563	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	1.281.601	-	-	-	1.281.601	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.281.601	-	-	-	1.281.601	139	
4194.EAC	Layanan Umum	-	1.848.190	-	-	-	1.848.190	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.848.190	-	-	-	1.848.190	139	
4194.EAD	Layanan Sarana Internal	-	-	2.344.897	-	-	2.344.897	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	2.344.897	-	-	2.344.897	139	
4194.EAE	Layanan Prasarana Internal	-	-	410.000	-	-	410.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	-	410.000	-	-	410.000	139	
4194.EAF	Layanan SDM	-	601.373	-	-	-	601.373	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	601.373	-	-	-	601.373	139	
4194.EAG	Layanan Hukum	-	950.142	-	-	-	950.142	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	950.142	-	-	-	950.142	139	
4194.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	783.757	-	-	-	783.757	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	783.757	-	-	-	783.757	139	
4194.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	-	1.368.313	-	-	-	1.368.313	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.368.313	-	-	-	1.368.313	139	
4194.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	742.719	-	-	-	742.719	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	742.719	-	-	-	742.719	139	
4195	**Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**	**-**	**32.743.044**	**-**	**-**	**-**	**32.743.044**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	23.902.188	-	-	-	23.902.188	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	3.456.759	-	-	-	3.456.759	139	
02	PLN	-	8.818.301	-	-	-	8.818.301	140	PL 1F1NDHGA
02	PLN	-	11.627.128	-	-	-	11.627.128	140	RK 1HG72SWA
4195.AEA	Koordinasi	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
02	PLN	-	5.165.492	-	-	-	5.165.492	140	RK 1HG72SWA
4195.EAJ	Layanan Data dan Informasi	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.510.000	-	-	-	1.510.000	139	
4195.EAK	Layanan Pengawasan Internal	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.211.543	-	-	-	1.211.543	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	953.821	-	-	-	953.821	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	953.821	-	-	-	953.821	139	
4197	**Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**	**-**	**87.612.911**	**-**	**-**	**-**	**87.612.911**		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	68.330.294	-	-	-	68.330.294	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	28.343.555	-	-	-	28.343.555	139	
02	PLN	-	39.986.739	-	-	-	39.986.739	140	PL 1F1NDHGA
4197.AEE	Kemitraan	-	10.422.280	-	-	-	10.422.280	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	10.422.280	-	-	-	10.422.280	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	2.298.218	-	-	-	2.298.218	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.298.218	-	-	-	2.298.218	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS:0492-0900-5214-6811

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	6.562.119	-	-	-	6.562.119	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	6.562.119	-	-	-	6.562.119	139	
	JUMLAH	**35.572.240**	**646.342.000**	**2.754.897**	**-**	**-**	**684.669.137**		

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**631003**	**PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.942.568	8.242.214	9.517.247	15.835.881	13.995.731	15.474.906	14.027.134	17.658.418	23.433.333	79.469.656	461.640.439	23.431.610	684.669.137
		BELANJA PEGAWAI	1.671.895	2.027.618	3.094.785	2.596.774	3.379.363	3.343.791	2.312.196	2.383.340	2.418.912	4.090.808	4.090.808	4.161.952	35.572.240
		BELANJA BARANG	270.672	6.214.596	6.405.692	13.205.478	10.616.368	11.529.826	11.315.288	15.234.038	20.930.901	75.167.618	456.183.915	19.267.608	646.342.000
		BELANJA MODAL	0	0	16.770	33.630	0	601.290	399.650	41.040	83.520	211.230	1.365.717	2.050	2.754.897
	033.16.IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	0	367.728	1.799.756	1.289.476	3.808.054	2.852.432	3.947.112	4.835.209	8.309.975	27.930.076	436.006.098	1.825.712	492.971.627
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	367.728	1.799.756	1.289.476	3.808.054	2.852.432	3.947.112	4.835.209	8.309.975	27.930.076	436.006.098	1.825.712	492.971.627
	033.16.WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.942.568	4.712.211	5.323.200	5.462.284	6.944.904	5.934.307	5.121.770	4.679.493	4.787.825	8.242.204	9.615.476	8.575.313	71.341.555
		51 BELANJA PEGAWAI	1.671.895	2.027.618	3.094.785	2.596.774	3.379.363	3.343.791	2.312.196	2.383.340	2.418.912	4.090.808	4.090.808	4.161.952	35.572.240
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	270.672	2.684.594	2.211.645	2.831.880	3.565.541	1.989.227	2.409.925	2.255.113	2.285.393	3.940.167	4.158.952	4.411.311	33.014.418
		53 BELANJA MODAL	0	0	16.770	33.630	0	601.290	399.650	41.040	83.520	211.230	1.365.717	2.050	2.754.897
	033.16.WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	0	3.081.237	411.110	5.296.591	675.391	2.029.802	1.320.462	3.325.277	5.959.729	3.032.410	3.178.247	4.432.788	32.743.044
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	3.081.237	411.110	5.296.591	675.391	2.029.802	1.320.462	3.325.277	5.959.729	3.032.410	3.178.247	4.432.788	32.743.044
	033.16.WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	0	81.038	1.983.182	3.787.530	2.567.382	4.658.365	3.637.790	4.818.440	4.375.805	40.264.966	12.840.618	8.597.797	87.612.911

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	81.038	1.983.182	3.787.530	2.567.382	4.658.365	3.637.790	4.818.440	4.375.805	40.264.966	12.840.618	8.597.797	87.612.911

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV A. B L O K I R

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021
IV B. C A T A T A N

DS:0492-0900-5214-6811

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

ttd.
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE
NIP 196102111986031002



Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastrukur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat